



**PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA**

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2019-2023



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2019**



**GUBERNUR PAPUA
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



**WAKIL GUBERNUR PAPUA
KLEMEN TINAL, SE, MM**



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Gubernur Provinsi Papua untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otonomi Khusus Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kabupaten dan kota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Papua dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan Sasaran adalah arahan guna pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berasakan :
 - a. transparansi;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, sinergis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

- (4) RPJMD disusun berorientasi pada proses dengan pendekatan:
 - a. teknokratik
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas bawah dan bawah atas.
- (5) RPJMD disusun berorientasi pada substansi dengan pendekatan:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.

Pasal 3

- (1) RPJMD bertujuan sebagai pedoman dasar pemecahan permasalahan daerah melalui :
 - a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
 - c. partisipasi masyarakat; dan
 - d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (2) Program partisipatif lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Rencana kerja yang terukur dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (4) Rencana kerja yang berkeadilan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
- (5) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
 - a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antar RPJMD dengan dokumen lainnya, dan sistematika penulisan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan aspek otonomi khusus Provinsi Papua;
 - c. Gambaran Keuangan Daerah : kinerja keuangan daerah, kebijakan pengelola keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan;
 - d. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah: permasalahan pembangunan dan isu strategis;
 - e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran : visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah : strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah : Kerangka pendanaan pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Penutup.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh BAPPEDA.
- (2) BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar pada suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, apabila terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, DPRP melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.
- (2) Gubernur pada akhir masa jabatannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (4) Apabila sampai dengan tahun kedua sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih Gubernur untuk masa jabatan berikutnya, RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan pada tahun berikutnya sampai terpilih Gubernur.

Pasal 12

- (1) Gubernur menyusun dokumen rencana pembangunan kewilayahan selama 5 (lima) tahun untuk masing-masing wilayah budaya berdasarkan visi dan misi serta arah dan kebijakan sebagai landasan penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD perencanaan dan SKPD teknis untuk menyusun RENSTRA SKPD secara terencana yang disesuaikan dengan kebijakan strategis Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 16 April 2019

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 16 April 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA: (2-100/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019 - 2023

I. UMUM

Provinsi Papua pada awalnya adalah Provinsi Irian Jaya yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Hingga tahun 2013, Provinsi Papua telah 50 tahun menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan pengakuan dan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga penyelesaian permasalahan pembangunan dapat ditanggulangi secara lebih kontekstual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hingga Tahun 2019, pemerintahan era otonomi khusus telah berjalan 17 tahun sejak efektifnya pelaksanaan pemerintah di era otonomi khusus tahun 2012 dan telah banyak memberikan warna dan perubahan diberbagai sendi kehidupan masyarakat.

Namun, belum secara optimal dapat menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan guna melaksanakan langkah peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, sehingga dapat lebih terfokus pada upaya pengurangan ketimpangan (*in-equity*) pembangunan dengan memperkokoh aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 ini, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkah dan Rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Penyusunan RPJMD ini adalah kewajiban konstitusional Saya dan Saudara Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi kami dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional, kelanjutan pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya serta aspirasi yang merupakan Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT) Papua yang berada dirawa-rawa, di daerah perbatasan, di lembah dan di gunung-gunung, di pesisir pantai dan pulau-pulau terpencil. HASRAT Papua terdiri dari **pemenuhan kebutuhan dasar** seperti Pendidikan yang mudah dan berkualitas, pelayanan Kesehatan yang mudah dan murah, peningkatan perekonomian masyarakat secara mandiri, pelayanan Sosial yang berkualitas, peningkatan pelayanan Keagamaan, pemenuhan Infrastruktur Dasar; **kebebasan** seperti bebas dari rasa takut, bebas berpendapat, bebas beraktivitas sesuai talenta yang Tuhan berikan, namun kebebasan ini juga diseimbangkan dan menghormati dengan hak-hak orang lain; menumbuhkan **kepercayaan diri** yaitu meningkatnya harkat dan martabat serta percaya diri seluruh orang Papua.

Harapan saya, dokumen RPJMD ini menjadi rujukan dan pegangan utama bagi seluruh stakeholders di Provinsi Papua, untuk bersama-sama mewujudkan visi **KITA** bersama yaitu **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan**. Visi kita ini, hanya mungkin terwujud jika Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan dukungan luas dari seluruh pelaku pembangunan, Pemerintah, Agama, Adat, MRP, DPRP, TNI, POLRI, Mitra Kerja pembangunan daerah, sektor swasta, BUMN, Instansi Vertikal dan seluruh masyarakat Papua.

Dan saya selaku Gubernur mengajak kepada semua aparatur daerah untuk bekerja menjalankan RPJMD Provinsi Papua secara sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen RPJMD ini kita susun, akan berarti apabila dapat diwujudkan untuk Kebangkitan, Kemandirian, Kesejahteraan dan Keadilan bagi seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Tantangan Papua kedepan begitu besar, kita memerlukan terobosan, kreatifitas dan inovatif dalam melakukan akselerasi pembangunan. Semoga RPJMD ini menjadi rujukan kita untuk bekerja dan berkarya demi terpenuhinya harapan seluruh rakyat Papua.

Sekian dan terima kasih.

Gubernur Papua,

Lukas Enembe, SIP, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. LATAR BELAKANG	I.1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I.5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I.8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I.10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I.11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II.1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II.1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II.27
2.1.3. Aspek Demografi.....	II.35
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.39
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.39
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	II.53
2.2.3. Fokus Pendidikan	II.59
2.2.4. Fokus Kesehatan	II.64
2.2.5. Fokus Ketenagakerjaan	II.68
2.2.6. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi.....	II.75
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.93
2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita.....	II.93
2.3.2. Nilai Tukar Petani.....	II.96
2.3.3. Produktivitas total daerah	II.99
2.3.4. Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB	II.100
2.3.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	II.101

2.3.6. Rasio ketergantungan	II.103
2.3.7. Angka kriminalitas yang Tertangani	II.104
2.3.8. Daya Saing Investasi.....	II.105
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	II.107
2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar	II.107
2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II.152
2.4.3. Layanan Urusan Pilihan.....	II.184
2.5. ASPEK OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA.....	II.200
2.5.1. Kerangka Regulasi Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	II.200
2.5.2. Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	II.204
2.5.3. Kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	II.208
2.5.4. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	II.209
2.5.5. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan.....	II.212
2.5.6. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah	II.213
2.5.7. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Tenaga Kerja dan Pengangguran.....	II.215
2.5.8. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.....	II.216
2.5.9. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.....	II.218
2.6. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	II.221
2.6.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II.221
2.6.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	II.247
2.6.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target.....	II.253
2.6.4. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target.....	II.261
2.6.5. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data	II.270
2.7. STANDAR PELAYANAN MINIMAL	II.277
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2017.....	III.2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III.2
3.1.2. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua	III.14
3.1.3. Neraca Daerah.....	III.17
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	III.27
3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah.....	III.30
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III.35
3.3. KERANGKA PENDANAAN	III.37
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III.37
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III.42
3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	III.46
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV.1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV.1
4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV.1
4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV.10
4.1.3. Urusan Pilihan.....	IV.27
4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan.....	IV.36
4.2. ISU-ISU STRATEGIS.....	IV.42
4.2.1. Isu Internasional.....	IV.43
4.2.2. Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019.....	IV.47
4.2.3. Penelaahan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025.....	IV.53
4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	IV.55

4.2.5. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua	IV.63
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
5.1. VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023	V.1
5.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023	V.6
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V.12
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI.1
6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	VI.2
6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan	VI.2
6.1.2 Orientasi Pembangunan	VI.3
6.1.3. Pendekatan Pembangunan	VI.5
6.1.4 Strategi Pencapaian Sasaran	VI.6
6.2. Arah Kebijakan	VI.6
6.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan	VI.7
6.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan	VI.18
6.3. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	VI.38
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII.1
7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	VII.1
7.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VII.6
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII.1
BAB IX PENUTUP	IX.1
9.1. Kaidah Implementasi	IX.1
9.2. Pedoman Transisi	IX.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2017	II.3
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua.....	II.7
Tabel 2.3.	Kawasan Terluar di Provinsi Papua.....	II.7
Tabel 2.4.	Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019	II.9
Tabel 2.5.	Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2017*	II.11
Tabel 2.6.	Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013	II.12
Tabel 2.7.	Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua.....	II.17
Tabel 2.8.	Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023.....	II.21
Tabel 2.9.	Distribusi Penyebaran Tutupan Lahan Menurut Kelas Tutupan Lahan Dan Kabupaten/Kota Di Papua Tahun 2017	II.24
Tabel 2.10.	Potensi Mineral Logam dan Non Logam.....	II.32
Tabel 2.11.	Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017	II.37
Tabel 2.12.	Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%).....	II.41
Tabel 2.13.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2013-2016.....	II.50
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.57
Tabel 2.15.	Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.68
Tabel 2.16.	Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	II.78
Tabel 2.17.	Komposisi PDRB Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (milyar rupiah).....	II.82
Tabel 2.18.	Komposisi PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Papua (milyar rupiah)	II.86
Tabel 2.19.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	II.89
Tabel 2.20.	Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Se Papua Tahun 2017 (%)	II.91
Tabel 2.21.	Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)	II.99
Tabel 2.22.	Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.101
Tabel 2.23.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (ribu orang)	II.103
Tabel 2.24.	Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun 2017	II.110
Tabel 2.25.	Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2017	II.112

Tabel 2.26.	Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK.....	II.114
Tabel 2.27.	Jumlah Gedung Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (unit)	II.115
Tabel 2.28.	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua	II.117
Tabel 2.29.	Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.117
Tabel 2.30.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	II.118
Tabel 2.31.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah.....	II.119
Tabel 2.32.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017	II.120
Tabel 2.33.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	II.142
Tabel 2.34.	Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk	II.148
Tabel 2.35.	APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	II.156
Tabel 2.36.	Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)	II.159
Tabel 2.37.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua	II.160
Tabel 2.38.	Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2017	II.161
Tabel 2.39.	Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017.....	II.162
Tabel 2.40.	Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua.....	II.166
Tabel 2.41.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP).....	II.168
Tabel 2.42.	Rasio Akseptor KB.....	II.170
Tabel 2.43.	Jumlah PUS yang Tidak ber-KB	II.171
Tabel 2.44.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	II.175
Tabel 2.45.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN.....	II.176
Tabel 2.46.	Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2013-2017	II.178
Tabel 2.47.	Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2013-2017	II.178
Tabel 2.48.	Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua	II.180
Tabel 2.49.	Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	II.185
Tabel 2.50.	Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	II.187
Tabel 2.51.	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m ³).....	II.189
Tabel 2.52.	Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan (ha)	II.189
Tabel 2.53.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017	II.192
Tabel 2.54.	Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton)	II.194
Tabel 2.55.	Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton)	II.195
Tabel 2.56.	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2013 - 2016 (ton/US\$).....	II.195
Tabel 2.57.	Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2013-2016 (US\$/%)	II.196
Tabel 2.58.	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan	II.197
Tabel 2.59.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan.....	II.198
Tabel 2.60.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton).....	II.199
Tabel 2.61.	Perdatus Pemerintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001	II.200
Tabel 2.62.	Perdasi yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001	II.201
Tabel 2.63.	Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	II.211

Tabel 2.64.	Rata-Rata Orang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II.216
Tabel 2.65.	Rata-Rata Percepatan IPM Di Provinsi Papua Dan Indonesia.....	II.218
Tabel 2.66.	Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua	II.218
Tabel 2.67.	Kualitas daya dukung penyediaan pangan di Provinsi Papua	II.221
Tabel 2.68.	Kondisi daya dukung penyediaan pangan per kabupaten	II.223
Tabel 2.69.	Tabel Kualitas daya dukung penyediaan pangan berdasar wilayah budaya	II.225
Tabel 2.70.	Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan (kcal/tahun).....	II.229
Tabel 2.71.	Kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua	II.232
Tabel 2.72.	Kondisi daya dukung penyediaan air per kabupaten di Provinsi Papua	II.235
Tabel 2.73.	Kondisi daya dukung penyediaan air per wilayah budaya.....	II.236
Tabel 2.74.	Kondisi daya tampung per kabupaten dalam pemurnian air.....	II.238
Tabel 2.75.	Kondisi daya tampung pemurnian air per wilayah budaya	II.240
Tabel 2.76.	Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Air (m ³ /detik)	II.243
Tabel 2.77.	Perhitungan luas guna lahan fungsi lindung	II.245
Tabel 2.78.	Perhitungan luas dan Proyeksi tutupan/penggunaan lahan.....	II.246
Tabel 2.79.	Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II.248
Tabel 2.80.	Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB.....	II.252
Tabel 2.81.	Rekapitulasi Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai Target.....	II.256
Tabel 2.82.	Gap Indikator yang Belum Tercapai	II.262
Tabel 2.83.	Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan atau Tidak Ada Data	II.271
Tabel 2.84.	Target Capaian SPM Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	II.280
Tabel 2.85.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 .	II.282
Tabel 2.86.	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Provinsi Papua Periode Pelaksanaan Tahun 2013-2018.....	II.295
Tabel 3.1	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta).....	III.5
Tabel 3.1	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta).....	III.5
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.7
Tabel 3.3	Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (Rp juta).....	III.10
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017.....	III.11
Tabel 3.5	Perkembangan Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta).....	III.13
Tabel 3.6.	Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2013-2017	III.16
Tabel 3.7.	Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017.....	III.19
Tabel 3.8.	Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua	III.26
Tabel 3.9.	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	III.30

Tabel 3.10.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2013-2017.....	III.32
Tabel 3.11.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.34
Tabel 3.12.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.35
Tabel 3.13.	Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.36
Tabel 3.14.	Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017 ..	III.36
Tabel 3.15.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	III.40
Tabel 3.16.	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Provinsi Provinsi Papua Tahun 2019-2023	III.42
Tabel 3.17.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2019-2023	III.43
Tabel 3.18.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023	III.44
Tabel 3.19.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	III.45
Tabel 4.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan.....	IV.3
Tabel 4.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	IV.5
Tabel 4.3.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV.6
Tabel 4.4.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	IV.8
Tabel 4.5.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	IV.9
Tabel 4.6.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial	IV.10
Tabel 4.7.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	IV.11
Tabel 4.8.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan	IV.12
Tabel 4.9.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	IV.13
Tabel 4.10.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV.14
Tabel 4.11.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV.15
Tabel 4.12.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV.16
Tabel 4.13.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	IV.17

Tabel 4.14.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika.....	IV.19
Tabel 4.15.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	IV.19
Tabel 4.16.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan.....	IV.21
Tabel 4.17.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah.....	IV.22
Tabel 4.18.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja.....	IV.23
Tabel 4.19.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	IV.24
Tabel 4.20.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan	IV.24
Tabel 4.21.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik	IV.25
Tabel 4.22.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan	IV.26
Tabel 4.23.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian.....	IV.26
Tabel 4.24.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan	IV.27
Tabel 4.25.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian.....	IV.28
Tabel 4.26.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV.30
Tabel 4.27.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan.....	IV.31
Tabel 4.28.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata	IV.32
Tabel 4.29.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan.....	IV.33
Tabel 4.30.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian	IV.34
Tabel 4.31.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan ESDM.....	IV.36
Tabel 4.32.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan.....	IV.37
Tabel 4.33.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian, dan Pengembangan	IV.38
Tabel 4.34.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan	IV.38
Tabel 4.35.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan	IV.40
Tabel 4.36.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan	IV.41
Tabel 4.37.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan	IV.42

Tabel 4.38.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan	IV.42
Tabel 4.39	Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025	IV.48
Tabel 4.40.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah Adat Di Provinsi Papua	IV.49
Tabel 4.41.	Persandingan Isu Strategis dengan Indikator TPB yang Belum Tercapai....	IV.57
Tabel 5.1.	Indikator Makro Pembangunan Tahun 2019-2023	V.11
Tabel 5.2.	Matriks Keselarasan Misi, Tujuan Sasaran Serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Papua Tahun 2019-2023	V.15
Tabel 6.1.	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	VI.8
Tabel 6.2.	Target Kewilayahan.....	VI.20
Tabel 6.3.	Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	VI.23
Tabel 6.4.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	VI.24
Tabel 6.5.	Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua	VI.25
Tabel 6.6.	Pengembangan Perekonomian Wilayah.....	28
Tabel 6.7.	Pengembangan Wilayah Perbatasan	VI.36
Tabel 6.8.	Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	VI.41
Tabel 6.9.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif.....	VI.63
Tabel 7.1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023	VII.2
Tabel 7.2	Pengalokasian Pendanaan Program Prioritas Menurut Urusan Kewenangan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023	VII.3
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	VII.7
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2019-2023	VIII.2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	VIII.6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023	I.4
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJMD Provinsi Papua Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.8
Gambar 1.3.	Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dengan Penganggaran	I.9
Gambar 2.1.	Peta Batas Administrasi Provinsi Papua	II.2
Gambar 2.2.	Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua.....	II.5
Gambar 2.3.	Peta Kemiringan Lereng.....	II.6
Gambar 2.4.	Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018.....	II.8
Gambar 2.5.	Kejadian Konflik di Provinsi Papua Tahun 2015	II.12
Gambar 2.6.	Peta Rawan Bencana Alam	II.14
Gambar 2.7.	Peta Intensitas Curah Hujan	II.16
Gambar 2.8.	Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua	II.19
Gambar 2.9.	Peta Tutupan Lahan Tahun 2012.....	II.22
Gambar 2.10.	Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 (dalam hektar).....	II.23
Gambar 2.11.	Peta Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015	II.28
Gambar 2.12.	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	II.31
Gambar 2.13.	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017.....	II.35
Gambar 2.14.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II.36
Gambar 2.15.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex	II.37
Gambar 2.16.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (%)	II.40
Gambar 2.17.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan Tambang per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (%)	II.41
Gambar 2.18.	Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi	II.43
Gambar 2.19.	Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%).....	II.44
Gambar 2.20.	Tingkat Kemahalan Konstruksi di Provinsi Papua	II.45

Gambar 2.21. Peta Kemahalan Konstruksi dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017	II.46
Gambar 2.22. Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (juta Rp)	II.47
Gambar 2.23. Pendapatan Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Dengan Tambang dan Tanpa Tambang di Provinsi Papua Tahun 2017	II.48
Gambar 2.24. Angka Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.49
Gambar 2.25. Distribusi Pendapatan Menurut Kategori Bank Dunia	II.51
Gambar 2.26. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index dengan Menyertakan Sektor Pertambangan	II.51
Gambar 2.27. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index Tanpa Sektor Pertambangan	II.52
Gambar 2.28. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Papua	II.53
Gambar 2.29. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%)	II.54
Gambar 2.30. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%)	II.55
Gambar 2.31. Peta Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017	II.56
Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2017	II.58
Gambar 2.33. Tingkat Pertumbuhan IPM Beserta Komponennya di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.58
Gambar 2.34. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.59
Gambar 2.35. Angka Melek Huruf di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (%)	II.60
Gambar 2.36. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)	II.61
Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)	II.63
Gambar 2.38. Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua	II.65
Gambar 2.39. Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015-2017 (%)	II.66
Gambar 2.40. Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%)	II.67
Gambar 2.41. Cakupan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Posbindu TM di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 (%)	II.68
Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)	II.70
Gambar 2.43. Peta Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017	II.71
Gambar 2.44. Komposisi dan Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor	II.72
Gambar 2.45. Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)	II.73
Gambar 2.46. Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)	II.74
Gambar 2.47. Produktifitas Regional (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja)	II.74
Gambar 2.48. Kondisi Demografi Keluarga di Provinsi Papua Tahun 2017	II.76
Gambar 2.49. Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2017	II.77
Gambar 2.50. Perbedaan Nilai Sub Indeks Terpenting Pembentuk Indeks Kebahagiaan di Provinsi Papua Antara Tahun 2014 dan 2017	II.77
Gambar 2.51. Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia dan Provinsi Papua	II.79
Gambar 2.52. Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Papua	II.80
Gambar 2.53. Ketersediaan Cadangan Pangan di Provinsi Papua (ribu ton)	II.81
Gambar 2.54. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.83

Gambar 2.55.	Nilai PDRB, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.84
Gambar 2.56.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.85
Gambar 2.57.	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.86
Gambar 2.58.	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.88
Gambar 2.59.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	II.88
Gambar 2.60.	Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)	II.94
Gambar 2.61.	Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua.....	II.94
Gambar 2.62.	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)	II.95
Gambar 2.63.	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)	II.96
Gambar 2.64.	Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)	II.97
Gambar 2.65.	Nilai Tukar Petani di Indonesia pada Desember 2017 (%).....	II.98
Gambar 2.66.	Nilai Tukar Petani dan Nelayan Provinsi Papua (%).....	II.98
Gambar 2.67.	Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB	II.100
Gambar 2.68.	Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua.....	II.102
Gambar 2.69.	Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua	II.104
Gambar 2.70.	Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%).....	II.105
Gambar 2.71.	Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017	II.106
Gambar 2.72.	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua	II.108
Gambar 2.73.	Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua	II.109
Gambar 2.74.	Jumlah Sekolah pendidikan SD, SMP dan SMA Tahun 2017	II.116
Gambar 2.75.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%).....	II.122
Gambar 2.76.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	II.124
Gambar 2.77.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	II.124
Gambar 2.78.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%).....	II.125
Gambar 2.79.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2016.....	II.126
Gambar 2.80.	Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk di Provinsi Papua	II.127
Gambar 2.81.	Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 100.000 Penduduk	II.127
Gambar 2.82.	Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2013-2017.....	II.128
Gambar 2.83.	Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.129
Gambar 2.84.	HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang).....	II.130
Gambar 2.85.	HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	II.130
Gambar 2.86.	Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua	II.132
Gambar 2.87.	Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016	II.133
Gambar 2.88.	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016 (km).....	II.134
Gambar 2.89.	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	II.135
Gambar 2.90.	Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan	II.136

Gambar 2.91. Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi Tahun 2016	II.137
Gambar 2.92. Penduduk Berakses Air Bersih di Provinsi Papua	II.138
Gambar 2.93. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Papua	II.139
Gambar 2.94. Sumber Air Minum, Mandi, dan Cuci Dominan	II.140
Gambar 2.95. Persentase Rumah Tangga dengan Jamban Tidak Layak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015	II.142
Gambar 2.96. Kondisi Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017.....	II.143
Gambar 2.97. Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2013-2018	II.145
Gambar 2.98. Tempat Buang Sampah Dominan (Kiri); Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat di Sumber (Kanan).....	II.146
Gambar 2.99. Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua.....	II.146
Gambar 2.100. Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua	II.149
Gambar 2.101. Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua	II.150
Gambar 2.102. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang).....	II.151
Gambar 2.103. Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%)	II.153
Gambar 2.104. Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja.....	II.153
Gambar 2.105. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2013-2017	II.155
Gambar 2.106. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua.....	II.156
Gambar 2.107. Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2013-2016.....	II.158
Gambar 2.108. Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari).....	II.158
Gambar 2.109. Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	II.163
Gambar 2.110. Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2017 (program)	II.164
Gambar 2.111. Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK.....	II.165
Gambar 2.112. Perkembangan APBD, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah)	II.167
Gambar 2.113. Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBD di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%).....	II.167
Gambar 2.114. Persentase APBD terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)	II.167
Gambar 2.115. Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	II.169
Gambar 2.116. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II.172
Gambar 2.117. Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet.....	II.173
Gambar 2.118. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016.....	II.174
Gambar 2.119. Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	II.177
Gambar 2.120. Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta	II.182
Gambar 2.121. Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua	II.182
Gambar 2.122. Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku.....	II.183
Gambar 2.123. Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua.....	184

Gambar 2.124. Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang).....	II.185
Gambar 2.125. Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016.....	II.188
Gambar 2.126. Jumlah Cadangan (<i>Reserve</i>) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua.....	II.190
Gambar 2.127. Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih).....	II.191
Gambar 2.128. Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih).....	II.192
Gambar 2.129. Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua.....	II.196
Gambar 2.130. Mekanisme Hubungan Gubernur, DPRD dan MRP.....	II.205
Gambar 2.131. Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2002-2016.....	II.211
Gambar 2.132. Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Indonesia.....	II.212
Gambar 2.133. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 1995-2017 (%).....	II.214
Gambar 2.134. Jumlah Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran di Papua.....	II.216
Gambar 2.135. IPM di Provinsi Papua dan Indonesia.....	II.217
Gambar 2.136. Gambar Peta kualitas daya dukung penyediaan pangan Provinsi Papua....	II.222
Gambar 2.137. Urutan daya dukung dalam penyediaan pangan per kabupaten.....	II.224
Gambar 2.138. Peta daya dukung penyediaan pangan per-wilayah budaya.....	II.225
Gambar 2.139. Peta Kebutuhan Energi Pangan Per Kabupaten.....	II.226
Gambar 2.140. Peta Ketersediaan Energi Pangan Per Kabupaten.....	II.227
Gambar 2.141. Peta Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan.....	II.228
Gambar 2.142. Proyeksi Kebutuhan Pangan.....	II.230
Gambar 2.143. Proyeksi Kehilangan Tanah.....	II.231
Gambar 2.144. Peta kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua.....	II.233
Gambar 2.145. Urutan daya dukung penyediaan air per Kabupaten.....	II.234
Gambar 2.146. Peta daya dukung penyediaan air per-wilayah budaya.....	II.236
Gambar 2.147. Peta Daya Tampung Pemurnian Air.....	II.237
Gambar 2.148. Urutan daya tampung dalam pemurnian air per kabupaten.....	II.239
Gambar 2.149. Peta daya tampung pemurnian air berdasarkan wilayah budaya.....	II.240
Gambar 2.150. Peta Ketersediaan Air Per Kabupaten.....	II.241
Gambar 2.151. Peta Kebutuhan Air Bersih Per Kabupaten.....	II.242
Gambar 2.152. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air.....	II.244
Gambar 2.153. Pola Ruang Wilayah Sebagai Dasar Analisa Luas Guna Lahan.....	II.245
Gambar 2.154. Perubahan Tutupan/Penggunaan Lahan 1990-2010 dan Proyeksi Tahun 2020-2030.....	II.247
Gambar 2.155. Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.....	II.249
Gambar 2.156. Gambar 2. Indikator TPB yang Dilaksanakan di Provinsi Papua.....	II.250
Gambar 2.157. Ketercapaian Indikator TPB di Provinsi Papua.....	II.251
Gambar 2.158. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sudah Tercapai.....	II.254
Gambar 2.159. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai.....	II.261
Gambar 2.160. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data.....	II.270
Gambar 2.161. Capaian SPM Pemerintah Provinsi Papua 2013-2017.....	II.278
Gambar 2.162. Anak Terlantar Dan Penyandang Tuna Netra Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	II.279

Gambar 3.1.	Garfik Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....	III.3
Gambar 3.2	Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013-2017	III.6
Gambar 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.8
Gambar 3.4	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017	III.11
Gambar 3.5	Penerimaan Dana Otsus Periode 2013-2017	III.14
Gambar 3.6.	Skema Sumber Dana Dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2013-2017	III.15
Gambar 5.1.	Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua	V.2
Gambar 5.2	Visi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023	V.4
Gambar 5.3	Misi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023	V.6
Gambar 6.1.	Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	VI.2
Gambar 6.2	Pendekatan Pembangunan Daerah	VI.6
Gambar 6.3.	Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	VI.7
Gambar 6.4.	Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua.....	VI.18
Gambar 6.5.	Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua	VI.22
Gambar 6.6.	Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua.....	VI.27
Gambar 6.7.	Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua.....	VI.29
Gambar 6.8.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta.....	VI.30
Gambar 6.9.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri	VI.31
Gambar 6.10.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago	VI.32
Gambar 6.11.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago	VI.34
Gambar 6.12.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha	VI.35
Gambar 6.13.	Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah.....	VI.38
Gambar 6.14.	<i>Flagship</i> 10 Tekad Papua dan Program Prioritas Provinsi Papua 2019-2023.....	VI.40

BAB I PENDAHULUAN



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

1.1. LATAR BELAKANG

Sampai tahun 2018, penyelenggaraan pemerintahan era otonomi khusus di Papua telah berjalan 16 tahun sejak efektif digulirkan pada tahun 2001 dan telah banyak memberikan warna dan perubahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, meskipun belum banyak menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu perencanaan yang lebih mendalam guna perbaikan pelaksanaan otonomi khusus di Papua sehingga dapat lebih fokus pada upaya pengurangan ketimpangan (*in-equity*) pembangunan dengan memperkuat aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, Bapak Lukas Enembe dan Bapak Klemen Tinal yang telah dilantik pada tanggal 5 September 2018 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mengajak semua komponen masyarakat di Provinsi Papua untuk mencapai visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan.

Untuk mencapai visi di atas harus dirumuskan strategi pembangunan yang tepat, desain kebijakan yang lebih menyentuh dan terukur yang didukung pelaksanaan kewenangan penuh, skema anggaran yang terbagi secara adil dan merata, serta pengawasan yang terkendali yang dibingkai dalam satu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. RPJMD 2019-2023 akan menjadi landasan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan di Provinsi Papua selama lima tahun kedepan, sebagai arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua untuk bersama membangkitkan masyarakat Papua, menjadi lebih mandiri, dan lebih sejahtera secara berkeadilan.

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Papua periode 2019–2023 menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena dokumen RPJMD akan menjadi acuan dasar bagi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJMD ini mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4. *Sustainable Development Goals* (SDGs)
5. Roadmap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua
6. Prioritas pembangunan nasional, baik pembangunan wilayah maupun pembangunan sektoral; dan
7. Dokumen lain yang relevan

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, penyusunan RPJMD Propinsi Papua 2019–2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 1.1.

1. Persiapan penyusunan RPJMD, yang meliputi:

- a. Penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. Orientasi mengenai RPJMD; dan
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD, yang meliputi:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran umum Propinsi Papua;

- c. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
- d. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis;
- e. Perumusan dan penjelasan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun;
- g. Perumusan rencana indikasi program prioritas yang disertai pendanaan;
- h. Penetapan indikator kinerja daerah;
- i. Pembahasan dengan OPD Propinsi Papua sebagai bahan penyusunan rancangan Renstra OPD; dan
- j. Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

3. Penyusunan rumusan RPJMD, yang meliputi:

- a. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- b. Verifikasi rancangan Renstra SKPD;
- c. Rancangan Renstra SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD; dan
- d. Pelaksanaan musrenbang RPJMD untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

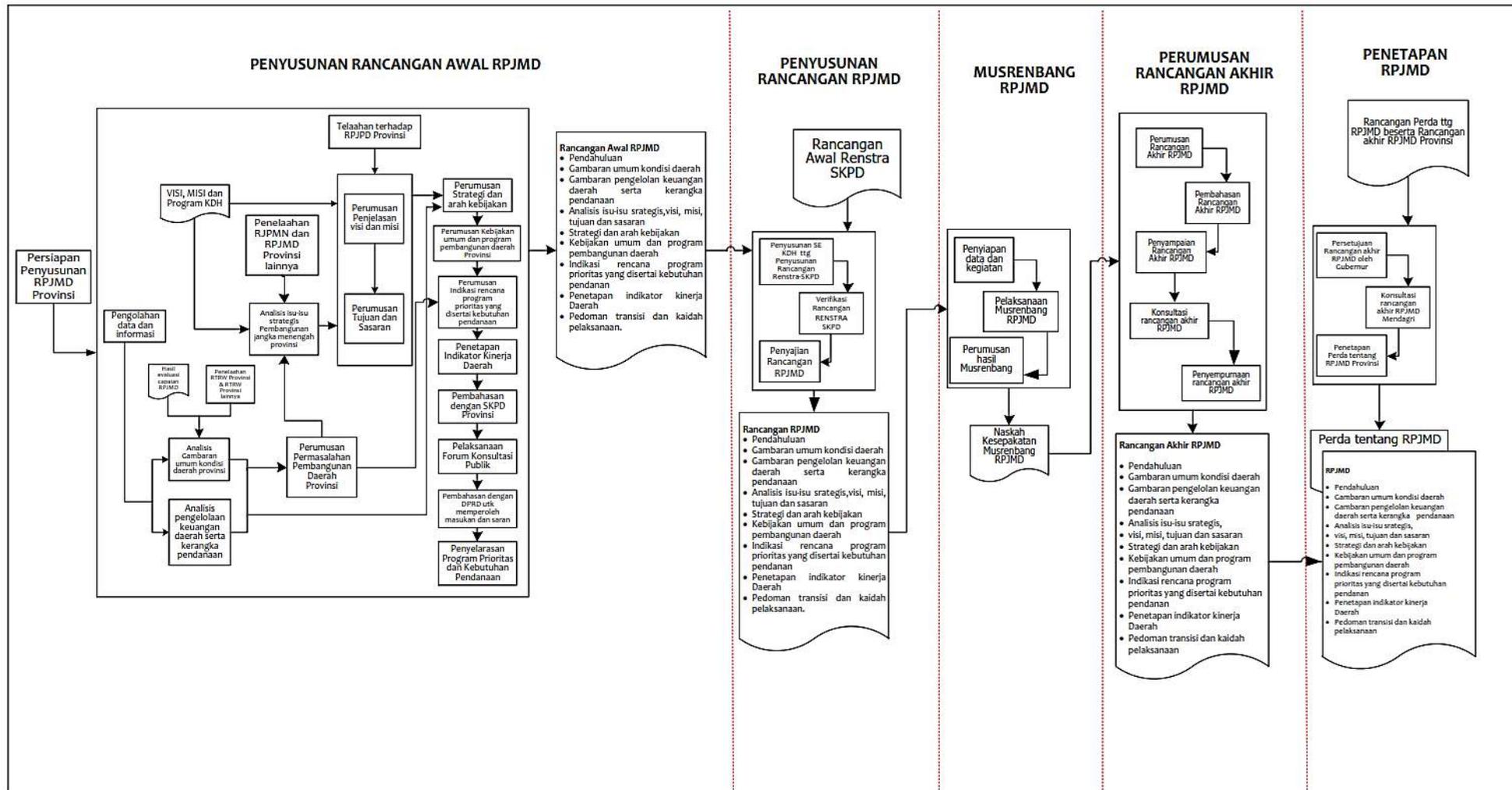
4. Perumusan rancangan akhir RPJMD, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan akhir RPJMD dengan memperhatikan hasil musrenbang RPJMD;
- b. Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD sesuai hasil konsultasi.

5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, meliputi:

- a. Penyusunan RAPERDA;
- b. Pembahasan pansus DPRD Propinsi Papua; dan
- c. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Gambar 1.1. Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dokumen RPJMD ini disusun dengan mempedomani Pancasila sebagai landasan ideologis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, serta sejumlah landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

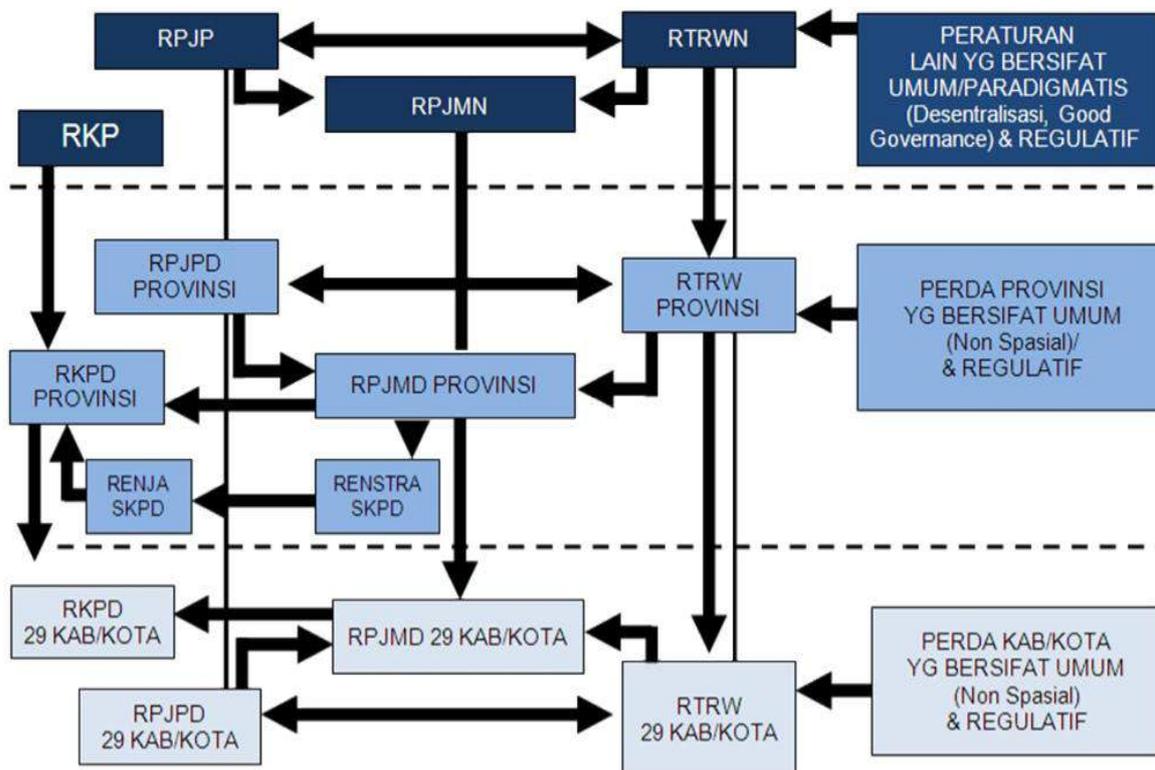
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21); dan
25. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), yang selanjutnya mengalami perubahan dua kali melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kedudukan dan hubungan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

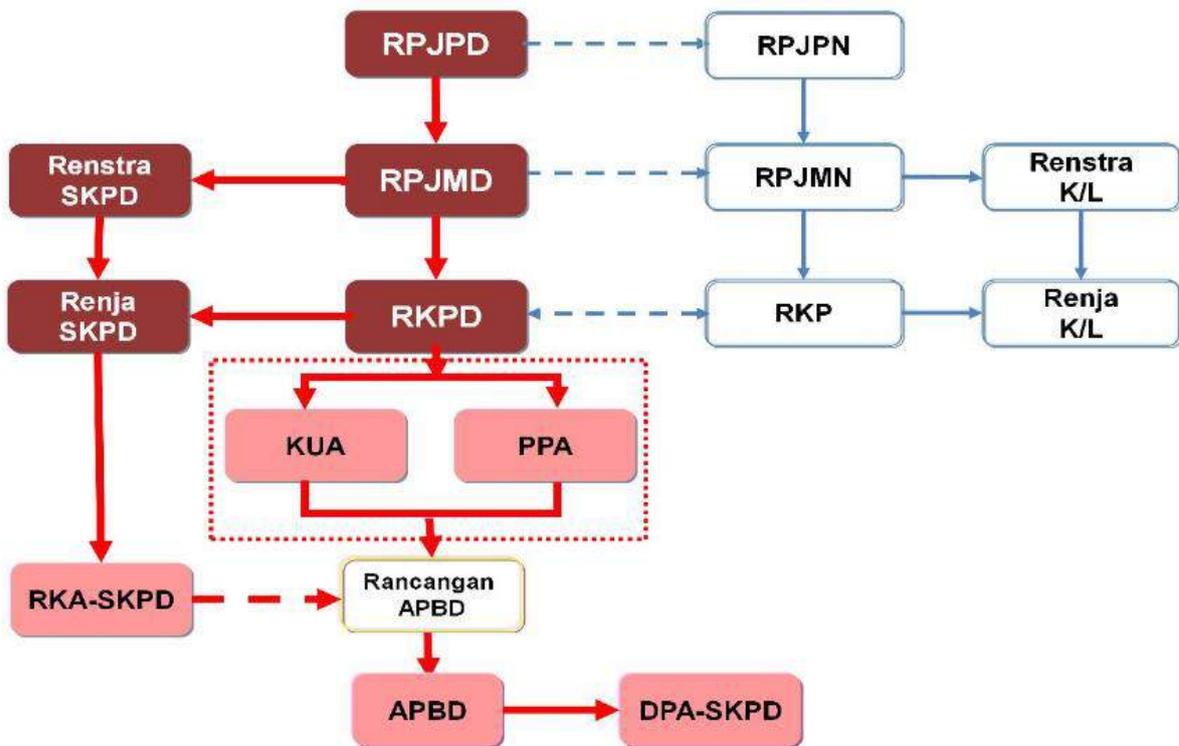
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Provinsi Papua Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



- a. RPJMD Provinsi Papua merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Daerah Provinsi Papua 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua;

- b. RPJMD Provinsi Papua menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD untuk jangka lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya; serta
- c. RPJMD Provinsi Papua menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Gambar 1.3. Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dengan Penganggaran



Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
- b. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
- c. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2019-2023 ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dokumen RPJMD ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bermitra masyarakat, secara berjenjang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2019-2023 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua;
5. Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua, dan menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan OPD dalam melaksanakan implementasi program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan;
7. Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPRP dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD;

8. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahunan mulai dari RENJA-PD, RKA-PD, DPA, hingga penyusunan APBD; dan
9. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara detail sistematika penulisan RPJMD untuk setiap bab dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan kondisi umum daerah Provinsi Papua yang meliputi aspek-aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, dan penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan secara rinci yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang dirinci menurut urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang. Selain itu juga memuat isu-isu strategis internasional, kebijakan nasional, dan isu-isu sektoral lainnya.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2019-2023 yang didasarkan pada konsolidasi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai isu strategis yang mengemuka di Papua, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu selama periode 2019-2023.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi tanggung jawab OPD.

Bab IX Penutup

Dalam bab penutup ini disajikan kaidah-kaidah transisi dan pelaksanaan yang akan menjadi pedoman dalam mengisi kekosongan RKPD disaat periode RPJMD berakhir, serta sebagai patokan dalam pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dalam perencanaan jangka pendek.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan kondisi umum daerah Provinsi Papua yang meliputi aspek-aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, otonomi khusus, dan pembangunan berkelanjutan

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Papua dalam pembahasan ini ditinjau berdasarkan luas wilayah, letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, topografi, klimatologi, hidrologi dan tutupan lahan.

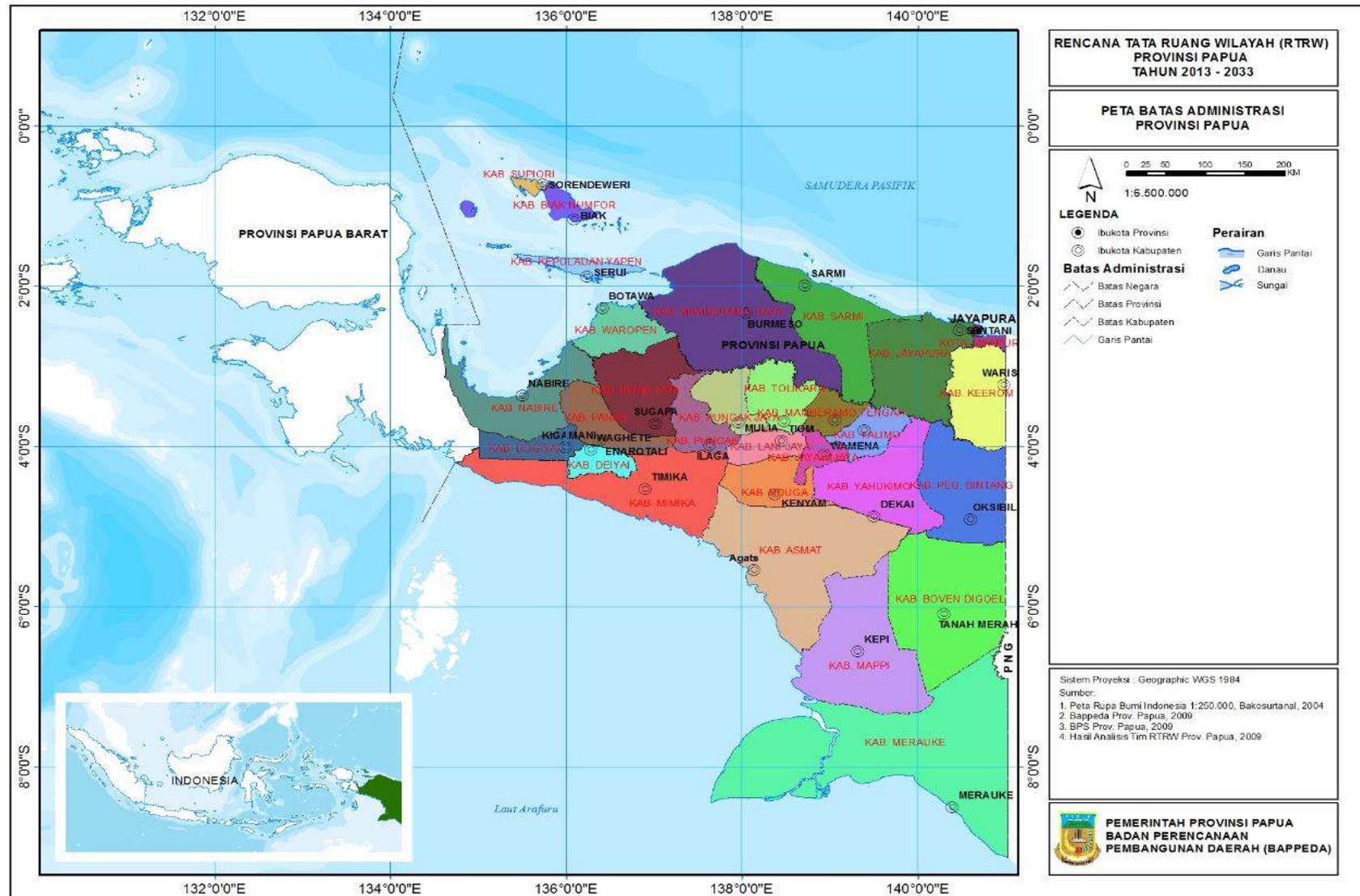
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00' LU - 9°10' LS dan 134°00' BT - 141°05' BT dengan luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 distrik dan 4.378 kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Samudra Pasifik
- b. sebelah selatan : Laut Arafuru
- c. sebelah barat : Papua Barat
- d. sebelah timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudia Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 hektar.

Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Tabel 2.1. Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Ha)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	647.200	Merauke	20	165	10	Dataran Mudah Akses
	Asmat	2.965.800	Agats	23	217	4	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	2.710.800	Tanah Merah	20	105	5	
	Mappi	1.891.200	Keppi	15	162	2	
La Pago	Jayawijaya	658.500	Wamena	39	317	14	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	224.800	Tiom	38	353	-	
	Mamberamo Tengah	127.500	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	216.800	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	1.568.200	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	805.500	Ilaga	25	205	-	
	Puncak Jaya	680.000	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	1.456.400	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	1.604.900	Dekai	51	517	1	
Mee Pago	Nabire	1.535.801	Nabira	15	76	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.003.900	Timika	18	123	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	53.739	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	423.740	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	392.202	Sugapa	6	78	-	
	Paniai	1.098.466	Enarotali	20	74	-	
Saireri	Biak Numfor	260.200	Biak	19	239	23	Dataran Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	205.000	Serui	16	147	18	
	Supiori	52.800	Sorendiweri	5	37	1	Dataran Sulit Akses
	Waropen	1.694.400	Waren	12	116	1	
Mamta	Jayapura	1.751.400	Sentani	19	127	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	839.000	Arso	11	91	-	
	Sarmi	3.558.900	Sarmi	19	108	2	
	Mamberamo Raya	2.381.391	Burmeso	9	59	-	Dataran Sulit Akses
	Kota Jayapura	94.000	Jayapura	5	16	23	
Total	32.027.839			568	5.163	154	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2017 (diolah)

Keterangan: (*) Luas wilayah berdasarkan undang-undang pemekaran

Berdasarkan Gambar 2.1 dan Tabel 2.1, terdapat 19 kabupaten di wilayah Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan. Dari 5.163 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2017, sekitar 79,68% atau sebanyak 4.114 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 70% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaan kondisi geografi wilayah kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi selama ini dalam memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antarwilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di sekelilingnya,

seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang.

2.1.1.2. Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu: 1) Pegunungan Utara di lingkaran luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkaran dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl.

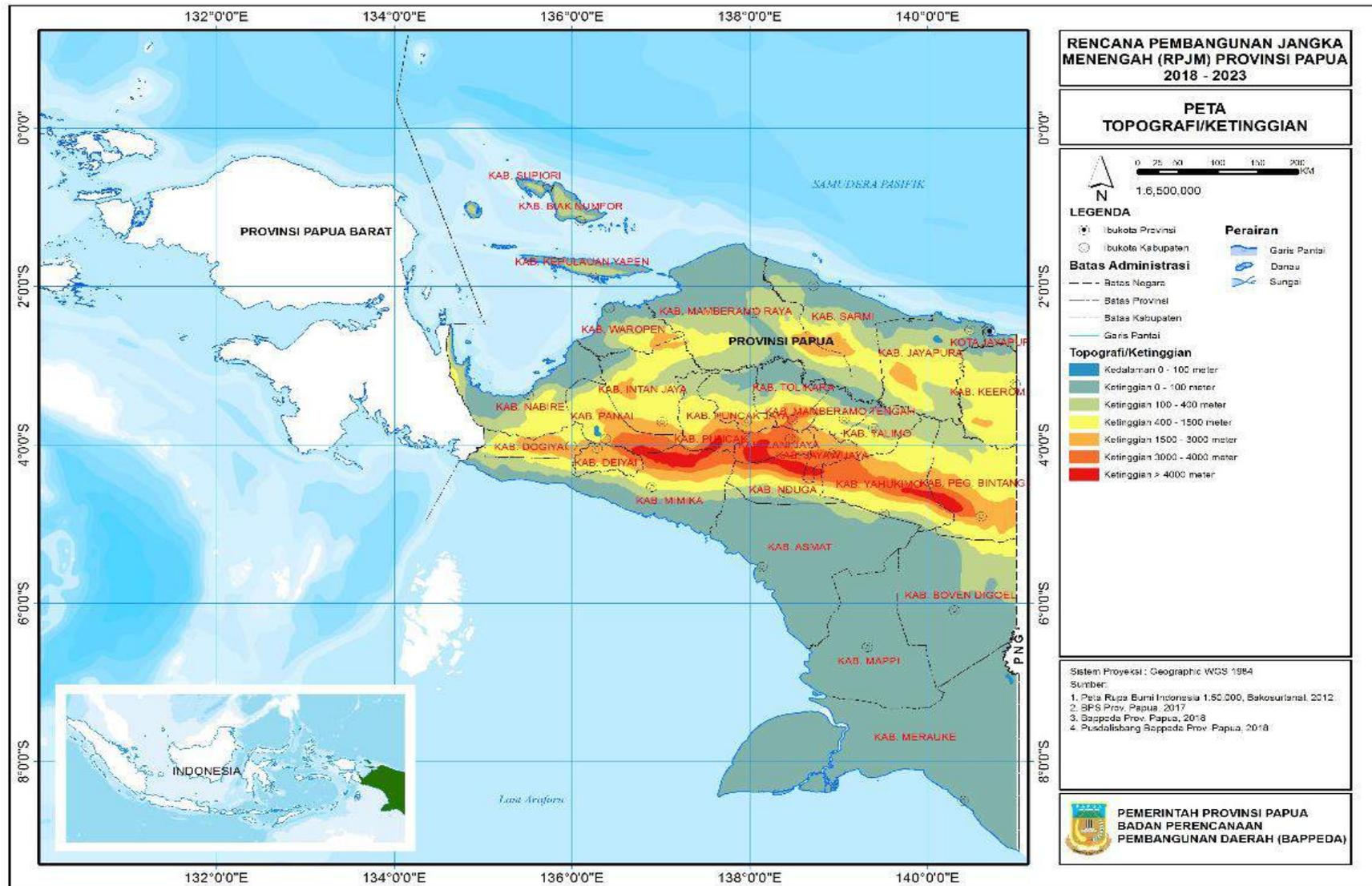
Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi Papua adalah lereng landai (0 – 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago.

Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim (lihat Gambar 2.2 dan 2.3) menyebabkan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan selama ini.

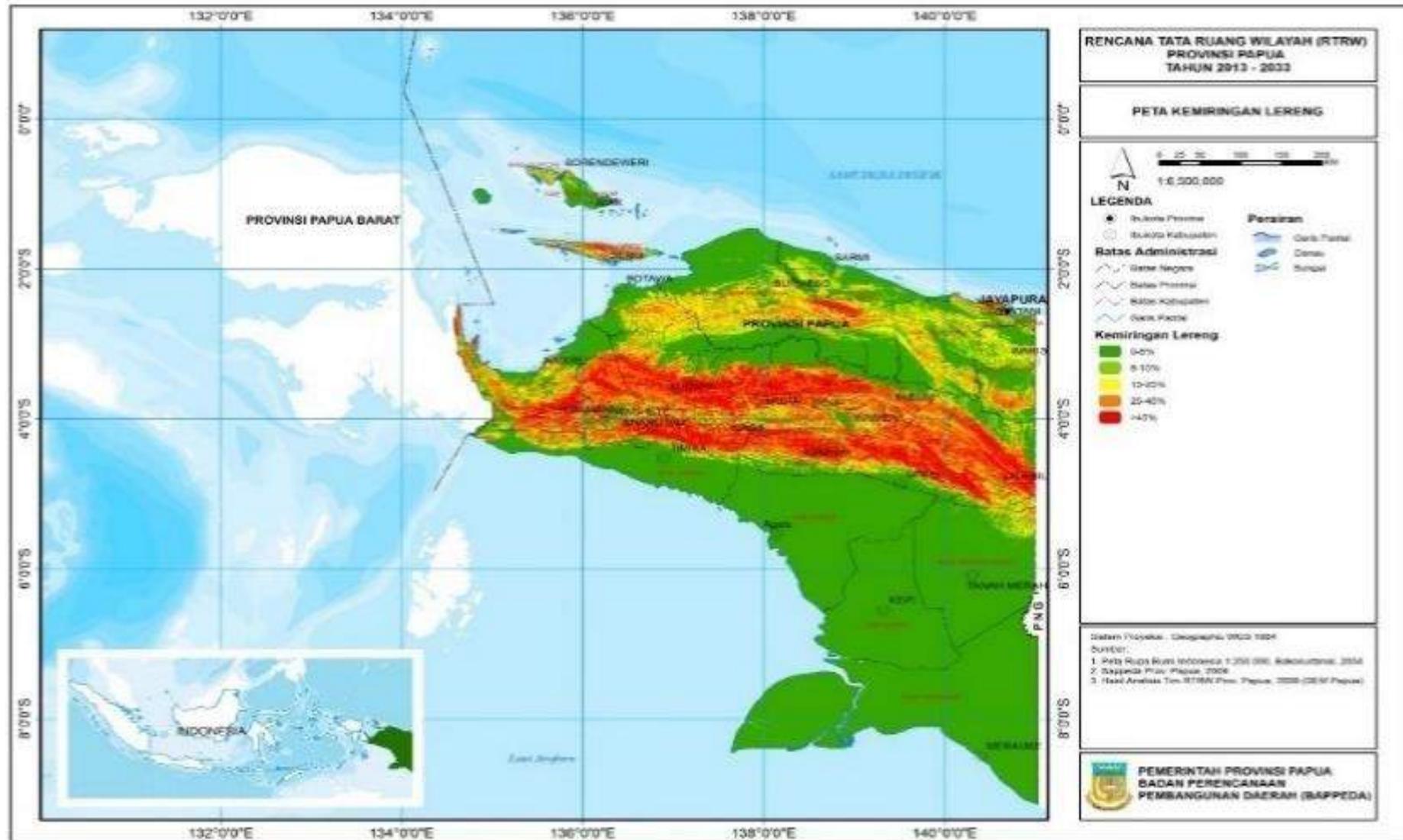
2.1.1.3. Kondisi Kawasan

Selain terhampar daratan yang sangat luas, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik, sehingga wilayah Papua memiliki potensi di bidang perikanan laut tangkap.

Gambar 2.2. Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua



Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng



Adapun luas wilayah laut sebesar 12.151,61 km² dan panjang garis pantai sebesar 5.878,11 km (lihat 0).

Tabel 2.2. Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)	Panjang Garis Pantai (km)
1	Merauke	3.179,51	1.497,01
2	Jayapura	1,35	148,33
3	Nabire	234,97	641,16
4	Kepulauan Yapen	40,03	897,72
5	Biak Numfor	47,85	537,17
6	Mimika	2.832,30	464,80
7	Mappi	582,14	151,47
8	Asmat	2.845,91	275,97
9	Sarmi	31,85	302,20
10	Waropen	666,69	222,58
11	Supiori	35,83	340,80
12	Mamberamo Raya	1.650,37	291,45
Provinsi Papua		12.151,61	5.878,11

Sumber: BPS, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008, Bakorsutanal, dan hasil pengukuran GIS Tahun 2009, Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat 2 *daerah terluar* di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke (lihat Tabel 2.3).

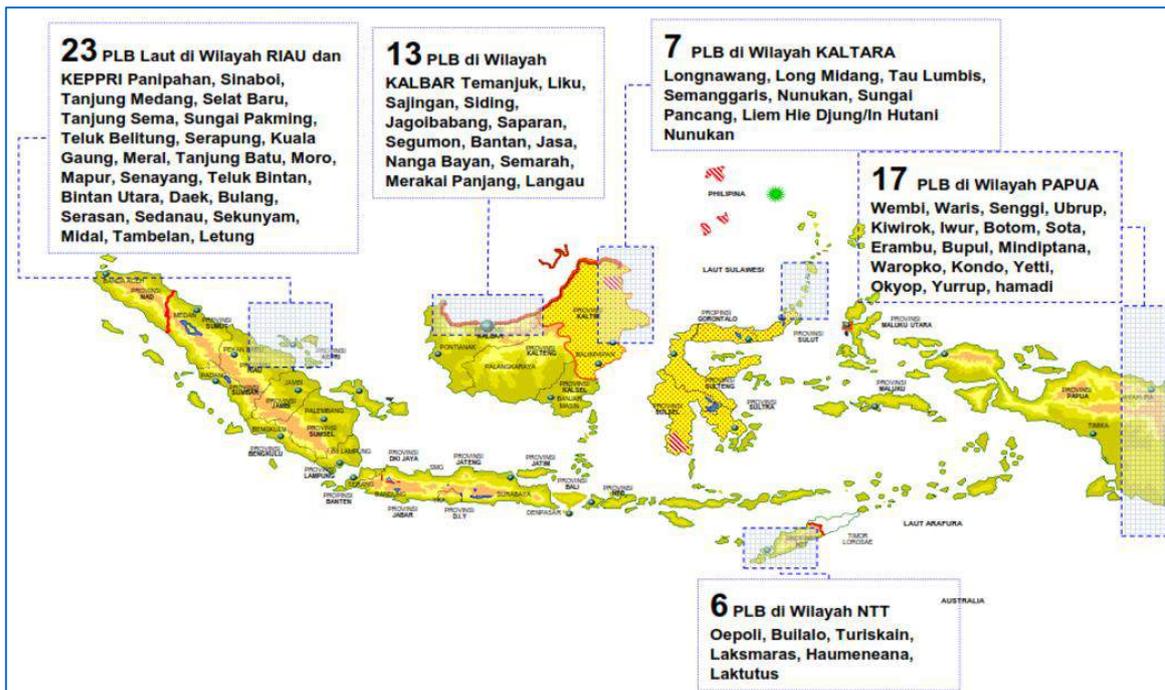
Tabel 2.3. Kawasan Terluar di Provinsi Papua

No	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Negara yang berbatasan	Keterangan
1	P. Fanildo	Supiori	Palau	Tidak berpenduduk
2	P. Brass	Supiori	Palau	Berpenduduk
3	P. Bepondi	Supiori	Palau	Berpenduduk
4	P. Liki	Sarmi	Palau	Berpenduduk
5	P. Kolepon/P. Dolok	Merauke	Australia	Berpenduduk

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 2008 dalam RPJPD 2005-2025

Provinsi Papua juga merupakan salah satu kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota sebagai *daerah terdepan* di Provinsi Papua yang posisinya berbatasan langsung dengan PNG yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke. Dinamika perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas tersebut, Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah membangun 17 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Papua (lihat Gambar 2.44).

Gambar 2.4. Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018



Sumber: Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI (2018)

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, pemerintah pusat telah membangun PLBN Skouw di Kota Jayapura. PLBN Skouw berdiri megah di atas lahan dengan luas total mencapai 10,7 hektar, dengan luas bangunan mencapai 7.619 m² yang terbagi dalam beberapa zona. Desain Gedung PLBN Skouw ini mengusung budaya lokal Papua yang mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (*green building*). Direncanakan pada tahun 2018, PLBN Sota di Kabupaten Merauke akan direnovasi dan dibangun lebih besar, namun tidak semegah seperti PLBN Skouw, karena aktifitas ekonomi dan lintas batas antar 2 (dua) negara RI-PNG pada PLBN Sota tidak seintensif PLBN Skouw.

Kondisi topografi yang begitu ekstrim yang tersebar di hampir sebagian wilayah Papua menyebabkan banyak daerah yang terisolasi dan belum tersentuh oleh pelayanan publik dari pemerintah secara memadai, sehingga jumlah daerah di Papua yang terkategori sebagai *daerah tertinggal* paling banyak di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 disebutkan jumlah daerah tertinggal

di Papua sebanyak 26 Kabupaten, yang mana lebih jauh lagi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dikatakan penyebab utama ke-26 tersebut menjadi daerah tertinggal ada 6 faktor yakni : (1) aksesibilitas, (2) Sumber Daya Manusia, (3) Ekonomi, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Karakteristik Daerah, dan (6) Kemampuan Keuangan Daerah. Urutan faktor-faktor penyebab utama ketertinggalan suatu daerah di wilayah di Papua dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
Anim Ha	Merauke	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prasarana		
	Boven Digul	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi			
	Mappi	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prasarana		
	Asmat	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	
Mamta	Sarmi	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi			
	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	SDM		
	Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM			
La Pago	Jaywijaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas		
	Puncak Jaya	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	SDM		
	Yahukimo	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prasarana		
	Pegunungan Bintang	Aksesibilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prasarana		
	Tolikara	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	SDM	Ekonomi		
	Nduga	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Lanny Jaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas		
	Mamberamo Tengah	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas		
	Yalimo	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah		
	Puncak	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas		
Mee Pago	Nabire	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Paniai	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
	Dogiyai	Ekonomi	SDM	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
	Intan Jaya	SDM	Ekonomi	Aksesibilitas	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	
	Deyiai	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Kemampuan Keuangan Daerah		
Saireri	Kepulauan Yapen	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas			
	Biak Numfor	Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah			
	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	SDM	

Sumber: Perpres No. 21 Tahun 2018 (diolah)

Dalam Tabel 2.4 terlihat bahwa permasalahan yang paling utama (nomor 1) penyebab ketertinggalan suatu daerah kabupaten di wilayah Papua menurut perspektif pemerintah pusat adalah aksesibilitas, ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Merujuk kepada indikasi yang tercantum dalam Tabel 2.4 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama ketertinggalan wilayah Anim Ha dan Mamta adalah faktor aksesibilitas. Penyebab utama ketertinggalan di La Pago dan Mee Pago adalah faktor aksesibilitas, ekonomi, dan Sumber Daya Manusia. Adapun penyebab ketertinggalan Saireri adalah ekonomi, terkecuali untuk Waropen penyebab utamanya adalah aksesibilitas.

Dalam tataran wilayah yang lebih kecil yakni perdesaan, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah desa tertinggal yang menjadi prioritas untuk wilayah Papua sebanyak 615 desa atau 88,87% dari yang dilaporkan pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.5).

Sebagian besar desa tertinggal di Papua tersebar di daerah-daerah pegunungan, terutama di wilayah adat La Pago mencapai 233 desa. Berikutnya di wilayah Saireri sebanyak 111 desa, di Mamta sebanyak 107 desa, dan Anim Ha sebanyak sebanyak 102 desa. Adapun di Mee Pago, jumlahnya yang terlihat sedikit karena banyak desa yang belum melaporkan kepada pemerintah pusat, sehingga teridentifikasi hanya 62 desa yang terkategori sebagai desa tertinggal.

Tabel 2.5. Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2017*

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Total
Anim Ha	3	102	138
Asmat	1	18	20
Boven Digoel	1	11	14
Mappi		14	14
Merauke	1	59	90
La Pago	3	233	236
Jayawijaya	1	67	68
Puncak	1	3	4
Puncak Jaya	0	15	15
Tolikara	0	29	29
Yahukimo	0	15	15
Lanny Jaya	0	19	19
Mamberamo Tengah	0	15	15
Nduga	0	14	14
Pegunungan Bintang	0	11	11
Yalimo	1	45	46
Mee Pago	3	62	66
Deiyai	1	4	5
Intan Jaya		14	14
Mimika		8	8
Nabire	1	5	6
Paniai		15	15
Dogiyai	1	16	18
Saireri	3	111	118
Biak Numfor	1	55	59
Kepulauan Yapen	1	30	31
Supiori		7	7
Waropen	1	19	21
Mamta	4	107	134
Jayapura	1	9	19
Keerom	1	16	21
Mamberamo Raya	1	4	5
Sarmi	1	78	89
Total	16	615	692

Sumber: Kemendes PD TT RI (2017)

Keterangan*:

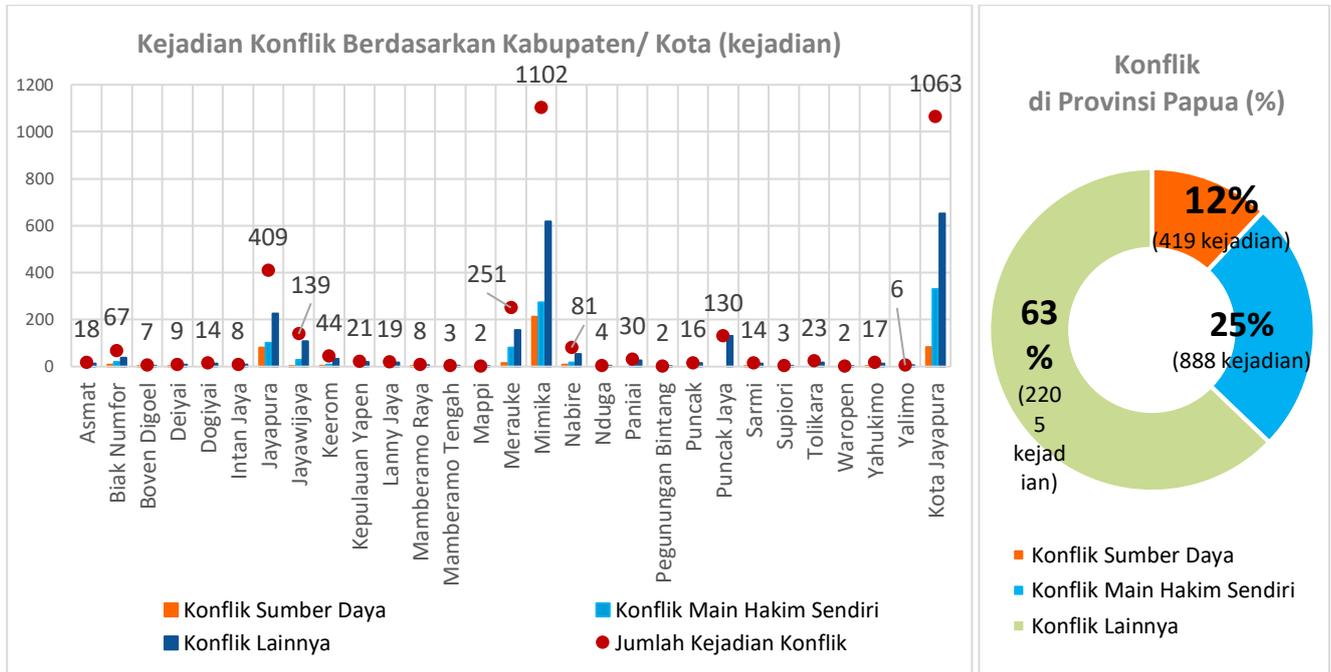
1. Penetapan desa tertinggal berdasarkan nilai IDM (Indeks Desa Membangun)
2. Jumlah desa yang dinilai tergantung dari banyaknya desa yang memberi laporan
3. Jumlah desa di Papua (diluar yang ada di Kota Jayapura) sebanyak 4.339 desa
4. Hanya 16% dari total desa di Papua yang dapat dinilai IDM-nya

Selain terdapat daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal, Provinsi Papua juga teridentifikasi memiliki *Daerah Tertentu*, khususnya daerah rawan konflik dan bencana. Berdasarkan *data base* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI (Kemendes PD TT RI) tahun 2015, terekam 2.624 kejadian konflik di Papua, yang sebagian besar (33,84%) disebabkan karena main hakim sendiri.

Terdapat 3 (tiga) daerah tertentu yang sangat rawan konflik main hakim sendiri yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Jayapura. Sedangkan untuk

konflik sumber daya lebih dominan di Kabupaten Mimika yang kaya akan sumber daya tambang emas dan tembaga. Adapun untuk daerah lainnya, seperti Kabupaten Deiyai, Intan Jaya, Mamberamo Raya, Boven Digoel, Yalimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Supiori, Waropen dan Mappi semuanya terindikasi merupakan daerah yang sangat rendah kerawanan konfliknya (lihat Gambar 2.55).

Gambar 2.5. Kejadian Konflik di Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Kemendes PDTT RI, 2017 (data diolah)

Kawasan daerah tertentu lainnya yang patut diperhatikan adalah kawasan bencana. Berdasarkan *data base* yang dikeluarkan Kemendes PDTT RI tahun 2013, terdapat tiga bencana yang sangat rawan terjadi di Provinsi Papua yaitu banjir, tanah longsor dan kebakaran (lihat Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013

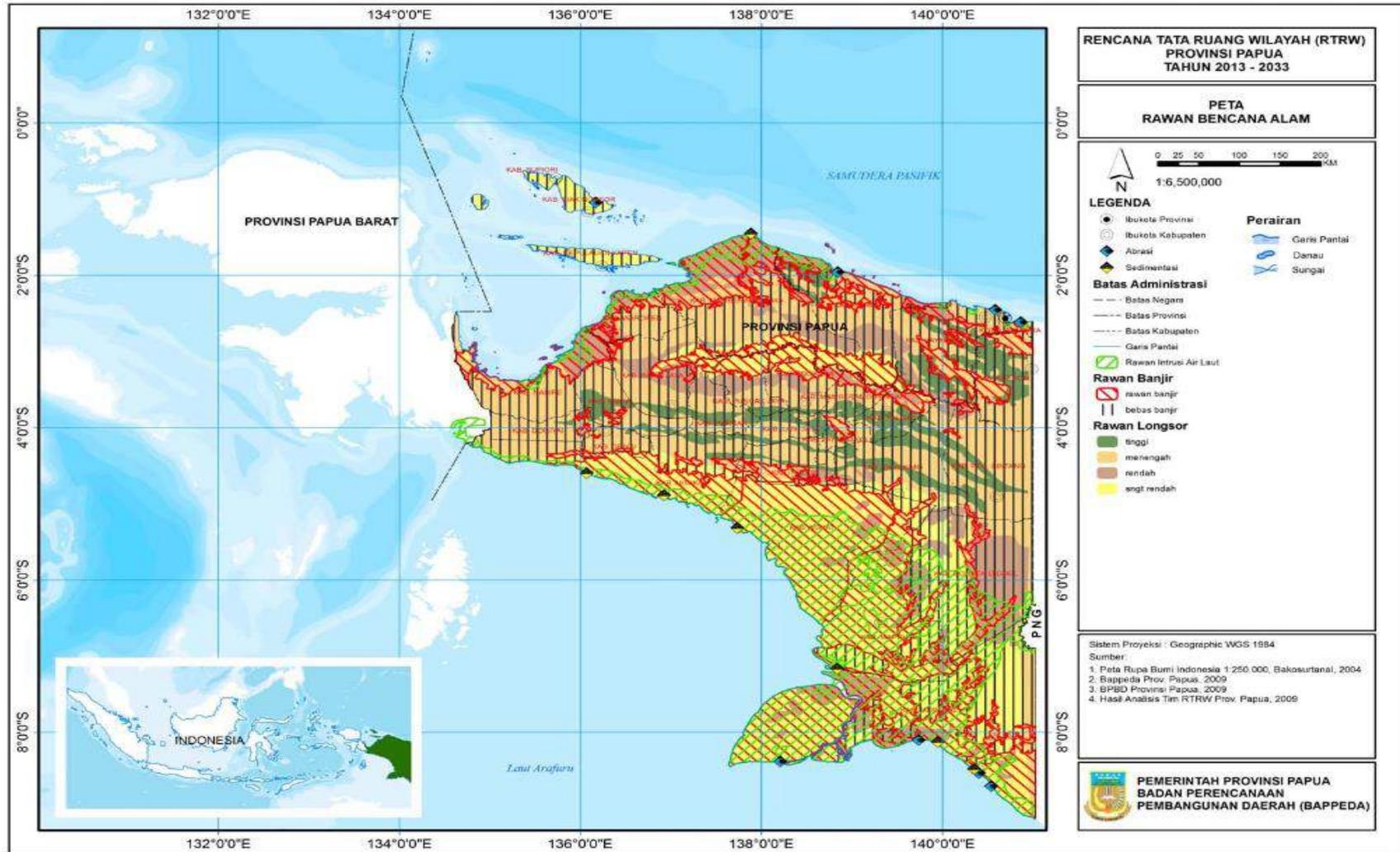
Kabupaten/Kota	RB Banjir	RB Gempa Bumi	RB Tsunami	RB Tanah Longsor	RB Gelombang Ekstrim & Abrasi	RB Kebakaran	RB Cuaca Ekstrim	RB Kekeringan
Merauke	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Jayawijaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Nabire	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	-
Kep. Yapen	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Biak Numfor	-	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Puncak Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Tinggi
Paniai	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Mimika	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Sarmi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Keerom	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi

Kabupaten/Kota	RB Banjir	RB Gempa Bumi	RB Tsunami	RB Tanah Longsor	RB Gelombang Ekstrem & Abrasi	RB Kebakaran	RB Cuaca Ekstrem	RB Kekeringan
Peg. Bintang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Yahukimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tolikara	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
Waropen	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Boven Digoel	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Mappi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Asmat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Supiori	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	-
Mamb. Raya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Mamb. Tengah	Sedang	Tinggi	-	Sedang	-	Sedang	Rendah	-
Yalimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Lanny Jaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Nduga	Tinggi	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	-
Puncak	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Dogiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Intan Jaya	-	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Deiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Kota Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Tinggi

Sumber: Kemendes PDTT RI (2017)

Dalam Tabel 2.6 tergambar bahwa tingkat kerawanan bencana banjir pada hampir setiap kabupaten/kota termasuk dalam kelas yang tinggi. Hanya 6 daerah tertentu saja yang diindikasikan tidak memiliki kerawanan banjir yakni Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Sedangkan untuk kerawanan tanah longsor sebagian besar daerah di Papua berpotensi tinggi, terkecuali untuk Kabupaten Merauke, Nabire, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah dan Nduga yang mempunyai kelas sedang. Selanjutnya untuk rawan kebakaran, oleh karena Papua memiliki hutan yang sangat luas dan menyebar diseluruh daerah, akhirnya hampir seluruh daerah di Papua terindikasi rawan kebakaran, kecuali Kota Jayapura saja yang dianggap tidak berpotensi rawan kebakaran. Untuk daerah lain potensi kerawanan kebakarannya bervariasi antara kelas yang tinggi dan sedang, dengan yang terbanyak pada kerawanan tinggi seperti di Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Paniai, Mimika, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Tolikara. Daerah yang potensi rawan kebakarannya dalam kelas sedang hanya ada 7 (tujuh) yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Puncak dan Intan Jaya. Secara visual, kondisi penyebaran rawan bencana alam di Provinsi Papua dapat diperhatikan pada Gambar 2.6 berikut ini.

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Alam



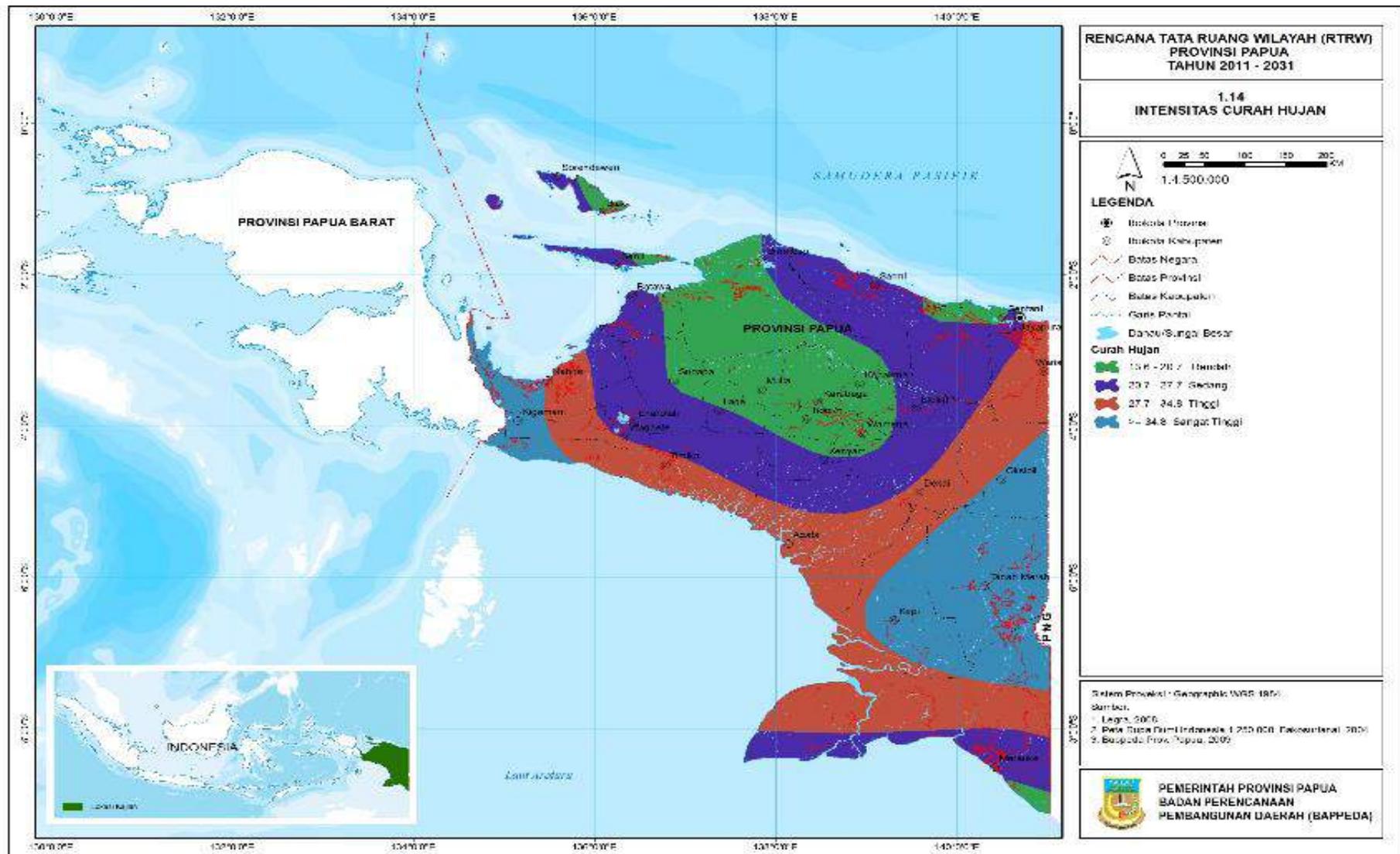
2.1.1.4. Klimatologi

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat. Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi. Penyebaran curah hujan. Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (lihat Gambar 2.77).

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pegunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi Papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

Gambar 2.7. Peta Intensitas Curah Hujan



Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

2.1.1.5. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km² (lihat Tabel 2.7). Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 2.7. Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km ²)
Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
Turiku Hilir	930.094	34.912,40
Apauwer	252.59	2.998,00
Wiru	155.114	2.494,80
Verkume	155.798	1.845,50
Biri	116.087	2.173,00
Sermo	151.866	1.599,20
Tor	244.29	3.153,60
Van Dallen	513.64	8.585,15
Wediman	875.27	11.492,30
Digul Kanan	420.912	7.253,70
Digul Hilir	1,178.81	33.698,04
Digul Kiri	615.753	6.162,50
Digul Timur	196.058	3.189,91
Digul Barat	196.01	2.489,90
Ein Hilir	1,956.46	65.315,43
Ein Hulu	509.886	5.337,72
Wapoga	574.393	10.637,14
Sobger	1.262.169	35.174,80
Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
Bigadu	315.5	9.103,53
Sirowo	150.915	4.013,00
Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61
Maro	559.804	9.909,00
Tami	320.328	7.015,40

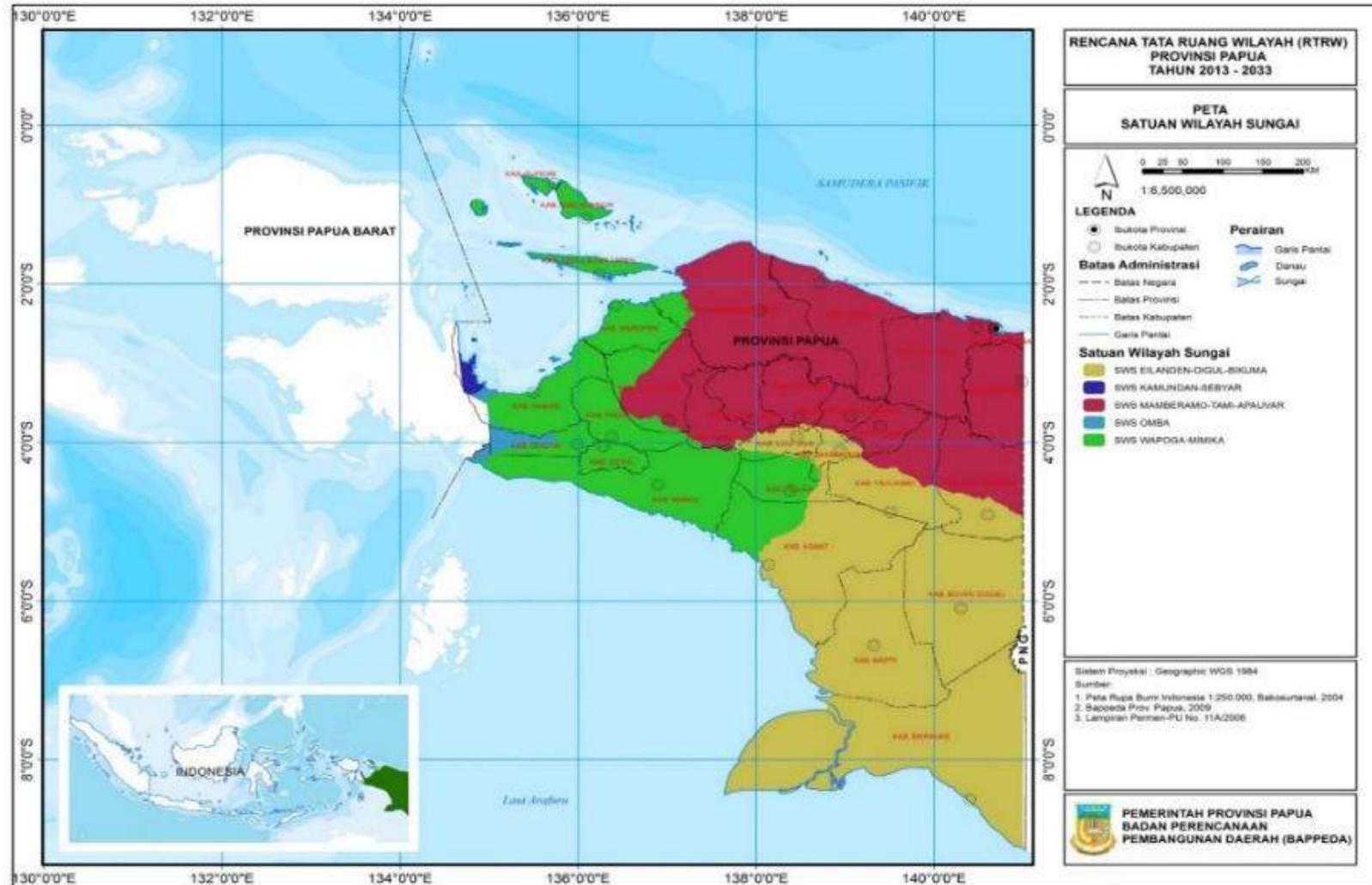
Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km ²)
Omba	157.253	3.427,60
Yawe	147.289	4.170,30
Lorentz	747.383	8.717,65
Kumbe	262.015	3.282,00
Wanggar	361.35	4.776,20
Kapiraya	121.26	2.860,90
Peter	682.955	10.992,30
Otokwa	187.337	3.395,30
Sentani	35.04	968,60
Grime	110.725	1.050,00
Bunga	397.783	3.457,07
Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
Bian	640.218	12.080,12
Kamura	118.525	2.187,60
Rombak	346.119	1.971,20
Nadubuai	222.608	1.971,20
Brazza	990.666	10.088,02
Parongga	31.33	593,20
Yawe	61.296	1.272,00
Akimuga	288.925	2.660,10
Mimika	477,71	4.670,01
Aidoma	306.834	3.184.599,00
Minajerwi	447.597	5.054,70
Cemara	280.4	2.556,40
Otokwa	181.007	1.662,00
Nordwest	624.39	7.832,82
Odamun	264.36	6.808
Dolok	224.573	3.119,20
Bulaka	331.26	6.418,01
Siriwo	155.759	1.187,60
Kumbe	38.4	483,90
Paranggo	94.882	774,90
Kamura	270.438	2.243,20
Mappi	524.98	7.596,00
Biak	84.27	467,15
Supiori	83.457	245.917,00
Yapen	298.986	1.266.089,00
Gesa	457.979	5.551,02

Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

- 1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS:DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.

Gambar 2.8. Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua



- 2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai: DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.
- 3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS: DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.
- 4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS Wapoga-Mimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS: DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu.

Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa *over estimated*. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

2.1.1.6. Tutupan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, diindikasikan Papua memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha (49%) dan 4,5 juta ha (14,5%); kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta ha (10,5%) dan savanna seluas 1,4 juta ha (4,5%). Sementara itu, hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir sama masing-masing sebesar 8,3 juta ha dan 8,2 juta ha. Sedangkan, jenis penggunaan hutan produksi konversi dan KSA/KPA mencapai 6,4 juta ha dan 5,6 juta ha (lihat Tabel 2.8 dan Gambar 2.9).

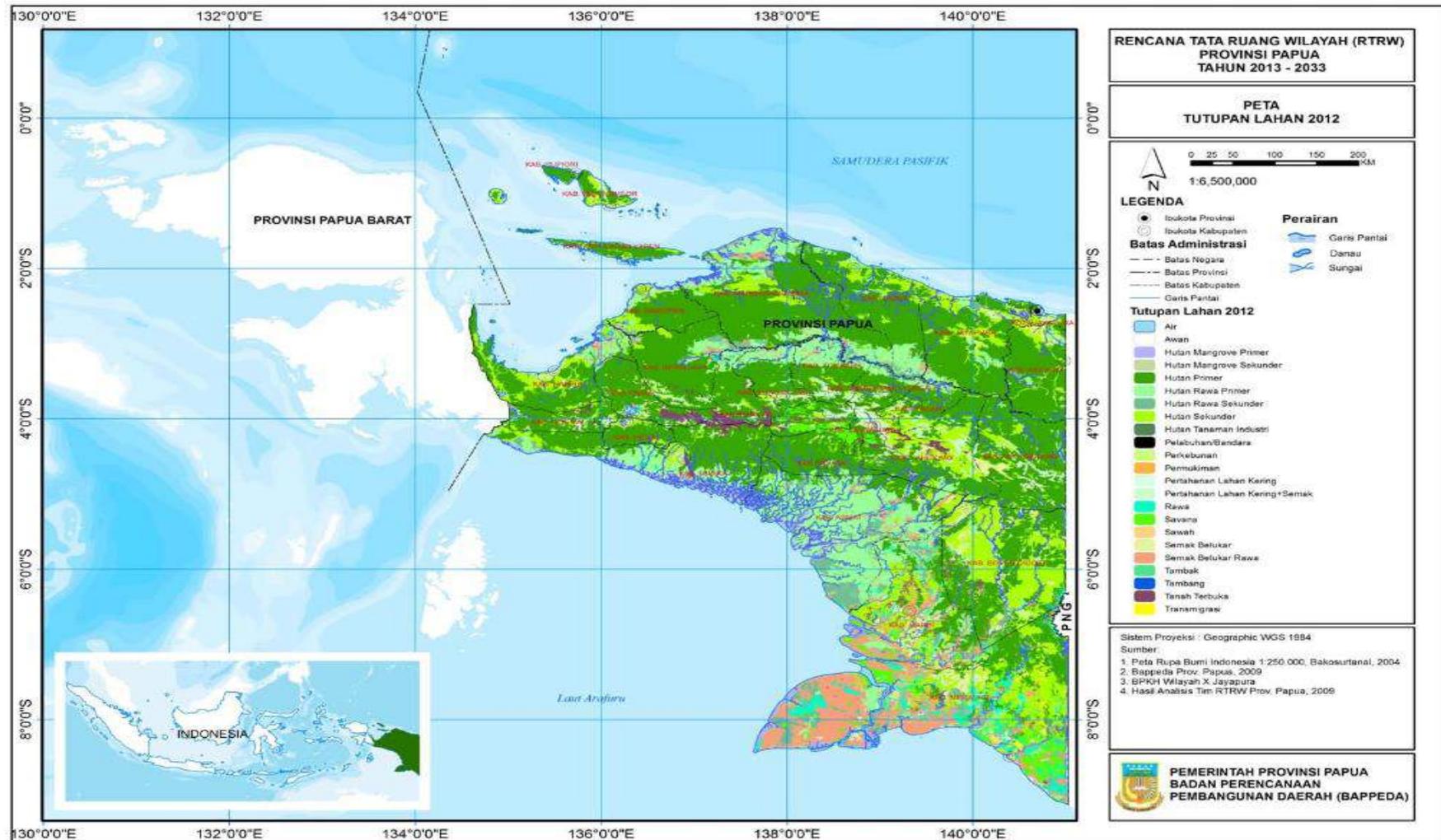
Tabel 2.8. Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan	Persentase
1	Air	551.789,45	2%
2	APL	1.707.014,50	5%
3	Hutan Lindung	7.838.861,32	24%
4	Hutan Produksi	4.767.346,35	14%
5	Hutan Produksi Konversi	4.136.177,07	13%
6	HPT	5.982.030,10	18%
7	KSA	6.755.034,81	21%
8	KSA Air	1.019.016,51	3%
JUMLAH		32.757.270,10	100%

Sumber: RTRW 2012, Pemerintah Provinsi Papua

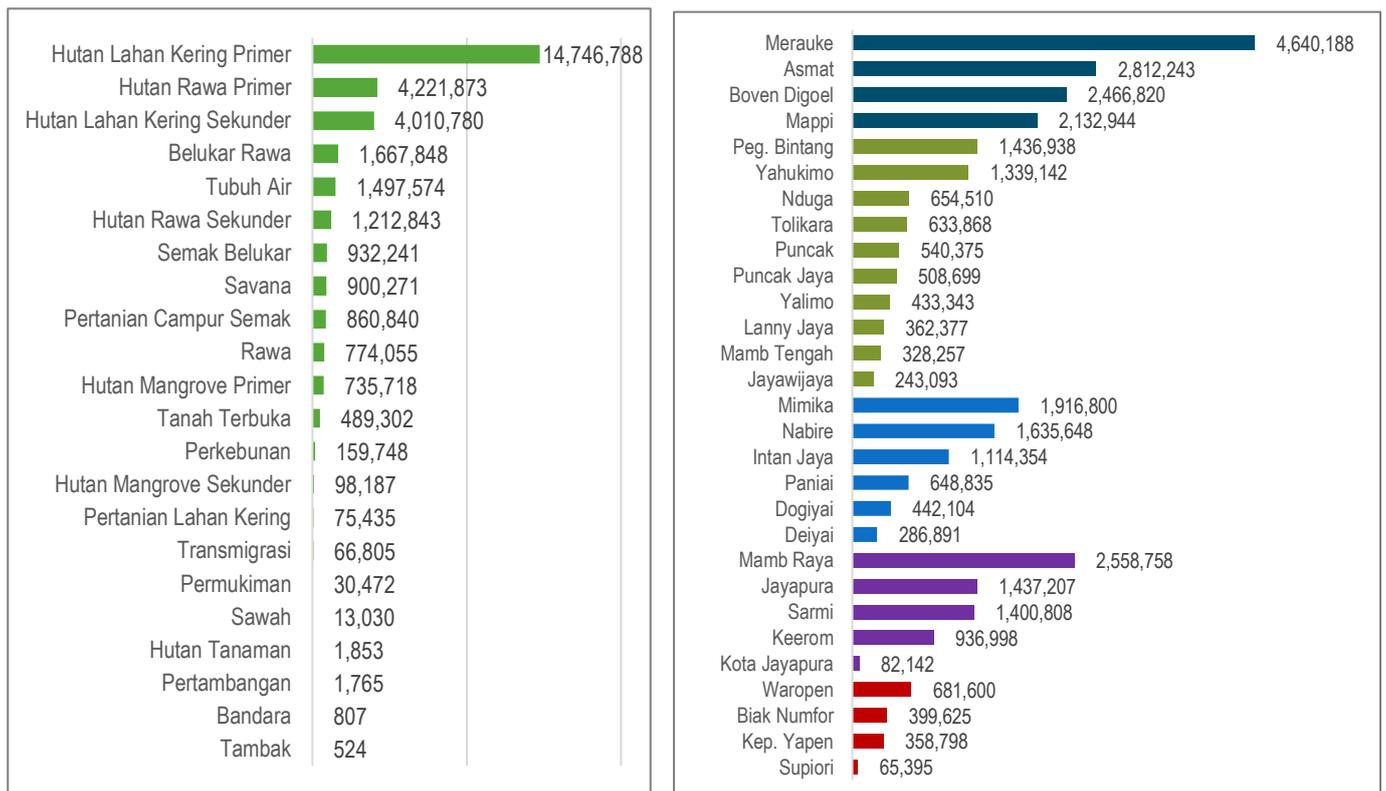
Sekitar 81,14% luas lahan di Papua berupa tutupan hutan yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati begitu tinggi. Diperkirakan dalam hutan Papua terdapat 602 jenis burung (52% jenis endemik), 223 jenis mamalia (58% jenis endemik), 223 jenis reptil (35% jenis endemik) dan 1.030 jenis tumbuhan (55% jenis endemik) hidup di belantara Papua.

Gambar 2.9. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012



Selanjutnya, menurut data terbaru yang dipublikasikan oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah X Papua, Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 adalah seluas 32.498.762 hektar yang terdiri atas : (1) Kawasan Berhutan seluas 25.028.044 hektar, dan (2) Kawasan Tidak Berhutan seluas 7.470.718 hektar. Dimana Kelas Tutupan Lahan paling luas adalah untuk Hutan Lahan Kering Primer yaitu 14.746.788 hektar, serta daerah yang paling besar memiliki tutupan lahan adalah Kabupaten Merauke seluas 4.640.188. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10. Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 (dalam hektar)



Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari liputan BPKH Wilayah X Provinsi Papua, sebagian besar daerah kabupaten/kota terdiri atas Tutupan Lahan Hutan Primer, rata-rata sekitar 25%-58% dari total luas tutupan lahan masing-masing daerah, hanya di Kabupaten Merauke dan Asmat yang paling dominan adalah Belukar dan Hutan Rawa Primer, dengan luasnya mencapai 21,70-55,64%. Adapun distribusi penyebaran tutupan lahan berdasarkan Kelas Tutupan Lahan dan Kabupaten/Kota sewilayah Papua selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9. Distribusi Penyebaran Tutupan Lahan Menurut Kelas Tutupan Lahan Dan Kabupaten/Kota Di Papua Tahun 2017

No.	Kelas Tutupan Lahan	Asmat	Biak Numfor	Boven Digoel	Deiyai	Dogiyai	Intan Jaya	Jayapura	Jayawijaya	Keerom	Kep. Yapen	Lanny Jaya	Mamberamo Raya
1	Bandara		110	48	35	12		102			52		
2	Belukar Rawa	116.525	129	34.849	1.240	3.232	19.972	2.859		987	526		62.262
3	Hutan Lahan Kering Primer	311.745	100.190	1.259.016	220.439	311.369	846.193	982.301	70.427	731.923	177.121	182.075	1.480.829
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	112.388	64.901	717.728	31.781	48.203	49.006	236.871	29.747	85.816	32.665	15.511	184.231
5	Hutan Mangrove Primer	177.742	3.942					108			680		86.102
6	Hutan Mangrove Sekunder	21.183	221								3.028		19.585
7	Hutan Rawa Primer	1.564.755	202	76.265	672	14.391	89.546	86.576		30.830	142		543.694
8	Hutan Rawa Sekunder	295.409	608	33.695	82	936	46.017	28.747		25.337	521		82.840
9	Hutan Tanaman							52					
10	Perkebunan			26.914	7.058			23.843		23.665			
11	Permukiman	413	1.533	2.740	2.312	493		1.229	2.001	1.269	1.014		27
12	Pertambangan												
13	Pertanian Campur Semak	1.278	15.419	32.589	5.232	33.620	43.458	26.012	46.687	9.332	10.581	38.307	2.140
14	Pertanian Lahan Kering		5.780	2.275				2.141	3.903	9.942	262		
15	Rawa	24.966	760	20.115		155	579	575	3	324		75	2.801
16	Savana	2.296		12.173	524	295	152	20	37.532			93.036	2.780
17	Sawah							135					
18	Semak Belukar	25.062	28.277	187.280	11.258	11.199	8.026	12.205	44.927	2.972	15.878	23.889	12.021
19	Tambak												
20	Tanah Terbuka	714	4.683	34.374	1.062	14.787	7.560	12.167	6.907	2.144	140	9.182	5.863
21	Transmigrasi							5.677		8.100			
22	Tubuh Air	157.766	172.870	26.761	5.197	3.412	3.846	15.589	958	4.356	116.188	302	73.584
	Total	2.812.243	399.625	2.466.820	286.891	442.104	1.114.354	1.437.207	243.093	936.998	358.798	362.377	2.558.758

Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Lanjutan Tabel 2.9.

No.	Kelas Tutupan Lahan	Mamberamo Tengah	Mappi	Merauke	Mimika	Nabire	Nduga	Paniai	Peg. Bintang	Puncak	Puncak Jaya	Sarmi
1	Bandara		78	158	140	26			31			
2	Belukar Rawa	2.111	327.801	1.006.873	8.688	27.351		4.960		3.512	11.539	10.014
3	Hutan Lahan Kering Primer	206.066	400.068	549.218	917.185	574.697	562.647	452.936	1.126.632	340.219	303.967	929.790
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	25.336	311.203	674.260	154.866	307.912	20.861	30.954	109.628	24.047	12.700	200.346
5	Hutan Mangrove Primer		53.042	196.736	180.065	17.110						1.687
6	Hutan Mangrove Sekunder		4.218	24.956	12.812	578						1.515
7	Hutan Rawa Primer	41.677	343.238	199.859	388.253	118.674	17.899	3.927	15.241	51.167	121.042	185.001
8	Hutan Rawa Sekunder	15.367	163.988	364.065	30.848	23.680	2.104	2.975	1.713	7.122	4.150	34.454
9	Hutan Tanaman		1.792			10						
10	Perkebunan		2.792	64.100	534	10.841						
11	Permukiman		2.708	3.503	3.660	1.422		313	193		985	469
12	Pertambangan				1.591			106				
13	Pertanian Campur Semak	26.043	59.055	54.438	24.463	19.203	5.502	14.290	97.684	23.491	39.501	11.176
14	Pertanian Lahan Kering		1.754	16.567	3.151	10.887		1.319	467			3.804
15	Rawa	658	125.819	568.284	9.738	4.416	245	5.649	80	4.979	108	1.341
16	Savana	16	85.667	581.994	628	826	33.189	79	2.169	6.814	4.215	371
17	Sawah			11.154		563						
18	Semak Belukar	5.070	119.141	166.016	16.486	11.972	3.714	40.578	69.262	12.508	4.085	4.256
19	Tambak					89						
20	Tanah Terbuka	69	71.890	58.743	52.706	2.188	3.725	74.840	2.232	62.708	1.065	291
21	Transmigrasi			44.934	274	3.271						2.731
22	Tubuh Air	5.844	58.693	54.329	110.712	499.933	4.623	15.907	11.607	3.807	5.342	13.561
	Total	328.257	2.132.944	4.640.188	1.916.800	1.635.648	654.510	648.835	1.436.938	540.375	508.699	1.400.808

Lanjutan Tabel 2.9.

No.	Kelas Tutupan Lahan	Supiori	Tolikara	Waropen	Yahukimo	Yalimo	Jayapura	Jumlah
1	Bandara				8	7		807
2	Belukar Rawa	70	12.595	6.236	373	2.289	856	1.667.848
3	Hutan Lahan Kering Primer	52.641	301.763	375.993	710.715	246.433	22.189	14.746.788
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.004	20.690	93.132	299.305	88.172	24.519	4.010.780
5	Hutan Mangrove Primer	3.585		14.646			272	735.718
6	Hutan Mangrove Sekunder	78		10.014				98.187
7	Hutan Rawa Primer		207.027	47.119	35.875	34.625	4.179	4.221.873
8	Hutan Rawa Sekunder		12.930	21.344	5.199	4.676	4.035	1.212.843
9	Hutan Tanaman							1.853
10	Perkebunan						2	159.748
11	Permukiman	425		398		152	3.215	30.472
12	Pertambangan				68			1.765
13	Pertanian Campur Semak	761	58.563	3.244	116.207	35.429	7.134	860.840
14	Pertanian Lahan Kering			702	2.741	3.805	5.933	75.435
15	Rawa	29	2.345		11			774.055
16	Savana		411	382	30.710	3.967	27	900.271
17	Sawah						1.177	13.030
18	Semak Belukar	3.734	1.338	5.582	75.234	6.248	4.023	932.241
19	Tambak						435	524
20	Tanah Terbuka	62	3.485	1.477	51.565	996	1.675	489.302
21	Transmigrasi			1.476			342	66.805
22	Tubuh Air	7	12.721	99.853	11.131	6.544	2.130	1.497.574
	Total	65.395	633.868	681.600	1.339.142	433.343	82.142	32.498.762

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033, maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang ialah sebagai berikut:

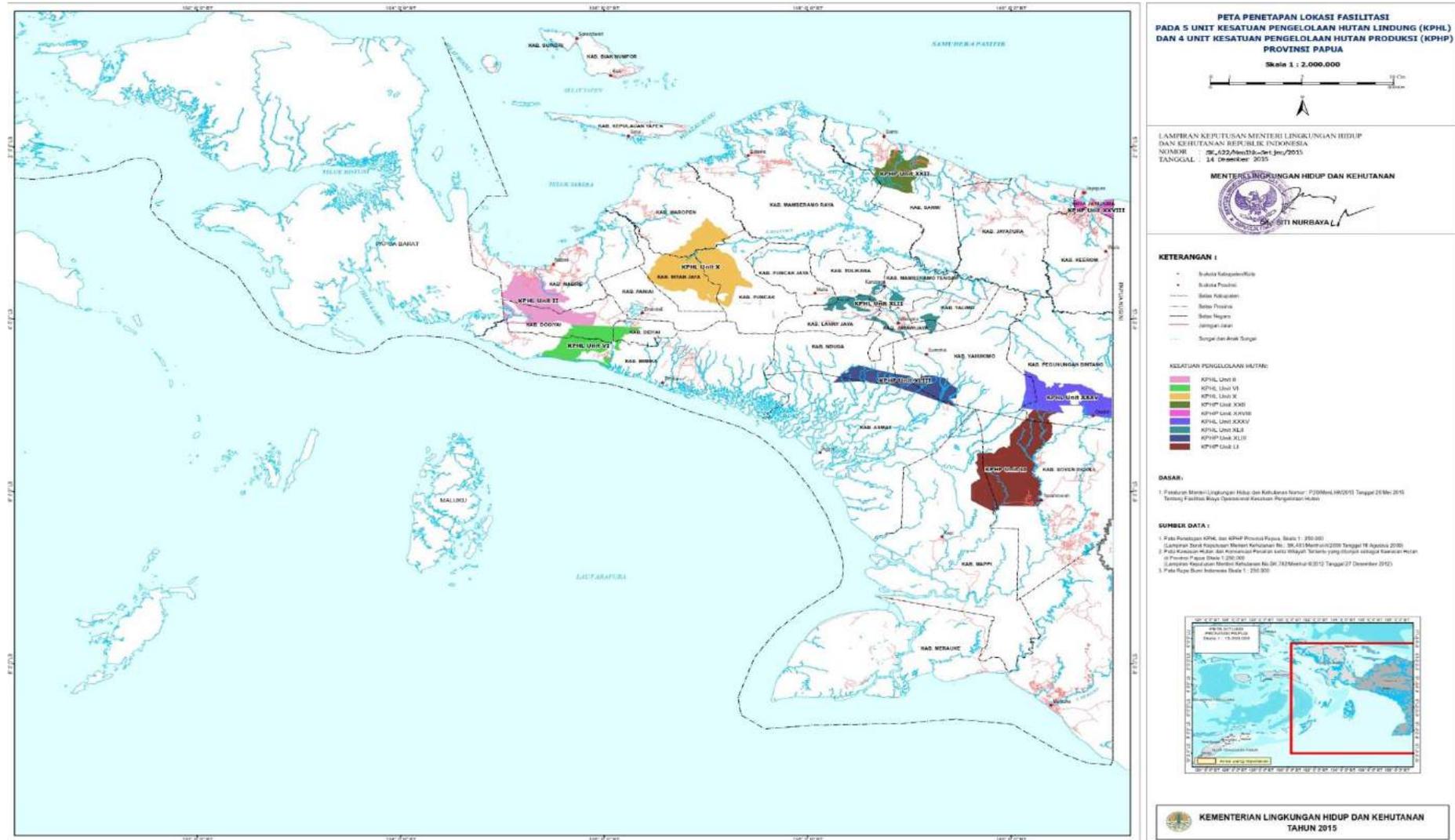
2.1.2.1. Potensi Hutan

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Provinsi Papua memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MenLHK/2015 Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Provinsi Papua terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana secara garis besarnya terdiri atas KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang tersebar pada : (1) KPHL Unit II Lintas Nabire, Dogiyai, (2) KPHL Unit VI Lintas Mimika, Dogiyai, Deyiai, (3) KPHL Unit X Lintas Intan Jaya, Waropen, Puncak, (4) KPHP Unit XXII Sarmi, (5) KPHL Unit XLII Lintas Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, (6) KPHP Unit XLIII Lintas Yahukimo, Nduga, (7) KPHL Unit XXXV Lintas Pegunungan Bintang, Yahukimo, (8) KPHP Unit LI Lintas BOVEN DIGUL, Pegunungan Bintang, dan (9) KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11. Peta Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015



b. Kawasan Hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Selain itu, kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Pada kawasan ini, kegiatan yang diperbolehkan ialah kegiatan permanen berdasarkan sistem tebang butuh.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Kawasan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kegiatan pada kawasan pertanian adalah pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus lebih dulu memiliki kajian studi AMDAL.

Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL. Kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang. Kawasan pertanian diharapkan menyediakan kegiatan pertanian berskala besar untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang merupakan penduduk asli setempat, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat. Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kako dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

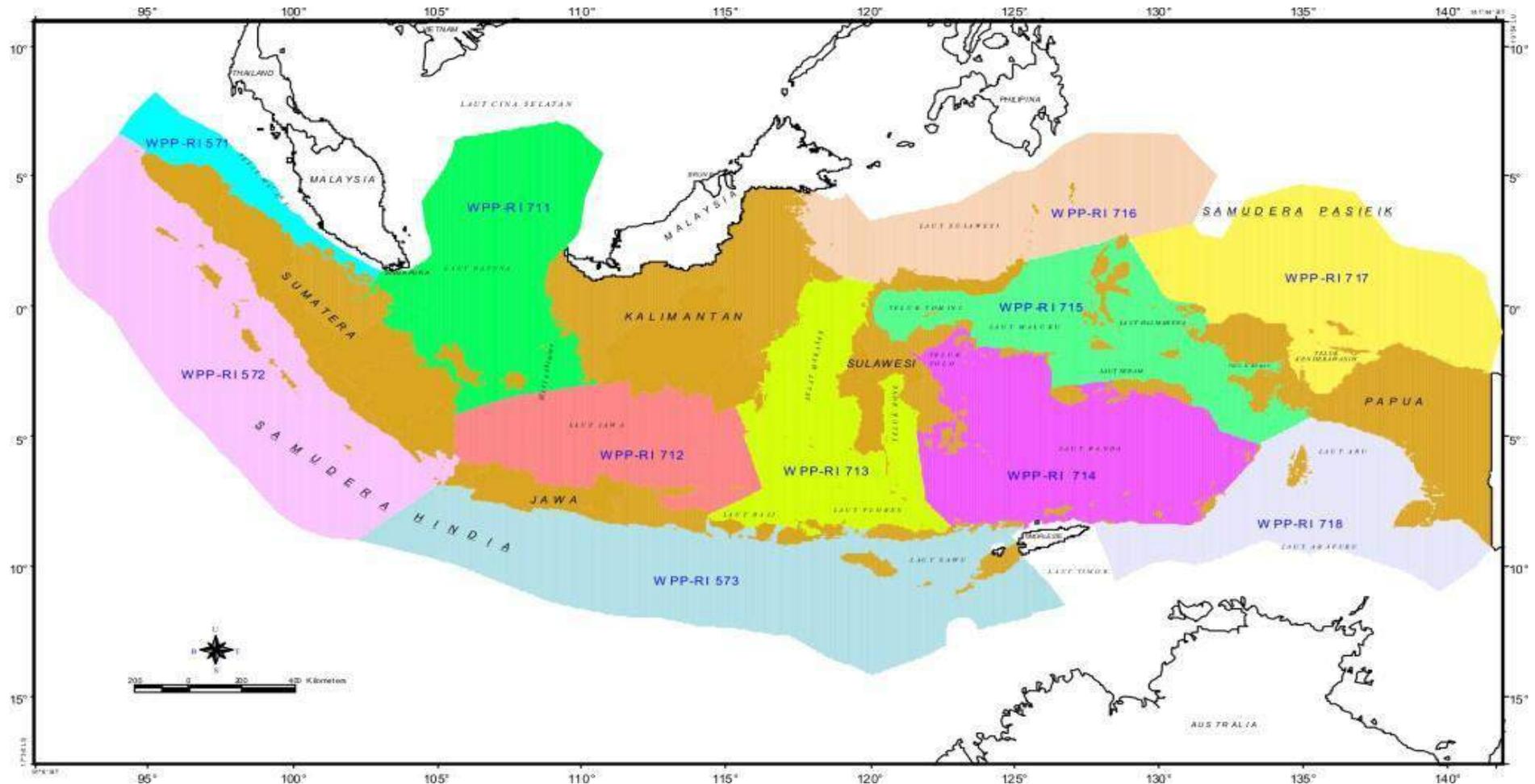
2.1.2.2. Potensi Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua memiliki panjang pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik (perhatikan Gambar 2.12) dengan pantai 509 mil laut (916 km) dengan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Utara dengan pusat kegiatan di Biak, dan Jayapura.
- Laut Papua Selatan dengan pusat kegiatan di Mimika dan Merauke

Gambar 2.12. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia



Sumber : Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

b. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut:

1. Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
2. Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabuapten Sarmi dan Waropen.
3. Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura, serta Kota Jayapura.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya.

2.1.2.3. Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (*Australia Plate*) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate*) yang bergerak ke arah Barat. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkaran Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
Kota Jayapura	S.Numbai, Kodam	Emas
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas
	S. APO	Emas
	S. Entrop	Emas
	S. Perumnas IV	Emas
	S. Borgonjie	Emas

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
Jayapura	S. Kujabu, Waena	Emas
	Sentani	Kobal
		Tungsten
		Nikel
		Asbes
	S. Kemiri	Emas
	Sentani	Emas
	S. Deyau, Sentani	Emas
	S. Sawe Sentani	Emas
	S. Ayapo Sentani	Emas
	S. Tami	Krom
	Tg. Tanahmerah	Talk
	Waris	Emas, tembaga, timah hitam
	Web	Emas, perak
	Arso	Krom, batubara
	Depapre	Marmer
	Bonggo	Batubara
	Genyem	Batubara
	Siduarsi	Nikel Laterit
	S.Pis dan S.Pas	Emas
Senggi	Tembaga, timah hitam	
Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Assolokobal	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Asologaima	Batubara
	Borme Utara	Emas
	Okbibab	Tungsten
	Soba	Timbal-Seng
	Holuwan	Timbal-Seng
	Bokondini	Tembaga, emas
	Tiom	Emas, batu garam
	Mbua	Batubara
	Nalca	Emas
	Dabera	Emas, tembaga
	Aboyi	Emas, molibdenum
	Nabire	Yaur
Logari		Emas
S. Sanoba, Nabire		Emas
S.Nabarua, Nabire		Marmer
Uwapa		Seng, Kaolin
Jali Bumi, Topo		Emas
Cemara, Topo		Emas
Haiura		Emas, tembaga
Wapoga		Emas
Biak Numfor	Supiori	Emas, Batu Kapur
	Korido	Kalsit
	Biak	Fosfat, Pasir Besi
Kepualauan Yapen	Yapen	Pasir Besi
	P. Num	Nikel
Waropen	Waropen Bawah	Emas
	Waropen Atas	Batu bara
Merauke	Jair	Emas, perak
	Mediptana	Tembaga, timah hitam, seng
	Kuoh	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, tembaga

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
	Ilaga	Arsenit, tembaga, emas, perak
Paniai	Enarotali	Pasir kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Kemabu	Tembaga, Emas
	Uwagimamo	Emas, tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, emas
	Komopa	Tembaga, emas
	Mimika	Tembagapura

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan potensi geologinya, wilayah Papua mempunyai kekayaan bahan galian mineral yang sangat besar dan potensial. Mulai dari emas, tembaga, nikel, timah, batu kapur, gamping, dan sebagainya tersedia di wilayah ini. Akan tetapi, meskipun kekayaan mineral tersebut sudah teridentifikasi sejak lama, namun hanya sedikit wilayah yang dapat memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya di Kabupaten Mimika yang memiliki potensi tembaga dan emas terbesar di dunia yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan multinasional yaitu PT. Freeport Indonesia. Sedangkan di daerah-daerah penghasil emas lainnya seperti di Paniai dan Nabire lebih banyak dikelola oleh penambangan rakyat dengan jumlah yang sangat kecil.

Eksplorasi pertambangan di Papua sangat berisiko. Ditambah lagi cadangannya berada di lokasi-lokasi terpencil yang minim infrastruktur, tersembunyi di hutan dan pegunungan. Pada saat eksplorasi, membutuhkan teknik khusus untuk menemukan cadangan mineral di Papua. Wilayah pertambangan secara topografi sangat sulit sehingga tak mudah merancang infrastruktur untuk tambang. Semua kondisi ini menjadi kendala bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan mineral. Sehingga perusahaan besar pertambangan yang ada masih sangat sedikit. Investasi pertambangan di Papua perlu dalam skala besar dengan resiko bisnis tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.

2.1.2.4. Pariwisata

Provinsi Papua memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

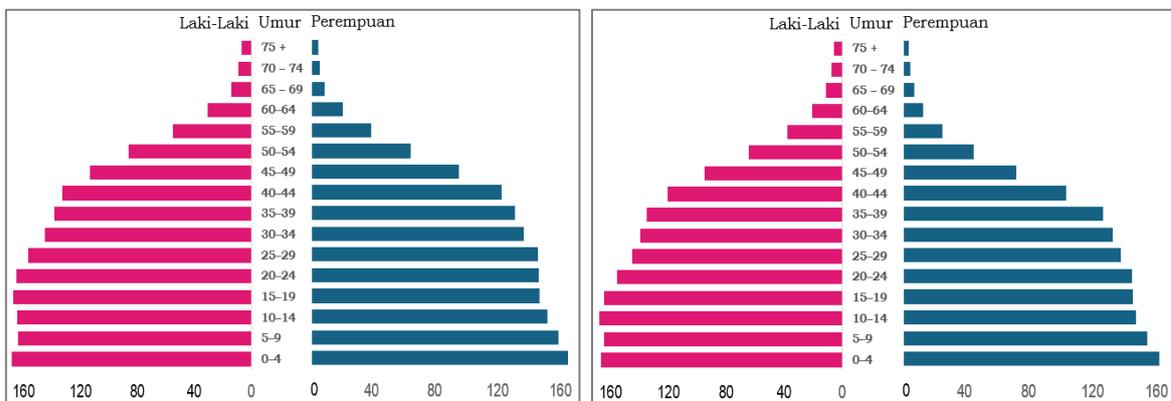
Obyek wisata potensial di Papua dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu kawasan wisata bahari, kawasan wisata air terjun, kawasan wisata pulau, kawasan wisata budaya, kawasan wisata sejarah, kawasan wisata religi, dan kawasan wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

2.1.3. Aspek Demografi

Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Baik itu di tahun 2013 maupun 2017 bentuk piramida penduduk Provinsi Papua kurang signifikan mengalami perubahan. Lihat Gambar 2.13 berikut ini.

Gambar 2.13. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017



[a] Piramida Tahun 2013

[b] Piramida Tahun 2017

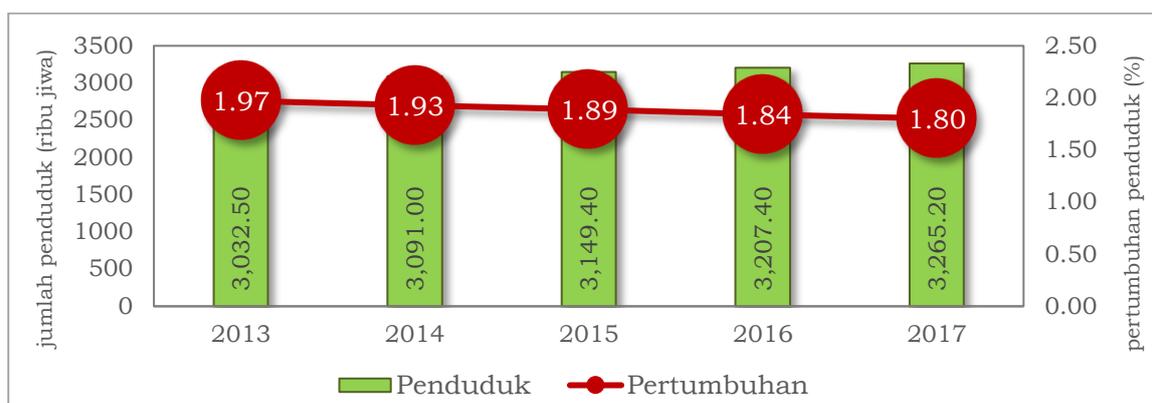
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 & 2018 (data diolah)

Penduduk usia muda (0-14 tahun) masih dominan, namun dengan kecenderungan tingkat kelahiran bayi semakin menurun di tahun 2017. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 15-44 tahun mengindikasikan

bahwa penduduk usia yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida yang tajam diantara tahun 2013 dan tahun 2017 memvisualisasikan bahwa usia harapan hidup di Provinsi Papua masih berkisar diantara 65-69 tahun, dan ada kecenderungan usia harapan hidup untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan di tahun 2017.

Jumlah penduduk Papua selama periode 2013-2017 berkembang pada tingkat pertumbuhan yang sangat terkendali dan relatif menurun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Papua sebesar 3.032,5 ribu jiwa dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 1,97%. Selanjutnya di tahun 2014 pertumbuhan penduduk Papua relatif mengalami pelambatan, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 1,93%. Kondisi ini terus berlanjut sepanjang periode 2015-2017, dimana pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 1,80%, yang terlihat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Adapun jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2017 adalah sebanyak 3.265,2 ribu jiwa (lihat Gambar 2.1414).

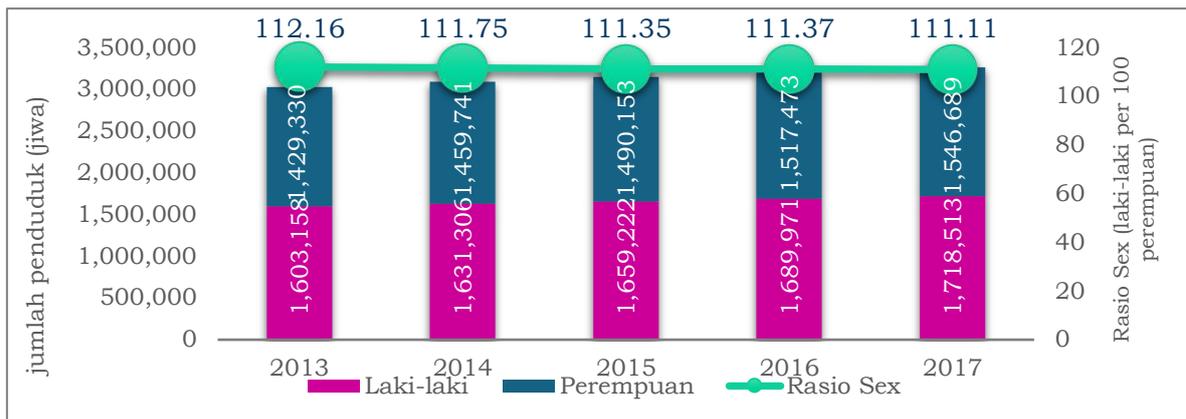
Gambar 2.14. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan (lihat Gambar 2.1515). Jumlah penduduk laki-laki tahun 2013 tercatat 1.603.158 jiwa, dan meningkat menjadi 1.718.513 jiwa pada tahun 2017. Sementara jumlah penduduk perempuan pada tahun 2013 sebesar 1.429.330 jiwa, dan meningkat menjadi 1.546.689 jiwa pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan angka Rasio Sex menjadi lebih besar dari 100, namun mempunyai kecenderungan angka yang relatif menurun. Tahun 2013 angka Rasio Sex mencapai 112,16 dan menurun menjadi 111,11 di tahun 2017.

Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Kemudian dari persebaran penduduk di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua terlihat tidak merata. Terdapat kabupaten/ kota yang memiliki luas wilayah yang sangat luas namun jumlah penduduk yang berada di kabupaten/kota tersebut sedikit, sebaliknya ada kabupaten/kota dengan luas wilayah yang kecil tetapi memiliki jumlah penduduk yang besar. Daerah dengan penduduk terbesar, terlihat di kota Jayapura, dengan tingkat kepadatannya tertinggi di Provinsi Papua di tahun 2017 sebesar 309,02 jiwa per km² luas wilayah. Adapun yang paling rendah di Kabupaten Mamberamo Raya, hanya sebesar 0,80 jiwa per km² (lihat Tabel 2.11).

Tabel 2.11. Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Kepadatan 2017 (jiwa/km ²)	Pertumbuhan 2013-2017 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
Anim Ha	Merauke	223.389	4,71	1,56	105,02
	Boven Digoel	66.209	2,68	2,32	116,82
	Mappi	94.671	4,08	1,84	100,96
	Asmat	92.909	3,76	2,25	104,03
	Total/Rata-rata	477.178	3,81	1,99	106,71
La Pago	Jayawijaya	212.811	91,29	1,18	105,40
	Puncakjaya	123.591	50,52	2,49	124,06
	Yahukimo	187.021	12,42	1,66	105,00
	Peg. Bintang	73.473	5,01	1,47	107,21
	Tolikara	136.576	22,21	2,17	118,91
	Nduga	97.012	16,65	3,09	123,99
	Lanny Jaya	176.687	51,37	2,34	114,66
	Mamb. Tengah	47.487	14,03	2,70	113,75
	Yalimo	60.822	16,62	2,59	114,13
	Puncak	107.822	19,19	1,92	109,78
	Total/Rata-rata	1.223.302	29,93	2,16	113,69
Mee Pago	Nabire	145.101	31,89	1,39	112,80
	Paniai	170.193	8,23	1,35	107,83
	Mimika	210.413	91,47	1,74	128,47

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Kepadatan 2017 (jiwa/km ²)	Pertumbuhan 2013-2017 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
	Dogiyai	94.997	21,01	1,55	98,26
	Intan Jaya	48.318	5,18	2,72	100,57
	Deiyai	72.206	31,04	2,07	105,10
	Total/Rata-rata	741.228	31,47	1,80	108,84
Saireri	Kep. Yapen	95.007	19,25	1,88	105,70
	Biak Numfor	144.697	11,12	1,73	107,00
	Waropen	29.480	5,48	2,31	106,11
	Supiori	19.104	30,12	3,00	103,41
	Total/Rata-rata	288.288	16,49	2,23	105,55
Mamta	Jayapura	125.975	8,75	1,48	111,13
	Sarmi	38.210	2,74	1,85	114,48
	Keerom	55.018	6,10	1,53	115,46
	Mamb. Raya	22.313	0,80	3,06	104,35
	Kota Jayapura	293.690	309,02	1,89	115,98
	Total/Rata-rata	535.206	65,48	1,96	112,28
Provinsi Papua		3.265.202	10,31	1,87	111,11

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Walaupun kepadatan penduduknya rendah, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya selama tahun 2013-2017 terlihat paling tinggi di Provinsi Papua bersama dengan Kabupaten Nduga. Laju pertumbuhan penduduk di Mamberamo Raya dan Nduga berkisar diantara 3,06-3,09% per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang terendah di Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 1,18% per tahun untuk periode yang sama.

Jika diperhatikan pada perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, terlihat di seluruh kabupaten/kota wilayah Papua mempunyai angka Rasio Sex di atas 100, terkecuali Kabupaten Dogiyai yang memiliki Rasio Sex di bawah 100 yakni 98,26 laki-laki per 100 perempuan, yang mengindikasikan bahwa diantara jumlah penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa terdapat penduduk laki-laki sebanyak 98 jiwa. Dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sementara daerah dengan angka rasio sex yang tertinggi adalah Kabupaten Nduga mencapai 123,99 laki-laki per 100 perempuan.

Ditinjau berdasarkan wilayah adat, diketahui bahwa wilayah yang paling banyak jumlah penduduknya adalah La Pago yakni sebanyak 1.223.302 jiwa, dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 2,16% per tahun selama periode 2013-2017, serta kepadatan penduduk mencapai 29,93 per km², dan angka Rasio Sex sebesar 13,69 laki-laki per 100 perempuan. Adapun wilayah adat yang memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Saireri (2,23% per tahun), dengan total penduduk 288.288 jiwa

yang terindikasi paling rendah untuk seluruh wilayah pembangunan. Wilayah Mamta dapat dikatakan merupakan wilayah pembangunan yang paling padat penduduknya, rata-rata sekitar 65.48 jiwa per km², namun dengan pertumbuhannya yang paling rendah bersama wilayah Mee Pago sebesar 1,96% per tahun.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan aspek kesejahteraan masyarakat merupakan upaya paling mendasar yang harus dilakukan dari segala proses pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat disajikan dalam tiga fokus utama yakni: (1) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) fokus kesejahteraan masyarakat, serta (3) fokus sosial budaya.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup aspek-aspek yang tergabung dalam isu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Secara lebih detil mencakup pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan regional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani.

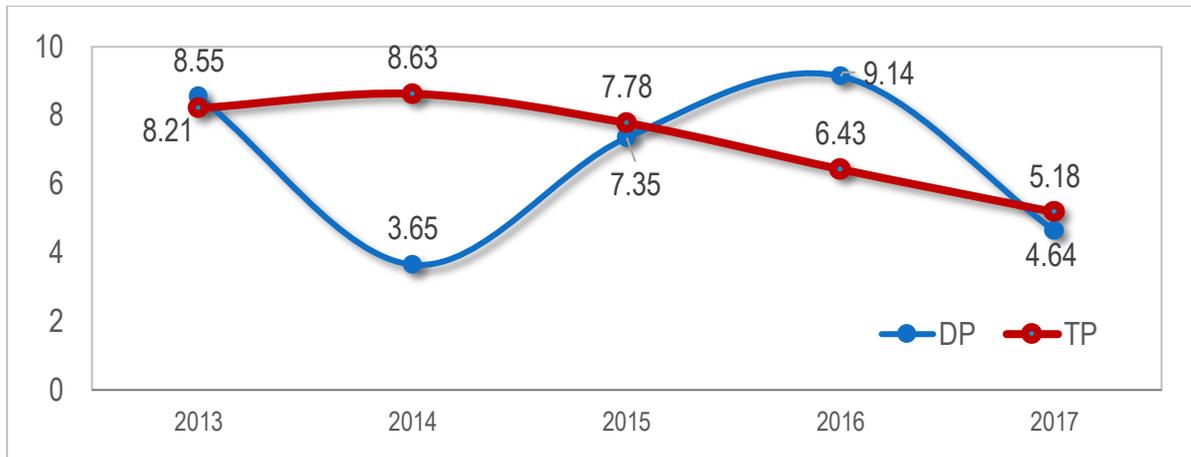
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Perkembangan ekonomi Provinsi Papua dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan komponen untuk melihat jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, yang mana untuk pengukuran pertumbuhannya lebih jauh dapat dipisahkan untuk wilayah Papua menjadi pertumbuhan PDRB dengan sektor pertambangan dan tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi Papua dengan menyertakan sektor pertambangan (DP) berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif sepanjang tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.1616).

Pertumbuhan ekonomi dengan sektor pertambangan cenderung mengalami ekspansif selama periode 2014-2016, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,86% per

tahun. Kemudian di tahun 2017 ada kontraksi kurang lebih -3,96% sehingga laju pertumbuhan di tahun tersebut melambat menjadi 5,18%. Lain halnya pertumbuhan ekonomi Papua jika diamati tanpa menyertakan sektor pertambangan, cenderung melambat selama tahun 2014-2017, dengan rata-ratanya sekitar 7,00 yang terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan sektor pertambangan.

Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (%)



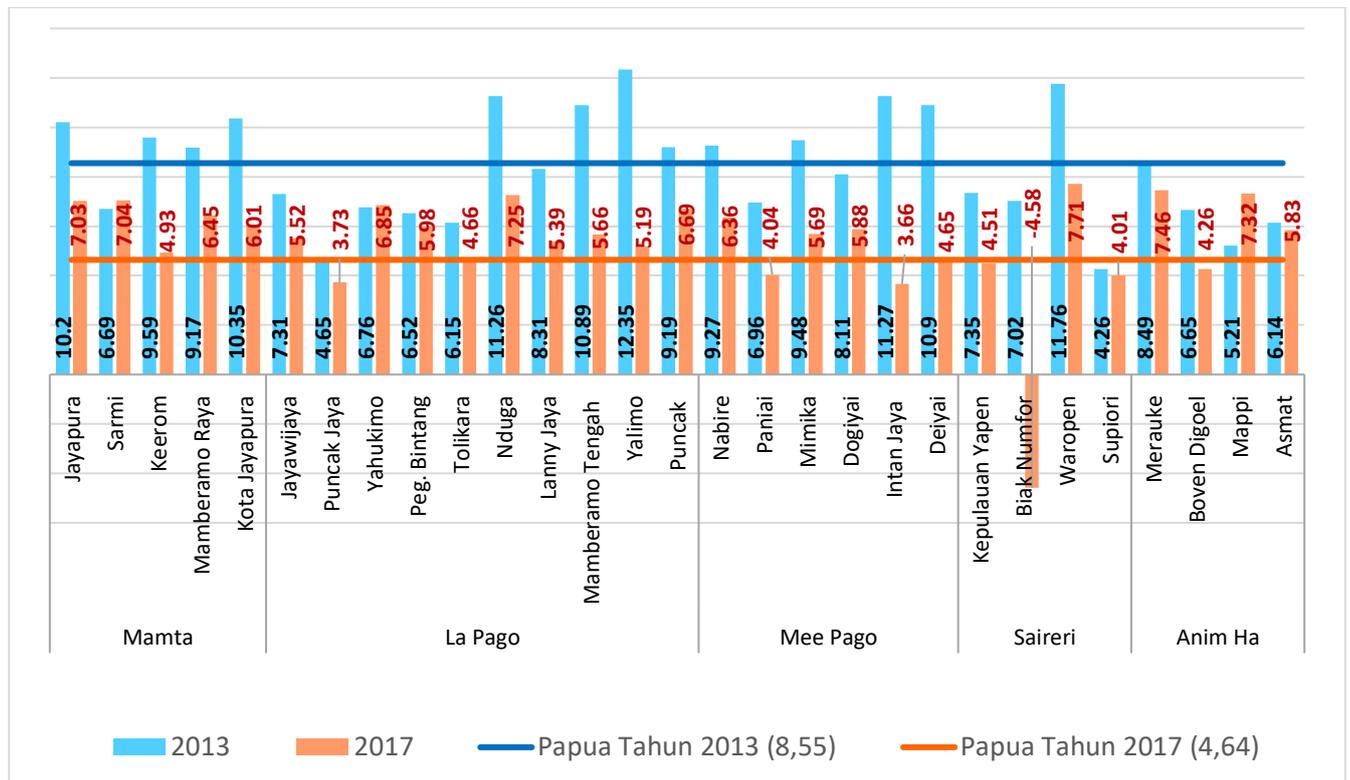
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara spasial terlihat sebagian besar wilayah kabupaten/kota mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar jika dilakukan perbandingan antara tahun 2013 dengan 2017. Pelambatan yang terbesar untuk wilayah adat Saireri adalah di Kabupaten Biak Numfor yang mengalami kontraksi rata-rata sekitar -2,90% per tahun. Kemudian untuk Mee Pago adalah Kabupaten Intan Jaya sebesar -1,90% per tahun, di La Pago adalah Kabupaten Yalimo sebesar -1,79% per tahun, di Mamta adalah Kabupaten Keerom sebesar -1,17% per tahun, dan di Anim Ha adalah Kabupaten Boven Digoel sebesar -0,60% per tahun. Lihat Gambar 2.17.

Hanya ada 3 (tiga) daerah di Papua yang dapat dikatakan mengalami ekspansif perekonomian yakni Kabupaten Mappi yang paling tinggi mencapai 0,53% per tahun, selanjutnya Sarmi sebesar 0,09% per tahun, dan terakhir Yahukimo mencapai 0,02% per tahun. Terjadinya pelambatan ekonomi di sebagian besar wilayah di Papua tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kinerja ekonomi di berbagai sektor potensial, rendahnya akses infrastruktur penggerak ekonomi dan masih lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik serta kualitas tenaga kerja yang

rendah, sehingga berimplikasi langsung terhadap rendahnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.17. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan Tambang per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara sektoral struktur perekonomian Papua terlihat kurang berimbang, oleh karena sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar PDRB dari tahun 2013 hingga 2017. Rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian per tahunnya mencapai 41,77% dengan kecenderungan yang menurun. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memiliki kontribusi yang tinggi dengan rata-rata 11,38% per tahun (lihat Tabel 2.122).

Tabel 2.12. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.66	11.89	11.66	10.87	10.80	11.38
B. Pertambangan dan Penggalian	43.56	40.84	40.60	42.08	41.78	41.77
C. Industri Pengolahan	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94	1.97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
F. Konstruksi	10.07	10.54	10.87	10.84	10.90	10.64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.71	7.98	8.04	7.88	8.00	7.92
H. Transportasi dan Pergudangan	3.88	4.14	4.23	4.19	4.24	4.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.63	0.68	0.68	0.66	0.67	0.66
J. Informasi dan Komunikasi	3.65	3.75	3.68	3.48	3.56	3.62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	1.53	1.46	1.42	1.39	1.45
L. Real Estate	2.32	2.42	2.39	2.34	2.36	2.37
M,N. Jasa Perusahaan	1.11	1.18	1.14	1.10	1.11	1.13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.47	8.27	8.55	8.59	8.56	8.29
P. Jasa Pendidikan	2.00	2.07	2.07	2.04	2.06	2.05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.42	1.50	1.52	1.50	1.51	1.49
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.00	1.05	1.05	1.02	1.03	1.03
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018

Struktur perekonomian Papua tergolong bersifat ekstratif karena ditopang oleh sektor-sektor primer seperti pertambangan dan pertanian. Adapun peranan sektor industri manufaktur masih sangat kecil dalam komposisi PDRB, rata-rata hanya 1,97% per tahun, yang terlihat lebih rendah dibandingkan sektor-sektor jasa tersier seperti perdagangan (7,92%), transportasi dan pergudangan (4,13%), informasi dan komunikasi (3,62%), administrasi pemerintahan (8,29%), dan sebagainya. Untuk itu, penguatan sektor industri dalam perekonomian wilayah menjadi kebijakan yang sangat penting dan strategis dimasa mendatang, dalam upaya mengubah struktur ekonomi ke sektor yang lebih banyak menyerap lapangan kerja, memberi pendapatan yang lebih baik, memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap sektor lainnya, dan menghasilkan efek multiplier yang lebih besar bagi wilayah lainnya.

2.2.1.2. Laju Inflasi dan Tingkat Kemahalan Harga

Kenaikan harga-harga di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 cenderung terkendali. Meskipun sempat mengalami kenaikan tinggi di tahun 2014,

namun untuk tahun 2015-2017 berikutnya terus mengalami penurunan, hingga mencapai titik terendah di tahun 2017 sebesar 2,41%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua yang dimotori oleh Bank Indonesia berperan efektif sehingga mampu mengendalikan inflasi.

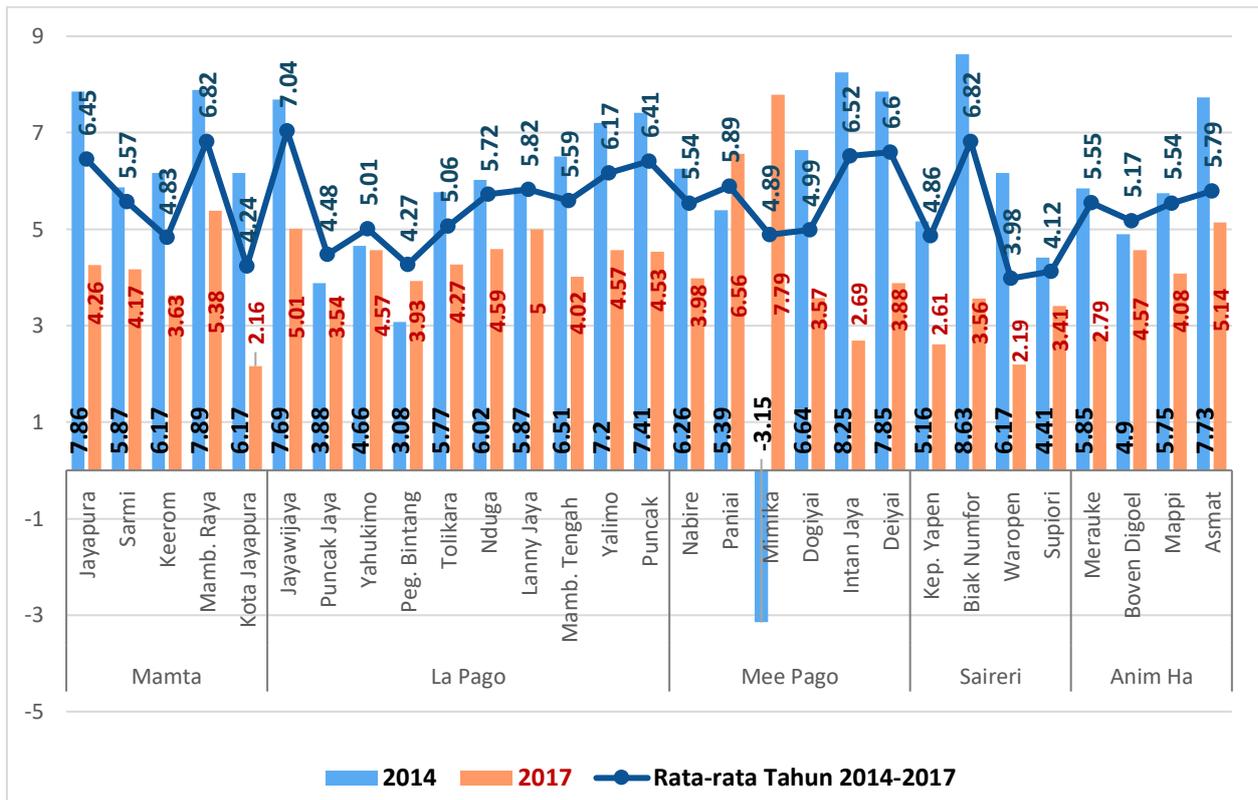
Gambar 2.18. Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Laju inflasi dapat menjadi tolak ukur bagi kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi di berbagai wilayah Papua dapat dikatakan cukup terkendali karena bergerak diantara 3,98% hingga 7,04% (lihat Gambar 2.199). Inflasi tertinggi di wilayah adat Mamta tercatat di Mamberamo Raya sebesar 6,82% per tahun sepanjang periode 2014-2017. Sedangkan untuk La Pago di Jayawijaya sebesar 7,04% per tahun. Kemudian di Mee Pago di Intan Jaya sebesar 6,52% per tahun, untuk Saireri di Biak Numfor sebesar 6,82% per tahun, dan di Anim Ha pada Kabupaten Asmat sebesar 5,79% per tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi di beberapa daerah (inflasi 5-7%) antara lain masih besarnya ketergantungan konsumsi pangan dari luar daerah (terutama beras), sulitnya akses transportasi perdagangan, tingginya harga BBM dan faktor stabilitas sosial yang berpengaruh pada tingkat kelancaran distribusi barang ke berbagai daerah pegunungan dan dataran rendah sulit akses.

Gambar 2.19. Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%)

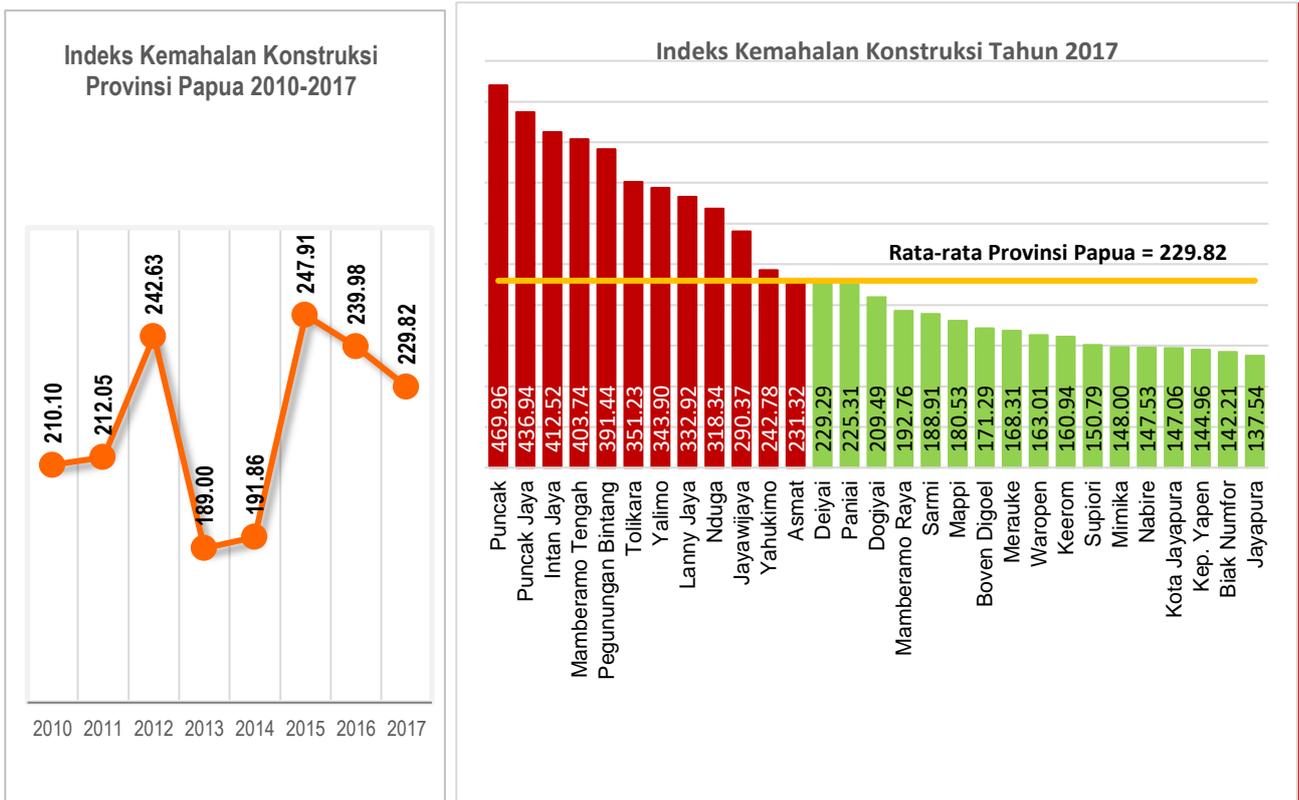


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain inflasi, permasalahan harga yang juga signifikan mempengaruhi kemiskinan di Papua selama ini adalah Tingkat Kemahalan Harga. Dalam Gambar 2.208 terlihat bahwa tingkat kemahalan harga yang direpresentasikan dengan IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) sangat tinggi. Ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200%.

Sebagian besar daerah kabupaten yang ada wilayah Papua, tampaknya belum begitu optimal untuk menekan tingkat kemahalan harga. Indikasinya dapat diperhatikan pada IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) setiap daerah di Papua yang semuanya di atas 100 poin, dimana ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200 poin, dengan IKK yang tertinggi karena sudah di atas 300 point yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Tolikara, Lanny Jaya, dan Nduga. Kebijakan subsidi untuk menekan tingkat kemahalan harga yang telah dijalankan belum efektif karena berfokus pada sisi konsumsi, yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan daerah untuk menghasilkan sendiri barang-barang produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan produsen lokal.

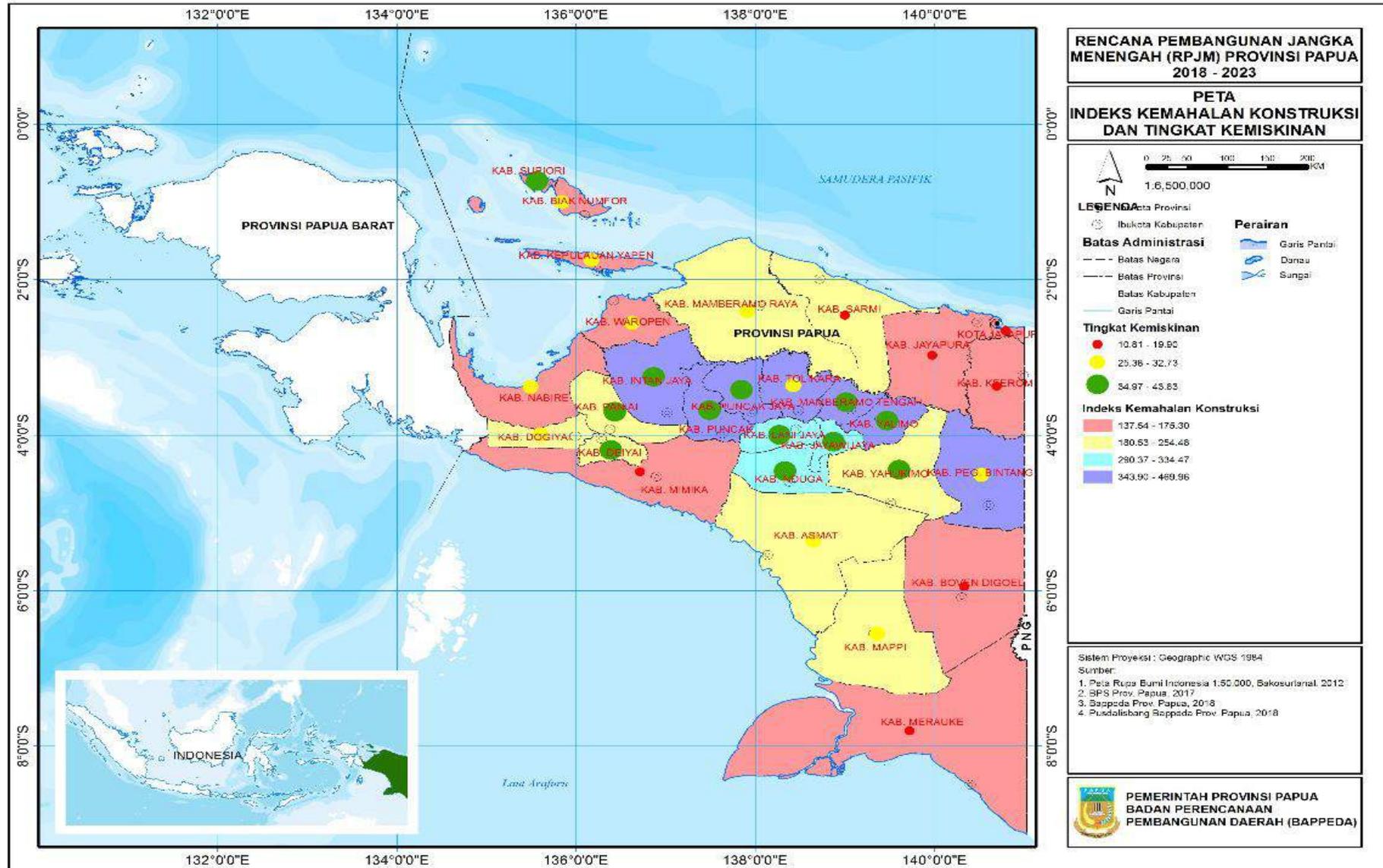
Gambar 2.20. Tingkat Kemahalan Konstruksi di Provinsi Papua



Sumber: BPS RI dan BPS Papua, 2018 (data diolah)

Terdapat kecenderungan juga bahwa daerah-daerah yang memiliki IKK tinggi merupakan daerah yang terindikasi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 2.21, hampir di semua daerah La Pago dan Mee Pago, seperti Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Yalimo yang ada di La Pago, kemudian Deyiai, Paniai, Dogiyai dan Intan Jaya yang ada di Mee Pago, memiliki tingkat kemiskinan rata-rata di atas 32% dengan IKK diatas 200%. Sementara di daerah-daerah pesisir yang ada di wilayah Adat Anim Ha, Saereri dan Mamta, cenderung memiliki IKK dan tingkat kemiskinan yang rendah. Fenomena ini memvisualisasikan bahwa ada korelasi yang erat antara tingkat kemiskinan dengan IKK, sehingga upaya untuk menurunkan IKK yang dijalankan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) selama ini perlu diteruskan lebih optimal di masa mendatang, agar akselerasi penurunan kemiskinan menjadi lebih baik.

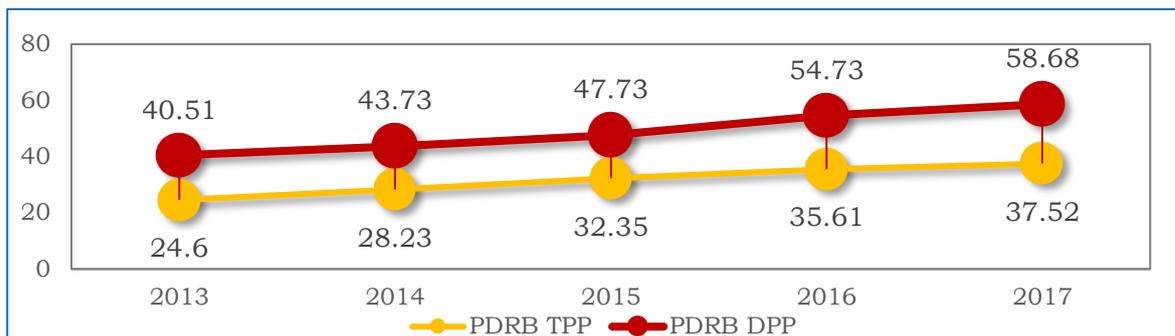
Gambar 2.21. Peta Kemahalan Konstruksi dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017



2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua secara umum mengalami peningkatan positif. PDRB perkapita dengan tambang perkembangannya menunjukkan tren positif dari tahun 2013-2017. Secara keseluruhan pertumbuhannya rata-rata mencapai 11,20% per tahun, dimana PDRB per kapita dengan tambang pada tahun 2013 tercatat sebesar 40,51 juta rupiah menjadi 58,68 juta pada tahun 2017.

Gambar 2.22. Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (juta Rp)



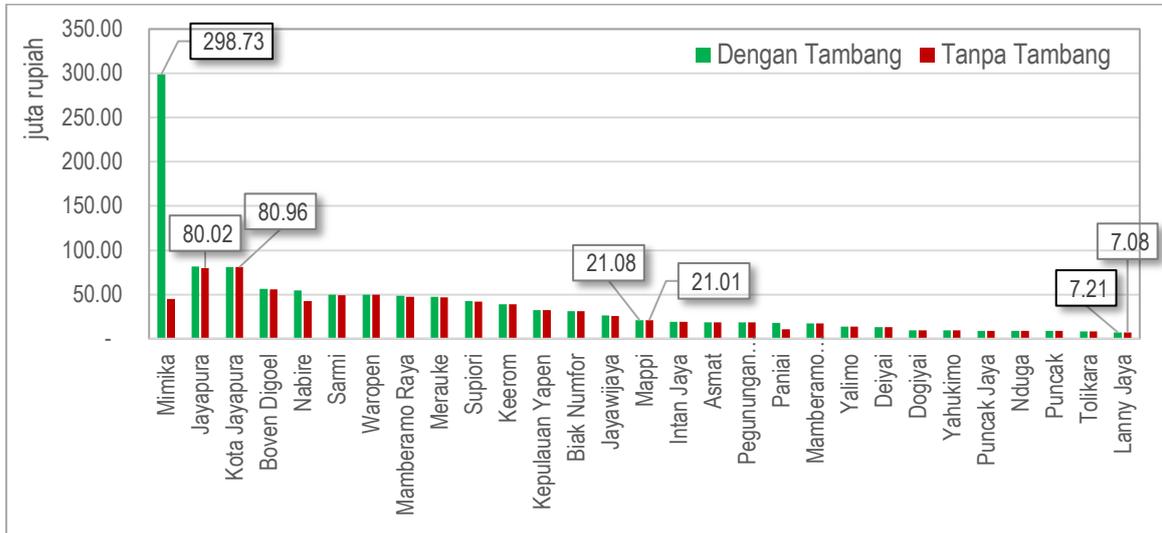
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Perhitungan pendapatan per kapita juga dapat dilakukan tanpa memasukan sektor pertambangan. Dalam hal ini, apabila diamati tanpa sektor pertambangan, tampak jelas PDRB per kapita Provinsi Papua menjadi lebih rendah. Dengan sektor pertambangan rata-rata PDRB per kapita mencapai Rp. 49.08 juta per tahun selama periode 2013-2017, sedangkan tanpa sektor pertambangan hanya sekitar Rp. 31.62 juta per tahun. Meskipun demikian ada kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita tanpa sektor pertambangan jauh lebih cepat yaitu sekitar 17.41% per tahun.

Apabila perkembangan pendapatan per kapita di Provinsi Papua diamati berdasarkan kewilayahan, Kabupaten Mimika pada tahun 2017 berdasarkan PDRB dengan tambang memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi mencapai Rp. 298,73 juta, dan yang terendah Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 7,21 juta untuk tahun yang sama (selengkapnya lihat Gambar 2.23). Terjadi ketimpangan pendapatan per kapita yang sangat mencolok di Provinsi Papua, ketika sektor pertambangan disertakan dalam perhitungan. Akan tetapi, jika perhitungan pendapatan per kapita tanpa menyertakan sektor pertambangan, terlihat deviasi antara nilai tertinggi dengan

terendah mengecil (namun tetap dalam kategori timpang), dimana pada tahun 2017 yang tertinggi adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke masing-masing sebesar Rp. 80,96 juta dan Rp. 80,02 juta, serta PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 7,08 juta.

Gambar 2.23. Pendapatan Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Dengan Tambang dan Tanpa Tambang di Provinsi Papua Tahun 2017



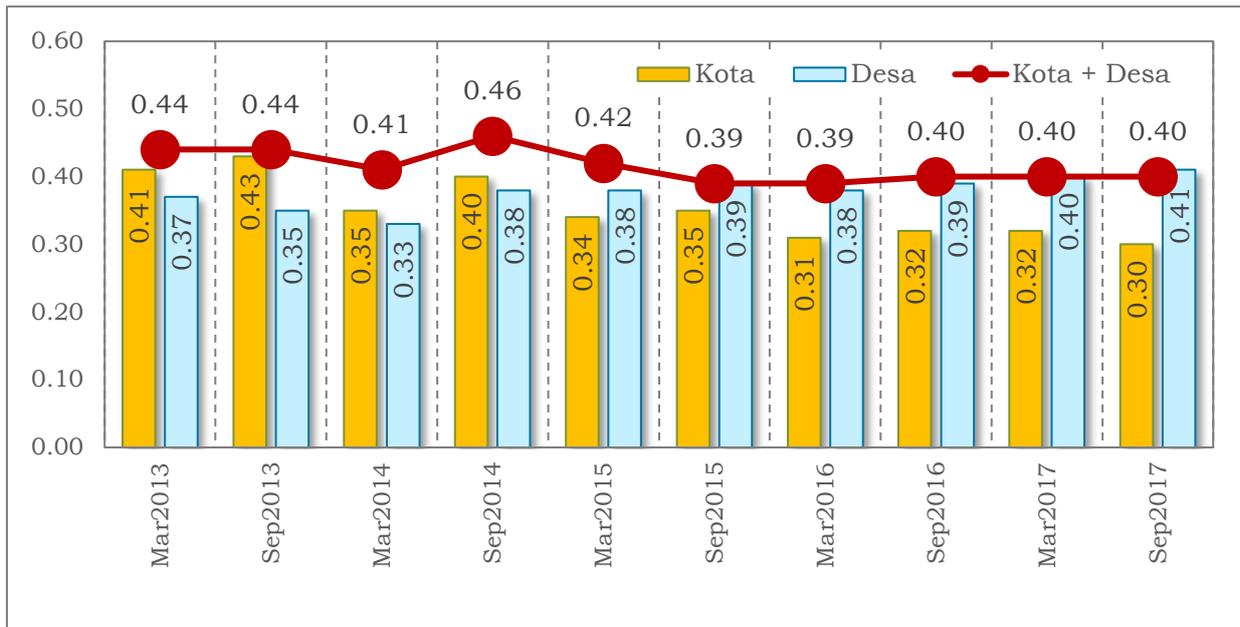
Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan

Secara konseptual ukuran ketimpangan pendapatan dapat dipilah menjadi dua bagian yakni ketimpangan antarpersonal, dan ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan antarpersonal lazimnya diukur dengan 2 (dua) cara yakni menggunakan Rasio Gini dan Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Sementara untuk ketimpangan antarwilayah, ukuran yang sederhana dan biasa digunakan adalah Indeks Williamson.

Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka Ratio Gini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2017) dan cenderung mengalami perbaikan, dengan kategori termasuk ketimpangan sedang (lihat Gambar 2.24).

Gambar 2.24. Angka Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Keterangan :

Menurut PERKA Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia, dijelaskan bahwa Daerah Perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang **memenuhi** persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumahtangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan Daerah Perdesaan adalah suatu wilayah setingkat desa/kelurahan yang **belum memenuhi** persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumahtangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Daerah perkotaan (perdefinisi BPS Provinsi Papua) memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan daerah perdesaan. Fenomena ini tercermin pada kecenderungan angka Rasio Gini perkotaan yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2017 mencapai 0,30 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan (perdefinisi BPS Provinsi Papua), selama tahun 2013-2017 distribusi pendapatannya menyebar dalam kondisi ketimpangan sedang, dan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada bulan september 2017 tercatat angka Rasio Gini untuk wilayah perdesaan sebesar 0,41 naik sekitar 0,06 poin bila dibandingkan september 2013 sebesar 0,35.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah adat, Anim Ha merupakan wilayah adat yang cenderung mengalami perbaikan ketimpangan pendapatan sepanjang tahun 2013-2016. Sedangkan wilayah lainnya cenderung mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan.

Tabel 2.13. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2013-2016

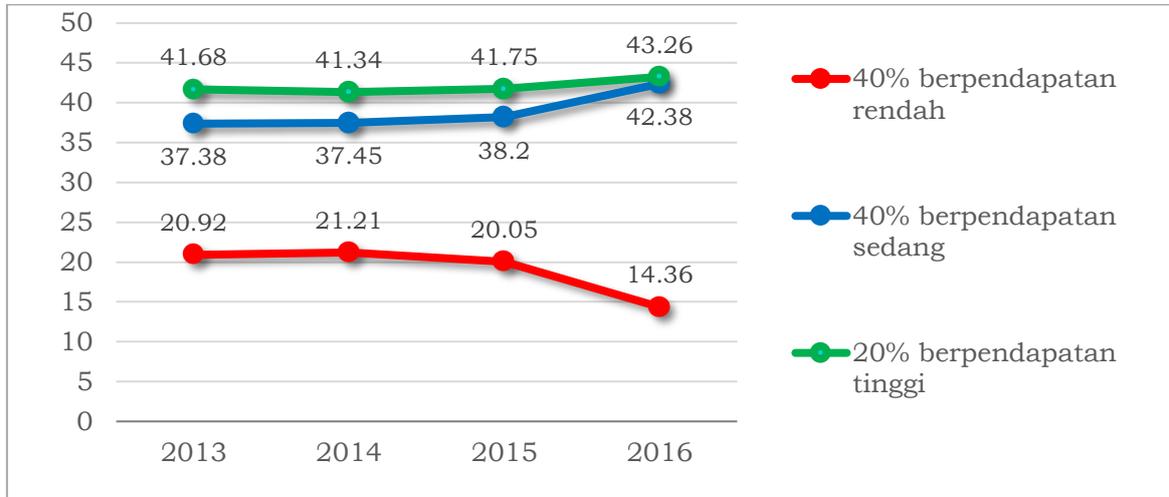
Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
Anim Ha	Merauke	0.466	0.451	0.411	0.340
	Boven Digoel	0.299	0.347	0.357	0.330
	Mappi	0.295	0.301	0.338	0.440
	Asmat	0.389	0.387	0.339	0.310
Mamta	Jayapura	0.268	0.323	0.386	0.310
	Sarmi	0.328	0.429	0.352	0.350
	Keerom	0.283	0.311	0.361	0.350
	Kota Jayapura	0.375	0.348	0.347	0.280
	Mamberamo Raya	0.309	0.265	0.234	0.300
Saereri	Biak Numfor	0.416	0.389	0.392	0.360
	KepulauanYapen	0.322	0.360	0.369	0.320
	Supiori	0.280	0.240	0.280	0.310
	Waropen	0.221	0.281	0.329	0.310
La Pago	Jayawijaya	0.367	0.336	0.397	0.340
	Yahukimo	0.271	0.299	0.257	0.250
	Pengunungan Bintang	0.146	0.220	0.268	0.290
	Tolikara	0.198	0.218	0.365	0.380
	Puncak Jaya	0.216	0.266	0.341	0.150
	LannyJaya	0.181	0.224	0.299	0.280
	Mamberamo Tengah	0.234	0.257	0.274	0.270
	Yalimo	0.259	0.212	0.135	0.190
	Puncak	0.183	0.253	0.333	0.190
	Nduga	0.199	0.222	n.a.	0.250
Mee Pago	Nabire	0.326	0.354	0.389	0.300
	Paniai	0.319	0.249	0.320	0.460
	Mimika	0.299	0.340	0.333	0.290
	Dogiyai	0.192	0.248	0.204	0.250
	Intan Jaya	0.225	0.382	0.274	0.290
	Deiyai	0.319	0.262	0.284	0.250
Papua		0.411	0.410	0.422	0.313

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016

Sepanjang tahun 2013-2016 terdapat 25 kabupaten yang memiliki distribusi pendapatan yang relatif rendah berkisar antara 0,19-0,35 di antaranya adalah Kabupaten Yalimo, Dogiyai, Nduga, Pengunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Mamberamo Raya, Supiori, Deiyai, Waropen, Tolikara, Intan Jaya, Mimika, Jayapura, Keerom, Boven Digoel, Paniai, Kota Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Mappi dan Asmat. Selain itu, terdapat juga beberapa daerah dengan kondisi tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dan belum merata di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Sarmi, Biak Numfor dan Merauke. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang begitu tinggi ternyata lebih banyak dinikmati oleh 20% penduduk yang berpendapatan tinggi. Dalam Gambar 2.2525 diketahui adanya peningkatan proporsi penduduk yang berpendapatan tinggi, yaitu dari 41,68% di tahun 2013 menjadi 43,26% di tahun 2016. Sementara proporsi penduduk

berpendapatan rendah cenderung menurun dari 20,92% pada tahun 2013 menjadi 14,36% pada tahun 2016.

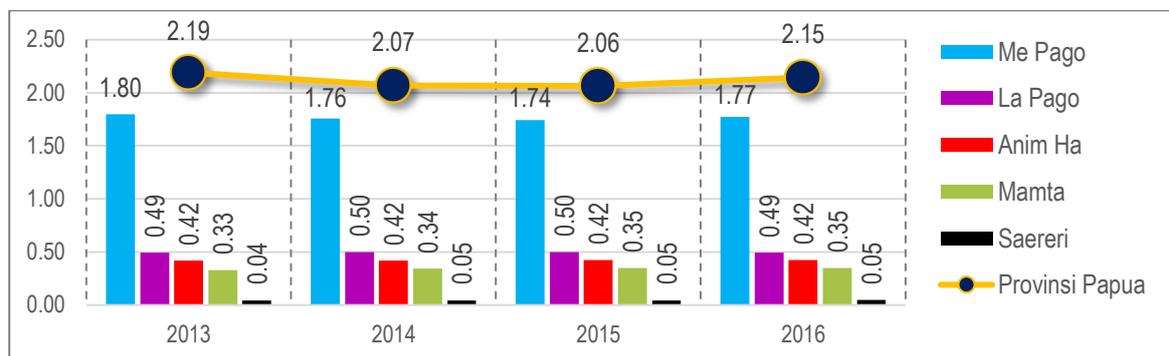
Gambar 2.25. Distribusi Pendapatan Menurut Kategori Bank Dunia



Sumber: BPS Papua, 2017 (data diolah)

Selain antar penduduk, distribusi pendapatan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah antar wilayah. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah lazim digunakan indikator Williamson Index (WI).

Gambar 2.26. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index dengan Menyertakan Sektor Pertambangan



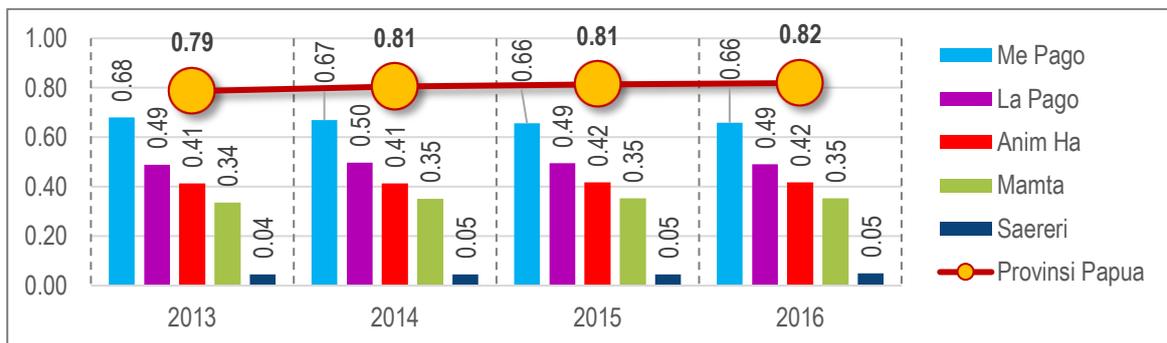
Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Williamson Index (lihat Gambar 2.2626), terindikasi bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Papua selama periode 2013-2016 selalu diatas normal karena melampaui batas maksimal nilai WI di atas 1, yakni sebesar 2,19 point pada tahun 2013 sampai dengan 2,15 point di tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan yang sangat besar sekali antara PDRB per kapita

tertinggi dengan yang terendah saat disertakan sektor pertambangan dalam perhitungan WI. Kabupaten Mimika dengan sektor tambang menjadi *outlier* (data pencilan) dalam pengukuran WI tersebut. Jika ditelusuri berdasarkan wilayah pembangunan berbasis adat, terlihat jelas ketimpangan antar wilayah paling tinggi dengan nilainya di atas normal hanya terjadi di wilayah Me Pago, oleh karena ada penguasaan pangsa PDRB yang sangat besar oleh Kabupaten Mimika. Sementara untuk wilayah La Pago, Anim Ha, Saereri, dan Mamta ketimpangan pendapatannya masing-masing tidak terlalu mencolok berkisar diantara 0,49 poin yang tertinggi di La Pago dan sebesar 0,05 poin di Saereri.

Kondisi yang berbeda ketika perhitungan WI tanpa menyertakan sektor pertambangan terlihat nilai indeksnya di bawah angka maksimum yaitu sekitar 0,79 point di tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 0,82 di tahun 2016 (lihat Gambar 2.277). Kecenderungan ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Papua selama periode 2013-2016 belum dapat membaik secara optimal. Dimana ketimpangan tertinggi terjadi di wilayah Me Pago, kemudian La Pago, Anim Ha, Mamta, dan terendah di wilayah Saereri.

Gambar 2.27. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index Tanpa Sektor Pertambangan



Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Meskipun disadari bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Papua semenjak tahun 2014 hingga sekarang memiliki dampak dalam jangka panjang, namun sebenarnya untuk jangka pendek manfaatnya dapat dirasakan segera oleh masyarakat Papua guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sebagai misal, pembangunan Trans Papua yang sudah dikerjakan pemerintah pusat hingga mencapai 2.905,75 km atau 89,15% dari total

panjang yang direncanakan, dapat dimanfaatkan segera oleh setiap daerah kabupaten/kota yang dilalui jalur Trans Papua tersebut untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Contohnya untuk Kabupaten Yalimo yang menjadi pintu transit penghubung antara Kota Jayapura yang ada di pesisir dengan Kota Wamena yang ada di pegunungan, dapat mengambil manfaat dari beroperasinya trans papua Jayapura-Wamena dengan membangun kawasan ekonomi baru di Distrik Benawa dan Abenaho. Begitu juga dengan Kabupaten Keerom dapat menjadikan Distrik Senggi sebagai pusat pertumbuhan baru, dan Distrik Lereh di Kabupaten Jayapura.

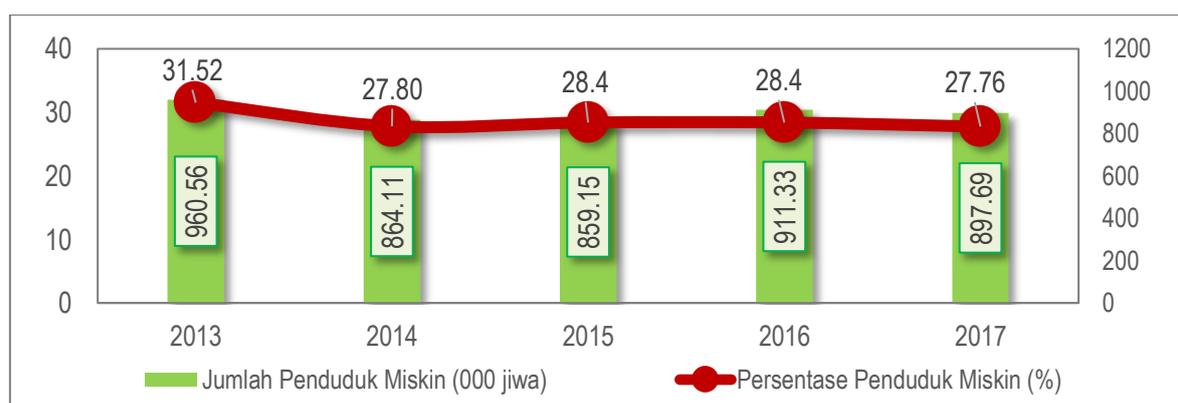
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1. Kemiskinan

Jika mengamati perkembangan tingkat kemiskinan selama tahun 2013-2017, kemiskinan di Provinsi Papua terus mengalami penurunan, meskipun sempat di tahun 2015 naik 0,6 poin, namun penurunan kemiskinan bisa dipercepat kembali sampai dengan tahun 2017, hingga menjadi 27,76%. (lihat Gambar 2.288). Dengan kata lain Provinsi Papua berhasil mempercepat penurunan kemiskinan kurang lebih -0,94% per tahun selama periode 2013-2017.

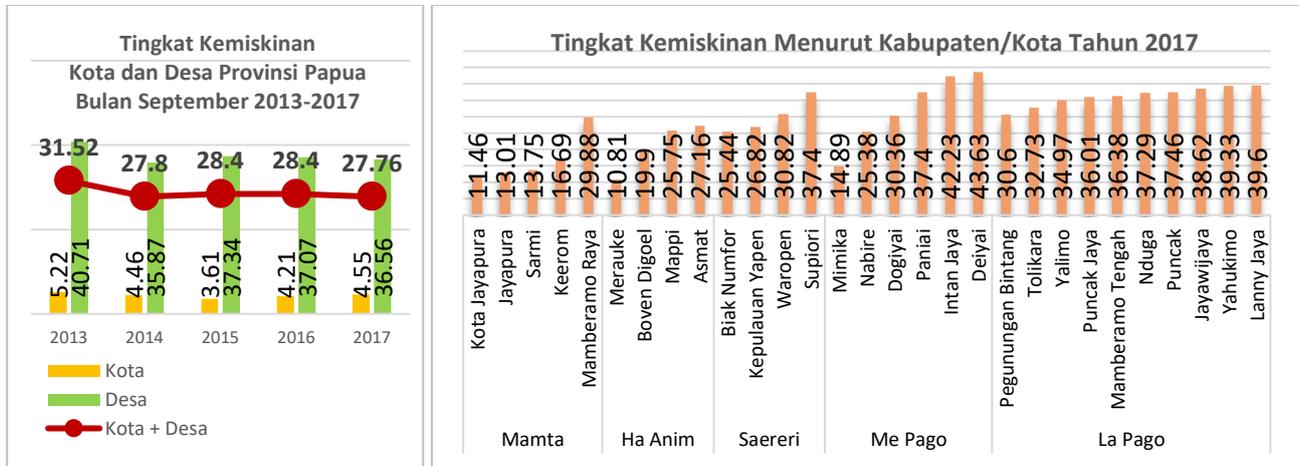
Gambar 2.28. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Papua



Sumber: BPS Papua, 2017 (data diolah)

Menurut kewilayahan, daerah yang paling miskin selama ini adalah di perdesaan. Sampai tahun 2017 (September) tercatat kemiskinan di perdesaan mencapai 36,56%, atau turun -0,51% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan di perkotaan sebesar 4,55% yang juga turun dibandingkan tahun 2016.

Gambar 2.29. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%)



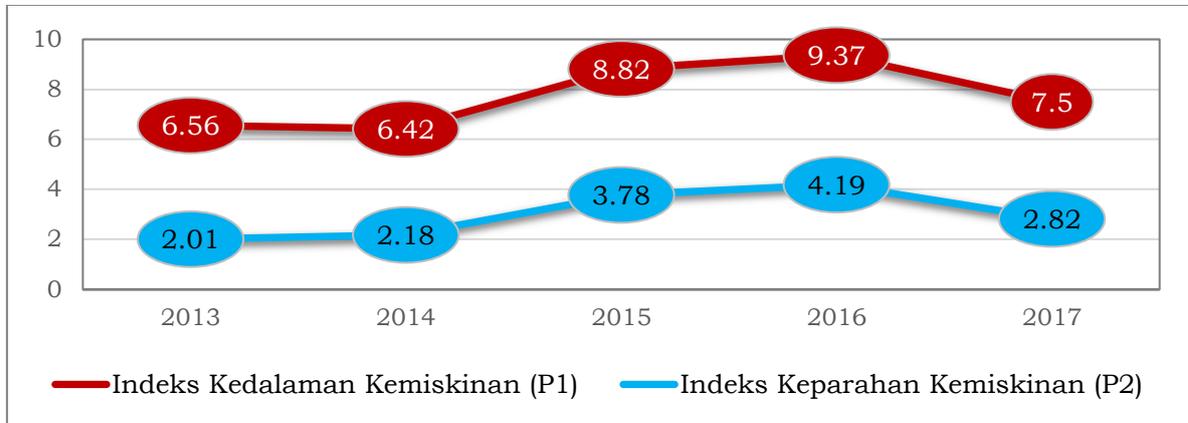
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara kumulatif selama tahun 2017, jika dipilah berdasarkan kabupaten/kota, terlihat kabupaten Deiyai sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.29). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Deiyai adalah 43,63% yang masuk kawasan pembangunan Mee Pago. Posisi kedua terbesar adalah kabupaten Intan Jaya dengan angka 42,23% yang keduanya masuk kawasan pembangunan La Pago. Sedangkan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah adalah kabupaten Merauke dengan angka 10,81% yang masuk kawasan pembangunan Mamta, yang diikuti oleh kota Jayapura dengan angka 11,46% dan kabupaten Jayapura dengan angka 13,01% yang keduanya masuk kawasan pembangunan Mamta. Jika diambil rata-ratanya per wilayah adat, dapat dikatakan bahwa wilayah La Pago mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi di Papua yaitu sebesar 36,30%, menyusul wilayah Me Pago sebesar 32,32%, Saireri sebesar 30,12%, Ha Anim sebesar 20,91%, dan Mamta sebesar 16,96%.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Di mana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Gambar 2.30. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%)

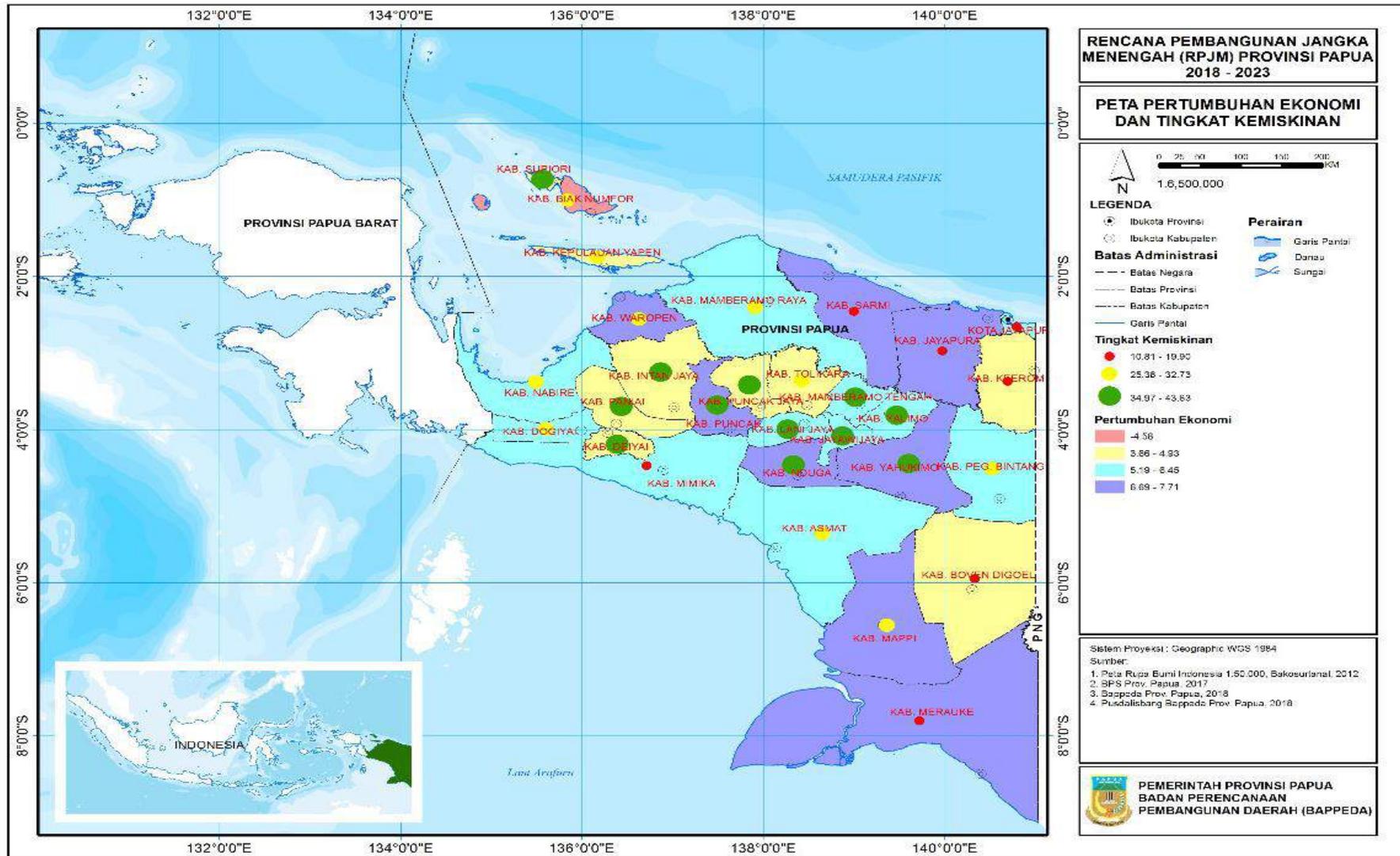


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, rata-rata naik 2,81% per tahun. Kemudian menurun di tahun 2017 sebesar 1,87% menjadi 7,5%, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, sehingga rata-rata tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 relatif kelihatan naik sebesar 0,24% per tahun.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua selama ini tampaknya kurang berdampak signifikan terhadap akselerasi penurunan kemiskinan. Fenomena ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan tinggi dibandingkan penduduk yang berpendapatan rendah. Sehingga efek multiplier yang dihasilkan perekonomian kurang optimal mendorong pendapatan penduduk miskin di atas garis kemiskinan. Dalam konteks kewilayahan hal ini terlihat jelas. Dimana berdasarkan Gambar 2.31, diketahui bahwa tidak semua daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinannya rendah. Begitu sebaliknya, pertumbuhan yang rendah ternyata tidak diikuti dengan kemiskinan yang tinggi.

Gambar 2.31. Peta Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017



2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua yang diindikasikan oleh IPM cenderung terus mengalami peningkatan, namun demikian masih dalam kategori IPM rendah, dan juga paling rendah di Indonesia. Dimana komponen pembentuk IPM yang paling cepat tumbuh selama ini adalah Harapan Lama Sekolah. Adapun untuk Angka Harapan Hidup, kontribusinya terhadap pertumbuhan IPM sangat rendah.

Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017

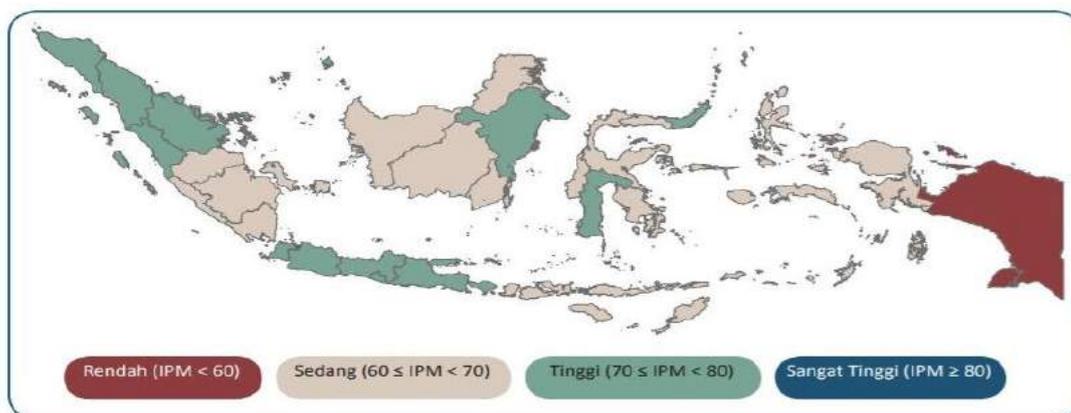
Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (thn)	64,76	64,84	65,09	65,12	65,14
Harapan Lama Sekolah (thn)	9,58	9,94	9,95	10,23	10,54
Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	5,74	5,76	5,99	6,15	6,27
Pengeluaran (Rp. ribu)	6.394	6.416	6.469	6.637	6.996
IPM	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09
Rank IPM Papua Di Indonesia	34	34	34	34	34

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM yang merefleksikan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan AHH di provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan, namun berjalan lambat dan masih dibawah angka maksimum. Tahun 2013, Angka Harapan Hidup 64,76 tahun meningkat 0,83 poin menjadi 65,14 tahun pada tahun 2017, dan masih belum mencapai angka maksimum 85 tahun.

Berdasarkan data capaian yang ada terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah maupun Angka Rata-rata Lama Sekolah masih jauh di bawah angka ideal dan bergerak sangat lambat. Meskipun demikian pergerakan kedua indikator tersebut sepanjang lima tahun ke arah yang lebih baik. Terlihat bahwa selama tahun 2013-2017, kenaikan rata-rata angka harapan lama sekolah mencapai 2.43 poin per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 2.24 poin per tahunnya. Terakhir untuk komponen pengeluaran per kapita Provinsi Papua sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Papua adalah sebesar Rp. 6.582,40 per tahun. Berdasarkan capaian dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran tersebut terlihat bahwa IPM di provinsi Papua tahun 2013-2017, dikategorikan IPM rendah dengan peningkatan rata-rata mencapai 1.24 point setiap tahunnya dengan capaian 59,09 point pada tahun 2017 dan menduduki ranking ke 34 di Indonesia (lihat Gambar 2.32).

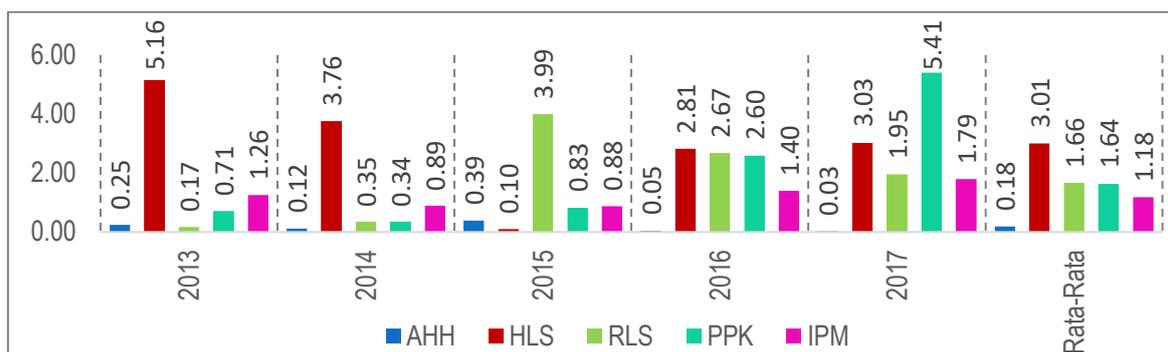
Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2017



Sumber: BPS RI (2018)

Komponen pembentuk IPM yang paling cepat tumbuh selama ini adalah Harapan Lama Sekolah, yang tercatat selama tahun 2013-2017 mencapai 3,01% per tahun. Sedangkan yang kedua cepat tumbuh adalah angka rata-rata lama sekolah yaitu 1,66% per tahun, kemudian komponen pengeluaran per kapita sekitar 1,64% per tahun, dan yang terendah adalah angka harapan hidup hanya 0,18 per tahun. Secara keseluruhan pertumbuhan IPM Papua kurang lebih 1,18% per tahun.

Gambar 2.33. Tingkat Pertumbuhan IPM Beserta Komponennya di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam Gambar 2.3434 diketahui bahwa IPM kabupaten/kota di wilayah Papua sepanjang tahun 2013-2017 sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2017 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 79,23 poin. Kemudian di ikuti dengan Kabupaten Mimika pada urutan ke-2, dan Kabupaten Biak Numfor di urutan ke-3. Adapun pada

tahun 2017 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Nduga (urutan ke 29), Puncak (urutan 28) dan Pegunungan Bintang (urutan ke 27).

Gambar 2.34. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Daerah yang mengalami perubahan peringkat IPM sepanjang tahun 2013-2017 adalah sebanyak 10 Kabupaten. Dimana yang memiliki perubahan dalam peringkat IPM yang mengarah pada pergerakan positif (peringkat naik) adalah Kabupaten Jayawijaya, Asmat, Mamberamo Raya dan Lanny Jaya. Sedangkan daerah dengan pergeseran peringkat IPM mengalami perubahan ke arah negatif (peringkat turun) antara lain Kabupaten Paniai, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Intan Jaya dan Deiyai.

Melihat kecenderungan berbagai komponen pembentuk IPM selama ini, terindikasi bahwa sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Papua telah berhasil membangun sektor kesehatan. Namun untuk pembangunan di bidang pendidikan dan ekonomi masih belum maksimal, yang diindikasikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah yang masih dibawah Wajib Belajar Sembilan Tahun, dan pengeluaran per kapita yang relatif di bawah garis kemiskinan.

2.2.3. Fokus Pendidikan

Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan yaitu akses, mutu dan tata kelola. Secara makro akses pendidikan dapat diindikasikan dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sementara untuk mutu pendidikan, salah satunya dapat digambarkan melalui kecenderungan indikator

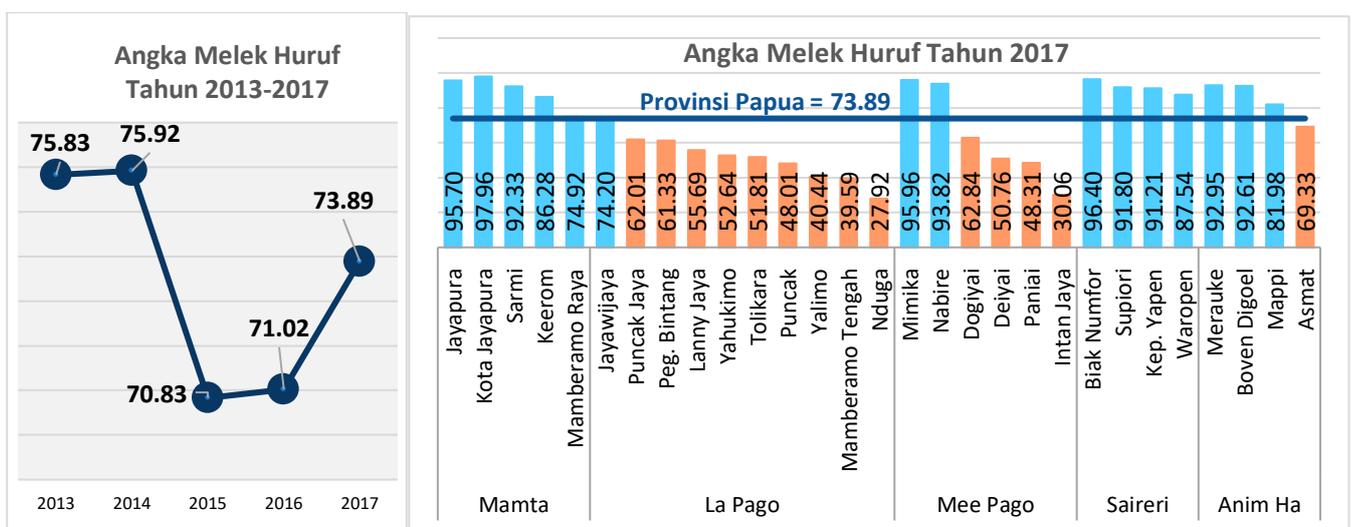
Angka Melek Huruf. Adapun untuk tata kelola, karena pembahasannya lebih bersifat mikro, akan dibahas pada konteks pembangunan menurut urusan berikutnya.

2.2.3.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi literasi suatu masyarakat disuatu daerah. Angka melek huruf ini merupakan salah satu komponen penentu tingkat kualitas pembangunan pendidikan di suatu daerah. Oleh karena itu Angka Melek huruf merupakan bagian dari indikator penting pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan. Provinsi Papua tampaknya kurang optimal untuk meningkatkan penduduk yang melek huruf sepanjang tahun 2013-2017.

Dalam Gambar 2.3533 terlihat bahwa AMH (Angka Melek Huruf) Provinsi Papua pada tahun 2013 hanya sebesar 75,83% dan menurun menjadi 73,89% pada tahun 2017. Meskipun demikian, untuk periode 2015-2017 ada kecenderungan peningkatan AMH dengan rata-rata 1,02% per tahun. Jika diperhatikan menurut kabupaten/kota, terpetakan cukup banyak daerah kabupaten yang mempunyai AMH di bawah rata-rata provinsi, semuanya di wilayah pegunungan (La Pago dan Mee Pago).

Gambar 2.35. Angka Melek Huruf di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari Gambar 2.3535 tampak jelas bahwa masih ada beberapa kabupaten yang mencapai AMH di bawah 70%. Bahkan 6 (enam) diantaranya dibawah 50% yaitu

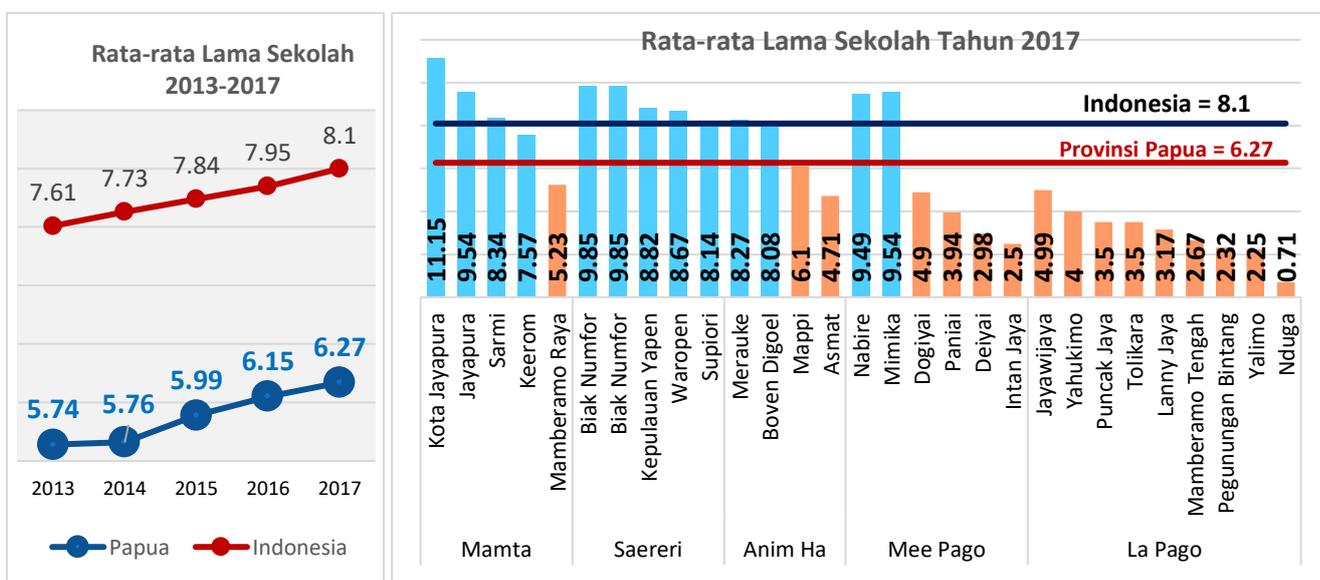
Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Paniai. Dimana Kabupaten Nduga memiliki AMH yang terendah di Papua hanya sebesar 27,92% pada tahun 2017. Dengan kata lain sekitar 72,08% penduduknya yang berusia diatas 15 tahun mengalami buta huruf.

Di samping itu juga terjadi ketimpangan yang sangat mencolok dalam pengentasan buta huruf melalui peningkatan AMH antar daerah di wilayah Papua. Pada umumnya daerah-daerah yang sulit akses baik itu di dataran rendah maupun pegunungan mempunyai AMH yang rendah, rata-rata dibawah AMH Papua. Sedangkan di daerah yang mudah akses, sebagian besar sudah di atas AMH Papua, dan beberapa diantaranya telah mencapai angka 100% seperti Kabupaten Merauke, Biak Numfor, Mimika, dan Waropen, atau yang mendekati 100% misalkan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Mamberamo Raya.

2.2.3.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Gambar 2.36. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana hingga tahun 2017 tercatat RLS Provinsi Papua hanya mencapai 6,27 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dalam menyerap penduduk usia sekolah. Beberapa daerah di Provinsi Papua telah memiliki capaian RLS yang cukup baik, namun sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua masih memiliki capaian RLS yang relatif rendah (lihat Gambar 2.3636).

Sebaran capaian RLS kabupaten/kota diatas menunjukkan rata-rata RLS yang paling tinggi di Papua adalah wilayah Mamta dengan capaian tertinggi berada di Kota Jayapura sebesar 11,15 tahun di tahun 2017, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 5,23 tahun. Adapun untuk wilayah pembangunan yang paling rendah RLS di seluruh Provinsi Papua adalah La Pago dengan nilai rata-rata hanya 2,9 tahun pada tahun 2017, dimana Kabupaten Nduga merupakan yang terendah di wilayah La Pago dan Provinsi Papua yakni 0,71 tahun, yang berarti sebagian besar penduduknya banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SD.

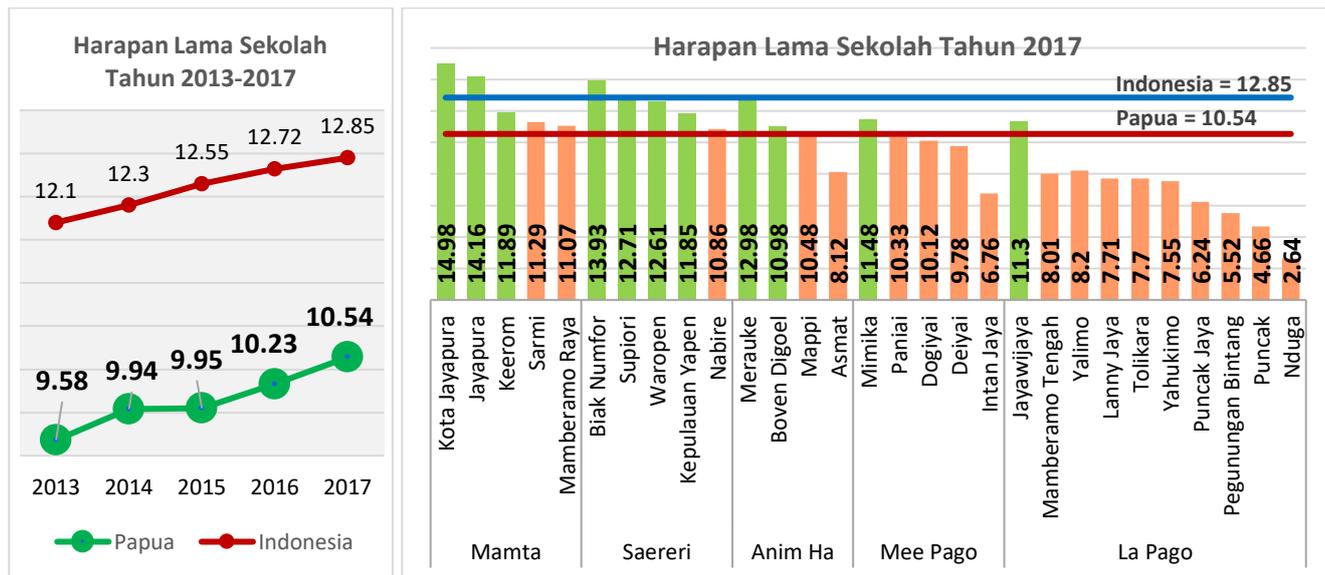
Untuk wilayah Mee Pago terlihat relatif lebih baik dibandingkan La Pago, meskipun masih dibawah 6 tahun. RLS pada tahun 2017 di wilayah Mepago kurang lebih mencapai 5,56 tahun dengan RLS terendah di Kabupaten Intan Jaya sebesar 2,5 tahun, dan tertinggi di Kabupaten Mimika sebesar 9,54 tahun. Berikutnya di wilayah Anim Ha, pada tahun 2017 secara rata-rata bisa mencapai 6,79 tahun. Dengan RLS tertinggi di Kabupaten Merauke sebesar 8,27 tahun, dan terendah di Kabupaten Asmat sebesar 4,71 tahun. Terakhir untuk wilayah Mamta, karena di topang oleh RLS Kota Jayapura yang paling tinggi yakni 11,15 tahun, akhirnya secara rata-rata capaian RLS di wilayah tersebut dapat mencapai 8,37 tahun. Dimana yang paling rendah di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 5,23 tahun. Semua fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan masyarakat di kelima wilayah adat tersebut dalam mengakses layanan pendidikan, yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan sehingga akses dan kualitas pendidikan antar wilayah menjadi berbeda sangat nyata.

2.2.3.3. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara umum, perkembangan HLS Provinsi Papua mengalami sedikit peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun capaian HLS Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,24 poin per tahun, dimana pada tahun 2017 diperkirakan HLS Provinsi Papua mencapai 10,54 tahun, yang mengindikasikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 10,54 tahun atau setara dengan kelas 1 SLTA, berarti masih dibawah jenjang pendidikan diploma/pendidikan tinggi (lihat Gambar 2.377).

Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018

Secara umum, Mamta merupakan wilayah adat dengan rata-rata HLS tertinggi di Papua, sedangkan untuk yang terendah di wilayah Lapago. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah adat Mamta, Kota Jayapura mempunyai HLS paling tinggi yakni sebesar 14,98 tahun pada akhir tahun 2017, sedangkan Kabupaten Mamberamo

Raya merupakan daerah yang memiliki HLS terendah yakni 11,07 tahun pada tahun yang sama. Selanjutnya, wilayah adat La Pago dengan rata-rata HLS sekitar 6,06 tahun pada tahun 2017, yang mana salah satu kabupaten di wilayah tersebut yaitu Nduga tercatat memiliki HLS yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 2,64 tahun. Kemudian untuk wilayah Mee Pago tercatat Kabupaten Mimika, Paniai dan Dogiyai diestimasi mempunyai HLS yang paling tinggi yakni masing-masing sebesar 11,48 tahun, 10,33 tahun dan 10,12 tahun. Sedangkan untuk wilayah Anim Ha, semua daerah diharapkan memiliki lama sekolah di atas 9 tahun, terkecuali untuk Kabupaten Asmat masih dibawah 9 tahun yakni sebesar 8,12 tahun.

2.2.4. Fokus Kesehatan

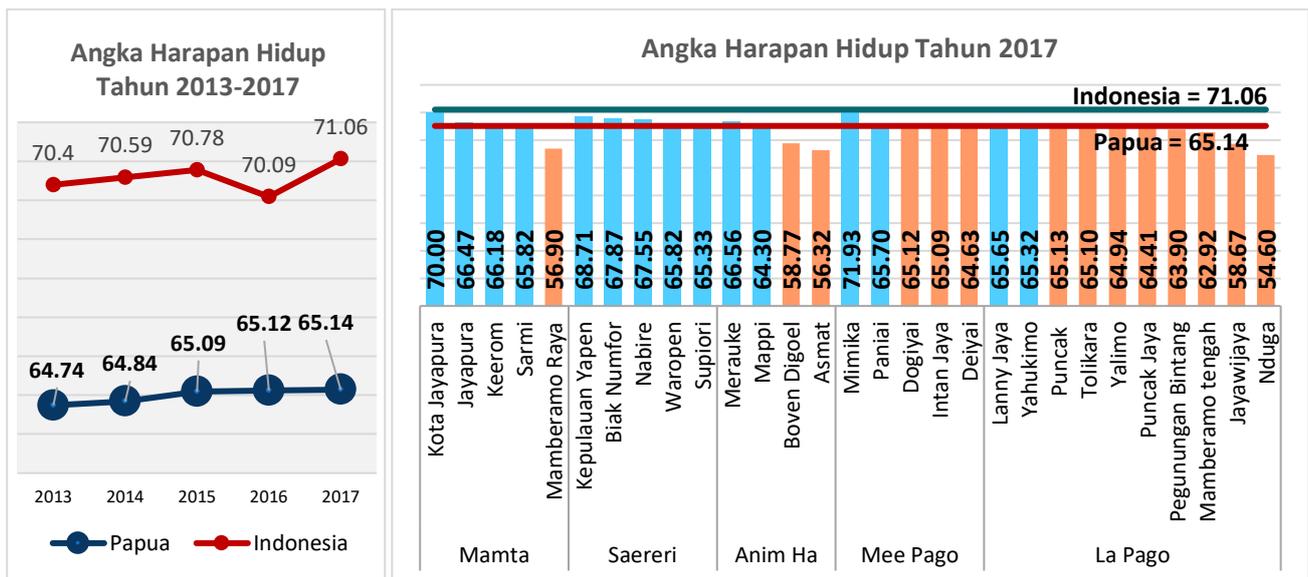
Pembangunan kesehatan di suatu daerah pada umumnya diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan yang mencakup penyediaan sarana dan prsarana kesehatan yang berkualitas dan memadai. Dalam tataran makro, indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Bayi, serta persentase balita gizi buruk dan gizi kurang. Sementara untuk upaya kesehatan masyarakat, salah satunya dapat menggunakan indikator cakupan desa siaga aktif. Namun, karena data mengenai Desa Siaga Aktif tidak tersedia, maka sebagai proksi digunakan data jumlah desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

2.2.4.1. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua. Secara umum capaian AHH Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2017 sebesar 65,14 tahun, atau naik sebesar 0,4 tahun bila dibandingkan tahun 2013. Meningkatnya AHH menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antarsektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini.

Gambar 2.38. Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2018

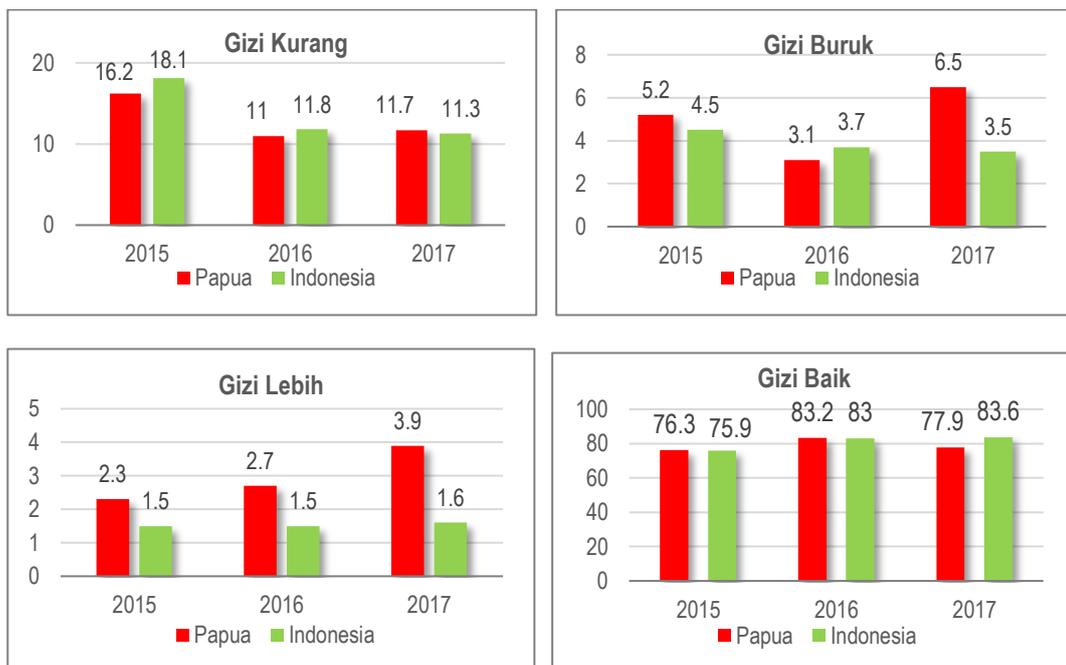
Rata-rata capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di 4 wilayah adat masih berada di bawah capaian AHH rata-rata Provinsi Papua. Saireri merupakan satu-satunya wilayah adat yang memiliki capaian rata-rata AHH di atas Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan ketimpangan ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi di wilayah adat Saireri yang mencapai 68,71 tahun pada akhir tahun 2017. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah AHH Kabupaten Mimika yang mencapai 71,93 tahun hingga akhir tahun 2017. Capaian AHH Kabupaten Mimika tersebut juga berada jauh di atas rata-rata AHH Provinsi Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Mimika relatif jauh lebih optimal dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua.

Sebaliknya, wilayah adat La Pago merupakan kawasan dengan rata-rata capaian AHH terendah di Provinsi Papua yaitu, 62,59 pada tahun 2017. Kabupaten Nduga merupakan daerah dengan capaian AHH terendah di wilayah adat Lapago yaitu sebesar 54,6 tahun sedangkan, Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten di wilayah adat La Pago.

2.2.4.2. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. Status gizi buruk bayi usia 0-23 bulan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan, karena selama tahun 2015-2017 kecenderungannya mengalami peningkatan, yakni dari 5,2% di tahun 2015 menjadi 6,5% di tahun 2017. Padahal untuk jangka waktu yang sama secara keseluruhan gizi buruk di Indonesia mengalami penurunan. Angka gizi buruk di Papua juga terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 3,5%.

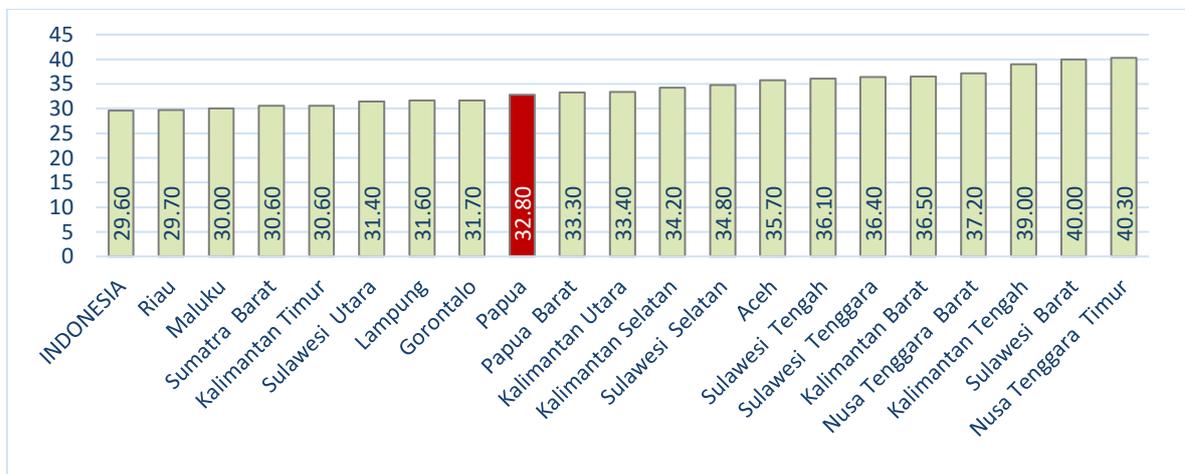
Gambar 2.39. Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015-2017 (%)



Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Provinsi Papua termasuk paling tinggi memiliki stunting di atas rata-rata Indonesia bersama 19 provinsi lainnya (lihat Gambar 2.409).

Gambar 2.40. Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%)



Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

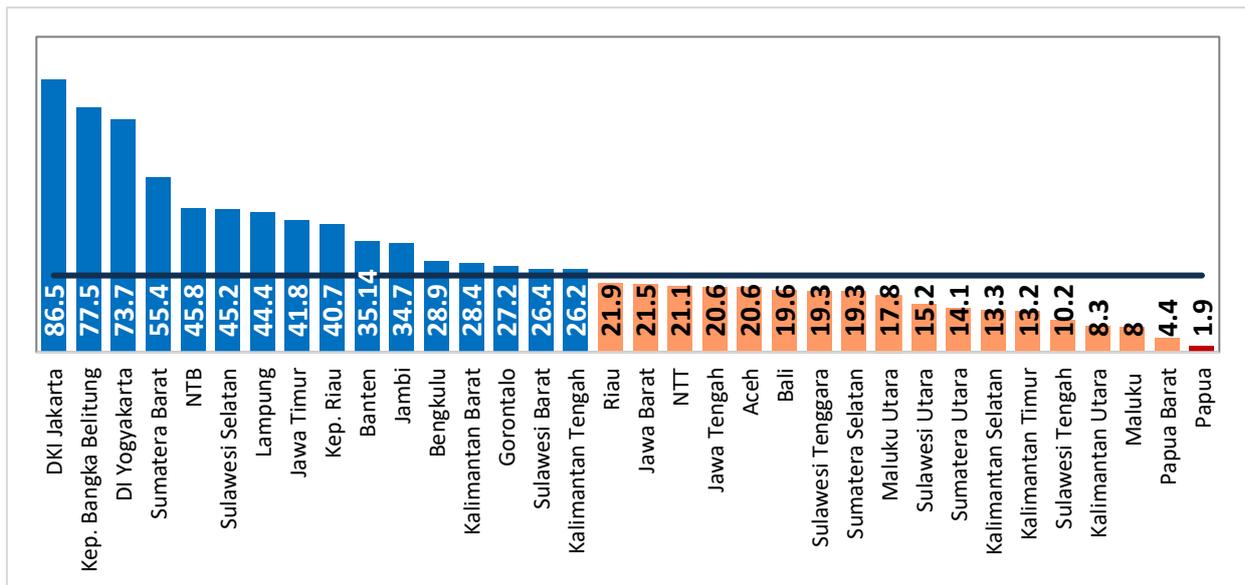
Keadaan stunting yang terlihat tinggi di Provinsi Papua ini, yaitu mencapai 32,80%, perlu ditangani segera dengan efektif, agar manfaat bonus demografi yang akan diterima selama periode 2020-2030 mendatang dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.

2.2.4.3. Cakupan Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

Desa Posbindu PTM (Pos Pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular) yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM juga terintegrasi secara rutin di masyarakat, seperti di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sasaran utama kegiatan adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Dalam Gambar 2.41 terlihat bahwa upaya kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang dilaksanakan di Provinsi Papua berada dalam kategori paling rendah di Indonesia, dengan cakupan Posbindu PTM hanya sebesar 1,90% dari seluruh total desa/kampung yang ada. Kondisi inilah yang menyebabkan Provinsi Papua selama ini sangat sulit untuk mendeteksi dini dengan cepat dan efektif mengenai potensi risiko penyakit tidak menular di seluruh kampung.

Gambar 2.41. Cakupan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Posbindu TM di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 (%)



Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2018 (data diolah)

2.2.5. Fokus Ketenagakerjaan

Apabila dilihat sepanjang tahun 2013-2017, jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja di provinsi Papua terlihat meningkat, kecuali tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah orang yang menganggur, dari tahun 2013-2017 jumlahnya mengalami fluktuasi. Tercatat jumlah angkatan kerja 1.688.876 jiwa pada tahun 2013 dan orang yang bekerja berjumlah 1.634.332 jiwa, sedangkan pengangguran berjumlah 54.544 jiwa.

Tabel 2.15. Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

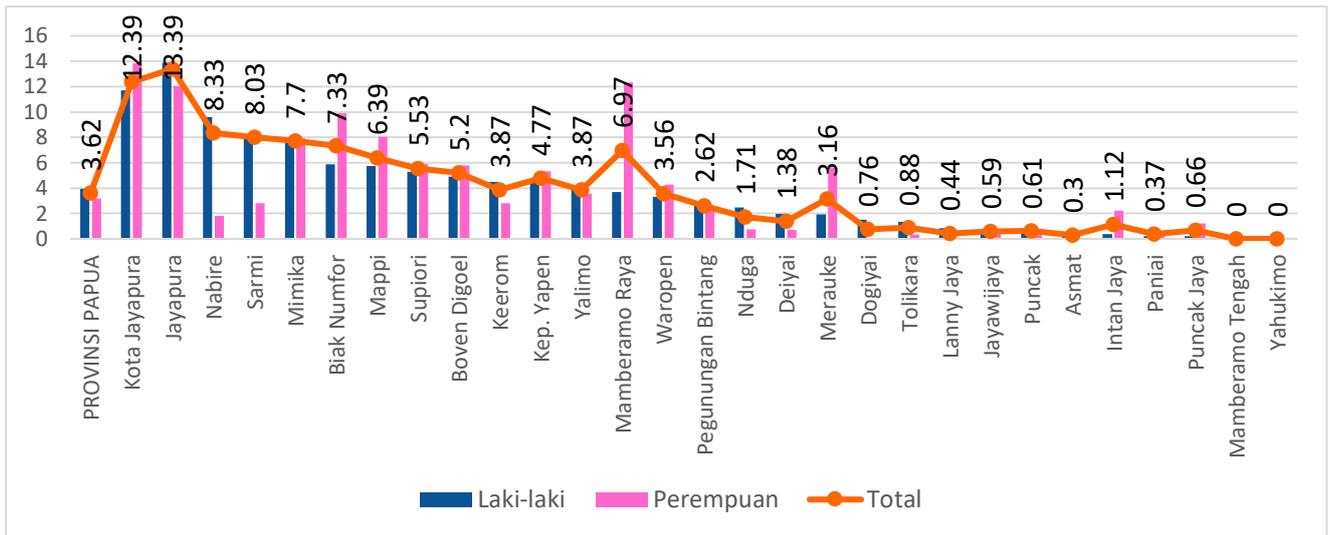
Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (jiwa)	2.165.070	2.129.404	2.189.230	2.245.462	2.291.111
Angkatan Kerja (jiwa)	1.688.876	1.675.113	1.741.945	1.722.162	1,762,841
1. Bekerja	1.634.332	1.617.437	1.672.480	1.644.485	1,699,071
2. Penganggur	54.544	57.676	69.465	57.677	63,770
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	476.194	454.291	447.285	523.300	528,270

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Laju Pertumbuhan yang Bekerja (%)	6,96	-1,03	3,40	-1,67	3,32
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	96,77	96,56	96,01	95,49	96,38
Rasio Orang Bekerja dengan Penduduk +15 (jiwa)	75,49	75,96	76,40	74,13	74,16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78,01	78,67	79,57	74,13	77,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	3,23	3,44	3,99	3,35	3,96

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat fluktuatif selama tahun 2013-2017. Dimana untuk TPAK di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut cenderung berkembang stabil dengan rata-rata mencapai 77,53%. Tahun 2013, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 78,01%, yang kemudian naik di tahun 2014 kemudian meningkat di tahun 2015, kemudian turun kembali di tahun 2016 menjadi 74,13%. Sampai dengan tahun 2017 kondisi TPAK Provinsi Papua adalah sebesar 77,30%. Akibat penambahan penduduk usia 15 tahun ke atas yang lebih cepat dibandingkan penduduk yang bekerja, menyebabkan penyerapan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam lapangan kerja semakin menurun yaitu dari 75,49% di tahun 2013 menjadi 74,16% pada tahun 2017. Dengan kata lain mengalami penurunan sekitar -0,33% per tahun selama periode 2013-2017. Dari sisi pengangguran, terlihat bahwa jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 60.626 orang setiap tahun. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dengan rata-rata mencapai 3,59 % pertahun selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017).

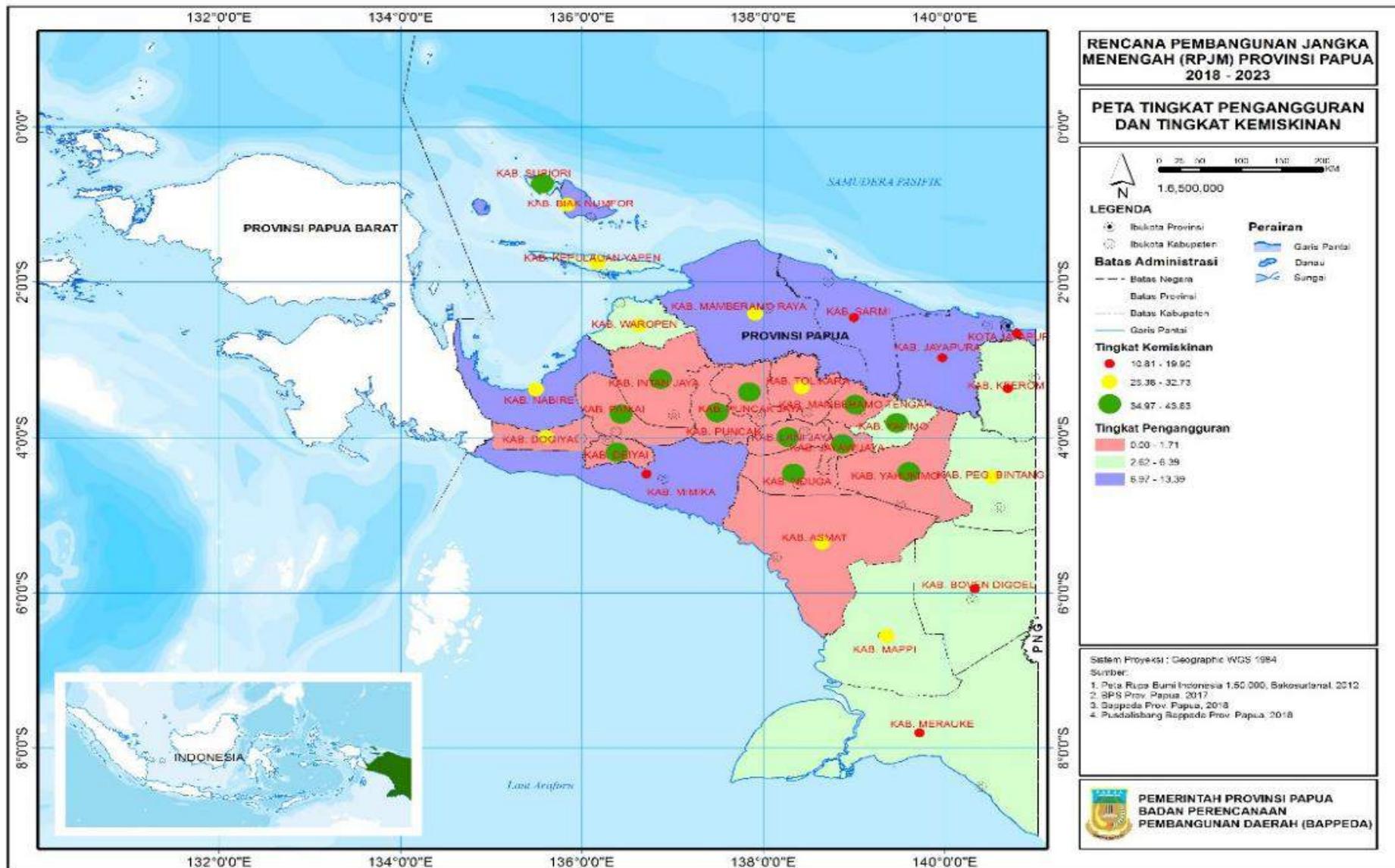
Gambar 2.42. Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika diperhatikan menurut kabupaten/kota terlihat tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kota Jayapura yakni sebesar 13,39% di tahun 2017, dengan kontribusinya yang terbesar bila diamati menurut jenis kelamin adalah penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 13,82% yang menganggur, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 11,72%. Perhatikan Gambar 2.42 di atas.

Gambar 2.43. Peta Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017

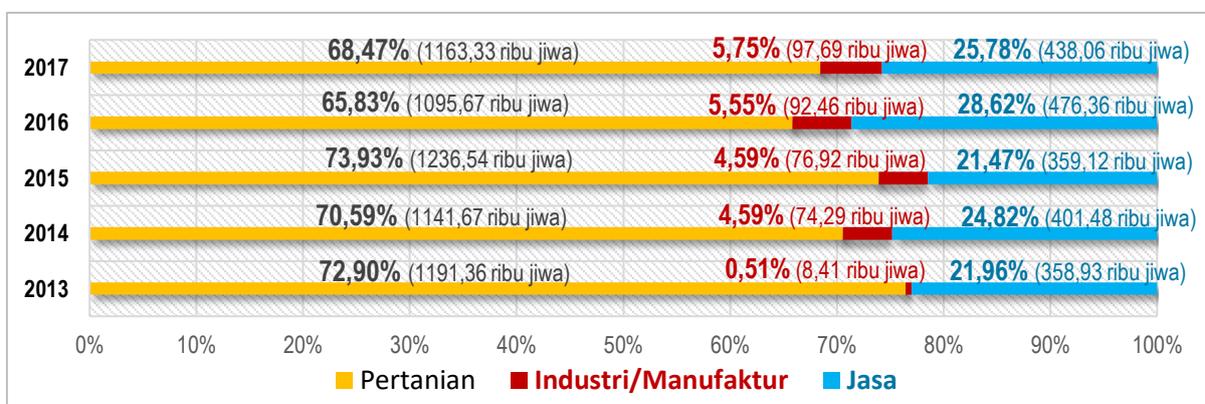


Sementara wilayah kabupaten dengan tingkat penganggurannya terendah adalah Asmat, hanya sebesar 0,30% pada tahun 2017. Walaupun pengangguran terlihat sangat rendah, yang menandakan jumlah orang bekerja lebih banyak, namun bukan berarti hal tersebut mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan secara signifikan di Provinsi Papua.

Dalam Gambar 2.4343 berikutnya juga terpetakan bahwa daerah-daerah yang rendah tingkat penganggurannya, seperti di Kawasan La Pago dan Mee Pago ternyata merupakan daerah yang paling banyak kantong kemiskinannya, dengan persentase kemiskinan rata-rata di atas 35%. Kondisi ini menggambarkan belum nampak korelasi yang signifikan antara pengangguran yang rendah dengan kemiskinan yang rendah juga. Hal ini disebabkan tenaga kerja yang ada ternyata lebih banyak terserap di sektor pertanian tradisional dimana tidak membutuhkan tingkat keahlian dan pendidikan yang tinggi, sehingga nilai upah yang diterima tenaga kerja sangat rendah dan belum maksimal mendorong perubahan pendapatan pada rumah tangga di sektor pertanian untuk hidup di atas garis kemiskinan.

Apabila mengamati struktur tenaga kerja menurut sektor di Provinsi Papua, (lihat Gambar 2.4444), diketahui bahwa jumlah orang yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi struktur tenaga kerja dengan proporsi yang cenderung menurun sepanjang tahun 2013-2017, yaitu rata-rata pertahun mencapai 70,34%. Adapun sektor industri rata-rata mencapai 4,20%, dan sektor jasa-jasa rata-rata mencapai 24,53%.

Gambar 2.44. Komposisi dan Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor

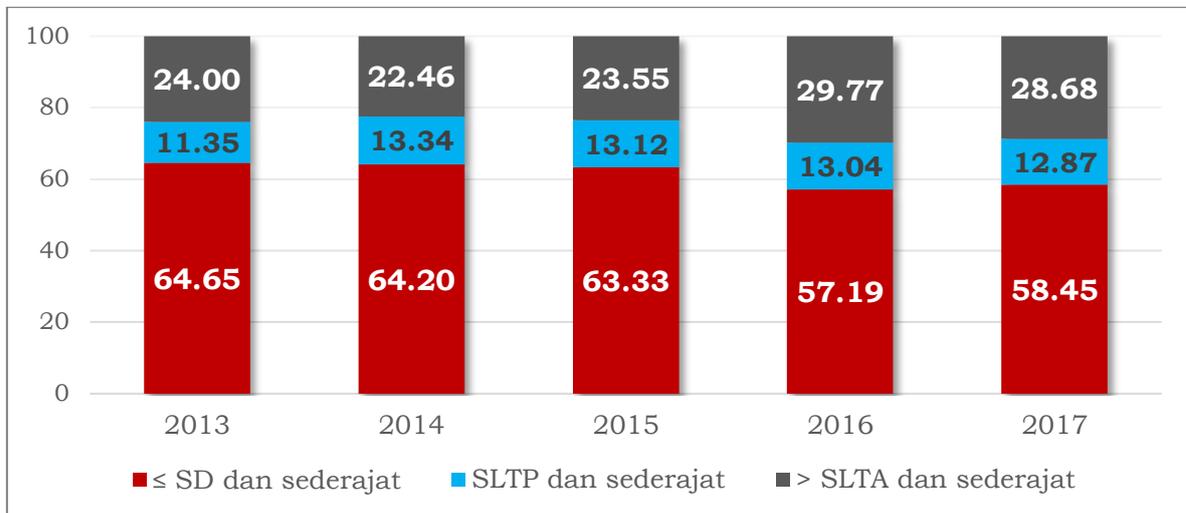


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Peranan tenaga kerja untuk mengatasi kemiskinan sepertinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan tenaga kerja yang lebih banyak terserap dalam lapangan

kerja merupakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, sehingga *transfer payment* yang dihasilkan belum maksimal mendorong pendapatannya di atas garis kemiskinan. Kondisi faktual tahun 2013-2017 dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana selama ini komposisi tenaga kerja di Provinsi Papua lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Perhatikan Gambar 2.45 dibawah ini.

Gambar 2.45. Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

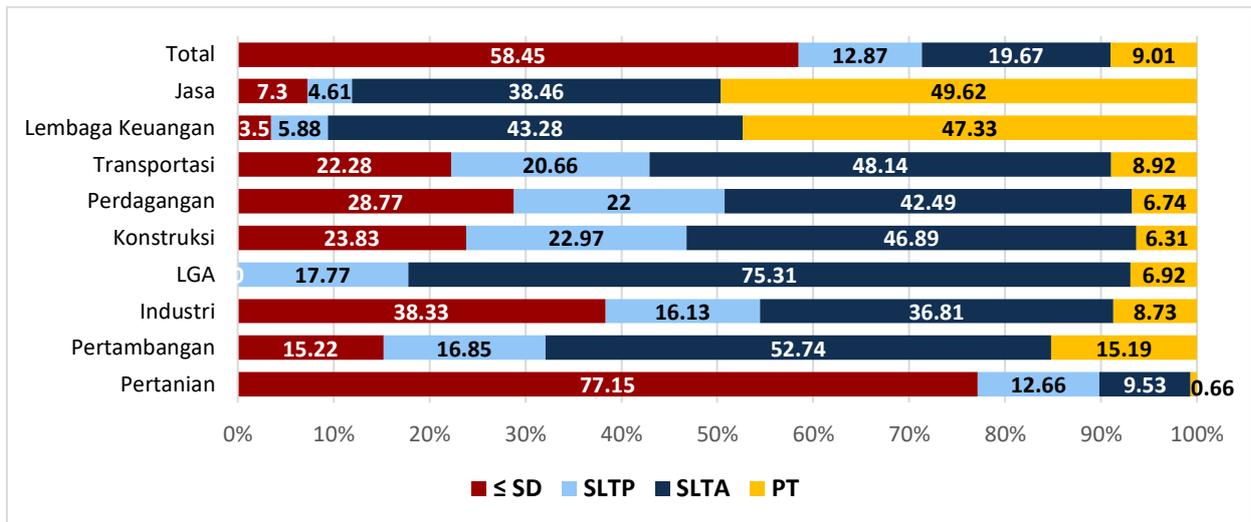


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.455 diketahui bahwa selama tahun 2013-2017 profil tenaga kerja di Provinsi Papua lebih dominan yang berpendidikan rendah yaitu SD/ sederajad dan atau di bawah SD/ sederajad, kurang lebih setiap tahunnya sekitar 61,56% dari total tenaga kerja. Sementara yang berpendidikan SLTP/ sederajad sebesar 12,79% per tahun, dan yang berpendidikan SLTA/ sederajad/ diatasnya sekitar 25,69% per tahun untuk periode yang sama.

Keadaan tenaga kerja menurut lapangan usaha dan pendidikan berikut ini juga memberikan gambaran bahwa peranan sektor pertanian belum memadai untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Papua. Meskipun sektor pertanian mampu menyerap lapangan kerja paling tinggi, namun tenaga kerja yang paling banyak diserap adalah tenaga kerja yang berpendidikan rendah (SD/ sederajad dan tidak sekolah), sekitar 77,15% dari total tenaga kerja di sektor tersebut. (lihat Gambar 2.4646)

Gambar 2.46. Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Termasuk juga di sektor industri, proporsi yang berpendidikan rendah tampak dominan, kurang lebih 38,33%. Tenaga kerja yang berpendidikan SLTA dan PT lebih banyak tersebar di sektor lembaga keuangan dan jasa sekitar 44,67%. Padahal kedua sektor tersebut kurang mampu menyerap lapangan kerja selama ini di Provinsi Papua.

Akibat tenaga kerja yang terserap lebih dominan yang berpendidikan rendah, akhirnya produktifitas regional yang dihasilkan Provinsi Papua selama ini terindikasi rendah (lihat Gambar 2.477). Rata-rata produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan PDRB di Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 hanya mencapai 79,53 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Namun demikian cenderung produktifitas tenaga kerja mengalami kenaikan setiap tahun, sekitar 5,18% per tahun.

Gambar 2.47. Produktifitas Regional (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Untuk meningkatkan produktifitas tenaga regional penting sekali dimasa mendatang mengupayakan peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, seperti pengembangan pendidikan vokasional untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian penduduk pada bidang pertanian, industri dan pertambangan. Serta penguatan pelatihan yang inovatif agar tenaga kerja Papua mampu mentransformasi teknologi untuk menghadapi revolusi industri ke-4 yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, editing genetik, maraknya perkembangan neuroteknologi dan internet.

2.2.6. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Dalam perspektif kesejahteraan sosial dan ekonomi, beberapa indikator yang penting dianalisis antara lain perkembangan keluarga sejahtera, tingkat kebahagiaan, ketahanan pangan, kemandirian fiskal dan kontribusi sektoral terhadap PDRB di Provinsi Papua.

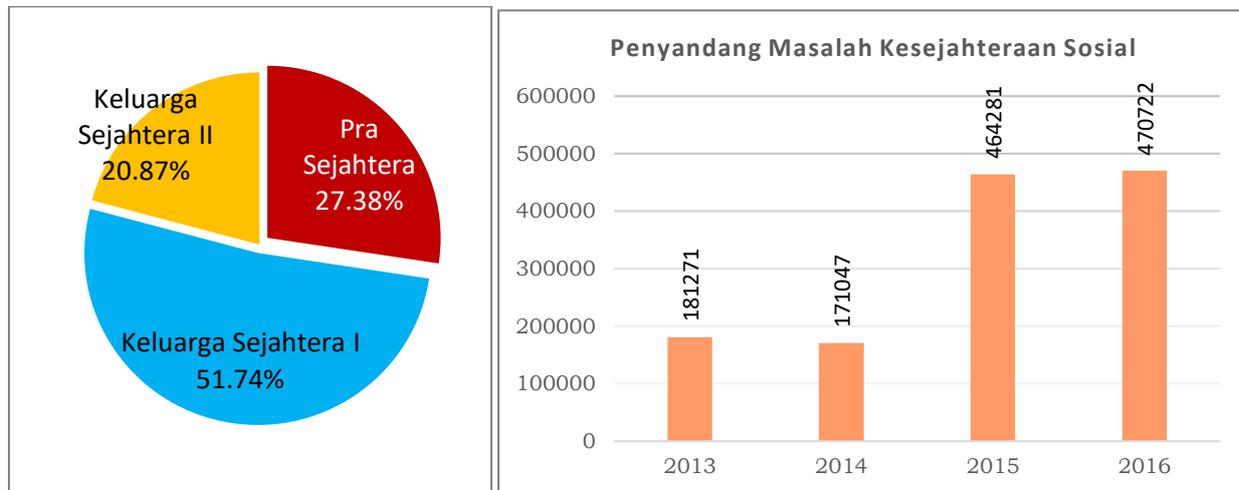
2.2.6.1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya. Adapun untuk Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II ini kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi namun kebutuhan untuk pengembangan belum terpenuhi.

Berdasarkan pentahapan keluarga sejahtera, kondisi demografi Provinsi Papua cenderung lebih banyak pada Keluarga Sejahtera I dan Pra Sejahtera, masing-masing sebesar 51,74% dan 27,38% dari total keluarga yang tercatat sebanyak 182.514 KK pada tahun 2017 (lihat Gambar 2.48). Fenomena ini menandakan meskipun sebagian besar keluarga di Provinsi Papua sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi kebutuhan sosial psikologinya masih belum maksimal terutama untuk pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, dan interaksi dengan lingkungan. Dimana pada akhirnya hal

ini dapat berdampak terhadap meningkatnya PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial).

Gambar 2.48. Kondisi Demografi Keluarga di Provinsi Papua Tahun 2017



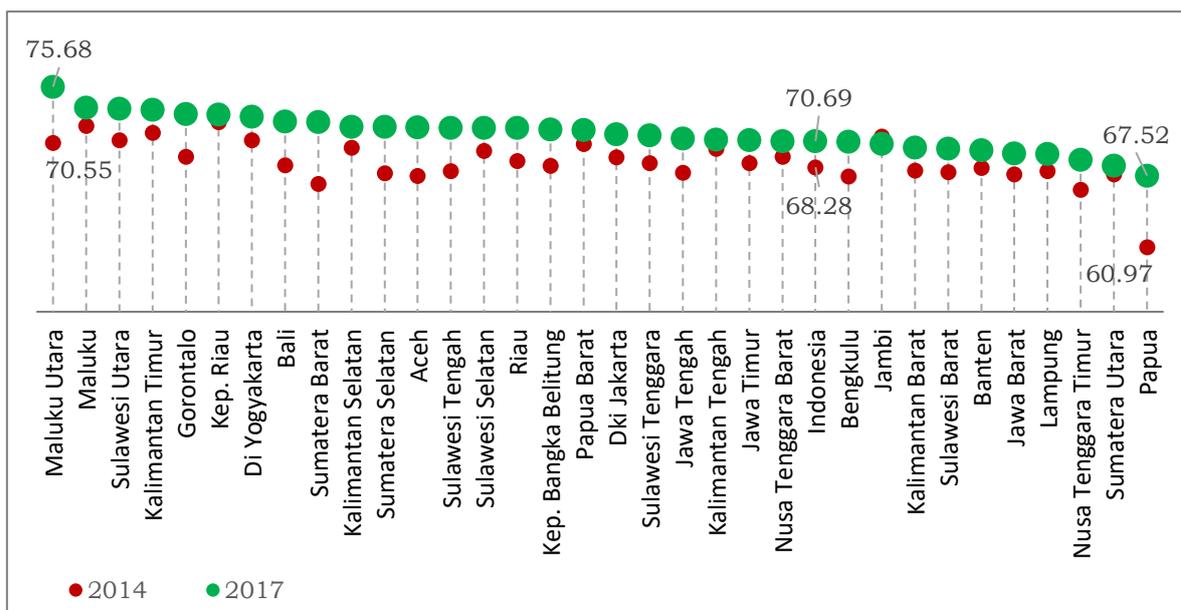
Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.2.6.2. Indeks Kebahagiaan

Diantara tahun 2014 dan 2017, terindikadikasi hampir seluruh wilayah provinsi mengalami kenaikan Indeks Kebahagiaan, terkecuali untuk Provinsi Jambi terjadi penurunan (lihat Gambar 2.49). Meskipun Provinsi Papua memiliki nilai Indeks Kebahagiaan paling rendah di Indonesia, akan tetapi peningkatannya di tahun 2017 paling tinggi yakni 6,55 poin dibandingkan tahun 2014. Tercatat Indeks Kebahagiaan Papua pada tahun 2014 sebesar 60.97 poin, dan tahun 2017 sebesar 67.52 poin. Fakta ini menunjukkan bahwa Papua paling berhasil meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya dibandingkan wilayah provinsi lain.

Merujuk kepada hasil perhitungan BPS Papua (2018) teridentifikasi faktor yang paling besar kontribusinya terhadap Indeks Kebahagiaan adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan, dengan nilainya di tahun 2017 sebesar 75,79 poin. Sementara yang terendah adalah faktor Pendidikan dan Keterampilan, dengan nilai sub indeksnya sebesar 53,54 poin. Kedua hal ini menandakan bahwa diantara tahun 2014 dan 2017 cenderung masyarakat merasa sangat puas dengan kondisi keamanan yang diwujudkan oleh pemerintah selama itu, namun untuk tingkat pendidikan tampaknya masih jauh dari harapan masyarakat sehingga penilaian terhadap elemen tersebut menjadi sangat rendah (lihat Gambar 2.499).

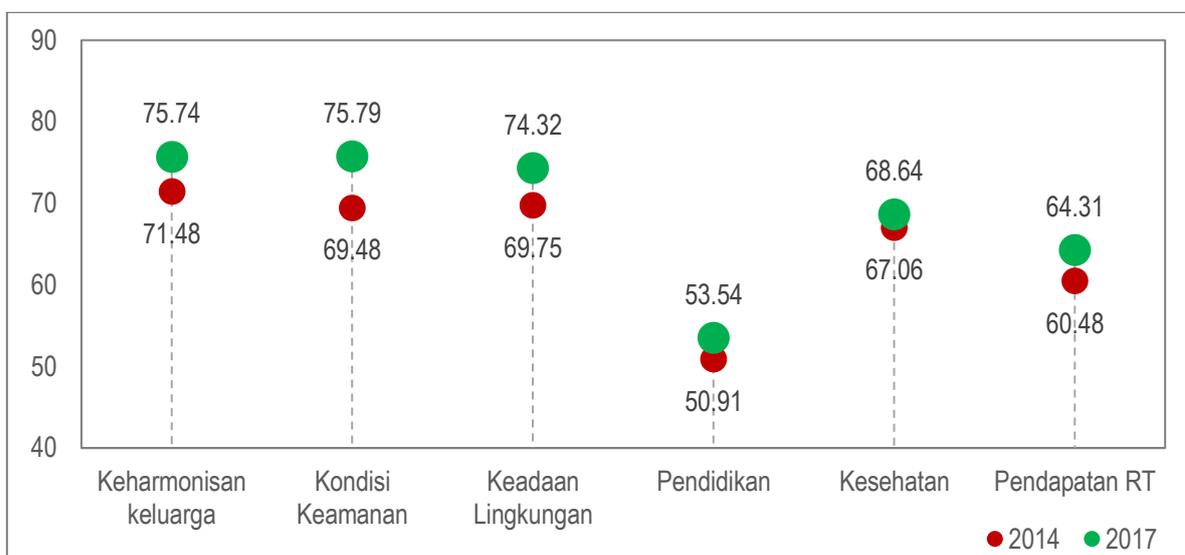
Gambar 2.49. Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2017



Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Apabila diperhatikan seksama pada perbedaan nilai sub indeks pembentuk Indeks Kebahagiaan diantara tahun 2014 dan 2017 terlihat bahwa elemen-elemen keharmonisan keluarga, kondisi keamanan, serta keadaan lingkungan semuanya meningkat lebih tinggi dibandingkan elemen pendidikan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga (perhatikan Gambar 2.5050).

Gambar 2.50. Perbedaan Nilai Sub Indeks Terpenting Pembentuk Indeks Kebahagiaan di Provinsi Papua Antara Tahun 2014 dan 2017



Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Paling tinggi perubahannya adalah sub dimensi Kondisi Keamanan yang naik sekitar 6,31 poin, sedangkan yang terendah sub dimensi kesehatan hanya sebesar 1,58 poin. Dinamika ini kembali menunjukkan bahwa masyarakat menilai faktor keamanan di Provinsi Papua yang paling baik dan memuaskan perubahannya, termasuk untuk faktor keluarga dan lingkungan. Sedangkan untuk pendidikan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga, walaupun ada peningkatan di tahun 2017 namun kurang begitu memuaskan, sehingga ketiganya dinilai masih tetap rendah dalam komponen Indeks Kebahagiaan.

2.2.6.3. Ketahanan Pangan

(1) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan atau *Desireable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor Pola Pangan Harapan yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi (lihat Tabel 2.16).

Tabel 2.16. Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)					Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Padi-padian	764	747	901	368	993	17.7	17.4	20.5	19.8	22.7
Umbi-umbian	589	662	816	615	720	4.3	5.4	7	7.1	6.1
Pangan Hewani	172	187	192	1S5	227	16.7	17.5	17.5	16.6	20
Minyak dan Lemak	228	246	277	290	291	0.1	0.1	0	0	0
Buah/biji berminyak	28	27	34	21	18	0.4	0.4	0,4	0.3	0.3
Kacang-kacangan	59	46	50	49	49	5.1	4	5	5.1	5.1
Gula	98	76	117	101	123	0	0	0	0	0
Sayuran dan buah	123	120	100	96	96	6.3	6.1	4.4	4.4	4.3
Lain-lain	17	17	23	23	26	1	0.8	0.9	1	1.1
Total	2078	2130	2512	2448	2448	51.8	51.7	55.7	54.3	59.7

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (data diolah)

Sumber energi yang terbesar dikonsumsi penduduk di Papua ternyata paling banyak berasal dari bahan pangan padi-padian, yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diperkirakan komoditi padi-padian memberi kontribusi sekitar 32,66% per tahun terhadap pemenuhan kebutuhan energi penduduk Papua sepanjang tahun 2013-2017. Sementara dari umbi-umbian sebesar 29,29% per tahun, serta dari minyak dan lemak sebesar 11,46% per tahun. Secara keseluruhan terlihat ketiga kelompok bahan pangan ini (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak) menjadi sumber energi yang terbesar bagi penduduk Papua, dengan kontribusinya mencapai 73,41% per tahun. Sisanya, dipenuhi dari konsumsi bahan pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lainnya.

Kondisi yang sama juga terlihat untuk pemenuhan kebutuhan protein. Bahan pangan padi-padian masih paling besar proporsinya. Menyusul kemudian yang berasal dari pangan hewani. Selama periode 2013-2017, kedua kelompok bahan pangan tersebut memberi kontribusi terhadap pemenuhan protein penduduk di Provinsi Papua sekitar 68,14% per tahun. Sisanya terpenuhi dari sumber bahan pangan lainnya, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.

Ada indikasi telah terjadi pergeseran pola pangan pokok penduduk Papua selama ini, sehingga padi-padian sekarang menjadi sumber energi dan protein utama. Padahal produksi lokal padi di Provinsi Papua sampai sekarang masih sangat rendah dan tidak mampu mencukupi konsumsi beras lokal, sehingga diperlukan impor beras dalam jumlah yang sangat banyak setiap tahunnya. Hal ini akhirnya membuat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi lebih rendah dibandingkan skor nasional secara keseluruhan.

Gambar 2.51. Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia dan Provinsi Papua



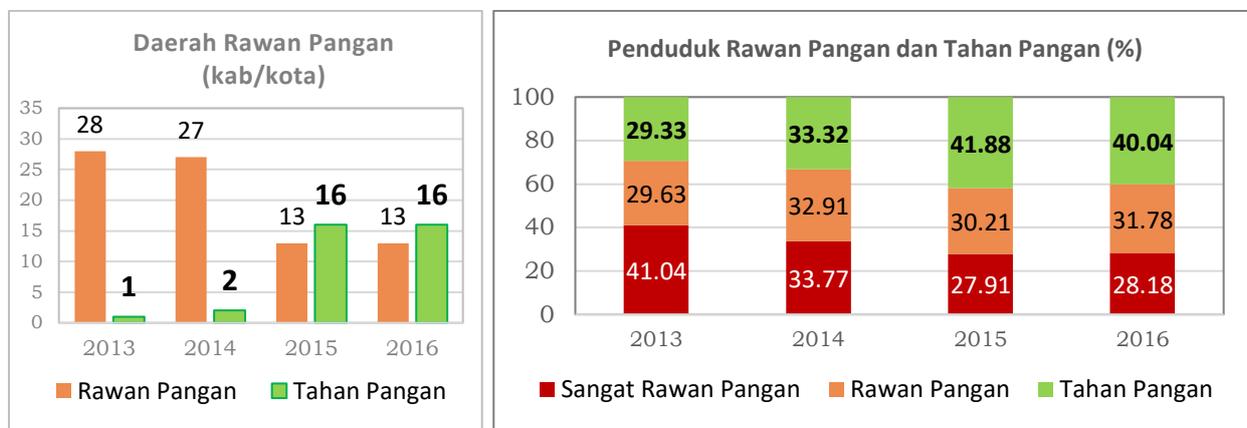
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (data diolah)

Seperti yang disajikan dalam Gambar 2.51, terlihat jelas Skor PPH Provinsi Papua mengalami penurunan selama periode 2013-2017, dan dibawah skor PPH nasional. Pada tahun 2017, skor PPH Provinsi Papua hanya sebesar 87,60%, sementara skor PPH nasional sebesar 90,40%. Perlu upaya yang lebih keras bagi Provinsi Papua untuk mencapai skor PPH yang ideal sebesar 100%.

(2) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dapat dikatakan Provinsi Papua cukup berhasil menangani daerah rawan pangan selama ini. Seperti yang divisualisasikan dalam Gambar 2.520, tampak jelas bahwa pada tahun 2013 dan 2014 jumlah daerah kabupaten yang terindikasi rawan pangan mencapai lebih dari 20 kabupaten. Begitu masuk di tahun 2015 sampai dengan 2016 jumlah daerah rawan pangan akhirnya dapat ditekan menjadi 13 kabupaten.

Gambar 2.52. Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Papua, 2018 dan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (diolah)

Begitu juga dengan jumlah penduduk yang rawan pangan, cenderung mengalami penurunan antara tahun 2013-2016. Seperti yang disajikan dalam Gambar 2.45, pada tahun 2013 jumlah penduduk sangat rawan/rawan pangan di Papua masih sebesar 70,67%, kemudian menurun terus setiap tahun hingga pada tahun 2016 menjadi 59,96%. Berarti ada penurunan sekitar 3,57% per tahunnya.

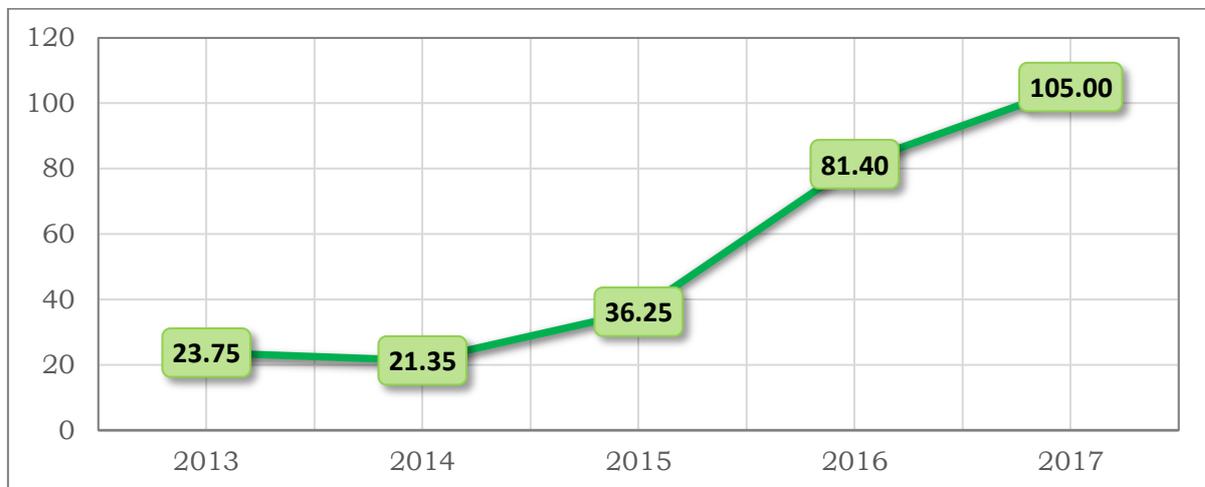
Meskipun ada indikasi keberhasilan dalam menekan jumlah daerah dan penduduk yang rawan/sangat rawan pangan, akan tetapi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa Kabupaten Asmat dan Pegunungan Bintang di awal tahun 2018 patut menjadi perhatian lebih serius dimasa mendatang, untuk mempercepat penuntasan 100% daerah-daerah yang teridentifikasi rawan pangan, oleh karena kerawanan pangan tersebut sangat berkaitan erat dengan kejadian gizi buruk, dan wabah penyakit

menular. Terdapat 3 (tiga) elemen dasar yang penting untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan ketahanan pangan yaitu (1) konsumsi pangan, (2) produksi pangan, dan (3) distribusi pangan. Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dan holistik, integratif antarsektor, dan spasial.

(3) Cadangan Pangan

Cadangan pangan di Provinsi Papua berupa beras yang tersimpan di Bulog cenderung mengalami peningkatan yang sangat tajam sepanjang tahun 2013-2017. Meskipun sempat mengalami penurunan -10,11% di tahun 2014 bila dibandingkan tahun 2013, namun secara keseluruhan cadangan pangan Provinsi Papua terlihat meningkat rata-rata 45,00% per tahun (lihat Gambar 2.5353).

Gambar 2.53. Ketersediaan Cadangan Pangan di Provinsi Papua (ribu ton)



Sumber: Bappeda Papua dan Kementan RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan perkembangan cadangan pangan yang tersedia sepanjang tahun 2013-2017, dapat dikatakan Provinsi Papua selama ini tidak mengalami permasalahan dalam mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras. Tetapi untuk penyaluran kontrak beras ditemukan ada masalah, oleh karena umumnya selalu melewati tahun kontrak, yang akhirnya memberikan tambahan beban pemeliharaan beras pada Perum BULOG. Kemudian, terjadinya perubahan Harga Pembelian Pemerintah Beras pada tahun berjalan juga merupakan masalah bagi BKP Provinsi Papua, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan kuantum. Agar semua permasalahan ini tidak lagi menjadi penghambat dalam penyediaan stok pangan dimasa mendatang, perlu dibuatkan strategi kebijakan anggaran.

2.2.6.4. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan dalam Perekonomian

Secara agregat dalam komposisi PDRB Provinsi Papua, sektor pertanian terbagi atas 5 sub sektor mencakup sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 terlihat lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian sekitar 3,80% per tahun, yang dipacu oleh pertumbuhan sub sektor peternakan dan perkebunan, masing-masing mengalami percepatan yang tinggi di atas sektor pertanian secara menyeluruh yakni sebesar 6,17% untuk sektor perkebunan dan 7,05% per tahun pada sektor peternakan selama tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.177).

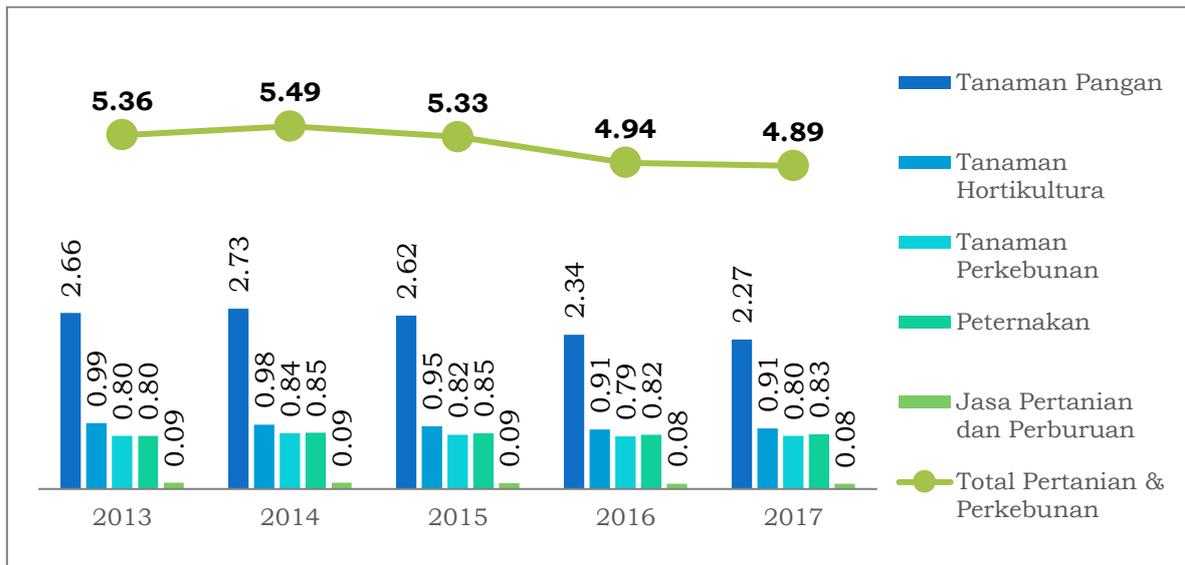
Tabel 2.17. Komposisi PDRB Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan(%)
Tanaman Pangan	3,119.76	3,316.05	3,420.24	3,324.63	3,371.14	1.96
Tanaman Hortikultura	1,164.97	1,186.57	1,237.36	1,287.18	1,360.78	3.96
Tanaman Perkebunan	942.03	1,022.16	1,072.03	1,130.43	1,197.14	6.17
Peternakan	939.76	1,032.78	1,103.78	1,167.66	1,234.08	7.05
Jasa Pertanian dan Perburuan	109.31	111.35	115.75	117.01	121.37	2.65
Total Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6,275.83	6,668.91	5,877.13	7,026.91	7,284.51	3.80
PDRB	117,118.82	121,391.23	130,311.60	142,221.09	148,823.63	6.17

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Meskipun pertumbuhan sub sektor tanaman pangan lebih lambat, namun kontribusinya terhadap perekonomian wilayah terlihat lebih baik dibandingkan sub sektor lainnya. Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.5452, kontribusi tanaman pangan kurang lebih mencapai 2,52% per tahun, jauh di atas sub sektor jasa pertanian dan perburuan yang tercatat paling rendah untuk kelompok sektor ini yakni sebesar 0,09% pertahun.

Gambar 2.54. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Apabila diamati secara keseluruhan, peranan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Papua rata-rata hanya mencapai 5,40% per tahun untuk periode 2013-2017, yang cenderung menurun setiap tahunnya dikarenakan adanya redistribusi nilai tambah ke sektor konstruksi yang mulai menonjol peranannya semenjak tahun 2013. Walaupun demikian, perubahan struktur ekonomi belum terjadi selama ini, kontribusi sektor pertambangan masih dominan.

2.2.6.5. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Perekonomian Wilayah

Dalam komponen PDRB, sektor kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa {fee} atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Perkembangan nilai PDRB sektor kehutanan, beserta laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian wilayah (lihat Gambar 2.5555).

Gambar 2.55. Nilai PDRB, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)



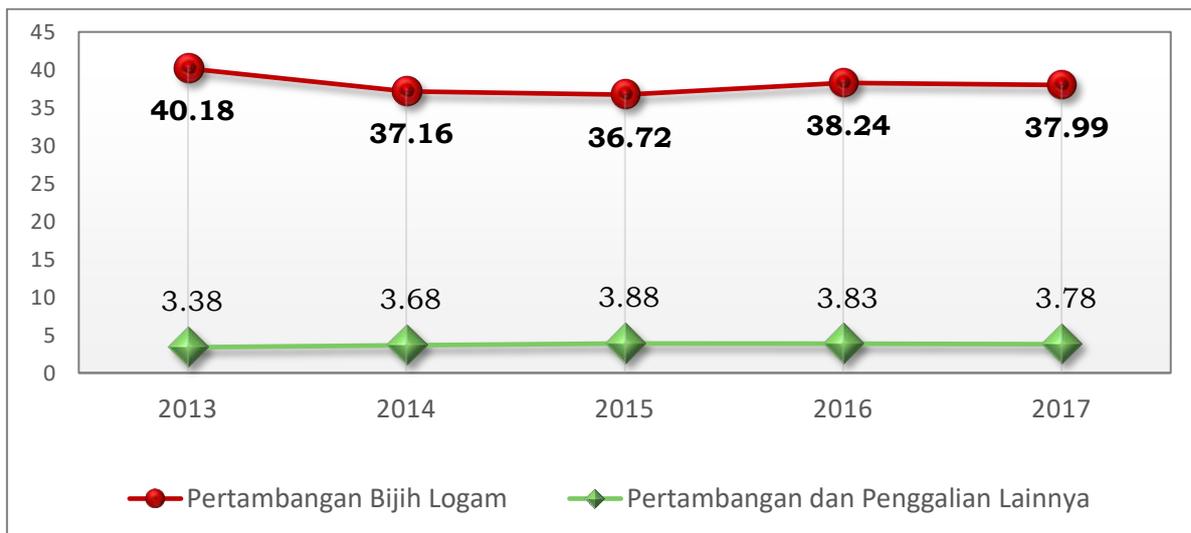
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Ada kecenderungan nilai PDRB sektor kehutanan terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2013-2017, namun dengan pertumbuhan yang melambat selama tahun 2015-2017, sehingga secara keseluruhan laju kenaikan PDRB sektor kehutanan hanya mencapai 4,84% per tahun. Kondisi ini akhirnya menyebabkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Papua mengalami penurunan yaitu dari 1,47% di tahun 2013 menjadi 1,38% pada tahun 2017, atau rata-rata turun sebesar 0,10% per tahun.

2.2.6.6. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah

Sejak periode 1970'an, yaitu ketika mulai diproduksi tembaga di Kabupaten Mimika oleh PT. Freeport Indonesia (anak perusahaan Freeport-McMoRan Inc), komoditi tembaga mengalami masa kejayaan, sehingga dapat menempatkan nilai tambah sektor pertambangan nonmigas menguasai PDRB Provinsi Papua kurang lebih 60% per tahun. Seiring dengan berkembangnya pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya di Papua, secara perlahan kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan, namun tetap terbesar dan mendominasi struktur perekonomian wilayah.

Gambar 2.56. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Porsi sektor pertambangan dalam PDRB wilayah sangat dominan, misalkan untuk periode 2013-2017 rata-rata per tahun bisa mencapai 38,06% kontribusinya, dan berada jauh di atas kontribusi sektor industri manufaktur yang masih dibawah 2% per tahun, atau sektor kontruksi sekitar 10,64% per tahun. Keberadaan sektor pertambangan yang sangat dominan ini dapat dimanfaatkan guna lebih mensejahterakan masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan, yakni dengan cara meningkatkan potensi sektor pertambangan untuk menghasilkan *trickle down effect* bagi wilayah lain terutama pada Kabupaten Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya yang terindikasi paling banyak penduduk miskinnya, dan *backward linkage effect* untuk sektor ekonomi lain seperti sektor pertanian yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi namun rendah kontribusinya terhadap PDRB.

2.2.6.7. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Wilayah

Pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri, tetapi banyak terkait dengan sektor lain. Untuk mengukur peranannya dalam perekonomian tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui identifikasi semua sektor yang terkait dengan kegiatan ini. Beberapa sektor/sub sektor yang termuat dalam PDRB Provinsi Papua yang dapat diasumsikan terkait dengan kegiatan pariwisata antara lain : (1) Angkutan Darat; (2) Angkutan Laut; (3) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; (4) Angkutan Udara (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Jasa Penunjang Angkutan; (7)

Penyediaan Akomodasi; (8) Penyediaan Makan Minum; dan (9) Jasa Pariwisata Lainnya.

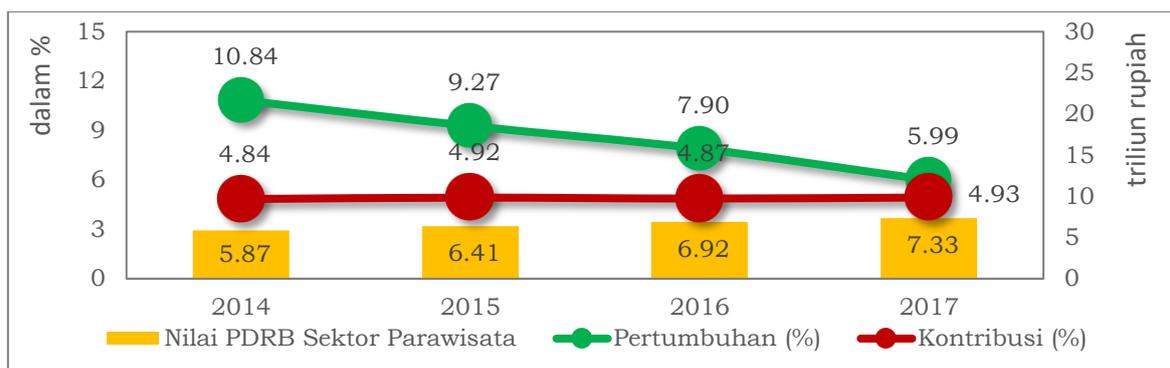
Tabel 2.18. Komposisi PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Papua (milyar rupiah)

Sektor Terkait Pariwisata	2013	2014	2015	2016	2017
Angkutan Darat	1.811,96	1.995,86	2.197,09	2.375,71	2.513,90
Angkutan Laut	836,73	923,41	994,17	1.076,65	1.143,61
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	68,93	74,92	80,51	85,99	91,32
Angkutan Udara	1.636,56	1.821,65	2.007,30	2.170,86	2.301,37
Jasa Penunjang Angkutan	164,03	180,26	196,38	211,49	224,58
Penyediaan Akomodasi	429,60	492,55	531,77	567,72	601,92
Penyediaan Makan Minum	303,51	332,73	355,55	377,59	400,48
Jasa Pariwisata Lainnya	44,30	48,27	51,12	54,27	57,35
Total PDRB Sektor Pariwisata	5.295,62	5.869,65	6.413,89	6.920,28	7.334,53

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika melihat komposisi nilai PDRB sektor pariwisata yang disajikan pada Tabel 2.188 di atas, terindikasi kelompok sektor pariwisata yang paling berperan sekali dalam perekonomian wilayah Papua adalah sektor angkutan terutama angkutan laut, darat dan udara. Berikutnya sektor penyediaan akomodasi, dan sektor penyedia makan minum. Semua sektor ini paling dominan membentuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Papua sekitar 4,81% per tahun selama periode 2014-2017 yang relatif naik sekitar 0,03% per tahun. Dimana sampai pada tahun 2017 kontribusi sektor pariwisata tercatat sebesar 4,93%. Adapun pertumbuhannya cenderung melambat, dimana pada tahun 2014 bisa mencapai 10,84%, namun pada tahun 2017 mengecil menjadi 5,99%.

Gambar 2.57. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

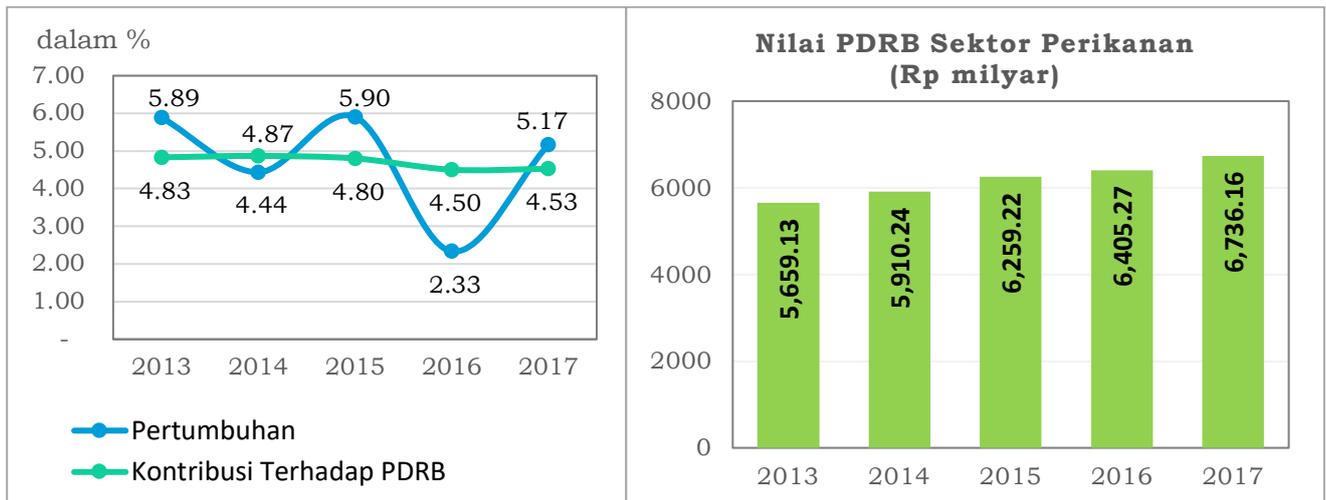
Potensi sektor pariwisata di Provinsi Papua sangat berpeluang untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian wilayah. Hal ini tercermin dari keberadaan subyek pariwisatanya yang sangat potensial. Contohnya bila dilihat dari rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel, Provinsi Papua masuk dalam urutan ke-6 terbesar di Indonesia yaitu 47,84% per tahun (BPS RI, 2018). Kemudian untuk *home stay* atau rata-rata lama tamu menginap, Papua urutan ke-3 terbesar setelah Bali dan Papua Barat, yakni rata-rata selama 2,7 hari (BPS RI, 2018). Dengan peluang seperti ini maka potensi ekowisata di Provinsi Papua sangatlah besar. Destinasi pariwisata perlu ditingkatkan baik itu dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya. Dalam hal ini membangun infrastruktur pariwisata merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Papua dengan tetap memperhatikan peran serta kelembagaan adat dan lingkungan sosial budaya.

2.2.6.8. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian

Pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh nelayan rakyat maupun perusahaan perikanan (kecil dan menengah) selama ini berhasil menempatkan nilai tambah sektor perikanan pada posisi ke-5 terbesar dalam komposisi PDRB Provinsi Papua. Dimana selama tahun 2013-2017 tercatat rata-rata nilai PDRB sektor perikanan Provinsi Papua sekitar Rp. 6.194,00 milyar per tahun, dengan kecenderungannya yang sangat berfluktuatif. Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perikanan kurang lebih 4,46% per tahun, dengan kontribusinya terhadap total PDRB Provinsi Papua mencapai 4,68% per tahun (lihat Gambar 2.588).

Nilai tambah yang dihasilkan sektor perikanan ini masih berpeluang untuk ditingkatkan lebih besar setiap tahunnya di masa mendatang. Berdasarkan data yang ada, potensi perikanan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan selama ini baru mencapai 15,30% dari potensi perikanan yang ada di WPP Papua. Beberapa kendala yang menjadi tantangan untuk mengoptimalkan potensi perikanan laut di Provinsi Papua selama ini antara lain : (1) masih banyak nelayan yang menggunakan perahu dayung tanpa bermotor, (2) daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) tidak jauh, (3) alat penangkapan ikan dan alat pengolahan hasil ikan masih tradisional, (4) kurangnya modal nelayan, dan (5) rendahnya investasi di sektor perikanan.

Gambar 2.58. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

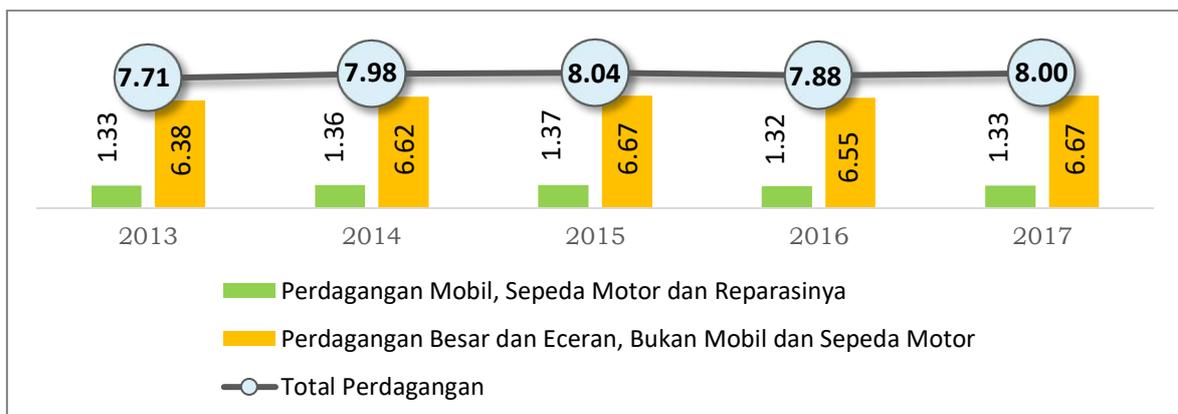


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.2.6.9. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap Perekonomian Wilayah

Sektor yang dimotori oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran ini selama tahun 2013-2017 rata-rata mampu memberi kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua sekitar 7,92% per tahun, dengan kecenderungannya yang terus meningkat. Kontribusi yang paling besar diberikan oleh perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, dimana untuk periode 2013-2017 bisa mencapai 6,58% per tahun, yang berada di posisi ke-4 terbesar. Sedangkan kontribusi dari sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reperasinya, sangat rendah, dengan rata-rata per tahun sekitar 1,34% (lihat Gambar 2.59).

Gambar 2.59. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sektor perdagangan sangat potensial untuk terus dikembangkan, karena tanpa adanya sektor ini dipastikan perekonomian wilayah Papua tidak akan bergerak. Selain dapat memberikan nilai tambah yang tinggi, daya serapnya terhadap kesempatan berusaha juga sangat potensial. Sektor ini paling banyak memberikan peluang Bergeraknya lapangan usaha informal yang selama ini dilaksanakan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar penduduk dapat diwujudkan melalui pengembangan sektor perdagangan. Termasuk juga dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya, karena *backward linkage* sektor perdagangan dapat diarahkan ke sektor-sektor lainnya dalam perekonomian wilayah.

2.2.6.10. Kontribusi sektor Industri terhadap Perekonomian Wilayah

Peranan sektor industri dalam perekonomian wilayah Provinsi Papua selama ini masih sangat rendah, tidak lebih dari 2% kontribusinya terhadap PDRB setiap tahun, yang cenderung stagnan sepanjang periode 2013-2017. Hanya ada 2 sub sektor industri yang paling berperan dalam perekonomian wilayah Papua, yakni industri makanan dan minuman, serta industri kayu. Kedua sub sektor tersebut menguasai pangsa industri kurang lebih 83% per tahun sepanjang periode 2013-2017, serta memberi kontribusi terhadap perekonomian wilayah Papua sebesar 1,64% untuk periode yang sama (lihat Tabel 2.199).

Tabel 2.19. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)

Kelompok Industri	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94
Industri Makanan dan minuman	0.79	0.83	0.80	0.77	0.80
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.85	0.89	0.86	0.80	0.79
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri Barang Galian bukan Logam	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri Alat Angkutan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Industri Furnitur	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam upaya mengurangi ketergantungan barang-barang produksi dari luar provinsi, terutama Jawa dan Sulawesi, maka strategi industrialisasi substitusi impor merupakan pilihan yang paling tepat. Khususnya di tahap awal adalah pengembangan industri makanan dan minuman, seperti tepung sagu, pasta ubi, mie instan, ikan kaleng, butiran coklat, beras organik, sirup buah merah, minyak goreng, dan sebagainya. Agar hal ini dapat terlaksana optimal, maka berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan industri di Provinsi Papua selama ini harus segera dituntaskan antara lain yang paling utama adalah: (1) minimnya sarana dan prasarana pendukung industri, (2) kualitas tenaga kerja yang masih rendah, (3) tingginya biaya transaksi (transportasi, administrasi dan lobi), (4) tingkat kerawanan keamanan yang tinggi, dan (5) rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Papua. Semua permasalahan ini harus diselesaikan secara holistik-integratif, terfokus dan spasial, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Agar dapat terus berkelanjutan, pengembangan *Eco-Industry* atau industri ramah lingkungan dapat dijadikan sebagai pioner bagi pengembangan agroindustri di Provinsi Papua masa mendatang. Mengadopsi strategi yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian (2017), maka strategi pembangunan industri yang berkelanjutan di Provinsi Papua harus difokuskan pada peningkatan nilai tambah melalui inovasi dan pengembangan teknologi industri, pengembangan pola produksi yang dapat mengurangi pemborosan sumber daya, dan mengintegrasikan industri daerah dalam *Global Value Chain* (GVC) untuk menjamin ketersediaan sumber daya industri dan pasar bagi industri nasional.

2.2.6.11. Kontribusi Sektoral Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten/Kota

Secara absolut dan spasial, peranan sektoral dalam perekonomian wilayah jika ditelusuri berdasarkan potensi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua terpetakan ada 23 daerah yang memiliki kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayahnya di atas 25%, dimana 12 kabupaten diantaranya memiliki peranan sektor pertanian yang sangat dominan yaitu Kabupaten, Merauke, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Boven Digoel, Tolikara, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Nduga dan Lanny Jaya. Ke-12 kabupaten ini dapat dikatakan mempunyai struktur ekonomi masing-masing berada pada sektor pertanian, karena kontribusinya terhadap perekonomian wilayah rata-rata mencapai 27% (lihat Tabel 2.20).

Tabel 2.20. Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Se Papua Tahun 2017 (%)

Kabupaten Kota	Lapangan Usaha																	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Merauke	27,06	1,68	4,04	0,06	0,14	14,39	13,93	7,86	1,31	7,82	2,33	2,88	1,56	9,47	2,44	1,80	1,23	100,00
Jayawijaya	14,60	1,42	2,18	0,08	0,04	12,49	16,26	16,90	0,68	6,88	1,49	6,35	2,06	12,04	2,89	2,22	1,42	100,00
Jayapura	22,18	2,07	4,91	0,04	0,18	13,83	12,42	15,81	1,37	5,51	1,35	4,61	2,18	8,21	2,13	1,53	1,66	100,00
Nabire	17,90	22,76	1,57	0,06	0,05	11,18	16,81	5,88	0,48	2,83	2,01	2,93	1,04	9,51	2,13	1,61	1,26	100,00
Kepulauan Yapen	23,25	0,58	4,05	0,07	0,14	6,49	17,68	9,35	0,84	3,60	3,19	5,99	1,43	14,72	3,73	2,16	2,73	100,00
Biak Numfor	22,32	0,90	3,78	0,22	0,15	6,37	15,70	10,46	0,79	4,05	5,02	4,71	2,40	17,37	2,85	1,81	1,11	100,00
Paniai	10,39	40,89	0,37	0,00	0,01	25,19	3,28	2,26	0,20	0,58	0,19	1,18	0,32	11,57	1,68	1,23	0,67	100,00
Puncak Jaya	27,16	1,10	0,53	0,01	0,00	28,34	7,27	2,33	0,22	0,78	0,16	1,97	0,20	21,30	3,50	3,83	1,31	100,00
Mimika	1,80	87,00	0,15	0,01	0,01	2,33	2,14	1,12	0,27	1,73	0,44	0,62	0,43	1,39	0,18	0,16	0,23	100,00
Boven Digoel	26,36	1,30	26,38	0,00	0,00	23,09	5,31	1,71	0,22	0,30	0,83	1,30	0,17	8,94	1,95	1,49	0,65	100,00
Mappi	25,45	0,34	0,70	0,01	0,00	32,48	6,66	2,10	0,23	0,53	0,70	1,65	0,10	21,98	3,69	2,45	0,93	100,00
Asmat	22,58	0,02	2,49	0,01	0,05	28,41	6,49	2,34	0,27	0,61	0,21	1,90	0,55	21,36	7,91	3,74	1,07	100,00
Yahukimo	23,44	0,85	0,57	0,01	0,00	21,91	5,28	4,76	0,31	1,02	0,36	3,29	0,27	27,93	6,09	2,54	1,36	100,00
Pegunungan Bintang	22,44	1,05	0,11	0,01	0,00	28,82	4,23	3,18	0,32	0,72	1,16	1,34	0,24	29,66	3,59	2,08	1,05	100,00
Tolikara	27,62	0,47	0,22	0,01	0,00	19,09	5,93	5,54	0,32	1,13	0,14	2,32	0,21	26,29	5,78	3,77	1,15	100,00
Sarmi	34,18	1,61	2,26	0,04	0,07	17,48	9,05	6,10	0,61	2,81	1,12	2,95	0,56	14,31	3,17	2,16	1,54	100,00
Keerom	33,62	1,08	5,53	0,04	0,00	27,03	7,46	0,97	0,91	1,03	1,20	1,54	0,05	13,49	2,79	2,11	1,17	100,00
Waropen	28,27	0,76	1,14	0,03	0,01	28,16	6,23	1,81	0,21	0,48	0,50	5,13	0,26	17,73	6,11	1,40	1,77	100,00
Supiori	29,39	0,35	0,59	0,07	0,00	26,96	3,82	0,30	0,23	0,61	0,95	2,56	0,08	20,90	6,45	3,78	2,96	100,00
Mamberamo Raya	22,68	2,29	0,29	0,00	0,00	19,68	9,89	3,09	0,63	0,00	0,09	1,71	0,17	24,87	7,83	4,21	2,58	100,00
Nduga	26,08	0,36	0,10	0,00	0,00	23,75	11,38	1,05	0,07	0,01	0,00	2,85	0,12	21,95	5,78	4,16	2,36	100,00

Kabupaten Kota	Lapangan Usaha																	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lanny Jaya	22,72	1,85	0,07	0,00	0,00	21,98	9,98	3,27	0,06	0,00	0,00	4,21	0,08	22,65	6,67	5,14	1,31	100,00
Mamberamo Tengah	17,28	1,34	0,09	0,00	0,00	23,84	10,10	5,54	0,02	0,01	0,05	2,05	0,11	28,52	5,32	3,64	2,08	100,00
Yalimo	27,45	0,51	0,11	0,00	0,00	18,20	11,19	2,79	0,08	0,01	0,00	1,10	0,09	28,04	4,76	3,21	2,47	100,00
Puncak	22,14	0,12	0,02	0,01	0,00	28,32	10,79	0,57	0,22	0,14	0,04	2,35	0,18	33,90	0,50	0,45	0,25	100,00
Dogiyai	28,62	2,75	0,06	0,00	0,00	10,40	11,68	0,99	0,29	0,45	0,00	9,81	0,00	31,66	0,68	2,23	0,38	100,00
Intan Jaya	25,22	0,36	0,28	0,00	0,00	33,32	7,06	0,92	0,02	0,01	0,00	0,33	0,08	26,00	3,08	1,88	1,45	100,00
Deiyai	25,13	1,06	0,33	0,02	0,00	31,39	7,86	0,73	0,05	0,04	0,16	1,63	0,07	23,31	3,94	3,28	1,01	100,00
Kota Jayapura	5,59	0,38	2,59	0,06	0,14	20,04	15,94	5,25	2,03	10,31	4,15	5,27	3,32	14,07	4,51	3,93	2,39	100,00
Jumlah Kabupaten & Kota	10,98	41,73	1,96	0,03	0,05	10,98	7,85	4,22	0,69	3,60	1,38	2,39	1,10	8,57	1,99	1,47	1,00	100,00
Papua	10,80	41,78	1,94	0,03	0,05	10,90	8,00	4,24	0,67	3,56	1,39	2,36	1,11	8,56	2,06	1,51	1,03	100,00

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Kode Lapangan Usaha

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Untuk kabupaten yang lain, meskipun kontribusi sektor pertaniannya diatas 25%, namun bukan yang paling dominan dalam perekonomian wilayah, sehingga struktur ekonomi daerah-daerah tersebut tidak pada sektor pertanian. Sebagai contoh di Kabupaten Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Intan Jaya dan Deyiai yang memiliki kontribusi sektor pertanian lebih dari 25%, akan tetapi struktur ekonominya adalah sektor kontruksi, oleh karena peranan sektor kontruksi terlihat yang paling besar, diatas 30%.

Termasuk juga untuk Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Dogiyai, struktur ekonominya bukan pada sektor pertanian, akan tetapi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Pada umumnya 3 (tiga) sektor yang telah diidentifikasi di atas, yaitu pertanian, kontruksi, dan adminitrasi pemerintahan mendominasi perekonomian wilayah hampir seluruh kabupaten di Provinsi Papua, terkecuali di Kabupaten Mimika sektor pertambangan terlihat yang menguasai pangsa PDRB, dan menjadi penyebab adanya ketimpangan sektoral yang begitu tinggi di Kabupaten Mimika, serta di Provinsi Papua secara keseluruhan.

Sektor industri sepertinya belum banyak berperan bagi perekonomian wilayah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, terkecuali untuk Kabupaten Boven Digoel, sektor industri tampak sudah menjadi *prime mover* ekonomi wilayah, dengan kontribusinya mencapai 26,38% per tahun. Andalan sektor industri Kabupaten Boven Digul selama ini adalah pengolahan kayu dan kelapa sawit, yang tampaknya masih perlu diperbaiki strukturnya, terutama dalam kaitan mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

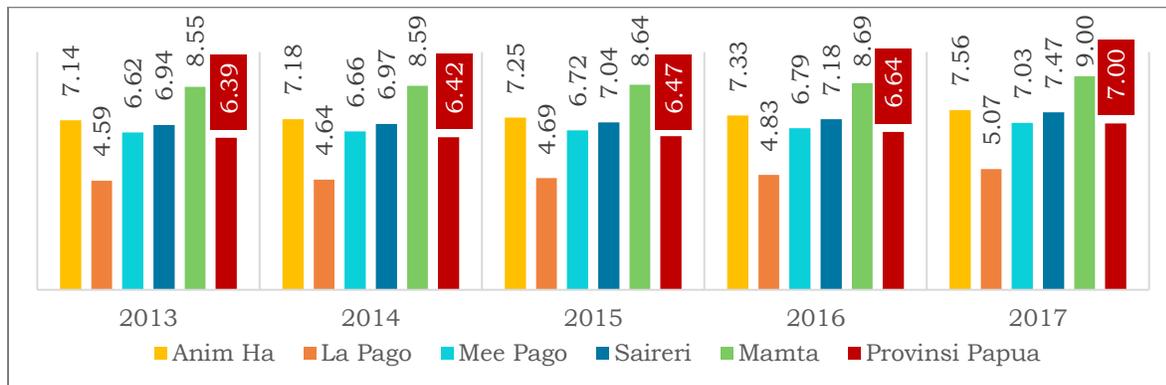
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua, sebagaimana yang ditunjukkan pada Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2013-2017 sebesar 2,27%. Dimana pada tahun 2017 tercatat

pengeluaran per kapita rumahtangga di Papua kurang lebih sebesar Rp. 7 juta (lihat Gambar 2.60).

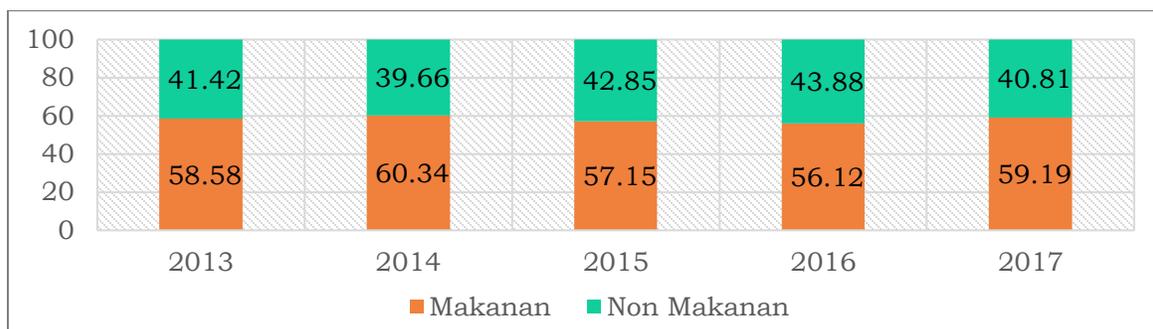
Gambar 2.60. Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua dialokasikan pada pengeluaran makanan, dengan persentasenya rata-rata sebesar 58,28% per tahun sepanjang periode 2013-2017. Berarti sisanya sebesar 41,72% dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan nonmakanan (lihat Gambar 2.61).

Gambar 2.61. Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua

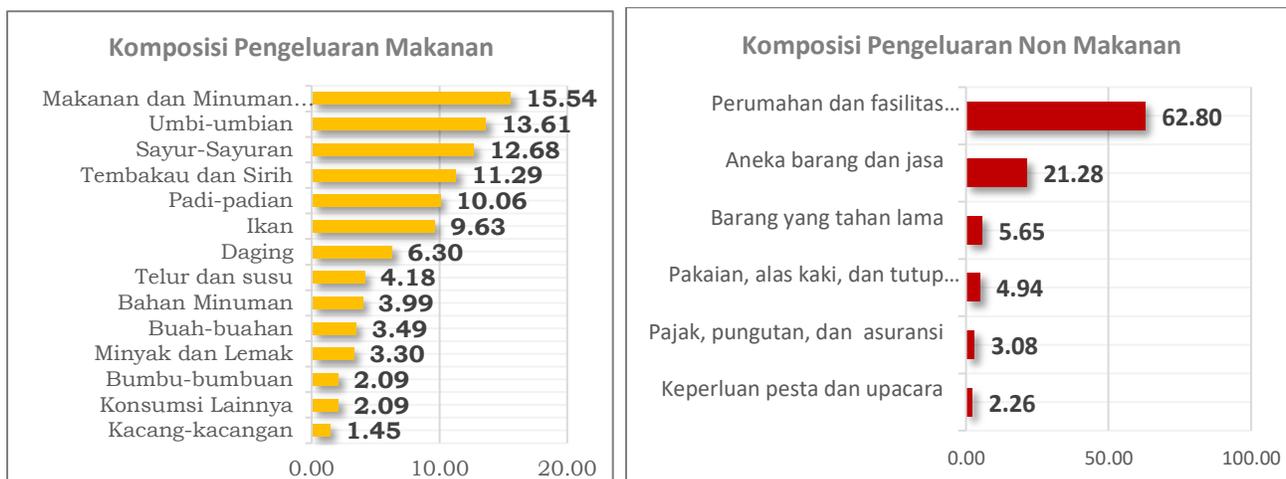


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pola konsumsi penduduk Papua untuk makanan lebih dominan dibelanjakan pada makanan dan minuman jadi (15,54%). Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein lebih besar dialokasikan pada umbi-umbian dan padi-padian, masing-masing sebesar 13,61% dan 10,06%. Serta untuk pemenuhan vitamin, lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, dengan alokasi pengeluarannya sebesar 12,68%. Adapun untuk

nonmakanan, pengeluaran masyarakat lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumahtangga, proporsinya bisa mencapai 62,80% dari total pengeluaran. Menyusul kemudian untuk aneka barang sebesar 21,28%. Paling rendah untuk keperluan pesta dan upacara, sebesar 2,26% (lihat Gambar 2.62).

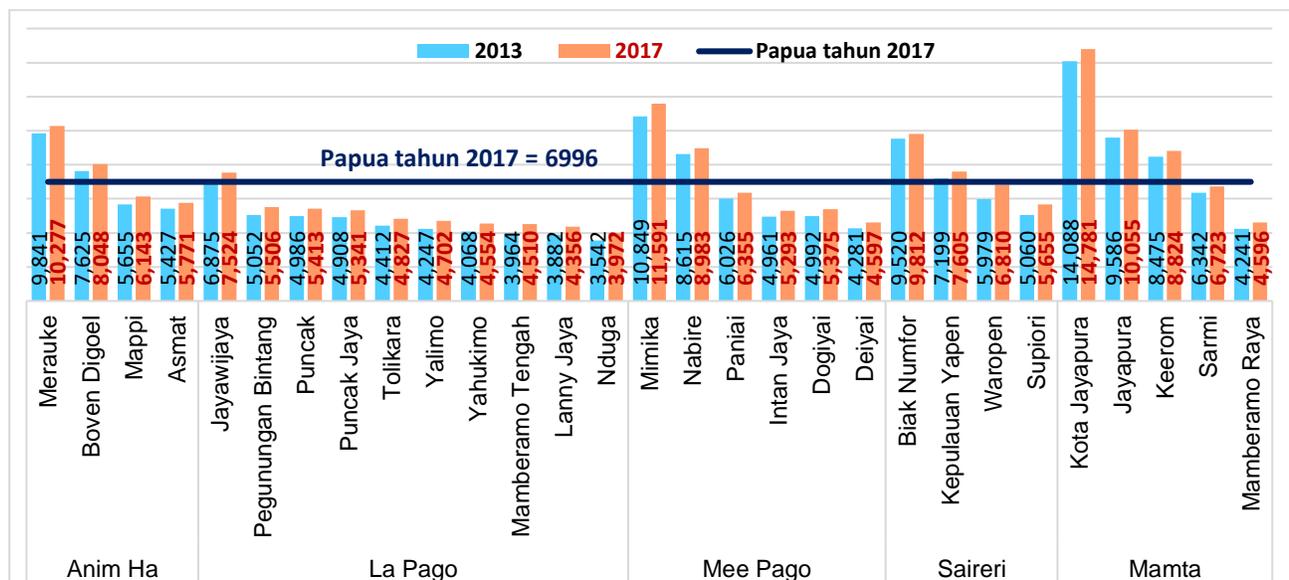
Gambar 2.62. Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selanjutnya bila dilihat menurut kabupaten/kota, sepanjang tahun 2013-2017 ada 2 (dua) wilayah yang terindikasi mempunyai pengeluaran per kapita paling tinggi di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura dengan rata-rata sebesar Rp. 14.322 ribu per tahun, dan Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.087 ribu per tahun. Sedangkan yang terendah selama itu adalah Kabupaten Nduga hanya sebesar Rp. 3.694 ribu per tahun.

Gambar 2.63. Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)



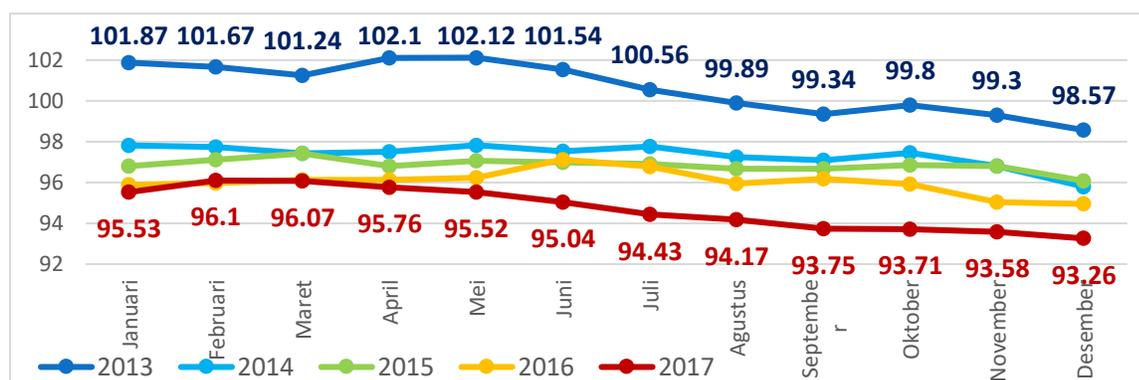
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sementara jika diamati per wilayah adat, terpetakan pada wilayah adat Anim Ha yang paling tinggi pengeluaran per kapita di tahun 2017 adalah Kabupaten Merauke yakni sebesar Rp. 9.994 ribu, kemudian untuk La Pago adalah Kabupaten Jayawijaya, sebesar Rp. 7.524 ribu, Mee Pago adalah Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.591 ribu, Saireri adalah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 9.812 ribu, dan di Mamta adalah Kota Jayapura sebesar Rp. 14.781 ribu.

2.3.2. Nilai Tukar Petani

NTP (Nilai Tukar Pertani) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada Gambar 2.6464 diuraikan perkembangan NTP Provinsi Papua selama tahun 2013–2017.

Gambar 2.64. Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

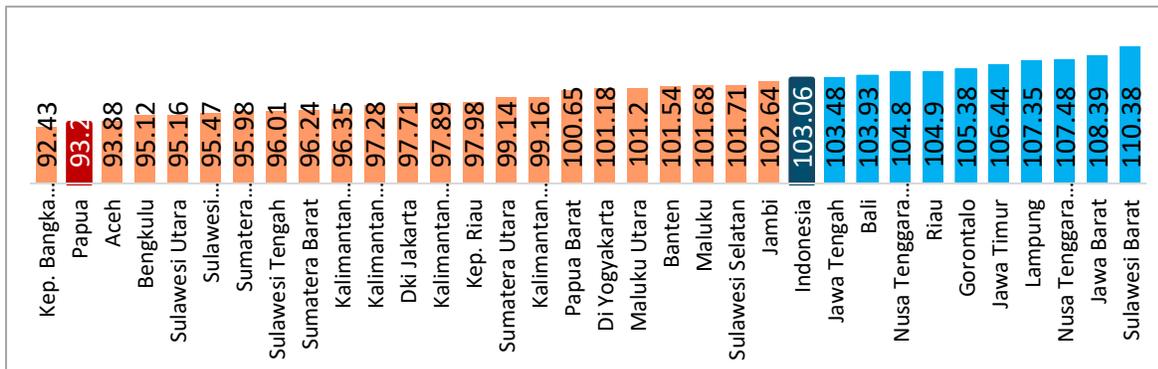


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, NTP Papua menunjukkan kecenderungan yang terus menerus turun, hingga sampai Desember 2017 hanya sebesar 93,26%, padahal Januari 2013 bisa mencapai 101,87%. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa kondisi petani di Papua mengalami defisit terus menerus, mulai Agustus 2013, yakni kenaikan harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibanding tingkat kesejahteraan sebelumnya.

Permasalahan rendahnya NTP antara lain disebabkan oleh (1) skala usaha budi daya pertanian yang relatif kecil; (2) harga komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) pembangunan infrastruktur yang belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi; (4) aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah (5) daya saing komoditas pertanian relatif rendah; (6) laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan. Akibat berbagai masalah ini, membuat NTP di Provinsi Papua selama ini paling rendah di Indonesia bersama Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Aceh.

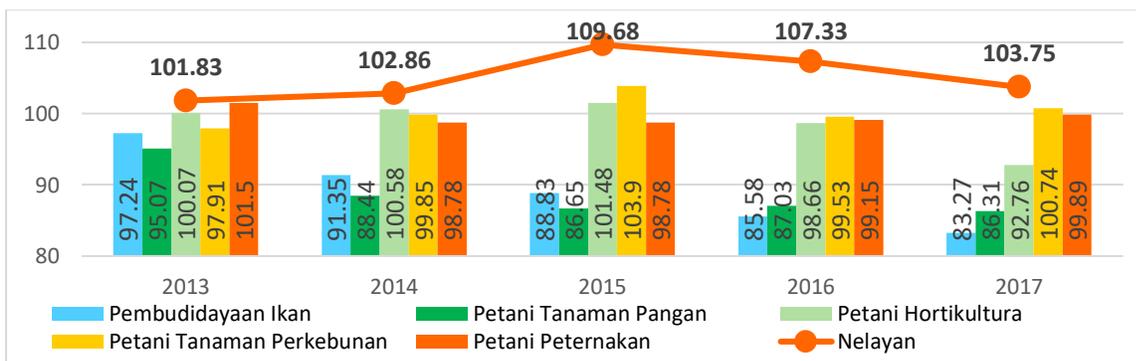
Gambar 2.65. Nilai Tukar Petani di Indonesia pada Desember 2017 (%)



Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Apabila diamati berdasarkan sub usaha pertanian dan perikanan, terlihat bahwa nelayan di Provinsi Papua lebih sejahtera dibandingkan petani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan pembudidayaan ikan. Hal ini tergambarkan dari perkembangan NTN (Nilai Tukar Nelayan) yang selalu lebih tinggi dari angka 100 selama tahun 2013-2017, dengan kecenderungannya yang terus meningkat, dimana pada tahun 2017 tercatat NTN Provinsi Papua sebesar 103,75%.

Gambar 2.66. Nilai Tukar Petani dan Nelayan Provinsi Papua (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Hal ini jauh berbeda dengan usaha pembudidayaan ikan, yang dikenal juga dengan sebutan petani tambak ikan, terlihat yang paling rendah tingkat kesejahteraannya diantara semua usaha pertanian dan perikanan. Untuk periode yang sama, NTP petani tambak ikan terus dibawah angka 100, bahkan cenderung menurun, dimana pada tahun 2017 NTP petani tambak hanya 83,27% turun 13,79% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 97,24%. Hal yang sama juga terjadi untuk petani tanaman pangan, selain mengalami penurunan setiap

tahun, juga nilainya paling rendah, serta jauh dibawah 100%, rata-rata NTP tanaman pangan sebesar 88,70%.

2.3.3. Produktifitas total daerah

Ukuran produktifitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan satu satuan nilai tambah atau PDRB. Perkembangan produktifitas daerah Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,85% per tahun, serta rata-rata produktifitas Rp. 79,53 juta per tenaga kerja per tahun. Lihat Tabel 2.211 di bawah ini.

Tabel 2.21. Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)

Tahun	Pertanian	Industri	Jasa	Produktifitas Total Daerah
2013	11.47	634.28	139.71	71.66
2014	12.64	701.03	136.69	75.05
2015	12.29	722.52	166.00	77.92
2016	14.11	676.55	134.80	85.44
2017	13.82	666.01	154.53	87.59
Rata-rata Produktifitas Per tahun	12.86	680.08	146.35	79.53
Rata-rata Pertumbuhan (%)	4.77	1.23	2.55	2.85

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

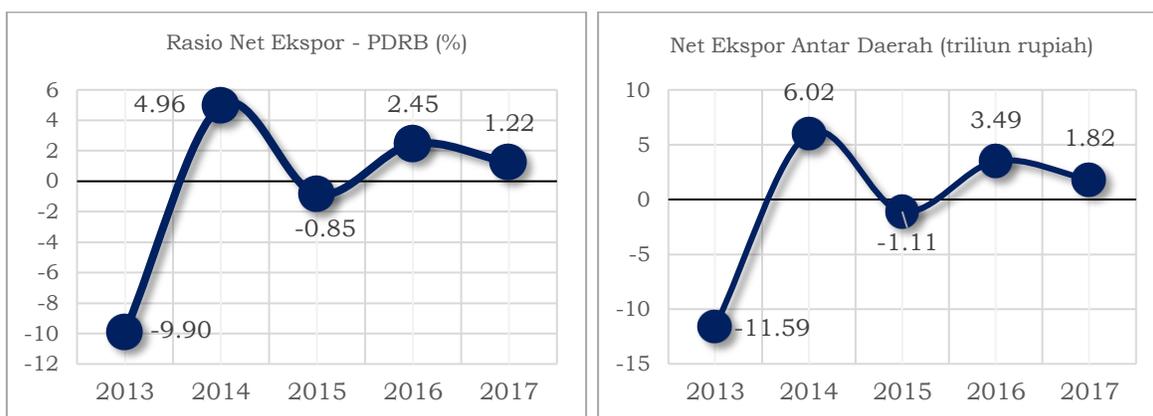
Oleh karena pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya sangat rendah (SD/tidak tamat SD/tidak sekolah) menyebabkan produktifitas daerah di sektor tersebut paling rendah diantara semua sektor. Rata-rata per tahun selama periode 2013-2017 hanya mencapai Rp. 12,86 juta per tenaga kerja per tahun. Beda dengan sektor industri yang mencapai Rp. 680,08 juta per tenaga kerja per tahun, dan sektor jasa sebesar Rp. 146,35 juta per tenaga kerja per tahun. Namun demikian, pertumbuhan produktifitas daerah di sektor pertanian tampak lebih tinggi dibandingkan industri dan jasa. Tingkat pertumbuhan produktifitas daerah sektor pertanian bisa mencapai 4,77% per tahun sepanjang tahun 2013-2017, jauh di atas sektor industri sebesar 1,25% per tahun dan sektor jasa sebesar 2,85% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi di sektor pertanian lebih cepat dibandingkan sektor industri dan jasa.

2.3.4. Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB

Sebagai suatu wilayah yang terbuka, aktifitas perdagangan ekspor dan impor Provinsi Papua terlihat sangat berfluktuatif. Hal ini ditandai dengan variasi perubahan Net Ekspor (selisih ekspor dan impor) yang naik turun selama periode 2013-2017. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.67, net ekspor Provinsi Papua mengalami defisit sebanyak 2 kali, yakni di tahun 2013 sebesar Rp. 11,59 triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp. 1,11 triliun. Namun untuk tahun 2014, 2016 dan 2017 semuanya mengalami surplus, dimana yang terbesar terjadi pada tahun 2014 mencapai Rp. 6,02 triliun.

Melalui perbandingan antara net ekspor dengan PDRB dapat ditemukan bagaimana daya saing ekonomi suatu daerah jika dihadapkan pada kinerja perdagangannya. Terlihat disini daya saing ekonomi Provinsi Papua masih sangat rendah yang diindikasikan rasio net ekspor PDRB selama periode 2013-2017 rata-rata dibawah batas minimum yaitu -0,42%.

Gambar 2.67. Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Ketergantungan perekonomian terhadap satu sektor saja yakni sektor pertambangan membuat perdagangan regional Provinsi Papua belum stabil. Tinggi rendahnya net ekspor sangat bergantung pada kinerja produksi di sektor pertambangan yakni bijih tembaga dan emas yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Fenomena yang terjadi di tahun 2013 dan 2015 ketika ada penurunan ekspor tembaga secara drastis oleh PT. Freeport Indonesia membuktikan hal tersebut. Rasio net ekspor PDRB Provinsi Papua langsung turun sampai ke titik nadir -9,90% tahun 2013 dan -0,85% tahun 2015. Untuk itu, memang sudah sepatutnya perekonomian daerah tidak hanya ditopang oleh satu atau dua sektor saja. Membangun dan

mengembangkan industri substitusi impor dan promosi ekspor berbasis pertanian dan berkelanjutan menjadi salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing kinerja perdagangan dimasa mendatang.

2.3.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR

Ketersediaan dana perbankan dalam upaya meningkatkan daya saing investasi regional sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kinerja perbankan di suatu daerah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak kolaps (jatuh). Terkait dengan hal ini, salah satu indikator yang dapat menunjukkan dengan baik bagaimana kondisi kinerja perbankan suatu daerah adalah rasio pinjaman terhadap simpanan di bank, atau dalam konteks perbankan disebut *Loan to Depositi Ratio* disingkat LDR, meskipun mulai tahun 2015 cara perhitungan LDR telah mengalami perubahan. Sebagian kalangan perbankan mengatakan batas aman LDR adalah 85%, atau toleransinya antara 85% - 100%.

Tabel 2.22. Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Tahun	Indikator Perbankan	Kelompok Bank			Total Bank
		Bank Pemerintah	Bank Swasta Nasional	Bank Perkreditan Rakyat	
2013	Kredit (juta rupiah)	15,119,851	3,260,913	451,170	18,831,934
	Simpanan (juta rupiah)	21,977,198	6,479,949	224,667	28,681,814
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	68.80	50.32	200.82	65.66
2014	Kredit (juta rupiah)	17,318,451	3,210,030	-	20,528,481
	Simpanan (juta rupiah)	26,420,175	7,296,942	251	33,717,117
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	65.55	43.99	-	60.88
2015	Kredit (juta rupiah)	18,863,362	3,395,402	778	22,259,542
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	294	36,232,546
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	64.81	47.63	264.63	61.44
2016	Kredit (juta rupiah)	21,145,894	3,171,884	857,702	25,175,480
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	345,672	36,577,924
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	72.66	44.50	248.13	68.83
2017	Kredit (juta rupiah)	23,193,087	3,382,726	976,556	27,552,369
	Simpanan (juta rupiah)	31,099,076	6,846,209	495,431	38,440,716
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	74.58	49.41	197.11	71.67

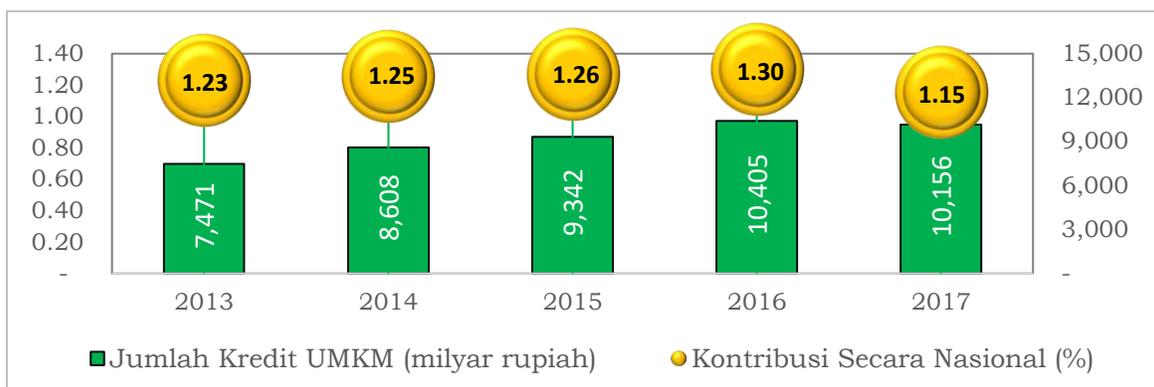
Sumber: Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat, 2018 (data diolah)

Perkembangan LDR di Provinsi Papua jika diperhatikan secara keseluruhan masih sangat aman, karena berada di bawah batas 85%, dengan kecenderungan yang terus

mengalami peningkatan, yang menandakan semakin banyak kredit yang disalurkan. Pada tahun 2013, posisi LDR perbankan di Provinsi Papua sebesar 65,66%, kemudian di tahun 2017 naik menjadi 71,67%. Sehingga rata-rata LDR di Provinsi Papua selama periode tahun 2013-2017 adalah 65,70% per tahun.

Jika diperhatikan menurut jenis bank, terpetakan bahwa semua bank pemerintah dan swasta di Provinsi Papua dalam posisi LDR yang sangat aman, rata-rata masih dibawah 60%. Akan tetapi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), kondisinya sangat memprihatinkan, karena rasio LDR BPR setiap tahunnya jauh di atas nilai 100, bahkan lebih dari 200% per tahun (sangat tidak aman), yang mengindikasikan jumlah kredit (pinjaman) jauh lebih besar dibandingkan dana pihak ketiga yang disimpan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka dipastikan dalam lima tahun mendatang banyak BPR yang kolaps. Padahal daya jangkau BPR ini ke pengusaha golongan lemah, dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di daerah perdesaan sangat tinggi sekali. Oleh karena itu perlu adanya penguatan, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah provinsi melalui kebijakan fiskal untuk menjaga dan melindungi BPR agar tidak kolaps dimasa mendatang. Terlebih lagi jika melihat proporsi penyaluran kredit oleh bank di Provinsi Papua selama ini kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sangat rendah sekali, di bawah 15 triliun rupiah per tahun, dan sekitar 1,4% saja kontribusinya secara nasional (lihat Gambar 2.68), maka BPR menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM di Provinsi Papua.

Gambar 2.68. Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua



Sumber: Bank Indonesia, 2018 (data diolah)

2.3.6. Rasio ketergantungan

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Tahun 2013 penduduk usia produktif mencapai 66,83% dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,23% dari total penduduk Papua, hal ini berarti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif.

Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (ribu orang)

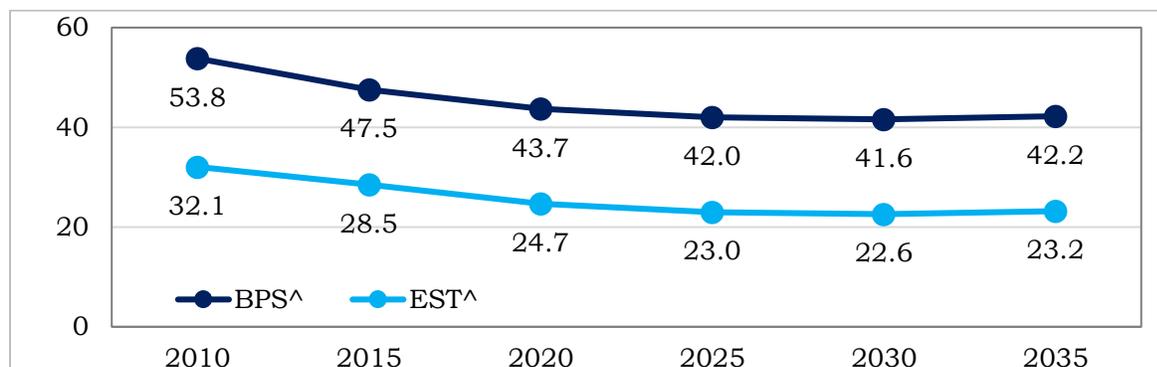
Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ² Pertumbuhan (% per thn)
0 - 4	328,5	329,3	330,0	331,6	333,1	0,35
5 - 9	318,6	319,8	321,3	321,8	322,5	0,30
10 - 14	315,1	315,4	316,0	316,1	316,1	0,08
15 - 19	309,6	310,9	311,6	312,7	314,0	0,35
20 - 24	300,1	303,9	306,9	309,3	311,3	0,92
25 - 29	282,5	286,9	292,0	297,1	302,1	1,69
30 - 34	271,7	273,6	275,5	278,6	281,7	0,91
35 - 39	261,9	264,8	267,3	268,2	269,5	0,72
40 - 44	224,1	233,6	241,8	249,3	255,2	3,30
45 - 49	167,1	177,9	188,6	199,1	209,3	5,79
50 - 54	110,4	120,3	130,6	140,6	150,9	8,13
55 - 59	64,1	70,9	78,1	86,3	94,9	10,31
60 - 64	35,0	38,4	42,5	47,1	52,2	10,51
65 - 69	19,9	21,0	22,5	24,7	23,8	4,58
70 - 74	13,0	13,4	13,7	13,8	15,6	4,66
75 +	10,9	10,9	11,0	11,1	13,1	4,70
Total	3.032,5	3.091,0	3.149,4	3.207,4	3.265,2	1,87

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dampak dari semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, menyebabkan rasio ketergantungan terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika menggunakan data proyeksi yang bersumber dari BPS, terlihat bahwa rasio ketergantungan yang cenderung menurun dari 53,8% tahun 2010 turun menjadi 42,2% pada tahun 2035, sedangkan berdasarkan estimasi terlihat gap yang cukup besar, yaitu tahun 2010 rasio ketergantungan mencapai 32,1% turun menjadi 23,2% tahun 2035. Semua ini

menggambarkan terjadinya bonus demografi di Provinsi Papua antara tahun 2020-2030 (lihat Gambar 2.699).

Gambar 2.69. Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua

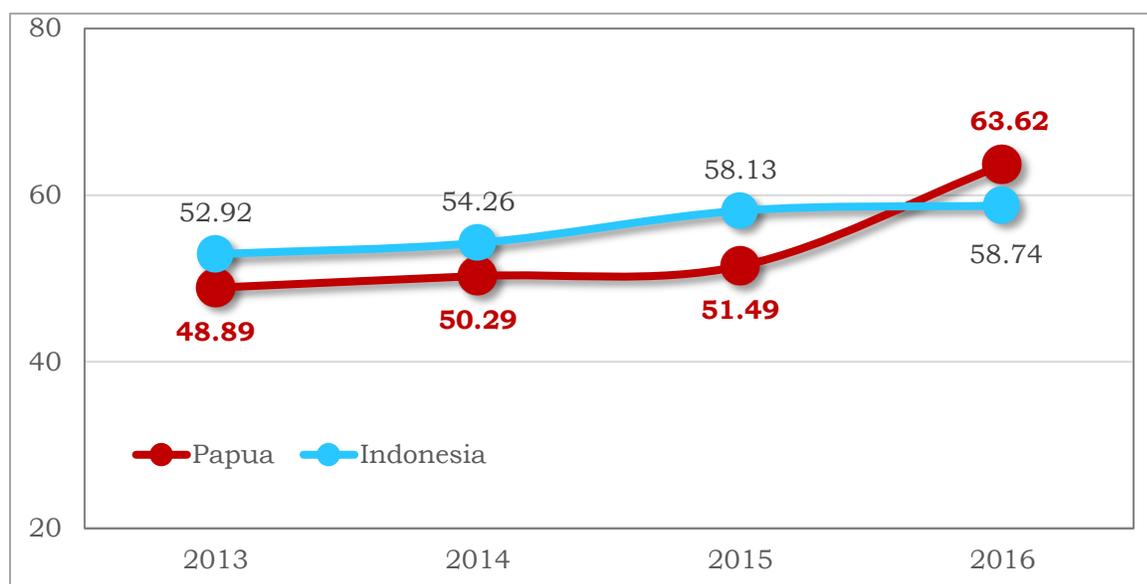


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Bonus demografi yang akan terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2020-2030 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas. Adanya bonus demografi menandakan bahwa penduduk usia produktif (15-64) lebih banyak dibandingkan penduduk yang nonproduktif (0-14 dan lebih dari 64 tahun), sehingga merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi mereka ini merupakan penduduk yang produktif untuk bekerja, membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dan pangan lebih banyak, karenanya perluasan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih banyak harus diwujudkan pada saat itu.

2.3.7. Angka kriminalitas yang Tertangani

Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor merupakan syarat mutlak yang harus ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Papua, agar daya saing investasi regional dapat terus meningkat setiap tahun. Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut adalah melalui penanganan penyelesaian kejahatan. Meskipun bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah Papua dapat memfasilitasinya melalui kebijakan fiskal untuk memperkuat dan mendukung penanganan kejahatan yang dilakukan oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia).

Gambar 2.70. Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%)

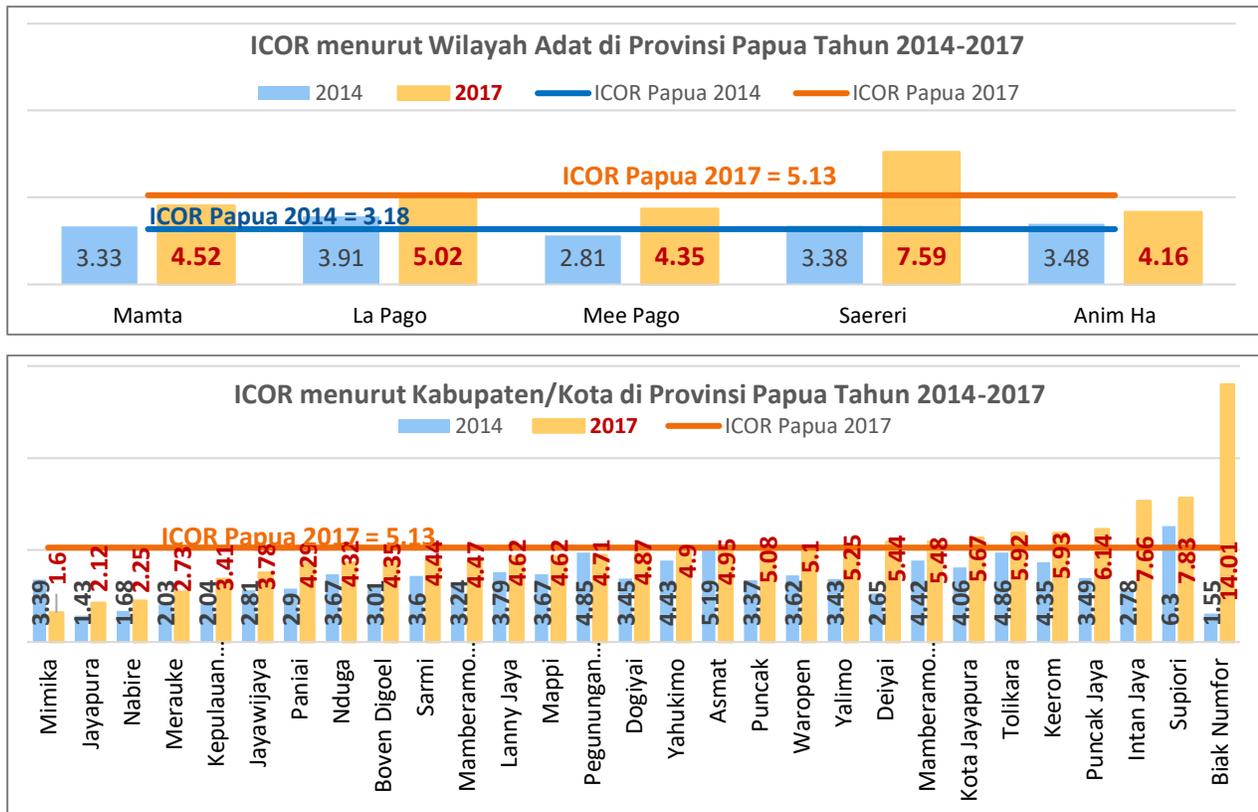
Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan indikator keamanan *Clearance Rate* (Persentase Penyelesaian Kejahatan) dalam Gambar 2.70, penyelesaian kejahatan di Provinsi Papua relatif lebih baik dibandingkan tingkat nasional, terutama pada tahun 2016, persentasenya dapat meningkat dan lebih tinggi dibandingkan secara nasional yaitu 63,62%, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,68% per tahun selama periode 2013-2016. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan di Provinsi Papua setiap tahunnya semakin membaik, yang mana hal ini merupakan hasil kesigapan POLRI bersama pemerintahan daerah dalam menangani atau menyelesaikan kejahatan yang selama ini terjadi di wilayah Papua.

2.3.8. Daya Saing Investasi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2 – 4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan.

Gambar 2.71. Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mampu menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang dapat menguntungkan investor. Fakta ini terekam pada nilai ICOR di setiap daerah yang cenderung lebih besar dari 4 poin, dan mengalami kenaikan rata-rata dalam interval 0,15% - 14% per tahun selama periode 2013-2017. Sehingga secara keseluruhan ICOR Provinsi Papua sebesar 5,13 pada tahun 2017, dan mengalami kenaikan sekitar 0,25% per tahun jika dibandingkan tahun 2014. ICOR sebesar 5,13 mempunyai arti bahwa untuk menciptakan nilai PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 5,13 rupiah.

Dalam konteks kewilayahan, dapat dikatakan bahwa wilayah adat yang dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi para investor adalah wilayah adat Anim Ha. Karena secara rata-rata ICOR untuk wilayah Anim Ha paling rendah, dan mendekati batas tertinggi ICOR moderat yakni sebesar 4,16 poin. Sementara untuk wilayah adat lainnya terlihat belum menguntungkan, terutama di wilayah adat Saireri dan La Pago masing-masing sebesar 7,59

poin dan 5,02 poin. Adapun untuk kabupaten/kota secara terpisah, teridentifikasi 6 kabupaten yang terlihat lebih menguntungkan para investor untuk berinvestasi yakni Kabupaten Jayawijaya dengan ICOR sebesar 3.78 poin, Kepulauan Yapen sebesar 3.41 poin, Merauke sebesar 2.73 poin, Nabire sebesar 2.25 poin, Jayapura sebesar sebesar 2.12 poin, dan yang paling rendah Mimika sebesar 1.60 poin.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.4.1.1. Pendidikan

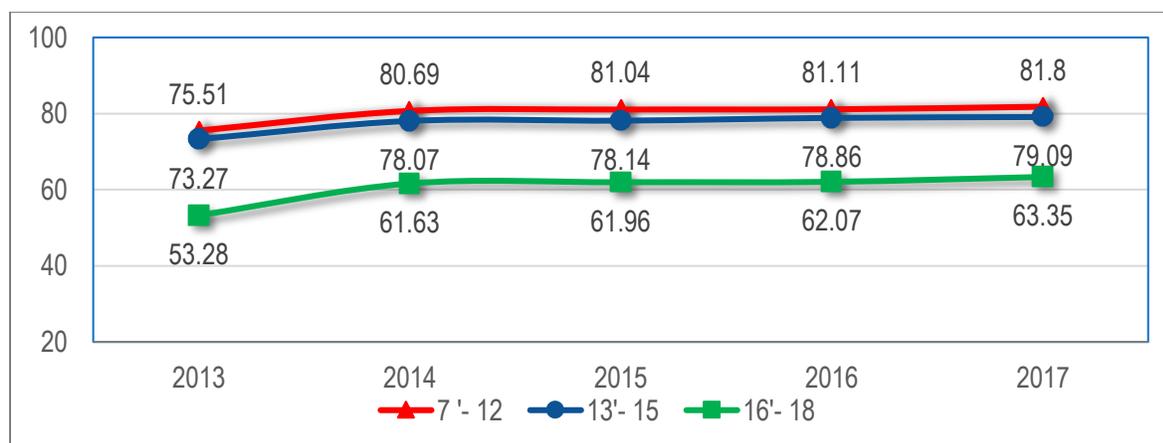
Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan asset yang potensial dalam upaya pengembangan daya saing daerah dalam berbagai aspek pembangunan. Kualitas penduduk suatu daerah merupakan penentu utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Namun asset tersebut membutuhkan perhatian khusus, jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik, sebaliknya justru akan menjadi beban suatu

daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia yang besar di Provinsi Papua harus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas secara sistematis salah satunya melalui pendidikan.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Gambar 2.72. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua

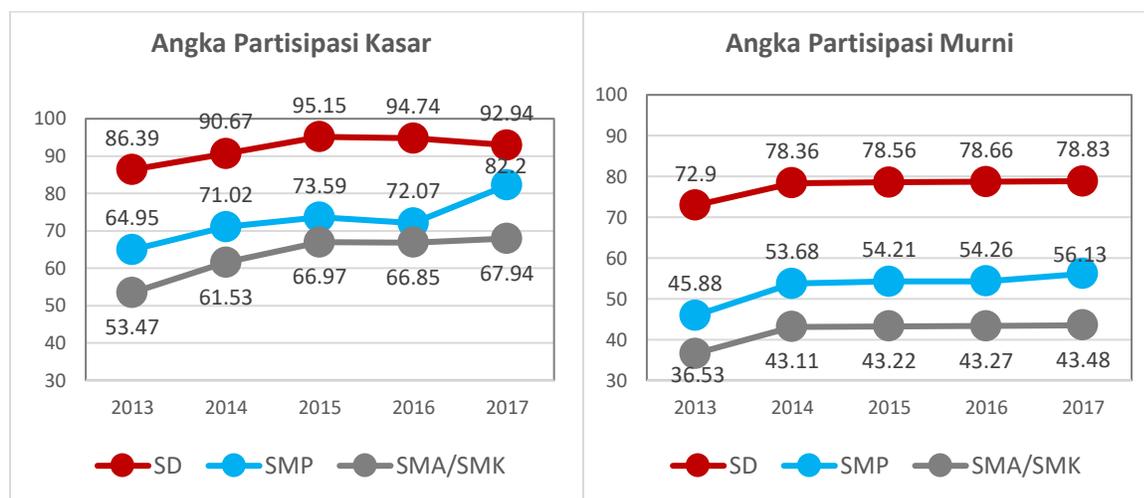


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Papua terlihat mengalami perkembangan yang cukup berarti sepanjang tahun 2013-2017, walaupun dalam perjalanannya sempat turun. Angka partisipasi sekolah Provinsi Papua, memang belum mencapai angka yang ideal, terlihat dari akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan 2013 untuk usia 7-12 tahun tercatat 75,514% artinya masih terdapat 24,49% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Tahun 2017, terlihat ada perkembangan positif untuk usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah meningkat menjadi 81,80%. Demikian juga untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun terlihat ada perkembangan angka partisipasi sekolah namun angkanya lebih rendah dari penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar provinsi Papua pada setiap jenjang pendidikan terlihat bervariasi. APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar sepanjang tahun 2013-2017 terlihat mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 91.98%. Kemudian jenjang pendidikan SMP dan SMA juga terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan masing-masing mencapai rata-rata SMP (72.77%) dan SMA/SMK (63.35%), namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat jauh lebih rendah yaitu sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 82.2% dan 67.94%. Kondisi ini merefleksikan bahwa daya serap penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan tanpa melihat batas usia di provinsi Papua masih rendah. Adapun untuk partisipasi pendidikan khusus (penyandang disabilitas) menurut publikasi dari Kemendiknas (2018) terlihat total peserta didik SLB (Sekolah Luar Biasa) di Provinsi Papua pada tahun 2018 adalah sebanyak 815 orang yang terdistribusi pada SLB tingkat SD sebanyak 415 orang, SLB tingkat SMP sebanyak 338 orang, dan SLB tingkat SMA sebanyak 62 orang.

Gambar 2.73. Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang *drop out* atau masih berada di jenjang SMP. Terlihat angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD

sebesar 72.9% tahun 2013, meningkat menjadi 78,36% pada tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2017 meningkat lagi sebesar 78.83%. Angka partisipasi murni ditingkat SMP dan SMA/SMK sampai dengan tahun 2017 juga meningkat masing-masing sebesar 56.13% dan 43.48. meskipun demikian nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkan tingkat SMP dan SMA/SMK. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.

Tabel 2.24. Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	7 - 12		13 - 15		16 - 18	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Merauke	116.99	95.65	94.2	68.2	91.07	67.13
Jayawijaya	97.4	88.09	98.09	71.2	103.4	70.67
Jayapura	110.55	93.94	100.54	71.57	131.83	68.06
Nabire	105.17	89.72	92.18	68.12	92.02	60.89
Kepulauan Yapen	108.91	93.97	94.08	65.55	87.91	56.23
Biak Numfor	115.9	91.64	104.38	71.13	106.17	64.59
Paniai	86.07	72.52	94.08	55.99	39.4	22.73
Puncak Jaya	89.13	73.69	55.89	28.46	47.62	18.18
Mimika	104.14	91.87	125.32	73.15	119.56	68.98
Boven Digoel	100.2	83.48	106.19	67.65	58.96	29.84
Mappi	119.11	85.68	57.44	35.96	26.39	15.16
Asmat	100.35	81.34	58.23	36.45	41.42	18.11
Yahukimo	77.56	60.4	47.98	22.73	28.44	16.03
Pegunungan Bintang	86.86	67.28	53.04	28.24	42.59	26.28
Tolikara	62.87	60.46	73.33	50.85	48.66	32.09
Sarmi	111.46	93.78	93.2	75.79	71.37	48.83
Keerom	101.89	87.68	95.5	69.54	81.1	62.88
Waropen	110.33	91.29	78.19	69.41	109.41	64.97
Supiori	110.56	94.25	101.86	66.32	86.88	57.24
Mamberamo Raya	112.15	97.6	69.17	52.65	54.43	49.38
Nduga	66.45	56.95	47.77	30.67	12.69	6.46
Lanny Jaya	72.87	68.85	87.48	67.74	51.56	43.67
Mamberamo Tengah	88.13	85.85	71.03	70.31	79.18	59.91
Yalimo	91.77	83.34	78.46	53.32	42.4	30.14
Puncak	58.82	48.88	35.71	18.76	19.04	12.41
Dogiyai	102.49	84.24	81.59	64.45	49.06	40.7
Intan Jaya	74.73	61.74	40.84	12.61	25.31	12.01
Deiyai	81.26	59.51	53.91	41.42	45.96	39.86
Kota Jayapura	105.23	93.28	108.69	80.85	105.25	62.75
Papua	92.94	78.83	82.2	56.13	67.94	43.48

Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2014-2017

Jika dilihat antar kabupaten/kota, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2.24 di atas, terlihat masih terdapat kesenjangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan antar wilayah pembangunan. APK tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI, diduduki oleh Kabupaten Mappi dengan angka 119.11% kemudian diikuti Kabupaten Merauke sebesar 116.99%, Kabupaten Biak Numfor sebesar 115.9% dan seterusnya. Sedangkan terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai APK di bawah 100% di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Paniai, Deiyai, Yahukimo, Intan Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara dan Puncak. Selain itu, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu sebesar 97.6%, kemudian diikuti Kabupaten Merauke dan Supiori masing-masing sebesar 95.65% dan 94.25%. terdapat juga daerah dengan capaian APM terendah di antaranya adalah Kabupaten Deiyai (59.51%), Nduga (56.95%) dan Puncak (48.88). Terlihat selisih antara APK dan APM pada masing-masing kabupaten. Oleh karena APM menunjukkan anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu maka bila semuanya bersekolah tepat waktu maka nilainya mencapai 100. Biasanya angka APM akan lebih rendah dari APK dikarenakan nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Jadi selisih antara APK dan APM menggambarkan proporsi murid yang terlambat sekolah atau terlalu cepat sekolah.

APK dan APM untuk jenjang SMP/MTS yang tertinggi di Kabupaten Mimika, yang terlihat mencolok dibandingkan daerah kabupaten lainnya di Provinsi Papua. APK dan APM Kabupaten Mimika memiliki nilai masing-masing 125.32% dan 73.15% sedangkan kabupaten Puncak memiliki APK dan APM terendah dengan nilai masing-masing 35.71% dan 18.76%. Pada jenjang SMA/SMK/MA angka partisipasi kasar tertinggi diduduki oleh kabupaten Jayapura dengan angka sebesar 131.83% dan angka partisipasi murni tertinggi diduduki oleh kabupaten Jayawijaya dengan nilai mencapai 70.67%. Sedangkan kabupaten dengan APK dan APM terendah yaitu kabupaten Nduga dengan nilai 12.69% dan 6.46%.

Berdasarkan APK dan APM per wilayah kabupaten/kota, terlihat jelas bahwa Provinsi Papua selama ini mengalami ketimpangan *with in* dan *with out* dalam pembangunan pendidikan. Dikatakan ketimpangan *with in* karena sebagian besar daerah di Papua mempunyai angka APM yang rendah, bahkan diantaranya ada yang dibawah 50, terutama

untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Raya. Dimana kondisi ini disebabkan rasio murid baik itu terhadap sekolah maupun guru masih banyak yang berada di bawah standar nasional. Sedangkan dikatakan *with out* karena ketimpangan pembangunan pendidikan juga terjadi antarwilayah, terutama ketimpangan dalam distribusi guru. Semua faktor ini akhirnya mengakibatkan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua masih belum bisa mencapai program nasional wajib belajar sembilan tahun.

2) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APTS) paling tinggi di Provinsi Papua Tahun 2017 adalah APTS SMP yaitu sebesar 1,21% atau sebanyak 1.532 orang, kemudian diikuti APTS SMP sebesar 0,93% atau sebesar 866 orang dan yang paling rendah adalah APTS SD yaitu sebesar 0,56% atau sebanyak 2.521 orang. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan APTS per jenjang pendidikan SD di Provinsi Papua, terlihat paling tinggi berada di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 6,06%, Pegunungan Bintang sebesar 2,76%, Lanny Jaya sebesar 2,98%, Membramo Tengah yaitu sebesar 1,91 persen dan Puncak sebesar 1,68 persen. Dari hasil tersebut jika dipetakan dalam wilayah adat maka ada terdapat 2 wilayah yang menjadi sebaran APTS tertinggi yaitu Mamta dan La Pago.

Tabel 2.25. Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA/ SMK		
		Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS
Mamta	Jayapura	20.068	69	0,34	8.456	92	1,09	7.196	12	0,17
	Sarmi	6.603	43	0,65	2.347	22	0,94	1.571	2	0,13
	Keerom	8.453	40	0,47	2.469	25	1,01	1.954	10	0,51
	Memberamo Raya	6.959	422	6,06	1.617	30	1,86	593	29	4,89
	Kota Jayapura	30.984	70	0,23	13.733	29	0,21	9.966	71	0,71
La Pago	Jaya Wijaya	25.428	48	0,19	7.385	160	2,17	6.570	164	2,50
	Puncak Jaya	4.501	25	0,56	1.001	-	0,00	809	9	1,11
	Yahukimo	43.249	75	0,17	5.451	24	0,44	1.663	23	1,38
	Pegunungan Bintang	871	24	2,76	212	11	5,19	658	5	0,76
	Tolikara	1.607	-	0,00	3.638	8	0,22	1.094	-	0,00
	Nduga	5.069	14	0,28	570	14	2,46	148	-	0,00

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA/ SMK		
		Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS
	Lanny Jaya	15.341	457	2,98	3.995	239	5,98	1.888	36	1,91
	Membramo Tengah	4.825	92	1,91	834	29	3,48	334	2	0,60
	Yalimo	7.769	45	0,58	2.611	1	0,04	801	19	2,37
	Puncak	3.698	62	1,68	868	2	0,23	332	-	0,00
Mee Pago	Nabire	22.493	103	0,46	8.305	54	0,65	7.525	93	1,24
	Paniai	21.003	34	0,16	3.944	441	11,18	1.070	3	0,28
	Mimika	35.441	75	0,21	11.479	14	0,12	8.622	80	0,93
	Dogiyai	17.011	99	0,58	1.996	2	0,10	884	-	0,00
	Deiyai	7.086	41	0,58	1.562	24	1,54	924	5	0,54
	Intan Jaya	4.486	14	0,31	659	2	0,30	50	13	26,00
Saereri	Biak Numfor	23.286	16	0,07	9.674	28	0,29	7.825	39	0,50
	Kepulauan Yapen	15.021	68	0,45	5.953	38	0,64	3.651	92	2,52
	Waropen	4.492	12	0,27	1.705	9	0,53	1.168	27	2,31
	Supiori	4.093	3	0,07	1.594	9	0,56	1.261	8	0,63
Anim Ha	Merauke	30.573	101	0,33	1.163	122	10,49	675	104	15,41
	Boven Digoel	11.781	25	0,21	3.144	12	0,38	1.922	2	0,10
	Mappi	25.298	389	1,54	5.144	75	1,46	3.180	13	0,41
	Asmat	18.692	55	0,29	2.593	16	0,62	1.261	5	0,40
Papua		448.483	2.521	0,56	126.477	1.532	1,21	93.127	866	0,93

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014-2017 (data diolah)

Kemudian, APTS SMP untuk jenjang pendidikan SMP tercatat paling tinggi terdapat di Kabupaten Paniai (11,18%), Merauke (10,49%), Pegunungan Bintang (5,19%), Lanny Jaya (5,98%) dan Mamberamo Tengah (3,48%). Adapun masing-masing kabupaten tersebut tersebar di beberapa wilayah adat itu Mee Pago, Anim Ha dan La Pago. Selain itu, pada jenjang pendidikan menengah jika dilihat menurut kewilayahan Kabupaten Intan Jaya (Mee Pago) memiliki nilai APTS tertinggi bahkan di atas 20%. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Merauke (Anim Ha) sebesar 15,41%, Mamberamo Raya (Mamta) sebesar 4,89% dan kabupaten lainnya yang berada di bawah 3%.

3) Angka Melanjutkan Sekolah

Melanjutkan dari APTS di atas, angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat cukup baik, namun perlu ditingkatkan lebih optimal lagi. Dari data yang tersaji di bawah ini tercatat sepanjang tahun 2015-2017 angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP terlihat sudah cukup baik dan cenderung terjadi peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2017 angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sebesar 86,17% yang pada tahun sebelumnya sebesar 83,33% (2016).

Tabel 2.26. Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK

URAIAN	2015	2016	2017
Lulusan SD	52.658	48.828	54.891
Siswa Baru SMP	39.550	40.690	42.685
ANGKA MELANJUTKAN SD KE SMP	75,11	83,33	86,17
Lulusan SMP	30.881	33.792	36.480
Siswa Baru SMA/SMK	26.503	31.054	32.295
ANGKA MELANJUTKAN SMP KE SMA/SMK	85,82	91,9	88,53

Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2014-2017

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan angka melanjutkan sekolah SMP ke SMA/SMK terlihat mengalami fluktuatif, namun cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016-2017 sebesar 3%, namun secara keseluruhan masih terlihat cukup baik dalam rentan waktu tiga tahun terakhir.

4) Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.26 di bawah ini, terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Papua terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan jumlah sekolah bernilai positif. Artinya, penambahan sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang cenderung semakin melek terhadap pendidikan. Sedangkan pada pendidikan sekolah dasar sepanjang tahun 2013-2017 terlihat cenderung berkurang sampai dengan tahun 2017 (lihat Tabel 2.277).

Tabel 2.27. Jumlah Gedung Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (unit)

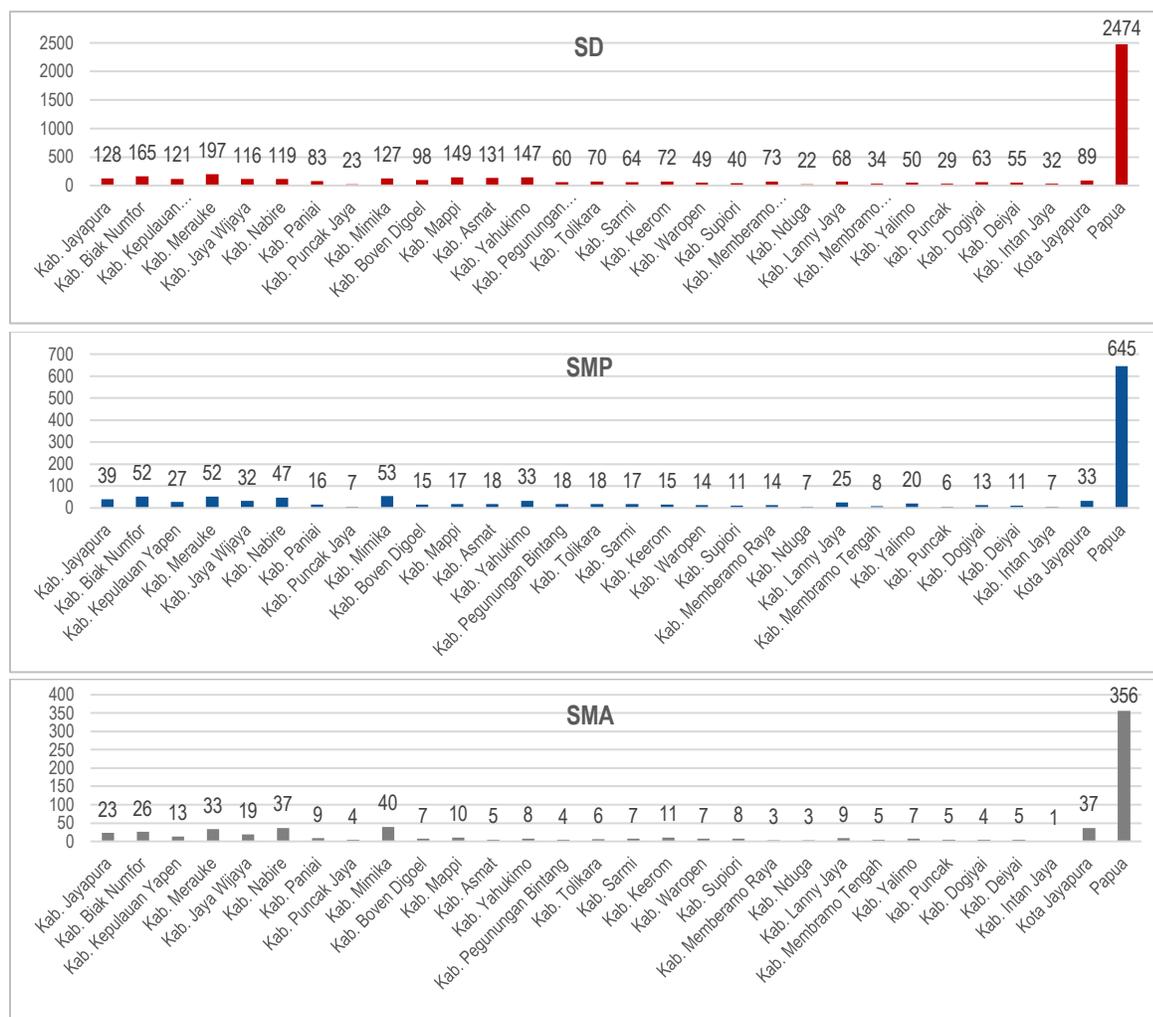
Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
Sekolah Dasar	2.829	2.982	2.415	2.277	2.474
Sekolah Menengah Pertama	540	582	582	587	645
Sekolah Menengah Atas	197	202	212	211	225
Sekolah Menengah Kejuruan	93	94	117	130	131
Jumlah	3.659	3.860	3.326	3.205	

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan perkembangan jumlah sekolah di Provinsi Papua selama lima tahun terakhir terlihat semakin menurun (bernilai negatif). Adapun Menurunnya jumlah sekolah yang paling dominan adalah sekolah dasar yaitu pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.829 unit dan terus menurun hingga tahun 2017 berjumlah 2.474 unit. Berdasarkan Data Dapodik Kemendiknas (2017), pada tahun 2016 tercatat dari total ruang kelas yang ada di Provinsi Papua sebanyak 22.377 kelas, sekitar 24,86% yang berkondisi baik, sisanya 75,14% dalam kondisi rusak. Dimana yang paling banyak adalah rusak ringan dan sedang sekitar 62,07%, ini berarti ada 13,07% yang rusak berat dan total. Dapodik (2017) juga mengidentifikasi bahwa jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat dan total lebih banyak ditemukan pada jenjang sekolah dasar kurang lebih sekitar 15,65%, dan jenjang SMP sebesar 10,70%.

Persebaran sekolah baik pada semua jenjang pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah di Provinsi Papua. Jika dicermati pada Gambar 2.74, tercatat sangat bervariasi jumlah sekolah di masing-masing daerah di Provinsi Papua. Distribusi sekolah dasar di Provinsi Papua jika diperhatikan paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke (197 unit) dan daerah dengan jumlah sekolah dasar paling sedikit adalah Kabupaten Nduga (22 unit). Untuk jenjang pendidikan SMP, paling banyak terdapat di Kabupaten Mimika (53 unit), dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Puncak (6 unit). Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terdistribusi terbanyak ada di Kabupaten Mimika (40 Unit) dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Intan Jaya (1 unit).

Gambar 2.74. Jumlah Sekolah pendidikan SD, SMP dan SMA Tahun 2017



Sumber: DAPODIK 2017 (data diolah)

5) Perkembangan Guru dan Murid

Selain itu, dengan semakin banyaknya jumlah sekolah sehingga kebutuhan guru juga semakin bertambah untuk semua jenjang pendidikan. Berbeda dengan kondisi jumlah sekolah pada tabel di atas, pertumbuhan perkembangan jumlah guru terlihat mencapai angka 17,69% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2017 mencapai 16.208 orang, kemudian untuk SMP mencapai 7.547 orang, pendidikan SMA sebesar 4.203 orang dan SMK mencapai 2.860 orang (lihat Tabel 2.28). Untuk tenaga guru di provinsi Papua, terlihat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16.23 % pertahun. Rata-rata

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh tenaga guru SD yaitu sebesar 26.34 % yang diikuti oleh tenaga guru SMA (18.88%), SMP (16.12%) dan SMK (11.65%).

Tabel 2.28. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua

Jenjang Pendidikan	2013 (org)	2014 (org)	2015 (org)	2016 (org)	2017 (org)	Rata ² growth (%)
Sekolah Dasar	12.348	11.997	8.310	17.667	16.208	17,69
Sekolah Menengah Pertama	5.060	7.089	7.331	7.687	7.547	11,64
Sekolah Menengah Atas	2.586	3.671	3.971	4.230	4.234	14,19
Sekolah Menengah Kejuruan	2.214	3.077	2.502	2.869	2.860	8,66
Jumlah	22.208	25.834	22.114	32.453	30.849	10,93

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Dengan semakin meleknnya masyarakat terhadap di bidang pendidikan berdampak juga terhadap penambahan jumlah murid sepanjang tahun 2013-2017. Jika dilihat pada Tabel 2.28 di bawah ini perkembangan jumlah murid per jenjang pendidikan secara keseluruhan semakin bertambah pesat, hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan yang mencapai angka 3,69%. Dalam Tabel 2.29, terlihat bahwa di semua jenjang pendidikan terjadi penambahan murid setiap tahunnya. Rata-rata penambahan jumlah murid paling banyak terlihat pada rata-rata pertumbuhan jenjang pendidikan SMA dan SMK yaitu masing-masing sebesar 5,95 persen dan 5,73 persen. Sedangkan jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama masing-masing mencapai 3,07 dan 4,62 persen. Meskipun pertumbuhan sekolah dasar hanya mencapai 3,07 persen, namun dari sisi jumlah murid pendidikan sekolah dasar paling dominan jumlahnya yaitu mencapai 448.483 orang sampai dengan tahun 2017. Kemudian diikuti dengan SMP sebesar 126.477 orang, lalu 61.786 orang untuk SMA, serta 31.341 orang untuk SMK.

Tabel 2.29. Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	2013 (org)	2014 (org)	2015 (org)	2016 (org)	2017 (org)	Rata ² growth (%)
Sekolah Dasar	399.444	382.292	412.187	445.243	448.483	3,07
Sekolah Menengah Pertama	106.482	101.392	115.296	123.823	126.477	4,62
Sekolah Menengah Atas	49.252	48.514	53.851	59.126	61.786	5,95
Sekolah Menengah Kejuruan	25.892	26.174	25.588	33.144	31.341	5,73
Jumlah	581.070	558.372	606.922	661.336	668.087	3,69

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah guru dan murid di Provinsi Papua pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) juga sangat berdampak terhadap ketersediaan guru dan persebarannya selama ini. Sepanjang tahun 2013-2017, terlihat bahwa rasio

ketersediaan guru terhadap murid untuk pendidikan dasar rata-rata sudah sesuai dan memenuhi aturan. Sampai dengan tahun 2017 rata-rata satu orang guru dapat memberikan pelajaran hingga mencapai 24 orang untuk satu kelasnya, sedangkan ketentuan yang berlaku efektifnya satu orang guru paling banyak memberikan pelajaran yaitu sebanyak 25 orang per kelas.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua, rata-rata rasio guru terhadap murid dikabupaten/kota nilainya sangat bervariasi. Rata-rata wilayah adat Mamta, Saereri dan Anim Ha memiliki rasio guru terhadap murid cukup ideal, meskipun di antara ketiganya masih terdapat daerah dengan rasio yang cukup tinggi di antaranya Mamberamo Raya, Mappi dan Asmat. Sedangkan pada wilayah adat La Pago dan Mee Pago didominasi oleh daerah yang memiliki rasio guru terhadap murid dapat dikatakan cukup tinggi, meskipun tidak semua masuk dalam kategori belum ideal. Adapun daerah dengan rasio guru terhadap murid cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Paniai, Dogiyai dan Deiyai.

Tabel 2.30. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Wilayah Adat	Kabupaten/kota	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua		23,87	21,84	22,44	24,20
Mamta	Jayapura	17,28	15,10	15,03	16,30
	Sarmi	20,79	14,10	14,18	15,27
	Keerom	13,14	13,17	13,62	14,47
	Mamberamo Raya	30,26	22,94	26,84	30,85
	Kota Jayapura	22,63	19,87	19,52	19,80
La Pago	Jayawijaya	20,51	27,81	27,26	29,97
	Puncak Jaya	15,79	26,06	25,57	26,97
	Yahukimo	48,12	59,88	60,22	62,44
	Pegunungan Bintang	8,64	23,12	33,80	46,88
	Tolikara	51,10	41,59	39,63	37,54
	Nduga	31,39	33,44	27,05	32,04
	Lanny Jaya	34,18	39,64	37,02	35,54
	Mamberamo Tengah	41,56	36,08	25,95	26,69
	Yalimo	90,25	28,15	27,05	29,57
	Puncak	20,26	21,18	20,11	23,91
	Mee Pago	Nabire	21,85	16,93	17,12
Paniai		20,16	30,10	31,84	37,51
Mimika		26,97	19,31	19,23	20,41
Dogiyai		43,95	30,18	35,85	39,43
Intan Jaya		25,09	31,50	29,20	20,99
Deiyai		34,18	14,89	17,28	31,18
Saereri	Kepulauan Yapen	22,51	18,25	19,29	21,71
	Biak Numfor	21,52	17,56	17,85	19,95
	Waropen	7,30	11,39	11,98	12,78
	Supiori	15,95	13,65	14,41	17,50
Anim Ha	Merauke	20,89	17,37	17,75	18,69

Wilayah Adat	Kabupaten/kota	2014	2015	2016	2017
	Boven Digoel	26,64	18,19	19,00	18,89
	Mappi	39,10	29,58	29,70	32,87
	Asmat	33,26	28,17	27,68	31,58

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Selanjutnya, pada pendidikan menengah di Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio guru terhadap murid sudah cukup ideal meskipun terbilang cukup rendah. Dalam rentan waktu lima tahun terakhir, rata-rata rasio guru terhadap murid terbilang cukup rendah, rata-rata guru dapat mengajar mencapai 12 siswa setiap tahunnya. Paling tinggi rasio guru terhadap murid yaitu pada tahun 2016 yaitu satu orang guru dapat mengajar 13 siswa.

Tabel 2.31. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua		11,07	12,27	13,22	13,13
Mamta	Jayapura	11,88	13,38	13,95	14,19
	Sarmi	7,90	9,88	12,63	12,77
	Keerom	5,01	8,88	9,63	10,23
	Mamberamo Raya	21,22	9,86	13,88	16,03
	Kota Jayapura	7,82	12,33	13,13	8,62
La Pago	Jayawijaya	26,61	17,49	18,82	18,35
	Puncak Jaya	11,70	13,73	16,68	15,26
	Yahukimo	9,43	13,97	11,69	12,99
	Pegunungan Bintang	6,77	7,59	10,89	11,15
	Tolikara	8,73	14,83	14,80	17,93
	Nduga	3,46	3,00	5,31	6,17
	Lanny Jaya	16,29	24,64	21,47	21,70
	Mamberamo Tengah	4,05	7,36	4,42	6,19
	Yalimo	51,89	14,08	11,54	13,35
	Puncak	3,35	5,02	4,56	6,04
Mee Pago	Nabire	16,01	12,02	12,23	10,97
	Paniai	10,68	14,51	21,57	15,63
	Mimika	13,00	10,44	12,08	10,86
	Dogiyai	7,72	11,89	11,63	10,78
	Intan Jaya	4,50	5,00	4,13	9,63

	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
	Deiyai	11,96	5,06	7,39	9,47
Saereri	Kepulauan Yapen	9,81	15,29	15,98	16,07
	Biak Numfor	14,59	13,41	14,26	14,54
	Waropen	6,07	7,48	8,63	9,42
	Supiori	4,90	8,16	8,06	10,78
Anim Ha	Merauke	12,36	12,32	13,45	13,48
	Boven Digoel	6,98	10,20	9,76	10,22
	Mappi	16,49	15,33	18,53	16,48
	Asmat	21,67	10,63	10,41	10,60

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Berdasarkan data kewilayahan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2014-2017 tercatat bahwa rata-rata sudah memenuhi peraturan yang berlaku, meskipun terlihat masih cukup rendah baik pada wilayah Mamta (12 siswa/guru), La Pago (13 siswa/guru), Mee Pago (11 siswa/guru), Saereri (11 siswa/guru) dan Anim Ha (13 siswa/guru). Untuk sebaran guru berkualifikasi pendidikan DIV dan S1 di Provinsi Papua terbilang masih cukup rendah. Dari data pada tabel di bawah ini, terlihat untuk sekolah dasar sebarannya masih di bawah 60%, SMP sudah cukup baik berkisar antara 84-87% dan pendidikan menengah yang memiliki sebaran cukup rendah meskipun pada tahun 2016 telah mencapai 95% namun turun di tahun 2017 sebesar 60%.

Tabel 2.32. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Papua	54,94	58,89	84,36	87,21	94,71	59,68
Jayapura	65,73	73,77	89,35	91,90	96,91	61,14
Sarmi	77,04	71,92	89,10	91,67	97,06	69,92
Keerom	73,98	75,96	85,57	84,95	96,81	69,11
Memberamo Raya	18,56	20,67	82,50	85,86	94,59	100,00
Kota Jayapura	79,11	83,10	91,87	93,01	96,70	55,93
Jaya Wijaya	45,92	53,89	82,26	86,82	95,33	64,80
Puncak Jaya	28,03	55,24	86,57	90,16	97,62	58,49

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Yahukimo	26,25	38,70	76,97	75,00	97,67	76,56
Pegunungan Bintang	54,35	48,25	95,65	92,05	100,00	59,32
Tolikara	44,17	47,34	54,35	63,09	94,92	81,97
Nduga	34,02	41,12	52,94	62,32	84,62	75,00
Lanny Jaya	20,71	29,71	42,86	69,12	90,00	93,10
Membramo Tengah	23,40	26,35	50,88	68,75	92,31	100,00
Yalimo	28,74	43,00	56,73	68,75	92,11	61,67
Puncak	36,76	40,31	86,05	91,94	96,36	70,91
Nabire	55,00	58,84	88,26	90,28	96,29	57,00
Paniai	45,90	46,61	81,58	82,21	86,89	57,38
Mimika	69,63	72,98	92,98	94,09	94,33	38,92
Dogiyai	44,41	37,57	83,59	86,03	95,24	53,66
Deiyai	25,07	28,35	75,47	79,12	92,31	55,06
Intan Jaya	53,57	67,00	87,50	95,38	100,00	100,00
Biak Numfor	42,44	54,32	75,00	82,45	89,57	67,47
Kepulauan Yapen	58,96	60,22	85,15	86,15	95,73	64,33
Waropen	51,42	53,18	85,28	85,96	88,46	62,10
Supiori	74,81	83,71	86,78	92,31	91,06	85,47
Merauke	57,36	62,70	90,91	92,71	93,43	52,04
Boven Digoel	59,82	55,61	84,95	89,52	93,24	48,94
Mappi	34,90	34,34	86,91	84,78	97,86	68,39
Asmat	47,54	50,87	92,50	88,32	97,22	90,76

Sumber: Kemendikbud RI (2017) dan Bappeda Papua (2018)

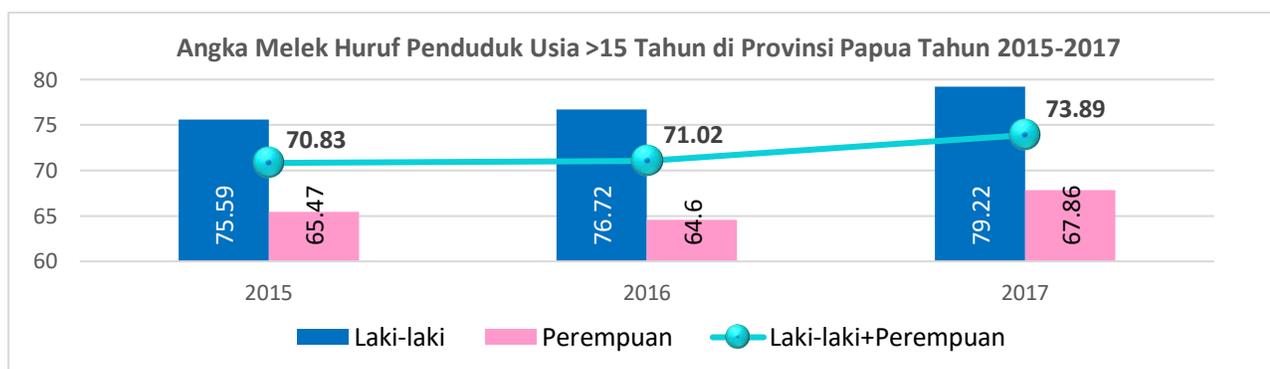
Secara kewilayahan, pada jenjang pendidikan sekolah dasar terlihat bahwa sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 belum merata. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama sebaran guru berpendidikan tinggi sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa daerah yang sebarannya masih terbilang cukup rendah. Sedangkan, pendidikan menengah tercatat terdapat beberapa daerah dengan sebaran mencapai angka sempurna sampai tahun 2017 di antaranya adalah Kabupaten Intan Jaya, Membramo Tengah dan

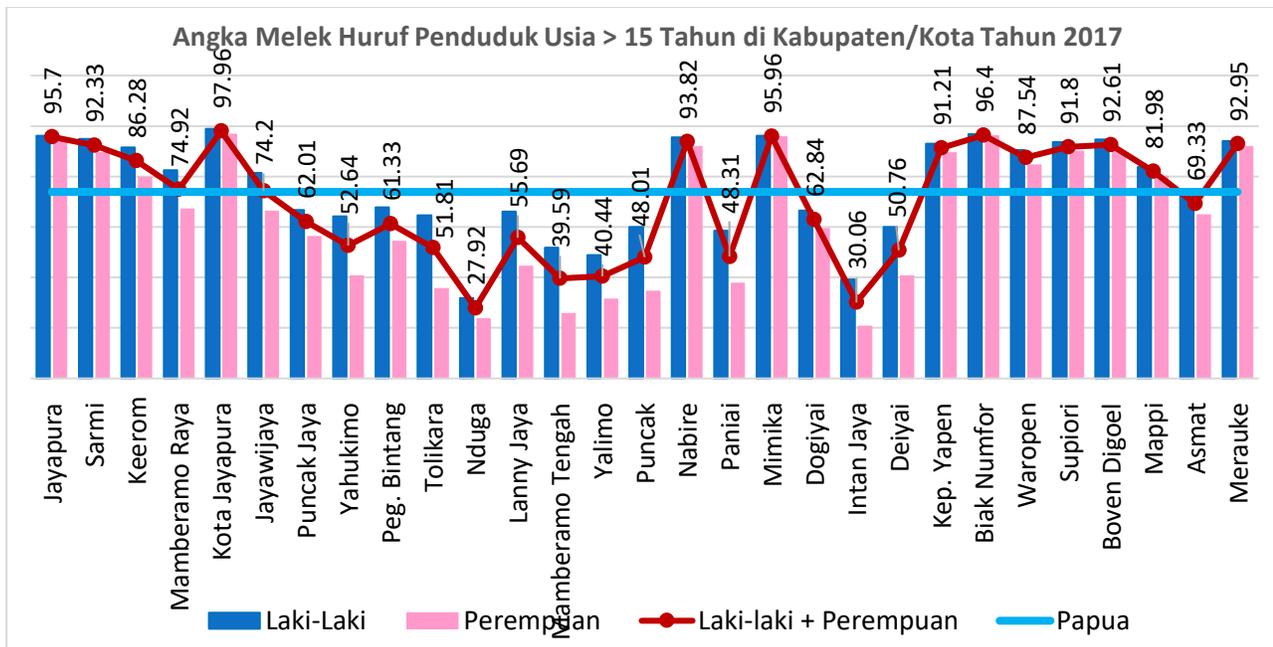
Memberamo Raya. Namun masih terdapat juga daerah yang memiliki kualifikasi guru berpendidikan tinggi bahkan sangat rendah di Provinsi Papua. Secara keseluruhan, sebaran kualifikasi guru berpendidikan tinggi baik pada pendidikan dasar dan menengah masih perlu diperhatikan. Rata-rata sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 yang cukup rendah paling banyak terdapat pada daerah yang sulit akses tepatnya pada beberapa wilayah pegunungan tengah.

6) Angka Melek Huruf

Berdasarkan data yang diperoleh, angka melek huruf untuk penduduk usia > 15 tahun di Provinsi Papua cenderung meningkat setiap tahunnya, namun perlu upaya yang optimal dalam memberantas buta aksara di Provinsi Papua. Dengan rata-rata cenderung meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Jika dilihat lebih jauh lagi, masih terdapat beberapa daerah dengan angka melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun ke atas masih di bawah 50% yang kebanyakan tersebar di wilayah adata La Pago dan Mee Pago (lihat Gambar 2.75).

Gambar 2.75. Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%)





Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika dilihat berdasarkan data kewilayahan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 terdapat 13 kabupaten/kota dengan capaian > 90%. Di antaranya adalah Kabupaten Merauke, Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Nabire, Mimika, Deiyai, Kep. Yapen, Biak Numfor, Supiori dan Boven Digoel. Sedangkan daerah lainnya masih capaiannya masih di bawah 90%. Selain itu, terdapat juga daerah dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun yang capaiannya di bawah 60% yang rata-rata tersebar di wilayah adat La Pago dan Mee Pago.

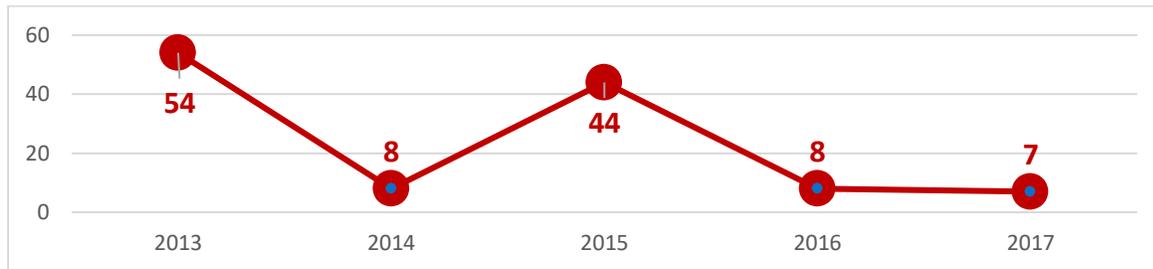
2.4.1.2. Kesehatan

1) Angka kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berdasarkan Gambar 2.76, diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun cukup pesat hingga tahun 2017. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat. Tercatat pada tahun 2013 kasus AKB mencapai hingga 54 kasus AKB, kemudian turun di tahun 2014 sebanyak 8 kasus namun kembali mengalami kenaikan yang

cukup pesat di tahun 2015 sebesar 44 kasus. Namun dalam dua tahun terakhir kasus AKB mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 8 kasus tahun 2016 dan 7 kasus di tahun 2017.

Gambar 2.76. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

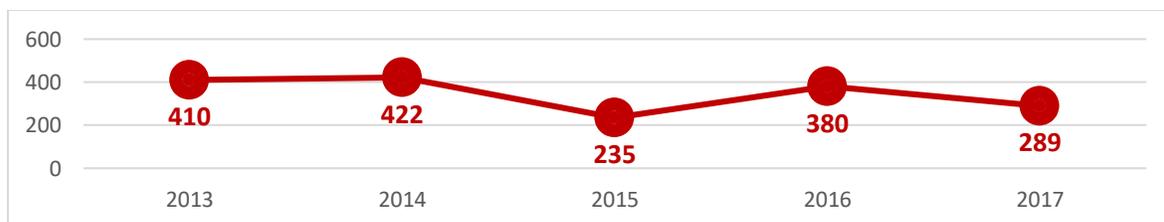


Sumber: Provinsi Papua

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Gambar 2.77. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

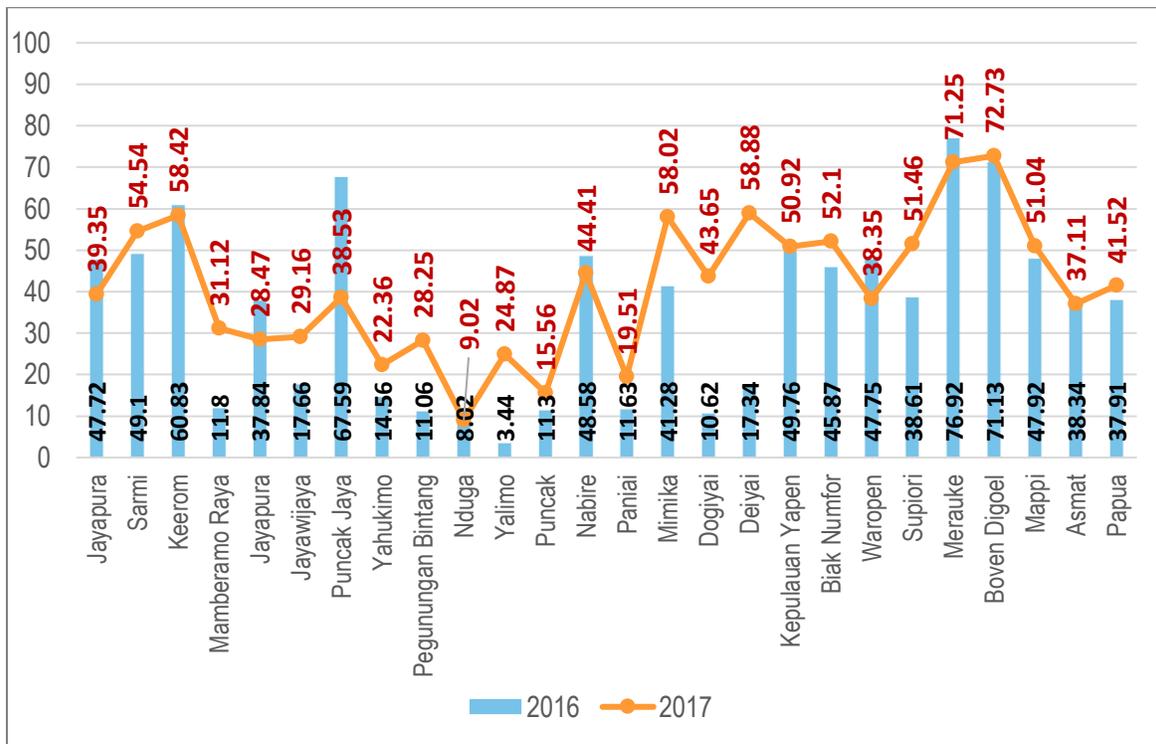


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi dan cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2013 kasus AKI mencapai 410 kasus, sampai dengan tahun

2017 kasus AKI menurun hingga tersisa 289 kasus (lihat Gambar 2.77). Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi kasus AKI di Provinsi Papua untuk tahun-tahun yang akan datang.

Gambar 2.78. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)



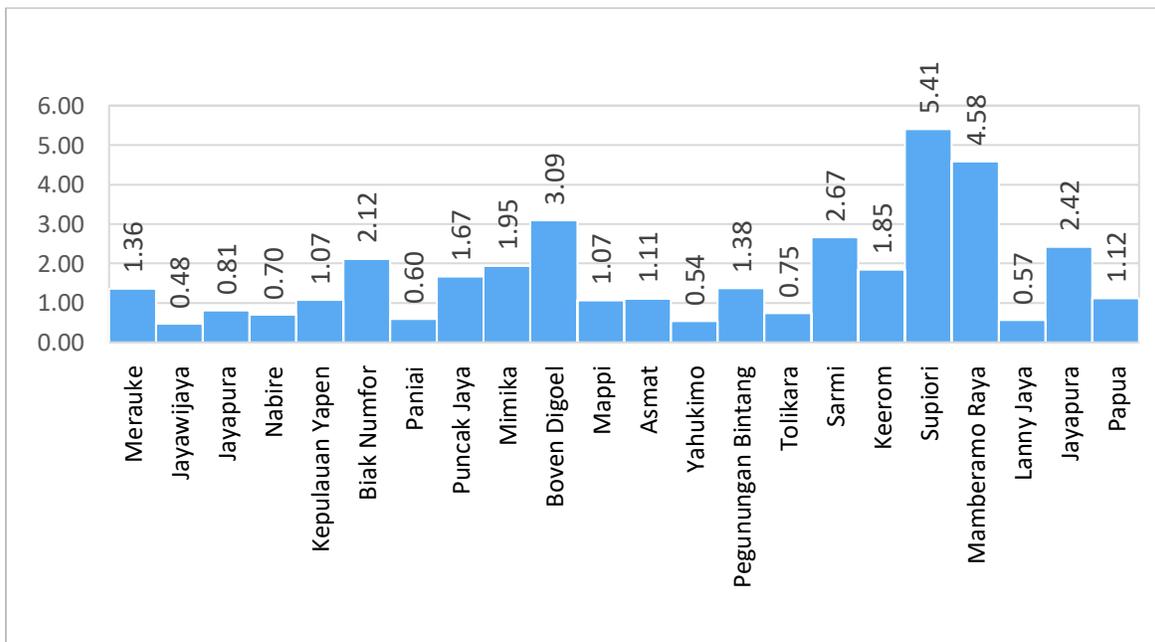
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 – 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.78, diketahui bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan dapat dikatakan masih cukup rendah untuk kondisi dua tahun terakhir. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua pada dua tahun berturut-turut masih di bawah 50 persen. Berdasarkan akumulasi dari 29 kabupaten/kota, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terbilang masih rendah. Adapun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di masing-masing wilayah adat masih terbilang cukup rendah, bahkan ada beberapa daerah dengan persentase di bawah 20 persen pada kondisi di tahun 2017.

3) Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2016 cakupan puskesmas per 10.000 penduduk sebesar 16 unit untuk 10.000 penduduk di Papua. Berdasarkan pada tabel di atas, banyak terjadi perubahan-perubahan terhadap penambahan unit puskesmas di hampir semua daerah di Provinsi Papua. Hal tersebut terlihat dari selisih kondisi pada tahun 2012 dengan kondisi di tahun 2016 dan perubahan tersebut terlihat di setiap masing-masing wilayah adat baik Mamta, Saereri, La Pago, Mee Pago maupun Anim Ha.

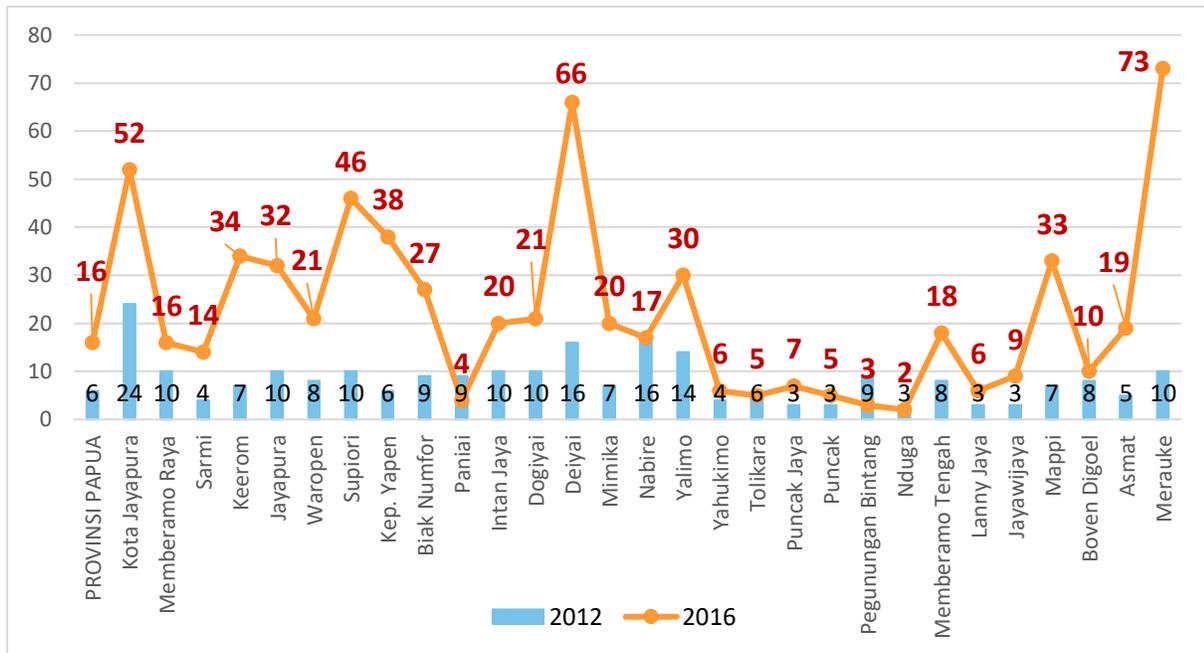
Gambar 2.79. Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (diolah)

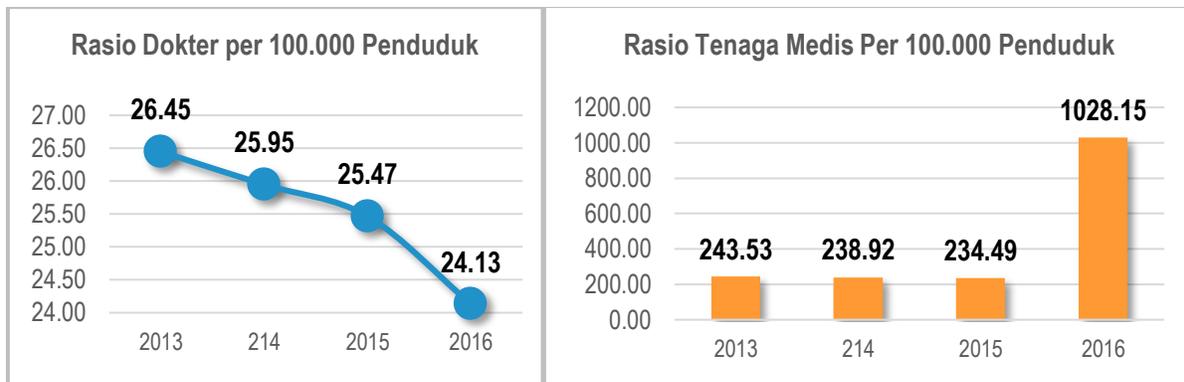
Sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 dapat dikatakan belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Terdapat ketimpangan distribusi ketersediaan puskesmas di 29 kabupaten/kota di Papua, khususnya di wilayah adat La Pago dan Mee Pago yang tercatat rata-rata dalam pelayanan kesehatan 10.000 penduduk adalah sebanyak 2-18 unit puskesmas saja. Meskipun tidak semua kabupaten memiliki ketersediaan puskesmas yang terbilang cukup rendah di dua wilayah adat tersebut.

Gambar 2.80. Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk di Provinsi Papua



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Gambar 2.81. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 100.000 Penduduk



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

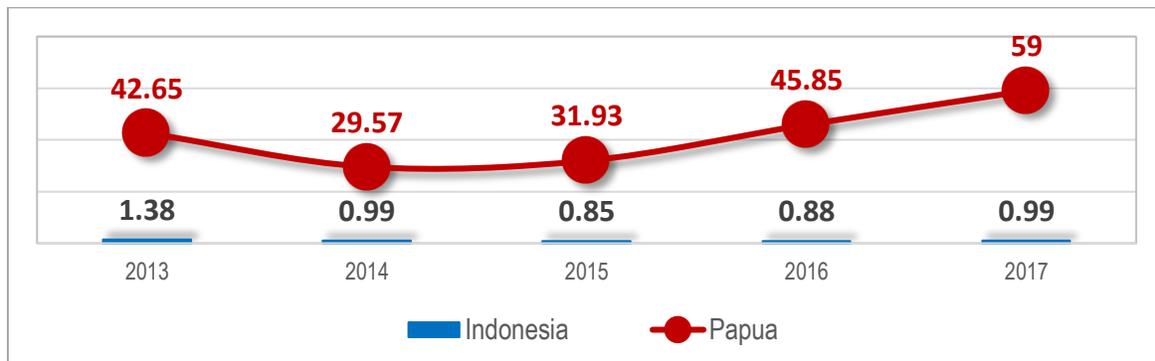
Dari Gambar 2.81, diketahui bahwa ketersediaan tenaga dokter di Provinsi Papua terlihat memiliki tren yang terus mengalami penurunan yang tidak signifikan hingga di tahun 2016 yaitu sebesar 24,13 dokter per 100.000 penduduk di seluruh Papua. Pada tahun 2013 tercatat rasio dokter per 100.000 penduduk adalah sebesar 26 dokter per 100.000 penduduk, kemudian tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sampai dengan tahun 2016.

Ketersediaan tenaga medis juga merupakan salah satu pelengkap dari berjalannya sektor kesehatan yang optimal. Dari Gambar 2.8181, diketahui bahwa perkembangan ketersediaan tenaga medis di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2013-2015, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016. Sampai dengan tahun 2016, rasio ketersediaan mencapai 1.028 orang untuk 100.000 penduduk.

4) Perkembangan Penanganan Penyakit Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit endemis di Provinsi Papua, meskipun nilainya tidak terlalu signifikan di semua wilayah di 29 kabupaten/kota di Papua. Dari gambar yang terlihat di bawah ini, situasi penyakit malaria di Provinsi Papua terbilang cukup tinggi bahkan tercatat paling tinggi pada tingkat nasional. Selain itu, penyakit malaria di Provinsi Papua cenderung meningkat sepanjang tahun 2013-2017.

Gambar 2.82. Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2013-2017



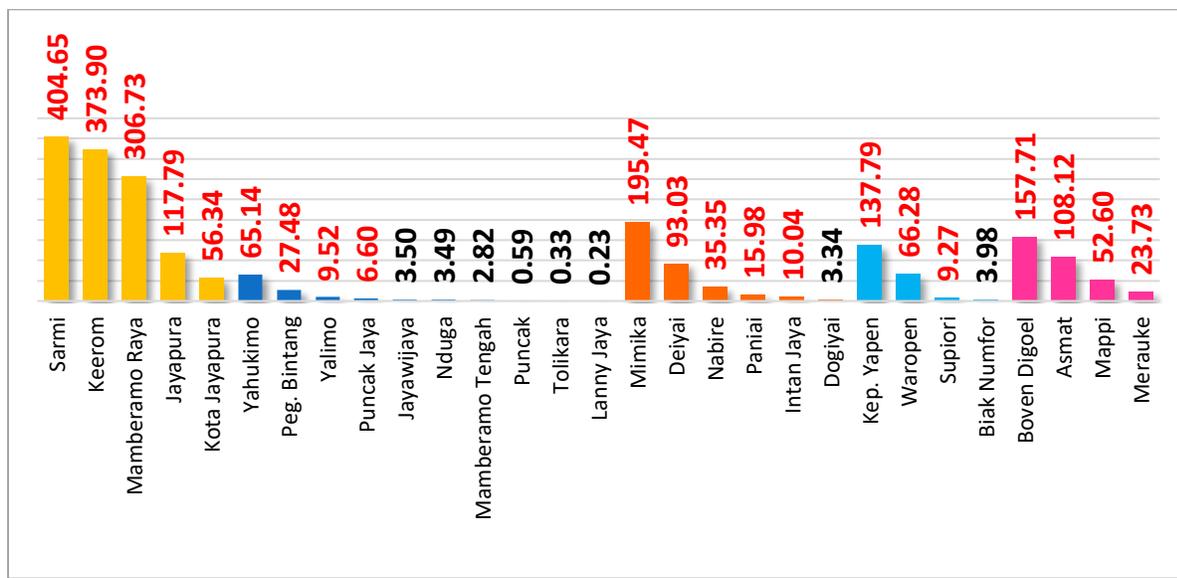
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2017

Keterangan: Annual Parasite Incidence (API) atau angka penderita malaria per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2013 tercatat kasus penderita penyakit malaria mencapai 43 kasus per 1.000 penduduk, meskipun pada tahun 2013-2014 sempat mengalami penurunan, namun kembali terjadi peningkatan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 59 kasus penyakit malaria per 1.000 penduduk di Provinsi Papua. Angka Penderita Malaria tertinggi di Papua terdapat pada beberapa daerah seperti Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen, Intan Jaya, Paniai, Nabire, Deiyai, Mimika, Puncak Jaya, Yalimo Pegunungan Bintang, Yahukimo, Kota Jayapura, Jayapura, Mamberamo Raya, Keerom dan

Sarmi dengan kisaran 6,60- 404,65%. Sedangkan daerah dengan angka penderita malaria terendah adalah Lanny Jaya, Tolikara dan Puncak dengan kisaran API sebesar 0,23 sampai dengan 0,59%.

Gambar 2.83. Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017

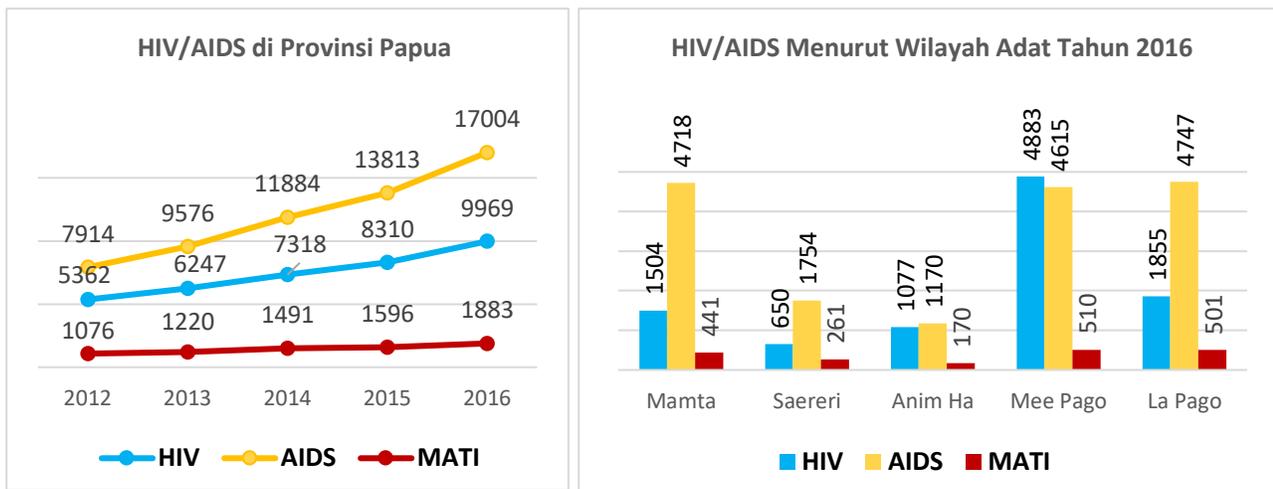


Sumber: Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2018 (data diolah)

5) Perkembangan Penanganan Penyakit HIV/AIDS

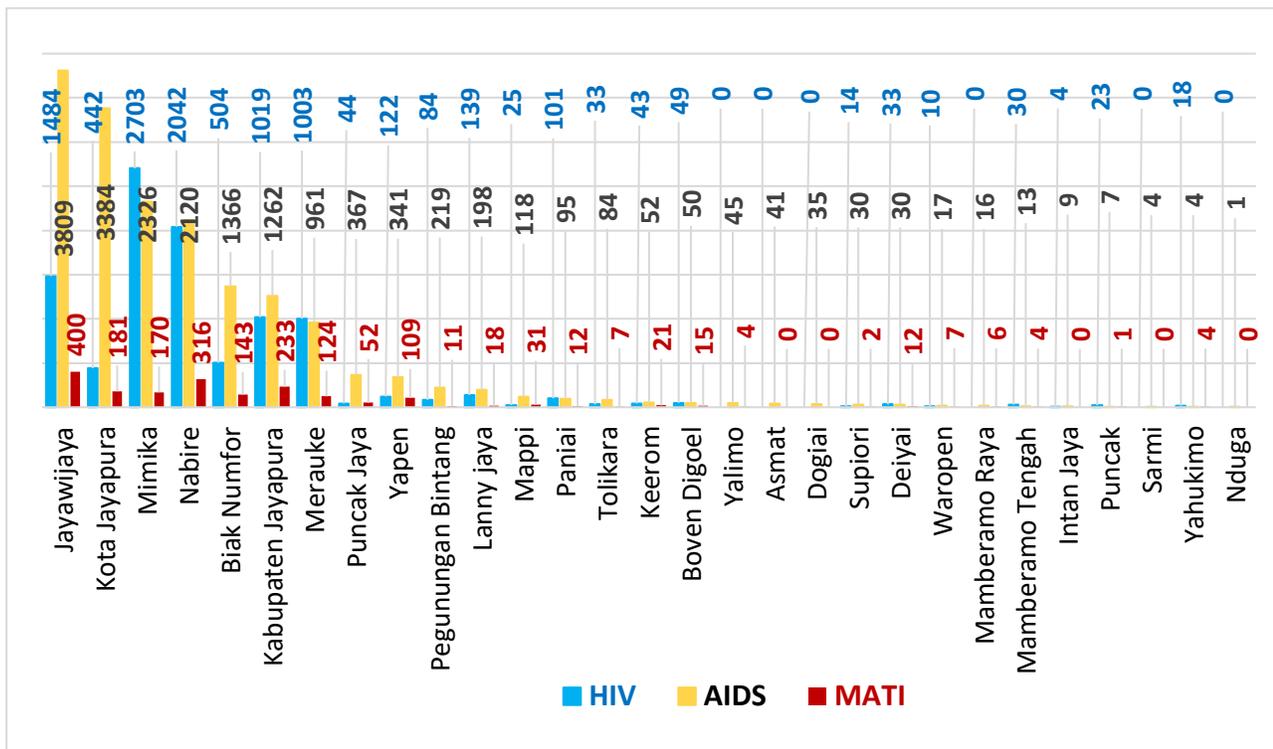
Perkembangan HIV/AIDS di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan baik penderita HIV, AIDS bahkan kasus kematian. Tercatat sampai dengan tahun 2016 triwulan ke IV terdapat 9.969 kasus pengidap HIV, 17.004 pengidap AIDS dengan 1.883 kasus kematian (lihat Gambar 2.8484).

Gambar 2.84. HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Gambar 2.85. HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016



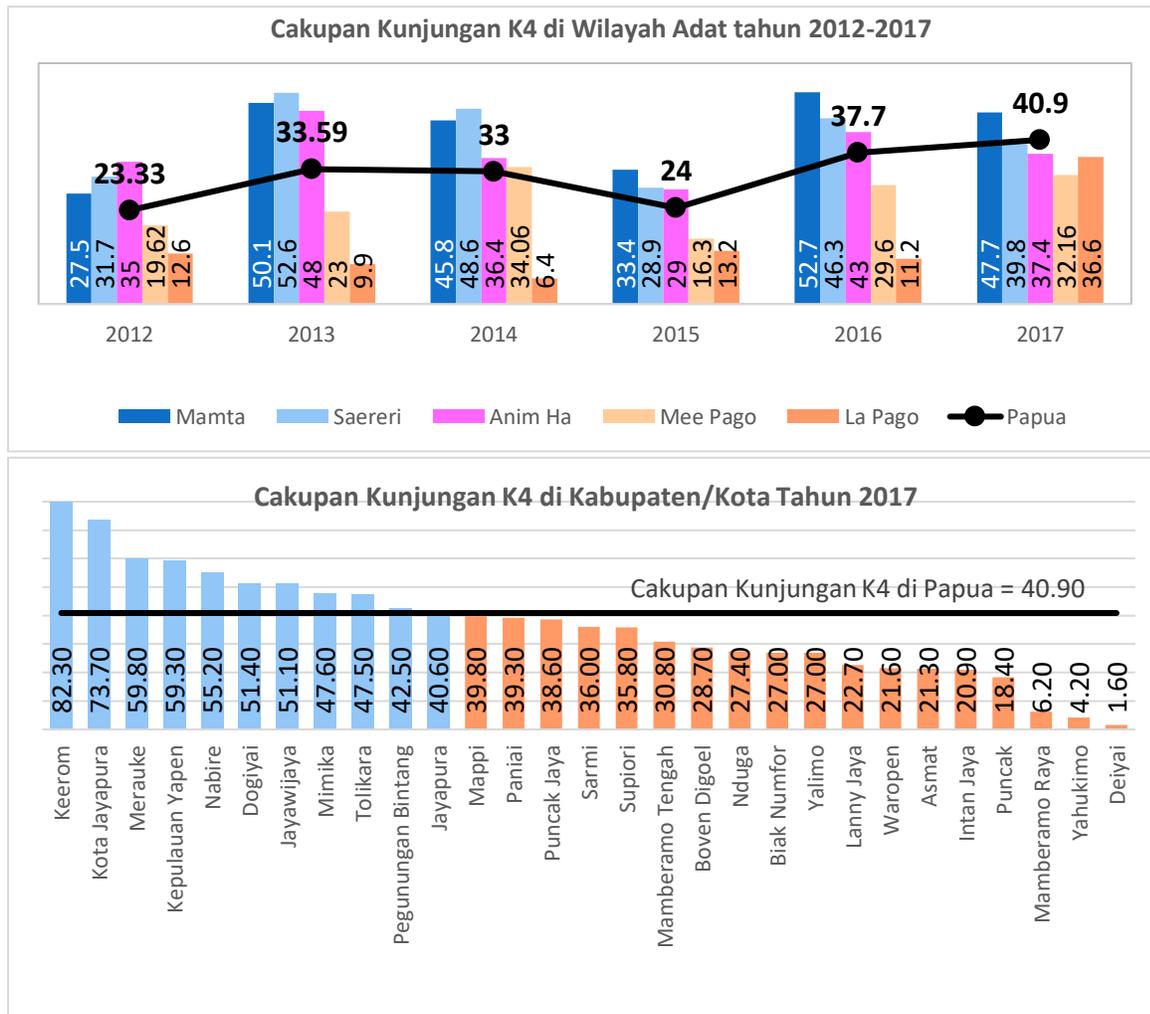
Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara keseluruhan, kasus pengidap HIV/AIDS dan kematian atas penyakit tersebut ada tersebar di 29 kabupaten/kota dengan jumlah yang bervariasi. Sedangkan daerah dengan kasus pengidap HIV terbanyak sampai dengan tahun 2016 adalah wilayah Mee Pago yaitu sebesar 9.766 kasus, kemudian pengidap AIDS terbanyak adalah wilayah La Pago adalah sebesar 9.494 kasus dan kasus kematian HIV/AIDS adalah wilayah Mee Pago adalah sebanyak 1.020 kasus.

6) Perkembangan Penanganan Ibu Hamil

Cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Secara umum, cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2012-2017. Namun demikian, terdapat 4 dari 5 wilayah adat dengan rata-rata cakupan K4 di bawah rata-rata provinsi. Meskipun demikian, persebaran capaian Kunjungan K4 di Mamta sangat timpang. Capaian Kunjungan K4 tertinggi dimiliki oleh Kota Jayapura dengan persentase mencapai 73,7% pada akhir tahun 2017. Persentase tersebut sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Kunjungan K4 di Mamberamo Raya sebagai yang terendah.

Gambar 2.86. Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

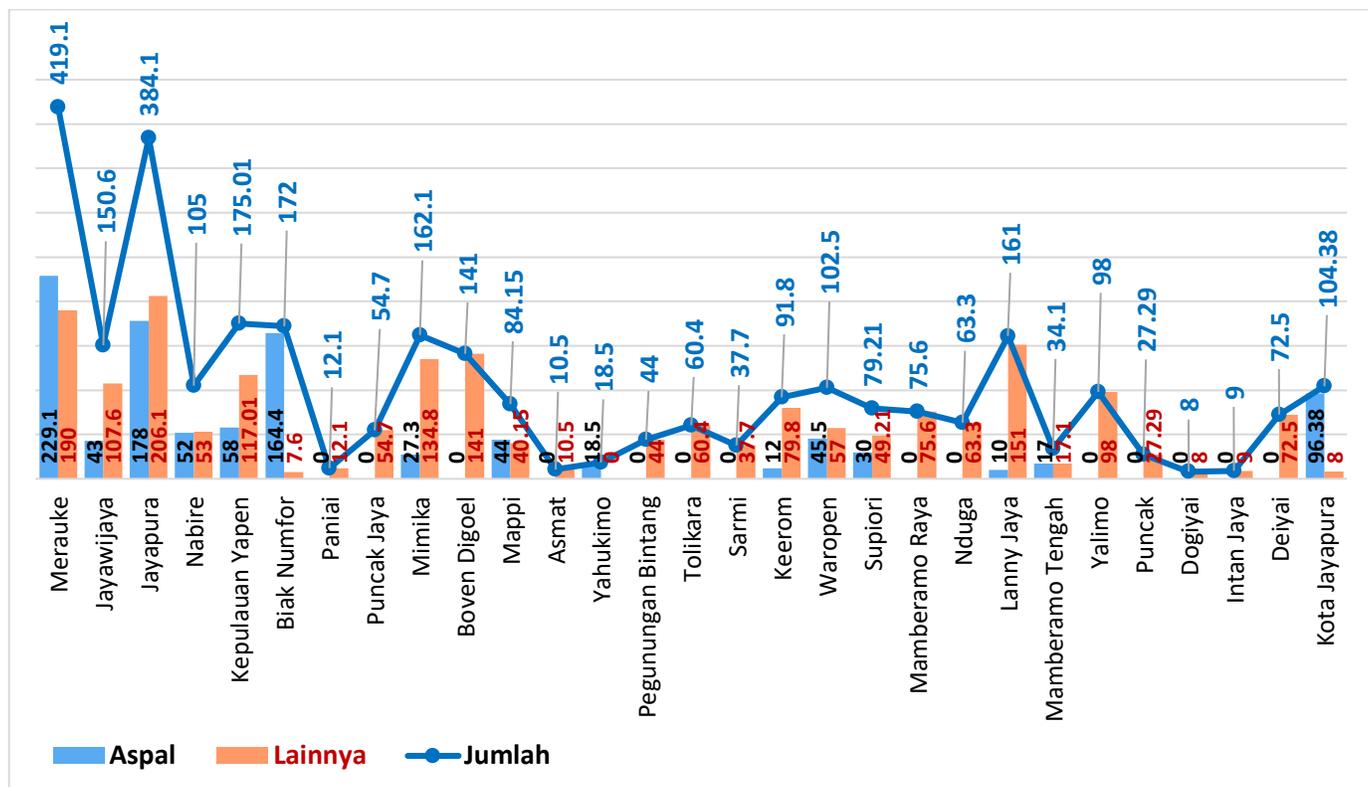
1) Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah

Lima kabupaten/kota dengan jalan provinsi terpanjang di Papua terdapat di Kabupaten Merauke 419,10 km (14,17%), Kabupaten Jayapura 384,10 km (12,99%), Kabupaten Kepulauan Yapen 175,01 km (5,92%), Kabupaten Biak Numfor 172 km (5,82%), dan Kabupaten Mimika 162,10 km (5,48%).

Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Papua yang sudah dilapisi aspal sepanjang 1.025,18 km (34,66%) dan yang belum dilapisi aspal atau jalan lainnya sepanjang

1.932,46 km (65,34%). Jalan aspal terpanjang terdapat di Kabupaten Merauke 229,10 km (22,35%), Kabupaten Jayapura 178 km (17,36%), Kabupaten Biak Numfor 164,40 km (16,04%), Kota Jayapura 96,38 km (9,40%), dan Kabupaten Kepulauan Yapen 58 km (5,66%).

Gambar 2.87. Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016

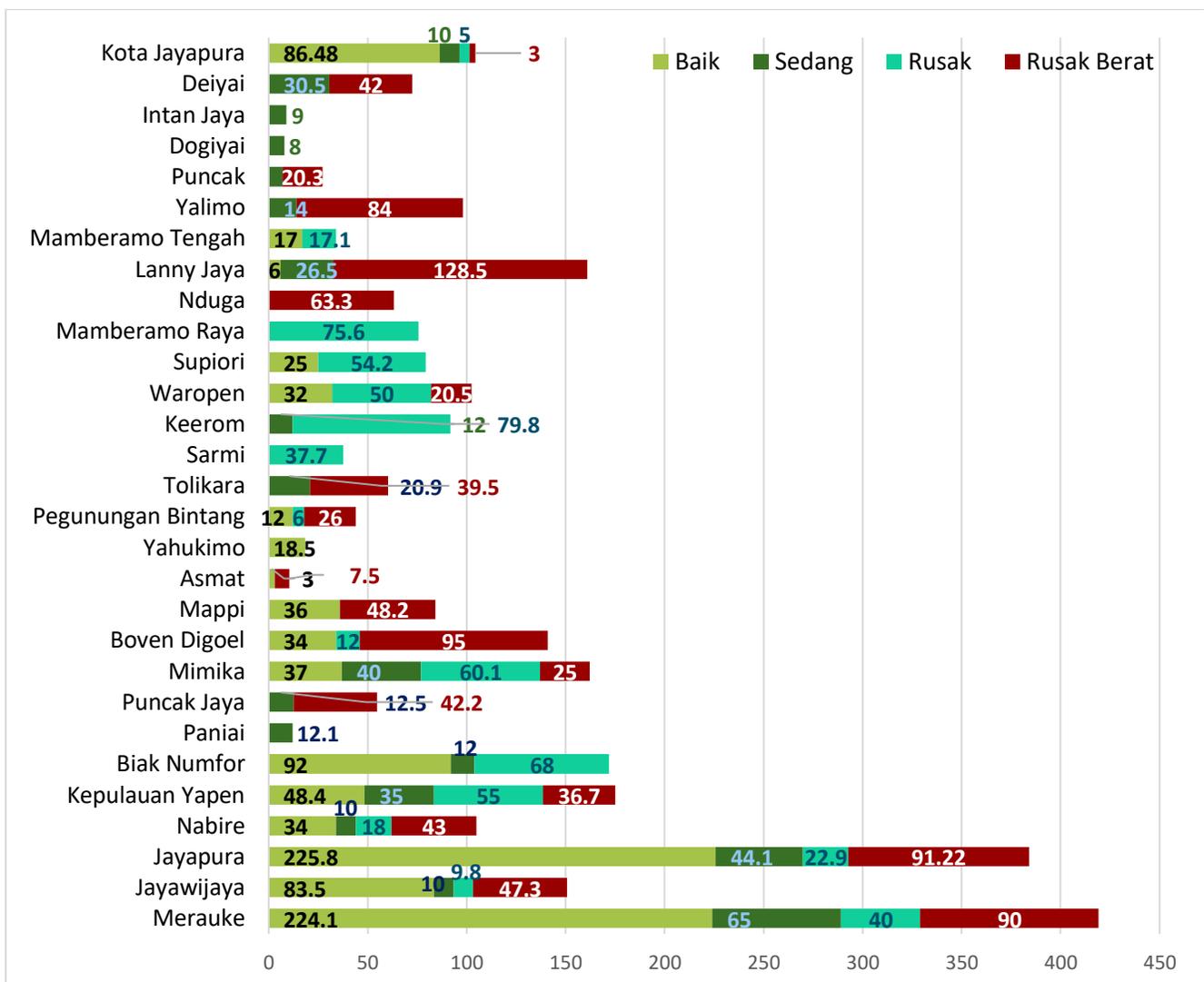


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pada tahun 2016, sepertiga dari panjang jalan provinsi di Papua berada dalam kondisi baik yaitu sepanjang 1.014,78 km (34,31%), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80%), sisanya dengan persentase yang cukup besar (52,89%) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Jika dibandingkan dengan kondisi jalan aspal baik (tahun 2017) sepanjang 1025,18 km (34,66%), maka terdapat kekurangan jalan aspal baik sepanjang 1358.27 km untuk 3.322.526 juta jiwa, sehingga perlu ada penambahan jalan aspal mantap (baik dan sedang) untuk 5 tahun mendatang paling tidak lebih dari 60% tahun sekarang.

Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kota Jayapura merupakan kabupaten yang kondisi jalan provinsinya sudah baik secara umum, dimana persentase panjang jalan kondisi baik lebih besar dari jalan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang lebih dari 75% jalannya berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

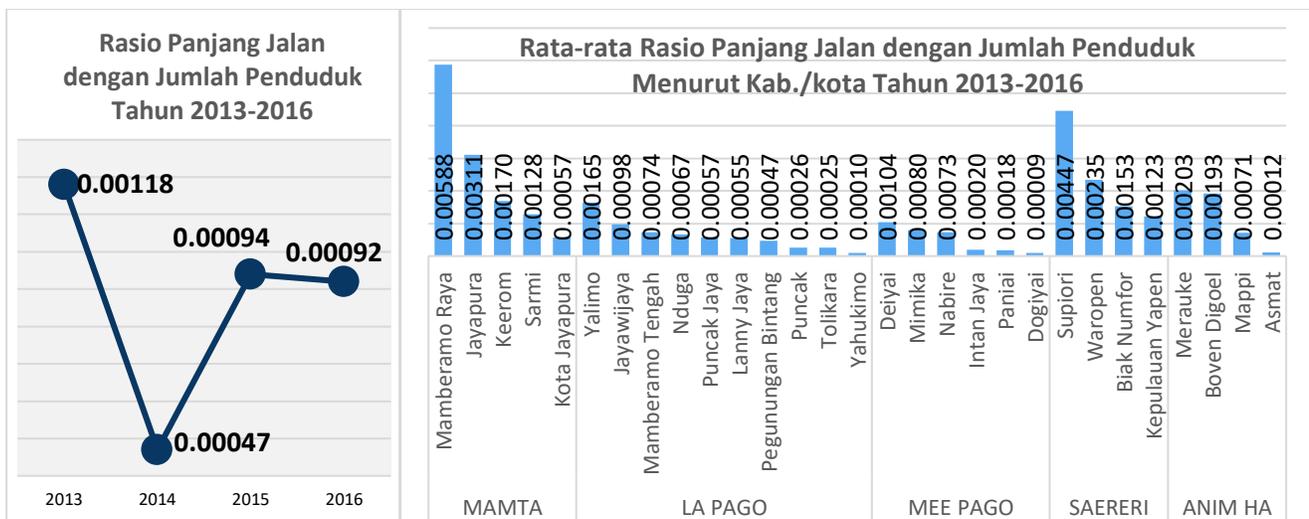
Gambar 2.88. Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016 (km)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Provinsi Papua. Peningkatan jalan dari tahun 2013-2016 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga tidak dapat menaikkan rasio mobilitas terutama dalam empat tahun terakhir. Rasio mobilitas tahun 2013 sebesar 0.00118 km/jiwa turun menjadi 0.00047 km/jiwa di tahun 2014 kemudian terlihat menurun lagi di tahun 2015 yaitu dari 0.00094 km/jiwa menjadi 0.00092 km/jiwa di tahun 2016 dengan rata-rata penduduk dapat mengakses jalan sebesar 0,00088 km/jiwa.

Gambar 2.89. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk



Sumber: Papua Dalam Angka 2018

Berdasarkan kabupaten/kota maka posisi pertama mobilitas penduduk terhadap panjang jalan di Papua yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya (Mamta) dengan nilai rata-rata sebesar 0,00588 km/jiwa, selanjutnya adalah Kabupaten Supiori (Saereri) 0,00447 km/jiwa, Kabupaten Jayapura (Mamta) sebesar 0,00311 km/jiwa. Adapun daerah yang memiliki aksesibilitas penduduk paling rendah adalah Kabupaten Dogiyai (Mee Pago), Yahukimo (La Pago) dan Asmat (Anim Ha) yang masing-masing memiliki rasio mobilitas di bawah 0,00015 km/jiwa.

Gambar 2.90. Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan



Sumber : data diolah (2018)

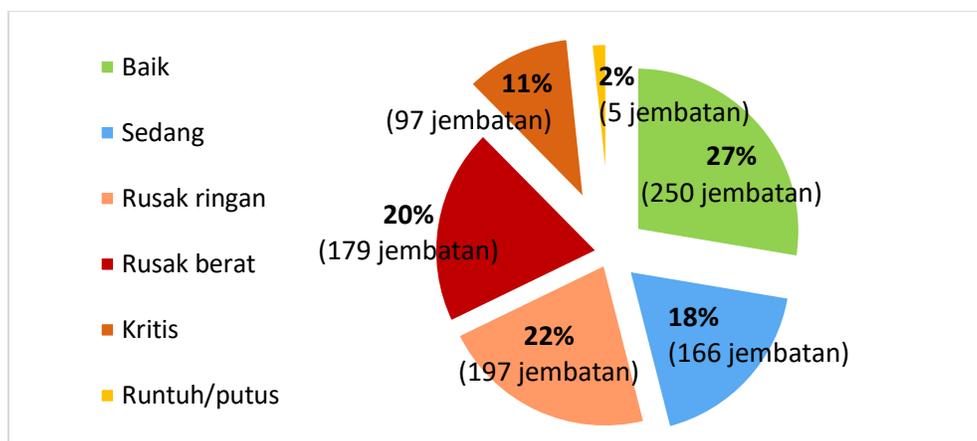
Penyediaan akses yang baik diperlukan untuk membuat masyarakat di setiap distrik dapat mengakses pelayanan dasar, berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat praktik dokter, puskesmas dan rumah sakit. Berdasarkan data Podes tahun 2014, diketahui bahwa jarak rata-rata yang harus ditempuh oleh setiap desa di Provinsi Papua cukup beragam untuk setiap jenis sarananya. Rata-rata jarak untuk menempuh sarana pendidikan berupa sekolah dasar (SD) adalah 20,12 km. Jarak ini cukuplah jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Begitu pun jarak yang harus ditempuh untuk mengakses Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu rata-rata 48,75 km. Berbeda dengan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai SMP, relative lebih dekat yaitu sekitar 0,04 km. Hal ini menunjukkan bahwa akses yang ada masih perlu diperbaiki. Tidak jauh berbeda dengan sarana pendidikan, akses menuju sarana kesehatan pun harus ditempuh dengan jarak yang relative jauh. Untuk mencapai rumah sakit, jarak yang harus ditempuh dari setiap distrik rata-rata adalah sekitar 66,33 km.

Berdasarkan data yang tercantum pada tahun 2014 di dalam Potensi Desa, bukan hanya jarak yang di tempuh relatif jauh dibandingkan dengan wilayah lainnya, akan tetapi diketahui pula bahwa masih terdapat beberapa distrik yang masih belum dapat mengakses sarana pendidikan dan juga kesehatan. Terdapat 20% distrik yang masih belum memiliki akses berupa jaringan jalan yang memadai untuk mencapai SD, 31,37% yang belum memiliki akses ke SMP. Sedangkan untuk akses ke SMA, 96,1% sudah memiliki akses meskipun masih beragam jaraknya. Berbeda dengan sarana pendidikan, distrik yang ada di Provinsi Papua

sudah relative memiliki akses yang lebih baik ke sarana kesehatan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa ternyata 96% distrik sudah memiliki akses ke tempat praktik dokter, 88,7% memiliki akses ke Puskesmas dan 96,5% sudah memiliki akses ke Rumah sakit.

Dalam meningkatkan konektivitas di daerah jembatan juga merupakan salah satu penunjang utama dalam dalam memudahkan adanya aksesibilitas dan mobilisasi daerah. Berdasarkan kondisi jembatan, Gambar 2.91 menunjukkan jembatan dalam kondisi baik (28,45%), sedang (18,16%), rusak ringan (21,55%), rusak berat (19,58%), kritis (10,61%) dan runtuh/putus (1,64%).

Gambar 2.91. Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi Tahun 2016



Sumber: Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, 2017 (data diolah)

2) Akses Terhadap Air Bersih dan Air Minum

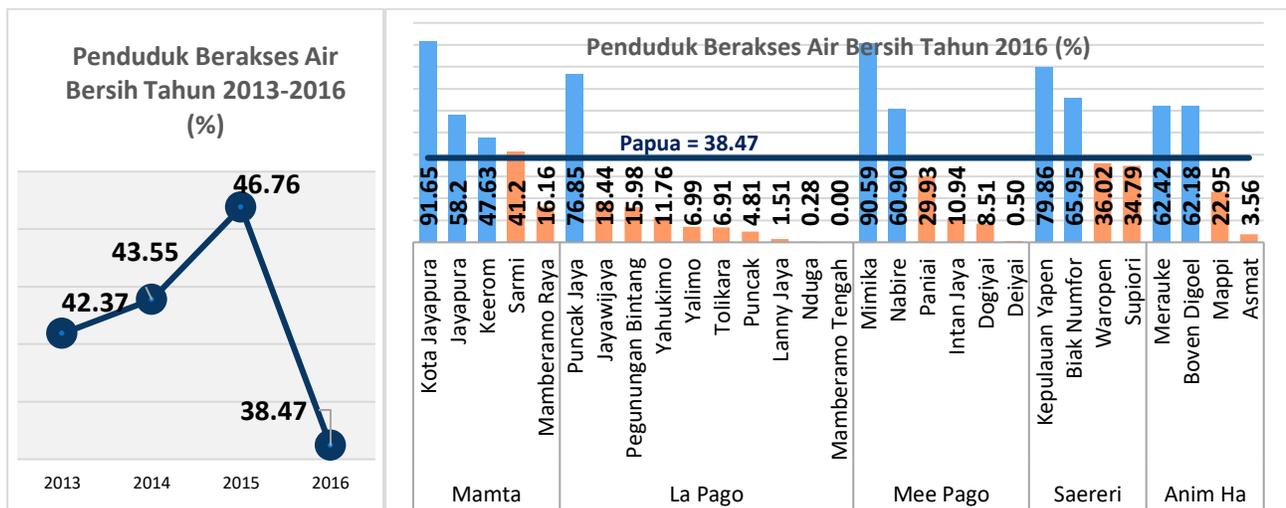
Secara keseluruhan persentase penduduk berakses air bersih di Provinsi Papua selama tahun 2013-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Terlihat bahwa sampai dengan tahun 2016 penduduk yang memiliki akses air bersih sebesar 38,47%, yang artinya masih terdapat 61,53% lebih penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih.

Dari kewilayahan di Provinsi Papua tercatat terdapat 4 (empat) daerah dengan persentase penduduk berakses air bersih cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Puncak Jaya (La Pago), Mimika (Mee Pago), Kepulauan Yapen (Saereri) dan Kota Jayapura

(Mamta) yang memiliki nilai di atas 70% (lihat Gambar 2.92). Sedangkan beberapa daerah lainnya memiliki penduduk berakses air minum masih di bawah 70%, bahkan terdapat beberapa daerah yang penduduknya berakses air bersih cukup rendah yang rata-rata didominasi oleh daerah di wilayah adat La Pago.

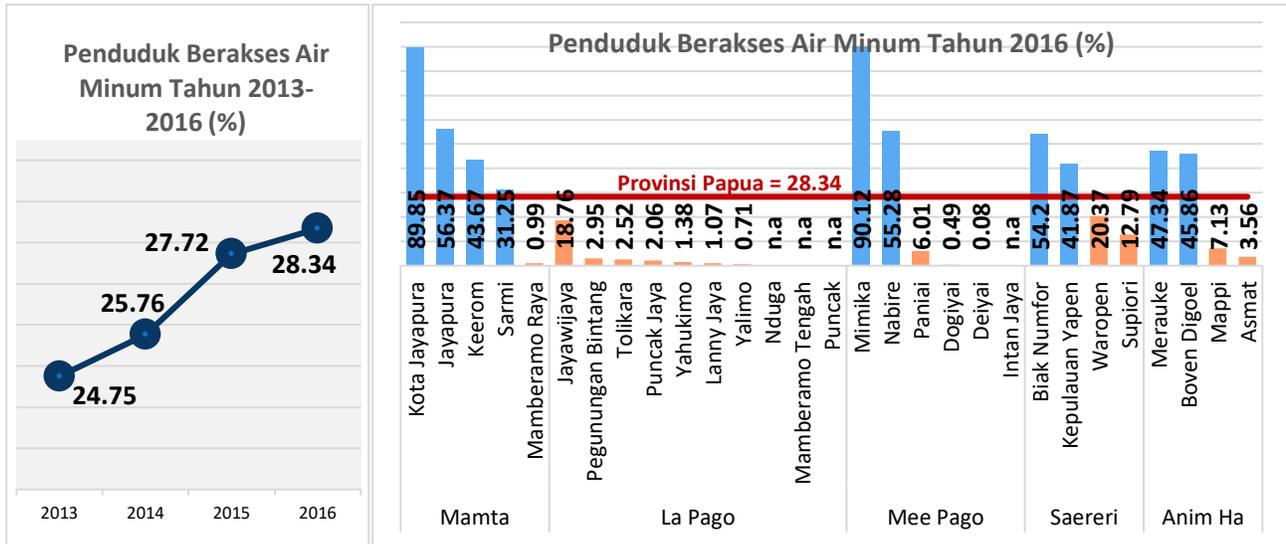
Selanjutnya jika dilihat pada Gambar 2.93, persentase penduduk yang berakses air minum pada tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan yang lebih baik, meskipun terbilang masih cukup rendah. Pada tahun 2013 tercatat penduduk yang dapat berakses air minum adalah sebesar 24,75%, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 28,34%. Dari 29 kabupaten/kota terdapat beberapa daerah yang persentase penduduk berakses air minum cukup tinggi di antaranya adalah Kota Jayapura (Mamta) dan Kabupaten Mimika (Mee Pago) yaitu masing-masing sebesar 89,85 dan 90,12%. Sedangkan daerah lain khususnya di wilayah La Pago memiliki persentase akses air minum bisa dibilang sangat rendah dan beberapa terdapat di daerah Mee Pago.

Gambar 2.92. Penduduk Berakses Air Bersih di Provinsi Papua



Sumber: IKP, 2017 (data diolah)

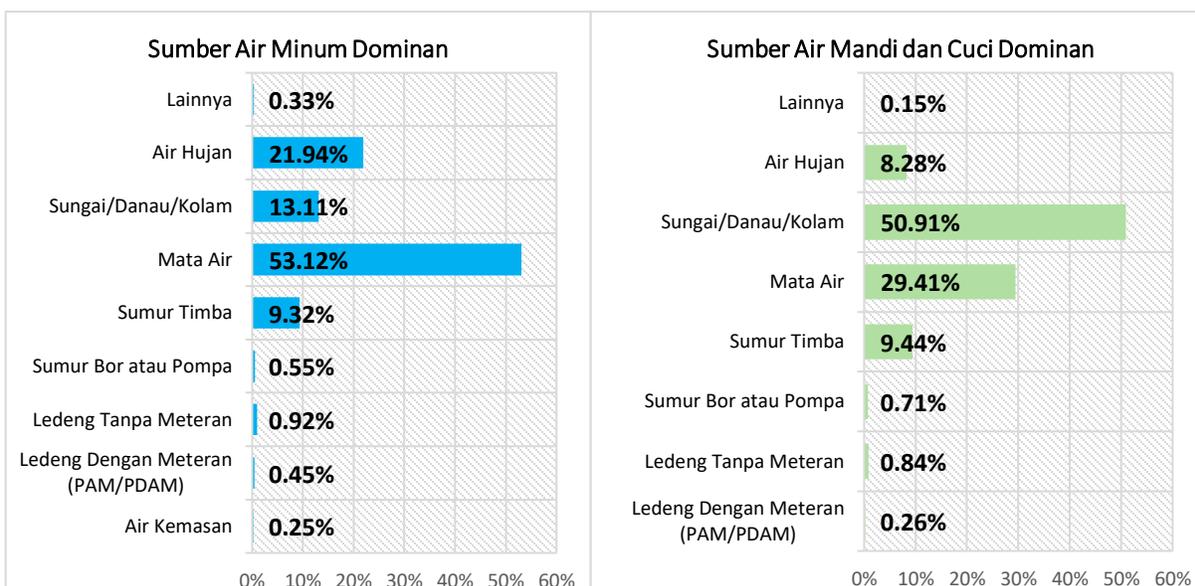
Gambar 2.93. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Papua



Sumber: IKP, 2017

Berdasarkan Gambar 2.94, juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Papua memperoleh sumber air minum yang berasal dari mata air terlindung/tak terlindung (53,12%) serta air hujan (21,94%). Terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti air sumur timba, sungai, danau, dan kolam namun tidak menjadi dominasi untuk sumber air minum di Provinsi Papua. Berbeda dengan air minum, untuk kebutuhan memasak/ mencuci/ mandi dan sebagainya, dominasi masyarakat Papua memanfaatkan sumber air sungai/danau/kolam (50,91%), dan mata air (29,41%).

Gambar 2.94. Sumber Air Minum, Mandi, dan Cuci Dominan

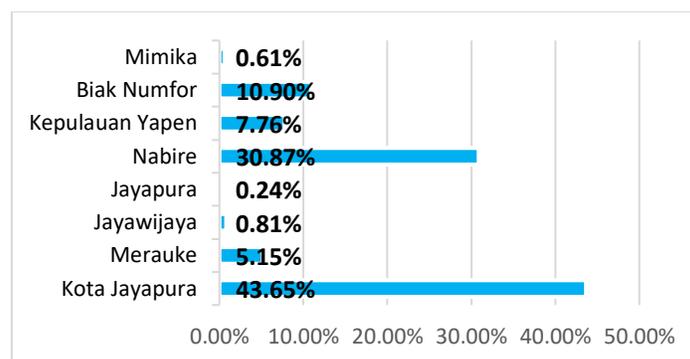


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Jumlah perusahaan air bersih di Provinsi Papua pada tahun 2014 tercatat menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 8 perusahaan yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 19 liter per detik (1,15%) yaitu dari 1.642 liter per detik menjadi 1.661 liter per detik. Sedangkan untuk kapasitas produksi efektif pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 119 liter per detik (10,79%) yaitu dari 1.102 liter per detik menjadi 983 liter per detik. Dengan jumlah perusahaan air minum yang sangat tidak memadai seperti ini maka diperlukan strategi untuk meningkatkan potensi ketersediaan air dengan pembangunan embung dan rehabilitasi sumur air tanah agar tercapai target SPM air minum sebesar 100%.

Jumlah pelanggan air bersih di Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 perusahaan air bersih mempunyai pelanggan sebanyak 42.547 pelanggan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 65.265 pelanggan. Pelanggan non niaga (rumah tangga dan pemerintah) merupakan pengguna dengan jumlah terbesar yaitu sebanyak 59.747 pelanggan atau sebesar 91,55 persen dari total pelanggan pada tahun 2014. Kabupaten Nabire (30,87%) dan Kota Jayapura (43,65%) merupakan wilayah dengan jumlah pelanggan PDAM terbesar di Provinsi Papua.

Gambar 2.55. Persentase Pelanggan PDAM di Provinsi Papua Tahun 2014



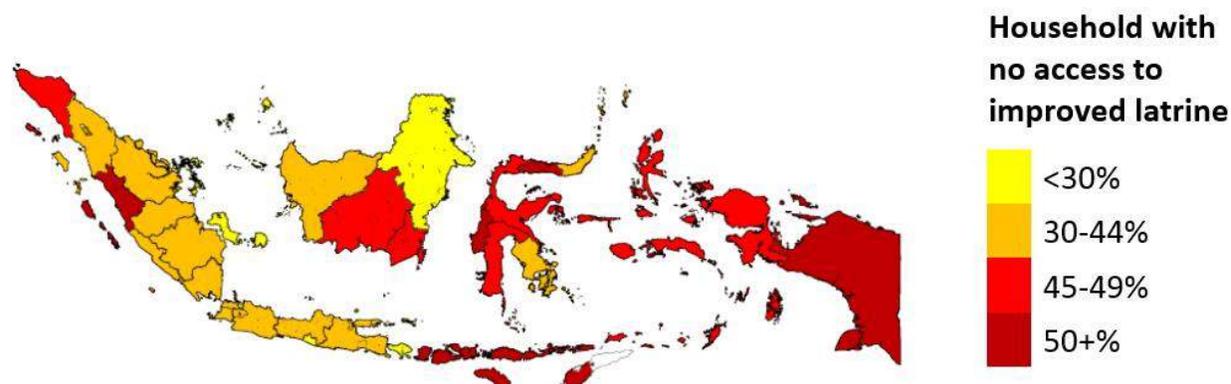
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Volume air bersih yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2014 adalah sebesar 15,41 juta meter kubik, sedangkan pada tahun 2013 volume air bersih yang disalurkan adalah sebesar 14,40 juta meter kubik. Ini berarti selama periode 2013 sampai dengan 2014 air bersih yang disalurkan mengalami pertumbuhan sebesar 7,04%. Berdasarkan kelompok pengguna, pelanggan non niaga (rumah tangga dan pemerintah) merupakan pengguna air bersih terbesar selama tahun 2014 yaitu sebesar 12,6 juta meter kubik.

3) Akses Terhadap Infrastruktur Air Limbah

Pada tahun 2015, Provinsi Papua beserta beberapa provinsi di Indonesia tergolong pada kategori tinggi untuk persentase rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak, yakni >50%. Persentase ini tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat yang berkisar 45-49% (lihat Gambar).

Gambar 2.95. Persentase Rumah Tangga dengan Jamban Tidak Layak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015



Sumber: *Millenium Challenge Account* Indonesia, 2018

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar setiap tahun terlihat meningkat. Pada tahun 2013 untuk rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebanyak 45,07% dan meningkat hingga 55,73% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan pemerintah dalam memberikan kesadaran akan pentingnya fasilitas buang air besar bagi masyarakat guna peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.33. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

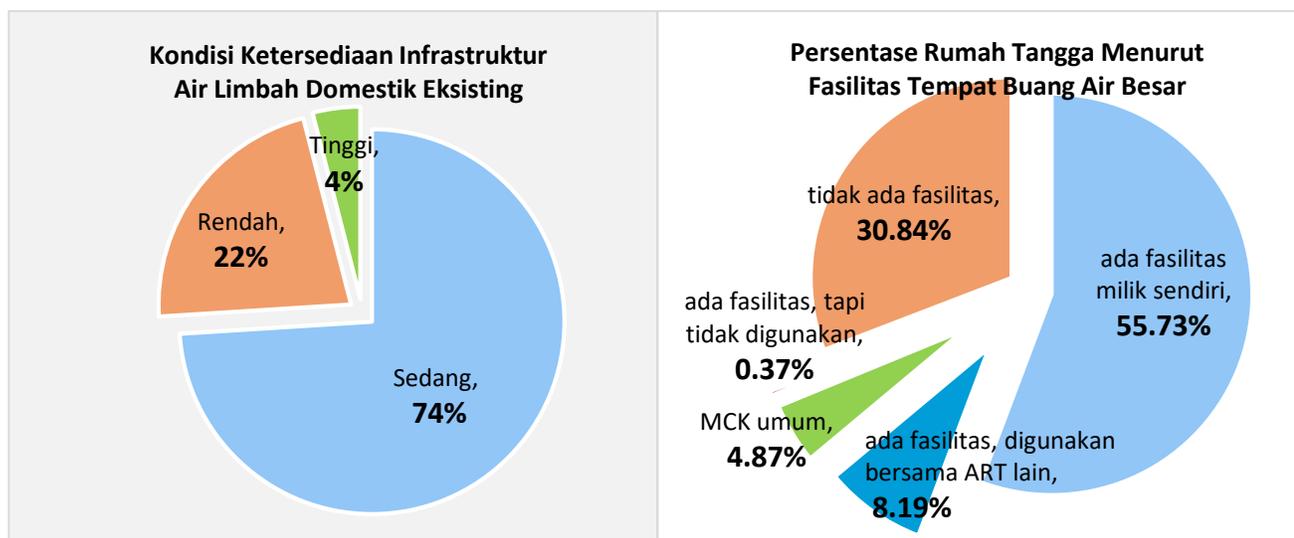
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Sendiri	45,07	46,16	56,18	56,09	55,73
Bersama	13,94	11,63	12,52	7,33	8,19
Umum	3,15	2,94	3,23	3,12	4,87
Ada, ART Tidak Menggunakan	n.a	n.a	n.a	0,36	0,37
Tidak Ada	37,84	39,27	28,07	33,10	30,84

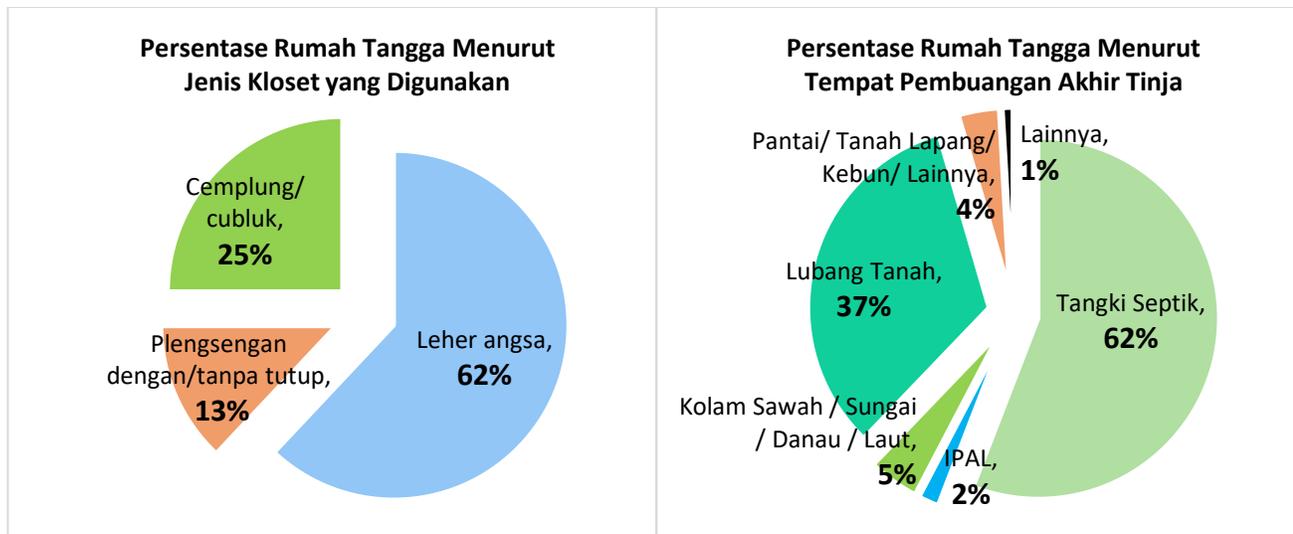
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2013-2017)

Pada tahun 2017, sebagian besar atau 56% penduduk telah memiliki fasilitas buang air besar yang hanya digunakan untuk 1 rumah tangga sendiri. Namun demikian, pada tahun 2017 masih juga terdapat 31% rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas buang air besar. Di samping itu, terdapat pula sebagian kecil fasilitas buang air besar yang digunakan secara bersama dengan sistem komunal baik dalam bentuk MCK umum ataupun digunakan bersama dengan rumah tangga lain. Berdasarkan jenis kloset yang digunakan,

62% penduduk menggunakan jenis kloset leher angsa. Penggunaan lengsekan dengan/tanpa tutup menunjukkan prosentase yang cukup kecil yakni hanya sekitar 13% saja untuk digunakan sebagai kloset. Terdapat pula penggunaan cemplung/cubluk (25%) untuk jenis kloset lainnya di tahun 2017. Adapun berdasarkan jenis tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan, 51% penduduk telah memiliki tangka septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Penduduk yang membuang tinja ke IPAL hanya berkisar 2% saja. Terdapat 37% penduduk, yang membuang akhir tinja ke lubang tanah, pantai, kebun, lapang, kolam, sawah, sungai, danau, laut, maupun di tempat terbuka lainnya sehingga mencemari lingkungan.

Gambar 2.96. Kondisi Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017





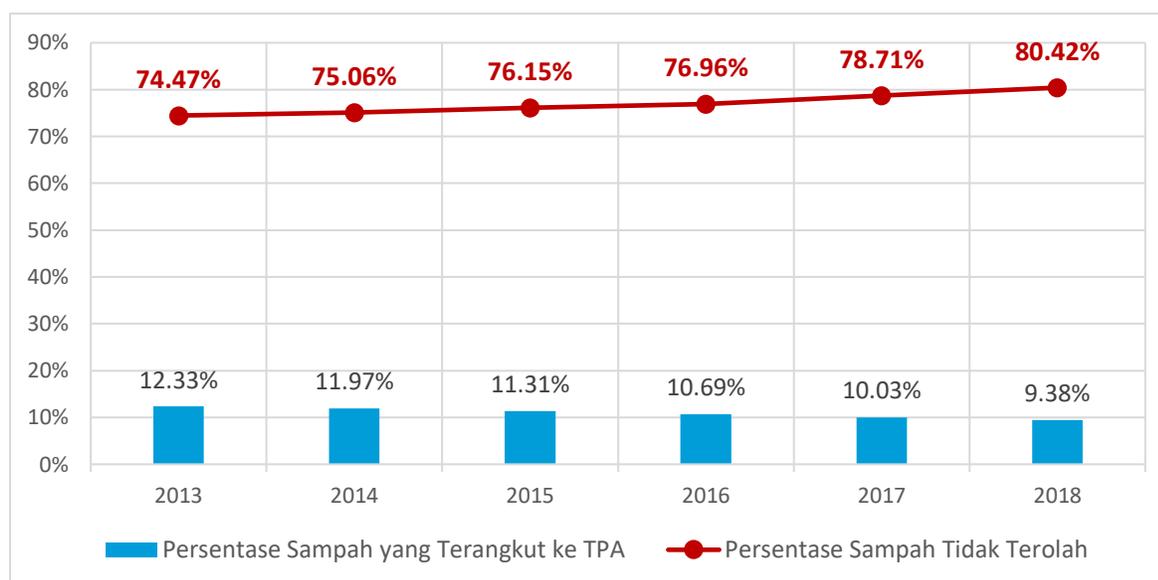
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

4) Persampahan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025, pembangunan infrastruktur persampahan sejalan dalam mendukung misi ke-III pembangunan jangka panjang Provinsi Papua, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengembangan infrastruktur persampahan, pembangunan jangka panjang Provinsi Papua diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang terintegrasi antar wilayah yang didukung sistem pengelolaan berbasis masyarakat untuk mempertahankan kualitas lingkungan.

Masih rendahnya implementasi dari 3R (*Reuse, Recycle dan Reduce*) terhadap sumber sampah baik di sumber maupun di tempat pengumpulan sampah menjadi salah satu indikasi pengelolaan sampah yang belum baik. Di samping itu terbatasnya sarana persampahan di masing-masing distrik menjadi salah satu kendala yang cukup besar. Provinsi Papua mengalami tren penurunan keterangkutan sampah ke TPA dari tahun 2013 yang semula sebesar 12,33% menjadi 9,38% pada tahun 2018. Hal tersebut meningkatkan ketidakterolahan sampah domestik dari 74% pada tahun 2013 menjadi 80% pada tahun 2018 (lihat Gambar 2.97).

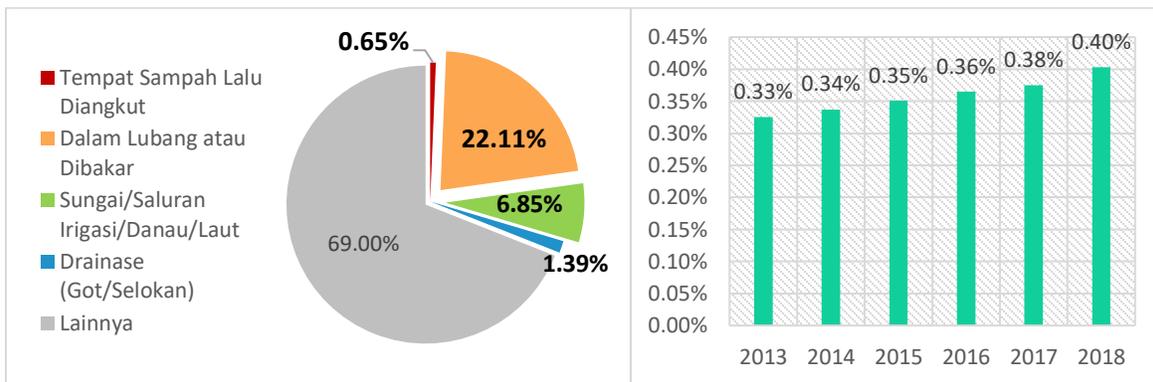
Gambar 2.97. Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2013-2018



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

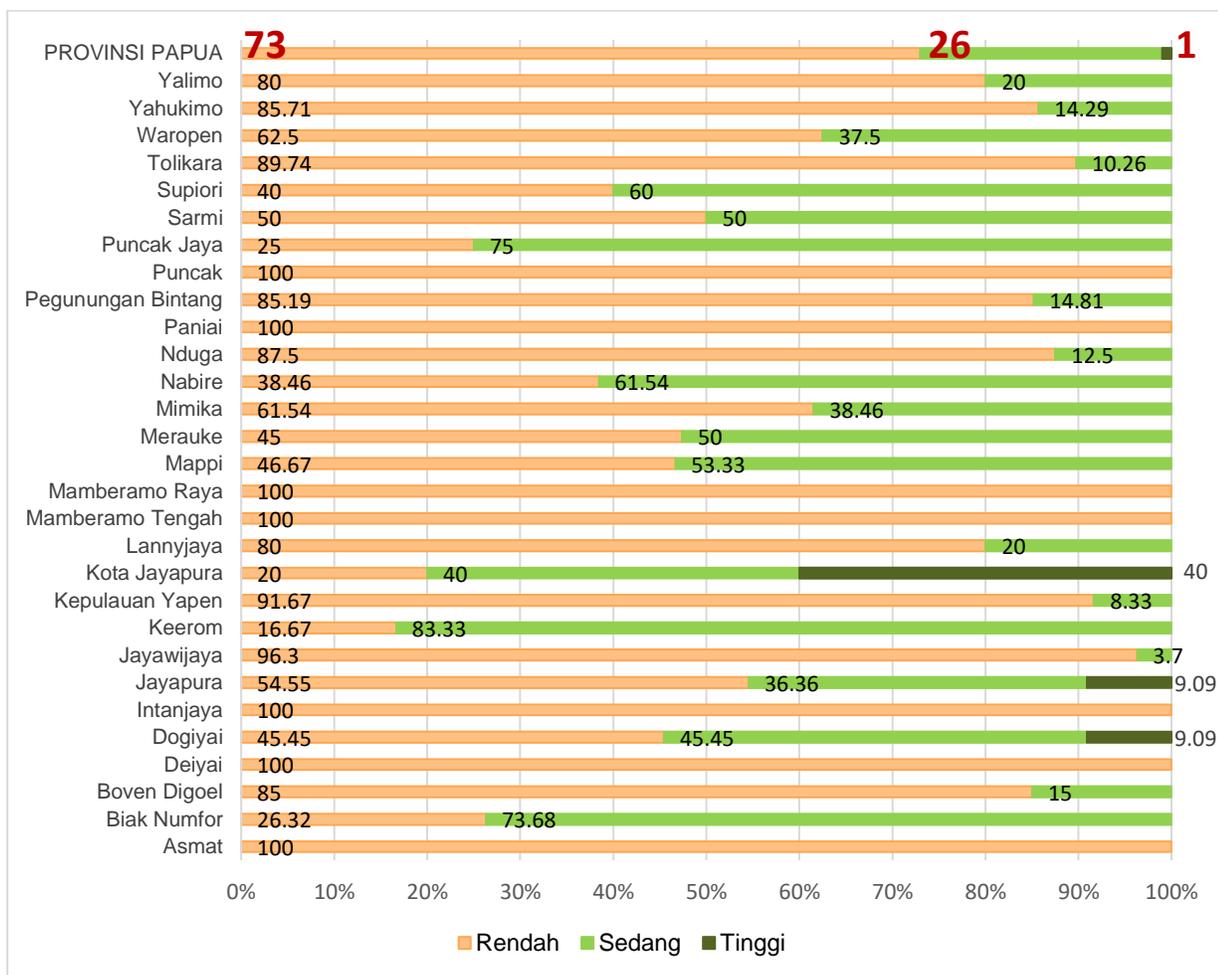
Pengelolaan sampah di Provinsi Papua saat ini masih mengandalkan sistem swadaya atau tidak tersentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan TPS yang hanya tersebar di 1% dari total distrik saja di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.99). Oleh karena keterbatasan pelayanan persampahan tersebut, maka hanya 0,65% kampung saja yang membuang sampah ke tempat sampah lalu diangkut. Sebanyak 22,1% kampung mengelola sampah secara dominan di dalam lubang atau dibakar, dan masih terdapat 6,85% desa lainnya yang membuang sampah ke badan air. Namun demikian, sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber sangatlah kecil. Pada tahun 2018 hanya 0,40% saja sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.98.

Gambar 2.98. Tempat Buang Sampah Dominan (Kiri); Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat di Sumber (Kanan)



Sumber: Podes Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Gambar 2.99. Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua



Sumber: Podes Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.99, sebagian besar distrik di Provinsi Papua (73%) memiliki status “rendah” dalam penyediaan infrastruktur persampahan domestik. Namun demikian, perlu dipikirkan pula upaya peningkatan pada 26% distrik dengan status penyediaan eksisting “sedang” dan upaya pemeliharaan status “tinggi” bagi distrik-distrik yang telah memiliki kategori cukup baik dalam penyediaan persampahan domestik eksisting. Adapun kabupaten dengan jumlah distrik lebih dari 50% yang berstatus “rendah” berada di hampir semua kabupaten kecuali Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kota Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supirori. Penilaian rendah tersebut disebabkan karena masih banyaknya penggunaan drainase (got/selokan) dan sungai/saluran irigasi/danau/laut sebagai tempat buang sampah bagi sebagian besar keluarga di masing-masing distrik. Pembuangan sampah ke badan air merupakan tindakan yang akan mencemarkan badan air yang akan berpengaruh ke ekosistem secara keseluruhan. Agar penanganan persampahan ini lebih konkret maka sangat diperlukan strategi pengembangan sistem dan pengelolaan infrastruktur persampahan regional yang bisa mencakup 29 kabupaten/kota mulai dari aspek perencanaan hingga penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi.

5) Jasa Kontruksi

Keberadaan perusahaan konstruksi atau yang dikenal dengan kontraktor di suatu wilayah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya di Provinsi Papua. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Papua gencar dilakukan selama ini dengan berbagai program yang diterapkan, dimana salah satunya program pembangunan Jalan Trans Papua. Dan untuk mendukung pembangunan konstruksi di Provinsi Papua, menurut publikasi BPS Papua 2018 tercatat sudah ada 5.208 unit usaha jasa konstruksi yang tersebar variatif di 29 kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan jumlah perusahaan konstruksi terbesar yakni Kota Jayapura (1.008 unit usaha), kemudian disusul oleh Kabupaten Mimika (557 unit usaha), Merauke (456 unit usaha), Biak Numfor (402 unit usaha), Jayawijaya (346 unit usaha), Jayapura (283 unit usaha), Nabire (260 unit usaha), Kepulauan Yapen (243 unit

usaha), Mappi (235 unit usaha), Boven Digoel (224 unit usaha), Asmat (221 unit usaha), Sarmi (139 unit usaha), Pegunungan Bintang (131 unit usaha), Yahukimo (124 unit usaha), Puncak Jaya (122 unit usaha), dan Keerom (110 unit usaha). Kabupaten lainnya, rata-rata dibawah 100 unit usaha jasa kontruksi, dimana yang paling sedikit di Kabupaten Deyiai hanya sebanyak 3 unit usaha. Selanjutnya, jika diperhatikan dari skala usahanya, hampir semuanya, sekitar 84%, jasa kontruksi di Provinsi Papua ini dilakukan dalam skala usaha kecil. Hanya 15,34% saja yang skala menengah, dan 0,63% dalam skala besar.

6) Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,93% pertahun. Tercatat sampai dengan tahun 2017 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 27 unit. Artinya untuk 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 27 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 29 kabupaten/kota sepanjang tahun 2013-2017 sangat bervariasi.

Tabel 2.34. Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	22,45	22,02	24,65	23,76	26,63
MAMTA					
Jayapura	41,62	40,78	49,01	39,52	47,95
Sarmi	32,71	31,74	31,34	34,72	51,30
Keerom	40,06	39,33	37,39	36,78	70,16
Mamberamo Raya	21,81	21,45	22,85	24,04	0,90
Kota Jayapura	22,65	22,53	22,13	28,21	18,39
LA PAGO					
Jayawijaya	26,79	26,65	26,37	26,11	19,45
Puncak Jaya	20,89	20,66	29,83	28,39	19,01
Yahukimo	24,16	23,74	29,89	29,42	29,57
Pegunungan Bintang	29,15	28,57	30,12	29,79	27,90
Tolikara	27,53	27,05	26,35	25,11	25,26
Nduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Lanny Jaya	13,78	13,01	12,86	0,00	14,04
Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	19,49	18,53
Yalimo	23,31	22,23	21,74	0,00	20,06
Puncak	0,00	0,00	0,00	24,64	24,95
MEE PAGO					

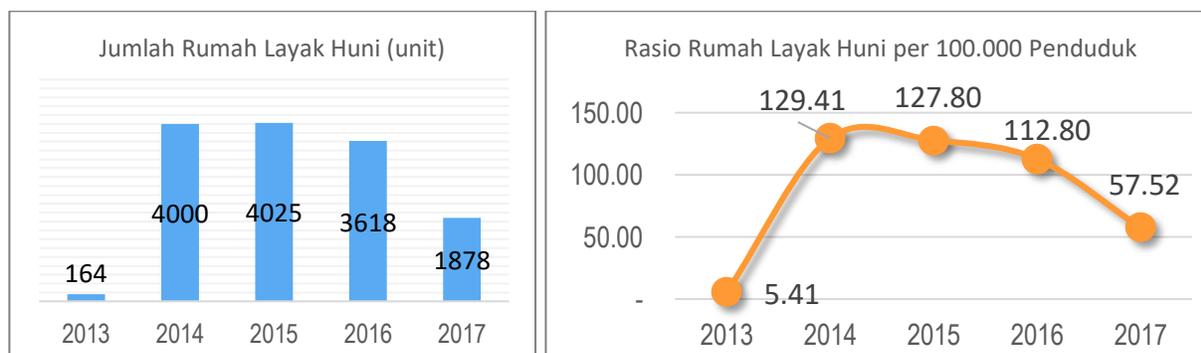
Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Nabire	33,07	32,95	35,53	40,69	36,66
Paniai	29,26	29,05	28,73	14,10	9,81
Mimika	36,81	36,27	35,85	35,75	26,33
Dogiyai	12,54	12,33	12,15	14,71	113,58
Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
SAERERI					
Kepulauan Yapen	27,29	26,79	27,32	22,92	36,73
Biak Numfor	19,70	19,42	24,28	27,68	19,77
Waropen	17,76	17,56	17,07	18,18	43,08
Supiori	26,48	25,95	25,36	22,76	35,59
ANIM HA					
Merauke	18,44	18,34	52,30	34,82	22,79
Boven Digoel	31,82	31,58	53,81	51,45	41,54
Mappi	50,61	49,43	48,80	70,94	22,39
Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.4.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 memiliki trend yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah rumah layak huni terjadi pada tahun 2013-2015 yaitu sebesar 4.025 unit (2015), namun terjadi penurunan jumlah unit sampai dengan tahun 2017 (1.878 unit). Secara kumulatif total rumah layak huni yang terbangun hingga tahun 2017 sebanyak 13.685 unit (lihat Gambar 2.100). Perbandingan ketersediaan rumah layak huni untuk 100.000 penduduk di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 adalah 58 unit/100.000 penduduk.

Gambar 2.100. Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua

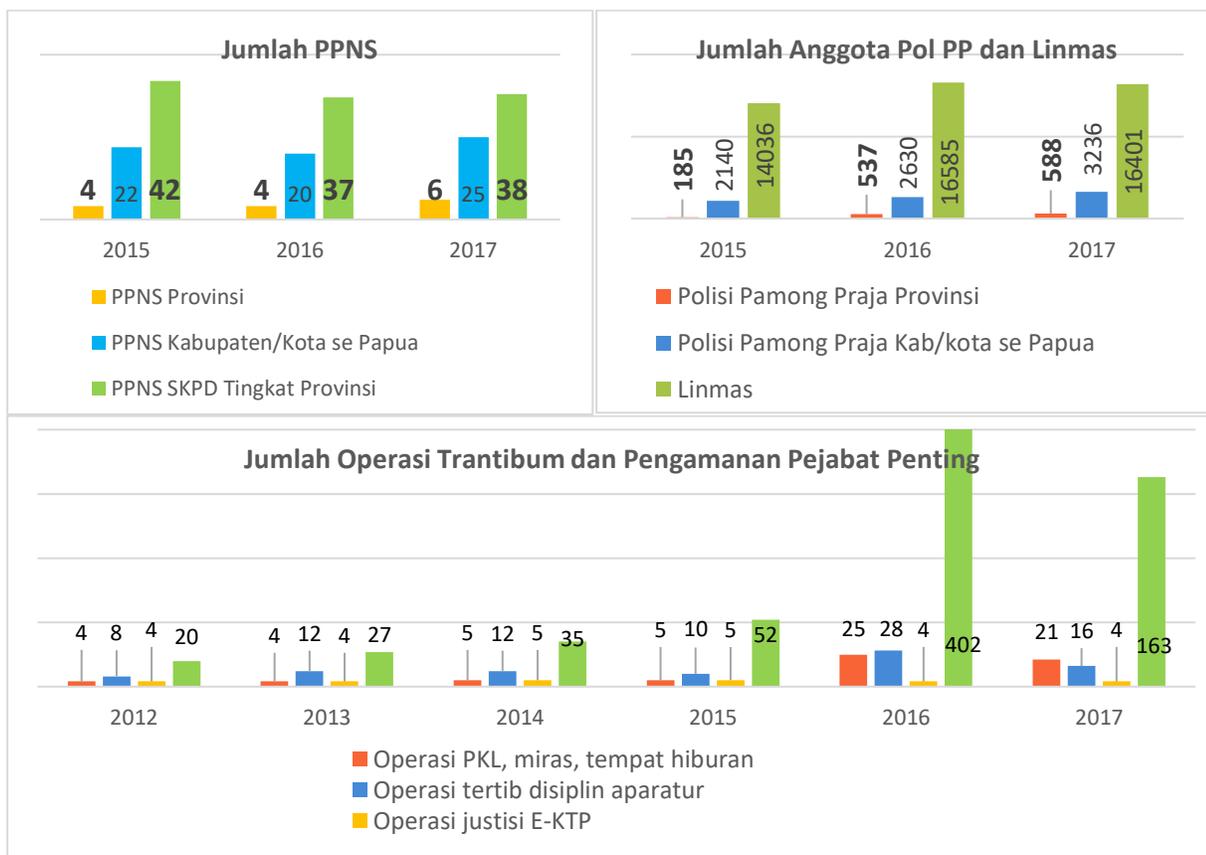


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Gambar 2.101. Kondisi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

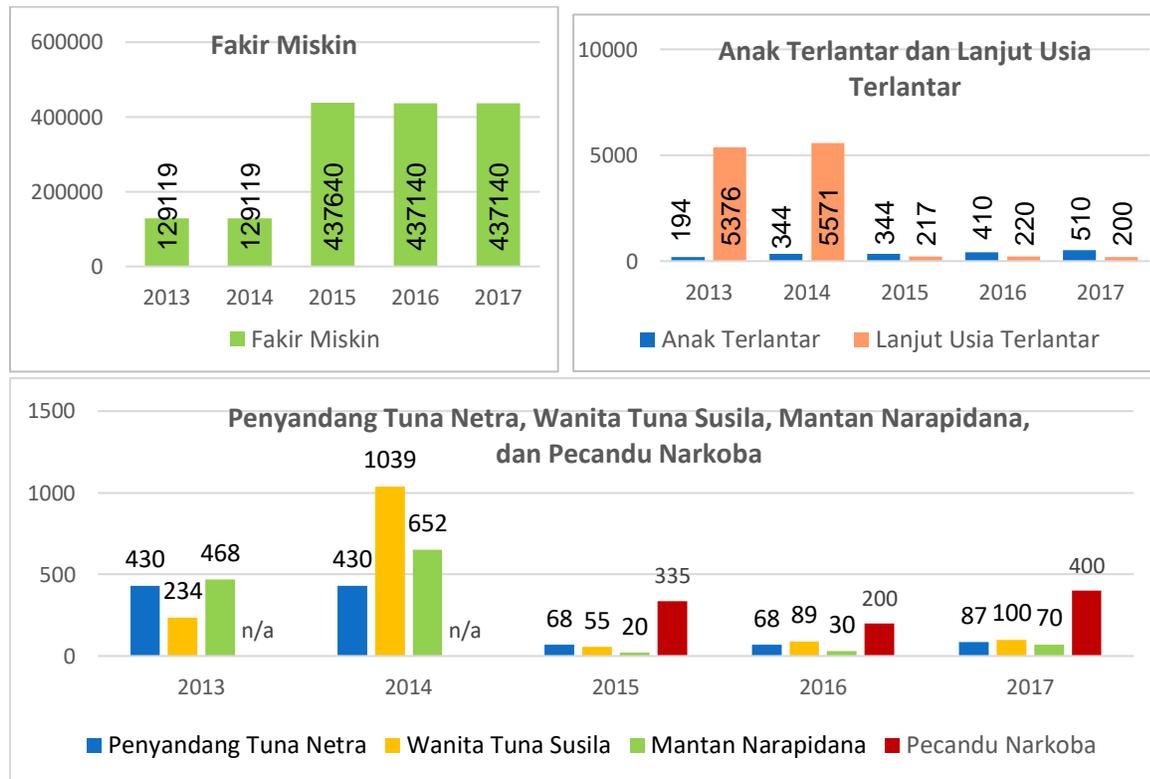
Berdasarkan Gambar 2.101 diketahui bahwa terdapat peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Papua pada rentang tahun 2012-2017. Hal ini terindikasi berdasarkan peningkatan jumlah PPNS,

peningkatan anggota Polisi Pamong Praja, peningkatan jumlah operasi trantibum, serta peningkatan pengamanan pejabat penting.

2.4.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba pada rentang tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.102).

Gambar 2.102. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang)



Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 194 anak (tahun 2013) menjadi 510 anak (tahun 2017). Peningkatan juga terjadi pada jumlah fakir miskin dari 129.119 orang (tahun 2013) menjadi 437.140 orang (tahun 2017). Peningkatan ini tergolong tinggi karena secara agregat meningkat 3 kali lipat dalam rentang waktu 5 tahun. Trend yang relatif menurun terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 5376 orang (tahun 2013) menjadi 200 orang (tahun 2017).

Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada penyandang tuna netra, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2014 sebanyak 1.039 orang dan berkurang menjadi 55 orang pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 100 orang. Berkurangnya jumlah wanita tuna susila pada tahun 2015 dikarenakan peraturan Bupati Kabupaten Jayapura untuk menutup lokasi prostitusi Tanjung Elmo.

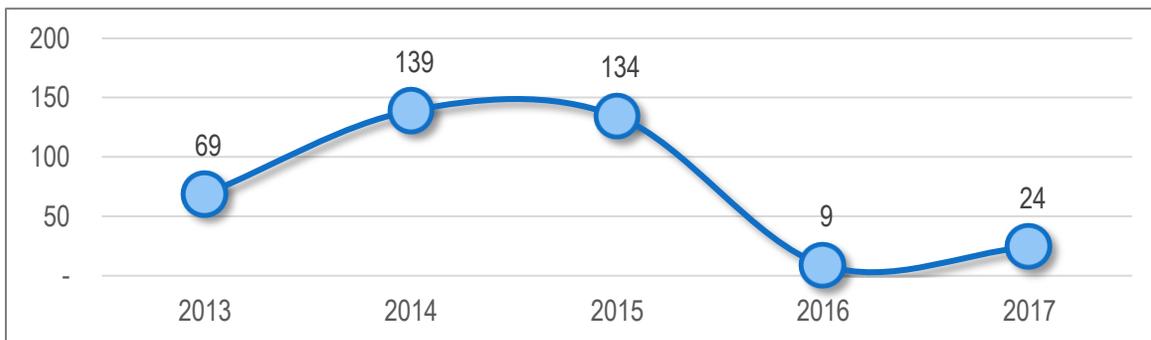
Jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2013 sebanyak 468 jiwa meningkat menjadi 652 jiwa pada tahun 2014. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 20 jiwa dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 70 jiwa. Adapun jumlah pecandu narkoba yang teridentifikasi pada tahun 2015 sebanyak 335 orang, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 200 orang namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 400 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Angka perselisihan pengusaha dengan pekerja pada tahun 2013 sebesar 69% meningkat pada tahun 2015 menjadi 139%. Namun pada tahun 2017 angka perselisihan pengusaha dengan pekerja menurun hingga 24%. Penurunan perselisihan pengusaha dan kerja ini dapat disebabkan karena peningkatan kompetensi atau *capacity building* yang dilakukan terhadap tenaga kerja di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.103).

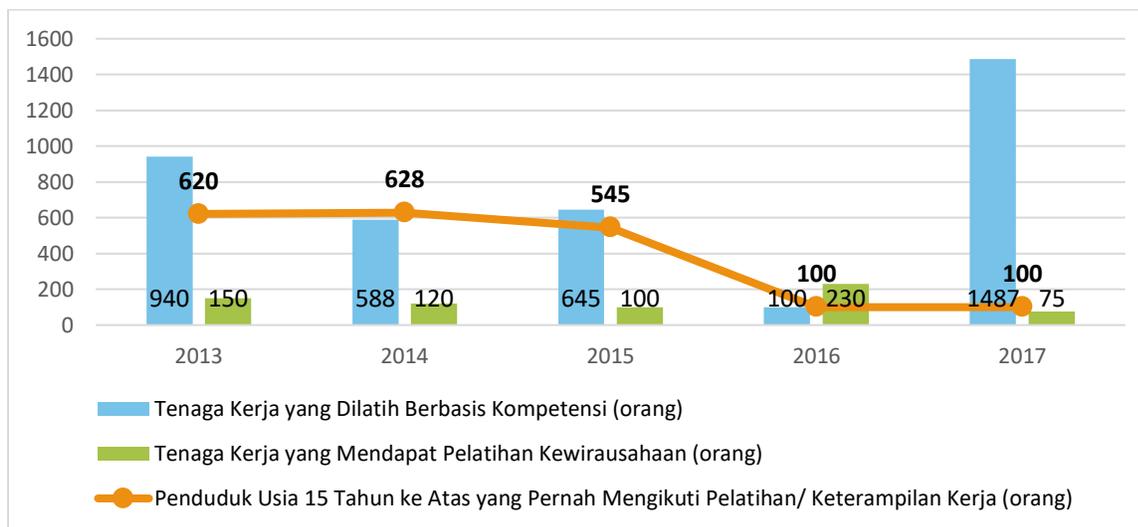
Gambar 2.103. Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%)



Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada Gambar 2.104 dapat terlihat bahwa Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 940 jiwa dan menurun hingga 100 jiwa pada tahun 2016, namun kembali meningkat menjadi 1.487 jiwa pada tahun 2017.

Gambar 2.104. Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja



Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2013 sebanyak 150 orang kemudian meningkat pada tahun 2016 sebanyak 230 orang. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi 75 orang tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Penurunan tersebut mungkin dikarenakan banyak tenaga kerja pada tahun sebelumnya yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Adapun penduduk usia 15

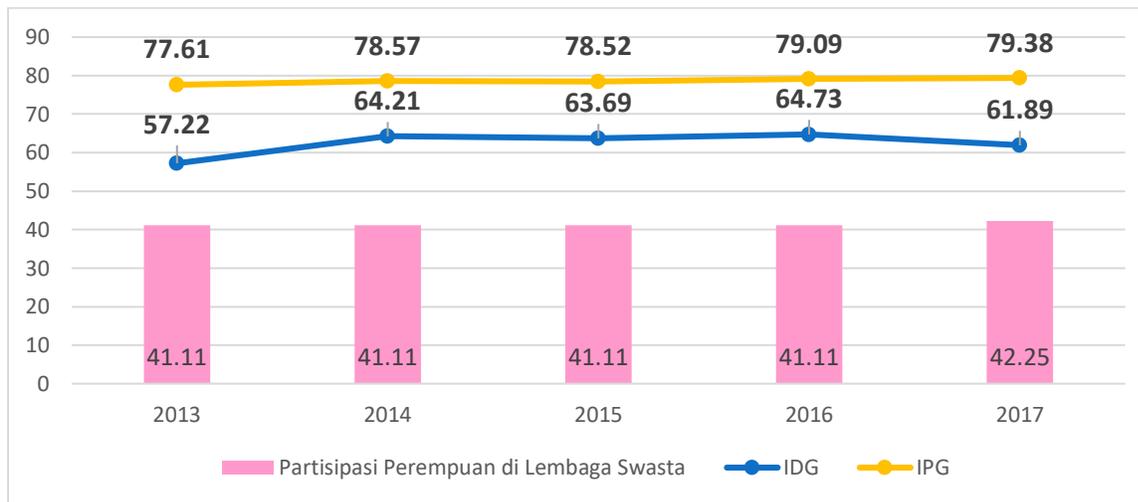
tahun keatas yang pernah mengikuti pelatihan/ keterampilan kerja pada tahun 2013 sebanyak 620 orang namun terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 berjumlah sebanyak 100 orang. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan atau keterampilan kerja, sehingga pemerintah bersama lembaga pelatihan perlu melakukan invasi pelatihan keterampilan kerja.

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan gender (IPG) yang dihitung dengan menggunakan harapan hidup, harapan pendidikan dan indeks distribusi pendapatan merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks pemberdayaan gender tercatat memiliki nilai cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun sebesar 1%, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya, pada indeks pembangunan gender juga terlihat cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun walaupun tidak signifikan perubahannya, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017 (lihat Gambar 2.105).

Gambar 2.105. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

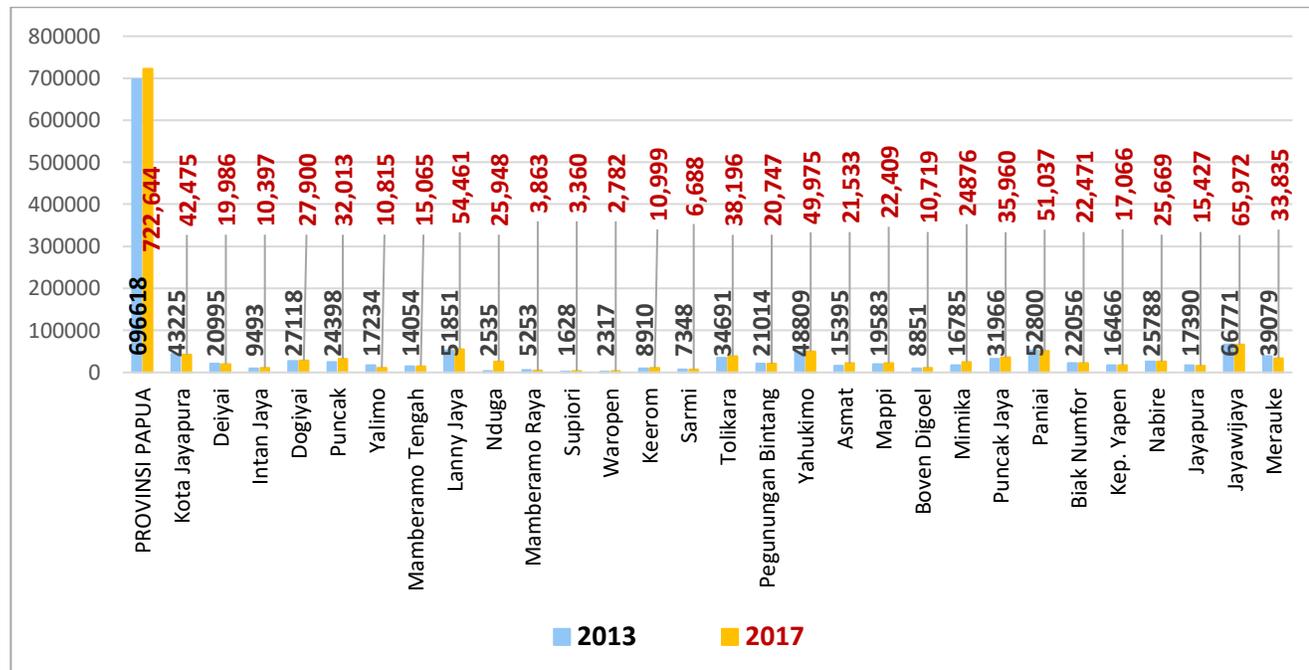
Membangun daerah tidak terlepas dari tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Strategi pembangunan selama ini sudah diarahkan dalam memberdayakan masyarakat secara umum dan peningkatan peran swasta terhadap urusan-urusan masyarakat yang belum optimal dilakukan pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap lapangan tenaga kerja perempuan di Provinsi Papua selama ini terbilang cukup tinggi. Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan, namun terlihat partisipasi perempuan terlihat sudah tinggi. Sampai dengan tahun 2017 partisipasi perempuan pada sektor swasta mencapai 42,25%. Selain variabel di atas, berikut ini adalah variabel partisipasi angkatan kerja khusus perempuan pada semua sektor lapangan usaha di Provinsi Papua yang akan disajikan perbandingan data tahun 2013 dengan kondisi pada tahun 2017.

2) Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Papua untuk perbandingan tahun 2013 dan tahun 2017 mengalami peningkatan pada masing-masing daerah di 29 kabupaten/kota. Tercatat Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua secara keseluruhan meningkat dari 696,618 orang di tahun 2013 menjadi 722,644 orang pada tahun 2017 atau meningkat sebesar sebesar 3,60 persen. Secara kewilayahan, terdapat beberapa daerah yang juga mengalami peningkatan di antaranya terdapat 18

kabupaten/kota, sedangkan 11 daerah lainnya mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan perubahannya.

Gambar 2.106. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2017

3) Tingkat Pendidikan Perempuan

Partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan yang tergambarkan melalui Angka Partisipasi Purni (APM) Perempuan yang terlihat bervariasi. Tercatat sampai dengan tahun 2017 APM perempuan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 78,36%, ini berarti masih terdapat 21,64% perempuan yang belum mengenyam pendidikan sekolah dasar. Sedangkan APM perempuan pada pendidikan menengah pertama sebesar 58,71%, kemudian pendidikan menengah sebesar 40,91%.

Tabel 2.35. APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
MAMTA									
Jayapura	94,24	94,39	94,30	66,72	70,18	68,65	69,52	77,56	73,22
Sarmi	95,14	100,00	97,34	68,74	89,91	79,44	38,79	57,37	47,15

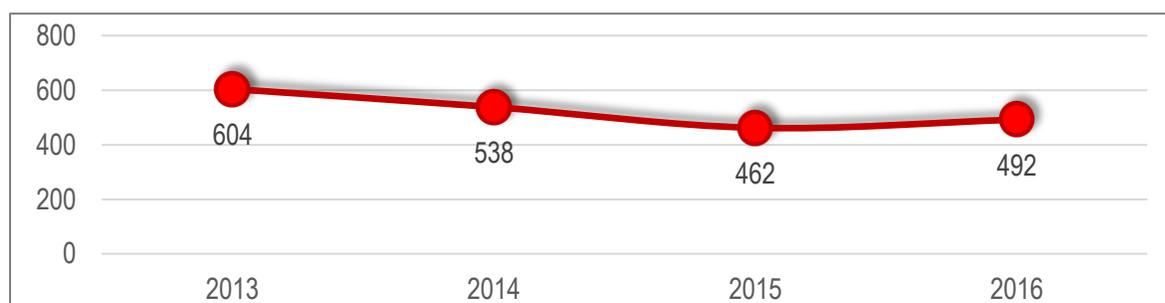
Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
Keerom	85,29	89,05	87,16	58,81	73,56	65,99	71,25	54,55	63,37
Mamberamo Raya	97,37	96,73	97,07	33,38	46,65	40,34	61,36	51,69	57,01
Kota Jayapura	92,80	92,78	92,79	74,57	90,99	82,96	61,84	61,79	61,82
LA PAGO									
Jayawijaya	81,91	93,24	87,28	71,94	84,94	78,82	78,69	52,48	66,90
Puncak Jaya	66,10	71,54	68,83	25,85	19,86	23,13	10,38	0,00	6,60
Yahukimo	69,26	60,72	64,78	16,99	20,10	18,36	11,61	9,73	10,67
Pegunungan Bintang	59,43	64,92	62,10	21,86	25,08	23,01	24,29	23,13	23,68
Tolikara	60,54	58,35	59,50	44,41	51,58	47,22	37,64	13,31	28,77
Nduga	59,69	48,44	55,06	29,33	17,66	24,84	1,70	0,00	1,13
Lanny Jaya	69,89	56,97	64,81	67,79	70,83	69,38	38,61	58,14	44,71
Mamberamo Tengah	88,67	84,89	87,30	72,71	58,34	66,16	53,85	78,37	65,20
Yalimo	89,20	70,53	81,33	36,69	63,42	48,71	25,75	20,26	22,75
Puncak	48,88	37,36	43,14	12,17	16,69	13,96	16,71	11,39	13,82
Nabire	89,69	89,20	89,44	65,61	76,95	70,36	53,34	76,89	65,05
Paniai	64,06	77,65	69,97	55,77	55,91	55,81	23,86	12,85	17,99
MEE PAGO									
Mimika	94,00	90,80	92,39	70,36	79,18	74,82	84,49	58,02	70,92
Dogiyai	86,40	85,60	86,02	66,78	57,43	61,89	43,82	42,03	42,86
Intan Jaya	72,37	46,20	63,16	12,64	11,47	12,08	18,65	5,47	9,84
Deiyai	73,27	40,89	54,29	21,71	17,63	20,93	45,23	0,00	33,31
SAERERI									
Kepulauan Yapen	92,21	95,44	93,88	65,99	62,21	64,13	63,73	50,26	56,75
Biak Numfor	86,02	91,63	88,76	80,57	68,81	74,86	60,51	68,78	64,19
Waropen	94,63	88,57	91,39	66,90	73,67	69,99	67,58	62,55	64,94
Supiori	95,34	87,95	91,61	67,10	73,37	71,26	30,10	36,48	33,08
ANIM HA									
Merauke	96,66	97,93	97,34	74,32	71,90	73,16	78,88	66,34	72,89
Boven Digoel	78,02	83,10	80,44	43,38	83,35	64,96	18,41	28,17	23,94
Mappi	87,28	91,54	89,33	30,43	39,17	35,26	11,24	19,93	15,91
Asmat	77,08	82,74	79,91	34,90	45,40	38,50	24,25	18,94	21,34
Papua	78,93	78,36	78,66	50,45	58,71	54,26	45,32	40,91	43,27

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

4) Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja melainkan ditentukan juga oleh terwujudnya kerukunan yang aman dan damai yang dimulai dari lingkungan keluarga masyarakat. Sepanjang tahun 2013-2016 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Papua masih terjadi. Meskipun kondisi KDRT di Provinsi Papua memiliki trend menurun, namun angkanya masih terbilang cukup tinggi. Dalam Gambar 2.107, diketahui bahwa pada rentang waktu empat tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya menurun hingga 7,54% per tahun. Pada tahun 2013 jumlah KDRT adalah sebesar 604 kasus dan terus menurun hingga 492 kasus di tahun 2016.

Gambar 2.107. Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2013-2016



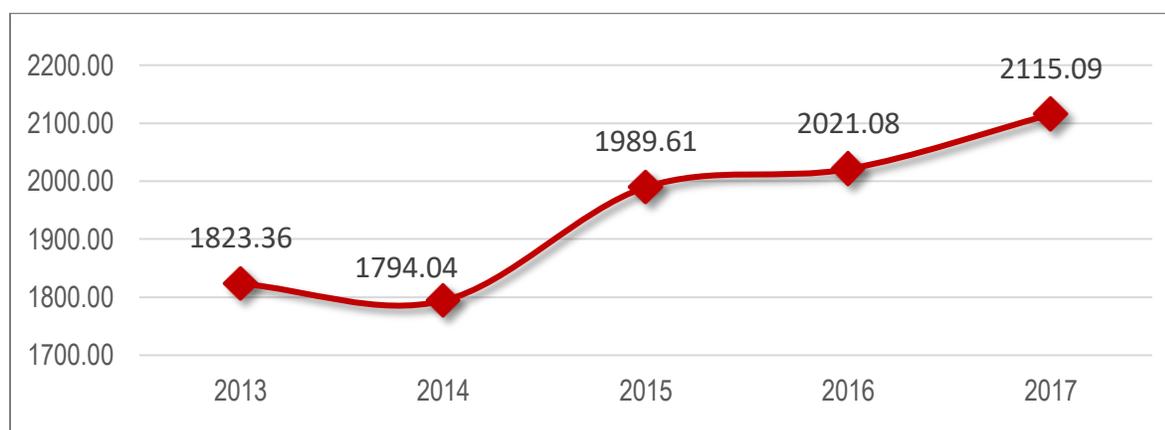
Sumber: Statistik Kriminal BPS RI, 2017 (data diolah)

2.4.2.3. Pangan

1) Tingkat Konsumsi Pangan

Konsumsi kalori atau protein adalah banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Rata-rata wanita memerlukan asupan sebanyak 2000 kalori per harinya, sedangkan pria rata-rata membutuhkan asupan sebanyak 2500 kalori per hari.

Gambar 2.108. Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)



Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.108, asupan kalori Provinsi Papua dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 asupan kalori mencapai 1.823 kkal/kapita/hari dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 menjadi 2.115 kkal/kapita/hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa asupan kalori di Provinsi Papua telah memenuhi standar yang ditentukan.

2.4.2.4. Pertanian

Kondisi pertanian khususnya di Provinsi Papua sering menjadi masalah yang serius, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdapat penurunan peralihan tanah di Provinsi Papua dari 7.057 hektar pada tahun 2016 menjadi 5.887 hektar pada tahun 2017. Adapun proporsi luas peralihan tanah dengan jual-beli mengalami peningkatan dari 87,96% pada tahun 2016, menjadi 88,51% pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.36).

Tabel 2.36. Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jual beli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7057
2017	5.211	451	197	3	25	5887

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ±729.116 hektar, yang berasal dari :

1. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar
3. Program pemerintah untuk pencadangan percontohan sawah baru seluas ± 9.053 hektar
4. Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar
5. Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar
7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±11.302 hektar

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting di Provinsi Papua ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 2.37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Tahun	IKU	IKA	IKTL	IKLH
2013	88.67	58.00	97.28	82.91
2014	84.24	54.67	97.44	80.65
2015	84.24	80.00	79.35	81.01
2016	89.60	76.00	79.17	81.35
2017	90.91	77.33	78.18	81.47
Rata2 Pertumbuhan Provinsi Papua	0.54	5.51	- 6.03	- 0.45
Kontribusi Terhadap Nasional Tahun 2017	1.12	6.32	- 9.22	2.07

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Dalam Tabel 2.37 diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang negatif (-0,45%). Sementara dua dari tiga indikator pembentuk IKLH Provinsi Papua yaitu IKU dan Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat. Adapun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memiliki trend yang cenderung menurun dengan rata-rata sebesar 6,03% setiap tahunnya. Selanjutnya kontribusi IKLH Provinsi Papua untuk tahun 2017 tercatat untuk IKU sebesar 1,12%, IKA sebesar 6,32%, IKTL sebesar -9,22% dan secara keseluruhan kontribusi IKLH Provinsi Papua terhadap Nasional yaitu sebesar 2,07%.

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak yang memiliki akte lahir di beberapa kabupaten sampai saat ini terbilang masih cukup rendah. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 6 kabupaten dengan jumlah anak yang memiliki akte lahir mencapai 2% sampai dengan 6,9%. Secara kewilayahan hampir sebagian besar daerah di Provinsi Papua, persentase anak yang

memiliki akte lahir masih rendah. Berdasarkan Tabel 2.38, terdapat 3 (tiga) wilayah yang rata-rata persentase anak berakte di atas 50% di antaranya ialah wilayah Mamta, Saereri dan Anim Ha.

Tabel 2.38. Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kapamilikan Akta Kelahiran		
		Semua anak	Anak < 5 tahun	Anak < 1 tahun
Mamta	Jayapura	75,00	53,90	41,10
	Keerom	81,80	63,20	45,60
	Mamberamo Raya	6,70		
	Sarmi	64,10	43,10	38,10
	Kota Jayapura	88,80	67,80	47,40
La Pago	Jayawijaya	33,40	31,10	17,10
	Lanny Jaya	22,60	27,90	24,90
	Mamberamo Tengah	4,10	6,90	n.a
	Nduga	n.a	n.a	n.a
	Pegunungan Bintang	32,30	33,60	32,80
	Puncak	74,30	67,00	66,20
	Puncak Jaya	45,50	50,00	74,00
	Tolikara	38,50	29,60	n.a
	Yahukimo	3,10	4,00	23,00
	Yalimo	3,00	2,80	0,00
Mee Pago	Deiyai	2,00	3,60	n.a
	Dogiyai	37,50	12,90	n.a
	Intan Jaya	6,90		n.a
	Mimika	70,00	48,40	23,00
	Nabire	80,30	65,50	38,40
	Paniai	16,00	20,80	12,90
Saereri	Biak Numfor	53,70	40,80	46,20
	Supiori	70,40	46,50	51,50
	Waropen	64,98	52,96	48,99
Anim Ha	Asmat	24,00	20,00	n.a
	Boven Digoel	66,80	58,60	37,90
	Mappi	40,70	20,80	17,80
	Merauke	83,26	72,36	69,63

Sumber: SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017 – BPS`

Persentasae penduduk berbasis NIK di beberapa kabupaten terlihat masih rendah pada tahun 2017. Terlihat persentase penduduk yang memiliki NIK terendah sebesar 0,50% di kabupaten Nduga dan 4,50% di kabupaten Mamberamo Tengah, juga untuk kepemilikan NIK semua anak terlihat masih sangat rendah pada beberapa kabupaten yang diantaranya adalah kabupaten Puncak sebesar 3,40%, Mamberamo Tengah sebesar 4,10%, Deiyai sebesar 5,20% dan Yahukimo sebesar 5,80%. Apabila dilihat berdasarkan kewilayahan di

Provinsi Papua tercatat sebanyak 4 (empat) wilayah yang memiliki persentase penduduk dan anak memiliki NIK mencapai 50% yaitu, Mamta, Mee Pago, Saereri dan Anim Ha.

Tabel 2.39. Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kepemilikan NIK			
		Semua Orang	Semua Anak	Anak di Bawah 5 Tahun	Anak di Bawah 1 Tahun
Mamta	Jayapura	93,70	87,80	74,80	61,50
	Keerom	90,90	80,60	62,10	34,00
	Mamberamo Raya	75,90	53,70	34,60	39,60
	Sarmi	90,00	79,20	59,70	49,40
	Kota Jayapura	96,30	91,00	78,70	63,10
La Pago	Jayawijaya	70,90	66,90	55,20	17,60
	Lanny Jaya	51,90	56,20	67,60	0,00
	Mamberamo Tengah	4,50	4,10	6,90	27,80
	Nduga	0,50			
	Pegunungan Bintang	65,40	54,00	49,90	41,50
	Puncak	52,30	3,40	3,10	0,00
	Puncak Jaya	64,90	58,40	51,60	59,50
	Tolikara	33,30	16,80	15,80	
	Yahukimo	13,20	5,80	5,30	0,70
Mee Pago	Yalimo	25,80	22,10	32,90	34,20
	Deiyai	44,70	5,20	9,00	10,70
	Dogiyai	46,10	42,90	35,10	22,60
	Intan Jaya	43,00	23,70	16,80	
	Mimika	91,20	79,30	59,00	43,90
	Nabire	87,50	78,20	65,10	35,00
Saereri	Paniai	45,70	19,40	20,30	4,90
	Biak Numfor	82,40	64,30	43,30	16,00
	Supiori	86,40	74,40	58,80	47,50
Anim Ha	Waropen	93,08	89,03	71,95	50,38
	Asmat	75,10	54,00	37,30	28,90
	Boven Digoel	93,60	92,70	85,60	62,40
	Mappi	86,10	74,00	47,40	37,10
	Merauke	94,64	88,88	74,35	56,67

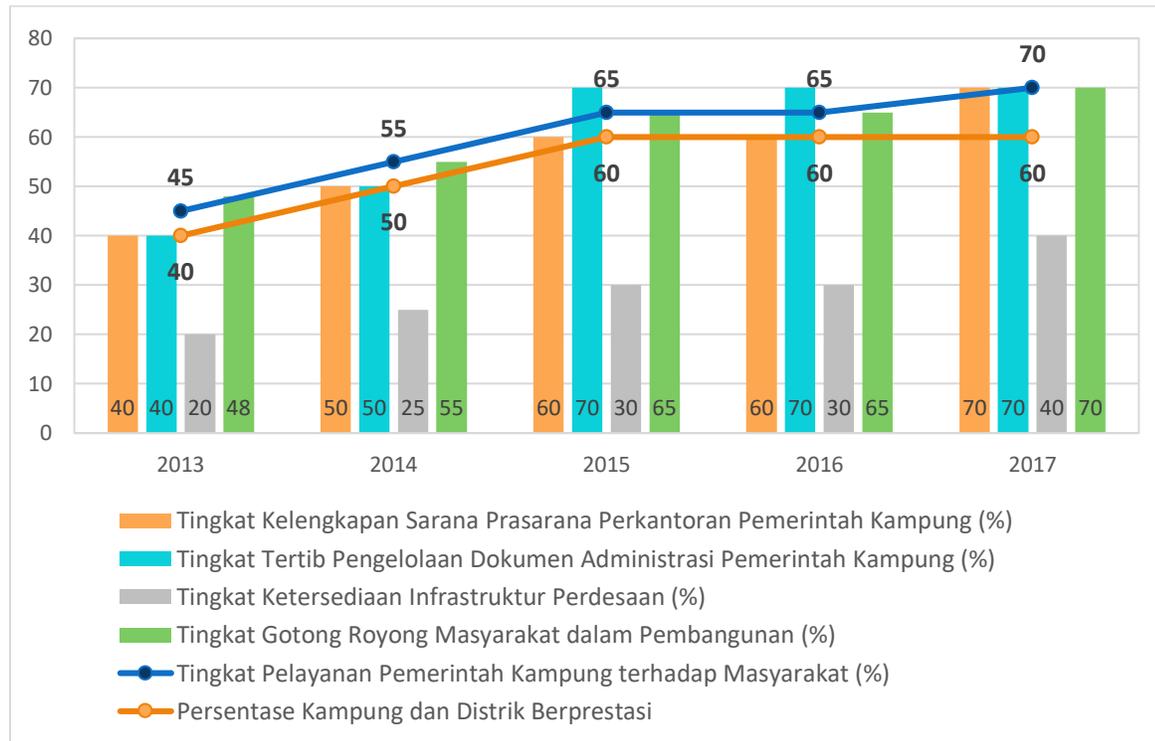
Sumber: SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017 - BPS

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah kampung yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2013 tingkat pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat mencapai 45%, dan mengalami peningkatan menjadi 70% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam peningkatan pelayanannya kepada masyarakat, yang juga dapat ditinjau berdasarkan peningkatan kelengkapan sarana

prasarana perkantoran pemerintah kampung, peningkatan tertib pengelolaan dokumen administrasi pemerintah kampung, dan penyediaan infrastruktur perdesaan (lihat Gambar 2.109).

Gambar 2.109. Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



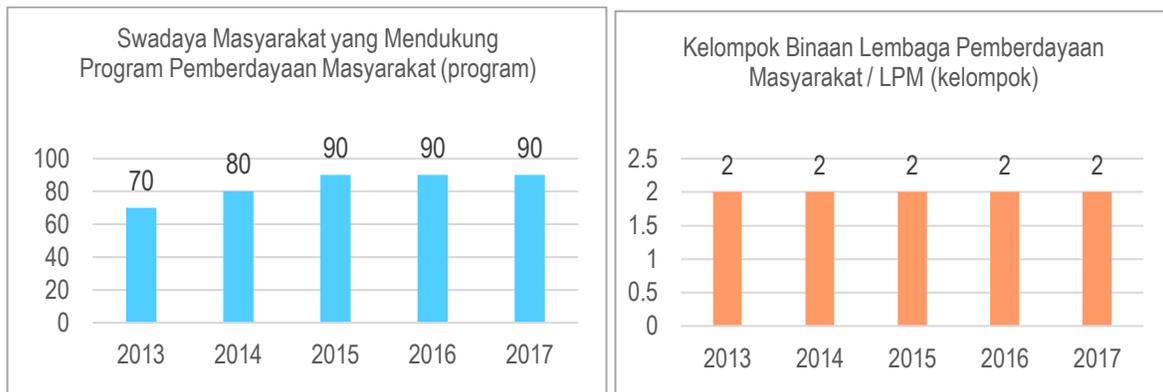
Sumber: Bappeda Papua 2018

Sebagai *outcome* peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung tersebut, terdapat trend peningkatan persentase kampung dan distrik berprestasi dari 40% pada tahun 2013 menjadi 60% pada tahun 2017. Selain itu, tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan juga mengalami peningkatan dari 48% pada tahun 2013 menjadi 70% pada tahun 2017. Semangat masyarakat membantu pemerintah dalam pembangunan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Hal tersebut kiranya dapat memacu pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi dalam pembangunan, sehingga seluruh masarakat yang berada dipelosok dapat menikmati pembangunan yang sama.

Dalam Gambar 2.110 dapat terlihat bahwa jumlah swadaya masyarakat untuk mendukung program pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat, menunjukkan angka yang sangat baik. Pada tahun 2013 jumlah swadaya masyarakat dalam

mendukung program pemberdayaan masyarakat mencapai 70 program kemudian meningkat hingga 90 program pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dengan swadaya masyarakat dalam mendukung program pemerintah, kiranya dapat mempercepat pembangunan di daerah, sehingga permasalahan kesenjangan dapat menurun.

Gambar 2.110. Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2017 (program)

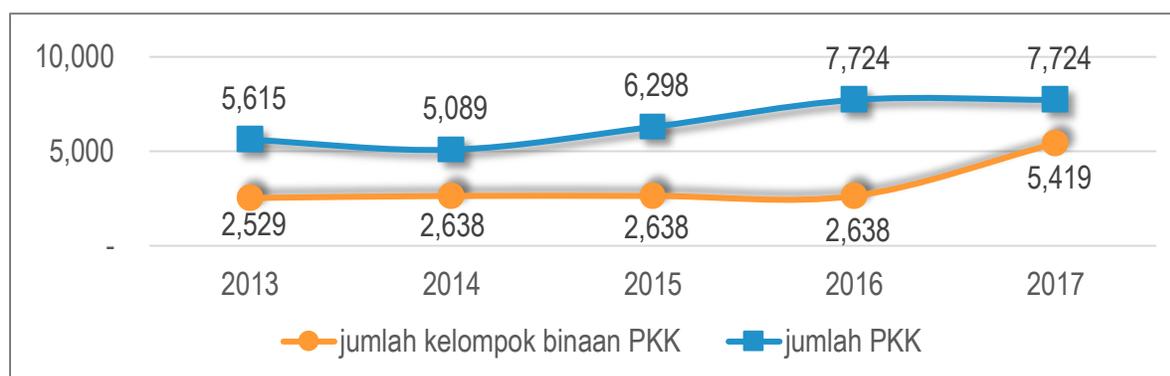


Sumber: Bappeda Papua 2018

Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 baru mencapai 2 kelompok. Kiranya di tahun-tahun kedepan lembaga pemberdayaan masyarakat kampung menambah lagi kelompok-kelompok binaan sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah baik di sektor ekonomi dan sektor lainnya lebih banyak lagi.

Jumlah kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2013 sebanyak 5.615 kelompok PKK mampu membentuk 2.529 kelompok binaan. Pada tahun 2017 jumlah kelompok PKK meningkat menjadi 7.724 kelompok dan menbina 5.419 kelompok binaan (lihat Gambar 2.111). Peningkatan tersebut menunjukkan nilai yang positif, dengan meningkatnya jumlah kelompok PKK dan binaannya kiranya dapat melibatkan banyak masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat terutama perempuan dalam meningkatkan peran perempuan melalui PKK.

Gambar 2.111. Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK



Sumber: Bappeda Papua, 2018

Melalui PKK kita dapat meningkatkan peran perempuan serta dapat menggali dan menggerakkan serta mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembinaan ini diharapkan dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan perempuan dan anak serta perbaikan kesejahteraan keluarga dan mampu memotifasi orang lain dan memberikan harapan bagi terbentuknya keluarga mandiri serta bermasyarakat dan menunjang program pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (*on top*) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

Tabel 2.40. Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua

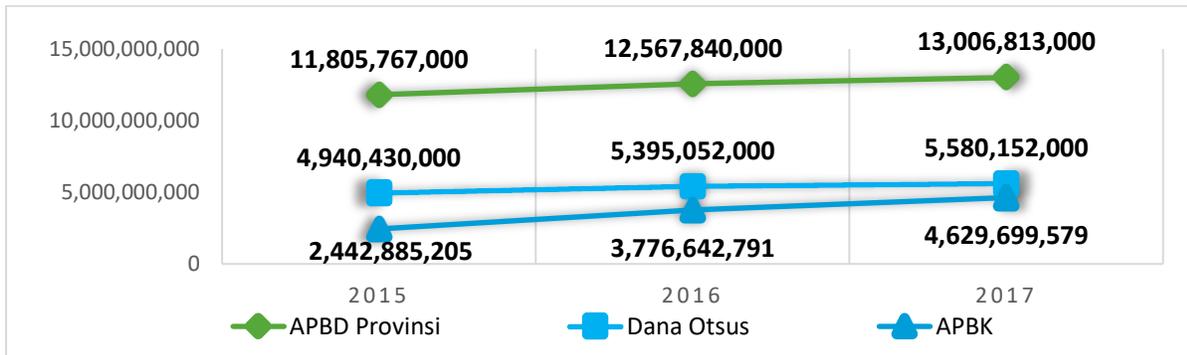
	2015	2016	2017
APBD Provinsi	11.805.767.000	12.567.840.000	13.006.813.000
Dana Otsus	4.940.430.000	5.395.052.000	5.580.152.000
APBK	2.442.885.205	3.776.642.791	4.629.699.579
DD	1.433.226.742	3.385.116.457	3.563.722.683
Kampung	4.293	4.635	5.163
Penduduk	3.149.375	3.207.444	3.265.202
DD/kampung	333.852,02	730.337,96	690.242,63
DD/kapita	455,08	1.055,39	1.091,42
%DD terhadap APBK	59	90	77
%DD terhadap APBD provinsi	0,12	26,93	27,40
%DD terhadap Dana Otsus	29,01	62,74	63,86
%APBK terhadap APBD provinsi	20,69	30,05	35,59
%APBK terhadap dana otsus	49,45	70,00	82,97

Sumber: Data Dana Desa diolah dari DJPK Kementerian Keuangan dan APBDesa dari BPS Pemerintahan Desa tahun 2015, 2016 dan 2017

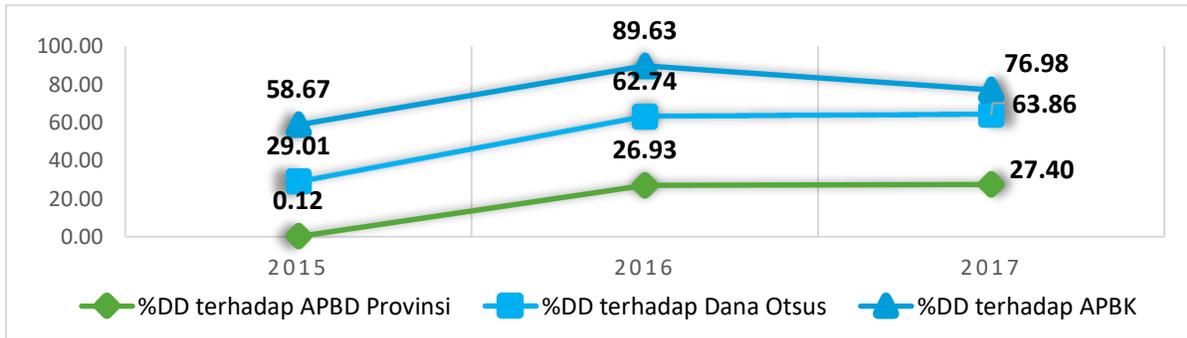
Sejak diimplementasikan tahun 2015, Dana Desa memiliki komposisi -bauran dana- yang signifikan baik di tingkat Desa, kabupaten, maupun provinsi. Pada Tabel 2.40 dapat dilihat bahwa seiring dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi mandate UU Desa agar alokasi Dana Desa secara bertahap mencapai 10% dari dana transfer daerah- jumlah alokasi Dana Desa di Provinsi Papua terus meningkat, terakhir tahun 2017 mencapai 3,56 Trilyun Rupiah atau 63,86% terhadap total Dana Otsus dan 27,40 terhadap total APBD Provinsi Papua. Peningkatan DD juga diikuti oleh APB Kampung karena UU Desa juga mengamanatkan Kabupaten/Kota mengalokasikan 10% dari DAU, DBH dan Pajak Daerah untuk Desa.

Pada Gambar 2.112, Gambar 2.113, dan Gambar 2.114, dapat dilihat perkembangan APB Kampung dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dimana pada tahun 2017 APBKampung mencapai 4,63 Trilyun atau 82,97% dari Dana Otsus dan 35,59,4% dari APBD Provinsi. Meskipun lokasi ADD juga meningkat, tetapi proporsi DD terhadap APBKampung tetap tinggi sebesar 76,98% pada tahun 2017.

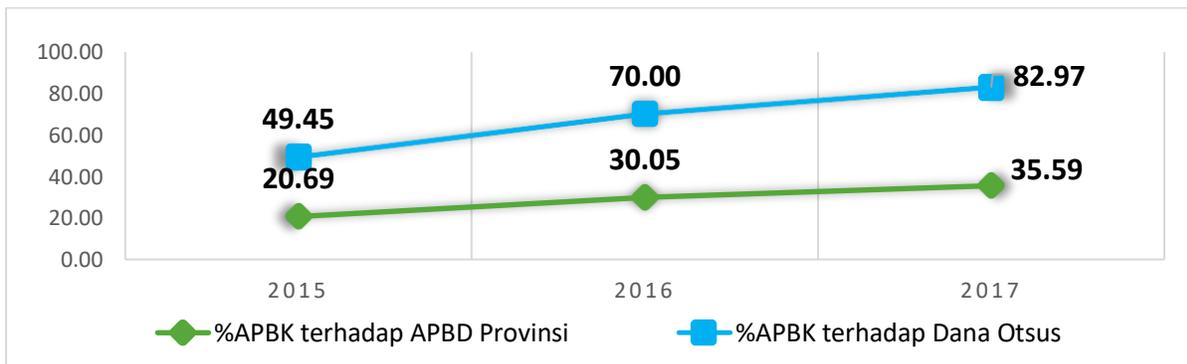
Gambar 2.112. Perkembangan APBD, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribuan Rupiah)



Gambar 2.113. Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBD di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)



Gambar 2.114. Persentase APBD terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)



Dari uraian di atas, nampak bahwa kebijakan UU Desa dengan Dana Desa memberikan kontribusi terhadap alokasi sumber daya keuangan langsung ke kampung.

Dengan kata lain, idealnya kampung perlu memiliki sumber daya keuangan untuk mendanai untuk mendanai kewenangan lokal kampung sesuai dengan prinsip susidiaritas.

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara keseluruhan pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Terlihat rata-rata pertumbuhan penduduk yang tersebar di 29 kabupaten/kota bertumbuh sebesar 1%. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Papua cukup terkendali dan tidak mengalami perubahan yang cukup besar (lihat Tabel 2.41). Secara kewilayahan di Provinsi Papua, terdapat beberapa daerah dengan pertumbuhan paling tinggi di antaranya adalah Kabupaten Puncak Jaya (La Pago) dan Supiori (Saereri) yang mampu bertumbuh sebesar 3 (tiga) persen. Sedangkan daerah lainnya stabil memiliki pertumbuhan berkisar antara 1-2 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.41. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	1,97	1,93	1,89	1,84	1,8
Jayapura	1,97	0,5	1,7	1,95	1,77
Sarmi	2,01	0,79	2,82	1,94	1,86
Keerom	2,14	2,38	1,31	0,81	1,64
Mamberamo Raya	1,39	3,73	4,92	1,38	2,25
Kota Jayapura	1,59	1,16	2,83	1,87	1,7
Jayawijaya	0,99	0,51	1,08	1,89	1,23
Puncak Jaya	3,92	1,13	1,79	3,88	3,18
Yahukimo	2,02	1,77	1,76	1,59	1,52
Peg. Bintang	2,04	2,01	1,43	1,12	1,33
Tolikara	1,98	1,76	2,98	1,88	2,09
Nduga	1,9	7,73	1,78	1,82	1,18
Lanny Jaya	2	5,91	1,19	1,25	1,09
Mamberamo Tengah	1,9	6,35	2,03	0,81	1,69
Yalimo	2,09	4,87	2,27	1,51	1,75
Puncak	1,96	1,59	2,08	1,83	2,18
Nabire	1,99	0,36	1,74	1,87	1,61
Paniai	2,03	0,72	1,1	1,85	1,71
Mimika	2,5	1,48	1,19	1,94	2,35
Dogiyai	1,85	1,67	1,51	1,76	1,27
Intan Jaya	1,9	3,24	2,47	3,01	2,15
Deiyai	1,98	2,27	1,99	1,79	2,25
Kepulauan Yapen	1,81	2,05	1,57	1,87	2,03
Biak Numfor	2,04	0,56	2,46	1,89	2,04
Waropen	1,84	3,04	2,42	1,44	2,35
Supiori	1,79	1,84	5,19	1,65	3,34
Merauke	1,99	1,67	1,45	1,58	1,54

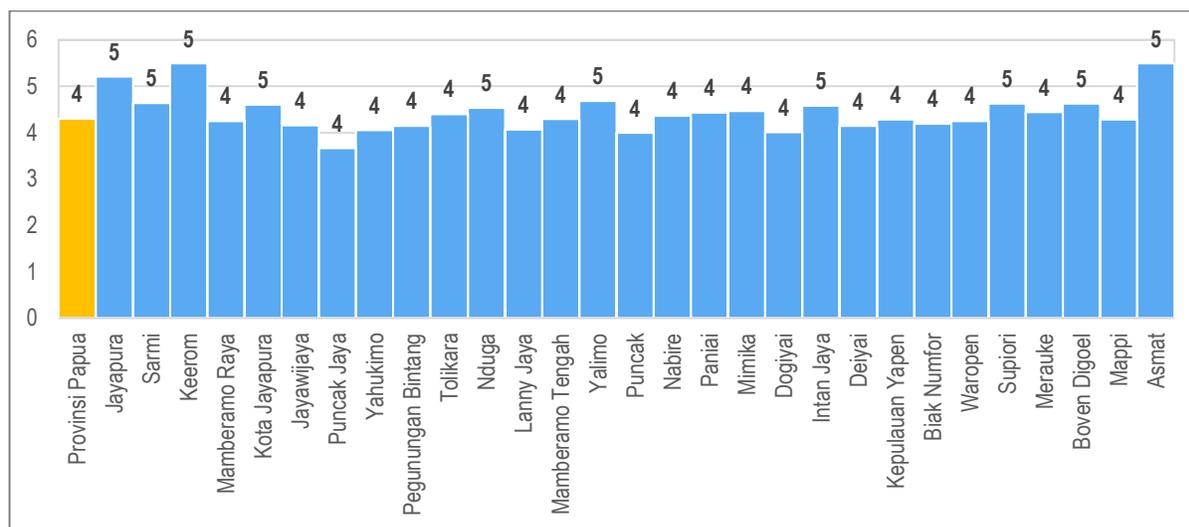
Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Boven Digoel	1,88	1,46	2,83	2,62	2,37
Mappi	1,84	2,03	2,32	1,87	1,15
Asmat	2,02	1,9	2,27	1,96	2,87

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah)

Secara demografis, tujuan berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk, dengan jumlah anak yang dianjurkan pemerintah sebanyak 2 (dua) orang sehingga anggota keluarga sebanyak 4 (empat) orang. Secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua juga tidak memiliki perubahan yang cukup pesat. Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebesar 4 (empat) orang dalam setiap rumah tangga.

Berdasarkan kabupaten/kota di Papua, terdapat 11 daerah yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di atas rata-rata provinsi di antaranya ialah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Nduga, Yalimo, Intan Jaya, Supiori, Boven Digoel dan Asmat yaitu rata-rata 5 (lima) orang. Sedangkan daerah lainnya memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di bawah rata-rata provinsi.

Gambar 2.115. Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2. Keluarga Berencana

Persentase pasangan usia subur (PUS) dalam menyukseskan program keluarga berencana dapat terdeteksi melalui partisipasinya menjadi akseptor KB. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran PUS selain bersumber dari kesadarannya sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan layanan pemerintah khususnya para aparatur yang berperan di dalam pelaksanaan program tersebut.

Tabel 2.42. Rasio Akseptor KB

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Mamta	Jayapura	95,46	51,63	22,08	37,55	86,33
	Sarmi		131,70	123,24	51,51	20,96
	Keerom	53,80	45,63	45,63	31,68	100,00
	Mamberamo Raya	100,00	33,41	33,41	100,00	100,00
	Kota Jayapura	87,84	95,16	95,16	85,35	98,34
La Pago	Jayawijaya	5,73	8,62	5,45	92,02	84,34
	Puncak Jaya	100,00	19,19	19,19	72,71	42,86
	Yahukimo		31,06	31,06	15,46	7,55
	Pegunungan Bintang	100,00	80,14	75,11	45,03	37,81
	Tolikara		10,13	10,13	100,00	100,00
	Nduga	100,00	65,05	65,05	100,00	100,00
	Lanny Jaya	100,00	45,35	45,35	9,78	68,14
	Mamberamo Tengah		80,74	80,74	55,42	100,00
	Yalimo	100,00	97,31	97,31	38,40	58,99
	Puncak		81,43	81,43	41,87	86,11
Mee Pago	Nabire	51,17	52,88	52,88	41,35	100,00
	Paniai	100,00	94,18	94,22	62,15	100,00
	Mimika	90,52	21,00	21,00	75,09	100,00
	Dogiyai	100,00	96,59	96,59	20,88	100,00
	Intan Jaya		23,71	23,71	27,14	100,00
	Deiyai		29,36	29,36	14,53	100,00
Saereri	Kepulauan Yapen	100,00	35,62	35,62	68,97	65,21
	Biak Numfor	57,16	19,49	19,47	63,13	53,92
	Waropen	100,00	11,21	11,21	44,93	50,70
	Supiori	44,37	15,42	15,42	22,33	82,24
Anim Ha	Merauke	100,00	9,84	9,84	54,60	61,56
	Boven Digoel		13,34	13,34	32,91	38,63
	Mappi	100,00	31,49	31,49	100,00	100,00
	Asmat		49,85	49,85	82,03	65,52
	Papua	82,94	37,03	33,38	55,32	79,37

Sumber: Papua Dalam Angka 2014-2018

Pada Tabel 2.42 tercatat rasio akseptor KB di Provinsi Papua menunjukkan kondisi yang cenderung semakin meningkat. Secara keseluruhan di Provinsi Papua terdapat 18

daerah yang menunjukkan rasio akseptor KB cenderung semakin meningkat. Sedangkan 11 daerah lainnya terlihat memiliki nilai yang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.43. Jumlah PUS yang Tidak ber-KB

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Papua	40.608	218.477	231.160	181.876	41.122
Jayapura	1.334	18.990	30.590	40.304	3.600
Sarmi		-292	-214	1.941	1.938
Keerom	4.357	6.246	6.246	13.446	0
Mamberamo Raya	0	2.077	2.077	0	0
Jayapura	3.865	1.705	1.703	4.911	1.016
Jayawijaya	856	24.673	25.528	1.319	683
Puncak Jaya	0	11.362	11.362	524	424
Yahukimo		5.214	5.214	4.058	2.840
Pegunungan Bintang	0	600	752	1.311	875
Tolikara		17.441	17.441	0	0
Nduga	0	866	866	0	0
Lanny Jaya	0	2.005	2.005	14.633	582
Mamberamo Tengah		251	251	794	0
Yalimo	0	36	36	2.294	269
Puncak		179	179	1.645	71
Nabire	10.555	10.994	10.994	24.812	0
Paniai	0	640	636	2.485	0
Mimika	7.777	16.520	16.680	14.069	0
Dogiyai	0	46	46	4.484	0
Intan Jaya		4.113	4.113	145	0
Deiyai		2.394	2.394	4.224	0
Kepulauan Yapen	0	5.500	5.500	2.786	2.728
Biak Numfor	10.926	20.866	20.870	11.508	11.434
Waropen	0	6.433	6.433	1.663	841
Supiori	938	2.233	2.233	2.021	100
Merauke	0	44.578	44.578	21.718	10.999
Boven Digoel		7.916	7.916	4.020	2.380
Mappi	0	3.513	3.513	0	0
Asmat		1.378	1.378	761	342

Sumber: Papua dalam angka 2015-2018

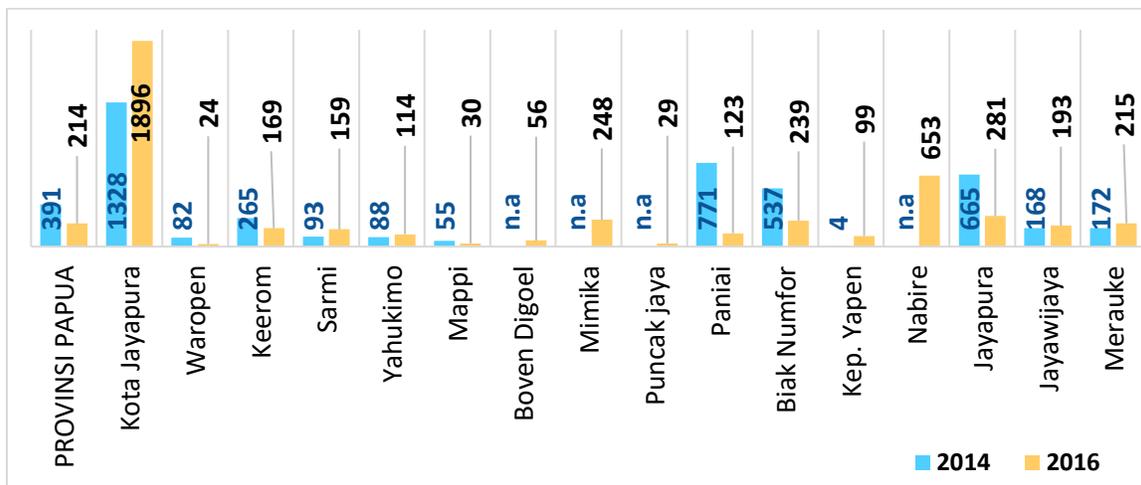
2.4.2.9. Perhubungan

1. Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 1:214 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan sebanyak 214 unit kendaraan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013, yaitu sepanjang 1 km dapat diakses oleh 391 unit kendaraan baik roda empat, roda dua dan kendaraan lainnya.

Gambar 2.11616 menunjukkan adanya perubahan di masing-masing wilayah di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016. Dari data statistik yang diperoleh Kota Jayapura memiliki perbandingan yang paling besar di antara beberapa kabupaten lainnya yaitu mencapai 1;1,896 yang berarti bahwa dalam 1 km diakses oleh 1,896 unit kendaraan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 berarti terjadi penambahan unit kendaraan baik roda empat, dua dan lainnya. Selain itu, terdapat juga kabupaten lain yang tercatat secara statistik memiliki rasio panjang jalan terhadap kendaraan meningkat di antaranya adalah Kabupaten Sarmi, Yahukimo, Kepulauan Yapen, Jayawijaya dan Merauke yang menandakan adanya peningkatan unit kendaraan. Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Waropen, Keerom, Mappi, Paniai, Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura memiliki nilai rasio yang menurun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penambahan ruas jalan selama ini.

Gambar 2.116. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2015-2018 (data diolah)

Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

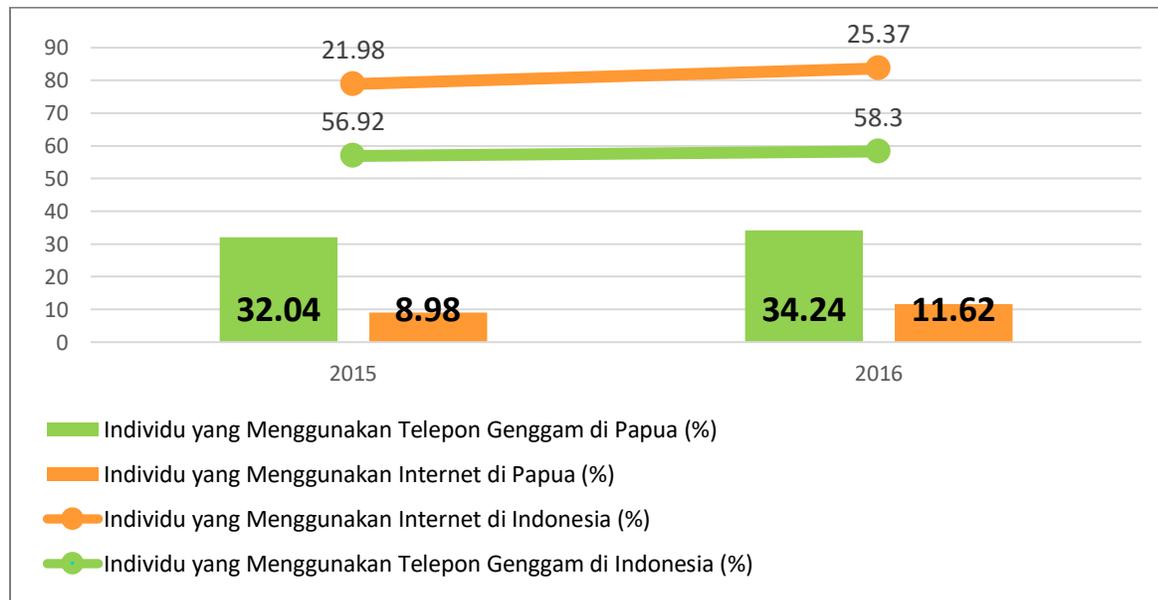
- Entrop di Kota Jayapura;
- Wamena di Kabupaten Jayawijaya;
- Oyehe di Kabupaten Paniai;
- Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- Biak di Kabupaten Biak Numfor.

2.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

Hingga awal 2018, total BTS yang telah didirikan tiga operator di seluruh wilayah Papua sebanyak 4.644 unit. Dengan jumlah terbanyak dibangun oleh Telkomsel. Anak perusahaan Telkom itu mengoperasikan 4.461 unit BTS. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan BTS milik Indosat 137 unit BTS, dan XL 46 unit BTS. Dengan jumlah BTS seperti itu, Telkomsel menjadi perusahaan yang mendominasi, yakni 96,06%. Bandingkan dengan Indosat Ooredoo 2,95% dan XL Axiata 0,99%.

Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam di Indonesia mencapai 56,92% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai 58,3%. Sedangkan di wilayah Provinsi Papua mencapai 32,04% dan meningkat menjadi 34,24%. Sementara proporsi individu yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 21,96% pada tahun 2015, meningkat menjadi 25,37% pada tahun 2016. Di Provinsi Papua proporsi individu yang menggunakan internet sebesar 8,98% pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 11,62% pada tahun 2016.

Gambar 2.117. Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet

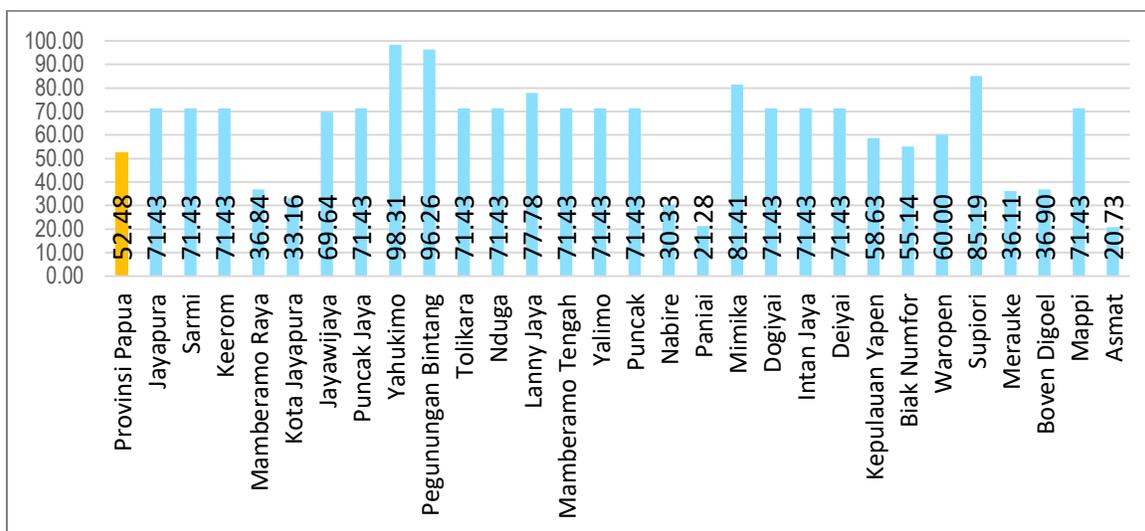


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2015-2016 (data diolah)

2.4.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Berdasarkan data stitistik koperasi yang diperoleh di Provinsi Papua tercatat sampai dengan tahun 2016 koperasi yang aktif adalah sebesar 52,48% yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Secara kewilayahan tercatat 4 Kabupaten dengan koperasi yang masih aktif di atas 80 persen di antaranya adalah Kabupaten Supiori (85,19%), Mimika (81,41%), Pegunungan Bintang (96,26%) dan Kabupaten Yahukimo (98,31%). Sedangkan daerah lainnya memiliki koperasi aktif berada pada kisaran 20-75%.

Gambar 2.118. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016



Sumber: Dinas Koperasi Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.4.2.12. Penanaman Modal

Dalam mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi Papua masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data di atas menunjukkan sepanjang tahun 2013-2016 jumlah investor baik PMDN maupun PMA di Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata pertumbuhan terlihat semakin menurun hingga 37,74% setiap tahunnya. Meskipun demikian nilai investasi memiliki baik PMDN dan PMA terlihat cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Walaupun tidak konsisten mengalami peningkatan, namun tercatat hingga tahun 2016 nilai investasi mencapai Rp. 122,55 triliun. Jika dipilah berdasarkan kewilayahan, terdapat 2 (dua) kabupaten dengan

jumlah investor terbanyak yaitu Kabupaten Jayapura (Mamta) dan Kabupaten Merauke (Anim Ha).

Tabel 2.44. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016	
	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)						
Papua	168	109.304.355	186	38.874.752	200	94.044.386	87	122.549.122
Jayapura	17	1.281.963	17	15.650.852	18	11.942.907	13	14.636.407
Sarmi	3	573.49	6	726.00	7	578.34	4	578.34
Keerom	9	5.208.126	11	3.384.978	11	5.903.366	9	5.903.366
Mamb. Raya	3	347.66	3	695.32	3	347.66	3	347.66
Jayapura	11	1.589.534	12	1.000.000	12	9.924.848	2	10.167.243
Jayawijaya	2	1.65	2	-	2	1.65	-	1.65
Yahukimo	3	-	3	-	3	-	3	-
Peg. Bintang	1	-	1	-	1	-	1	-
Nabire	3	-	22	221.94	24	1.585.245	4	2.689.474
Paniai	39	91.76	3	1.762.067	5	12.284.190	1	10.400.867
Mimika	5	25.02	40	1.540.124	42	29.145.320	6	44.786.011
Deiyai	-	-	-	-	-	-	1	-
Kep. Yapen	-	105.92	-	-	1	50.00	1	291.61
Biak Numfor	18	7.978.398	5	-	5	101.51	1	124.67
Waropen	6	-	6	-	5	-	4	-
Merauke	30	91.462.088	33	11.138.252	39	14.548.865	20	23.773.819
Boven Digoel	12	537.24	13	2.630.218	13	7.505.484	6	8.723.005
Mappi	4	-	7	125.00	7	125.00	7	125.00
Asmat	1	-	1	-	1	-	1	-

Sumber: Papua dalam angka 2015-2017

Rasio daya serap tenaga kerja dari perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2013 dari rata-rata satu perusahaan menyerap 250 tenaga kerja menurun hingga tahun 2017 sebesar satu perusahaan menyerap 78 tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah perusahaan dan penurunan jumlah tenaga kerja di Provinsi Papua sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 tidak proporsional.

Tabel 2.45. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN

Indikator	2013	2014	2015	2016
Perusahaan				
PMDN	66	78	78	87
PMA	102	108	122	126
Jumlah Perusahaan	168	186	200	213
Tenaga Kerja				
PMDN	41.031	42.154	14.805	14.881
PMA	971	1.028	1.033	1.701
Jumlah Tenaga Kerja	42.002	43.182	15.838	16.582
Rasio	250	232	79	78

Sumber: Papua dalam angka 2015-2017 (diolah)

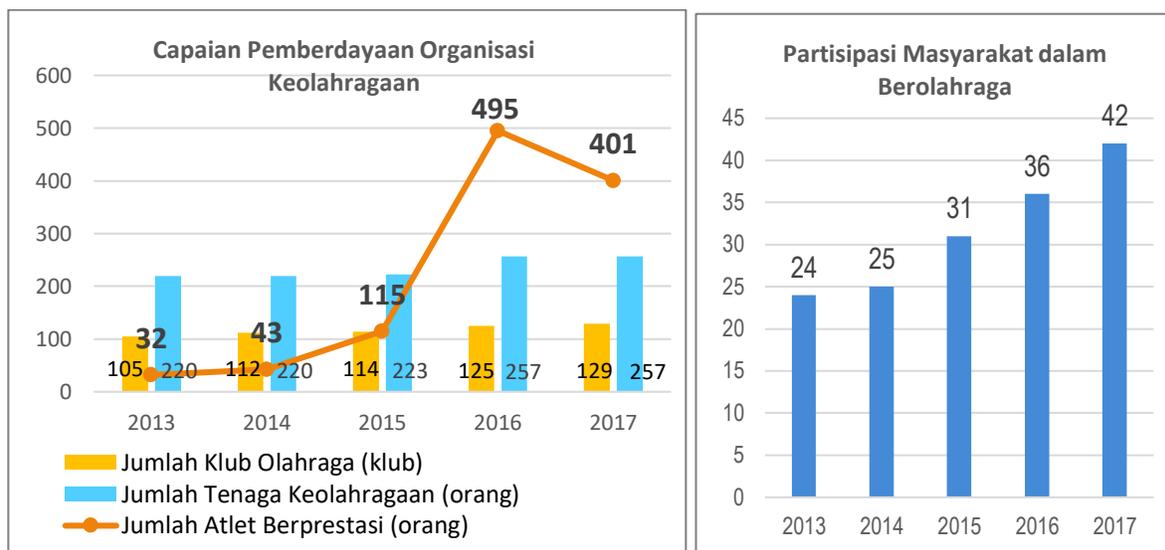
2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Dengan semakin banyaknya event olahraga baik pada tingkat kabupaten, nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir tercatat klub olahraga di Provinsi Papua juga kian bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan klub-klub olahraga berbagai cabang olahraga sepanjang tahun 2013-2017 rata-rata bertumbuh sebesar 4,98% per tahunnya. .

Gambar 2.119. Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan tercatat klub olahraga di Provinsi Papua ada 129 klub dengan berbagai macam cabang. Jumlah tenaga dan keolahragaan yang berkualitas Provinsi Papua secara konsisten juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tercatat ada sebanyak 220 orang tenaga keolahragaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 257 orang. Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah atlet berprestasi di Provinsi Papua meningkat sangat pesat. Tercatat rata-rata pertumbuhan atlet yang berprestasi hingga mencapai 35,38% setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2017 jumlah atlet yang berprestasi tercatat sebanyak 401 orang, meskipun sempat menurun dari tahun sebelumnya yang mencatatkan sebanyak 495 orang. Selanjutnya, partisipasi masyarakat di Provinsi Papua selama ini juga terus mengalami peningkatan dalam bidang olahraga. Adanya partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Gambar 2.119).

1. Organisasi Kepemudaan

Dalam meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan di Provinsi Papua selama ini, terdapat beberapa indikator dalam peningkatan peran serta kepemudaan di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46. Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda	43	43	44	47	47
Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	32	32	32	30	33
Organisasi pemuda yang aktif	32	32	32	32	32
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	45	45	45	30	115

Sumber: Provinsi Papua

Dari beberapa indikator di atas terlihat semuanya mengalami peningkatan yang positif. Tercatat organisasi pemuda di Provinsi Papua terus bertambah dari tahun-ke tahun, sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 47 organisasi pemuda yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga konsisten melakukan pembinaan maupun kegiatan pelatihan lainnya terhadap lembaga maupun organisasi kepemudaan, pada tahun 2017 sudah ada 33 lembaga/oraganisasi yang terbina dan 115 kelompok usaha yang diberdayakan.

2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam menunjang capaian olahraga terus konsisten, perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Provinsi Papua saat ini memiliki sarana dan prasarana olahraga terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017. Tercatat sarana olahraga masyarakat dan ruang publik bermutu sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 186 unit, kemudian gedung olahraga 15 unit dan sarana olahraga untuk pusat pertandingan sebanyak 176 unit

Tabel 2.47. Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	175	175	175	186	186
Jumlah Gedung olahraga	8	10	10	15	15
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	175	175	175	176

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.4.2.14. Statistik

Kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Papua selain didukung dengan adanya instansi BPS, Provinsi Papua juga saat ini memiliki pusat data pembangunan yang merupakan salah satu unit di bawah Bappeda yaitu Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, yang disingkat PUSDALISBANG.

PUSDALIBANG Provinsi Papua adalah Wadah yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah. Selain itu Pusat Data dan Analisa Pembangunan berfungsi untuk : (1) menjembatani jaringan-jaringan dengan pemangku kepentingan pembangunan, (2) mendukung dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, (3) mendorong pengembangan kapasitas dan secara proaktif menyebarkan data dan informasi (terutama dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik dan pemerintah.

Muatan utama dari produk PUSDALISBANG adalah statistik hasil-hasil pembangunan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua, penyediaan data SIPD, analisis data statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data statistik secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Selama tahun 2016-2018, PUSDALISBANG Provinsi Papua telah menghasilkan beberapa dokumen statistik dan analisis pembangunan, antara lain : (1) Infografis Potret Capaian Pembangunan Papua, (2) Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (3) Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (4) Pencapaian Indikator Makro Provinsi Papua, (5) Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, PUSDALISBANG Provinsi Papua juga telah mengembangkan *e-Government* yang dapat diakses melalui website : https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel.

2.4.2.15. Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua. Selengkapnya perkembangan WBTB Papua dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.48. Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Papua	Seni Pertunjukan
2013	68	Ukiran Asmat	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2013	69	Barappen	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan
2013	70	Tifa	Papua	Seni Pertunjukan
2013	77	Noken	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	120	Tomako Batu	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	121	Koteka	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

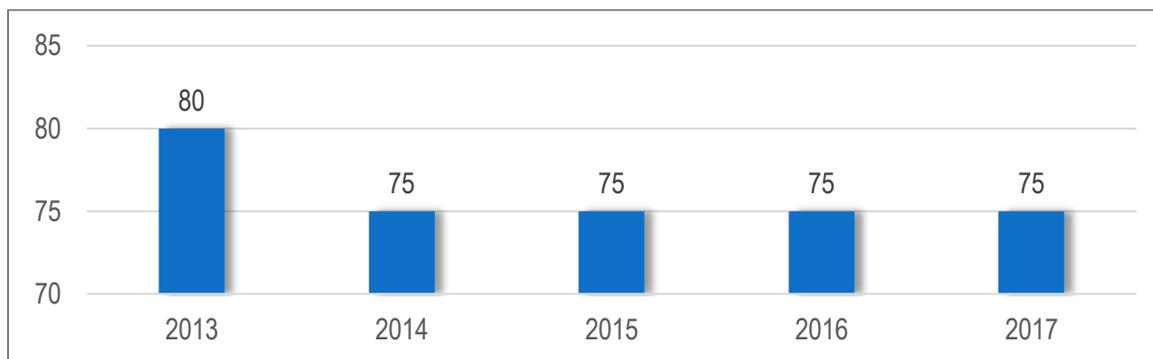
Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2016	141	Wor Biak	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
2016	142	Elha	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	143	Aker	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	144	Honai	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	145	Khombow	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	146	Terfo	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	143	Yu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	144	Pokem	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu sebesar 75 persen dalam rentang waktu empat tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2013 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 80 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 75 persen dan terus bertahan sampai dengan tahun 2017. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang.

Gambar 2.120. Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

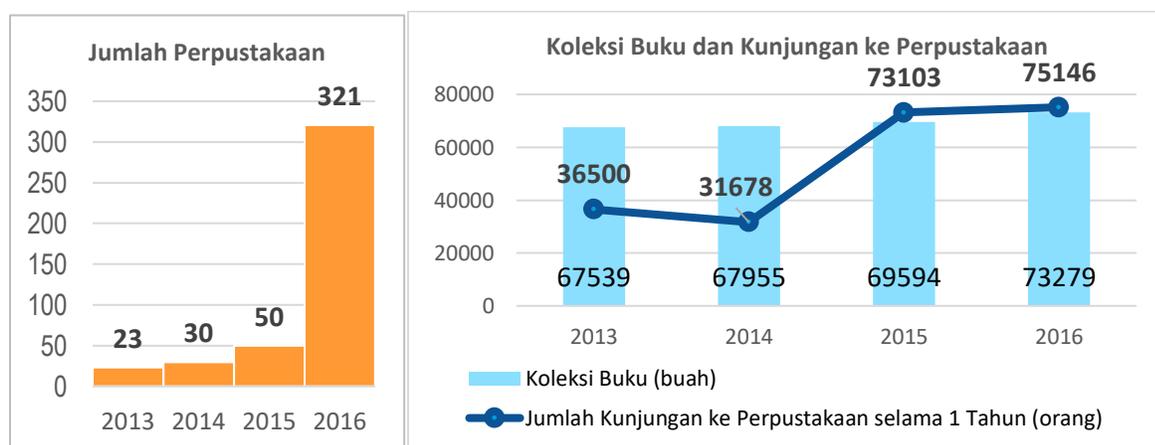


Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.4.2.16. Perpustakaan

Sepanjang tahun 2013-2016 gedung perpustakaan di Provinsi Papua mengalami peningkatan dan tersebar di 29 kabupaten/kota. Tercatat peningkatan jumlah gedung perpustakaan dimulai dari tahun 2013 sebanyak 23 unit kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 321 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya perpustakaan di Provinsi Papua dapat memberikan ruang kepada siapa saja untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Gambar 2.121. Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua



Sumber: Provinsi Papua

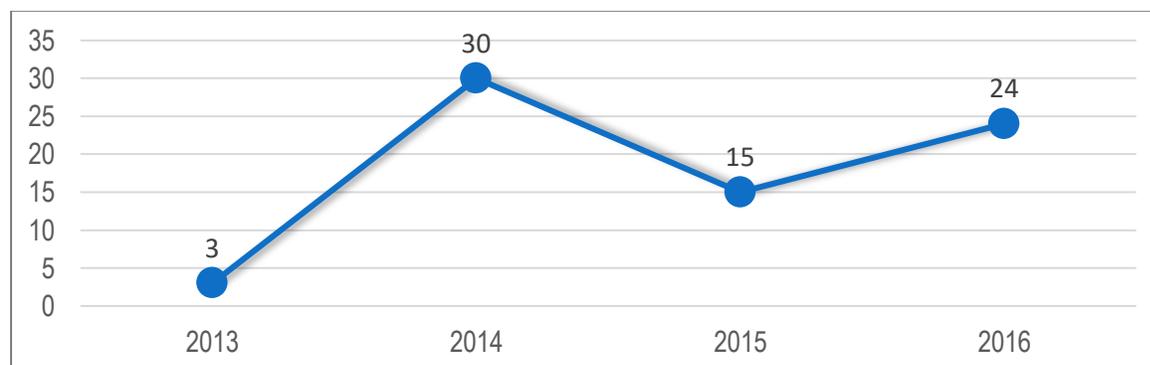
Selain itu, koleksi buku yang tersedia juga mengalami peningkatan dalam rentan waktu empat tahun terakhir. Tercatat rata-rata peningkatan koleksi buku di Provinsi Papua

meningkat sebesar 5,24% setiap tahunnya, meskipun terlihat ada penurunan jumlah koleksi buku 11,70 persen dari tahun 2013-2014 dan 27,88 persen di tahun 2015-2016. Selanjutnya, dengan semakin banyaknya perpustakaan yang dibuka ini membuat jumlah kunjungan ke perpustakaan juga terlihat terus mengalami peningkatan. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 75,146 pengunjung. Dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar 14,72%.

2.4.2.17. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku merupakan perangkat yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Berdasarkan Gambar 2.122, diketahui bahwa perangkat daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku baru mencapai 24 PD, dengan kata lain masih terdapat beberapa OPD yang belum menerapkan arsip masing-masing PD secara baku.

Gambar 2.122. Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku



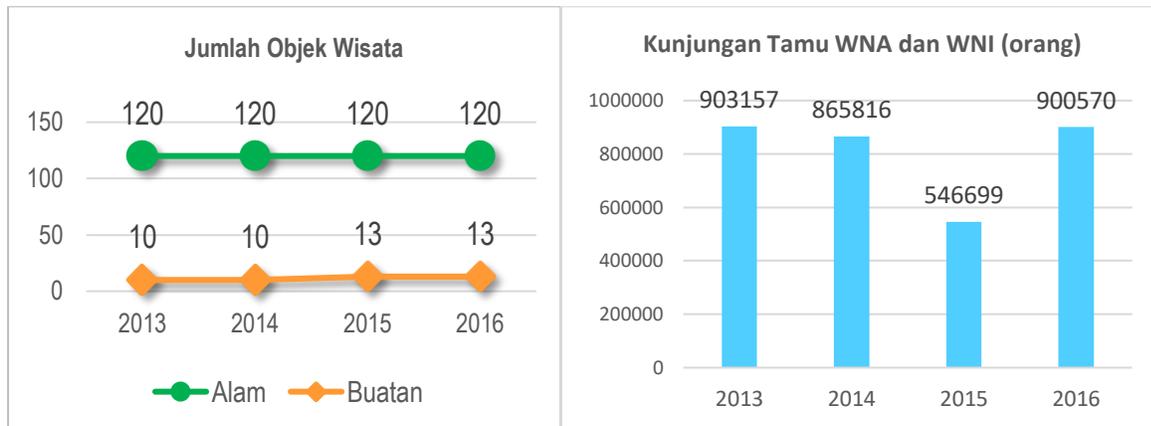
Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Pariwisata

Potensi pariwisata di Provinsi Papua sangat beragam jenisnya yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Objek wisata di Papua terbagi atas dua kelompok yaitu wisata alam dan wisata buatan. Tercatat objek wisata alam di Provinsi Papua terdiri dari 120 objek, dan objek wisata buatan sebanyak 13 objek (lihat Gambar 2.123).

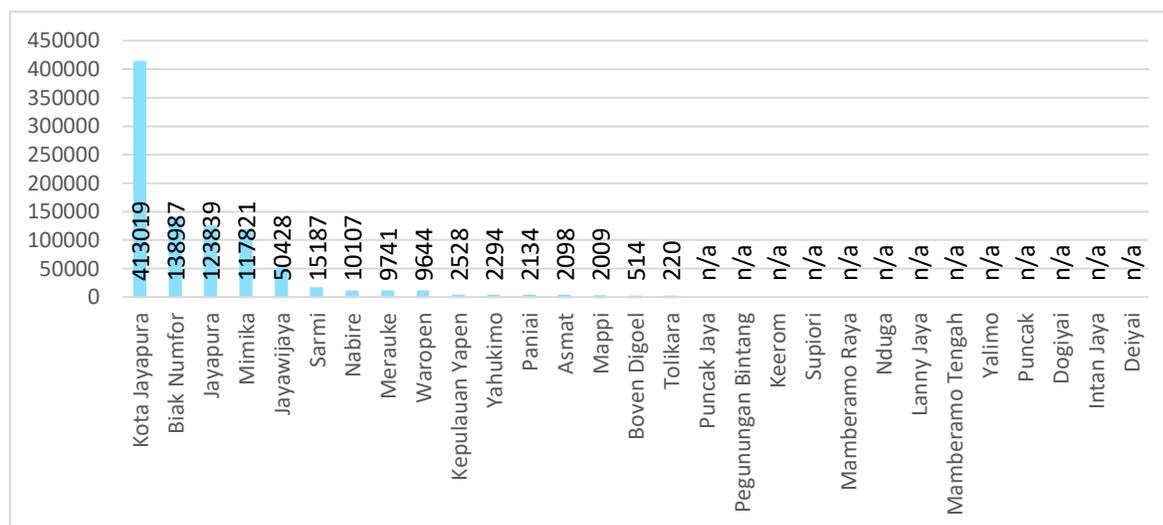
Gambar 2.123. Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.12423, diketahui bahwa kunjungan wisata di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Sebaran kunjungan wisatawan di Papua tidak terlepas dari adanya event-event yang dilaksanakan hampir ada di setiap tahun di berbagai daerah di Papua. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah wisatawan dalam negeri maupun mancanegara mencapai 900,570 orang atau meningkat sebesar 39,29% dari tahun sebelumnya. Selain itu, lama kunjungan wisatawan di Papua sangat beragam dalam rentan waktu empat tahun terakhir, tercatat rata-rata lama kunjungan berkisar antara 2-6 hari setiap tahunnya.

Gambar 2.124. Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)



Sumber: Statistik BPS

2.4.3.2. Pertanian

Berdasarkan Tabel 2.49, diketahui bahwa rata-rata produktifitas pertanian terus mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada produktifitas total di Papua terus menurun dari 9,82 ton/ha di tahun 2013 menjadi 7,37 ton/ha di tahun 2016 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rata-rata setiap tahunnya produktifitas berkurang hingga mencapai 8,65%. Hal ini disebabkan juga oleh produksi total pertanian yang terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,16% khususnya pada tanaman padi sawah yang setiap tahunnya memiliki jumlah produksi menurun paling tinggi yaitu sebesar 12,32% per tahunnya.

Tabel 2.49. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
Luas Panen (Hektar)						
Padi Sawah	38.338	40.138	38.977	51.730	55.004	44.837
Jagung	3.002	2.951	2.736	3.342	3.464	3.099
Kacang Kedelai	3.750	3.258	2.761	5.723	6.282	4.355
Kacang Tanah	1.951	1.994	2.268	2.902	3.187	2.460
Ubi Kayu	3.171	3.729	3.822	3.463	3.559	3.549
Ubi Jalar	30.980	33.041	36.091	35.863	37.656	34.726
Total	81.192	85.111	86.655	103.023	109.152	93.027
Produksi (Ton)						

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
Padi Sawah	338.988	356.515	374.949	224.945	243.328	307.745
Jagung	7.034	6.948	6.666	8.143	8.550	7.468
Kacang Kedelai	4.609	3.821	3.523	7.964	9.082	5.800
Kacang Tanah	2.045	2.043	2.498	3.308	3.729	2.725
Ubi Kayu	38.900	45.512	46.388	45.059	47.112	44.594
Ubi Jalar	405.521	411.893	446.952	469.441	492.913	445.344
Produktifitas (Ton/Hektar)						
Padi Sawah	8,84	8,88	9,62	4,35	4,42	7,22
Jagung	2,34	2,35	2,44	2,44	2,47	2,41
Kacang Kedelai	1,23	1,17	1,28	1,39	1,45	1,30
Kacang Tanah	1,05	1,02	1,10	1,14	1,17	1,10
Ubi Kayu	12,27	12,20	12,14	13,01	13,24	12,57
Ubi Jalar	13,09	12,47	12,38	13,09	13,09	12,82

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Secara keseluruhan terdapat empat komoditi dengan produktifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Sedangkan padi sawah dan ubi jalar mengalami penurunan hingga mencapai masing-masing sebesar 27,86 dan 0,07%. Namun secara nilai produksi terlihat bahwa hampir semua jenis komoditi ini terus mengalami perbaikan, kecuali padi sawah.

Menurut Peta Kawasan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan atau LP3B (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua, 2013) teridentifikasi dari total luas LP3B sebesar 2.666.363 hektar sekitar 10,15% diperuntukan LP3B tanaman padi, dan 89,85% untuk tanaman ubi jalar.

Dalam bidang perkebunan, secara keseluruhan luas panen untuk 12 komoditi di Provinsi Papua tercatat pada tahun 2013 sebesar 99.182 ha dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017 sebesar 257,059 ha atau meningkat sebesar 61.42%. Produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Papua secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2013 adalah sebesar 400 ton/ha naik menjadi 441 ton/ha atau meningkat sebesar 9,35%. Jika dilihat per komoditi, tanaman cengkeh dan karet memiliki produktivitas tertinggi yaitu bisa mencapai di atas 90-95% yaitu pada tahun 2013 ke tahun 2017. Kemudian diikuti oleh komoditi pinang dan mente yang memiliki produktivitas berkisar antara 40-60% untuk tahun 2013 ke tahun 2017. Sedangkan

komoditi lainnya hanya mampu meningkat di bawah 20% untuk tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.509).

Tabel 2.50. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

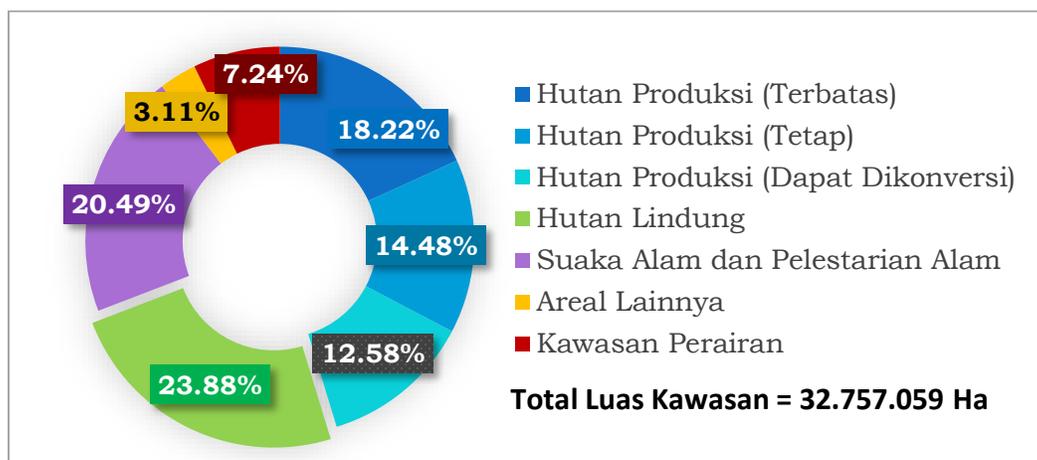
Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata ²
Luas Panen (Hektar)						
Kakao	32.491	33.590	34.950	35.223	34.130	34.077
Kopi	7.852	9.765	10.067	11.839	10.906	10.086
Kelapa	23.576	31.416	27.305	125.486	25.063	46.569
Karet	4.158	4.297	4.387	6.707	8.659	5.642
Karet	14.244	17.795	14.244	14.244	14.244	14.954
Sagu	7.014	12.716	13.516	35.486	155.675	44.881
Pinang	2.999	3.304	3.882	4.435	4.245	3.773
Mente	4.831	4.831	4.796	5.100	2.351	4.382
Cengkeh	575	576	576	30	323	416
Lada	47	45	45	45	42	45
Kapuk Randu	741	799	799	816	853	802
Jarak Pagar	654	658	664	605	568	630
Total	99.182	119.792	115.231	240.016	257.059	166.256
Produksi (ton)						
Kakao	9.757	9.639	10.133	10.297	10.732	10.112
Kopi	1.472	1.771	2.009	3.101	2.503	2.171
Kelapa	15.583	14.157	15.320	15.993	16.136	15.438
Karet	3.285	3.285	3.342	3.342	6.990	4.049
Karet	812	13.802	8.121	8.121	8.121	7.795
Sagu	7.319	42.793	24.959	26.618	66.593	33.656
Pinang	457	921	602	1.107	1.117	841
Mente	573	574	584	593	709	607
Cengkeh	5	3	3	3	47	12
Lada	11	6	6	6	7	7
Kapuk Randu	86	35	35	35	110	60
Jarak Pagar	281	278	278	278	276	278
Produktifitas (Kilogram/Hektar)						
Kakao	300,30	286,96	289,93	292,34	314,44	296,79
Kopi	187,47	181,36	199,56	261,93	229,51	211,97
Kelapa	660,97	450,63	561,07	127,45	643,82	488,79
Karet	790,04	764,49	761,80	498,29	807,25	724,37
Karet	57,01	775,61	570,13	570,13	570,13	508,60
Sagu	1043,48	3365,29	1846,63	750,10	427,77	1486,65
Pinang	152,38	278,75	155,07	249,61	263,13	219,79
Mente	118,61	118,82	121,77	116,27	301,57	155,41
Cengkeh	8,70	5,21	5,21	100,00	145,51	52,92
Lada	234,04	133,33	133,33	133,33	166,67	160,14
Kapuk Randu	116,06	43,80	43,80	42,89	128,96	75,10
Jarak Pagar	429,66	422,49	418,67	459,50	485,92	443,25

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

2.4.3.3. Kehutanan

Secara keseluruhan total luas kawasan di Provinsi Papua adalah sebesar 32.757.059 Ha yang terdiri atas hutan produksi (terbatas), hutan produksi (tetap), hutan produksi (dapat dikonversi), hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, areal lainnya dan kawasan perairan (lihat Gambar 2.12520).

Gambar 2.125. Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Dengan luas kawasan hutan yang cukup luas, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu kapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya sepanjang tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.5150). Produksi kayu bulat dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2014-2015 sempat mengalami peningkatan sebesar 58,79% dan kemudian kembali terjadi penurunan hingga di tahun 2017 yaitu dengan nilai produksi sebesar 439,11 m³. Selain itu, produksi kayu gergajian dan kayu lapis juga tercatat mengalami penurunan jumlah produksi terkecuali untuk verner yang terlihat mengalami peningkatan di tahun 2016-2017 sebesar 48,29% atau sebesar 302,85 m³.

Tabel 2.51. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m³)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
2013	578.440.360	465.516.793	213.840.594	-
2014	479.582.120	471.751.917	243.660.310	-
2015	1.163.665.550	526.274.724	279.573.630	-
2016	949.705.300	443.587.206	124.145.276	156.601.043
2017	439.119.900	124.022.400	-	302.848.336

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.4.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Luas Areal Pertambangan

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Sepanjang tahun 2013-2016 luas areal penambangan terus meningkat dengan rata-rata 33,55% setiap tahunnya. Meningkatnya luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat pada tahun 2015-2016.

Tabel 2.52. Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan (ha)

Uraian	2013	2014	2015	2016
Eksplorasi	100,204	100,204	3,023,359	3,257,179
Eksploitasi	100,204	100,402	100,402	100,402
Area Penambangan Liar	789	789	789	789
Total	201,197	201,395	3,123,761	3,358,370

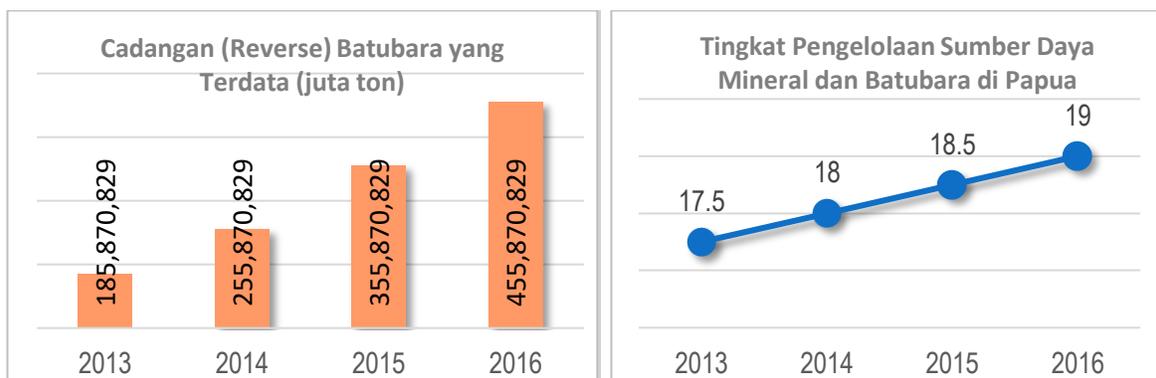
Sumber: Bappeda Papua, 2018

2. Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah cadangan berubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2013 mencapai 185,9 juta ton dan pada tahun 2016 meningkat mencapai 455,9 juta ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk

mengeksplorasi sumber daya batubara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun persentase pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Papua hingga tahun 2016 baru mencapai 19% (lihat Gambar 2.126). Ekplorasi yang lebih mendalam perlu dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan sumberdaya sebagaimana kegunaannya. Namun pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan sumberdaya yang ada dan tidak merusak lingkungan.

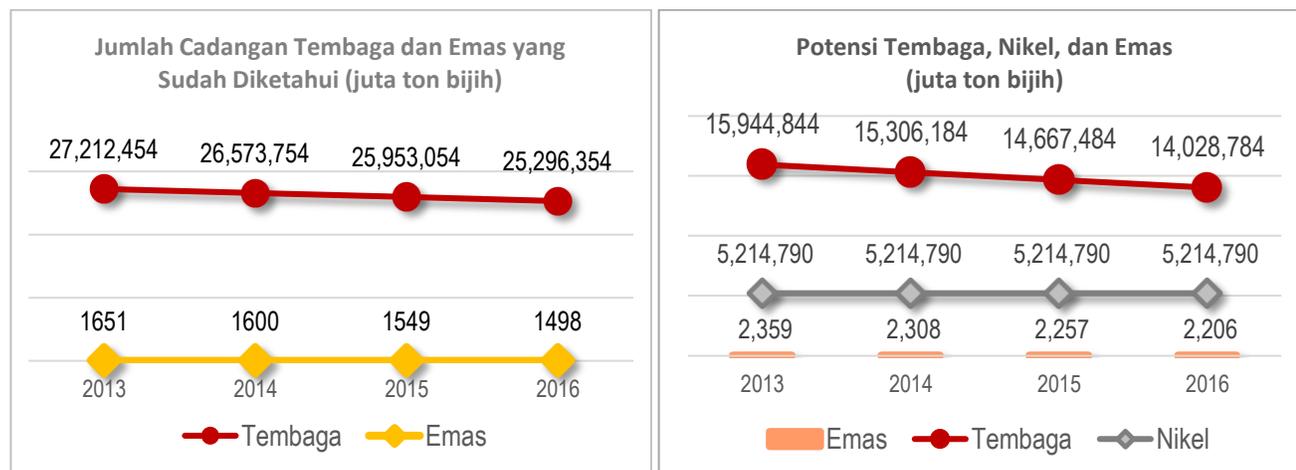
Gambar 2.126. Jumlah Cadangan (*Reserve*) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Papua, 2018

Jumlah cadangan tembaga dan emas yang telah diketahui di Provinsi Papua sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 terus menurun dari 1.651 juta ton biji tembaga pada tahun 2013 menurun hingga 1.498 juta ton tembaga pada tahun 2016. dan 27,21 juta ton bijih emas pada tahun 2013 menurun menjadi 25,29 juta ton bijih emas pada tahun 2016 (lihat Gambar 2.127).

Gambar 2.127. Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih)

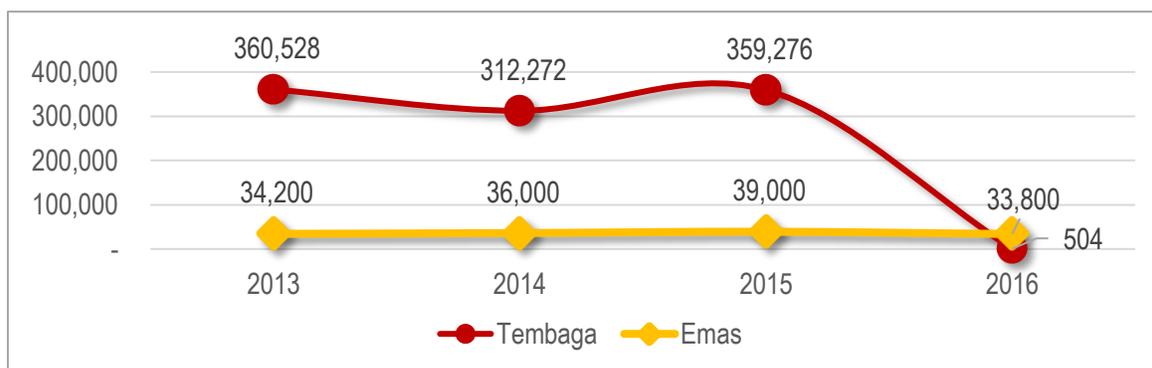


Sumber: Bappeda Papua, 2018

Potensi tembaga dan emas di Provinsi Papua menunjukkan penurunan sejak tahun 2013 sebanyak 15,94 juta ton bijih emas dan 2,36 juta ton bijih tembaga menurun menjadi 14,03 juta ton bijih tembaga pada tahun 2016 dan 2,20 juta ton bijih emas pada tahun 2016. Namun tidak untuk nikel yang angkanya sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 masih tetap sebanyak 5,21 juta ton bijih nikel. Hal ini menunjukkan untuk sumberdaya mineral seperti bijih nikel belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan untuk dilakukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Berdasarkan Gambar 2.128, diketahui bahwa produksi sektor pertambangan seperti tembaga dan emas mengalami fluktuasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 dari 360,52 juta ton bijih emas sempat menurun menjadi 312,27 juta ton emas per tahun pada tahun 2014 kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 359,27 juta ton bijih emas dan produksi kembali menurun hingga 504 juta ton bijih emas pada tahun 2016.

Gambar 2.128. Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih)



Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Penurunan produksi bijih emas dan tembaga pada tahun 2014 disebabkan adanya negosiasi ulang kontrak sumber daya alam antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport, kemudian pada tahun 2016 karyawan PT. Freeport melakukan mogok kerja yang mengakibatkan Produksi emas, dan tembaga kembali menurun. Sedangkan produksi tembaga terlihat sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 terus meningkat dari 34,2 juta ton bijih pada tahun 2013, namun pada tahun 2016 menurun hingga 33,8 juta ton bijih tembaga.

3. Ketersediaan dan Sumber Penerangan

Persentase rumah tangga di Provinsi Papua yang telah menggunakan listrik terlihat cukup rendah. Pada tahun 2013 rumah tangga yang menggunakan listrik baru mencapai 45,52% kemudian meningkat menjadi 55,82% pada tahun 2017. Dari data BPS terlihat rumah tangga menurut sumber penerangan yang paling rendah pada tahun 2013 terdapat di kabupaten Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Asmat. Pada tahun 2017 kabupaten dengan sumber penerangan listrik paling rendah adalah Yahukimo, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Dogiyai dan Intan Jaya.

Tabel 2.53. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya								
MAMTA										
Jayapura	93,81	6,19	88,81	11,19	96,01	3,99	99,78	0,22	97,07	2,93

Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya								
Sarmi	77,70	22,30	74,92	25,08	88,60	11,40	79,14	20,86	81,85	18,15
Keerom	86,48	13,52	82,56	17,44	85,53	14,47	92,11	7,89	95,54	4,46
Mamberamo Raya	25,91	74,09	20,52	79,48	58,53	41,47	51,74	48,26	43,88	56,12
Kota Jayapura	100,00	0,00	100,00	0,00	96,23	3,77	99,48	0,52	99,88	0,12
LA PAGO										
Jayawijaya	30,63	69,37	37,18	62,82	50,69	49,31	48,71	51,29	57,93	42,07
Puncak Jaya	6,65	93,35	13,64	86,36	11,16	88,84	12,16	87,84	14,91	85,09
Yahukimo	2,78	97,22	7,57	92,43	3,76	96,24	5,79	94,21	2,90	97,10
Pegunungan Bintang	8,99	91,01	12,71	87,29	28,45	71,55	19,01	80,99	34,22	65,78
Tolikara	2,32	97,68	5,26	94,74	7,33	92,67	7,56	92,44	11,07	88,93
Nduga	1,86	98,14	5,71	94,29	n.a	n.a	11,18	88,82	6,49	93,51
Lanny Jaya	2,01	97,99	6,10	93,90	5,83	94,17	9,49	90,51	3,09	96,91
Mamberamo Tengah	14,36	85,64	11,69	88,31	8,02	91,98	86,93	13,07	38,92	61,08
Yalimo	30,40	69,60	49,57	50,43	48,76	51,24	37,02	62,98	85,83	14,17
Puncak	2,36	97,64	7,43	92,57	73,78	26,22	5,27	94,73	15,15	84,85
MEE PAGO										
Nabire	91,12	8,88	88,88	11,12	84,89	15,11	82,58	17,42	92,65	7,35
Paniai	26,87	73,13	25,18	74,82	13,97	86,03	22,92	77,08	31,97	68,03
Mimika	88,72	11,28	93,56	6,44	93,69	6,31	96,12	3,88	98,14	1,86
Dogiyai	31,62	68,38	14,20	85,80	19,07	80,93	18,58	81,42	3,61	96,39
Intan Jaya	1,30	98,70	6,01	93,99	10,55	89,45	9,87	90,13	11,06	88,94
Deiyai	41,86	58,14	52,31	47,69	49,33	50,67	49,70	50,30	44,65	55,35
SAERERI										
Kepulauan Yapen	59,66	40,34	57,93	42,07	75,65	24,35	65,49	34,51	70,40	29,60
Biak Numfor	95,25	4,75	95,32	4,68	98,78	1,22	98,65	1,35	98,64	1,36
Waropen	62,45	37,55	61,12	38,88	73,50	26,50	87,72	12,28	93,03	6,97
Supiori	39,97	60,03	48,86	51,14	45,60	54,40	59,91	40,09	74,21	25,79
ANIM HA										
Merauke	89,54	10,46	86,67	13,33	94,37	5,63	93,89	6,11	94,70	5,30
Boven Digoel	73,99	26,01	77,63	22,37	73,41	26,59	69,60	30,40	91,64	8,36
Mappi	18,69	81,31	18,30	81,70	20,78	79,22	23,67	76,33	26,86	73,14
Asmat	9,57	90,43	17,72	82,28	21,97	78,03	18,18	81,82	81,29	18,71
Papua	45,52	54,48	47,32	52,68	53,17	46,83	50,90	49,10	55,82	44,18

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013-2017

2.4.3.5. Perdagangan

Volume ekspor menurut negara tujuan pada tahun 2013 mencapai 1.364 ton dengan jumlah volume ekspor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 1.115 ton. Pada tahun 2016

ekspor mencapai 1.259 juta ton.dengan benua tujuan ekspor terbesar adalah Asia sejumlah 1.144 juta ton.

Tabel 2.54. Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton)

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)				Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
ASIA	1.115	457.842	1.009.511	1.144.285	111.986	333.544	308.394	312.286
Jepang	302	107.261	220.900	280.200	2.915	32	4	760
Korea Selatan	137	35.031	75.721	137.289	61.350	5.547	2.590	3.587
Filipina	100	9.152	111.000	163.200	-	3	171	1.469
Tiongkok	247	179.629	167.000	263.000	2.770	20.288	96	7.279
India	326	123.000	429.440	270.000				
Malaysia					30	54	36	44
Asia Lainnya	3	3.769	5.450	30.597	44.920	307.621	305.498	299.148
EROPA	144	133.446	32.000	38.000	75	2.846	1.878	2.115
Spanyol	144	113.446	32.000	38.000				
Inggris	15	-	15	-	32	240	74	86
Jerman	15	-	-	-	3	6	3	6
Swiss	15	-	-	-	27	199	142	194
Italia					3	601	217	395
Eropa Lainnya	15	20.000	-	-	9	1.799	1.442	1.434
AMERIKA	-	1.108	11.655	12.551	11.453	14.545	10.435	11.085
Amerika Serikat	-	1.108	11.655	12.551	11.330	13.324	9.548	9.442
Kanada	-	-	-	-	78	957	753	1.461
Amerika Lainnya	-	-	-	-	46	264	135	182
OCEANIA	-	538	509	625	37.843	52.824	46.957	54.262
Australia	15	137	23	9	37.839	52.789	46.905	54.210
Selandia Baru	15	-	-	-	1	2	-	1
Oseania Lainnya	-	400	486	617	3	33	52	51
TIMUR TENGAH	105	124.630	114.532	64.077				
Saudi Arabia	85	83.074	93.225	39.081				
Uni Emirat Arab	8	18.416	11.562	12.510				
Timur Tengah Lainnya	12	23.140	9.745	12.485				
Negara Lainnya	-	-	-	-	-	26	5	15
Jumlah	1.364	717.565	1.168.206	1.259.539	161.357	403.785	367.670	379.763

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Sedangkan volume impor menurut negara asal pada tahun 2013 mencapai 161.357 ton dengan jumlah volume impor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 111.986 ton. Dan

pada tahun 2016 impor mencapai 379.763 ton.dengan benua tujuan impor terbesar adalah Asia sejumlah 312.286 ton.

Tabel 2.55. Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton)

Pelabuhan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Pelabuhan (Ton)				Volume Impor Menurut Pelabuhan (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Frans Kaisepo	5	18	4	365	15	15	-	-
Jayapura	236	18	662	68	1	15	10.225	9.233
Serui	20.750	44.017	40.408	30.894				
Merauke	30.351	27.551	41.609	45.245	690	44	417	-
Amamapare	1.850.274	1.051.376	782.958	1.179.368	160.649	391.197	356.982	370.483
Sentani	27.367	361	1	164	12	12.544	38	46
Bade	177.862	109.769	79.528	70.562	15	15	-	-
Kimaam	96.874	40.844	26.049	36.665	5	15	-	-
Ubrub					-	-	7	-
Nabire	15	15	15	15				
Wamena	4	7	15	15				
Numfoor	15	15	15	789				
Jumlah	2.203.723	1.273.961	971.218	1.364.120	161.357	403.785	367.669	379.762

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Nilai ekspor menurut golongan barang yang paling tinggi pada tahun 2013 adalah bujuh tembaga dan konzentrat (HS26) senilai 2.608 milyar US\$ dan pada tahun 2016 jumlah nilai ekspor tertinggi menurut golongan barang adalah bijih tembaga dan konsetrat.

Tabel 2.56. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2013 - 2016 (ton/US\$)

Golongan Barang	Satuan	2013	2014	2015	2016
Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26)	Volume (kg)	1.179.327	525.741	1.015.240	1.114.400
	Nilai (US\$)	2.608.595.385	1.376.498.241	1.831.814.111	1.907.955.250
Kayu dan Barang dari Kayu (HS44)	Volume (kg)	145.135	139.720	152.036	144.500
	Nilai (US\$)	96.413.984	115.703.724	123.336.544	96.181.410
Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03)	Volume (kg)	39.415	51.511	1	6
	Nilai (US\$)	21.953.394	33.762.797	713	59.166
Lemak Nabati & Hewani (HS15)	Volume (kg)	1	12	6	48
	Nilai (US\$)	5.947	30.823	20.449	79.907
Lainnya	Volume (kg)	241	581	924	584
	Nilai (US\$)	1.364.119.831	717.564.989	1.168.206.165	1.259.538.627
Jumlah	Volume (kg)	1.364.120	717.565	1.168.206	1.259.539
	Nilai (US\$)	2.728.043.282	1.529.674.059	2.007.516.930	2.008.078.061

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Andil ekspor Provinsi papua terhadap nilai ekspor Indonesia sebesar 1,49% dan pada tahun 2016 andil provinsi papua sebesar 1,38 persen dari nilai ekspor Indonesia. Sedangkan

andil nilai impor papua sebesar 0,27 dari nilai impor Indonesia dan pada tahun 2016 andil Provinsi Papua 0,53 persen dari nilai impor Indonesia.

Tabel 2.57. Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2013-2016 (US\$/%)

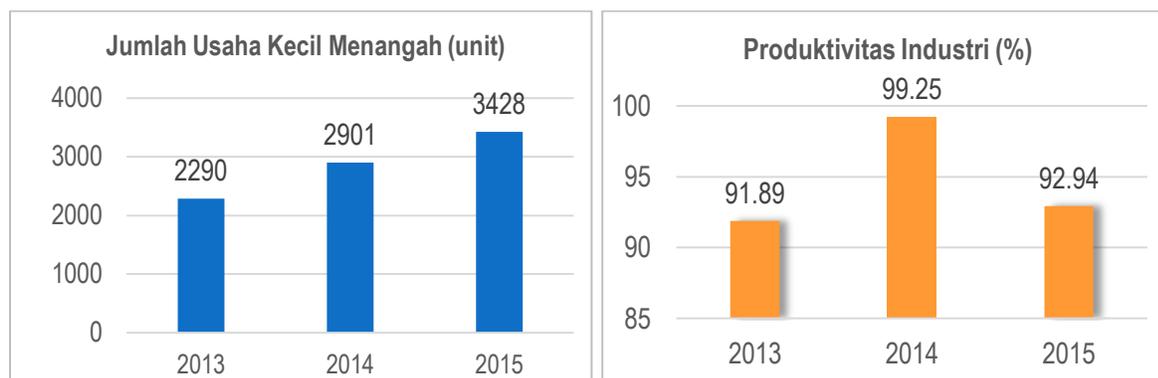
Tahun	Ekspor			Impor		
	Papua	Indonesia	Andil	Papua	Indonesia	Andil
2013	2.728,00	182.551,80	1,49	506,4	186.628,70	0,27
2014	1.529,70	176.292,50	0,87	1.014,50	178.178,80	0,57
2015	2.007,50	150.283,70	1,34	746,7	142.694,80	0,52
2016	2.008,10	145.186,20	1,38	721,3	135.652,90	0,53

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

2.4.3.6. Perindustrian

Jumlah unit usaha industri kecil menengah Provinsi Papua mencapai 2.290 unit pada tahun 2013 dan meningkat hingga 3.428 unit pada tahun 2015. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah tersebut diiringi dengan peningkatan produktivitas industri pada tahun 2013 sebesar 91,89%, kemudian meningkat hingga 99,25% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 persentase peningkatan produktivitas industri mencapai 92,94%.

Gambar 2.129. Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

2.4.3.7. Kelautan dan Perikanan

Provinsi Papua memiliki panjang pantai kurang lebih 1.170 mil laut, dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dengan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan

yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar. Serta pada bagian selatan, Papua yang masuk dalam WPP 718 mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang.

Nelayan tangkap di Provinsi Papua hampir sebagian besar masih menggunakan perahu tak bermotor. Sementara untuk perahu bermotor dan kapal motor hanya sedikit yang memilikinya. Sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.57, terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah perahu/kapal tangkap ikan sebanyak 6.953, pada tahun 2015 meningkat hingga 10.997 dan pada tahun 2011 sebanyak 11.356, namun pada tahun 2016 jumlah perahu/kapal tangkap ikan menurun menjadi 4.595.

Tabel 2.58. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan

Kabupaten/Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Merauke	747		83	171		417	574	-	462	661	114	132	1.209	1.078	771	303
Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	7		3	-		515	408		483	9	156	44	490	524	567	44
Nabire	5	813	-	-		811	425	425		6	200	200	5	1.630	625	625
Kepulauan Yapen	15		-	-		875	1.965		872	19	764	764	887	894	2.729	764
Biak Numfor	201		1	-			2.981	-		206	32	60	201	206	3.014	60
Paniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mimika	84	863	-	-		650	-	517	648	83	62	98	732	1.596	62	615
Boven Digoel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mappi	135	898	-	-			125	376		160	27	52	135	1.058	152	428
Asmat	32		-	-		625	499	499	620	42	-	-	652	667	499	499
Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	26	495	-	-	482	175	195	216	168	30	25	25	676	700	220	241
Keerom	-		-	-	-	620	-	-	-	32	-	-	-	652	-	-
Waropen	-		-	-		180	363		175	-	48	53	175	180	411	53
Supiori	-		-	-		425	622	222	421	-	20	39	421	425	642	261
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	63	803	-	-	798	515	1.563	644	509	69	101	58	1.370	1.387	1.664	702
Provinsi Papua	1.315	3.872	87	171	1.280	5.808	9.720	2.899	4.358	1.317	1.549	1.525	6.953	10.997	11.356	4.595

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Papua sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 232.157 rumah tangga perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan perairan umum, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 233.563 rumah tangga perikanan.

Tabel 2.59. Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	55.664	50.425	2.028	2.059	57.691	52.484
Jayawijaya	-	-	707	721	707	721
Jayapura	15.364	18.025	1.411	1.439	16.775	19.463
Nabire	10.678	13.248	61	63	10.738	13.310
Kepulauan Yapen	5.508	8.370	-	-	5.508	8.370
Biak Numfor	38.569	31.266	-	-	38.569	31.266
Paniai	-	-	205	211	205	211
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-
Mimika	21.561	20.661	75	96	21.636	20.757
Boven Digoel	-	-	62	63	62	63
Mappi	20.641	21.431	4.946	5.095	25.587	26.526
Asmat	5.818	6.443	99	104	5.917	6.547
Yahukimo	-	-	148	157	148	157
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-
Sarmi	1.156	1.216	-	-	1.156	1.216
Keerom	-	-	-	-	-	-
Waropen	13.141	18.052	941	955	14.082	19.007
Supiori	10.544	13.571	-	-	10.544	13.571
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	22.760	19.820	72	76	22.832	19.895
Provinsi Papua	221.403	222.527	10.754	11.037	232.157	233.563

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 11.091 ton menurun menjadi 7.403 ton.

Tabel 2.60. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Kab/Kota	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	1	-	21	21	77	19	-	-	1	-	-	-	100	40
Jayawijaya	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-
Jayapura	-	-	7	7	39	-	-	-	1.361	1.361	-	-	1.408	1.369
Nabire	-	-	600	600	342	356	-	-	-	-	-	-	942	956
Kepulauan Yapen	96	85	-	-	26	26	-	-	12	13	-	-	134	124
Biak Numfor	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10
Paniai	-	-	-	-	250	260	-	-	-	-	-	-	250	260
Puncak Jaya	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Mimika	-	-	-	-	61	40	-	-	-	-	-	-	61	40
Boven Digoel	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
Mappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asmat	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
Yahukimo	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keerom	-	-	-	-	253	203	-	-	-	-	-	-	253	203
Waropen	-	-	-	-	122	123	-	-	-	-	-	-	122	123
Supiori	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	-	13	918	918	6.568	3.052	-	-	186	157	-	-	7.672	4.139

Kab/Kota	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Provinsi Papua	125	113	1.546	1.546	7.859	4.213	-	-	1.561	1.531	-	-	11.091	7.403

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Seluruh indikator kinerja hasil pembangunan yang disajikan dalam sub bab ini dalam bentuk rekapitulasi dapat dilihat dalam Tabel 2.83 di Bab 2 terakhir ini.

2.5. ASPEK OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

2.5.1. Kerangka Regulasi Otonomi Khusus Provinsi Papua

Undang-undang Otsus merupakan langkah maju bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena melalui Undang-undang ini Pemerintah mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua berbeda dengan provinsi yang lain. Melalui UU Otsus Papua di Provinsi Papua diberlakukan dua bentuk Peraturan Daerah, yakni: Peraturan Daerah Khusus yang disingkat Perdasus dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur yang dalam penetapannya harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP dan Peraturan Daerah Provinsi yang disingkat Perdasu dibuat dan ditetapkan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur. Perdasus dan Perdasu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perdasus dan Perdasu pada tahapan implementasi, maka dibentuk Peraturan Gubernur.

Dalam rangka implementasi UU Otsus, setidaknya dibutuhkan penyusunan dan penetapan 11 (sebelas) Perdasus dan 18 (delapan belas) Perdasu. Kesebelas Perdasus dan Delapan belas Perdasu sebagai amanat langsung dari UU Otsus sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat pada Tabel 2.6160 dan Tabel 2.621.

Tabel 2.61. Perdasus Perintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001

NO.	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
1.	Pasal 2 ayat (3)	Pengaturan lambang daerah.
2.	Pasal 4 ayat (9)	Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur dalam pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah.
3.	Pasal 11 ayat (3)	Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.	Pasal 19 ayat (3)	Keanggotaan dan jumlah anggota MRP
5.	Pasal 20 ayat (2)	Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP

6.	Pasal 21 ayat (2)	Pelaksanaan hak MRP.
7.	Pasal 23 ayat (2)	Tata cara pelaksanaan kewajiban MRP.
8.	Pasal 34 ayat (7)	Pembagian lebih lanjut penerimaan bagi hasil bidang pertambangan minyak bumi, gas alam serta penerimaan khusus untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
9.	Pasal 38	Usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam
10.	Pasal 66 ayat (2)	Penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan
11.	Pasal 67.	Pelaksanaan pengawasan sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Sumber: Hasil Elaborasi Tim Uncen, 2010

Tabel 2.62. Perdasi yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001

NO	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
1.	Pasal 24 ayat (2)	Tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua.
2.	Pasal 26 ayat (3)	Perangkat Pemerintah Provinsi
3.	Pasal 27 ayat (3)	Kewenangan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat
4.	Pasal 29 ayat (3)	Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP dalam pembentukan Perdasus,
5.	Pasal 32 ayat (2)	Fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc,
6.	Pasal 35 ayat (6)	Pelaksanaan bantuan dari dalam dan luar negeri.
7.	Pasal 36 ayat (1)	Perubahan dan perhitungan APBD Provinsi Papua
8.	Pasal 36 ayat (3)	Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya
9.	Pasal 41 ayat (2)	Tata cara penyertaan modal Pemprov. Papua
10.	Pasal 48 ayat (3)	Hal tertentu mengenai tugas kepolisian di Provinsi Papua
11.	Pasal 56 ayat (6)	Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau subsidi Pemprov dan Pemkab/Kota dalam bidang pendidikan
12.	Pasal 57 ayat (4)	Perlindungan dan pengembangan kebudayaan asli Papua oleh Pemprov.
13.	Pasal 59 ayat (5)	Kewajiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemprov.
14.	Pasal 60 ayat (2)	Perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan dan peningkatan gizi oleh Pemprov Papua & Pemkab/Kota
15.	Pasal 61 ayat (4)	Masalah kependudukan termasuk penempatan penduduk dalam rangka transmigrasi nasional,
16.	Pasal 62 ayat (4)	Masalah ketenagakerjaan
17.	Pasal 64 ayat (5)	Masalah pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan,
18.	Pasal 65 ayat (3)	Kewajiban Pemprov. di bidang social

Sumber: Hasil Elaborasi Tim DC Uncen, 2010

Sampai dengan tahun 2018, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah merumuskan dan menetapkan perdasus dan perdasi sebagaimana yang diamanatkan UU Otsus. Bahkan ada beberapa Perdasus yang walaupun tidak diamanatkan secara langsung dalam UU Otsus, tapi karena itu dianggap penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar orang asli Papua, sehingga dirumuskan dan ditetapkan. Perdasus yang ditetapkan diluar amanat UU Otsus tapi berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua antara lain:

1. Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan adat Di Papua;
2. Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua;
3. Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
4. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga masyarakat Adat Atas Tanah;
5. Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil; Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; dan
6. Perdasus Nomor 10 Tahun 2014 tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung.

Untuk melaksanakan Perdasus dan Perdasi, perlu diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur. Dalam pelaksanaannya sampai saat ini adanya beberapa Perdasus dan Perdasi yang penting bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Papua, namun belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur. Sebagai ilustrasi, dapat diberikan beberapa masalah dalam implementasi UU Otsus, yaitu:

1. Perdasus tentang Lambang Daerah
2. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah. Bagi masyarakat hukum adat, pemerintah dan swasta dirasakan bahwa perdasus ini sangat penting karena berkaitan dengan pemetaan dan penetapan batas-batas wilayah masyarakat hukum adat, sehingga dapat diketahui kepemilikan hak ulayat dari wilayah-wilayah adat tersebut. Hal ini sangat penting bagi para Investor yang mau menanamkan modalnya di Papua karena

kepemilikan hak ulayat jelas, bukan seperti yang terjadi selama ini dimana pihak investor kesulitan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat. Namun demikian, pemerintah provinsi belum juga membuat peraturan pelaksanaannya dengan instrumen hukum peraturan gubernur sehingga peraturan ini belum dapat dilaksanakan, bahkan oleh pemerintah provinsi sedang dilakukan perubahan terhadap Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tersebut.

3. Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil yang merupakan perda payung mengenai model pendidikan khusus bagi orang asli Papua yang secara personal maupun secara komunitas, diperlukan suatu perlakuan afirmatif yang tepat sasaran, sehingga orang asli Papua yang berada di daerah terpencil, terisolasi dan terpinggirkan dan mengalami masalah pendidikan memperoleh kesempatan yang layak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat. Oleh karena sasaran Perdasus adalah orang asli Papua yang berada di daerah terpencil, maka orang asli yang dalam implementasinya harus ditindaklanjuti dengan pembentukan perda di tingkat kabupaten/kota sehingga dapat dilaksanakan di kabupaten/kota. Namun demikian hal tersebut belum dilaksanakan, pemerintah kabupaten/kota sendiri belum mengetahui keberadaan Perdasus Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil, karena pemerintah provinsi (dalam hal ini Dinas Pendidikan) belum melakukan sosialisasi tentang adanya perdasus tersebut. Selain dari itu, pemerintah provinsi sendiri juga belum membuat peraturan gubernur sebagai penjabaran dari perdasus tersebut.
4. Perdasus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Usaha Perikanan.
5. Perdasus Pertambangan

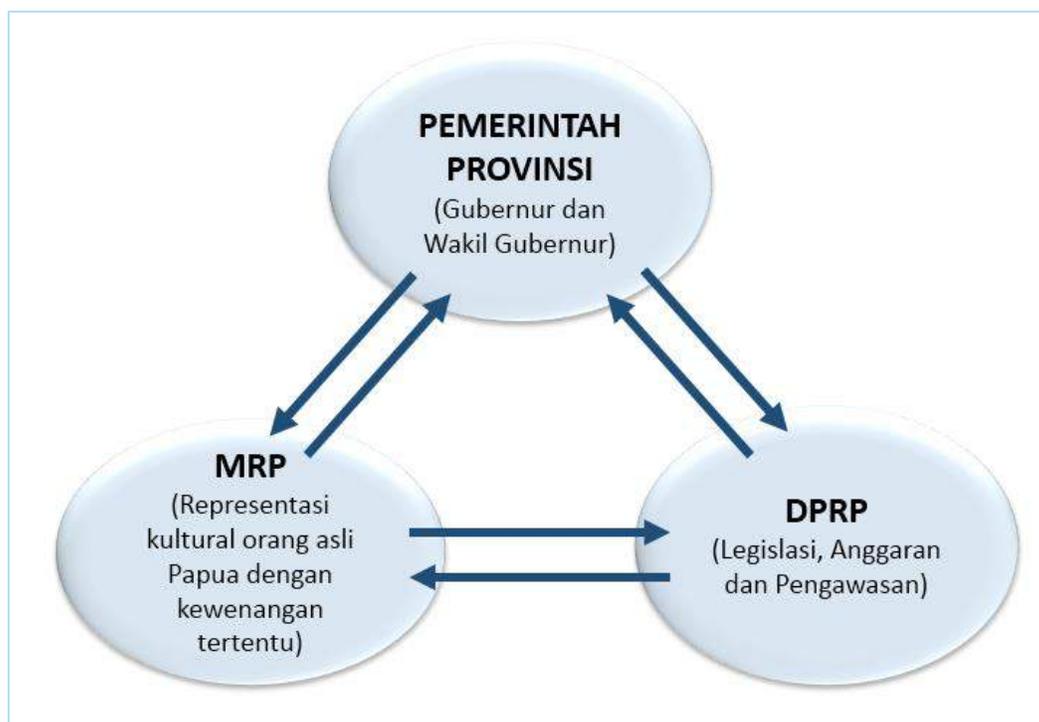
Uraian pada bagian-bagian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Otsus Papua sebagai instrumen akselerasi pembangunan di Papua masih memerlukan pembenahan dan atau peningkatan. Perlu dibangun komunikasi politik yang harmonis atas dasar saling membutuhkan dan saling percaya antara Pusat dan Daerah dan antara unsur Provinsi (DPRP – Gubernur – MRP), maupun antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Perlu dilakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional maupun lokal dengan menjadikan Undang-undang Otsus sebagai acuan utama (setelah disempurnakan sesuai tuntutan perubahan).

2.5.2. Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang berimplikasi terhadap penamaan kelembagaan pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Daerah (Gubernur beserta perangkat daerah), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga lembaga ini merupakan lembaga suprastruktur politik di tingkat provinsi yaitu DPRP disebut sebagai badan legislatif, Pemerintah Provinsi disebut sebagai badan eksekutif, sementara MRP sesuai rumusan awal yang diajukan Provinsi Papua dimaksudkan sebagai bagian dari DPRP dengan menggunakan sistem dua kamar (bikameral).

DPRP sebagai badan legislatif berwenang dalam melaksanakan fungsi di bidang legislatif, yang mencakup: (1) legislasi; (2) budgeting (penganggaran); dan (3) pengawasan. Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif berwenang dalam melaksanakan fungsi pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Di samping itu sebagai wakil Pemerintah Pusat, Gubernur juga memiliki kewenangan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua. Sedangkan MRP memiliki kewenangan melaksanakan fungsi tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Pola dan mekanisme hubungan sinergis dengan tugas dan wewenang berbeda dalam rangka implementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 oleh ketiga lembaga ini dapat digambarkan secara sederhana dalam Gambar 2.130.

Gambar 2.130. Mekanisme Hubungan Gubernur, DPRD dan MRP



a. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Irian Jaya. Perubahan nomenklatur DPRD Provinsi menjadi DPRP sebagaimana tersebut di atas, diikuti pula dengan penambahan jumlah anggota, yaitu sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penambahan 1¼ (satu seperempat) keanggotaan DPRP dimaksudkan untuk mengakomodir keterwakilan orang asli Papua sekaligus dalam rangka peningkatan kinerja lembaga perwakilan tersebut. yaitu diharapkan dengan adanya penambahan jumlah keanggotaan akan semakin menambah bobot lembaga DPRP dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat, khususnya orang asli Papua.

Penambahan jumlah anggota DPRP dilakukan pertama kalinya dalam pemilihan umum tahun 2004. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum jumlah kursi DPRP dalam

pemilihan umum tahun 2004, ditetapkan 56 (lima puluh enam) kursi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 Ayat (2) huruf b, bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh 45 (empat puluh lima) kursi. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka jumlah anggota DPRD adalah 45 orang. Jumlah ini selanjutnya ditambah dengan $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) dari jumlah tersebut menjadi 56 orang. Dengan demikian maka seharusnya jumlah anggota DPRD yang dipilih adalah sebanyak 45 orang dan yang diangkat sebanyak 11 orang. Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum saat itu secara langsung menambah kursi bagi DPRD dari unsur partai politik.

Kondisi ini berlangsung selama 3 (tiga) kali pemilihan umum legislatif yaitu tahun 2004, 2009, dan 2014. Pengisian alokasi kursi yang seharusnya diisi melalui jalur pengangkatan justru dilakukan melalui pemilihan umum, artinya kursi tersebut diperebutkan oleh partai politik peserta pemilihan umum secara bebas. Permasalahan ini akhirnya merambah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Penetapan Komisi Pemilihan Umum mengenai proses rekrutmen anggota DPRD untuk pengisian 11 (sebelas) kursi tambahan tersebut tidak memperhatikan filosofi dan pertimbangan penambahan kursi bagi DPRD sebagaimana yang terungkap dalam persidangan-persidangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang otonomi khusus Papua dan tercatat dalam Risalah sidang-sidang dimaksud.

Sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, akan tetapi jumlah anggota DPRD yang diangkat baru dapat terealisasi pada tahun 2017, dan berdasarkan pada putusan tersebut maka jumlah alokasi kursi DPRD bertambah dengan adanya anggota DPRD yang diangkat. Oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2009-2014 sebanyak 56 (lima puluh enam), ditambah 11 (sebelas) anggota yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus pada tahun 2009. Dengan demikian alokasi kursi anggota DPRD meningkat menjadi 70 kursi, yaitu: $1\frac{1}{4} \times 56 = 70$ (tujuh puluh). Ke depan DPRD dari unsur yang diangkat harus diperkuat kewenangannya

agar peran DPRP dalam perlindungan hak-hak orang asli Papua lebih optimal, salah satunya dengan memperkuat tugas dan wewenang dalam mengajukan usulan Perdasus.

b. Pemerintah Provinsi Papua

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Eksistensi orang asli Papua dalam wilayah Provinsi Papua diberikan ruang di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, oleh karenanya syarat utama untuk dapat dicalonkan menjadi Gubernur di Provinsi Papua adalah Warga Negara Republik Indonesia dari orang asli Papua.

Sesuai Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2001, perangkat daerah di Provinsi diatur dengan Perdasus, artinya berdasarkan kewenangan sebagaimana diarahkan dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2001 maka seluruh bidang pemerintahan yang menjadi urusan Provinsi Papua dapat dijabarkan dalam bentuk perangkat Daerah sesuai kemampuannya. Akan tetapi selama kurun waktu berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 pembentukan perangkat daerah berpedoman pada undang-undang pemerintahan daerah yang umum yaitu dimulai sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perangkat daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk kabupaten/kota dalam wilayahnya perlu diberikan penguatan melalui pengaturan perangkat daerah secara berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Idealnya pengaturan perangkat daerah diserahkan kepada Daerah Provinsi, selanjutnya Daerah Provinsi yang akan mengatur lebih lanjut perangkat daerah kabupaten/koa berdasarkan pada kewenangan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.

c. Majelis Rakyat Papua (MRP)

MRP merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan,

dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Ini berarti bahwa MRP memiliki kewenangan yang terbatas. MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP dengan masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.

MRP harus diperkuat kewenangannya, yaitu diposisikan sebagai lembaga legislatif sebagaimana halnya DPR Provinsi, hanya dibedakan berdasarkan ruang lingkup kewenangannya, yaitu ruang lingkup kewenangan DPRD meliputi aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penduduk, sedangkan kewenangan MRP hanya meliputi aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Dengan demikian badan legislatif di tingkat provinsi sebaiknya terdiri dari 2 (dua) kamar, yaitu DPR Provinsi yang merepresentasikan penduduk, dan MRP yang merepresentasikan orang asli Papua.

2.5.3. Kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua

UU Nomor 21 Tahun 2001, secara umum dapat dikatakan memiliki bobot desentralisasi yang tinggi, namun dalam tataran implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan undang-undang tersebut yang berimplikasi pada tumpang tindihnya kewenangan Provinsi Papua dengan Pemerintah, dan tumpang tindih kewenangan Provinsi Papua dengan kabupaten/Kota. Artinya selama kurun waktu berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua sama dengan provinsi/kabupaten/kota lainnya di Indonesia, yang berbeda hanya dalam penerimaan dana otonomi khusus.

Overlapping dengan kewenangan Pemerintah, disebabkan rumusan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu pada kalimat: “kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sesuai Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014, mengatur bahwa: “penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan”. Artinya kewenangan Provinsi Papua berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan berdasarkan ke-3 kriteria tersebut.

Dalam konteks ini, maka sesuai amanah Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua harus dijabarkan dengan instrumen hukum yang berbentuk

Perdasus/Perdasi. Hal yang terjadi adalah ketika Perdasi/Perdasus tersebut diimplementasikan, ternyata bertentangan dengan undang-undang sektoral. Terjadinya pertentangan ini disebabkan rumusan norma yang kabur tersebut, sehingga norma, standar, prosedur dan kriteria terkait setiap bidang kewenangan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan undang-undang yakni undang-undang sektoral.

Terjadi perbedaan penggunaan istilah kewenangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, dan istilah urusan atau wewenang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mau pun UU Nomor 23 Tahun 2014. Jika menggunakan istilah kewenangan maka Provinsi Papua memiliki kewenangan secara bulat atas urusan bidang pemerintahan tertentu, sedangkan menggunakan istilah urusan atau wewenang, maka kewenangan Provinsi Papua dibatasi oleh norma, standar, prosedur dan kriteria yang tertuang dalam undang-undang sektoral.

Disisi lain, terjadi juga tumpang tindih kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan rumusan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001, menyebutkan bahwa: “kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena UU Nomor 23 Tahun 2014 menitikberatkan kewenangan pada Kabupaten/Kota, sementara UU Nomor 21 Tahun 2001 menitikberatkan kewenangan pada Provinsi. Penyelesaian persoalan kewenangan harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan ke depan.

2.5.4. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Kehadiran UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi landasan legal yang kuat bagi pemerintah pusat dan Provinsi Papua, antara lain untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua secara adil dalam upaya mencapai kesejahteraan Orang Asli Papua, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua;

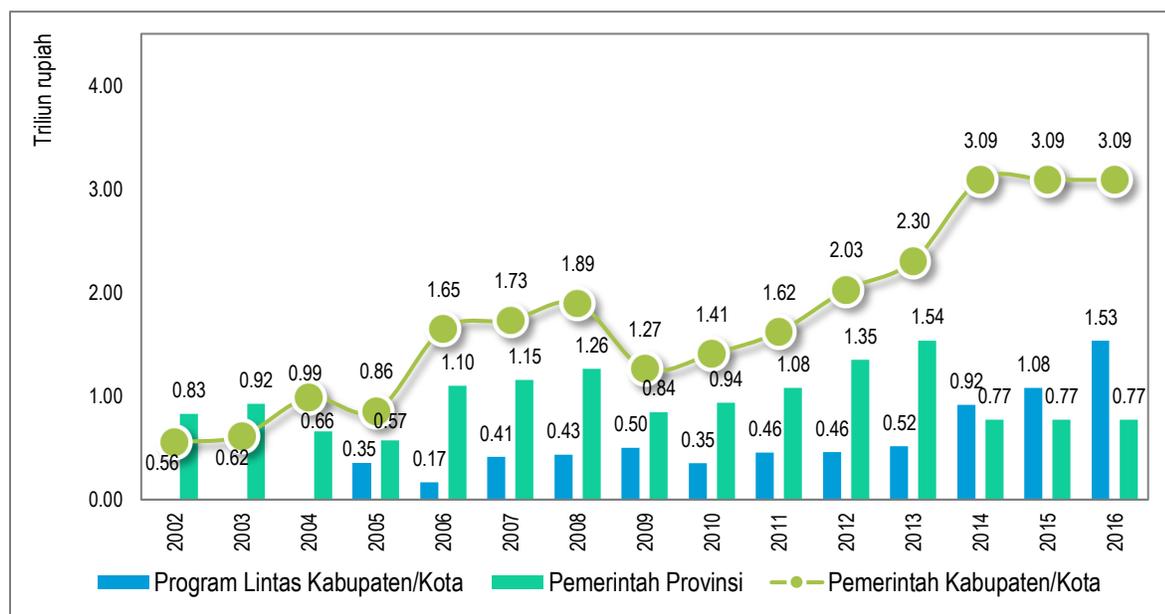
2. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli Papua, agar dapat sejajar dengan daerah lain;
3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar penduduk asli Papua;
4. Mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Keempat poin di atas merupakan cita-cita dari pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua yang harus diwujudkan bersama dengan masyarakat Orang Asli Papua.

Untuk mewujudkan ke-4 cita-cita Otsus tersebut, semenjak tahun 2002 pemerintah Provinsi Papua diberi dana transfer dari pemerintah pusat yang setara 2% dari DAU nasional yang disebut sebagai Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua. Dimana jika dikalkulasi sampai dengan tahun 2016, secara kumulatif DOK tersebut kurang lebih sudah mencapai Rp. 47,905.38 juta. Dalam hal ini, pengelolaan DOK tersebut diatur sendiri oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Secara garis besarnya, pengaturan pengelolaan DOK yang dijalankan oleh pemerintah provinsi selama tahun 2002 - 2016 dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : (1) penggunaan DOK untuk kepentingan bersama yang disebut program strategis lintas kabupaten/kota atau Urusan Bersama, (2) penggunaan DOK yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan alokasinya yang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu periode 2003-2005 dengan pembagian 60%-40% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kemudian periode 2006-2012 dibagi 40%-60% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan yang terakhir periode 2013-2016 dibagi sebesar 20%-80% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian ke pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dilakukan setelah disisihkan dahulu dari total penerimaan DOK setara 2% DAU Nasional tersebut untuk penggunaan program strategis lintas kabupaten/kota (Urusan Bersama). Selengkapnya penerimaan DOK dan pembagiannya selama periode 2002-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.1316.

Gambar 2.131. Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2002-2016



Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Keterangan: Pembagian Dana Otsus sudah dikeluarkan bagian dari Provinsi Papua Barat

Dari Gambar 2.1316 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan pembagian DOK ke pemerintah kabupaten/kota jauh lebih besar dibandingkan ke pemerintah provinsi maupun untuk UB (Urusan Bersama). Selama tahun 2002-2016 total DOK yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota kurang lebih sebanyak Rp. 26,18 triliun, dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 15,74% per tahun. Setelah itu untuk pemerintah provinsi dengan total penerimaan sekitar Rp. 14,56 triliun pada periode yang sama, dan pertumbuhannya sebesar 8,13% per tahun. Kemudian untuk program strategis lintas kabupaten/kota sebanyak Rp. 7,17 triliun, dengan pertumbuhannya mencapai 24,37% per tahun. Pertumbuhan total penerimaan DOK yang setara 2% DAU nasional adalah 12,42% per tahun sepanjang periode 2002-2016.

Tabel 2.63. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Alokasi Dana Otsus Papua	Total 2002-2016 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan 2002-2016 (%)
Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota	7.168.140.478.400	24,37
Pemerintah Provinsi	14.561.495.136.220	8,13

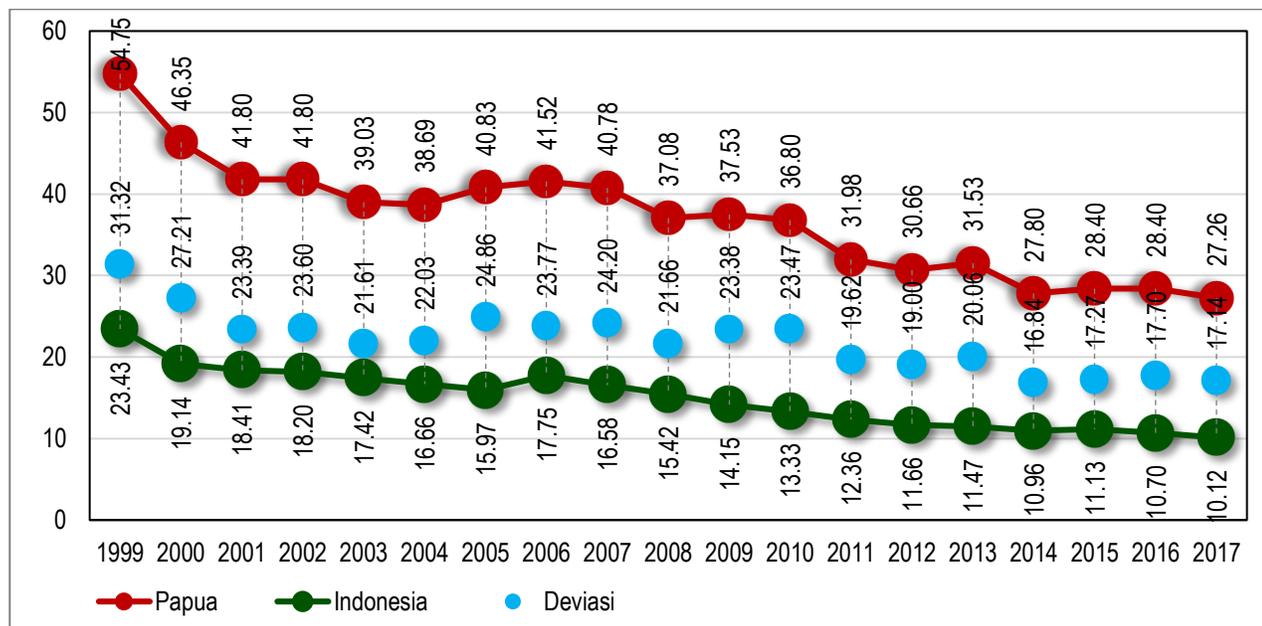
Pemerintah Kabupaten/Kota	26.175.254.388.330	15,74
Total Dana Otsus Setara DAU 2%	47.904.890.002.950	12,42

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.5.5. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan

Dalam penggunaannya, ada 4 sektor pembangunan yang menjadi sasaran utama dari pengelolaan dana Otsus yakni sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar. Keempat sektor tersebut merupakan akar penyebab dari rendahnya kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), tingginya tingkat kemiskinan pada OAP, rendahnya kualitas SDM OAP, dan tingginya kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia. Beranjak pada konsep berpikir tersebut, berikut ini disampaikan dinamika historis tingkat kemiskinan, struktur ekonomi, tingkat pengangguran dan orang bekerja, serta kualitas pembangunan manusia. Semuanya disajikan dalam rentang waktu sebelum dan saat dilaksanakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, perhatikan Gambar 2.132.

Gambar 2.132. Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Indonesia



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.132, pada tahun 1999 masa sebelum Otonomi Khusus, Provinsi Papua (waktu itu masih bernama Irian Jaya) membukukan tingkat kemiskinan yang paling tinggi sekali di Indonesia yakni 54,75%. Pada tahun 2001, ketika dimulai pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, tercatat tingkat kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 41,80%, atau turun sekitar 12,95%, dan tetap paling tinggi di Indonesia. Kemudian saat diberlakukan Otonomi Khusus tahun 2001 sampai dengan tahun 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dapat diturunkan dengan sangat drastis sebesar -27,49% bila dibandingkan tahun 1999, dimana pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua menjadi 27,26%. Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dapat dinyatakan berhasil dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

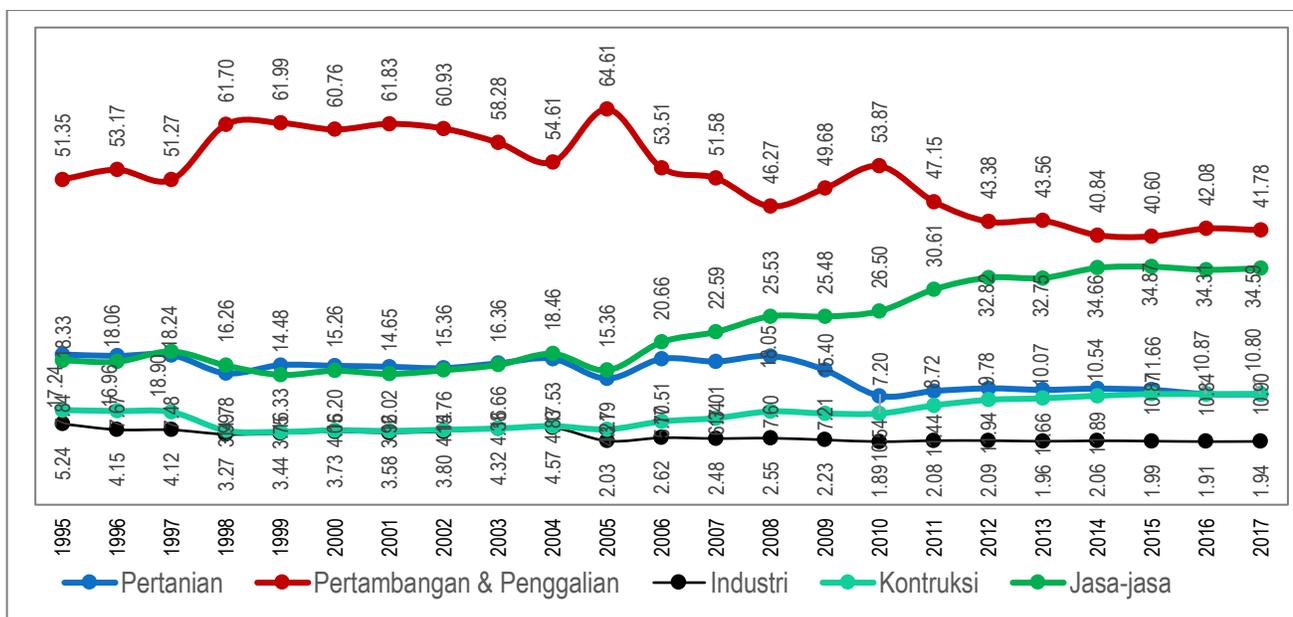
Selain itu juga berhasil mengurangi kesenjangan persentase kemiskinan dengan tingkat nasional yakni dari periode 1999-2001 rata-rata sebesar 27,31% per tahun, menjadi 23,10% per tahun pada periode 2001-2005, kemudian sebesar 22,50% per tahun pada periode 2005-2012, dan semakin kecil pada periode 2013-2017 sebesar 17,80% per tahun. Atau dengan kata lain, secara keseluruhan untuk periode 2001-2017 pelaksanaan Otonomi Khusus berhasil memperkecil kesenjangan kemiskinan dengan tingkat nasional kurang lebih sekitar 21% per tahun. Fakta ini mengindikasikan bahwa Otonomi Khusus mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan di Provinsi Papua yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, khususnya selama periode 2013-2017 yang mampu mengurangi kesenjangan lebih cepat dibandingkan periode-periode masa Otonomi Khusus lainnya. Namun demikian perlu dicatat bahwa sampai sekarang kemiskinan di Provinsi Papua masih paling tinggi di Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif untuk lebih mempercepat penurunan kemiskinan dimasa mendatang.

2.5.6. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah

Salah satu keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah mengubah struktur ekonominya dari ekonomi yang ekstratif ke ekonomi manufaktur (pengolahan barang setengah jadi dan atau barang jadi). Ekonomi ekstratif merupakan perilaku ekonomi yang melakukan usaha penggalian, pengambilan atau pengolahan kekayaan yang disediakan alam, dimana hasil yang diambil dari alam tidak diolah atau tidak

diusahakan kembali. Ekonomi yang ekstraktif ini lebih peduli pada keuntungan maksimal perusahaan tanpa memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Mengubah struktur ekonomi ekstratif ke ekonomi pengolahan terutama industri berbasis pertanian dan berkelanjutan dapat memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih tinggi yang ditandai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya pendapatan per kapita diluar sektor ekstratif, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya kerusakan lingkungan akibat pengurasan sumber daya yang berlebihan dari ekonomi ekstratif. Sebagaimana yang divisualisasikan pada Gambar 2.133, terlihat selama 22 tahun masa pembangunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat ekstratif masih mendominasi struktur ekonomi Provinsi Papua, rata-rata di atas 40%, namun dengan kecenderungan yang terus menurun.

Gambar 2.133. Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 1995-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Pelaksanaan Otonomi Khusus yang dimulai tahun 2001 sampai sekarang ini (tahun 2017), belum maksimal meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian wilayah, bahkan termasuk juga dalam mengangkat sektor pertanian yang lebih banyak menyerap lapangan usaha dan pekerjaan bagi penduduk miskin Orang Asli Papua. Kecenderungan kontribusi sektor industri manufaktur dan pertanian mengalami

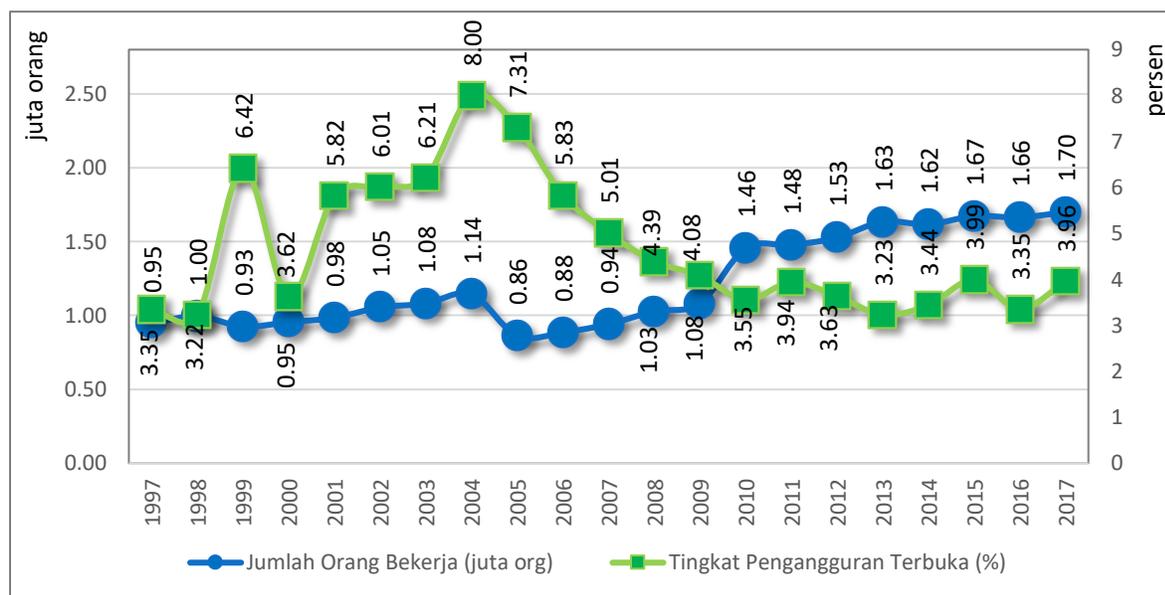
penurunan sejak tahun 2006 hingga tahun 2017, akibat terjadi redistribusi nilai tambah ke sektor jasa-jasa dan konstruksi. Kedua sektor tersebut selama periode 2006-2017 menguasai pangsa PDRB Provinsi Papua sekitar 19,21% per tahun, sementara sektor pertanian turun menjadi 13,23% per tahun dan industri manufaktur hanya 2,15% per tahun untuk periode yang sama.

Adanya penambahan APBD Provinsi Papua sejak diberlakukan Otonomi Khusus menyebabkan konsumsi pemerintah bertambah sangat tinggi, dimana penambahan tersebut lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor jasa pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dimasa mendatang diperlukan adanya integrasi yang kuat, antara ketiga sektor strategis tersebut dengan sektor pertanian dan industri manufaktur, agar efek multiplier dari meningkatnya konsumsi pemerintah terhadap ketiga sektor strategis tersebut lebih berdampak nyata terhadap pembangunan pertanian dan industri manufaktur.

2.5.7. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Tenaga Kerja dan Pengangguran

Keberhasilan Otonomi Khusus lainnya dalam pembangunan wilayah Papua dapat diamati juga pada peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Disini terbukti bahwa selama masa Otonomi Khusus (2001-2017) jumlah orang bekerja di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan, dan pengangguran dapat diturunkan lebih cepat. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.134 dan Tabel 2.63, saat Otonomi Khusus belum dilaksanakan jumlah orang yang terserap dalam lapangan kerja hanya mencapai 961.300 orang per tahun dengan pengangguran terbuka sekitar 4,49% per tahun. Kemudian di masa pelaksanaan Otonomi Khusus periode 2002-2005, jumlah orang bekerja meningkat menjadi 1.035.218 orang per tahun namun dengan pengangguran terbuka yang lebih tinggi sebesar 6,88% per tahun. Selanjutnya pada periode 2006-2012 jumlah orang bekerja bertambah menjadi 1.199.529 orang per tahun, serta pengangguran dapat diturunkan hingga 4,35% per tahun. Terakhir di periode 2013-2017, jumlah yang bekerja naik lebih besar menjadi 1.657.561 orang per tahun, dan tingkat pengangguran semakin direduksi hingga menjadi 3,59% per tahun.

Gambar 2.134. Jumlah Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran di Papua



Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Tabel 2.64. Rata-Rata Orang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Periode Pembangunan	Jumlah Orang Bekerja (orang/tahun)	Pengangguran (persen/tahun)
1997-2001	961.300	4,49
2002-2005	1.035.218	6,88
2006-2012	1.199.529	4,35
2013-2017	1.657.561	3,59

Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Berdasarkan kedua data di atas terindikasi bahwa keberhasilan Otonomi Khusus dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Papua mulai terasa pada periode 2006-2012, kemudian lebih meningkat lagi dampaknya selama periode 2013-2017. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa jumlah orang yang bekerja selama masa Otonomi Khusus ini masih lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah sederajat SD, tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah (lihat kembali Gambar 2.34 dan Tabel 2.24 sebelumnya).

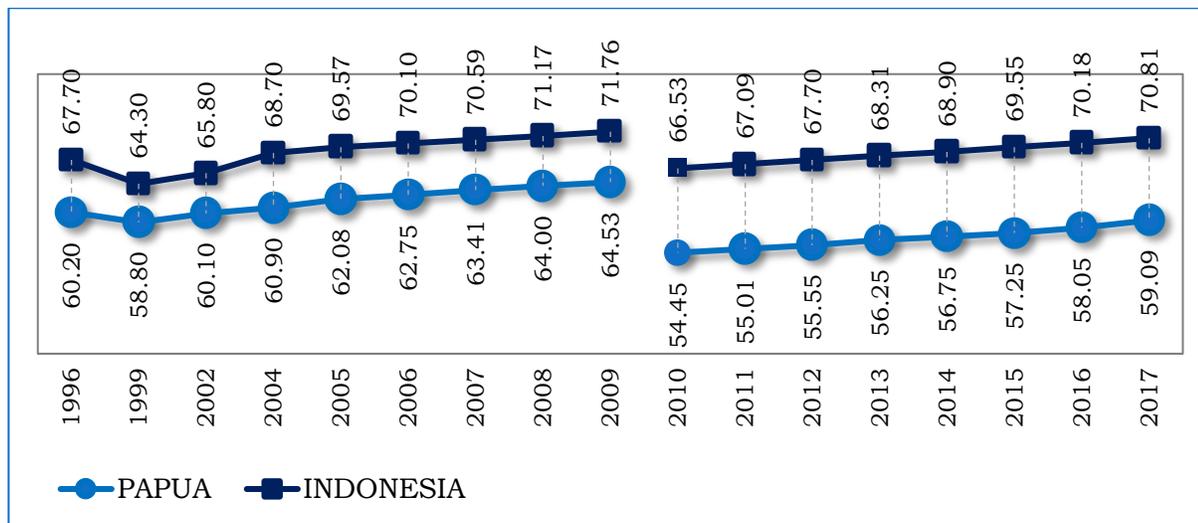
2.5.8. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia

Pada berbagai pembahasan sebelumnya telah diulas bagaimana begitu gencarnya pemerintah provinsi dan pusat selama ini membangun sektor pendidikan, kesehatan,

ekonomi dan infrastruktur di Papua. Dengan maksud agar kesejahteraan masyarakat Papua dapat ditingkatkan, dan kesenjangan pembangunan dengan wilayah lain di Indonesia dapat dikurangi. Dengan menggunakan kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM selama masa sebelum dan sesudah dijalankan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, dapat digambarkan mengenai dampak dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Papua.

Dalam Gambar 2.135 berikut ini terlihat jelas bahwa sepanjang tahun 1996-2001 masa sebelum Otonomi Khusus, maupun periode 2002-2017 masa pelaksanaan Otonomi Khusus, kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua selalu lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Kecenderungan ini terlihat dari IPM Provinsi Papua yang terus di bawah IPM nasional, dengan kesenjangannya yang relatif tidak berubah, yakni rata-rata sekitar 16,04 poin per tahun. Tetapi jika diperhatikan dari akselerasinya, terindikasi di masa Otonomi Khusus peningkatan IPM di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan periode sebelum Otonomi Khusus yang malah cenderung mengalami penurunan.

Gambar 2.135. IPM di Provinsi Papua dan Indonesia



Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Sepanjang periode 2002-2017, rata-rata kenaikan IPM sekitar 1,18% per tahun, sedangkan sebelum masa otonomi khusus yaitu tahun 1996-2002 IPM Provinsi Papua mengalami penurunan sekitar -0,03% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa

pelaksanaan Otonomi Khusus mampu memperbaiki percepatan IPM Provinsi Papua, terutama di era tahun 2013-2017 yang tumbuh lebih cepat dibandingkan periode lainnya sebesar 1,24% per tahun (lihat Tabel 2.654).

Tabel 2.65. Rata-Rata Percepatan IPM Di Provinsi Papua Dan Indonesia

Periode	Papua	Indonesia
1996-2002	-0.03	-0.56
2003-2009	1.19	1.46
2010-2012	1.01	0.88
2013-2017	1.24	0.90
2002-2017	1.18	1.16

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

2.5.9. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Seperti pada pengelolaan keuangan daerah lainnya, pengelolaan dana Otonomi Khusus juga diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi. Secara makro, seluruh aspek pengelolaan dana Otonomi Khusus tersebut dapat diamati efektifitasnya melalui pengukuran elastisitas belanja terhadap indikator-indikator pembangunan yang dianggap merupakan hasil dampak dari pengelolaan dana Otonomi Khusus. Dan sesuai data hasil pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dihitung elastisitas belanja dari dana Otonomi Khusus Papua, khususnya terhadap tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan IPM yang dibagi berdasarkan 3 periode pengamatan mengikuti pola pembagian dana Otonomi Khusus yang dijalankan selama ini di Provinsi Papua (lihat Tabel 2.66)

Tabel 2.66. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua

Pola Pembagian Provinsi - Kabupaten/Kota	Periode	Kemiskinan	LPE	IPM
Pola 60%-40%	2002-2005	-0.0112	0.5530	0.1462
Pola 40%-60%	2006-2012	-0.1106	-0.0303	0.0395
Pola 20%-80%	2013-2016	-0.0788	-0.1290	0.1671
Keseluruhan	2002-2016	-0.0701	0.0735	0.0935

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Jika diperhatikan pada dampaknya terhadap kemiskinan, pengelolaan dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua telah mengarah pada tanda yang sesuai yaitu negatif, dengan

besaran elastisitasnya secara keseluruhan (2002-2016) sebesar $-0,0701$. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar $0,0701\%$ dengan asumsi variabel yang lain konstan. Selanjutnya bila diperhatikan pada periode pembagian alokasi dana Otonomi Khusus, teridentifikasi bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus lebih efektif menurunkan kemiskinan pada periode 2006-2012 (pola 40%-60%) dibandingkan periode lainnya. Dimana terlihat nilai elastisitas belanja pada periode tersebut paling besar secara negatif yaitu $-0,1106$ yang bermakna bahwa pada masa itu setiap ada kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan sebesar $0,1106\%$. Sementara di periode 2013-2016, dampaknya terhadap kemiskinan sebesar elastisitas $-0,0788$, dan periode 2002-2005 sebesar $-0,0112$.

Berbeda dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, ternyata pengelolaan dana Otonomi Khusus di periode 2003-2005 lebih efektif dibandingkan periode lainnya, oleh karena nilai elastisitas belanjanya lebih tinggi yakni $0,5530$, yang berarti pada masa tersebut setiap ada kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% memberi dampak terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar $0,5530\%$. Secara keseluruhan (2002-2016) nilai elastisitas belanja Otonomi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua adalah $0,0735$.

Terakhir, untuk dampaknya terhadap kenaikan IPM, terindikasi bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus di periode 2013-2016 yang paling efektif dibandingkan periode yang lain. Dalam hal ini, berdasarkan nilai elastisitasnya sebesar $0,1671$ menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan belanja Otonomi Khusus sebesar 1% akan direspon dengan kenaikan IPM sekitar $0,1671\%$, yang nyatanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan secara menyeluruh untuk periode 2002-2016 yang memiliki elastisitas sebesar $0,0935$. Terjadinya perbedaan efektifitas pengelolaan dana Otonomi Khusus tersebut menunjukkan bahwa selama ini belum ditemukan pola pengelolaan keuangan dana Otonomi Khusus yang lebih tepat sasaran ke arah percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM sekaligus secara serentak dan simultan.

Perlu diperhatikan juga bahwa nilai elastisitas dari belanja Otonomi Khusus selama ini lebih kecil dari 1, atau bersifat inelastis yang berarti variasi perubahan input masih lebih

besar dibandingkan perubahan output, tersirat disini ada inefisiensi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus. Beberapa masalah yang membuat kondisi ini terjadi sebagian telah diungkap dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua yang dilakukan pada tahun 2016. Permasalahan yang dimaksud antara lain:

1. Data usulan kegiatan Otonomi Khusus kabupaten/kota dalam bentuk URD/RD, masih kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat langsung pada penduduk OAP (Orang Asli Papua). Fakta ini menandakan bahwa kabupaten/kota belum begitu optimal menterjemahkan amanat Otonomi Khusus. Hasil evaluasi juga mencatat bahwa kelemahan ini antara lain karena kurangnya pengarahannya dan kendali program/kegiatan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota;
2. Salah satu kendala dalam menilai program/kegiatan yang dibiayai dana Otsus karena sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Papua belum memperhatikan indikator kinerja *outcome* dan *impact* dalam perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah baru sebatas mengukur kinerja input dan output, dan masih kurang termotivasi merumuskan bagaimana pemanfaatan dan dampak kegiatan terhadap layanan yang disediakan pemerintah. Sebagai akibatnya banyak suara OAP yang menyatakan belum melihat dampak Otsus;
3. Banyak kegiatan yang kurang mengungkapkan lokasi yang tepat. Fenomena ini banyak ditemukan dalam URD/RD dan dokumen RKA/DPA. Penyebabnya, karena belum optimalnya persiapan saat perencanaan seperti belum ada pembahasan lokasi, kurangnya data lapangan, kurangnya pengendalian, dan sebagainya.

Banyak rumah tangga OAP yang belum mengetahui adanya kegiatan-kegiatan yang bersumber pada dana Otonomi Khusus. Sebagian besar beranggapan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dijalankan selama ini bersumber dari dana desa atau APBD kabupaten/kota. Namun, ada kecenderungan rumah tangga OAP lebih mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan Prospek, Gerbang Mas, KPS dan perumahan rakyat berasal dari dana Otonomi Khusus

2.6. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.6.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan yang digunakan dalam analisis ini menggunakan dua pendekatan yaitu dengan menggunakan daya dukung berbasis jasa ekosistem dan daya dukung berdasarkan kapasitas penyediaan dan kebutuhan pada setiap wilayah kabupaten di seluruh Provinsi Papua.

2.6.1.1. Daya Dukung Penyediaan Pangan

a) . Berdasarkan Jasa Ekosistem

Sektor pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan dari air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Tabel 2.67. Kualitas daya dukung penyediaan pangan di Provinsi Papua

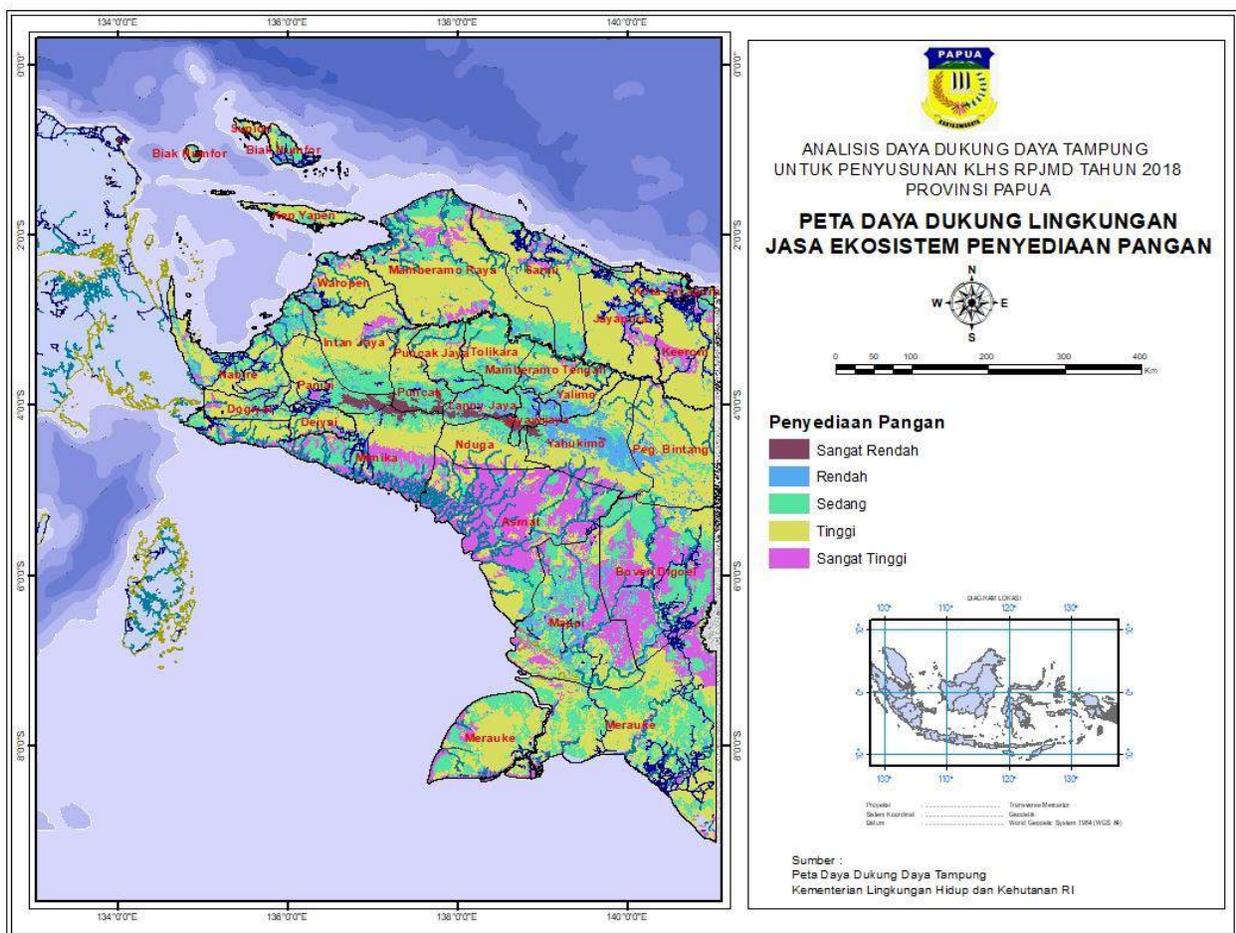
No	Kelas Daya Dukung	Jumlah	
		Ha	%
1	Sangat Rendah	427,722	1.36
2	Rendah	2,334,590	7.44
3	Sedang	8,428,826	26.86
4	Tinggi	14,587,481	46.49
5	Sangat Tinggi	5,601,148	17.85
	Jumlah	31,379,766	100.00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Lahan yang berpotensi tinggi untuk penyedia bahan pangan di Provinsi Papua sebesar 46,49 % dari total luas lahan, yaitu seluas 14,587,481 ha. Luas lahan berpotensi sedang seluas 8,428,826 ha atau 26.86 %, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Papua merupakan Provinsi yang kaya akan sumber pangan yang bermanfaat bagi manusia.

Jasa ekosistem penyediaan pangan adalah kontribusi ekosistem dalam penyediaan pangan tidak hanya bagi manusia namun juga bagi seluruh makhluk hidup. Jasa ekosistem penyediaan pangan ini terkait dengan kesejahteraan manusia dalam hal keamanan, akses terhadap bahan dasar untuk penghidupan yang layak dan kesehatan. Setiap kabupaten memiliki daya dukung yang berbeda dalam hal penyediaan pangan. Terdapat kabupaten yang mampu menghasilkan peran penyediaan pangan yang besar namun ada jugakabupaten yang hanya mampu menyediakan jasa penyediaan pangan yang relatif sedikit.

Gambar 2.136. Gambar Peta kualitas daya dukung penyediaan pangan Provinsi Papua



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Tata kelola sumberdaya manusia yang efektif terkait erat dengan upaya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan seperti dalam TPB 2. Dalam kaitan tersebut

diperlukan informasi terkait luas area yang memiliki tingkat penyedia pangan. Dalam tata kelola ini juga terkait dengan TPB 3 terkait upaya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dan tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Berdasarkan Tabel 2.67 berikut di bawah ini terlihat bahwa setiap kabupaten memiliki daya dukung yang berbeda-beda dalam penyediaan pangan di Provinsi Papua.

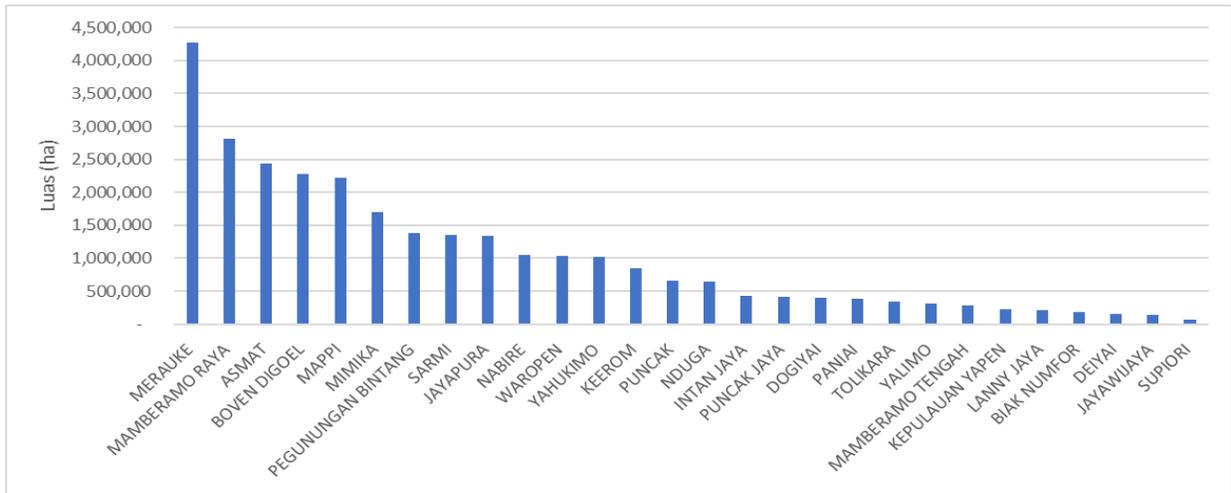
Tabel 2.68. Kondisi daya dukung penyediaan pangan per kabupaten

Kabupaten	Perkiraan Luas Daya Dukung Penyediaan Pangan									
	Sangat Tinggi (ha)		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
ASMAT	1,533,855	27.38	575,962	3.95	326,206	3.87	42,738	1.83	74	0.02
BIAK NUMFOR	3,724	0.07	52,852	0.36	120,906	1.43	44,008	1.89	4,281	1.00
BOVEN DIGOEL	908,759	16.22	445,130	3.05	930,135	11.04	101,494	4.35	960	0.22
DEIYAI	2,269	0.04	120,997	0.83	31,911	0.38	30,509	1.31	2,156	0.50
DOGIYAI	16,705	0.30	257,101	1.76	130,058	1.54	49,466	2.12	14,825	3.47
INTAN JAYA	4,490	0.08	200,619	1.38	222,701	2.64	26,337	1.13	11,373	2.66
JAYAPURA	112,828	2.01	985,397	6.76	245,809	2.92	167,295	7.17	3,306	0.77
JAYAWIJAYA	-	-	14,736	0.10	122,133	1.45	100,895	4.32	26,075	6.10
KEEROM	131,321	2.34	609,615	4.18	111,610	1.32	54,512	2.33	188	0.04
KEPULAUAN YAPEN	886	0.02	146,956	1.01	85,749	1.02	9,413	0.40	234	0.05
LANNY JAYA	-	-	14,199	0.10	193,845	2.30	91,476	3.92	69,683	16.29
MAMBERAMO RAYA	375,821	6.71	1,765,856	12.11	674,842	8.01	77,389	3.31	1,011	0.24
MAMBERAMO TENGAH	14,049	0.25	184,664	1.27	80,764	0.96	29,236	1.25	76	0.02
MAPPI	757,880	13.53	705,221	4.83	757,230	8.98	309,675	13.26	8,912	2.08
MERAUKE	533,167	9.52	2,163,691	14.83	1,578,493	18.73	51,647	2.21	26	0.01
MIMIKA	592,324	10.58	594,923	4.08	509,599	6.05	55,489	2.38	30,499	7.13
NABIRE	49,636	0.89	632,933	4.34	373,046	4.43	147,249	6.31	2,307	0.54
NDUGA	23,944	0.43	496,668	3.40	123,462	1.46	32,616	1.40	21,608	5.05
PANIAI	14,482	0.26	169,470	1.16	206,437	2.45	60,816	2.61	104,363	24.40
PEGUNUNGAN BINTANG	19,168	0.34	1,201,345	8.24	161,331	1.91	144,927	6.21	650	0.15
PUNCAK	34,707	0.62	339,770	2.33	279,089	3.31	54,519	2.34	90,999	21.28
PUNCAK JAYA	16,331	0.29	213,711	1.47	190,836	2.26	20,454	0.88	1,636	0.38
SARMI	157,110	2.80	840,984	5.77	357,741	4.24	53,503	2.29	193	0.05
SUPIORI	1,963	0.04	40,988	0.28	21,805	0.26	1,574	0.07	216	0.05
TOLIKARA	4,131	0.07	187,492	1.29	150,227	1.78	19,766	0.85	3,243	0.76
WAROPEN	124,814	2.23	763,427	5.23	143,000	1.70	51,899	2.22	941	0.22
YAHUKIMO	164,467	2.94	631,101	4.33	224,511	2.66	415,824	17.81	25,347	5.93
YALIMO	2,306	0.04	231,613	1.59	75,348	0.89	89,860	3.85	2,540	0.59
Grand Total	5,601,140	100.00	14,587,423	100.00	8,428,825	100.00	2,334,585	100.00	427,722	100.00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang memiliki daya dukung yang paling tinggi dalam penyediaan pangan disertai oleh Memberamo Raya, Asmat, Boven Digoel, Mappi, Mimika dan beberapa kabupaten lain seperti dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.137. Urutan daya dukung dalam penyediaan pangan per kabupaten

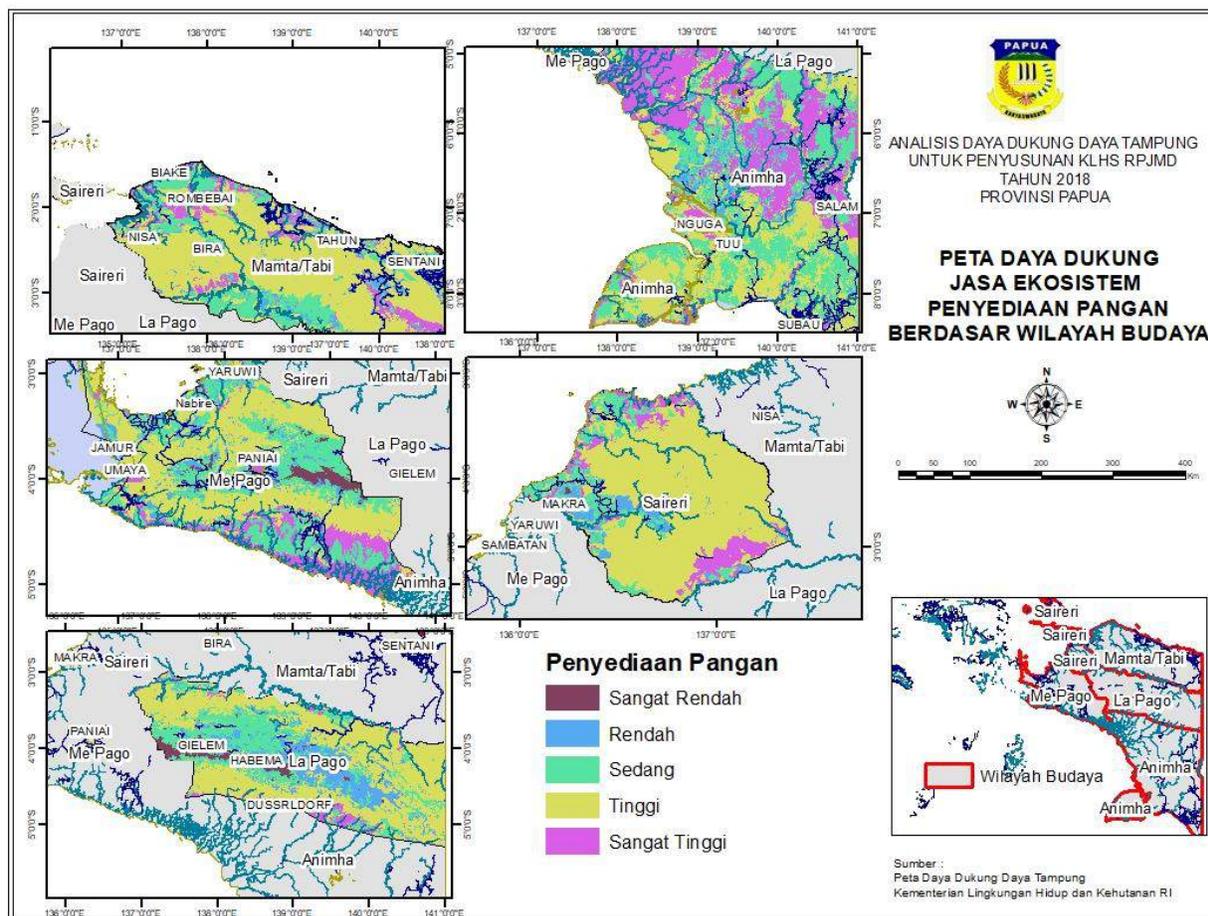


Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Jika dilihat secara keseluruhan diperkirakan lahan sekitar 28.617.388 ha memiliki daya dukung yang baik dalam penyediaan pangan. Data lain menunjukkan bahwa sekitar 80 % lahan dengan daya dukung tinggi dalam penyediaan pangan berada di 12 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Dari informasi ini diperoleh gambaran dalam perumusan KRP perlu dilihat distribusi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Daya dukung berdasarkan wilayah budaya ditunjukkan dari komposisi daya dukung sedang hingga sangat tinggi dari masing-masing wilayah adat dapat dilihat Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 2.138. Peta daya dukung penyediaan pangan per-wilayah budaya



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Daya dukung penyediaan pangan pada kategori sangat tinggi terluas terdapat di wilayah budaya Ha Anim. Jika dibandingkan pada kateori tinggi maka wilayah budaya Mamta, Ha Anim dan Lapago juga memiliki daya dukung yang seimbang dari segi luasan.

Tabel 2.69. Tabel Kualitas daya dukung penyediaan pangan berdasar wilayah budaya

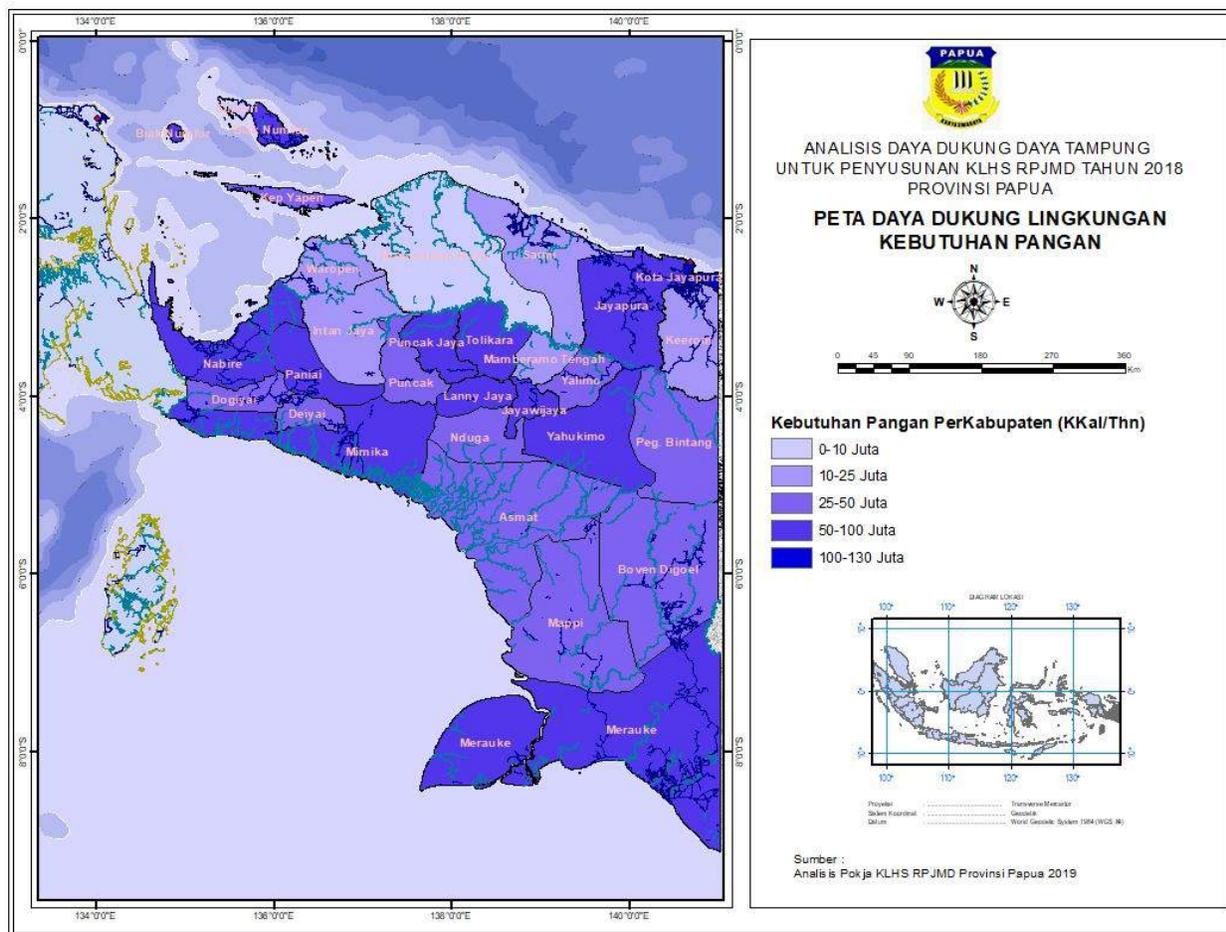
Wilayah Budaya	Daya Dukung Penyediaan Pangan (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
I. Mamta	1,390,002	4,201,853	777,080	6,368,936
II. Saereri	371,460	1,004,223	131,388	1,507,071
III. Ha Anim	3,592,064	3,890,004	3,733,661	11,215,729
IV. Meepago	1,473,752	1,976,043	679,906	4,129,702
V. Lapago	1,601,547	3,515,299	279,105	5,395,951
Total	8,428,825	14,587,423	5,601,140	28,617,388

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

b) Berdasarkan Kapasitas Riil Penyediaan dan Kebutuhan Pangan

Kapasitas kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi Papua diperhitungkan berdasarkan rata-rata kebutuhan kalori manusia per hari selama periode satu tahun yaitu sebesar 2500 KKal/hari. Hasil analisis di bawah ini memperlihatkan sebaran kebutuhan pangan di Provinsi Papua berdasarkan wilayah administrasi kabupaten, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten dengan kebutuhan pangan tertinggi sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya sebagai kabupaten dengan kebutuhan pangan yang paling rendah.

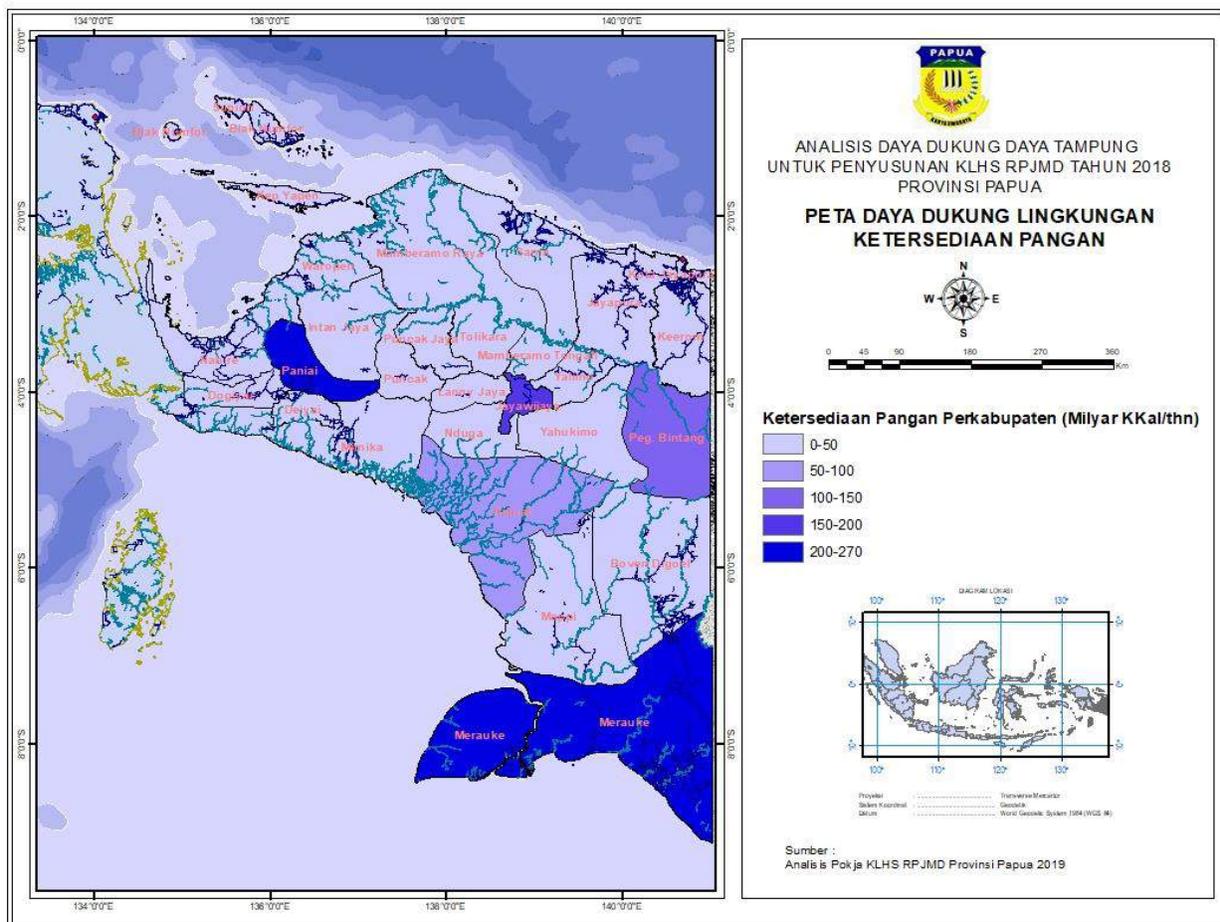
Gambar 2.139. Peta Kebutuhan Energi Pangan Per Kabupaten



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Sementara ketersediaan pangan di Provinsi Papua dinilai dengan mengkonversi nilai produksi tanaman pangan yang dikonsumsi di Provinsi Papua selama periode satu tahun (sagu, beras, jagung, singkong dan ubi jalar) per wilayah kabupaten terhadap nilai kalori dari setiap jenis tanaman pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten dengan nilai ketersediaan energi pangan terbesar sedangkan kabupaten lainnya memiliki nilai ketersediaan energi pangan yang rendah.

Gambar 2.140. Peta Ketersediaan Energi Pangan Per Kabupaten

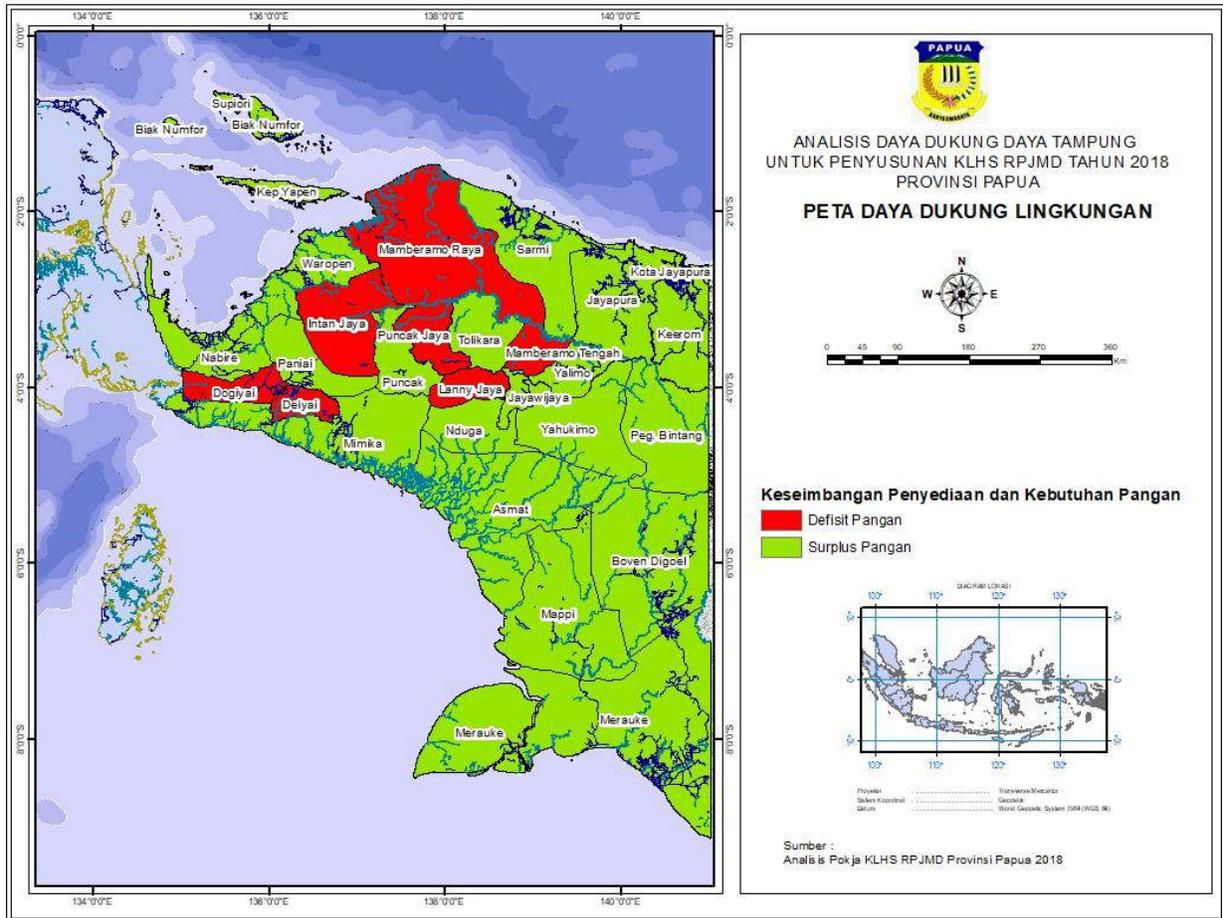


Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Nilai Saldo energi pangan adalah imbang antara kebutuhan dan ketersediaan energi pangan. Dari hasil analisis dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah bahwa Kabupaten Lanny Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Memberamo Tengah dan

Mamberamo Raya merupakan kabupaten yang defisit energi pangan sedangkan Kabupaten Jayawijaya, Merauke, Paniai dan Pegunungan Bintang merupakan kabupaten dengan surplus energi pangan terbesar.

Gambar 2.141. Peta Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Penjelasan keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan energi pangan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Beberapa kabupaten memiliki daya dukung pangan akan tetapi jika dilihat dari produksinya beberapa kabupaten tidak memiliki daya dukung pangan yang cukup.

Tabel 2.70. Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Energi Pangan (kkal/tahun)

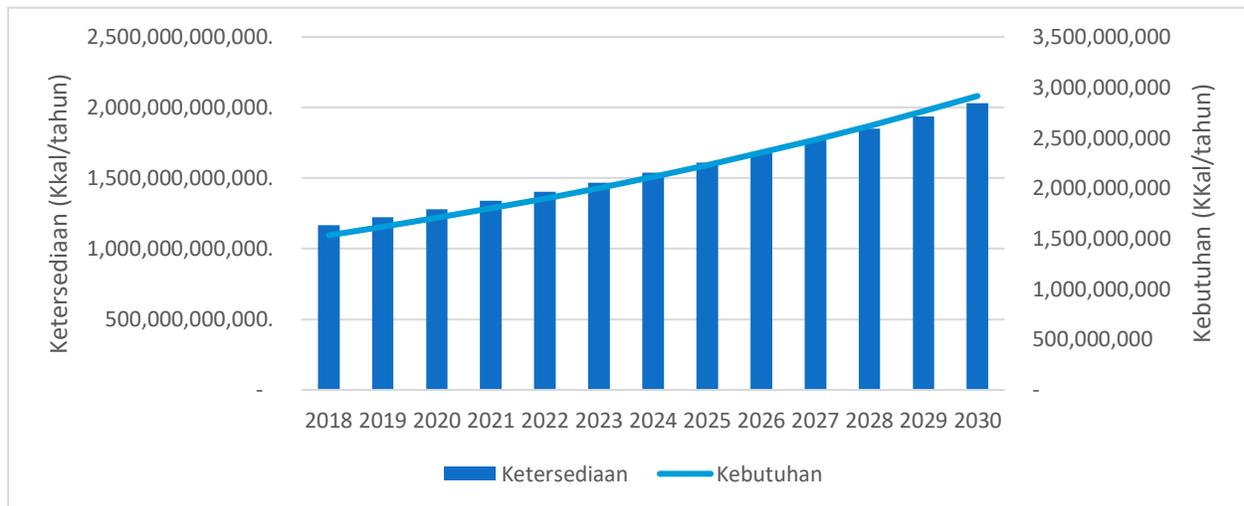
No	Kabupaten	Ketersediaan Energi Pangan	Kebutuhan energi Pangan	Saldo Energi Pangan
1	Kabupaten Asmat	65.439.899.100	41.345.200	65.398.553.900
2	Kabupaten Biak Numfor	13.307.746.500	64.391.300	13.243.355.200
3	Kabupaten Boven Digoel	17.200.146.100	29.463.500	17.170.682.600
4	Kabupaten Deiyai	0	32.132.200	-32.132.200
5	Kabupaten Dogiyai	0	42.274.400	-42.274.400
6	Kabupaten Intan Jaya	0	21.501.900	-21.501.900
7	Kabupaten Jayapura	21.828.321.917	56.059.900	21.772.262.017
8	Kabupaten Jayawijaya	167.000.000.000	94.702.600	166.905.297.400
9	Kabupaten Keerom	16.276.468.300	24.483.500	16.251.984.800
10	Kabupaten Kep. Yapen	15.130.722.200	42.278.900	15.088.443.300
11	Kabupaten Lanny Jaya	0	78.627.100	-78.627.100
12	Kabupaten Mamberamo Raya	0	9.929.460	-9.929.460
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	0	21.132.100	-21.132.100
14	Kabupaten Mappi	14.195.377.400	42.129.400	14.153.248.000
15	Kabupaten Merauke	255.000.000.000	99.409.900	254.900.590.100
16	Kabupaten Mimika	16.559.305.900	93.635.500	16.465.670.400
17	Kabupaten Nabire	26.381.156.138	64.571.100	26.316.585.038
18	Kabupaten Nduga	324.760.000	43.171.100	281.588.900
19	Kabupaten Paniai	268.000.000.000	75.737.200	267.924.262.800
20	Kabupaten Peg. Bintang	114.000.000.000	32.696.100	113.967.303.900
21	Kabupaten Puncak	30.683.364.600	47.981.700	30.635.382.900
22	Kabupaten Puncak Jaya	0	54.999.000	-54.999.000
23	Kabupaten Sarmi	11.101.600.400	17.003.800	11.084.596.600
24	Kabupaten Supiori	322.392.500	8.501.430	313.891.070
25	Kabupaten Tolikara	21.887.543.300	60.777.400	21.826.765.900
26	Kabupaten Waropen	4.622.277.800	13.118.800	4.609.159.000
27	Kabupaten Yahukimo	10.227.575.400	83.225.800	10.144.349.600
28	Kabupaten Yalimo	884.083.200	27.066.300	857.016.900
29	Kota Jayapura	26.408.123.923	130.694.000	26.277.429.923

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Kabupaten-Kabupaten yang mengalami defisit energi pangan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Papua untuk memastikan capaian TPB No. 2 dan 3. Defisit energi pangan ini menjadi arahan dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan agar kebutuhan pangan dapat dicukupi secara mandiri jika jalur distribusi antar wilayah masih relatif sulit.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk provinsi Papua sebesar 5,55 % pertahun hal ini juga menimbulkan dampak terhadap penambahan kebutuhan pangan tiap tahun. Gambar 2.142 di bawah ini memperlihatkan proyeksi kebutuhan pangan yang meningkat akan tetapi masih berada jauh di bawah ketersediaannya.

Gambar 2.142. Proyeksi Kebutuhan Pangan

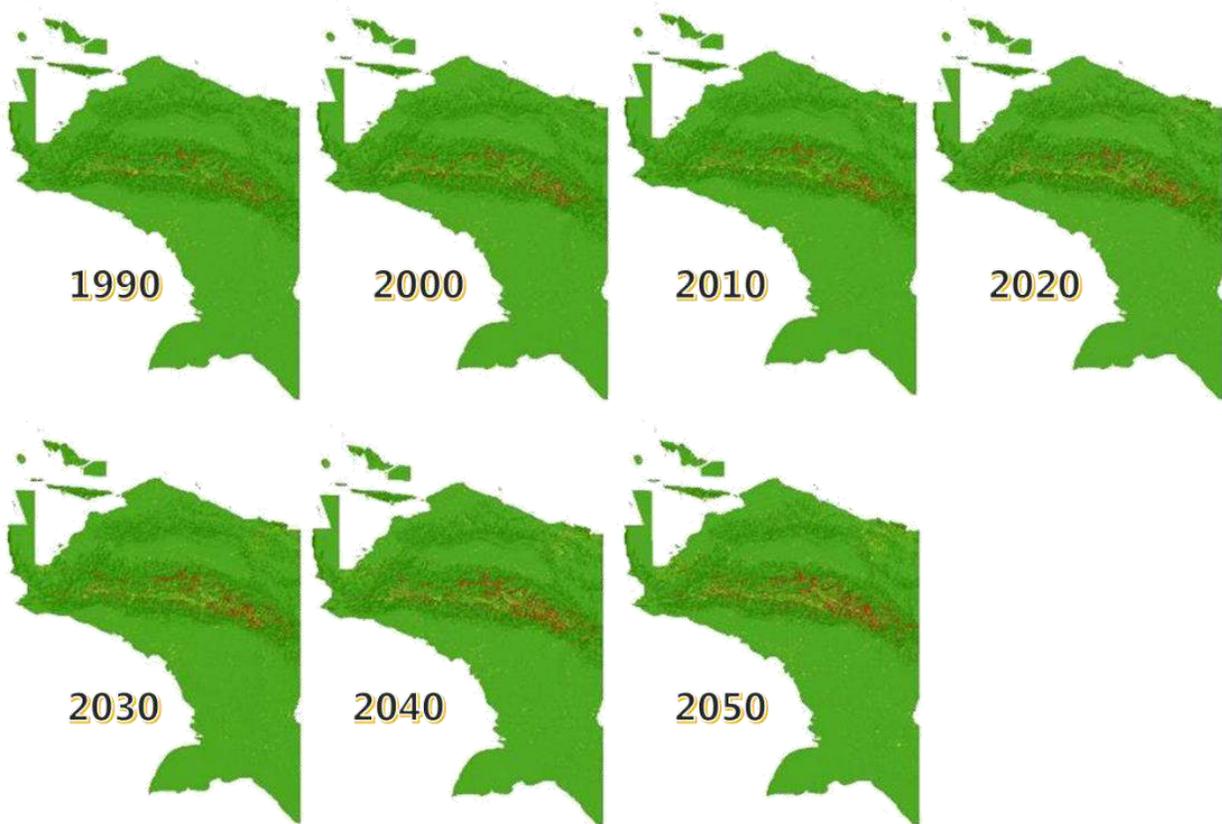


Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Analisis yang mendukung daya dukung pangan selanjutnya adalah tanah. Tanah merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan daya dukung pangan tersebut karena seperti halnya didaerah lain, Provinsi Papua juga mengalami resiko kehilangan tanah sebagaimana dalam Gambar 2.143. Laju kehilangan tanah Provinsi Papua sangat rendah. Kehilangan tanah yang tinggi akibat erosi hanya terjadi di dataran tinggi dan curam. Selama 1990-2050, Prediksi tingkat kehilangan tanah meningkat dari 332,58 ton / ha / tahun menjadi 890,47 ton / ha / tahun. Tingkat kehilangan tanah oleh Wilayah Adat1990-2050 Umumnya, tingkat kehilangan tanah meningkat di semua wilayah adat selama periode analisis La Pago adalah mengalami kehilangan tanah tertinggi di semua periode analisis. Pada tahun 1990, tingkat kehilangan tanah adalah 497,44 ton / ha / tahun kemudian meningkat hingga 1,353.96 ton / ha / th pada tahun 2050. Ini karena, lokasi La Pago kebanyakan di dataran tinggi dengan berbagai daerah lereng. Sebaliknya, Animha adalah tingkat kehilangan tanah terendah selama analisis periode. Pada tahun 1990, tingkat

kehilangan tanah adalah 30,67 ton / ha / tahun kemudian meningkat hingga 42,94 ton / ha / tahun. Animha terletak di bagian selatan Provinsi Papua dan didominasi oleh daerah datar.

Gambar 2.143. Proyeksi Kehilangan Tanah



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

2.6.1.2. Daya Dukung/Daya Tampung Penyediaan Air

a) Berdasarkan Jasa Ekosistem

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Sebagian besar lahan di Provinsi Papua berpotensi sedang untuk menyediakan air bersih. Seluas 44,13 % lahan di kawasan ini mempunyai potensi sedang dan 25,88 % memiliki potensi tinggi untuk penyediaan air bersih. Lahan berpotensi tinggi luasnya mencapai 8.122.385 ha, sedangkan lahan berpotensi sedang mencapai

13.848.258 dan ha lahan berpotensi rendah mencapai 6.859.414 ha (21,86 %) sebagaimana yang disajikan pada table berikut.

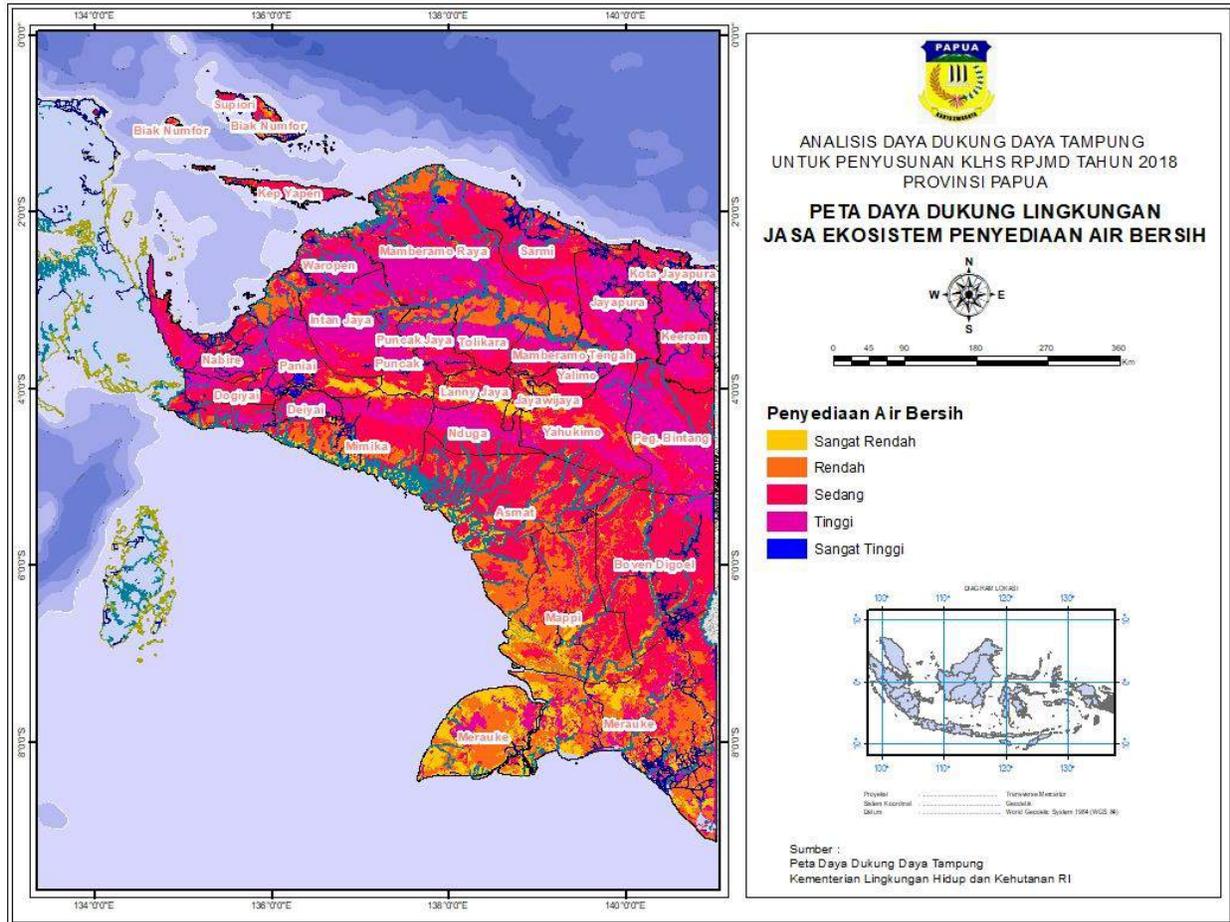
Tabel 2.71. Kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua

No	Kelas Daya Dukung	Jumlah	
		Ha	%
1	Sangat Rendah	2,338,457	7.45
2	Rendah	6,859,414	21.86
3	Sedang	13,848,258	44.13
4	Tinggi	8,122,385	25.88
5	Sangat Tinggi	211,182	0.67
Jumlah		31,379,696	100.00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Penyediaan air bersih memiliki arti penting bagi kesejahteraan manusia dalam aspek keamanan, aspek kesehatan serta akses terhadap bahan dasar untuk penghidupan yang layak. Setiap tipe ekoregion yang ada di Provinsi Papua tersebut mampu menyediakan air bersih dalam berbagai tingkatan dan distribusi. Distribusi luas dan peran jasa ekosistem dalam penyediaan air bersih dapat dilihat Gambar 2.144 berikut.

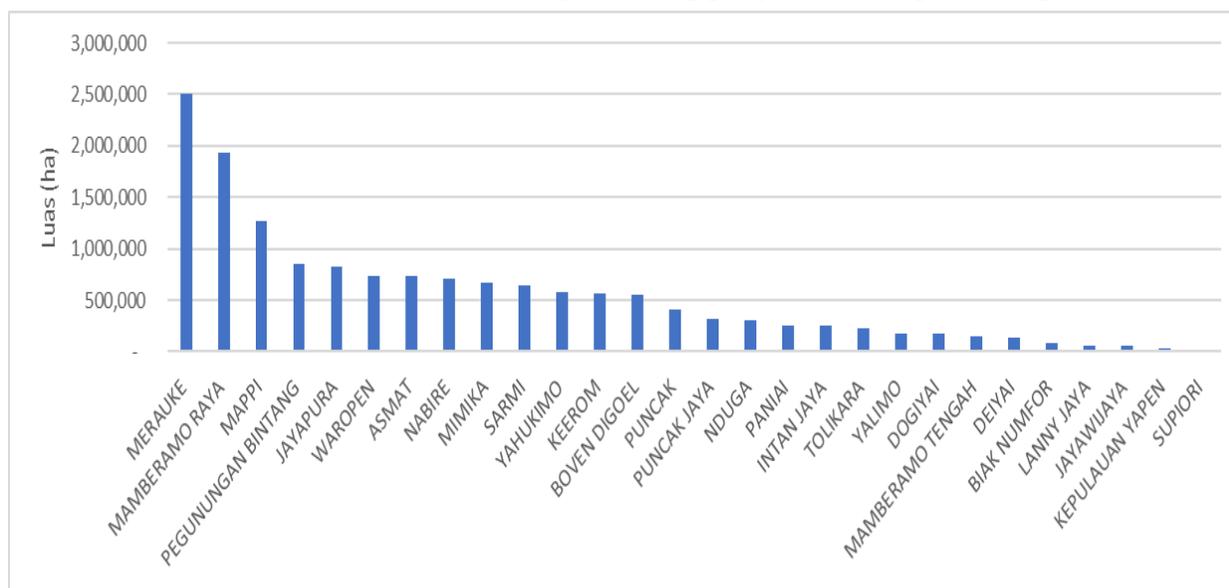
Gambar 2.144. Peta kualitas daya dukung penyediaan air Provinsi Papua



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Berdasarkan daya dukung wilayah, Provinsi Papua diperkirakan memiliki wilayah dengan luas sekitar 15.192.981 ha dengan luasan wilayah pada kategori tinggi terhadap penyediaan air dalam menopang kegiatan pembangunan. Merauke, Memberamo Raya, Mappi, Pegunungan Bintang, Jayapura, Waropen merupakan wilayah-wilayah yang memiliki wilayah terluas dalam penyediaan air.

Gambar 2.145. Urutan daya dukung penyediaan air per Kabupaten



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Rincian daya dukung penyediaan air per kabupaten di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut. Selain penyediaan air, upaya memperbaiki kualitas air sebagai upaya mendukung pengembangan sektor lain dapat dilihat pada Gambar 2.145 di atas. Gambar tersebut menunjukkan daya tampung terkait kemampuan dalam pemurnian air di Kabupaten Merauke, Mamberamo Raya, Asmat, dan Boven Digoel.

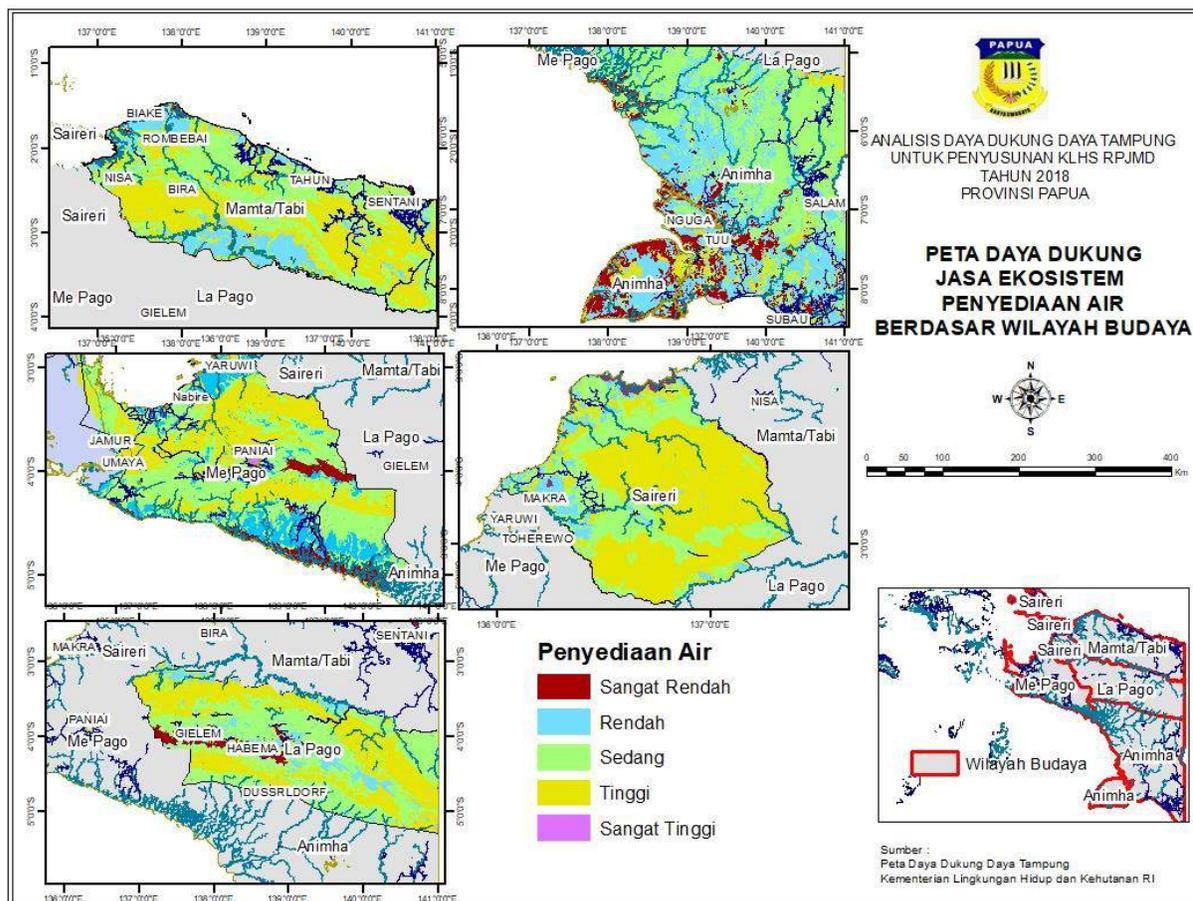
Tabel 2.72. Kondisi daya dukung penyediaan air per kabupaten di Provinsi Papua

Kabupaten	Perkiraan Luas Daya Dukung Penyediaan Air									
	Sangat Tinggi (ha)		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
ASMAT	6,420	3.04	69,836	0.86	652,267	9.51	1,559,255	11.26	191,056	8.17
BIAK NUMFOR	-	-	834	0.01	85,644	1.25	116,678	0.84	22,615	0.97
BOVEN DIGOEL	16,727	7.92	119,084	1.47	417,455	6.09	1,780,802	12.86	52,410	2.24
DEIYAI	3,840	1.82	101,002	1.24	24,037	0.35	58,957	0.43	5	0.00
DOGIYAI	609	0.29	139,639	1.72	27,338	0.40	300,569	2.17	-	-
INTAN JAYA	263	0.12	231,858	2.85	19,169	0.28	210,929	1.52	3,302	0.14
JAYAPURA	16,260	7.70	691,367	8.51	116,879	1.70	685,007	4.95	5,122	0.22
JAYAWIJAYA	39	0.02	6,107	0.08	51,976	0.76	145,395	1.05	60,323	2.58
KEEROM	3,582	1.70	493,726	6.08	61,232	0.89	348,321	2.52	385	0.02
KEPULAUAN YAPEN	84	0.04	-	-	30,378	0.44	211,420	1.53	1,356	0.06
LANNY JAYA	293	0.14	433	0.01	61,018	0.89	215,362	1.56	92,098	3.94
MAMBERAMO RAYA	69,860	33.08	1,254,114	15.44	614,320	8.96	897,933	6.48	58,692	2.51
MAMBERAMO TENGAH	5,131	2.43	129,763	1.60	16,917	0.25	155,229	1.12	1,750	0.07
MAPPI	668	0.32	87,030	1.07	1,181,742	17.23	963,475	6.96	306,003	13.09
MERAUKE	6,648	3.15	507,732	6.25	1,993,445	29.06	774,297	5.59	1,044,903	44.68
MIMIKA	7,086	3.36	288,822	3.56	376,191	5.48	886,748	6.40	223,987	9.58
NABIRE	5,502	2.61	475,060	5.85	224,507	3.27	479,666	3.46	20,437	0.87
NDUGA	2,226	1.05	292,238	3.60	8,268	0.12	371,373	2.68	24,194	1.03
PANIAI	16,014	7.58	177,167	2.18	64,619	0.94	203,199	1.47	94,570	4.04
PEGUNUNGAN BINTANG	11,401	5.40	767,787	9.45	71,753	1.05	675,359	4.88	1,121	0.05
PUNCAK	5,932	2.81	340,805	4.20	61,448	0.90	314,789	2.27	76,110	3.25
PUNCAK JAYA	2,655	1.26	241,853	2.98	69,594	1.01	128,214	0.93	652	0.03
SARMI	11,977	5.67	346,640	4.27	281,874	4.11	765,267	5.53	3,773	0.16
SUPIORI	-	-	29	0.00	4,678	0.07	56,642	0.41	5,197	0.22
TOLIKARA	657	0.31	212,854	2.62	15,502	0.23	135,847	0.98	-	-
WAROPEN	3,286	1.56	643,095	7.92	83,766	1.22	329,549	2.38	24,384	1.04
YAHUKIMO	6,943	3.29	400,395	4.93	175,078	2.55	856,678	6.19	22,158	0.95
YALIMO	7,079	3.35	103,116	1.27	68,319	1.00	221,301	1.60	1,852	0.08
Total	211,182	100.00	8,122,385	100.00	6,859,414	100.00	13,848,258	100.00	2,338,457	100.00

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Daya dukung penyediaan air per-wilayah budaya dapat dilihat pada Gambar 2.146 berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan distribusi penyediaan kapasitas penyediaan dari lima wilayah budaya yang ada di Provinsi Papua.

Gambar 2.146. Peta daya dukung penyediaan air per-wilayah budaya



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Kondisi daya dukung penyediaan air pada kategori sedang-tinggi disajikan pada Tabel 2.72 dimana Wilayah Mamta, H Anim, dan Lapago menunjukkan luas area yang tinggi dalam penyediaan air.

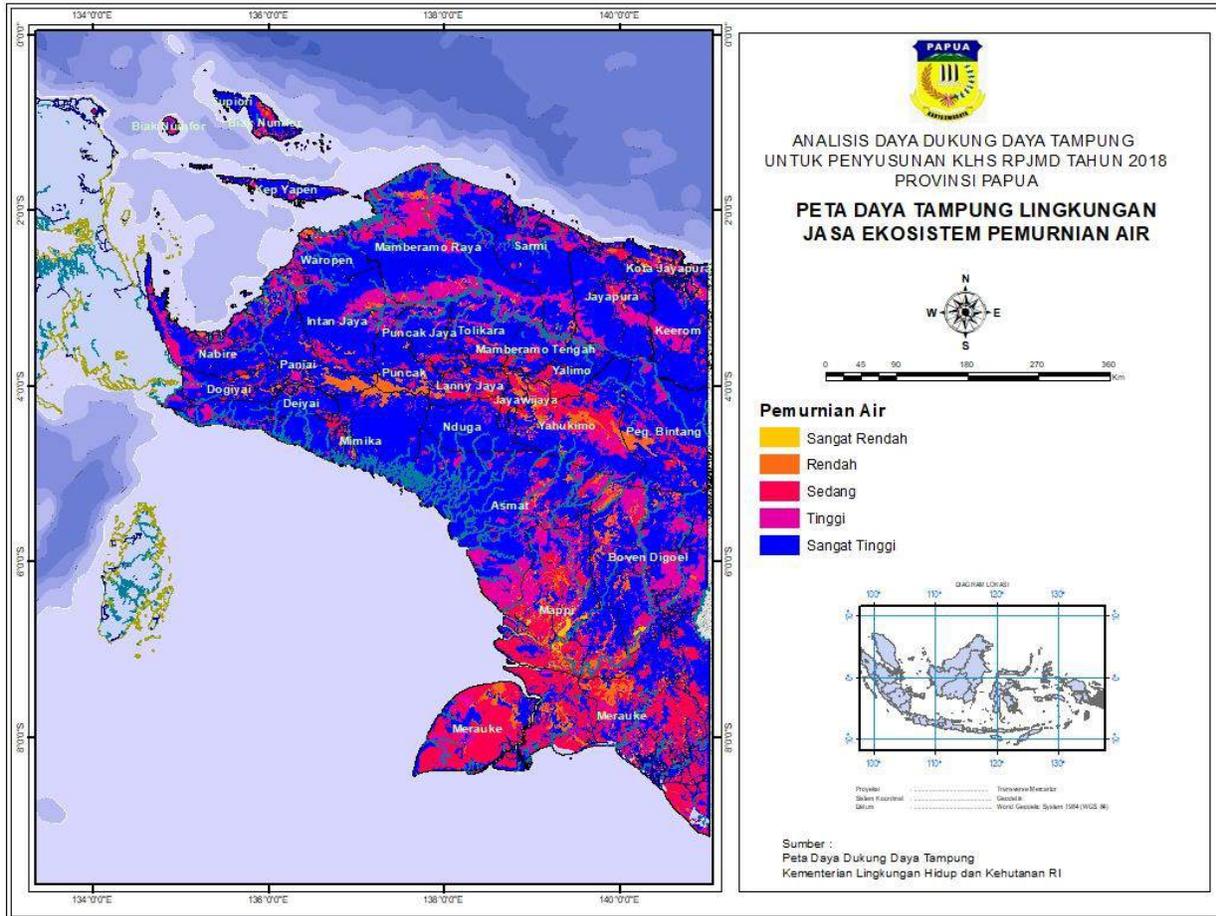
Tabel 2.73. Kondisi daya dukung penyediaan air per wilayah budaya

Wilayah Budaya	Daya Dukung Penyediaan Air (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
I. Mamta	2,696,527	2,785,848	101,679	5,584,054
II. Saereri	714,289	643,958	3,370	1,361,617
III. Ha Anim	5,077,828	783,682	30,463	5,891,973
IV. Meepago	2,140,068	1,413,547	33,314	3,586,929
V. Lapago	3,219,546	2,495,350	42,355	5,757,252
Total	13,848,258	8,122,385	211,182	22,181,825

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Dalam konteks kebutuhan air, selain unsur daya dukung juga diperlukan informasi daya tampung dalam hal ini adalah pemurnian air. Gambar dibawah ini menunjukkan daya tampung pemurnian air Provinsi Papua.

Gambar 2.147. Peta Daya Tampung Pemurnian Air



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Kabupaten Mimika dan beberapa kabupaten lain seperti tersebut pada Gambar 2.147 atas memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap unsur-unsur pencemar yang masuk dalam wilayahnya. Sedangkan Tabel 2.73 menunjukkan kondisi daya tampung per kabupaten dalam pemurnian air.

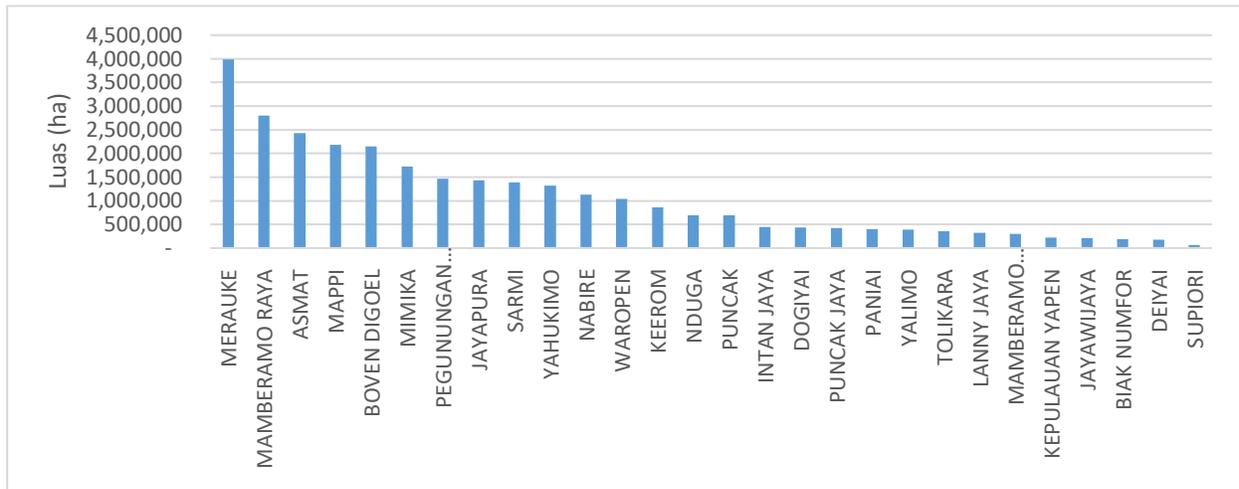
Tabel 2.74. Kondisi daya tampung per kabupaten dalam pemurnian air

Kabupaten	Perkiraan Luas Daya Dukung Pemurnian Air									
	Sangat Tinggi (ha)		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
ASMAT	1,878,286	9.97	440,878	8.76	105,858	1.99	53,698	2.61	115	0.01
BIAK NUMFOR	105,116	0.56	32,275	0.64	53,970	1.01	34,410	1.67	-	-
BOVEN DIGOEL	1,214,017	6.45	742,349	14.74	196,848	3.69	217,159	10.54	16,104	0.78
DEIYAI	144,658	0.77	14,717	0.29	14,121	0.26	12,410	0.60	1,936	0.09
DOGIYAI	345,225	1.83	32,621	0.65	54,428	1.02	34,421	1.67	1,460	0.07
INTAN JAYA	379,626	2.02	17,285	0.34	50,277	0.94	18,292	0.89	41	0.00
JAYAPURA	928,202	4.93	360,892	7.17	139,639	2.62	74,902	3.64	11,000	0.53
JAYAWIJAYA	87,035	0.46	16,220	0.32	109,048	2.05	51,536	2.50	-	-
KEEROM	605,905	3.22	217,997	4.33	33,004	0.62	38,430	1.87	11,910	0.58
KEPULAUAN YAPEN	180,454	0.96	27,889	0.55	17,885	0.34	17,010	0.83	-	-
LANNY JAYA	169,465	0.90	879	0.02	154,948	2.91	43,912	2.13	-	-
MAMBERAMO RAYA	1,817,633	9.65	851,076	16.90	125,183	2.35	90,857	4.41	10,170	0.49
MAMBERAMO TENGAH	217,562	1.16	28,585	0.57	54,890	1.03	7,752	0.38	-	-
MAPPI	984,399	5.23	427,922	8.50	766,054	14.37	313,327	15.21	47,215	2.29
MERAUKE	1,398,028	7.42	398,318	7.91	2,188,349	41.06	340,914	16.55	1,416	0.07
MIMIKA	1,489,157	7.91	130,093	2.58	102,252	1.92	61,332	2.98	-	-
NABIRE	775,657	4.12	186,931	3.71	164,735	3.09	70,450	3.42	7,399	0.36
NDUGA	632,117	3.36	21,524	0.43	36,330	0.68	8,328	0.40	-	-
PANIAI	350,899	1.86	32,276	0.64	21,440	0.40	147,097	7.14	3,857	0.19
PEGUNUNGAN BINTANG	1,215,649	6.46	125,789	2.50	120,319	2.26	65,665	3.19	-	-
PUNCAK	514,878	2.73	129,790	2.58	43,435	0.81	110,482	5.36	499	0.02
PUNCAK JAYA	331,863	1.76	49,016	0.97	46,433	0.87	15,458	0.75	198	0.01
SARMI	909,158	4.83	295,210	5.86	177,828	3.34	23,143	1.12	4,191	0.20
SUPIORI	59,355	0.32	599	0.01	2,313	0.04	4,278	0.21	-	-
TOLIKARA	274,318	1.46	19,503	0.39	65,931	1.24	5,031	0.24	76	0.00
WAROPEN	742,602	3.94	212,729	4.22	81,717	1.53	40,712	1.98	6,321	0.31
YAHUKIMO	821,585	4.36	190,706	3.79	303,239	5.69	145,721	7.08	-	-
YALIMO	258,308	1.37	31,488	0.63	99,060	1.86	12,720	0.62	91	0.00
Jumlah	18,831,157	100.00	5,035,558	100.00	5,329,535	100.00	2,059,447	100.00	123,999	6.02

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Perhitungan daya dukung ketersediaan air di bagi dalam 3 wilayah sungai, yaitu: (1) WS Wapoga-Mimika, (2) WS Mamberamo-Tami-Apauvar dan, (3) WS Einlanden-Digul-Bikuma. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat WS Mamberamo Tami Apauvar terdiri dari 27 DAS, WS Wapoga - Mimika terdiri atas 97 DAS dan WS Einlanden-Digul-Bikuma terdiri atas 29 DAS.

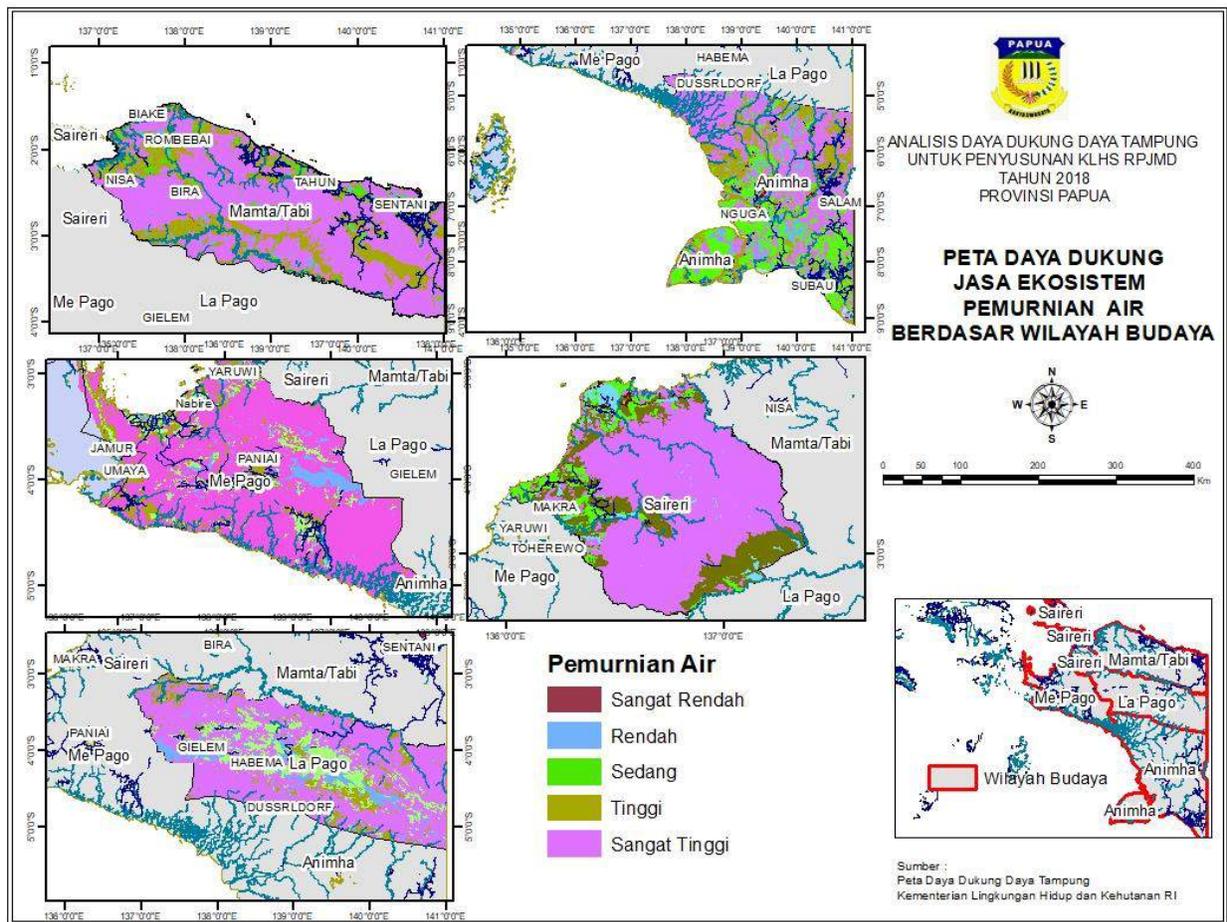
Gambar 2.148. Urutan daya tampung dalam pemurnian air per kabupaten



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Kapasitas daya tampung dalam pemurnian air Provinsi Papua dilihat pada Gambar 2.149 di bawah ini. Jika diperhatikan semua wilayah budaya memiliki daya tampung yang tinggi dan sangat tinggi terhadap pemurnian air.

Gambar 2.149. Peta daya tampung pemurnian air berdasarkan wilayah budaya



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Kapasitas daya tampung dalam pemurnian air Provinsi Papua dari kategori sedang hingga tinggi berdasarkan wilayah budaya dapat dilihat pada Tabel 2.74 Wilayah budaya dengan kapasitas daya tampung relatif tinggi terdapat dalam luasan 10 juta hektare di wilayah adat Ha Anim dan 6 Juta hektare berada pada wilayah adat Mamta dan Lapago.

Tabel 2.75. Kondisi daya tampung pemurnian air per wilayah budaya

Wilayah Budaya	Daya Tampung Pemurnian Air (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
I. Mamta	475,654	1,725,176	4,260,899	6,461,730
II. Saereri	155,886	273,491	1,087,527	1,516,905
III. Ha Anim	3,257,108	2,009,468	5,474,731	10,741,307
IV. Meepago	407,253	413,923	3,485,221	4,306,397
V. Lapago	1,033,634	613,499	4,522,779	6,169,912

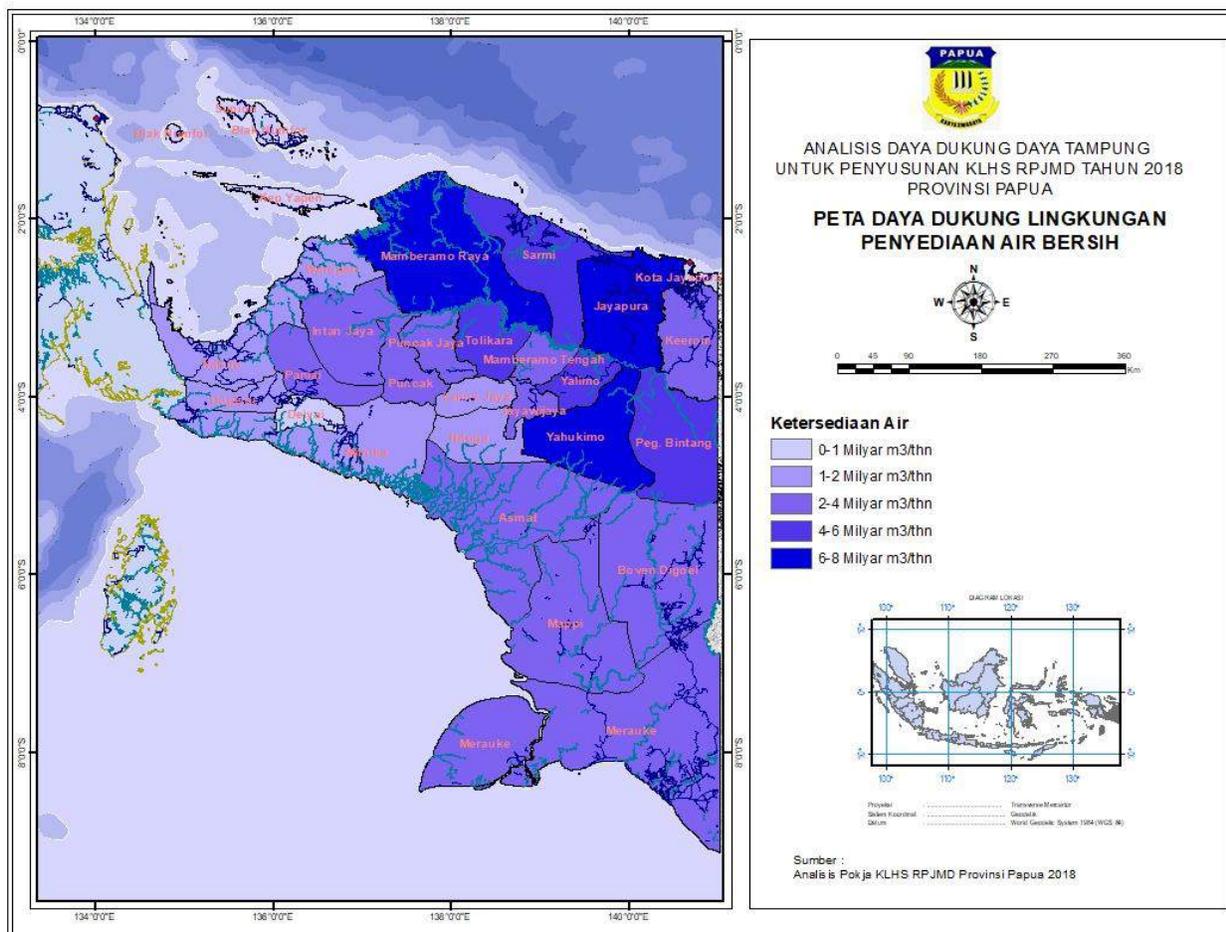
Wilayah Budaya	Daya Tampung Pemurnian Air (ha)			Jumlah (ha)
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Total	5,329,535	5,035,558	18,831,157	29,196,250

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

b) Berdasarkan Kapasitas Riil Penyediaan dan Kebutuhan Air

Perhitungan penyediaan air dilakukan dengan mempergunakan data debit air tahunan pada wilayah sungai yang melintasi masing-masing kabupaten di Provinsi Papua. Hasil analisis di bawah ini menunjukkan adanya daya dukung penyediaan air yang sangat tinggi di Provinsi Papua terutama di Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Sarmi, Tolikara dan Yahukimo.

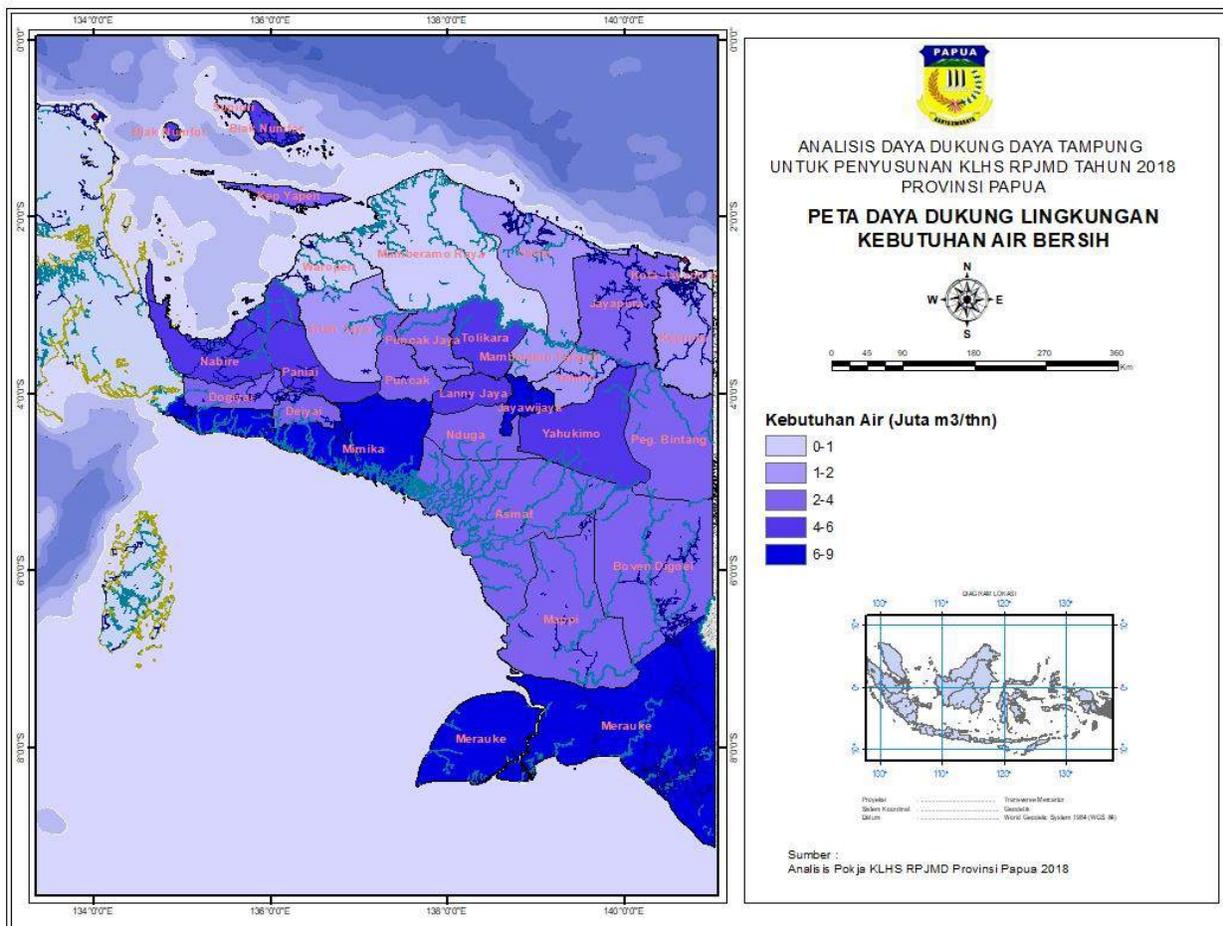
Gambar 2.150. Peta Ketersediaan Air Per Kabupaten



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Perhitungan kebutuhan air domestik dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten dengan standar rata-rata kebutuhan air bersih antara perkotaan sedang dan pedesaan menurut WHO sebesar 85 liter per kapita. Hasil analisis di bawah ini menunjukkan bahwa Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Mimika merupakan kabupaten dengan kebutuhan air terbesar, sedangkan Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya dan Waropen merupakan kabupaten dengan kebutuhan air terendah.

Gambar 2.151. Peta Kebutuhan Air Bersih Per Kabupaten



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Saldo ketersediaan adalah imbalan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa seluruh kabupaten di Provinsi Papua masih berada dalam kondisi surplus. Kabupaten Mamberamo Raya, Yahukimo,

Jayapura, Sarmi, Pegunungan Bintang dan Tolikara memiliki nilai surplus air terbesar sedangkan Kabupaten Deiyai, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Supiori dan Biak Numfor merupakan kabupaten yang memiliki nilai surplus air terkecil.

Tabel 2.76. Keseimbangan Ketersediaan dan Kebutuhan Air (m3/detik)

No	Kabupaten	Kebutuhan Air	Ketersediaan Air	Saldo Air
1	Kabupaten Asmat	2.882.502	3.641.719.464	3.638.836.962
2	Kabupaten Biak Numfor	4.489.224	16.855.992	12.366.768
3	Kabupaten Boven Digoel	2.054.134	3.769.860.744	3.767.806.610
4	Kabupaten Deiyai	2.240.191	389.989.944	387.749.753
5	Kabupaten Dogiyai	2.947.282	1.585.304.208	1.582.356.926
6	Kabupaten Intan Jaya	1.499.066	2.892.387.312	2.890.888.246
7	Kabupaten Jayapura	3.908.374	6.393.487.752	6.389.579.378
8	Kabupaten Jayawijaya	6.602.461	2.512.972.440	2.506.369.979
9	Kabupaten Keerom	1.706.933	2.346.472.872	2.344.765.939
10	Kabupaten Kep. Yapen	2.947.592	86.771.304	83.823.712
11	Kabupaten Lanny Jaya	5.481.714	1.256.184.000	1.250.702.286
12	Kabupaten Mamberamo Raya	692.261	8.324.515.872	8.323.823.611
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	1.473.284	3.834.866.952	3.833.393.668
14	Kabupaten Mappi	2.937.168	2.562.252.696	2.559.315.528
15	Kabupaten Merauke	6.930.644	2.478.472.056	2.471.541.412
16	Kabupaten Mimika	6.528.063	1.698.224.112	1.691.696.049
17	Kabupaten Nabire	4.501.759	1.692.584.424	1.688.082.665
18	Kabupaten Nduga	3.009.797	1.378.827.504	1.375.817.707
19	Kabupaten Paniai	5.280.238	2.417.633.856	2.412.353.618
20	Kabupaten Peg. Bintang	2.279.500	5.431.413.744	5.429.134.244
21	Kabupaten Puncak	3.345.178	3.042.404.064	3.039.058.886
22	Kabupaten Puncak Jaya	3.834.411	2.863.389.960	2.859.555.549
23	Kabupaten Sarmi	1.185.465	5.822.407.584	5.821.222.119
24	Kabupaten Supiori	592.702	63.213.912	62.621.210
25	Kabupaten Tolikara	4.237.270	5.391.210.600	5.386.973.330
26	Kabupaten Waropen	914.617	1.535.477.328	1.534.562.711
27	Kabupaten Yahukimo	5.802.327	6.743.200.968	6.737.398.641
28	Kabupaten Yalimo	1.887.003	4.201.830.360	4.199.943.357
29	Kota Jayapura	9.111.732	259.635.888	250.524.156

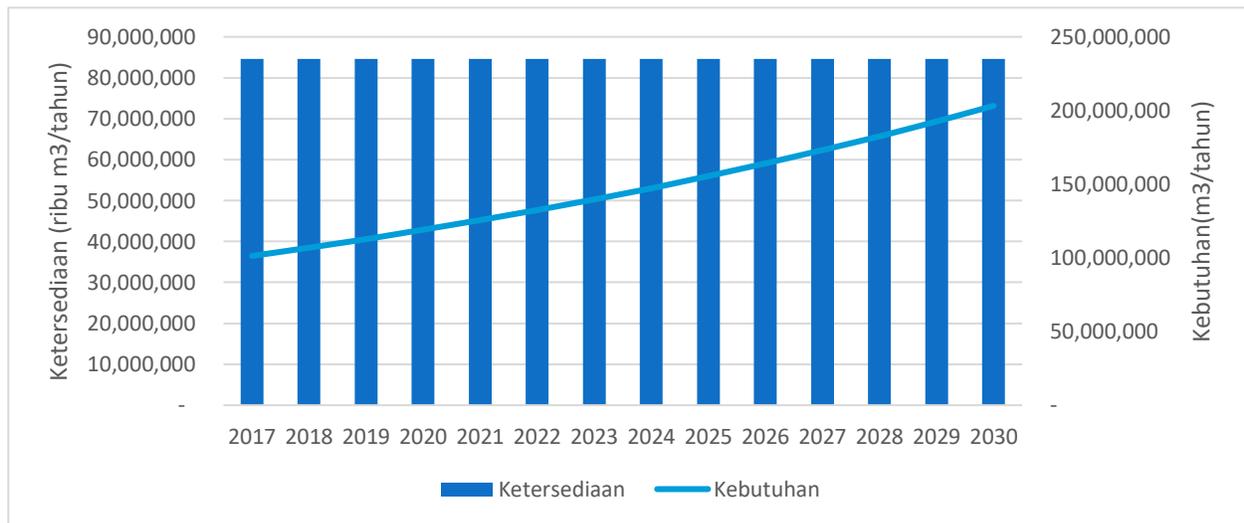
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Kabupaten-Kabupaten surplus airnya terkecil perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Papua untuk memastikan capaian TPB No. 6. Rendahnya ketersediaan air pada

kabupaten-kabupaten ini menjadi pertimbangan dalam pengaturan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk dan jalinan kemitraan jaringan air bersih dengan daerah hulu atau daerah sekitarnya yang surplus airnya lebih besar.

Berdasarkan proyeksi laju kebutuhan air Provinsi Papua terlihat terdapat kenaikan kebutuhan air domestik yang signifikan dari sekitar 100 juta m³/tahun menjadi sekitar 200 juta m³/tahun. Kebutuhan ini belum memperhitungkan kebutuhan air komersial dan industri atau kegiatan ekonomi yang lain. Namun demikian kebutuhan akan air masih dibawah ketersediaan air dari segi kuantitas dengan belum memperhatikan lebih jauh terhadap kualitas.

Gambar 2.152. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Air

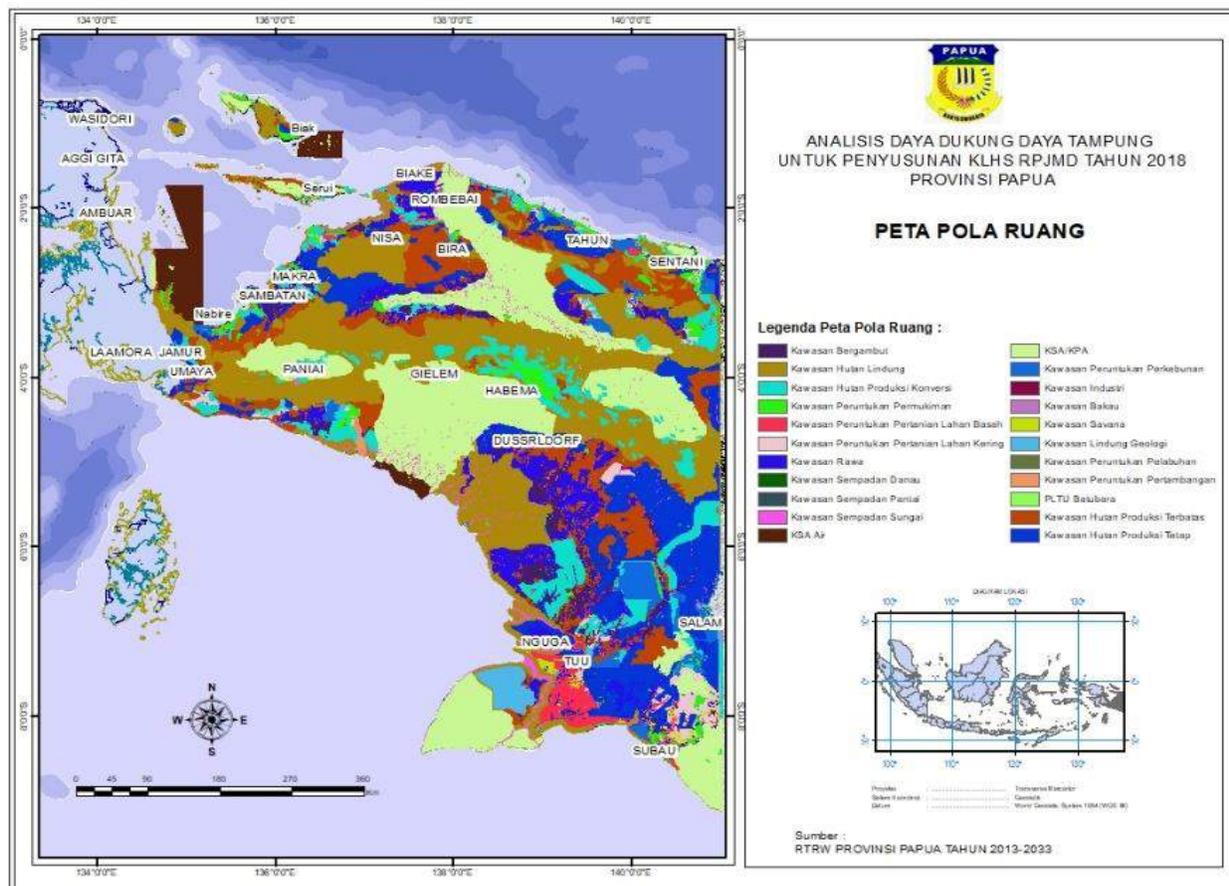


Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

2.6.1.3. Daya Dukung Kelestarian Hutan

Daya dukung kelestarian hutan didekati dengan proxy berupa daya dukung fungsi lindung yang menggambarkan alokasi fungsi lindung di suatu wilayah. Alokasi fungsi lindung tersebut ditentukan berdasarkan alokasi fungsi ruang yang terdapat dalam pola ruang wilayah seperti dalam gambar 2.153 di bawah ini.

Gambar 2.153. Pola Ruang Wilayah Sebagai Dasar Analisi Luas Guna Lahan



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Provinsi Papua dengan luas wilayah yaitu 32.757.938 ha. Dalam penghitungan daya dukung fungsi lindung seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung, tetapi dengan koefisien yang berbeda-beda. Tutupan lahan hutan dan badan air memiliki fungsi lindung yang tinggi dibandingkan dengan tutupan lahan bangunan atau terbuka. Tabel 2.76 menunjukkan perhitungan luas lahan yang dengan fungsi lindung tiap tutupan lahan Provinsi Papua.

Tabel 2.77. Perhitungan luas guna lahan fungsi lindung

No	Pola Ruang	Luas (ha)	Koefisien Lindung	Luas Guna Lahan (ha)
1	KSA/KPA	6,755,995	1	6,755,995
2	KSA Air	1,019,016	1	1,019,016
3	Kawasan Hutan Lindung	7,839,652	1	7,839,652
4	Kawasan Bergambut	939,136	1	939,136
5	Kawasan Bakau	3,836	1	3,836

No	Pola Ruang	Luas (ha)	Koefisien Lindung	Luas Guna Lahan (ha)
6	Kawasan Sempadan	563,463	1	563,463
7	Kawasan Lindung Geologi	284,678	1	284,678
8	Kawasan Rawa	2,057,906	0.98	2,016,748
9	Kawasan Savana	101,778	0.28	28,498
10	Kawasan HP	4,197,246	0.68	2,854,127
11	Kawasan HPK	2,448,298	0.68	1,664,842
12	Kawasan HPT	3,796,353	0.68	2,581,520
13	Kawasan Peruntukan Perkebunan	717,803	0.54	387,613
14	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	651,995	0.46	299,918
15	Kawasan peruntukan Pertanian Lahan kering	540,461	0.21	113,497
16	Kawasan Industri	12,239	0.18	2,203
17	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	294	0.18	53
18	Kawasan Peruntukan Permukiman	788,347	0.18	141,903
19	Kawasan Peruntukan Pertambangan	39,422	0.01	394
20	PLTU Batubara	21	0.01	0
		32,757,938	12.07	27,497,092

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Perhitungan DD fungsi lindung adalah $27.497.092/32.757.938$ atau sebesar 0,84, sehingga dapat dikatakan bahwa DDL Provinsi Papua berada pada kondisi sangat baik. Hal ini juga terlihat kondisi yang masih baik dari lanskap hutan utuh (Intact Forest Landscape/IFL) Provinsi Papua.

Tabel 2.78. Perhitungan luas dan Proyeksi tutupan/penggunaan lahan

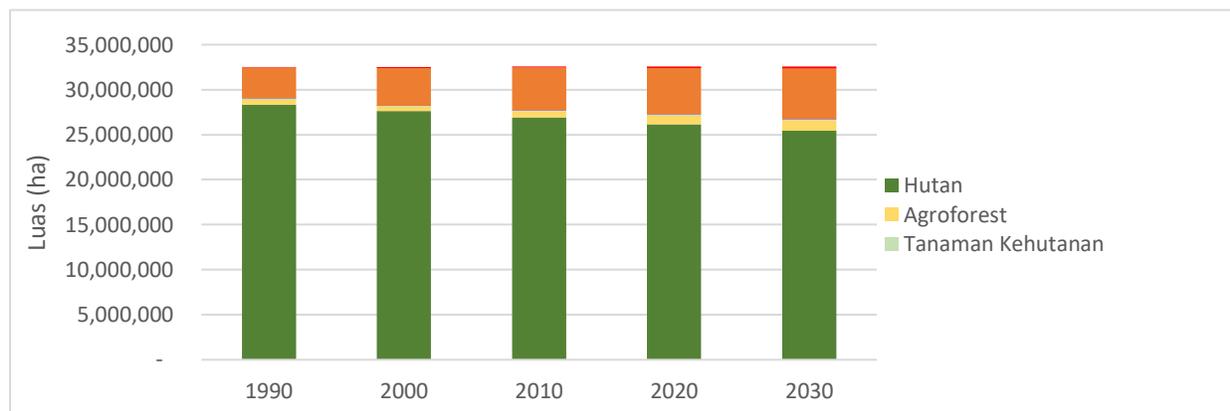
Kategori Penggunaan Lahan	Luas (ha)				
	1990	2000	2010	2020	2030
Hutan	28,347,725	27,600,738	26,900,850	26,182,681	25,466,538
Agroforest	507,350	520,000	718,075	924,888	1,114,669
Tanaman Kehutanan	183,538	85,606	81,750	94,431	108,600
Kelapa Sawit	381	37,894	39,806	51,456	64,363
Lahan belum termanfaatkan	3,411,413	4,171,788	4,721,394	5,159,263	5,598,994
Permukiman	75,763	76,638	116,356	160,438	207,544
Total	32,526,169	32,492,663	32,578,231	32,573,156	32,560,706

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Jika dilihat kondisi tutupan lahan Provinsi Papua secara historis berdasarkan hasil analisis Citra Satelit Landsat dari kegiatan Penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi

Hijau Provinsi Papua Tahun 2018/2019 didapatkan bahwa terdapat perubahan luas penggunaan lahan yang signifikan sebagaimana pada Tabel 2.77 dan Gambar 2.154.

Gambar 2.154. Perubahan Tutupan/Penggunaan Lahan 1990-2010 dan Proyeksi Tahun 2020-2030



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

2.6.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam melakukan analisa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Papua, Pokja KLHS RPJMD melakukan identifikasi capaian atas indikator TPB yang disesuaikan dengan target yang ada pada RPJMD Papua 2013-2018. Selain itu, Pokja KLHS RPJMD juga melakukan pengukuran data capaian pembangunan di Provinsi Papua 2013-2017 terhadap indikator TPB Nasional sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang berjumlah 236 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi. Pada pengukuran capaian pembangunan Provinsi Papua 2013-2017 terhadap target Nasional, ada beberapa indikator yang tidak bisa diukur secara langsung terhadap Nasional, disebabkan indikator tersebut merupakan indikator skala nasional (Khusus Target Nasional) yang dikontribusikan dari masing-masing Provinsi yang ada di Indonesia dengan target yang berbeda-beda.

Berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan di Provinsi Papua, terdapat 236 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan pedoman penilaian tujuan

pembangunan berkelanjutan, penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB akan dijabarkan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional;
3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan tidak ada data (termasuk indikator TPB yang berbeda satuan pengukuran; indikator yang menjadi target khusus Nasional)

Dari total indikator TPB tersebut, yang sudah dilaksanakan sebanyak 87 indikator (36,9%) terdiri dari 33 indikator (14,0%) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai, 54 indikator (22,9%) yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai. Sementara 149 indikator (63,1%) belum dilaksanakan dan atau tidak ada data capaian, ada juga indikator yang tidak bisa dihitung karena menjadi khusus target Nasional. Hal ini menjadi catatan baik untuk Nasional maupun untuk Provinsi untuk terus mengevaluasi indikator capaian untuk pembangunan sebagai upaya yang dibutuhkan ke depan, serta pencatatan capaian pembangunan yang terus menerus mendokumentasikan database pembangunan secara lebih baik agar target daerah dan nasional dapat tercapai sesuai dengan kondisi riilnya.

Tabel 2.79. Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Status	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sudah dilaksanakan dan sudah tercapai	33	14,0%
2	Sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai	54	22,9%
3	Belum dilaksanakan dan tidak ada data ¹	149	63,1%
	Jumlah	236	100%

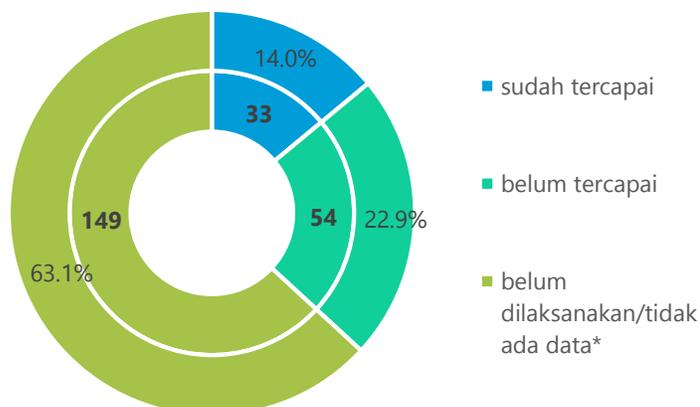
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Gambar 1 di bawah ini menunjukkan komposisi ketercapaian tersebut secara lebih jelas, dimana menunjukkan masih cukup banyak indikator TPB yang belum dilaksanakan dan atau tidak ada datanya yaitu mencapai 63,1%. Indikator-indikator tersebut perlu dijadikan

¹ Data indikator tersebut termasuk indikator TPB yang tidak ada data, data berbeda satuan pengukuran (dianggap tidak ada data); dan juga indikator yang menjadi target khusus Nasional. Target Nasional adalah target yang diukur berdasarkan akumulasi dari pencapaian masing-masing Provinsi.

perhatian sebagai upaya untuk mengukur dan mendokumentasikan data capaian dengan lebih baik lagi.

Gambar 2.155. Ketercapaian Indikator Papua terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

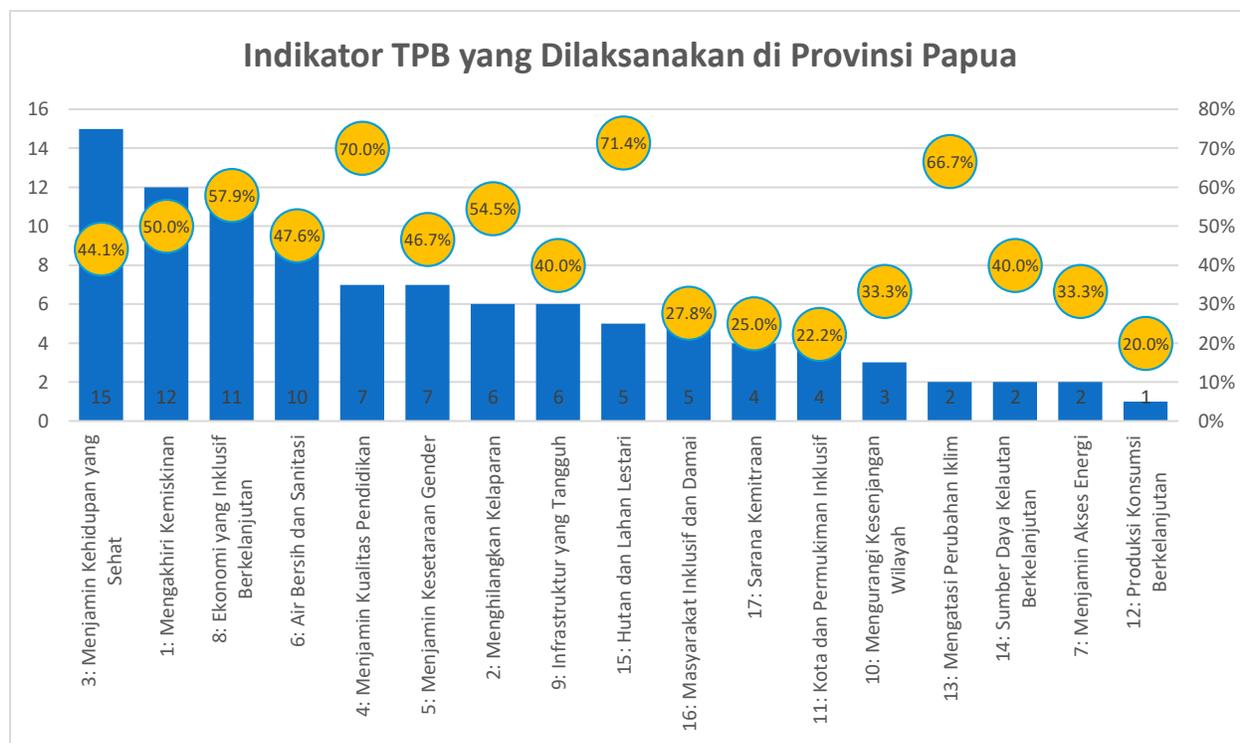
Sementara disisi yang lain, data analisis Pokja KLHS juga mengukur capaian indikator TPB yang relevan dengan indikator RPJMD dibandingkan dengan antara target dan capaian dari RPJMD Provinsi Papua 2013-2018, hasil ini menjadi penting sebagai evaluasi internal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua. Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB yang relevan dengan RPJMD sebanyak 102 indikator. Dari 102 indikator tersebut dibuat 4 kategorisasi, sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target daerah;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target daerah;
3. Indikator TPB ada data, tetapi belum menjadi target daerah;
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan atau tidak ada data;

Dari 102 indikator tersebut, sebanyak 36 indikator (35,3%) yang sudah dilaksanakan. Dari 36 indikator yang sudah dilaksanakan yakni; indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 14 indikator (13,7%), dan indikator yang

sudah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 22 indikator (21,6%). Selain itu, sebanyak 27 indikator (26,5%) yang memiliki data tetapi belum menjadi target di RPJMD. Sementara ada 39 indikator (38,2%) belum atau tidak ada datanya. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Papua untuk mengevaluasi kembali efektivitas capaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu masih ada beberapa data yang belum dikumpulkan untuk menilai capaian pembangunan Provinsi Papua. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan perlunya mengcapture data dan mengkompilasi data capaian tersebut untuk mengevaluasi dari indikator capaian yang dilaksanakan.

Gambar 2.156. Gambar 2. Indikator TPB yang Dilaksanakan di Provinsi Papua



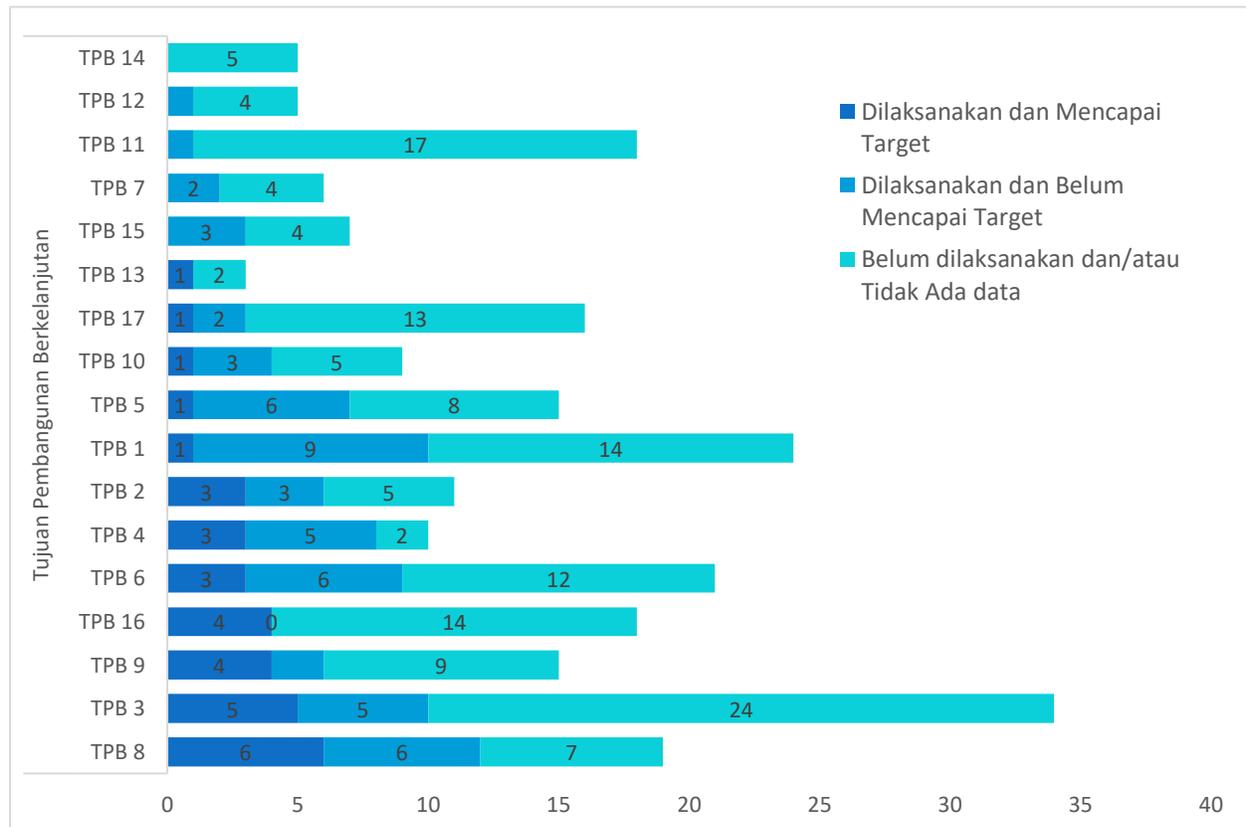
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Dari 102 indikator yang ada dalam RPJMD Provinsi Papua sebagaimana Gambar 2 diatas, terdapat 6 TPB yang sudah dilaksanakan lebih dari 50% indikator di masing-masing TPB, yaitu TPB 15: Hutan dan Lahan yang Lestari, TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan, TPB 13: Mengatasi Perubahan Iklim, TPB 8: Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, TPB 2: Menghilangkan Kelaparan dan TPB 1: Mengakhiri Kemiskinan. Sementara dari sisi jumlah

indikator yang paling banyak adalah TPB 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan yang paling sedikit adalah TPB 12: Produksi Konsumsi Berkelanjutan.

Hasil rekapitulasi analisa TPB terhadap target Nasional yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai, indikator yang sudah dilaksanakan tetapi masih belum tercapai, serta indikator yang belum dilaksanakan dan/atau indikator yang tidak ada datanya berdasarkan masing-masing TPB ditampilkan seperti Gambar 3 dibawah ini. Secara proporsi indikator yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai secara berurutan dari yang paling tinggi adalah indikator TPB 1, 6, 5, 8, 4, 3. Sementara itu masih banyak juga indikator TPB yang belum dilaksanakan dan/atau tidak ada datanya, diantaranya adalah TPB 11, 12, 14, 16, 9, 7, 15, 13. Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian untuk penyusunan RPJMD Papua 2019-2023 ke depan, supaya indikator tersebut dapat diukur dan dikompilasi dengan baik sesuai dengan arah kebutuhan pembangunan di Papua.

Gambar 2.157. Ketercapaian Indikator TPB di Provinsi Papua



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Berdasarkan analisis secara keseluruhan yang mengacu pada pembagian kategori di atas, rincian dan total indikator masing masing dapat dilihat pada Tabel 2.79 di bawah ini.

Tabel 2.80. Rekapitulasi Analisis Ketercapaian Indikator TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan/atau Tidak Ada data
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	1	9	14
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	3	3	5
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	5	5	24
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	10	3	5	2
Tujuan 5: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	15	1	6	8
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	21	3	6	12
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	6	0	2	4
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	6	6	7
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	15	4	2	9
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	9	1	3	5
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	18	0	1	17
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	0	1	4
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3	1	0	2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan/atau Tidak Ada data
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	5	0	0	5
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	7	0	3	4
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	18	4	0	14
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16	1	2	13
JUMLAH	236	33	54	149

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

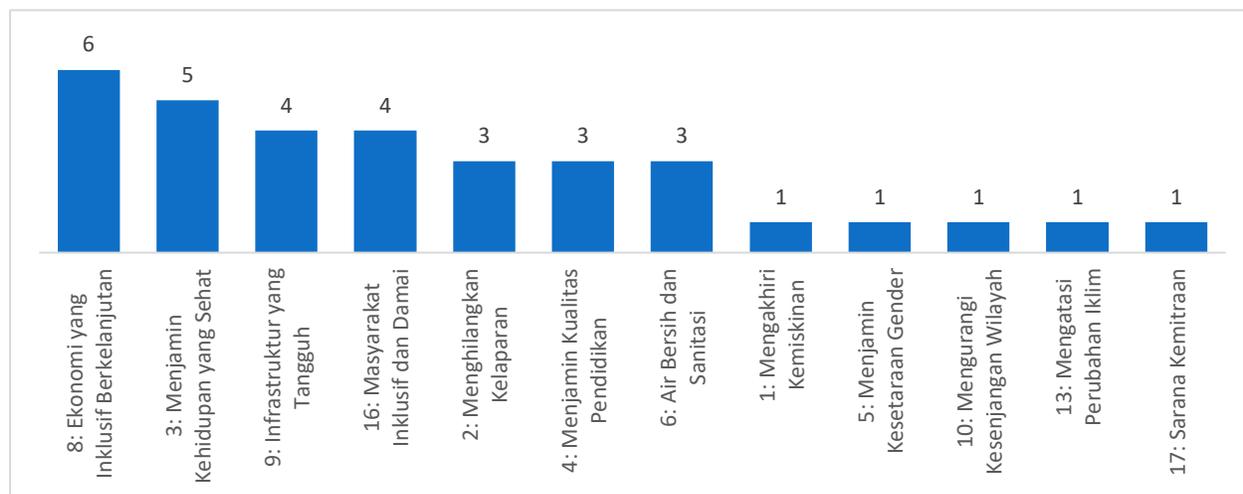
Pada bagian selanjutnya di bawah ini akan diuraikan masing-masing ketercapaian indikator TPB di Provinsi Papua secara lebih detail.

2.6.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

Secara keseluruhan ada 33 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target di Provinsi Papua atau 14,0% dari keseluruhan indikator TPB terhadap indikator Nasional yang menjadi kewenangan Provinsi. Indikator tersebut berada pada 12 TPB yang berbeda dengan jangkauan jumlah indikator yang tercapai antara 1 sampai 6 indikator. Indikator yang paling tinggi ketercapaiannya adalah nomor 8 yaitu untuk ekonomi inklusif yang berkelanjutan, seperti kunjungan wisatawan, usia muda yang mengikuti pelatihan, tingkat setengah pengangguran dan indikator usaha mikro kecil menengah (UMKM). Diikuti oleh urutan ke dua yaitu TPB 3, 9 dan 16 untuk isu kesehatan, infrastruktur dan hukum dan tata kelola. Berikut gambar sebaran indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target.

Meskipun sudah tercapai hasil tersebut masih sangat relative, karena sebagian besar capaian dalam target Nasional tidak sepenuhnya memiliki benchmark yang jelas, hanya disebutkan indikator “meningkat” atau indikator “menurun”.

Gambar 2.158. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sudah Tercapai



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat dikatakan bahwa ketercapaian Provinsi Papua paling tinggi ada pada ekonomi kecil menengah, dan isu kesehatan seperti AKI dan AKB, isu infrastruktur dermaga dan telekomunikasi seperti jumlah dermaga dan akses individu terhadap telepon seluler. Disusul isu tata kelola seperti opini BPK, nilai SAKIP terhadap OPD, dan keterwakilan perempuan. Meskipun demikian, masih banyak indikator lainnya dari TPB yang sudah tercapai yang masih perlu mendapatkan perhatian serius, karena capaian tersebut hanya 19% per masing-masing TPB tersebut, selain itu masih ada indikator dalam 5 TPB (seperti TPB 7, 11, 12, 14, dan 15) yang belum tercapai sama sekali. Selain itu, hitungan capaian di atas masih didasarkan pada jumlah capaian indikator saja, namun secara proporsi masih sangat sedikit. Jumlah indikator di masing-masing TPB tidak berimbang, dan perlu dilihat secara proporsional.

Dalam pencapaian kesejahteraan manusia, TPB menempatkan kondisi lingkungan (biosphere) sebagai dasar untuk menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Artinya jika kondisi lingkungan yang sehat dan bersih dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, yang kemudian akan mendorong

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator biosphere yang perlu diperhatikan adalah TPB 13; mengatasi perubahan iklim, TPB 14; Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan, TPB 15; Hutan dan Lahan Lestari, dan TPB 6; Air Bersih dan Sanitasi yang Sehat.

Berikut target dan indikator yang sudah tercapai dijabarkan pada tabel 2.80 berikut ini:

Tabel 2.81. Rekapitulasi Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai Target

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
1	Tanpa Kemiskinan	Meningkat menjadi 63%.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Cakupan imunisasi dasar	71,27	63,35	60,57	66,83
2	Tanpa Kelaparan	Menurun menjadi 17%	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi balita gizi kurang		16,2	11,9	12,8
2	Tanpa Kelaparan	Menurun menjadi 28%	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.			26,5	25,0	24,3
2	Tanpa Kelaparan	Meningkat	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkatkan cadangan pangan daerah 200 ton		20,9	64,91	105
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 306	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	422	235	380	289
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	8	44	8	7
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 245	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Cakupan penemuan penderita baru TB Paru BTA (+)		217	260	68
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun menjadi 9,91%	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.		2,78	2,63	

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menurun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		26,67	24,04	
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkat	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			17,03	23,09	
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	78,36	78,56	78,66	78,83
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkat	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			3388	3721

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
5	Kesetaraan Gender	Meningkat	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persentase penduduk +5 thn menggunakan telepon seluler		32,04	34,24	
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Meningkat	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		11	4	21	28
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Meningkat	Kualitas air danau.	Indeks kualitas Air	54,67	80,00	76,00	77,33
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Meningkat	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks kualitas Air	54,67	80,00	76,00	77,33
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	Rasio penduduk yang bekerja	96,56	96,01	96,65	96,38
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	25,0%	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Cakupan jumlah UMKM yang di bina oleh Pemerintah				47.977
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Upah rata-rata per jam pekerja.			18.589	22.191	
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Menurun	Tingkat setengah pengangguran.			11,68	13,07	11,25

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).			15,42	16,53	16,35
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	Meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah Kunjungan Wisatawan		865.816	546.699	900.570
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Meningkat	Jumlah dermaga penyeberangan.	Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangn (ASDP)	20	21	22	22
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Menurun	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.		19.884	19.559	19.247	18.952
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Meningkat	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persentase penduduk +5 thn menggunakan telepon seluler		32,04	34,24	
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	Meningkat	Proporsi individu yang menggunakan internet			8,98	11,62	
10	Mengurangi Kesenjangan	Meningkat menjadi 87	Indeks Kebebasan Sipil.		85,69	82,72	92,15	
13	Penanganan Perubahan Iklim	Ada	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Serapan GRK (Gg CO2eq)	110.807	81.192	117.537	107.633

No TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR TPB	INDIKATOR RPJMD	CAPAIAN			
					2014	2015	2016	2017
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Menurun	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.			0,16	0,12	
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persentase OPD dengan nilai SAKIP "B"		55,69	61,97	65,25
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	Meningkat	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Proporsi perempuan di DPRP		6,79	6,79	14,55
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Meningkat	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Proporsi individu yang menggunakan internet.		8,98	11,62	

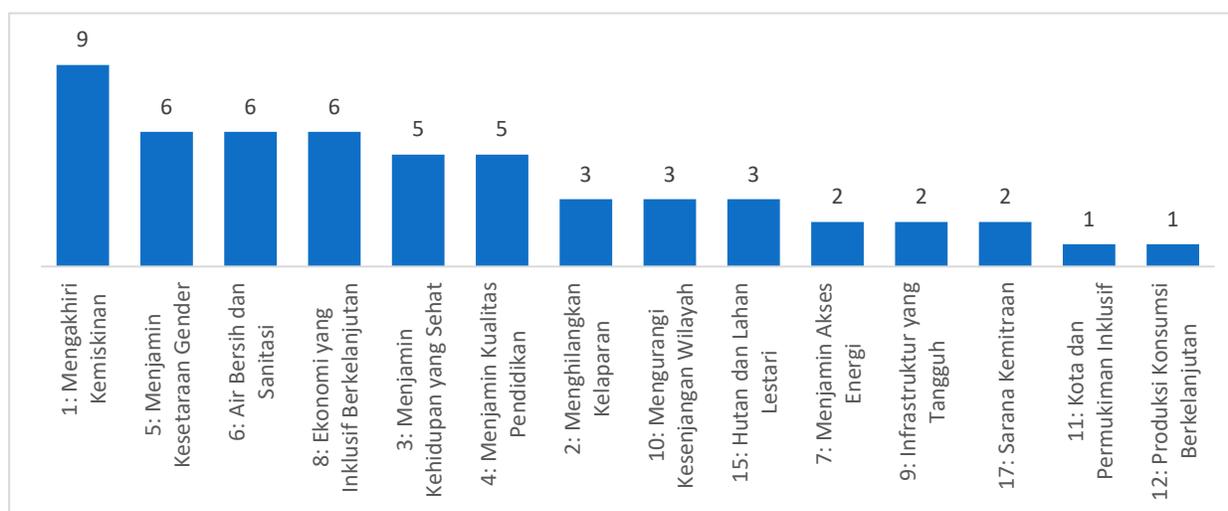
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Catatan: Tidak semua indikator TPB sama dengan indikator yang ada pada RPJMD Provinsi Papua, ada beberapa indikator TPB yang disesuaikan dengan indikator RPJMD Papua.

2.6.4. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target

Berikut adalah indikator-indikator yang masuk dalam kategori sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Indikator-indikator yang dijelaskan berikut sudah tercantum dalam program dan kegiatan OPD Provinsi Papua. Dalam melakukan analisis ketercapaian untuk indikator yang belum mencapai target nasional, dibutuhkan persandingan capaian dari pembangunan berdasarkan indikator target TPB nasional. Berikut indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:

Gambar 2.159. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Dari 54 indikator yang belum tercapai, terdapat 18 indikator yang berbasis lahan (ditunjukkan dengan blok warna abu-abu pada Tabel 4). Indikator yang belum tercapai dan berbasis lahan ini mencakup isu ketersediaan prasarana air baku dan sanitasi layak, pangan, elektrifikasi, lahan kritis, dan tutupan hutan. Melihat proporsi yang belum tercapai di masing-masing TPB masih cukup tinggi, dimana secara rata-rata 23% indikator pada masing-masing TPB belum tercapai. Secara proporsi TPB yang paling banyak belum tercapai secara berurutan adalah TPB 4, 15, 5, 1, 10, 7 dan 8 (di atas 30% dan maksimum 50%). Tabel 2.81 berikut merupakan analisis gap dari indikator yang belum tercapai.

Tabel 2.82. Gap Indikator yang Belum Tercapai

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	27,62%	Menurun menjadi 7-8%	-20,62%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	29.083	Menurun menjadi 2,8 juta	meningkat 2.724 KPM dari tahun sebelumnya
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		51,05%	Meningkat menjadi 70%	18,95%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	59.09%	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	40.91%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	33,06	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	66,94
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		14,44%	Meningkat menjadi 18,6 juta	perlu diturunkan
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah (SMA)	43,48	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).	48,15

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Rasio kepemilikan akta kelahiran	44%	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	33,34%
1: Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	55,82%	Meningkat menjadi 100%	44,18%
2: Menghilangkan Kelaparan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	32,8	Menurun	meningkat 4,9% dari tahun sebelumnya
2: Menghilangkan Kelaparan	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	24,65	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	25,35
2: Menghilangkan Kelaparan	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Konsumsi ikan (kh/kap/org):34,26; ekspor perikanan (US\$/tahun):18.903.551; jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikasi (unit/tahun) : 12 unit	42,89	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	49,61%
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Kn)	49,2	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	45,8
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses		51,05%	Meningkat menjadi 85 %	33,95%

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
		melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.				
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBA) (Jiwa/1000/KH)	8	Menurun	meskipun tidak ada gap tetapi tren cenderung meningkat
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka kejadian Malaria	46	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13.921
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		18,6%	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	-3,2%
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	67,94	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	23,69
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah	6,27	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	2,53
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	67,94	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	23,69
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	73,89	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	22,21

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	73,89%	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	meningkat 2,87% dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indeks Pemberdayaan Gender	63,69	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	menurun 1% dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	98	Menurun	meningkat 78 kasus dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		24,54	Menurun	meningkat 1,8% dari tahun sebelumnya
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	67,94%	Meningkat menjadi 91,63%	23,69%
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	10.61	Meningkat	menurun 2,12% dari tahun sebelumnya

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
5: Menjamin Kesetaraan Gender	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		25,13	Meningkat	menurun 2,75% dari tahun sebelumnya
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase penduduk berakses air minum	28,34	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	71,66
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Persentase Penduduk berakses air bersih	59,09	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	40,91
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	28,34	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	71,66
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	33,06	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	66,94
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		1.718	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	kurang 20% dari jumlah desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
6: Air Bersih dan Sanitasi	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	44.807.829	Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019.	1.019.217.062
7: Menjamin Akses Energi	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi	0.5582	Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019 (2014: 81,5%).	0.4078
7: Menjamin Akses Energi	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.		334,5	Meningkat menjadi 1.200 KWh	865,5
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB DP	4,64	Meningkat	menurun 4,5% dari tahun sebelumnya
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita (Rp juta)	4.557.869	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	442.131.021
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian	33,8	Meningkat	menurun 5,38% dari tahun sebelumnya
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	21,81	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	29,19
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	3,62	Menurun	meningkat 0,27% dari tahun sebelumnya
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	900.570	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	perlu ditingkatkan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
9: Infrastruktur yang Tangguh	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	47,1%	1000 Km (skala nasional)	perlu ditingkatkan
9: Infrastruktur yang Tangguh	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Jumlah pelabuhan strategis	3	24 pelabuhan (skala nasional)	perlu ditingkatkan
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indeks Gini	0,397	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	0,04
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	27,62	Menurun menjadi 7-8%	-20,62
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin (P0)	0.2762	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	0.1362
11: Kota dan Permukiman Inklusif	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		49,35	Meningkat menjadi 80%	30,65
12: Produksi Konsumsi Berkelanjutan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		4,73	20 ton per hari (skala nasional)	15,27
15: Hutan dan Lahan Lestari	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indeks kualitas tutupan hutan	78.18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	perlu ditingkatkan
15: Hutan dan Lahan Lestari	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	14	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	perlu ditingkatkan
15: Hutan dan Lahan Lestari	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	44.807.829	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan	1.019.217.062

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Papua	Capaian (2017)	Target Nasional TPB	Gap
					Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	
17: Sarana Kemitraan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase PAD terhadap pendapatan	78.096.081	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	perlu ditingkatkan
17: Sarana Kemitraan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		0,05%	Di atas 12%	11,95%

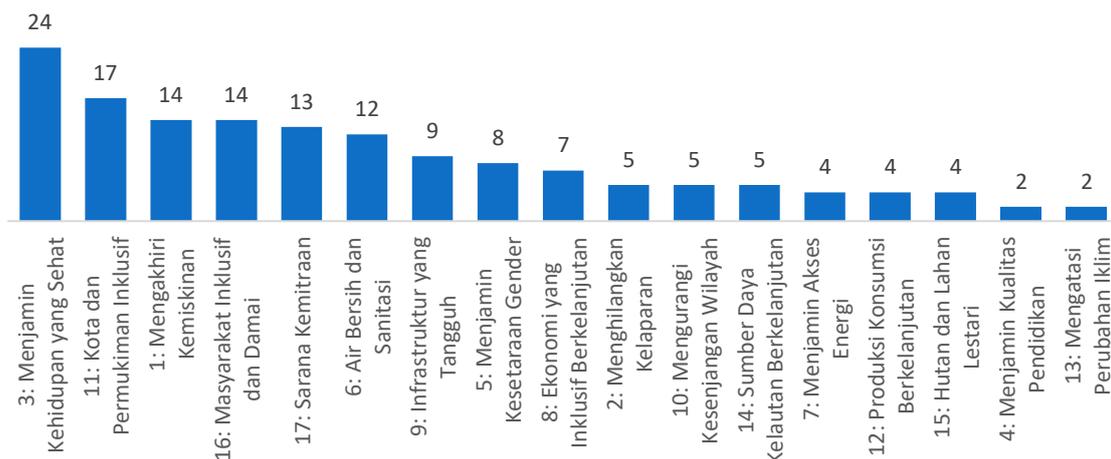
Sumber: Analisis GAP Pokja KLHS RPJMD 2019-2023 Provinsi Papua

Keterangan: Blok warna abu-abu merupakan indikator berbasis lahan, sementara blok warna hijau merupakan indikator dalam RPJMD baru.

2.6.5. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data

Dari 236 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan kewenangan provinsi, masih terdapat 149 indikator atau 63,1% yang belum dilaksanakan dan/atau tidak (belum) ada data yang dikumpulkan. Pada saat mengukur indikator pada kategoori ini ditemukan 17 indikator yang sebenar tidak bisa diukur secara langsung, karena indikator tersebut merupakan indikator secara Nasional atau target Nasional, meskipun demikian tim pokja berupaya untuk mengkonversi dari agregasi setiap provinsi, dan sebagian besar dikelompokan atau dianggap tidak ada datanya Secara jumlah indikator, diantara 17 TPB, ada 6 TPB yang lebih dari 10 indikator dimasing-masing TPB belum dilaksanakan; diantaranya yang paling banyak adalah TPB 3; Menjamin Kehidupan, TPB 11; Kota dan Permukiman Inklusif; TPB 1 mengurangi kemiskinan, TPB 16 hukum dan tata kelola, TPB 17 Sarana Kemitraan, seperti indikator statistik dan kepuasan masyarakat, serta TPB 12 yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi layak.

Gambar 2.160. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan/atau Tidak Ada Data



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

Namun, secara proporsional indikator TPB yang belum dilaksanakan dan/atau tidak ada datanya, secara berurutan adalah TPB 14 (semua 100% indikator tersebut belum dilaksanakan/tidak ada datanya), padahal TPB 14 merupakan isu penting karena masuk dalam kategori biosphere. Indikator lainnya yang masih banyak belum dilaksanakan atau belum ada datanya adalah 11, 17, 12, 16, 3, 7, 13, dan 9 (antara 60-

80% indikator belum dilaksanakan). Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian untuk penyusunan RPJMD Papua 2019-2023 ke depan, supaya dalam diukur dan dilaksanakan.

Tabel 2.83. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan atau Tidak Ada Data

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
1: Mengakhiri Kemiskinan	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a) 1.3.1.(b) 1.3.1.(c) Jumlah: 3 indikator
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* 1.5.1.(a) 1.5.1.(b) 1.5.1.(c) 1.5.1.(d) 1.5.1.(e) 1.5.2.(a) Jumlah: 7 indikator
	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.5.3* 1.a.1* 1.a.2* Jumlah: 3 indikator
2: Menghilangkan Kelaparan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* 2.1.2* 2.1.2.(a) Jumlah: 3 indikator
	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2* 2.2.2.(a) Jumlah: 2 indikator
3: Menjamin Kehidupan yang Sehat	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2* 3.2.2.(b) Jumlah: 2 Indikator
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) 3.3.3.(a) 3.3.4.(a) 3.3.5* 3.3.5.(a) 3.3.5.(b) Jumlah: 6 indikator
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a) 3.4.1.(b) 3.4.2* 3.4.2.(a) Jumlah: 4 indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e) 3.5.2* Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* 3.7.1.(a) 3.7.1.(b) 3.7.2* 3.7.2.(a) Jumlah: 5 indikator
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2* 3.8.2.(a) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekecualian untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) 3.c.1* Jumlah: 2 indikator
4: Menjamin Kualitas Pendidikan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(c) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Jumlah: 1 indikator
5: Menjamin Kesetaraan Gender	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a) 5.2.2* 5.2.2.(a) Jumlah: 3 indikator
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a) 5.3.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2* Jumlah: 1 indikator
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a) 5.6.1.(b) Jumlah: 2 indikator
6: Air Bersih dan Sanitasi	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a) 6.2.1.(e) 6.2.1.(f) Jumlah: 3 indikator
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia	6.3.1.(a) Jumlah: 1 indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a) 6.4.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a) 6.5.1.(c) 6.5.1.(e) 6.5.1.(f) 6.5.1.(g) Jumlah: 5 indikator
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(e) Jumlah: 1 indikator
7: Menjamin Akses Energi	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a) 7.1.2.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1* Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1* Jumlah: 1 indikator
8: Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1* 8.9.1.(c) 8.9.2* Jumlah: 3 indikator
	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* 8.10.1.(a) 8.10.1.(b) Jumlah: 3 indikator
9: Infrastruktur yang Tangguh	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c) Jumlah: 1 indikator
	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1* 9.2.1.(a) 9.2.2* Jumlah: 3 indikator
	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* 9.3.2* Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1(a) Jumlah: 1 indikator
	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama	9.5.1* Jumlah: 1 indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	
	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* Jumlah: 1 indikator
10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b) 10.1.1.(e) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1* Jumlah: 1 indikator
	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d) Jumlah: 1 indikator
	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b) Jumlah: 1 indikator
11: Kota dan Permukiman Inklusif	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b) 11.1.1.(c) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) 11.2.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a) 11.3.1.(b) 11.3.2.(a) 11.3.2.(b) Jumlah: 4 indikator
	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* 11.5.1.(a) 11.5.1.(b) 11.5.1.(c) 11.5.2.(a) Jumlah: 5 indikator
	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko	11.b.2* Jumlah: 1 indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
	bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	
12: Produksi Konsumsi Berkelanjutan	<p>Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</p> <p>Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p>	<p>12.4.2.(a) Jumlah: 1 indikator</p> <p>12.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator</p> <p>12.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator</p> <p>12.8.1.(a) Jumlah: 1 indikator</p>
13: Mengatasi Perubahan Iklim	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	<p>13.1.1* 13.1.2* Jumlah: 2 indikator</p>
14: Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan	<p>Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</p> <p>Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.</p> <p>Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.</p>	<p>14.2.1.(b) Jumlah: 1 indikator</p> <p>14.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator</p> <p>14.b.1* 14.b.1.(a) 14.b.1.(b) Jumlah: 3 indikator</p>
15: Hutan dan Lahan Lestari	<p>Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.</p> <p>Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.</p> <p>Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</p>	<p>15.2.1.(a) 15.2.1.(b) Jumlah: 2 indikator</p> <p>15.6.1* Jumlah: 1 indikator</p> <p>15.9.1.(a) Jumlah: 1 indikator</p>
16: Masyarakat Inklusif dan Damai	<p>Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.</p> <p>Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p>	<p>16.1.1.(a) 16.1.2.(a) 16.1.4* Jumlah: 3 indikator</p> <p>16.2.1.(a) 16.2.1.(b) 16.2.3.(a)</p>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Jumlah Indikator
		Jumlah: 3 indikator
	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* 16.6.1.(c) 16.6.1.(d) 16.6.2.(a) Jumlah: 4 indikator
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c) Jumlah: 1 indikator
	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a) Jumlah: 1 indikator
17: Sarana Kemitraan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2* Jumlah: 1 indikator
	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b) 17.6.2.(c) Jumlah: 2 indikator
	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) 17.17.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) 17.18.1.(b) 17.18.1.(c) 17.18.1.(d) Jumlah: 4 indikator
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d) Jumlah: 3 indikator

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023(data diolah)

2.7. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

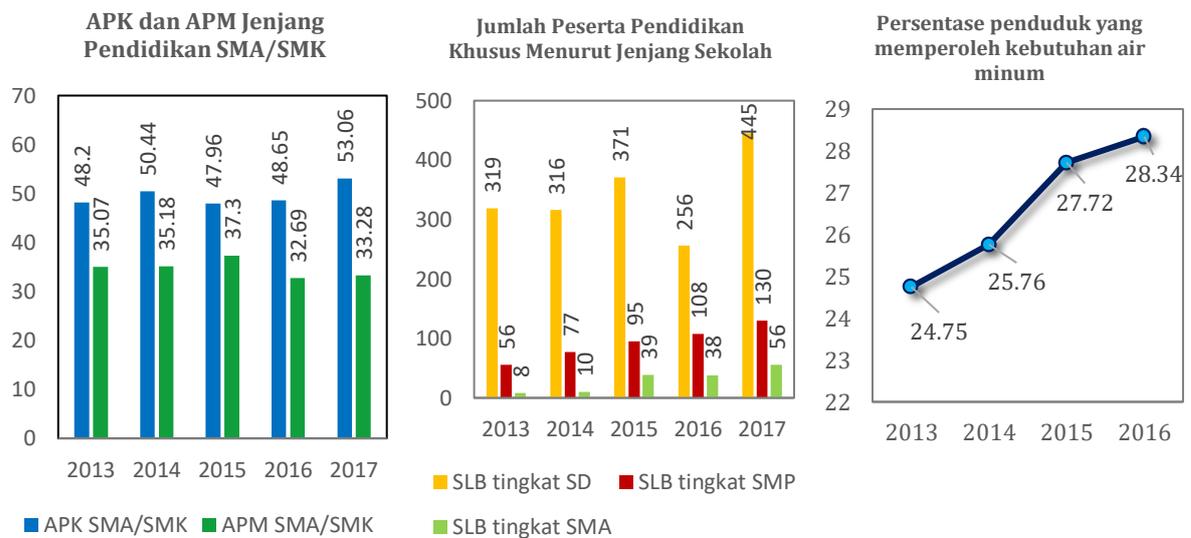
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM (Standar Pelayanan Minimal) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Adapun operasionalnya secara umum di jabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Menurut PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus memenuhi SPM terdiri atas : (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Dimana menurut ketentuan yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pengaturan tentang SPM untuk daerah provinsi terdiri atas: (a) pendidikan menengah; (b) pendidikan khusus; (c) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; (d) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi; (e) pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; (f) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota; (g) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

bencana daerah provinsi; (h) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; (i) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi; (j) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; (k) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; (l) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; (m) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan (n) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Implementasi SPM pada Pemerintah Provinsi Papua jika merujuk kepada kedua peraturan tersebut di atas dapat dikatakan masih belum memuaskan. Karena PP dan Permendagri tersebut dikeluarkan setelah 4 tahun berjalan pelaksanaan RPJMD Papua Periode 2013-2018, sehingga capaian SPM yang mengacu pada kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat di laporkan. Dalam hal ini yang dapat dilaporkan capaiannya hanya pada pelayanan dasar pendidikan dengan jenis Pendidikan Menengah dan pelayanan dasar pekerjaan umum dengan jenis pelayanan berupa Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Gambar 2.161. Capaian SPM Pemerintah Provinsi Papua 2013-2017



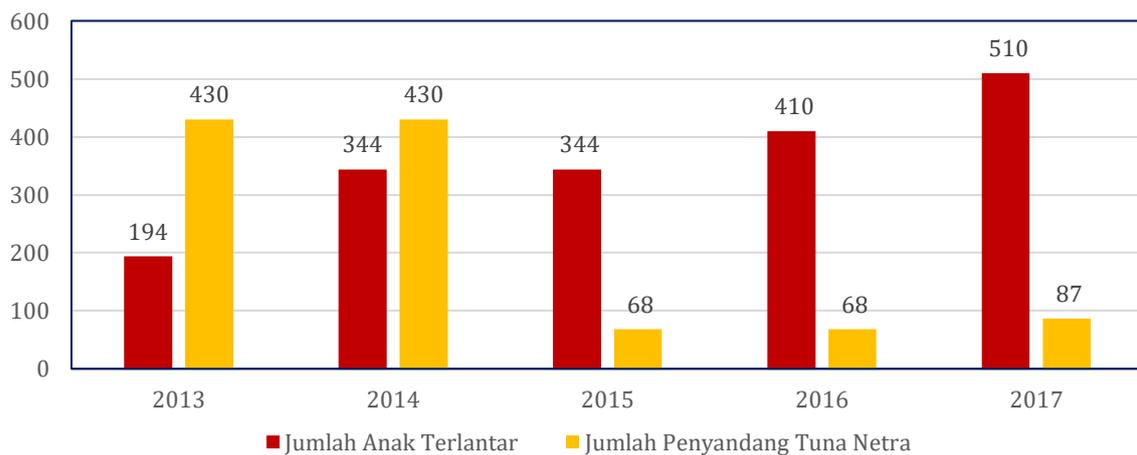
Sumber : Kemendibud RI, 2019 dan BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.161 di atas, terlihat jelas bahwa capaian SPM pelayanan dasar pendidikan dan pekerjaan umum pada pemerintah Provinsi Papua belum memenuhi target. Capaian SPM kedua pelayanan dasar ini selama periode 2013-2018

masih dibawah 100% setiap tahunnya, tepatnya antara 24% - 53%. Ini berarti sepanjang tahun itu, pemerintah Papua masih belum optimal memenuhi target capaian SPM sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain pada pelayanan pendidikan dan pekerjaan umum, pemerintah provinsi harus bekerja keras juga untuk melakukan pelayanan rehabilitasi terhadap anak terlantar dan penyandang disabilitas terlantar. Karena berdasarkan data tahun 2013-2017, terindikasi jumlah anak terlantar di Provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan rata-rata 27,33% per tahun. Sementara penyandang tuna netra yang terlantar mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015, namun kembali meningkat sepanjang tahun 2015-2017 meskipun tidak sebesar periode 2013-2015 sebelumnya. Sampai dengan tahun 2017 jumlah anak terlantar di Provinsi Papua mencapai 510 anak, sedangkan jumlah penyandang tuna netra terlantar sebanyak 87 orang.

Gambar 2.162. Anak Terlantar Dan Penyandang Tuna Netra Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Beranjak pada kecenderungan capaian SPM yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua selama ini, dan ketentuan besaran SPM yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah provinsi sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, maka berikut ini disampaikan target pencapaian SPM Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019-2023.

Tabel 2.84. Target Capaian SPM Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Urusan	No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Operasional	Target Capaian Per Tahun					Target Capaian	Batas Waktu Capaian
					2019	2020	2021	2022	2023		
Pendidikan	1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	APK SMA/SMK	65	80	100	100	100	100%	Setiap Tahun
				APM SMA/SMK	49	60	75	85	100	100%	
	2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 -18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	APK peserta didik SLB tingkat SD (orang)	20	50	80	100	100	100%	Setiap Tahun
				APK peserta didik SLB tingkat SMP (orang)	20	50	80	100	100	100%	
				APK peserta didik SLB tingkat SMA (orang)	20	50	80	100	100	100%	
	Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana	20	60	80	100	100	100%
2		Pelayanan kesehatan bagi penduduk	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB	80	100	100	100	100	100%	
Pekerjaan Umum	1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum	50	70	90	100	100	100%	Setiap Tahun
	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	25	50	75	100	100	100%	
Perumahan	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase penduduk korban bencana yang	40	60	80	100	100	100%	Setiap Tahun

Urusan	No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Indikator Operasional	Target Capaian Per Tahun					Target Capaian	Batas Waktu Capaian
					2019	2020	2021	2022	2023		
		layak huni bagi korban bencana provinsi		memperoleh rumah layak huni							
	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100%	Setiap Tahun
TRANTIBUM LINMAS	1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	100	100	100	100	100	100%	Setiap Tahun
Sosial	1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Persentase penduduk disabilitas telantar yang memperoleh layanan	40	60	80	100	100	100%	Setiap Tahun
	2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan	40	60	80	100	100	100%	Setiap Tahun

Tabel 2.85. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013-2017

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah								
1.1.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.55	3.65	7.35	9.14	4.64	8.00	<	
1.1.1.2.	Inflasi	6.48	7.98	2.79	4.13	2.41	2.5	>	
1.1.1.3.	IHK	143.68	120.2	123.55	126.15	129.87	110	>	
1.1.1.4.	IKK	189	191.86	247.91	239.98	229.82	230	>	
1.1.1.5.	Pendapatan Per Kapita	40.51	43.73	47.73	54.73	58.68	30	>	
1.1.1.6.	Gini Ratio	0.44	0.46	0.39	0.40	0.40	0.30	<	
1.1.1.7.	Distribusi Pendapatan Menurut Kategori Bank Dunia								
	40% berpendapatan rendah	20.92	21.21	20.05	14.36		30	<	
	40% berpendapatan sedang	37.38	37.45	38.2	42.38		40	<	
	20% berpendapatan tinggi	41.68	41.34	41.75	43.26		30	<	
1.1.1.8.	Ketimpangan Pendapatan Berdasarkan Angka Williamson Index (tanpa sektor pertambangan)	0.79	0.81	0.81	0.82		0.45	<	
1.2.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.2.1.	Kemiskinan								
1.2.1.1.	Jumlah Penduduk Miskin (1,000 Jiwa)	960.56	864.11	859.15	911.33	897.69	920	>	
1.2.1.2.	Tingkat kemiskinan	31.52	27.8	28.4	28.4	27.76	28	>	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.2.1.3.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	6.56	6.42	8.82	9.37	7.5		8.5	>
1.2.1.4.	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)	2.01	2.18	3.78	4.19	2.82		3	>
1.2.1.5.	Indeks pembangunan manusia	56.25	56.75	57.25	58.05	59.09		60	<
1.2.1.5.	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan	6,394	6,416	6,469	6,637	6,996		6500	>
1.3.	Fokus Pendidikan								
	Angka Melek Huruf	75.83	75.92	70.83	71.02	73.89		86	<
	Rata-Rata Lama Sekolah	5.74	5.76	5.99	6.15	6.27		7.8	<
	Harapan Lama Sekolah	9.58	9.94	9.95	10.23	10.54		12	<
1.4	Fokus Kesehatan								
	Angka Harapan Hidup	64.76	64.84	65.09	65.12	65.14		68.36	<
	Pervalensi Balita Gizi Buruk			5.2	3.1	6.5		1.75	<
1.5	Fokus Ketenagakerjaan								
	Angkatan Kerja (jiwa)	1,688,876	1,675,113	1,741,945	1,722,162	1,762,841		1,352,066	>
	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	476,194	454,291	447,285	523,300	528,270		345,727	<
	Bekerja	1,634,332	1,617,437	1,672,480	1,644,485	1,699,071		1,500,000	>
	Pengangguran	54,544	57,676	69,465	57,677	63,770		58,950	<
	Laju Pertumbuhan yang Bekerja (%)	6.96	-1.03	3.4	-1.67	3.32		2.5	<
	Daya Serap Tenaga Kerja (%)	96.77	96.56	96.01	95.49	96.38		96	>
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78.01	78.67	79.57	74.13	77.3		77.28	=
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.23	3.44	3.99	3.35	3.96		4.36	>
	Produktifitas Regional	71.66	75.05	77.92	85.44	87.59			
1.6	Fokus Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi								

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I					51.74		50	>
	Penyandang masalah kesejahteraan	181,271	171,047	464,281	470,722			450	>
	Indeks Kebahagiaan		60.97			67.52		65	>
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	88.1	85.9	85.7	85.2	87.6		88	<
	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2,078	2,130	2,512	2,448	2,448		2500	<
	Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)	51.8	51.7	55.7	54.3	59.7		55	>
	Ketersediaan Cadangan Pangan	23.75	21.35	36.25	81.4	105		150	<
	Persentase Penduduk Rawan Pangan	70.67	66.68	58.12	59.96			60	>
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	9.01	9.2	8.9	8.19	8.07		8	
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1.47	1.53	1.52	1.42	1.38		0.8	
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	43.56	40.84	40.6	42.08	41.78		45	>
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		4.84	4.92	4.87	4.93		5	<
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4.83	4.87	4.8	4.5	4.53		5	<
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	7.71	7.98	8.04	7.88	8		8	=
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94		3	<
2)	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Pengeluaran Konsumsi per kapita (juta rupiah)	6.39	6.42	6.47	6.64	7.00		7.25	=
	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	41.42	39.66	42.85	43.88	40.81		42	>
	Nilai Tukar Petani	98.57	95.8	96.08	94.95	93.26		100	<
	Produktivitas total daerah	71.66	75.05	77.92	85.44	87.59		85	>

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB	-9.9	4.96	-0.85	2.45	1.22		1.5	>
	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	50.32	43.99	47.63	44.5	49.41		50	<
	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	200.82	-	264.63	248.13	197.11		200	>
	Rasio Ketergantungan	49.63	48.51	47.51	46.57	45.69		45	>
	Angka Kriminalitas yang tertangani	48.89	50.29	51.49	64			50	>
3)	ASPEK PELAYANAN UMUM								
3.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar								
3.1.1.	Pendidikan								
	Angka Partisipasi Sekolah								
	7-12	75.51	80.69	81.04	81.11	81.8		80	>
	13-15	73.27	78.07	78.14	78.86	79.09		90	<
	16-18	53.28	61.63	61.96	62.07	63.35		70	<
	Angka Partisipasi Kasar (%)								
	SD	86.39	90.67	96.15	94.74	92.94		95	<
	SMP	64.96	71.02	73.59	72.07	82.2		100	<
	SMA	53.47	61.53	66.97	66.85	67.94		70	<
	Angka partisipasi Murni (%)								
	SD	72.9	78.36	78.56	78.66	78.83		75	>
	SMP	45.88	53.68	54.21	54.26	56.13		60	<
	SMA	36.53	43.11	43.22	43.27	43.48		45	<
	Angka Putus Sekolah (%)								
	SD					0.56		0.6	=

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	SMP					1.21		1	=
	SMA					0.93		0.95	>
	Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP (%)			75.11	83.33	86.17		90	<
	Angka Melanjutkan Sekolah SMP ke SMA (%)			85.82	91.9	88.53		90	<
	Jumlah Gedung Sekolah Dasar (unit)	2,829	2,982	2,415	2,277	2,474		2400	>
	Jumlah Gedung Sekolah Menengah Pertama (unit)	540	582	582	587	645		500	>
	Jumlah Gedung Sekolah Menengah Atas (unit)	197	202	212	211	225		210	>
	Jumlah Gedung Sekolah Menengah Kejuruan (unit)	93	94	117	130	131		120	>
	Jumlah Guru Sekolah Dasar (orang)	12,348	11,997	8,310	17,667	16,208		15000	>
	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (orang)	5,060	7,089	7,331	7,687	7,547		7500	>
	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (orang)	2,586	3,671	3,971	4,230	4,234		4000	>
	Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (orang)	2,214	3,077	2,502	2,869	2,860		2500	>
	Jumlah Murid Sekolah Dasar (siswa)	399,444	382,292	412,187	445,243	448,483		440000	<
	Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (siswa)	106,482	101,392	115,296	123,823	126,477		125000	
	Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (siswa)	49,252	48,514	53,851	59,126	61,786		50000	>
	Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan (siswa)	25,892	26,174	25,588	33,144	31,341		28000	>
	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar (guru per murid)		23.87	21.84	22.44	24.2		29.33	<
	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah (guru per murid)		11.07	12.27	13.22	13.13		12.5	>
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)								
	SD				54.94	58.89		70	<

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	SMP				84.36	87.21		80	>
	SMA				94.71	59.68		50	>
	Angka Melek Huruf Penduduk >15 tahun (%)			70.83	71.02	73.89		80	<
3.1.2.	Kesehatan								
	Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran hidup	54	8	44	8	7		32	>
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	410	422	235	380	289		250	<
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan				37.91	41.52		40	>
	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk				1.12			1.5	<
	Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk				16			20	>
	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	26.45	25.95	25.47	24.13			20	<
	Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk	243.53	238.92	234.49	1028.15			500	>
	Angka Penderita Malaria	42.65	29.57	31.93	45.85	59		50	>
	Penderita HIV/AIDS (jiwa)	15,823	19,202	22,123	26,973			20000	<
	Cakupan kunjungan K4 (%)	33.59	33.00	24.00	37.70	40.90		40	=
3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Panjang Jalan	3,563.57	1,452.13	2,957.56	2,957.64			5000	<
	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.00118	0.00047	0.00094	0.00092			0.00015	<
	Penduduk Bersakses Air bersih	42.37	43.55	46.76	38.47			50	<
	Penduduk Bersakses Air minum	24.75	25.76	27.72	28.34			40	<
	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	62.16	60.73	71.93	66.54	68.79		70	<

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk	22.45	22.02	24.65	23.76	26.63		25	>
3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
	Rasio Rumah Layak Huni per 100.000 Penduduk	5.41	129.41	127.8	112.8	57.52		60	<
3.1.5.	Lingkungan Hidup								
	Persentase Sampah yang Terangkut Ke TPA	12.33	11.97	11.31	10.69	10.03	9.38	20	<
	Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat	0.33	0.34	0.35	0.36	0.38	0.4	1	<
	Indeks Kualitas Air	58.00	54.67	80.00	76.00	77.33		75	>
	Indeks Kualitas Udara	88.67	84.24	84.24	89.6	90.91		80	>
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	97.28	97.44	79.35	79.17	78.18		75	>
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82.91	80.65	81.01	81.35	81.47		80	>
3.1.6.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	Jumlah Linmas			14,036	16,585	16,401		40000	<
	Jumlah Pol-PP Se Papua			2,140	2,630	3,236		5000	<
3.1.7.	Sosial								
	Jumlah Fakir Miskin	129,119	129,119	437,640	437,640	437,640		400000	
	Jumlah Anak Terlantar	194	344	344	410	510		600	
	Jumlah Lansia Terlantar	5376	5571	217	220	200			
	Jumlah Penyandang Tuna Netra	430	430	68	68	87			
	Jumlah Wanita Tuna Susila	234	1039	55	89	100			
	Jumlah Mantan Narapidana	468	652	20	30	70			

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Jumlah Pecandu Narkoba			336	200	400		200	=
3.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
3.2.1.	Tenaga Kerja								
	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun	69	139	134	9	24		10	<
	Tenaga Kerja yang Dilatih Berbasis Kompetensi	940	588	645	100	1,487		1000	=
	Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan	150	120	100	230	75		200	>
	Penduduk > 15 Tahun yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Keterampilan Kerja	620	628	545	100	100		100	=
3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	IPG	77.61	78.57	78.52	79.09	79.38		80	<
	IDG	57.22	64.21	63.69	64.73	61.89		70	<
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	41.11	41.11	41.11	41.11	42.25		50	<
	AMH Perempuan (%)								
	SD					78.36		80	<
	SMP					58.71		60	<
	SMA					40.91		50	<
	Jumlah KDRT	604	538	462	490			400	
	Jumlah kelompok binaan PKK	2,529	2,638	2,638	2,638			2500	>
	Jumlah PKK	5,615	5,089	6,298	7,724			5000	>
3.2.3.	Pangan								

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)	1823.36	1794.04	1989.61	2021.08	2115.09		2200	<
3.2.4.	Pertanahan								
	Data Peralihan Tanah				7,057	5,887		6000	=
3.2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran					37.76		60	<
	Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK					64.25		80	<
3.2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung								
	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah kampung (%)	40	50	60	60	70		80	<
	Tingkat tertib pengelolaan dokumen administrasi pemerintah kampung (%)	40	50	70	70	70		80	<
	Tingkat ketersediaan infrastruktur pedesaan (%)	20	25	30	30	40		30	>
	Tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan (%)	48	55	65	65	70		75	<
	Tingkat pelayanan pemerintah kampung terhadap masyarakat (%)	45	55	65	65	70		70	=
	Persentase kampung dan distrik berprestasi (%)	40	50	60	60	60		50	>
	Swadaya Masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat (%)	70	80	90	90	90		90	=
	Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / LPM (Kelompok)	2	2	2	2	2		10	<

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Persentase Dana Desa Terhadap APBD Provinsi	-	-	0.12	26.93	27.4		30	>
	Persentase Dana Desa Terhadap Dana OTSUS	-	-	29.01	62.74	63.86		30	>
	Persentase Dana Desa Terhadap APBK			58.67	89.63	76.98		70	>
	Persentase APBK Terhadap APBD Provinsi			20.69	30.05	35.59		30	>
	Persentase APBK Terhadap Dana OTSUS			49.45	70	82.97		50	>
3.2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.97	1.93	1.89	1.84	1.8		1.85	>
	Jumlah PUS yang tidak ber- KB	40,608	218,477	231,160	181,876	41,122		200000	<
3.2.8	Perhubungan								
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan (kendaraan/km)		391		214			350	<
3.2.9.	Komunikasi dan Informatika								
	Individu yang menggunakan telepon genggam (%)			32.04	34.24			50	<
	Individu yang menggunakan Internet (%)			8.98	11.62			20	<
3.2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
	Persentase Koperasi Aktif				52.48			65	<
3.2.11.	Penanaman Modal								
	Jumlah Investor	168	186	200	187			300	<
	Nilai Investasi	109,304,355	38,874,752	94,044,386	122,549,122			100,000,000	>
	Jumlah PMDN	66	78	78	87			200	<
	Jumlah PMA	102	108	122	126			100	>

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.12.	Kepemudaan dan Olah Raga								
	Jumlah klub olah raga	105	112	114	125	129	200	<	
	Jumlah Tenaga Keolahragaan	220	220	223	257	257	300	<	
	Jumlah Atlet Berprestasi	32	43	115	495	401	500	>	
	Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	24	25	31	36	42	60	<	
	Jumlah Organisasi Pemuda	43	43	44	47	47	50	<	
	Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	32	32	32	30	33	30	>	
	Organisasi pemuda yang aktif	32	32	32	32	32	30	>	
	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	45	45	45	30	115	100	>	
	Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	175	175	175	186	186	200	<	
	Jumlah Gedung olahraga	8	10	10	15	15	20	<	
	Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	175	175	175	176	200	<	
	Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta	80	75	75	75	75	80	<	
3.2.13.	Perpustakaan								
	Jumlah Perpustakaan	23	30	50	321		500	<	
	koleksi buku	67,539	67,955	69,594	73,279		100,000	<	
	Jumlah Kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	36,500	31,678	73,103	75,146		100,000	<	
3.2.14.	Kearsipan								

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku	3	30	15	24			50	<
3.3.	Layanan Urusan Pilihan								
3.3.1.	Pariwisata								
	Jumlah Objek Wisata	130	130	133	133			100	>
	Kunjungan tami WNI dan WNA	903,157	865,816	546,699	900,570			850,000	>
3.3.2	Pertanian								
	Produksi Komoditas Utama Pertanian (ton)	797,097	826,732	880,976	758,860	804,714		800,000	>
	Produktifitas Komoditas Utama Pertanian (ton/ha)	9.82	9.71	10.17	7.37	7.37		25	<
	Produksi Komoditas Utama Perkebunan (ton)	39,641	87,264	65,392	69,494	113,341		300,000	<
	Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan (ton/ha)	0.40	0.73	0.57	0.29	0.44		1	<
3.3.3.	Kehutanan								
	Luas Kawasan Hutan dan Perairan				32,757,059			32,757,059	=
	Produksi Kayu Hutan (m ³)	1,257,797,747	1,194,994,347	1,969,513,904	1,674,038,825	865,990,63		1,500,000	>
	Energi dan Sumber Daya Mineral								
	Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan	201,197	201,395	3,123,761	3,358,370			3,000,000	>
	Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara	17.5	18	18.5	19			50	<
	Jumlah cadangan Tembaga (Juta Ton Bijih)	27,212,454	26,573,754	25,953,054	25,296,354			25,296,354	=
	Jumlah cadangan Emas yang sudah diketahui (Juta Ton Bijih)	1651	1600	1549	1498			1,500	<

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (target akhir perencanaan RPJMD 2013-2018)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Produksi Tembaga (Juta Ton Bijih)	360,528	312,272	359,276	504,000			400,000	>
	Produksi Emas (Juta Ton Bijih)	34,200	36,000	39,000	33,800			40,000	<
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	45.52	47.32	53.17	50.9	55.82		60	<
3.3.4.	Perdagangan								
	Volume Ekspor Menurut Pelabuhan (Ton)	2,203,723	1,273,961	971,218	1,364,120			1,300,000	>
	Volume Impor Menurut Pelabuhan (Ton)	161,357	403,785	367,669	379,762			300,000	>
	Nilai Ekspor Papua (juta US\$)	2,728.00	1,529.70	2,007.50	2,008.10			1,500	>
	Nilai Impor Papua (juta US\$)	506.40	1,014.50	746.70	721.3			1,000	>
3.3.5.	Perindustrian								
	Jumlah Industri Kecil Menengah	2,290.00	2901	3428				5,000	<
	Produktifitas Industri	91.89	99.25	92.94				100	<
3.3.6.	Kelautan dan Perikanan								
	Jumlah Kapal Motor	1,315	3,872	2170	1671			3,500	<
	Jumah Perahu tak Bermotor	1,280	5,808	9,720	2,899			2,500	>
	Jumlah Perahu motor Tempel	4,358	1,317	1,549	1,525			1,500	>
	Jumlah Rumah Tangga Perikanan			232,157	233,563			200,000	>
	Produksi Perikanan Tangkap			11,091	7,403			10,000	>

Tabel 2.86. Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Provinsi Papua Periode Pelaksanaan Tahun 2013-2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.	Konflik SARA	Kasus	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	100	100	100	100	100	100	100	
		Penanganan Napsah	persen	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-
		Tingkat Aktivitas Keagamaan	Kegiatan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya masyarakat Papua yang berbudaya	Tingkat aktualisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Kegiatan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100	
		Dialog Lintas Budaya	Tingkat rutinitas	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin	Rutin	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum serta terjaganya ketertiban umum	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	-	21.4	23.3	23.6	20.8	-	20	-	93.00	83.50	82.00	96.00	-	96.00	
		Angka Kriminalitas yang tertangani	per 10.000 penduduk	-	-	4.95	5.54	6.58	-	20	-	-	175.27	172.28	167.12	-	167.12	
		Tingkat Konflik Horisontal (antar suku)	Kasus	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Pelanggaran Hukum dan HAM	Kasus	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	100	100	100	100	100	100	100	
	Kekerasan dalam rumah tangga	Kasus	550	383	515	-	-	-	350	42.86	90.57	52.86	-	-	-	52.86	
	Jumlah Korban Bencana Alam yang Tertangani	Orang	16	8	22	-	-	-	100	16	8	22	-	-	-	22.00	
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran melalui Lembaga Adat	Kasus	3,355	3,355	3,732	-	-	-	4,000	83.88	83.88	93.30	-	-	-	93.30
5	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	Presentase Pejabat Sturktural yang memenuhi Syarat Jabatan.	Persen	-	80.83	99.32	96.63	-	-	100	-	80.83	99.32	96.63	-	-	96.63
		Presentase Pejabat Fungsional yang sesuai kebutuhan.	Persen	-	26.35	70.79	-	-	-	100	-	26.35	70.79	-	-	-	70.79

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Nilai	D	C	C	C	B	B	B	35	75	75	75	100	100	100
	Rata-rata Kehadiran Pegawai		87.00	84.33	87.51	90.71	90.27	-	100	87.00	84.33	87.51	90.71	90.27	-	90.27
6	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	80	95	95	95	95	95	100	80.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95
	Persentasi Penyampaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu (RPJMD, RKPDP, KUA dan PPAS)	Kualitas	Tersedia dan Akurat	Tersedia dan Akurat	Tersedia dan Akurat	Tersedia dan Akurat	Tersedia dan Akurat	Tersedia dan Akurat	Tersedia dan Akurat	100	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	Persen	-	30.61	32.65	33	35	40	100	-	30.61	32.65	33.00	35.00	40.00	40
	Proporsi Standar Pelayanan Minimal	Persen	-	50	40	45	50	60	60	-	83.33	66.67	75.00	83.33	100.00	100

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	(SPM) pada urusan Pemerintahan																
	Persentasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen	Persen	-	-	-	60	75	-	90	-	-	-	66.67	83.33	-	83.33	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100	
8	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan	Persen	52.00	47.00	55.36	67.52	-	-	70.00	74.29	67.14	79.09	96.46	-	-	96.46	
	Persentase nilai temuan keuangan hasil audit yang dapat ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	65.42	78.17	-	100	-	-	-	65.42	78.17	-	78.17	
9	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Wajar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100	100	100	

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
pada Layanan Publik	Tanpa Pengecualian (WTP)																
	Proporsi Belanja Anggaran Publik yang lebih Besar daripada Belanja Aparatur.		69.07	71.47	72.62	75.17	76.28	80.34	85	81.26	84.08	85.44	88.44	89.74	94.52	94.52	
10	Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota	Jumlah Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota		Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00						
		Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota		Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100						
11	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah adat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
12	Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)	Frekwensi Kerjasama tiga tungku		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Pembangunan Berdasarkan 5(lima) Wilayah Adat	WP	Pembangunan berdasarkan 5 wilayah adat	Pembangunan berdasarkan 5 wilayah adat	100	100	100	100	100	100						

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
13	Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.	Persentasi Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Persen	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00	
		Ditetapkan seluruh Perdasus dan Perdasi sesuai Amanat Undang-undang Otsus	Persen	17.24	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	100	17.24	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69
		Implementasi kebijakan Otsus secara konsisten	Deskriptif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00
14	Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.	Tersedianya Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah rekonstruksi	Dokumen	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	100	-	-	100	
		Tingkat Pendidikan Orang Asli Papua	Deskriptif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00
		Angka Harapan hidup Orang Asli Papua	Deskriptif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00
		Proporsi Keluarga Orang Asli	Deskriptif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Papua yang memiliki Rumah Layak Huni																
	Proporsi KAT berdaya Sosial	Deskriptif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00
	Jumlah Penduduk Miskin Orang Asli Papua	Deskriptif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100	100	100	100	100	100	100.00
	Presentase Penduduk diatas Garis kemiskinan	Persen	68.48	72.20	71.60	71.60	72.24	72.46	75	75	91.31	96.27	95.47	95.47	96.32	96.61	96.61
15	Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan	Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Deskriptif	Efisien & Efektif	Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Proporsional	100	100	100	100	100	100	100.00					
16	Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan	Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang miskin Struktur kaya Fungsi	Perda	1	1	1	-	-	-	1	100	100	100	-	-	-	100
17	Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur	Persentase Pegawai yang Sudah mengikuti diklat struktural dari seluruh	Persen	-	-	90.14	93.45	-	-	100	-	-	90.14	93.45	-	-	93.45

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Pemerintah Daerah	pejabat struktural																
	Persentase pegawai yang Berpendidikan minimal sarjana	Persen	-	-	49.94	60.17	68.47	-	75	-	-	66.59	80.23	91.29	-	91.29	
18	Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan penduduk	1.97	1.93	1.89	1.84	1.80	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Sistem Kependudukan secara Nasional		-	75	90	95	95	100	100	-	-	-	-	-	-	-
19	Terwujudnya masyarakat yang religius	Penggunaan Narkotika dan pemakaian Zat Adiktif		-	-	-	-	-	-	< 500 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Konflik akibat SARA	Kasus	-	18	19	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
20	Terwujudnya layanan sosial yang berkualitas	Cakupan KAT	Persen	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kelompok PMKS yang dibina	Kelompok	761	745	745	-	-	-	300	253.67	248.33	248.33	-	-	-	-
21	Terwujudnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender		77.61	78.57	78.52	79.09	79.38	-	65	119.40	120.88	120.80	121.68	122.12	-	122.12
		Indeks Pemberdayaan Gender		57.22	64.21	63.69	64.73	61.89	-	60	95.37	107.02	106.15	107.88	103.15	-	103.15

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
22	Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua	Apresiasi dan aktualisasi terhadap seni dan budaya	Persen	80	80	80	100	100	100	100	80	80	80	100	100	100	100
23	Meningkatnya prestasi olahraga	Prestasi Papua pada perhelatan olahraga tingkat Nasional (PON)	Posisi urutan dalam PON	-	-	8	-	-	-	10	-	-	80.00	-	-	-	80.00
		Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti dalam PON	Cabang	-	-	25	-	-	-	30	-	-	83.33	-	-	-	83.33
		Partisipasi Atlit Papua di Iven Nasional dan Internasional	Atlit	-	-	380	-	-	-	400	-	-	95.00	-	-	-	95.00
		Jumlah pelatih yang bersertifikasi Nasional	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah Pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	-	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Organisasi	43	43	44	47	47	-	40	107.50	107.50	110.00	117.50	117.50	-	117.50	
	Jumlah wirausaha muda asli Papua	wirausaha	45	45	45	30	115	-	1000	4.50	4.50	4.50	3.00	11.50	-	11.50	
25	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	Persentase Penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Usia Harapan Hidup	Tahun	64.76	64.84	65.09	65.12	65.14	-	68.36	94.73	94.85	95.22	95.26	95.29	-	95.29	
	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	/ 100.000 KH	344	575	422	235	380	289	250	62.40	-	31.20	106.00	48.00	84.40	84.40	
	Porposi Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih	Persen	35	33.31	53.15	26.34	39.18	-	85	-	-	-	-	-	-	-	
	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	/ 1.000 KH	35	54	8	44	8	7	25	60.00	-	168.00	24.00	168.00	172.00	172.00	
	Prevalensi Kekurangan	Persen	-	-	16.2	11.9	12.8	-	15	-	-	92.00	120.67	114.67	-	114.67	

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Gizi pada anak balita (%)															
	Kasus Malaria (API) per 1.000 penduduk	/ 1.000	42.65	29.57	31.93	45.85	59	-	50	114.70	140.86	136.14	108.30	82.00	-	82.00
	Cakupan imunisasi Dasar	Persen	-	-	-	36.13	46	-	80	-	-	-	45.16	57.50	-	57.50
	Penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan mendapatkan ARV	Persen	826	44	100	100	100	100	100	826.00	44.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
26	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil		75.92	77.84	70.83	71.02	73.89	-	90	84.36	86.49	78.70	78.91	82.10	-	82.10
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	5.74	5.76	5.99	6.15	6.27	-	9	63.78	64.00	66.56	68.33	69.67	-	69.67
	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-PAUD/TK	Persen	-	12.19	10.93	37.82	-	-	50	-	24.38	21.86	75.64	-	-	75.64
	- SD	Persen	85.95	90.67	95.15	94.74	92.94	-	100	85.95	90.67	95.15	94.74	92.94	-	92.94
	- SMP	Persen	65.01	71.02	73.59	72.07	82.20	-	80	81.26	88.78	91.99	90.09	102.75	-	102.75
	- SMA	Persen	53.48	61.53	66.97	66.85	67.94	-	60	89.13	102.55	111.62	111.42	113.23	-	113.23
	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SD		72.90	78.36	78.56	78.66	78.83	-	80	91.13	97.95	98.20	98.33	98.54	-	98.54

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	- SMP		45.88	53.68	54.21	54.26	56.13	-	55	83.42	97.60	98.56	98.65	102.05	-	102.05	
	- SMA		36.53	43.11	43.22	43.27	43.48	-	45	81.18	95.80	96.04	96.16	96.62	-	96.62	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 7 - 12 Tahun		75.51	80.69	81.04	81.11	81.80	-	85	88.84	94.93	95.34	95.42	96.24	-	96.24	
	- 13 - 15 Tahun		73.27	78.07	78.14	78.86	79.09	-	80	91.59	97.59	97.68	98.58	98.86	-	98.86	
	- 16 - 18 Tahun		53.28	61.63	61.96	62.07	63.35	-	60	88.80	102.72	103.27	103.45	105.58	-	105.58	
	Kemampuan Baca-Tulis-Berhitung SD kelas 3		-	-	-	-	75.00	-	100	-	-	-	-	75.00	-	75.00	
	Penemuan dan Pemanfaatan TTG	Temuan	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
27	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rupiah per Tahun (triliun)	109.30	38.87	94.04	122.55	-	-	35.00	312.30	111.07	268.70	350.14	-	-	350.14
		Jumlah Investor (PMA dan PMDN)	Proyek	168	186	200	187	-	-	200	84.00	93.00	100.00	93.50	-	-	93.50
28	Tercapainya stabilitas makro ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi		8.55	3.65	7.35	9.14	4.64	-	7.00	122.14	52.14	105.00	130.57	66.29	-	66.29
		PDRB per Kapita	juta rupiah	40.51	43.73	47.73	54.73	58.68	-	30.00	135.03	145.77	159.10	182.43	195.60	-	195.60
		Indeks Gini	Persen	0.4400	0.4600	0.3900	0.4000	0.4000	-	0.3000	53.33	46.67	70.00	66.67	66.67	-	66.67
29	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM	Prosentase Jumlah UMKM yang berdaya saing	Persen	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Koperasi yang berdaya saing															
30	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah	Cakupan Jumlah UMKM yang di bina oleh pemerintah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.23	3.44	3.99	3.35	3.96	-	4.36	125.92	121.10	108.49	123.17	109.17	-	109.17
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78.01	78.67	79.57	74.13	77.3	-	77.58	100.55	101.41	102.57	95.55	99.64	-	99.64
32	Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah	Jumlah PDRB dari Sektor Pariwisata	milyar rupiah	-	825.28	887.32	-	-	-	1000.00	-	82.53	88.73	-	-	-	88.73
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	-	-	-	7.76	2.00	-	3	-	-	-	258.56	66.57	-	66.57
33	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/tahun	797,097	826,732	880,976	758,860	804,714	-	700,000	113.87	118.10	125.85	108.41	114.96	-	114.96
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Ton/tahun	39,641	87,264	65,392	69,494	113,341	-	300,000	13.21	29.09	21.80	23.16	37.78	-	37.78
		Kontribusi Sub Sektor Perkebunan	Persen	1.47	1.53	1.52	1.42	1.38	-	3.00	49.00	51.00	50.67	47.33	46.00	-	46.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	terhdapa PDRB																
	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	Persen	0.89	0.89	0.91	1.00	1.21	-	5.00	17.80	17.80	18.20	20.00	24.20	-	24.20	
	Persentase Pengendalian penyakit Menular	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/tahun	-	-	-	185,974	-	-	500,000	-	-	-	37.19	-	-	37.19	
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/tahun	-	-	-	13,252	-	-	10,000	-	-	-	132.52	-	-	132.52	
	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	persen	4.83	4.87	4.80	4.50	4.53	-	4.32	111.81	112.73	111.11	104.17	104.86	-	104.86	
	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB		n.a	n.a	2.20	2.57	2.94	-	2.35	-	-	93.62	109.36	125.11	-	125.11	
	Kontribusi Sub Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Persen	43.56	40.84	40.60	42.08	41.78	-	33.00	132.00	123.76	123.03	127.52	126.61	-	126.61	
34	Meningkatkan pendapatan	Paritas Daya Beli	Juta/Tahun	6,394.00	6,416.00	6,469.00	6,637.00	6,996.00	-	7,500.00	85.25	85.55	86.25	88.49	93.28	-	93.28

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Taget RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	masyarakat adat pemilik hak ulayat																
35	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	persen	-	-	-	34.31	-	-	60.00	-	-	-	57.18	-	-	57.18
		Terbangunnya jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW serta PKW-PKL	km	-	-	365	365	365	365	365	-	-	100.00	100.00	100.00	-	100
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	-	-	-	45.15	-	-	60	-	-	-	75.25	-	-	75.25
		Tingkat ketersediaan dan fungsional bandara	Fungsional	-	-	Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional, Domestik & Internasional	100	100	100	100	100	-	100
		Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Fungsional	-	-	Pelabuhan jayapura : Pelayanan Penumpang & Barang	100	100	100	100	100	-	100				

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Persentase Arus Penumpang Angkutan Umum Per Tahun	Per Tahun	-	-	-	3.88	-	-	5	-	-	-	77.60	-	-	77.60		
36	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	Prosentase cakupan sistem jaringan sumberdaya air terhadap irigasi	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	
		Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi	Persen	-	23.56	-	-	-	-	-	100	-	23.56	-	-	-	-	23.56
		Tingkat ketersediaan air tanah	Jt M ³	-	-	-	-	-	-	-	18.075	-	-	-	-	-	-	-
37	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi	persen	-	79.31	79.31	100	100	100	60	-	132.18	132.18	166.67	166.67	166.67	166.67	
38	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan	Rasio elektrifikasi	persen	45.52	47.32	53.17	50.9	55.82	-	50	91.04	94.64	106.34	101.80	111.64	-	111.64	
		Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	energi alternatif																
	Daya terpasang	Kw	-	-	-	-	370,751	-	200,000	-	-	-	-	185.38	-	185	
39	Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	Unit	-	5,979	8,934	-	12,000	-	13,000	-	45.99	68.72	-	92.31	-	92	
40	Meningkatnya ketersediaan air bersih	Persen	42.37	43.55	46.76	38.47	-	-	50.00	84.74	87.10	93.52	76.94	-	-	76.94	
41	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	-	65.00	70.45	76.52	-	-	75.00	-	86.67	93.93	102.03	-	-	102.03	
42	Papua sebagai paru-paru dunia	Emisi GRK	-	-	-	-	-	-	640.737.952 tCO2eq	-	-	-	-	-	-	-	
		Serapan GRK	110,807,000	81,192,000	117,537,000	107,633,000	-	-	> 894.359.816 tCO2eq	12.39	9.08	13.14	12.03	-	-	12.03	
		Luas tutupan hutan primer dan sekunder	ha	-	-	-	-	25,028,042	-	≤ 25.131.606 Ha (79,52%)	-	-	-	-	99.59	-	99.59
		Persentase Area Hutan Mangrove yang Kondisi Baik	Persen	-	-	82.64	-	-	-	90	-	-	91.82	-	-	-	91.82
		Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	-	-	3	-	-	-	2	-	-	50.00	-	-	-	50.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-						Target Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Target RPJMD Terhadap Akhir Perencanaan						Rasio Capaian Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap seluruh kawasan	Persen	-	-	26.61	-	-	-	26.61	-	-	100.00	-	-	-	100.00
43	Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan	Persen	-	-	95	-	-	-	100	-	-	95.00	-	-	-	95.00
44	Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase dokumen perencanaan yang mengakomodir pembangunan berkelanjutan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata rasio kinerja															96,009	
Predikat															Sangat Tinggi	

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan secara rinci yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan

Gambaran Keuangan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan proyeksi kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam horizon waktu perencanaan jangka menengah daerah dengan pertimbangan utama kondisi kinerja keuangan daerah yang telah dihasilkan selama ini, baik itu aspek realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun analisis terhadap perkembangan neraca daerah.

Selanjutnya kerangka pendanaan merupakan pedoman bagi daerah dalam menskenariokan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam APBD selama lima tahun kedepan. Pada sisi pendapatan akan terlihat sejauh mana faktor internal dan eksternal akan mempengaruhi pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), maupun dana yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat berupa ; DAU, DAK, bagi hasil serta dana otonomi khusus Papua. Sedangkan dari sisi belanja daerah akan diproyeksikan kebutuhan belanja daerah untuk memenuhi berbagai kriteria belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas daerah dan belanja non prioritas. Sedangkan dari sisi pembiayaan akan terlihat bauran strategi kebijakan penyeimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang terwujud dalam surplus/defisit anggaran daerah.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, pada akhirnya manajemen komponen APBD berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah terutama dalam mencermati adanya hubungan yang terukur secara rasional antara ketiganya. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya

keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2017

Analisis kinerja keuangan masa lalu mendeskripsikan tentang analisis kinerja keuangan daerah pada periode tahun 2013-2017, berupa kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu akan diketahui pola perkembangan pendapatan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

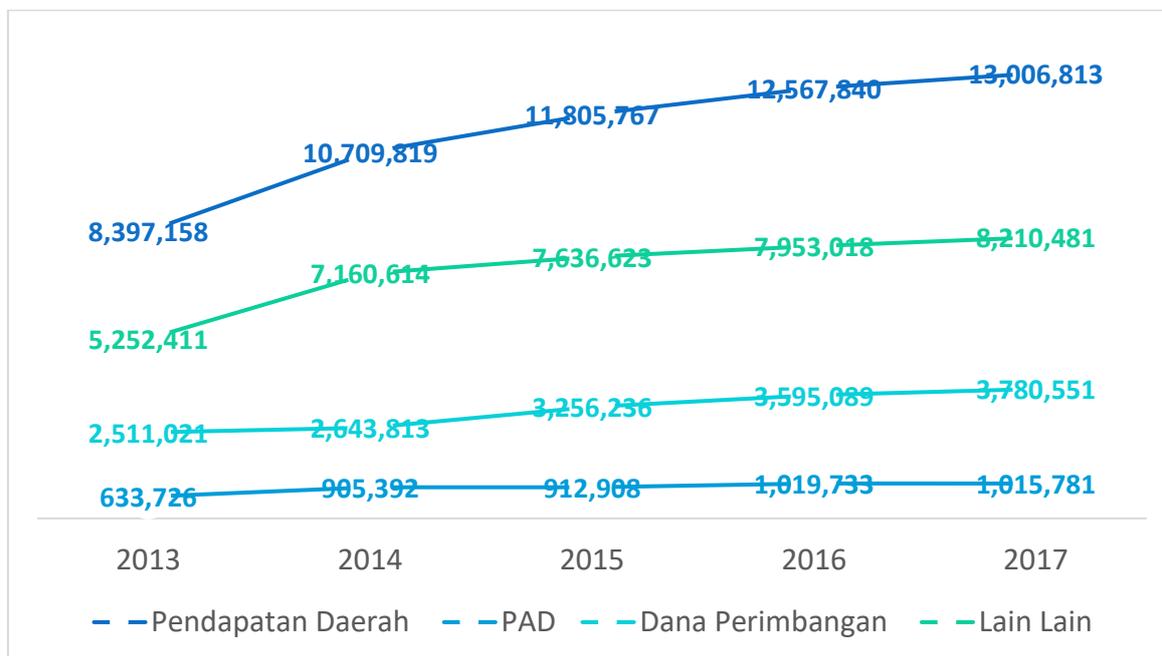
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Keberadaan pendapatan daerah akan memberikan kemampuan fiskal pada daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Gambar Grafik 3.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Secara umum, realisasi

pendapatan daerah Provinsi Papua mengalami perkembangan yang konsisten dan terus menanjak sepanjang periode ini, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai sebesar 12 persen, dari sebesar Rp 8,39 trilyun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.10,70 trilyun pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 11,80 trilyun pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp 12,56 trilyun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 13,00 trilyun.

Gambar 3.1. Garfik Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber Data : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan, maka terlihat adanya perbedaan pola pertumbuhan sesuai dengan pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selama periode tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dari sebesar Rp 512,03 milyar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 927,2 milyar pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 882,2 milyar dan 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1,16 trilyun dan sebesar Rp 1,36 trilyun pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14 persen per tahun.

Selanjutnya pos dana perimbangan secara konsisten mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan yang cukup bervariasi setiap tahunnya, dari sebesar Rp 2,50 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 2,75 triliun pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan cukup besar menjadi Rp 3,45 triliun pada tahun 2015 dan sebesar Rp 3,94 triliun pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, dana perimbangan kembali mengalami peningkatan cukup besar menjadi Rp 4,54 triliun. Sepanjang tahun 2013-2017, pos dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 11 persen per tahun.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terutama disumbangkan oleh dana otonomi khusus papua dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp 4,35 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 4,77 triliun pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp 4,94 triliun pada tahun 2015. Peningkatan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 menjadi Rp 5,399 triliun dan Rp 5,58 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 persen per tahun.

Tabel 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
PENDAPATAN	8.298.239	8.397.158	101,2	10.802.461	10.709.819	99,1	11.987.596	11.805.767	98,5	13.065.980	12.567.840	96,2	14.116.823	13.006.813	92,1
Pendapatan Asli Daerah	512.034	633.726	123,8	927.254	905.392	97,6	882.299	912.908	103,5	1.161.422	1.019.733	87,8	1.367.161	1.015.781	74,3
Pendapatan Pajak Daerah	413.950	453.677	109,6	592.820	566.063	95,5	659.442	633.392	96,0	879.024	666.992	75,9	1.045.479	756.689	72,4
Hasil Retribusi Daerah	17.639	24.524	139,0	53.865	57.092	106,0	59.670	49.085	82,3	83.188	58.077	69,8	82.930	77.988	94,0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.493	25.793	101,2	32.917	32.942	100,1	15.899	15.932	100,2	52.810	53.759	101,8	52.810	721	1,4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.952	129.732	236,1	247.651	249.295	100,7	147.288	214.498	145,6	146.399	240.905	164,6	185.942	180.383	97,0
Dana Perimbangan	2.506.984	2.511.021	100,2	2.753.097	2.643.813	96,0	3.457.230	3.256.236	94,2	3.949.272	3.595.089	91,0	4.543.835	3.780.551	83,2
Bagi Hasil Pajak	314.281	308.441	98,1	313.663	244.217	77,9	288.080	196.894	68,3	310.889	277.042	89,1	309.397	257.824	83,3
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	169.538	179.414	105,8	327.725	287.888	87,8	430.914	321.105	74,5	610.502	487.428	79,8	296.766	155.189	52,3
Dana Alokasi Umum	1.889.268	1.889.268	100,0	1.991.202	1.991.202	100,0	2.277.933	2.277.933	100,0	2.502.449	2.502.449	100,0	2.570.118	2.338.201	91,0
Dana Alokasi Khusus	133.897	133.897	100,0	120.506	120.506	100,0	460.304	460.304	100,0	514.750	317.778	61,7	1.367.553	1.029.338	75,3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.279.221	5.252.411	99,5	7.122.111	7.160.614	100,5	7.648.066	7.636.623	99,9	7.955.286	7.953.018	100,0	8.205.827	8.210.481	100,1
Dana Penyesuaian	351.842	325.033	92,4	345.040	343.560	99,6	457.146	445.645	97,5	560.235	560.235	100,0	0	0	0,0
Dana Otonomi khusus	4.355.950	4.355.950	100,0	4.777.071	4.777.071	100,0	4.940.430	4.940.430	100,0	5.395.052	5.395.052	100,0	5.580.152	5.580.152	100,0
Dana Tambahan Infrastruktur	571.429	571.429	100,0	2.000.000	2.000.000	100,0	2.250.000	2.250.000	100,0	1.987.500	1.987.500	100,0	2.625.000	2.625.000	100,0
Pendapatan Lainnya	0	0	0,0	0	39.538	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4.591	0,0

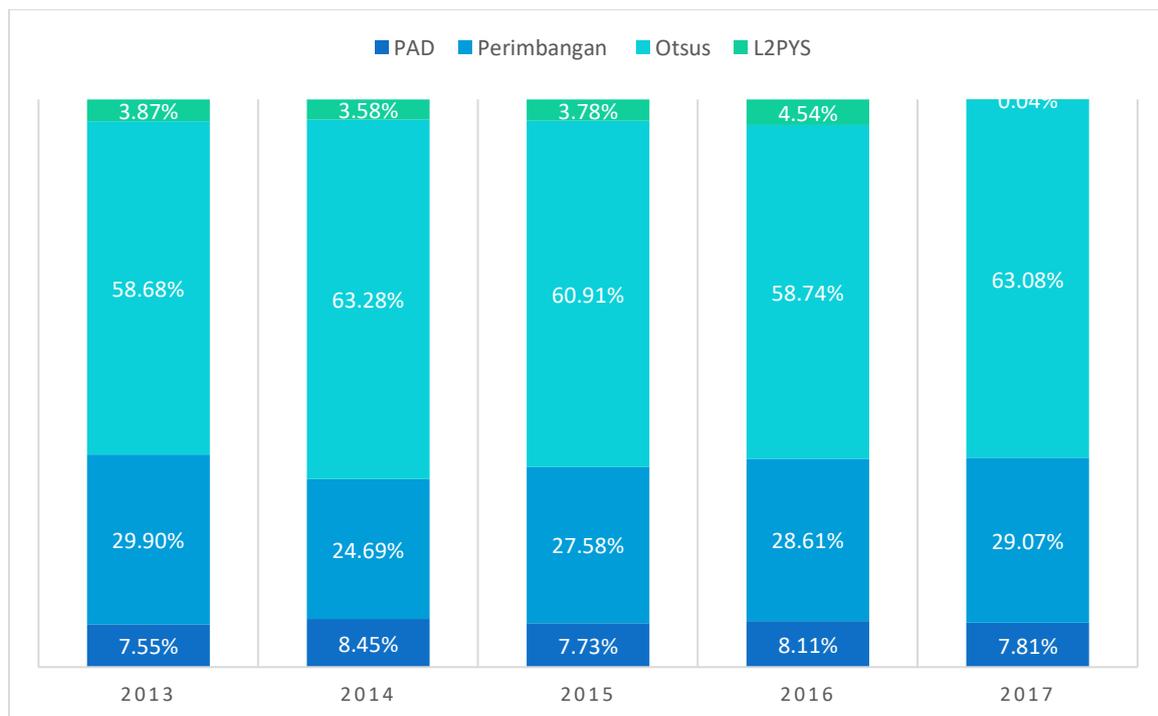
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013- 2017

Keterangan

A= Anggaran dan R = Realisasi

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Provinsi Papua dapat dikatakan sangat berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia yang umumnya didominasi oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dana perimbangan. Sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, pendapatan daerah Provinsi Papua didominasi oleh besarnya kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dalam hal ini bersumber dari dana otonomi khusus Papua yang dihitung sebesar 2 persen dari DAU nasional serta dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua.

Gambar 3.2 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013 – 2017 (diolah)

Gambar 3.2 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017. Pada periode tersebut terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar pada angka 7,50% sampai dengan 8,45 %, kemudian Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan SDA serta DAU dan DAK memberikan kontribusi dalam kisaran angka 24,6% sampai dengan 29,90%. Sedangkan dana otonomi khusus dan dana tambahan

infrastruktur dalam rangka otsus memberikan kontribusi yang dominan melebihi separo dari APBD yang mencapai kisaran angka 58% sampai dengan 63 %.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

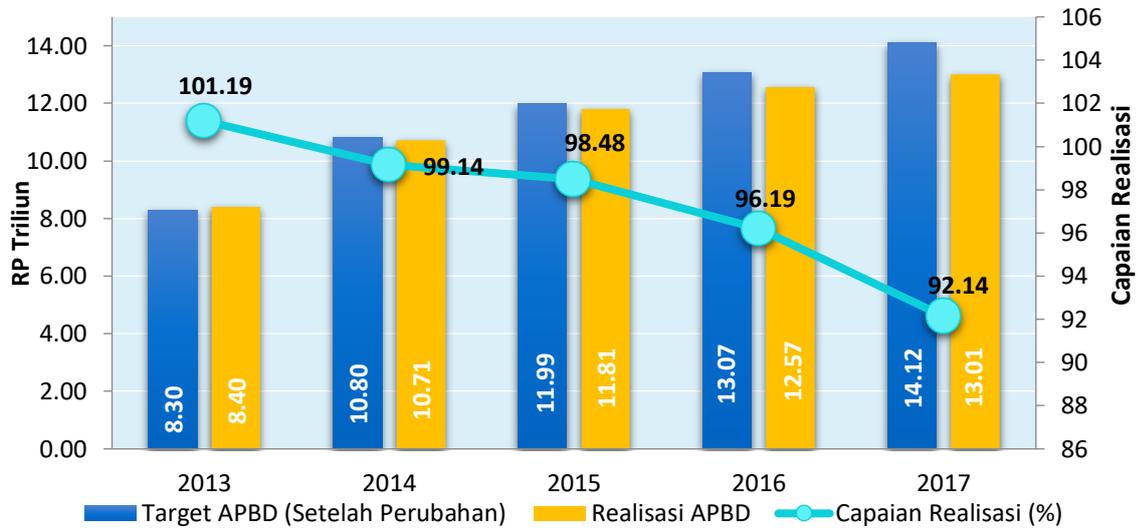
Selama periode tahun 2013-2017, hanya pada tahun 2013 target pendapatan dapat direalisasikan dengan baik yang mencapai angka sebesar 101,2 persen, sedangkan periode tahun 2014-2017, realisasi pendapatan selalu berada dibawah target yang ditetapkan. Kondisi ini terutama disebabkan tidak terealisasinya beberapa sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2013	8.298.239.247.000,00	8.397.158.332.245,00	101,2%	98.919.085.245
2014	10.802.461.214.000,00	10.709.818.949.527,00	99,1%	(92.642.264.473)
2015	11.987.595.808.455,00	11.805.767.353.119,00	98,5%	(181.828.455.336)
2016	13.065.980.097.715,00	12.567.839.768.232,70	96,2%	(498.140.329.482)
2017	14.116.822.510.433,00	13.006.812.664.926,50	92,1%	(1.110.009.845.507)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013-2017 (diolah)

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013-2017 (diolah)

3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Permendagri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2013 sampai tahun 2017, jumlah anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel 3.3. berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jumlah nominal belanja daerah Provinsi Papua pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp 8,94

trilyun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 15,65 trilyun pada tahun 2017.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan terlihat adanya peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada kedua pos belanja yaitu; belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 11%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18% per tahun.

Semua pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkecuali belanja tidak terduga. Pos belanja pegawai secara perlahan namun pasti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9% per tahun, kemudian belanja hibah mengalami pertumbuhan sebesar 13% per tahun, belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar 6% per tahun dan Belanja bantuan keuangan mengalami pertumbuhan sebesar 12% per tahun. Sedangkan pada pos belanja langsung terjadi peningkatan belanja yang cukup signifikan pada semua jenis belanja. Pada periode 2013-2017, belanja pegawai mengalami pertumbuhan rerata sebesar 14% per tahun, belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17% per tahun dan belanja modal mengalami pertumbuhan rerata sebesar 22% per tahun.

Tabel 3.3 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Belanja	8.941.437	8.171.352	91%	11.520.664	10.303.787	89%	13.268.460	12.396.447	93%	13.601.165	11.968.494	88%	15.654.664	13.303.282	85%
Belanja Tidak Langsung	5.322.500	5.080.595	95%	6.842.740	6.419.562	94%	7.155.349	6.980.188	98%	7.563.695	6.782.511	90%	8.102.810	7.614.480	94%
Belanja Pegawai	733.505	657.546	90%	898.649	744.258	83%	1.006.629	919.022	91%	1.082.739	986.869	91%	1.319.848	1.110.723	84%
Belanja Hibah	685.960	651.084	95%	863.485	732.224	85%	885.017	835.350	94%	1.167.661	1.077.607	92%	1.038.385	1.025.283	99%
Belanja Bantuan Sosial	274.646	178.167	65%	157.227	88.454	56%	100.034	94.309	94%	153.745	145.771	95%	101.028	96.897	96%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	233.162	232.801	100%	280.831	280.781	100%	297.467	290.677	98%	362.829	313.262	86%	390.165	310.131	79%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.365.227	3.348.441	100%	4.612.843	4.562.249	99%	4.843.201	4.829.852	100%	4.791.205	4.258.952	89%	5.203.385	5.071.446	97%
Belanja Tidak Terduga	30.000	12.557	42%	29.705	11.595	39%	23.000	10.978	48%	5.516	49	1%	10.000	0	0%
Belanja Langsung	3.618.937	3.090.757	85%	4.677.924	3.884.225	83%	6.113.112	5.416.259	89%	6.037.470	5.185.984	86%	7.551.853	5.688.802	75%
Belanja Pegawai	195.333	175.894	90%	218.273	196.401	90%	214.620	190.579	89%	260.967	235.694	90%	274.065	248.630	91%
Belanja Barang dan Jasa	1.898.047	1.694.118	89%	2.189.514	1.998.521	91%	2.729.760	2.360.218	86%	2.838.475	2.459.957	87%	3.821.939	3.112.159	81%
Belanja Modal	1.525.557	1.220.745	80%	2.270.138	1.689.303	74%	3.168.733	2.865.462	90%	2.938.028	2.490.333	85%	3.455.849	2.328.013	67%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017 (diolah)

Keterangan

A= Anggaran

R = Realisasi

Rencana dan Realisasi Belanja Daerah

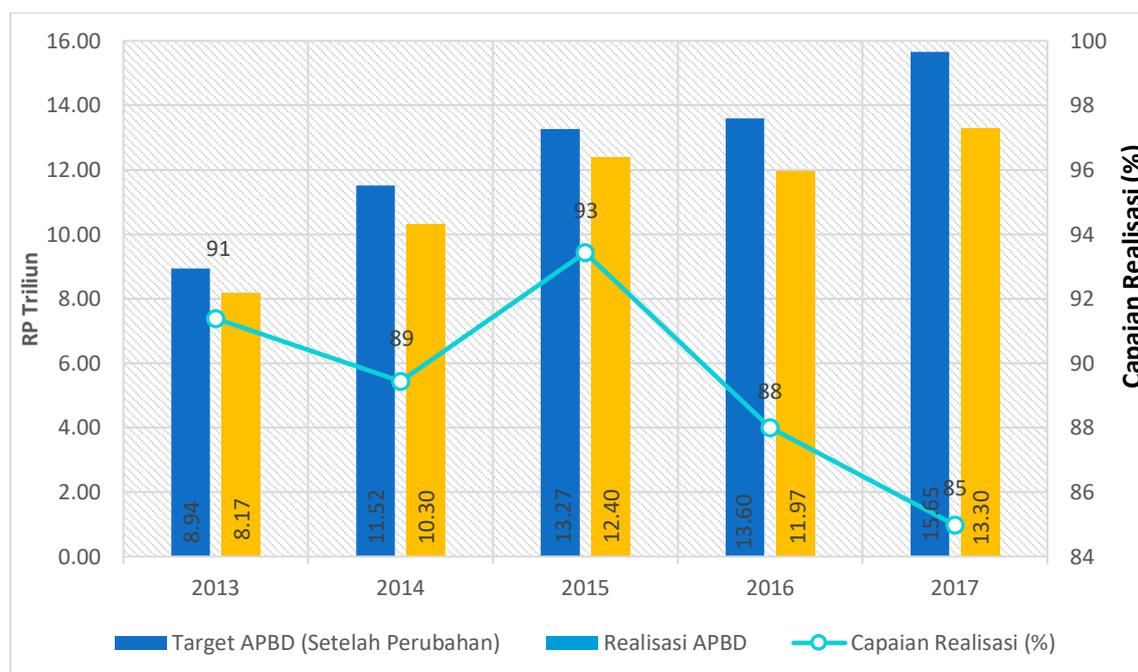
Selama periode tahun 2013-2017, realisasi belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka sebesar 85% sampai dengan 93%.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	%	Selisih
2013	8.941.437.247.000,00	8.171.352.348.477,00	91%	(770.084.898.523,00)
2014	11.520.664.078.000,00	10.303.786.846.381,00	89%	(1.216.877.231.619,00)
2015	13.268.460.356.704,00	12.396.447.236.264,00	93%	(872.013.120.440,00)
2016	13.601.164.762.819,00	11.968.494.421.588,20	88%	(1.632.670.341.230,78)
2017	15.654.663.746.433,00	13.303.282.243.301,10	85%	(2.351.381.503.131,92)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Gambar 3.4 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017 (diolah)

3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Berdasarkan data pada tabel 3.5. terlihat bahwa sepanjang periode tahun 2013-2017 Pemerintah Provinsi Papua selalu menerapkan penganggaran defisit yang selalu akan ditutupi dengan Sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Dalam kenyataannya realisasi anggaran memang selalu menghasilkan jumlah SILPA yang signifikan untuk menutupi defisit yang terjadi.

Tabel 3.5 Perkembangan Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Surplus/ Defisit	-643.198	225.806	-35%	-718.203	406.032	-57%	-1.280.865	-590.680	46%	-535.185	599.345	-112%	-1.537.841	-296.470	19%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	768.198	768.416	100%	833.203	833.203	100%	1.305.865	1.180.865	90%	565.185	503.496	89%	1.612.841	1.009.244	63%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	768.198	768.416	100%	833.203	833.203	100%	1.055.865	1.055.865	100%	565.185	503.496	89%	1.072.841	1.009.244	94%
Pencairan Dana Cadangan				0	0	0%	250.000	125.000	50%	0	0	0%	540.000	0	0%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	125.000	161.019	129%	115.000	183.370	159%	25.000	25.000	100%	30.000	30.000	100%	75.000	140.462	187%
Pembentukan Dana Cadangan				0	68.370	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	65.462	0%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000	25.000	100%	115.000	115.000	100%	25.000	25.000	100%	30.000	30.000	100%	75.000	75.000	100%
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pihak Ketiga	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Pembiayaan Netto	643.198	607.397	94%	718.203	649.832	90%	1.280.865	1.155.865	90%	535.185	473.496	88%	1.537.841	868.782	56%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	833.203	0%	0	1.055.865	0%	0	565.185	0%	0	1.072.841	0%	0	572.312	0%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Keterangan

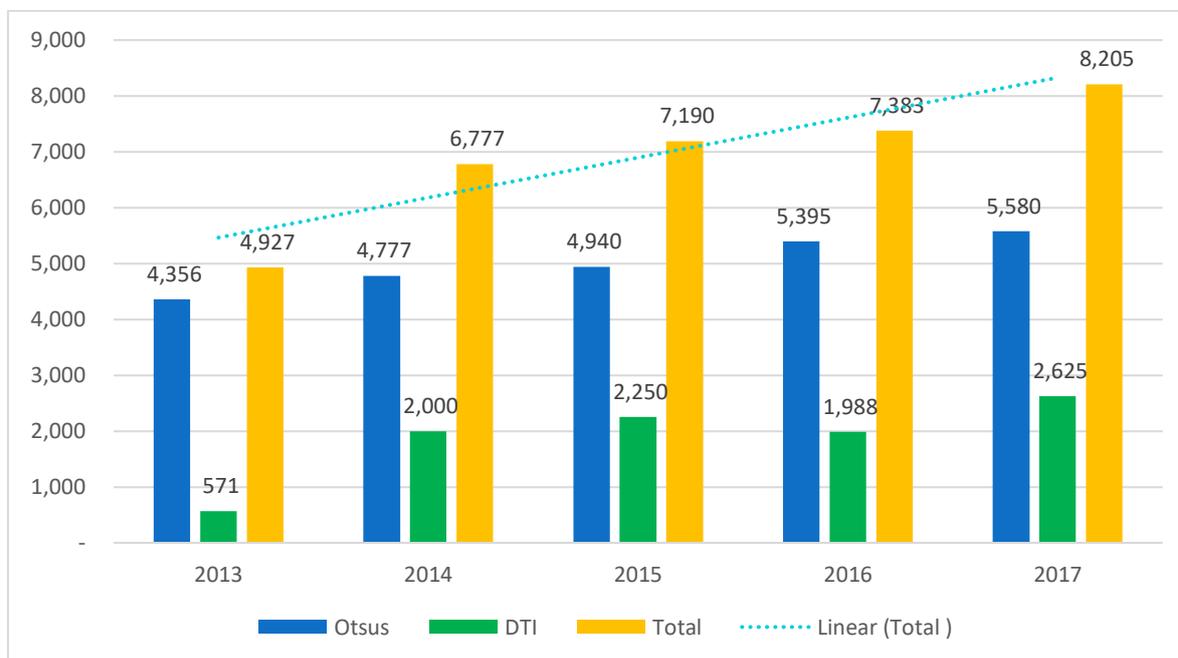
A= Anggaran

R = Realisasi

3.1.2. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua

Selama periode pertama masa kepemimpinan Bapak. Lukas Enembe, SIP, MH sebagai Gubernur di Provinsi Papua pada tahun 2013–2017, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana otsus (DO) dan dana tambahan Infrastruktur (DTI) kepada Provinsi Papua mencapai sebesar Rp. 34,4 triliun, yang terdiri dari sebesar Rp. 25,04 triliun DO dan sebesar Rp.9,43 triliun berupa DTI. Gambar 3.5. menunjukkan bahwa terkecuali pada tahun 2016, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur secara konsisten terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan alokasi DAU nasional. Dana otsus secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 6,4 persen pertahun dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus mengalami pertumbuhan rerata sebesar 11 persen pertahun.

Gambar 3.5 Penerimaan Dana Otsus Periode 2013-2017



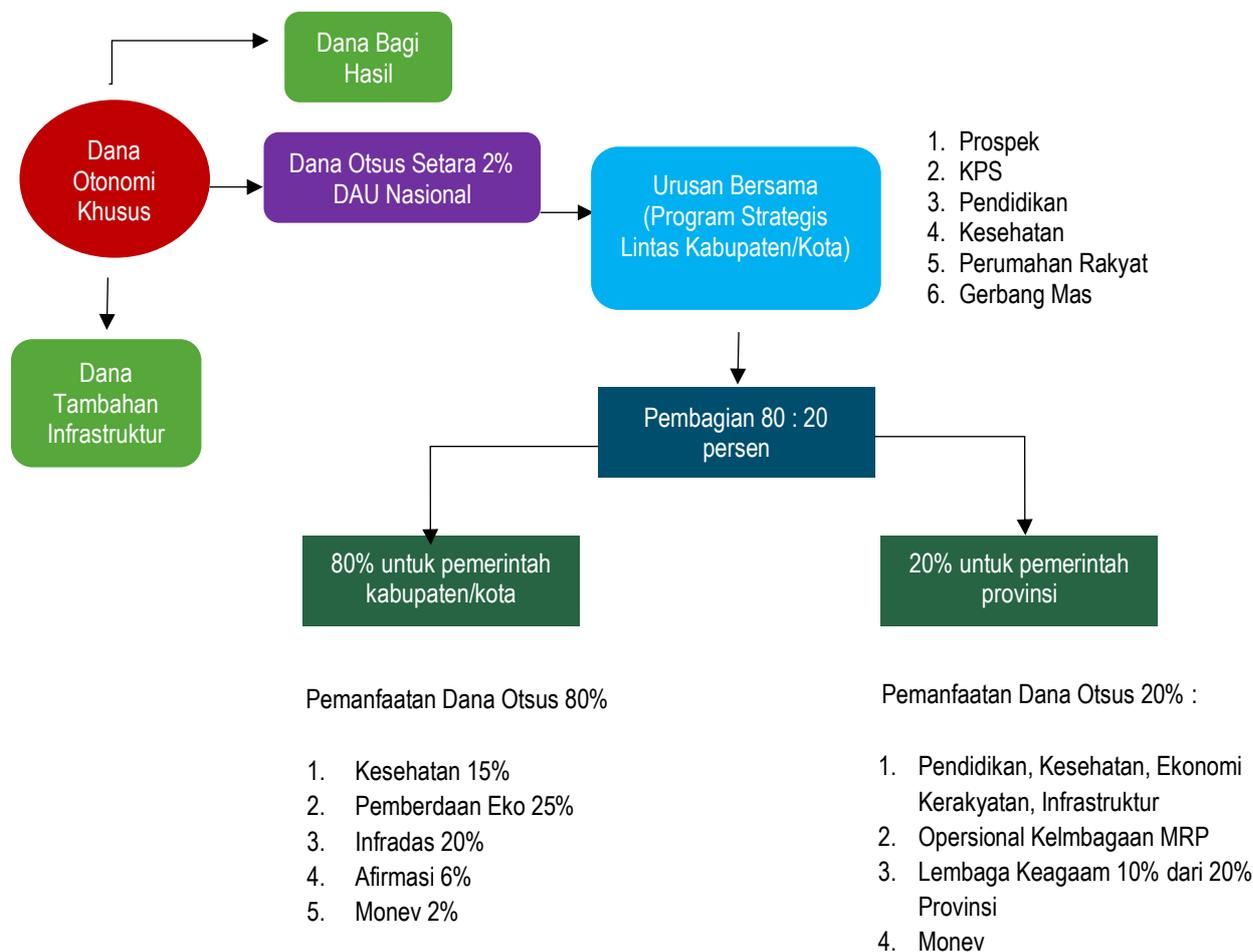
Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pemerintah Provinsi Papua mengatur pembagian penerimaan dana Otsus melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Perdasus ini efektif berlaku untuk pembagian dana Otsus tahun anggaran 2014. Sebelum tahun tersebut, pembagian dana Otsus mengacu pada yang Perdasus Nomor 1 Tahun 2007. Perbedaan pokok antara kedua Perdasus tersebut terjadi untuk pembagian dana antara Provinsi dan

kabupaten/kota. Dalam Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 diatur pembagian antara Provinsi dan kabupaten/kota 40% dan 60%, sedang dalam Perdasus 25 Tahun 2013 pembagian Provinsi dan kabupaten/kota 20% dan 80%.

Pembagian dana Otsus dengan porsi makin besar ke kabupaten/kota (80%) dilakukan Provinsi Papua dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sesuai amanat UU21/2001 bahwa kebijakan Otsus Papua ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi Orang Asli Papua (OAP) yang sebagian besar berada dibawah kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. Kedua, bahwa sesuai dasar pemerintah Provinsi relatif diberi kewenangan perundangan untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring hasil pembangunan yang dilaksanakan kabupaten/kota. Ketiga, bahwa dari sisi kedekatan dengan warga masyarakat, kabupaten/kota lebih dekat dan banyak mengetahui kondisi, keberadaan, masalah dan kebutuhan warganya.

Gambar 3.6. Skema Sumber Dana Dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber : data diolah

Berdasarkan data realisasi pelaksanaan dana otsus Papua tahun 2013-2017 terlihat bahwa dana otonomi khusus Papua teralokasi pada sektor-sektor yang telah ditentukan dalam Perdasus terkait. Selama periode tersebut terlihat bahwa besarnya alokasi dana untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hampir sama setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp. 3,08 triliun pertahun yang teralokasi bagi 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua serta sebesar Rp.772,2 milyar yang teralokasi pada belanja langsung program-program SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sedangkan dana urusan bersama yang merupakan sharing dana antara provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan penerimaan dana otonomi khusus Papua.

Jika ditelusuri lebih jauh tentang pengalokasian dana urusan bersama ini umumnya teralokasi pada program-program prioritas kepala daerah yang diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi Papua, beberapa program tersebut antara lain; Program strategis pembangunan kampung (PROSPEK), Program Kartu Papua Sehat (KPS), Program Gerakan Bangkit Mandiri Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua), bantuan keuangan pada lembaga sosial, budaya dan keagamaan, beasiswa pada putra putra terbaik Papua yang mengikuti pendidikan di beberapa Universitas dalam dan luar negeri.

Tabel 3.6. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Porsi Provinsi	1.536.142	772.297	772.295	772.295	772.295
Dana Urusan Bersama	515.595	915.594	1.078.956	1.533.578	1.718.679
Porsi Kabupaten/Kota	2.304.213	3.089.179	3.089.179	3.089.179	3.089.179
Total Penerimaan Otsus	4.355.950	4.777.071	4.940.430	5.395.052	5.580.152

Sumber : BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Berdasarkan hasil pelaksanaan program otonomi khusus selama ini yang disokong dengan keberadaan dana otonomi khusus maka perlu disadari bahwa kedepan perancangan formula pembagian dana Otonomi Khusus Papua baik yang dimaksudkan untuk didistribusikan bagi masing-masing kabupaten dan kota serta provinsi, maupun yang disalurkan melalui mekanisme strategis lain harus

ditempatkan sebagai instrumen perantara untuk peningkatan kesejahteraan terutama Orang Asli Papua. Hal ini penting karena kehadiran dana otsus Papua merupakan konsekwensi lanjutan dari disepakatinya secara politis kebijakan desentralisasi asimetris sebagai model pengelolaan kawasan ini. Sebuah kesepakatan yang dimaksudkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan dasar – mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hingga belum stabilnya kondisi keamanan di beberapa wilayah.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tentang perkembangan neraca daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal aset daerah mengalami pasang surut

seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua, namun demikian secara umum aset daerah mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 3 persen. Pada tahun 2013, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 16,99 trilyun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 21,46 trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai total aset menurun menjadi sebesar Rp 16,09 trilyun yang kemudian kembali meningkat menjadi sebesar Rp 19,12 trilyun pada tahun 2016 dan menjadi sebesar Rp 21,83 trilyun pada tahun 2017..

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2013-2017 Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua hanya kewajiban jangka pendek berupa hutang pada pihak ketiga, hutang dana BOS dan hutang belanja. Dari data neraca terlihat bahwa sepanjang tahun 2013-2017, jumlah hutang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rerata mencapai sebesar 39 persen pertahun. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah.

Pada sisi lain, selama periode tahun 2013-2017, Nilai ekuitas dana Provinsi Papua mengalami sedikit perubahan yang mencapai rata-rata sebesar 3 persen pertahun. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.7. Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
A	ASET	16.998.626.993.863	21.463.852.247.807	16.090.766.721.646	19.128.988.032.431	21.183.444.555.922	3%
1	ASET LANCAR	985.969.083.943	3.450.729.690.440	2.978.758.265.176	4.120.164.794.112	3.991.399.011.372	20%
01.01	Kas di Kas Daerah	825.998.845.011	1.045.409.962.130	560.578.663.641	1.050.054.257.807	558.830.624.940	-27%
01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	1.238.669	3.011.907.524	5.274.882.592	1.395.653.527	6.767.731.492	-14%
01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.272.797.231	10.510.956.767	973.909.486	12.183.375.418	6.720.182.766	-234%
01.04	Investasi Jangka Pendek	-	-				
01.05	Piutang Pajak	2.400.059.360	2.265.807.470.384	2.265.650.959.957	2.532.288.754.218	2.207.306.829.466	24%
01.06	Piutang Retribusi	-	-	6.397.637.052	-	-	100%
01.07	Piutang Bagian Lancar Pinjaman	-	-	-	-	-	
01.08	Piutang Kelebihan Transfer	-	27.652.600.936	-	-	-	100%
01.09	Piutang Jamkesmas/ BPJS Kesehatan	10.981.677.779	3.152.030.950	-	-	-	-248%
01.10	Piutang Lainnya netto	10.059.062.846	7.523.543.347	24.582.319.732	231.014.284.015	21.531.441.558	-212%
01.11	Belanja Dibayar Muka	37.500.000	61.643.836	360.290.410	1.129.216.578	55.890.411	-433%
01.12	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	4.264.621.838	2.244.998.370	2.309.075.903	4%
01.13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-	-	1.341.433.200	993.338.600	32%
01.14	Persediaan	129.217.903.047	87.599.574.566	110.674.980.468	288.512.820.979	1.186.883.896.236	28%
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	449.848.474.520	751.943.066.573	795.099.855.048	847.615.831.875	841.849.351.734	13%

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
02.01	Investasi Non Permanen	-	-	-	36.395.781.663	36.395.781.663	50%
02.01.01	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	36.395.781.663	36.395.781.663	50%
02.02	Investasi Permanen						
02.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	449.848.474.520	751.943.066.573	795.099.855.048	847.615.831.875	841.849.351.734	13%
3	ASET TETAP	13.542.429.036.403	15.188.134.904.772	11.239.435.289.966	12.971.512.017.915	15.077.385.904.115	1%
03.01	Tanah	1.289.084.094.264	1.309.597.025.264	1.354.594.625.264	1.387.610.080.264	1.602.938.265.264	5%
03.02	Peralatan dan Mesin	808.525.026.146	952.319.800.319	1.189.409.608.641	1.367.487.906.692	1.459.752.039.552	14%
03.03	Gedung dan Bangunan	1.696.319.692.064	1.827.931.953.074	2.207.173.307.922	2.360.442.099.690	2.764.353.210.497	11%
03.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi	8.897.042.929.541	9.506.321.531.751	11.170.859.291.020	12.201.586.998.744	14.187.649.996.901	11%
03.05	Aset Tetap Lainnya	324.956.124.302	354.705.231.702	389.307.400.512	441.935.489.612	443.644.985.082	7%
03.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	526.501.170.086	1.237.259.362.662	1.841.588.226.079	2.792.990.073.353	2.912.071.837.108	32%
03.07	Akumulasi Penyusutan	-	-	- 6.913.497.169.472	-7.580.540.630.440	-8.293.024.430.289	39%
4	DANA CADANGAN	946.923.717.123	1.015.294.136.130	970.843.819.969	1.032.572.663.172	1.098.034.927.308	4%
04.01	Dana Cadangan	946.923.717.123	1.015.294.136.130	970.843.819.969	1.032.572.663.172	1.098.034.927.308	4%
5	ASET LAINNYA	1.073.456.681.874	1.057.750.449.892	106.629.491.487	120.769.061.934	138.379.579.730	-217%
05.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	2.124.771.197	1.236.634.777	2.601.224.349	2.309.125.457	-	-4%
05.02	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-				
05.03	Kemitraandengan Pihak Ketiga	-	-				

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
05.04	Aset Tidak Berwujud	-	-	6.224.659.000	5.848.465.771	4.198.607.461	18%
05.05	Aset Lain-lain	450.186.612.180	427.287.461.179	97.803.608.138	112.611.470.706	131.495.322.799	-79%
05.06	Aset Tetap Yang Rusak	2.848.690.256	2.848.690.256	-	-	-	0%
05.07	Aset Tetap Yang Dihilangkan	558.132.567.550	566.256.867.550	-	-	-	1%
05.08	Piutang Kelebihan Pembayaran	17.496.681.068	17.496.681.068	-	-	-	0%
05.09	Kas Bendahara yg Belum Dipertanggungjawabkan	41.462.689.726	41.462.689.726	-	-	-	0%
B	KEWAJIBAN	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713	39%
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713	39%
01.01	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	668.881.129	277.792.999	6.050.250	-1511%
01.02	Utang Bos			-	18.378.432.500	80.044.808.500	89%
01.03	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
01.04	Utang Pajak	-	-	-	-	-	
01.05	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	
01.06	Utang belanja		3.186.653.000	66.747.719	217.817.743	5.379.701.349	-1102%
01.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.488.033.934	22.904.010.228	25.774.156.125	281.113.111.102	276.403.865.614	35%
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
02.01	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-		
02.02	Utang Luar Negeri	-	-	-	-		

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
C	EKUITAS DANA	16.985.070.181.797	21.437.705.213.931	16.064.256.936.673	18.829.000.878.087	20.821.610.130.209	3%
1	EKUITAS DANA LANCAR	972.412.271.877	3.424.582.656.564	-	-	-	72%
01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	833.202.864.110	1.055.864.548.249	-	-	-	21%
01.02	Cadangan Untuk Piutang	23.440.799.985	2.304.135.645.617	-	-	-	99%
01.03	Cadangan Untuk Persediaan	129.217.903.047	87.599.574.566	-	-	-	-48%
01.04	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	- 13.488.033.934	- 26.090.663.228	-	-	-	48%
01.05	Pendapatan yang Ditangguhkan	1.238.669	3.011.907.524	-	-	-	100%
01.06	Cadangan Asuransi Dibayar Dimuka	37.500.000	-	-	-	-	
01.07	Cadangan Untuk Sewa Dibayar Dimuka	-	61.643.836	-	-	-	100%
2	EKUITAS DANA INVESTASI	15.065.734.192.797	16.997.828.421.237	-	-	-	11%
02.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	449.848.474.520	751.943.066.573	-	-	-	40%
02.02	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	13.542.429.036.403	15.188.134.904.772	-	-	-	11%
02.03	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	1.073.456.681.874	1.057.750.449.892	-	-	-	-1%
02.04	Dana yang harus disediakan untuk	-	-	-	-	-	

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Growth
	pembayaran Utang Jangka Panjang						
3	EKUITAS DANA CADANGAN	946.923.717.123	1.015.294.136.130	-	-	-	7%
03.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	946.923.717.123	1.015.294.136.130	-	-	-	7%
03.02	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan						
03.03							
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.998.626.993.863	21.463.852.247.807	16.090.766.721.646	19.128.988.032.431	21.183.444.555.922	3%

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Papua 2013-2017

Selain analisis di atas, analisis neraca daerah juga memberikan informasi tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya,

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Tabel 3.7. menunjukkan hasil perhitungan rasio lancar pada neraca keuangan pemerintah Provinsi Papua yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Papua dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak boleh kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Provinsi Papua adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Papua relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya.

Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

Tabel 3.8. Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua

RASIO	RUMUS	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	974.949.906.164	3.450.729.690.440	2.978.758.265.176	4.120.122.675.872	3.991.399.011.372
	Kewajiban Jangka Pendek	13.488.033.934	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Rasio Lancar	72,283	131,974	112,364	13,734	11,031
	Aset Lancar – Persediaan	845.732.003.117	3.363.130.115.874	2.868.083.284.708	3.831.609.854.893	2.804.515.115.136
	Kewajiban Jangka Pendek	13.488.033.934	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Quick Ratio	62,702	128,624	108,190	12,773	7,751
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Total Aset	16.998.626.993.863	21.463.852.247.807	16.090.766.721.646	19.128.988.032.431	21.183.444.555.922
	Rasio Total Hutang (%)	0,0008	0,0012	0,0016	0,0157	0,0171
	Total Hutang	13.556.812.066	26.147.033.876	26.509.784.973	299.987.154.344	361.834.425.713
	Total Ekuitas	16.985.070.181.797	21.437.705.213.931	16.064.256.936.673	18.829.000.878.087	20.821.610.130.209
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,0008	0,0012	0,0017	0,0159	0,0174

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Papua 2013-2017 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Provinsi Papua selama ini merupakan bauran strategi penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelanjaan daerah disamping menjaga keseimbangan surplus dan defisit anggaran yang mengarah pada penciptaan keberlanjutan fiskal daerah.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya;
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
- c) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi Papua terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan sumber Daya Alam.

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir.
- c) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU

dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana Otonomi Khusus Papua merupakan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua perseratus) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional. Penganggarannya disesuaikan dengan Perdasus Papua Tentang Pengalokasian dana Otonomi Khusus Papua;
- b) Dana Tambahan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Otonomi khusus Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.
- c) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- d) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Selama periode tahun 2013-2017, proporsi belanja tidak langsung menyerap anggaran sebesar 58,9%, sedangkan belanja langsung menyerap anggaran rerata sebesar 41,1%. Besarnya proporsi anggaran belanja tidak langsung dalam hal ini terkait dengan adanya transfer dana otonomi khusus Papua dan dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Proporsi Rerata
Belanja Tidak Langsung	62,2%	62,3%	56,3%	56,7%	57,2%	58,9%
Belanja Pegawai	8,0%	7,2%	7,4%	8,2%	8,3%	7,9%
Belanja Hibah	8,0%	7,1%	6,7%	9,0%	7,7%	7,7%
Belanja Bantuan Sosial	2,2%	0,9%	0,8%	1,2%	0,7%	1,1%
Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota	2,8%	2,7%	2,3%	2,6%	2,3%	2,6%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung	41,0%	44,3%	39,0%	35,6%	38,1%	39,6%
Belanja Tidak Terduga	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Belanja Langsung	37,8%	37,7%	43,7%	43,3%	42,8%	41,1%
Belanja Pegawai	2,2%	1,9%	1,5%	2,0%	1,9%	1,9%
Belanja Barang dan Jasa	20,7%	19,4%	19,0%	20,6%	23,4%	20,6%

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Proporsi Rerata
Belanja Modal	14,9%	16,4%	23,1%	20,8%	17,5%	18,6%
TOTAL BELANJA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Jika dilihat dari pos jenis belanja, terlihat cukup besarnya alokasi anggaran untuk belanja bantuan keuangan yang sepanjang tahun 2013-2017 menyerap alokasi anggaran sebesar 39,6% dari total belanja daerah, kemudian pos belanja barang dan jasa menyerap anggaran sebesar 20,6% dan belanja modal menyerap anggaran sebesar 18,6% dari total belanja per tahunnya.

3.2.1.2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam hal ini digunakan untuk pembelanjaan yang terkait dengan penyediaan jasa-jasa umum yang menjadi pendukung bagi berjalannya pemerintahan dan pembangunan secara umum. Belanja-belanja ini terurai kedalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah serta menyebar kedalam berbagai jenis, objek dan rincian objek belanja yang ada.

Selanjutnya gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Papua periode tahun 2013 s/d 2017 ditampilkan pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.10. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	(Rp juta)				
BELANJA	2.013.959.249.673	2.252.348.420.726	2.809.213.246.247	2.938.037.573.985	3.167.730.920.993
BELANJA TIDAK LANGSUNG	657.545.844.872	744.258.374.534	933.275.370.494	986.869.094.636	1.110.723.063.509
Belanja Pegawai	657.545.844.872	744.258.374.534	933.275.370.494	986.869.094.636	1.110.723.063.509
Gaji Dan Tunjangan	374.260.754.421	391.509.678.108	436.332.687.369	483.082.144.233	471.086.850.106
Tambahan Penghasilan PNS	258.674.516.451	325.922.904.676	453.701.766.703	480.663.064.897	613.491.270.240
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	8.302.835.000	8.680.360.000	14.643.473.500	10.478.960.000	7.656.155.000
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	5.000.000.000	2.500.000.000	14.253.046.461	12.197.325.506	18.038.788.163
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	10.976.940.000	15.165.233.750	14.253.046.461	0	
Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	330.799.000	480.198.000	91.350.000	447.600.000	450.000.000
BELANJA LANGSUNG	1.356.413.404.801	1.508.090.046.192	1.875.937.875.753	1.951.168.479.349	2.057.007.857.484
Belanja Pegawai	174.522.914.813	195.383.425.935	190.579.264.830	235.693.717.681	248.630.252.397
Honorarium PNS	80.069.332.340	83.515.295.500	103.874.321.083	131.991.409.694	130.406.659.665
Honorarium Non PNS	91.129.358.973	111.668.505.435	86.704.943.747	103.702.307.987	118.223.592.732
Uang Lembur	3.324.223.500	199.625.000	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa	952.755.527.335	1.121.464.345.247	1.533.983.284.237	1.605.853.505.044	1.735.095.895.196
Belanja Bahan Pakai Habis	78.681.162.815	66.551.366.473	95.207.657.370	89.216.627.796	85.622.773.847
Belanja Bahan/Material	117.056.015.067	119.497.911.667	110.854.765.351	100.947.906.171	108.920.021.952
Belanja Jasa Kantor	91.217.330.186	100.664.946.335	288.743.487.337	239.428.256.295	223.725.404.342
Belanja Premi Asuransi	2.716.100.000	2.825.900.000	107.900.000	166.593.600	160.130.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.695.632.041	27.001.806.349	32.041.140.946	30.033.238.257	30.282.834.419
Belanja Cetak Dan Penggandaan	60.564.379.427	58.221.982.773	62.389.121.465	63.910.032.225	56.532.905.642
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	11.041.830.000	30.060.077.000	2.623.135.000	8.858.617.360	12.371.349.080
Belanja Makanan Dan Minuman	168.037.845.039	318.970.531.208	424.104.810.889	541.158.265.600	697.323.365.568
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	9.266.876.135	11.563.163.320	11.866.039.062	11.113.990.650	10.506.521.920
Belanja Pakaian Kerja	2.955.577.180	1.325.307.250	1.462.334.400	3.203.386.000	1.809.063.000
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	6.211.769.115	6.093.608.301	6.888.233.900	6.374.575.250	5.937.993.840

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Belanja Perjalanan Dinas	295.024.583.952	294.886.959.066	351.810.080.031	431.581.077.165	373.005.365.604
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	21.952.825.000	22.252.566.000	2.661.499.000	248.667.150	
Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.925.832.378	26.863.767.505	53.444.923.021	57.965.516.025	49.887.910.957
Belanja Jasa Konsultansi	29.407.769.000	34.684.452.000	89.778.156.465	21.646.755.500	79.010.255.025
Belanja Modal	229.134.962.653	191.242.275.010	151.375.326.686	109.621.256.625	73.281.709.891
Belanja Modal Pengadaan Tanah	28.541.350.000	12.328.862.000	0		
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat					
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	39.104.151.550	14.765.667.600	52.907.533.350	17.564.617.775	8.033.640.106
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	4.622.157.000	8.870.670.000	924.576.000		147.670.833
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	405.800.000	593.631.500		12.475.000	1.029.600.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	1.595.047.000	0			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.251.657.300	2.489.370.520	8.439.274.700	5.762.820.188	7.993.681.990
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.824.169.858	8.532.978.223			
Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.361.930.660	16.929.145.735	20.468.430.500	16.219.759.245	22.015.731.812
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.392.457.139	17.520.437.714			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.332.860.271	2.293.060.357			
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	13.732.869.748	4.164.872.061			
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.490.638.317	15.197.182.160	5.945.738.260	7.573.082.565	2.735.140.310
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	2.514.761.400	776.191.200	589.825.000	621.231.000	37.500.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	445.227.000	1.064.822.440	422.719.000	415.959.000	369.740.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	32.313.129.110	71.010.771.300	61.595.138.246	61.156.359.152	30.919.004.840
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	26.692.756.300	14.224.362.200		274.952.700	
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian. Kebudayaan	514.000.000	480.250.000	82.091.630	20.000.000	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013-2017 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami pasang surut, seiring dengan peningkatan kebutuhan pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Pada tahun 2013, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 24% yang kemudian menurun menjadi sebesar 21% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 23% dan meningkat lagi menjadi 24% pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 3.11. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2013	2.013.959.249.673	8.332.371.000.000	24%
2.	Tahun Anggaran 2014	2.252.348.420.726	10.487.157.000.000	21%
3.	Tahun Anggaran 2015	2.809.213.246.247	12.421.447.000.000	23%
4.	Tahun Anggaran 2016	2.938.037.573.985	11.998.494.000.000	24%
5.	Tahun Anggaran 2017	3.167.730.920.993	13.443.745.000.000	24%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

3.2.1.3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 3.12. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Uraian	Jumlah (Rp.Juta)					Rerata Pertumb uhan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Belanja Tidak Langsung	5.080.595	6.419.562	6.980.188	6.782.511	7.614.480	11%
Belanja Pegawai	657.546	744.258	919.022	986.869	1.110.723	14%
Belanja Hibah	651.084	732.224	835.350	1.077.607	1.025.283	13%
Belanja Bantuan Sosial	178.167	88.454	94.309	145.771	96.897	-6%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	232.801	280.781	290.677	313.262	310.131	8%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.348.441	4.562.249	4.829.852	4.258.952	5.071.446	12%
Belanja Tidak Terduga	12.557	11.595	10.978	49	-	-53%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000	183.370	25.000	30.000	140.462	101%
Pembentukan Dana Cadangan		68.370	-	-	65.462	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000	115.000	25.000	30.000	75.000	31%
JUMLAH	5.105.595	6.602.932	7.005.188	6.812.511	7.754.942	6%

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Papua selama kurun waktu tahun 2013 s.d 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.13. Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp.juta)	2014 (Rp.juta)	2015 (Rp.juta)	2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	8.397.158	10.709.819	11.805.767	12.567.840	13.006.813
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	8.171.352	10.303.787	12.396.447	11.968.494	13.303.282
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	161.019	183.370	25.000	30.000	140.462
	Defisit Riil	64.787	222.662	-615.680	569.346	-436.931

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2013-2017 terjadi fluktuasi defisit riil pada setiap tahunnya, kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari adanya pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Tabel 3.14. Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Provinsi Papua Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi Dari Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100%	100%	79%	100%	100%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	21%	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Sedangkan komposisi penutup defisit riil umumnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Tabel 3.12 menunjukkan bahwa secara

umum defisit riil ditutupi oleh SILPA, hanya pada tahun 2015, defisit riil juga ditutup dengan pencairan dana cadangan yang mencapai angka sebesar 21 % dari defisit riil yang terjadi.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah langkah yang dilakukan adalah memproyeksi masing-masing pos penerimaan daerah yang selanjutnya dialokasikan pada pengeluaran daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah terutama diasumsikan dari realisasi pertumbuhan yang dihasilkan selama lima tahun belakangan dengan tambahan asumsi-asumsi yang berasal dari informasi kebijakan yang relevan. Beberapa asumsi tersebut antara lain;

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun atau tidak jauh dari proyeksi angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua periode tahun 2018 s/d 2023. Dalam perspektif ini dapat dinyatakan bahwa otoritas pengelola pendapatan daerah Provinsi Papua mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan realisasi penerimaan yang berasal dari PAD, melalui;
 - a. peningkatan realisasi pajak dan retribusi daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Adanya peningkatan kontribusi pembagian deviden dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD diantaranya yang berasal dari PT Bank Papua;

- c. Adanya peningkatan efektivitas pengelolaan dana kas daerah melalui peningkatan efektivitas manajemen idle cash daerah
- 2. Dana perimbangan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 4 persen pertahun sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat. Hal ini didasarkan pada kondisi penerimaan daerah dari dana perimbangan pada beberapa tahun belakangan.
 - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
 - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
 - c. DAK baik fisik maupun non fisik diasumsikan tetap sesuai dengan format pengalokasiannya yang didasarkan pada subjektivitas dari pemerintah pusat
- 3. Sesuai dengan peningkatan penerimaan negara setiap tahunnya, maka diasumsikan juga berpengaruh pada peningkatan perolehan Papua dari dana otonomi khusus Papua yang merupakan proporsi 2 persen dari DAU nasional atau yang nantinya akan dipersamakan dengan pos dana otsus tersebut. Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun.

Dalam konteks berakhirnya masa pengalokasian dana otsus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus maka diasumsikan Pemerintah Pusat akan memberikan sumber dana baru yang jumlahnya minimal sama dengan alokasi dana otsus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus.

B. Belanja Daerah

- 1. Belanja tidak langsung diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 4,5 persen pertahun dengan uraian asumsi sebagai berikut;
 - a. Adanya peningkatan belanja pegawai sebesar 5 persen pertahun untuk mengakomodasi kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai;

- b. Adanya kenaikan belanja hibah rata-rata sebesar 3,5 persen pertahun guna mengantisipasi peningkatan hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan hibah pada lembaga organisasi yang menunjang penyelenggaraan program pembangunan daerah terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat;
 - c. Plafon belanja bantuan sosial diasumsikan tetap setiap tahun, terutama yang akan dialokasikan pada bantuan-bantuan pada kelompok-kelompok masyarakat formal terutama lembaga sosial, adat dan keagamaan;
 - d. Belanja bantuan keuangan terutama diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5% pertahun sesuai dengan asumsi besar pertumbuhan alokasi penerimaan dana otonomi khusus papua. Pos belanja bantuan keuangan ini terutama akan dialokasikan untuk pengalokasian 80 porsi dana otonomi khusus papua yang menjadi bagian untuk kabupaten/kota. Disamping ini pos ini juga digunakan untuk bantuan keuangan pada program-program khusus yang penanganannya dilakukan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Papua;
 - e. Dana bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah. Pos ini merupakan konsekuensi dari pembagian hasil Pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak BBNKB, bagi hasil PBB-KB, bagi hasil pajak rokok dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
2. Seiring dengan asumsi peningkatan pendapatan daerah, belanja daerah diasumsikan juga akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen pertahun, yang terdistribusi menurut jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan pengalokasian belanja langsung berdasarkan program daerah didasarkan pada kemampuan riil keuangan daerah.

Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	13.939.636.118.141	15.141.845.268.955	15.843.022.059.298	16.581.275.368.193	17.348.766.673.422
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	895.809.037.141	1.063.845.268.955	1.113.022.059.298	1.167.275.368.193	1.223.766.673.422
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	669.939.278.125	839.000.000.000	880.000.000.000	925.000.000.000	971.000.000.000
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	41.604.581.700	47.845.268.955	55.022.059.298	63.275.368.193	72.766.673.422
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.580.182.602	27.000.000.000	28.000.000.000	29.000.000.000	30.000.000.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.684.994.714	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
1.2.	Dana Perimbangan	4.411.150.386.000	4.775.000.000.000	4.959.000.000.000	5.151.000.000.000	5.355.000.000.000
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan SDA	648.886.554.000	840.000.000.000	882.000.000.000	926.000.000.000	973.000.000.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	2.616.545.381.000	2.835.000.000.000	2.977.000.000.000	3.125.000.000.000	3.282.000.000.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.145.718.451.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.632.676.695.000	9.303.000.000.000	9.771.000.000.000	10.263.000.000.000	10.770.000.000.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Otonomi khusus	5.808.230.158.000	6.153.000.000.000	6.461.000.000.000	6.783.000.000.000	7.123.000.000.000
1.3.3.	Dana Tambahan Infrastruktur	2.824.446.537.000	3.150.000.000.000	3.310.000.000.000	3.480.000.000.000	3.647.000.000.000
2	BELANJA	13.889.636.118.141	15.211.845.268.955	15.913.022.059.298	16.651.275.368.193	17.418.766.673.422
2.1.	Belanja Tidak Langsung	6.634.374.696.366	7.594.659.007.156	7.914.976.484.410	8.253.327.514.560	8.600.921.177.107
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.728.997.543.848	2.865.447.421.040	3.008.719.792.092	3.159.155.781.697	3.317.113.570.782
2.1.2.	Belanja Hibah	1.212.829.878.600	1.273.471.372.530	1.337.144.941.157	1.404.002.188.214	1.474.202.297.625

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	65.380.508.471	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	459.263.805.847	482.226.996.139	506.338.345.946	531.655.263.244	558.238.026.406
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/PemDes	2.142.902.959.600	2.848.513.217.447	2.937.773.405.214	3.033.514.281.405	3.126.367.282.294
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	7.255.261.421.775	7.617.186.261.799	7.998.045.574.889	8.397.947.853.633	8.817.845.496.315
2.2.1.	Belanja Pegawai	280.798.315.300	294.000.000.000	308.700.000.000	324.135.000.000	340.342.000.000
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.018.589.277.765	4.219.518.741.653	4.430.494.678.736	4.652.019.412.673	4.884.620.383.306
2.2.3.	Belanja Modal	2.955.873.828.710	3.103.667.520.146	3.258.850.896.153	3.421.793.440.960	3.592.883.113.008
	Surplus/Defisit	50.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000
3	Pembiayaan Netto	- 50.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
	SiLPA		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

3.3.2.1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dalam APBD Papua dilakukan berdasarkan data realisasi besaran SiLPA periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selama periode APBD 2019-2023 diperkirakan nilai SiLPA berada pada angka kisaran sebesar 120 milyar atau jauh lebih rendah dari realisasi yang terjadi selama ini. Asumsi utama yang digunakan dalam hal ini adalah proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.16. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Surplus/Defisit	50.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000	-70.000.000.000
3	Pembiayaan Netto	(50.000.000.000)	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
	SiLPA		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

3.3.2.2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2018 sampai dengan periode Tahun 2023 diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan proyeksi peningkatan pendapatan terkait.

Tabel 3.17. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
02.01	Belanja Tidak Langsung	6.634.374.696.366	7.594.659.007.156	7.914.976.484.410	8.253.327.514.560	8.600.921.177.107
02.01.01	Belanja Pegawai	2.728.997.543.848	2.865.447.421.040	3.008.719.792.092	3.159.155.781.697	3.317.113.570.782
02.01.02	Belanja Hibah	1.212.829.878.600	1.273.471.372.530	1.337.144.941.157	1.404.002.188.214	1.474.202.297.625
02.01.03	Belanja Bantuan Sosial	65.380.508.471	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
02.01.04	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	459.263.805.847	482.226.996.139	506.338.345.946	531.655.263.244	558.238.026.406
02.01.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/PemDes	2.142.902.959.600	2.848.513.217.447	2.937.773.405.214	3.033.514.281.405	3.126.367.282.294
02.01.05	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

3.3.2.3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 3.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	13.939.636.118.141	15.141.845.268.955	15.843.022.059.298	16.581.275.368.193	17.348.766.673.422
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran		120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
3	Total Penerimaan	13.939.636.120.160	15.261.845.270.975	15.963.022.061.319	16.701.275.370.215	17.468.766.675.445
	Dikurangi					
4	Pengeluaran Mengikat	6.634.374.696.366	7.594.659.007.156	7.914.976.484.410	8.253.327.514.560	8.600.921.177.107
5	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Kapasitas Riil	7.255.261.423.794	7.617.186.263.819	7.998.045.576.910	8.397.947.855.655	8.817.845.498.338

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

3.3.2.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai belanja tidak langsung dan belanja program pembangunan daerah yang dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas I, merupakan belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam rangka untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua sesuai dengan janji politik Gubernur, disamping program-program wajib dan mengikat sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait dengan agenda pembangunan nasional
2. Prioritas II, merupakan belanja tidak langsung dan belanja program pembangunan daerah terkait dengan prioritas perangkat daerah dalam rangka untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Tabel 3.19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Kapasitas Riil	7.255.261.423.794	7.617.186.263.819	7.998.045.576.910	8.397.947.855.655	8.817.845.498.338
B	Penggunaan Kapasitas Riil					
B.1.	Prioritas I					
	Belanja Langsung Program Prioritas untuk pencapaian visi dan misi Daerah Tahun 2019-2023	6.430.049.506.775	6.782.667.977.702	7.169.619.560.589	7.664.855.849.333	7.997.844.012.015
B.2.	Prioritas II					
B2.01	Belanja Langsung 6 Program Rutin pada seluruh Perangkat Daerah	825.211.915.000	834.518.284.098	828.426.014.300	733.092.004.300	820.001.484.300

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Provinsi Papua

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya adalah:

- 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 5) Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 6) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 7) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;

- 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengupayakan Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil sumber daya alam, DAU dan DAK serta dana dana yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi khusus papua.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :

1. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua tahun 2019-2023;
2. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Maney Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*) dalam rangka memenuhi janji politik dan program piriritas kepala daerah
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses
5. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
6. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah;

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah yang memberikan tingkat pengembalian yang cukup memadai sesuai dengan hasil analisa kelayakan investasi daerah.

4. Kebijakan Pembagian dan Pemanfaatan Dana Otsus

1. Dana otonomi khusus Papua dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota secara berkeadilan dengan memperhatikan daerah-daerah tertinggal, terbelakang, terpencil dan tertentu;
2. Pembagian dana otsus dengan proporsi yang adil antara provinsi dan kabupaten/kota setelah pembagian dana urusan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota;
3. Dana Urusan Bersama (DUB) dipergunakan untuk membiayai program-program strategis lintas kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kepentingan bersama dan pencapaian prioritas daerah secara umum;
4. Dana otsus bagian provinsi dialokasikan pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur, Operasional Kelmbagaan MRP, Lembaga Keagamaan dan kegiatan monitoring evaluasi penyelenggaraan otsus;
5. Dana otsus bagian kabupaten/kota dialokasikan pada bidang Kesehatan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan Infrastruktur dasar, kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua dan Monitoring evaluasi penyelenggaraan otsus di tingkat kabupaten;
6. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus terutama diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur; (transportasi, air bersih, energi listrik, telekomunikasi dan infrastruktur bidang lainnya)
7. Sejumlah tertentu dari dana tambahan dalam rangka otsus dialokasikan kepada kabupaten/kota terutama yang rendah akses melalui bantuan keuangan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang dirinci menurut urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang. Selain itu juga memuat isu-isu strategis internasional, kebijakan nasional, dan isu-isu sektoral lainnya

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan penting dilakukan sebagai basis merumuskan isu strategis. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Provinsi Papua 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab II sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis pembangunan melalui urusan wajib dasar ini menjadi sektor yang strategis dalam rencana pembangunan. Urusan ini menjadi aspek layanan paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat di Provinsi Papua.. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

4.1.1.1. Pendidikan

Penyelenggaraan layanan pendidikan di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai masalah, baik itu pada akses, kualitas maupun tata kelola pendidikan. Pada akses pendidikan, sampai saat ini Provinsi Papua belum dapat menuntaskan program nasional wajib belajar sembilan tahun, karena sampai dengan tahun 2017 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 6,3 tahun dengan perubahannya yang sangat lambat sebesar 0.1325 poin per tahun selama periode 2013-2017. Selain itu, jika diamati secara spasial terlihat ada ketimpangan akses pendidikan yang sangat mencolok, dimana RLS yang paling tinggi adalah 11,2 tahun di Kota Jayapura dan RLS terendah 1,9 tahun di Kabupaten Puncak. Ada deviasi yang sangat tinggi sekali antara terendah dengan tertinggi mencapai 9,2 poin. Dari aspek kualitas, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah ABA (Angka Buta Aksara). Meskipun dari kecenderungannya terlihat ABA di Papua semakin menurun, akan tetapi kondisinya masih jauh di bawah standar nasional. Pada tahun 2017 misalkan, ABA untuk Provinsi Papua mencapai 12,88% jauh di atas ABA Indonesia sebesar 2,07% untuk tahun yang sama. Selain itu juga terjadi ketimpangan yang sangat mencolok dalam pengentasan buta aksaraf. Pada umumnya di wilayah yang mudah akses memiliki ABA sangat rendah, bahkan ada diantaranya mencapai 0% seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Biak Numfor. Sementara untuk daerah-daerah sulit akses dan pegunungan rata-rata tingkat buta aksara penduduk masih sangat tinggi antara 19,35 - 56,17% seperti di Kabupaten Intan Jaya, Yalimo, Nduga, Puncak, Paniai, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Tolikara dan Puncak Jaya.

Semua hal di atas pada akhirnya membuat daya saing pendidikan di Provinsi Papua terlihat belum optimal, yang merupakan permasalahan pokok yang perlu diatasi untuk lima tahun mendatang, dengan permasalahan dan akar masalah yang dapat dijabarkan singkat sebagai berikut.

Tabel 4.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Akses, mutu dan tata kelola pendidikan belum optimal	1. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal 2. Kuantitas dan kualitas pelayanan PKBM yang relatif masih rendah 3. Rendahnya partisipasi pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah 4. Rendahnya proporsi pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan 5. Kondisi topografi yang sangat ekstrim dan variatif sehingga menyulitkan peserta didik mengkases sekolah
	2. Belum optimalnya kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi tenaga pendidik yang belum memadai 2. Penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal dan menyebar merata di setiap wilayah kabupaten/kota 3. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA yang terlihat masih tinggi, khususnya di daerah-daerah pegunungan dan dataran sulit akses 4. Belum maksimalnya melek Calistung (membaca, menulis dan berhitung) 5. Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A dan B
	3. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan tenaga pendidik belum merata baik itu secara kewilayahan maupun mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan 2. Kelayakhunian bangunan sekolah relatif rendah, terutama untuk ruang kelas dan ruang belajar 3. Belum maksimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah 4. Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas relatif masih rendah 5. Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah 6. Pendidikan ekstrakurikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal

4.1.1.2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan bagian krusial dalam memastikan produktivitas sumber daya manusia dalam berkontribusi terhadap upaya pembangunan. Namun demikian, urusan kesehatan di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan pokok bidang

kesehatan di Provinsi Papua terutama terkait dengan rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara rerata mengalami peningkatan di Papua, namun jika ditelaah nampak Kabupaten di wilayah Ha Anim dan La Pago seperti Boven Digul, Asmat, Jayawijaya dan Nduga capaiannya masih dibawah 60 tahun. Selain itu juga dari aspek status gizi bukan saja masalah gizi buruk yang perlu mendapat perhatian namun juga gizi berlebih terlihat menonjol di Papua jika dibanding dengan rata-rata Indonesia. Demikain juga terkait *stunting* (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Papua karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Indonesia. Fakta lainnya lagi adalah Angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data terakhir tahun 2017 menunjukkan terjadi kematian ibu sebesar 289 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan masih rendah, hanya 41,52% di tahun 2017, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 40,90% pada tahun 2017.

Sedangkan dari sumber daya kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 24,13 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya penanganan penyakit malaria di Provinsi Papua, sehingga sampai tahun 2017 tercatat API Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu 59 per 1.000 penduduk, yang cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2014.

Dalam hal kasus HIV/AIDS terindikasi jumlah kasus kematian akibat virus mematikan tersebut terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 tercatat ada 1.883 kematian akibat HIV/AIDS.

Terkait dengan berbagai kondisi kesehatan di Provinsi Papua seperti di atas, maka dapat disampaikan permasalahan pokok dan akar masalah pembangunan kesehatan untuk masa mendatang di Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 4.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
<p>1. Derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang belum optimal</p>	<p>1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Puskesmas yang belum memadai karena minimnya sarana dan prasarana Puskesmas, dan rendahnya kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas 2. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan belum merata menjangkau seluruh wilayah kabupaten 3. Kedisiplinan tenaga medis yang masih terlihat rendah 4. Belum optimalnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 5. Belum maksimalnya penerapan SPM Rumah Sakit dan Puskesmas 6. Rendahnya Jaminan Kesehatan pada masyarakat miskin 7. Belum maksimalnya pelayanan kefarmasian dan obat-obatan, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan generik maupun herbal
	<p>2. Masih rendahnya derajat kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih rendah 2. Belum maksimalnya penggunaan KIA dan KMS bagi ibu-ibu hamil 3. Belum optimalnya pemberian ASI Eksklusif 4. Masih banyaknya praktek-praktek dukun beranak tradisional yang tidak terlatih kebidanan 5. Masih tingginya keinginan ibu-ibu hamil mendatangi/mendatangkan dukun beranak untuk melahirkan 6. Rendahnya pengetahuan dan penerapan masyarakat terhadap makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 7. Proporsi pengeluaran perkapita masyarakat untuk kesehatan yang belum memadai 8. Kesadaran masyarakat terhadap dampak bahaya seks bebas masih rendah 9. Kondisi lingkungan rumah dan pemukiman yang masih buruk sehingga beresiko pada kesehatan keluarga 10. Rendahnya gizi ibu, bayi dan anak 11. Masih banyaknya kasus stunting dan gizi buruk

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan dua hal yaitu belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur dasar. Akses dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan merupakan hal yang vital sebagai penghubung antar pusat-pusat sosial, ekonomi dan pemukiman. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun social. Perkembangan jalan dalam kondisi baik di Papua sepanjang tahun 2014-2017 menunjukkan kecenderungan penurunan kecuali untuk Kota Jayapura. Secara keseluruhan kondisi kemantapan jalan dalam kondisi baik di Papua menurun, dari 66,78 persen di tahun 2014 menjadi 34,31 persen di tahun 2017. Namun jika di rinci khusus tahun 2016, kondisi jalan provinsi dengan Panjang 2.191,29 km dalam kondisi baik mencapai 75,16 persen, jalan Kabupaten dengan Panjang 12.651,35 km dalam kondisi baik 49,75 persen dan jalan kota dengan Panjang 248,24 km dalam kondisi baik mencapai 81 persen tahun 2016, Sedangkan untuk kondisi jembatan di Papua tahun 2016 dari 914 jembatan nasional dalam kondisi baik hanya mencapai 28,45 persen, kondisi sedang 18,16, kondisi rusak berat dan ringan masing-masing 19,58 persen dan 21,55 persen sedangkan kondisi putus dan kritis masing-masing 1,65 persen dan 10,61 persen (Buku Informasi Statistik 2017). Dari sisi aksesibilitas yang dilihat dari rasio Panjang jalan dengan luas wilayah masih tahun 2016 sebesar 0,06 persen. Berikut pemetaan permasalahan dan akar masalah urusan pekerjaan umum di Papua.

Tabel 4.3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang rendah dan menyebar tidak merata	1. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya konstruksi jalan dan jembatan yang tidak sesuai standar 2. Lambatnya rehabilitasi jalan/ jembatan rusak 3. Belum memadainya panjang jalan dalam kondisi mantap 4. Belum terhubungnya beberapa ibukota kabupaten oleh infrastruktur jalan/jembatan 5. Belum optimalnya konektivitas antar kawasan strategis provinsi

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		6. Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
2. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar pada masyarakat	2. Belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak daerah belum mengoptimalkan sumber air baku secara kontinyu 2. Minimnya ketersediaan jaringan irigasi 3. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali banjir 4. Belum memadainya infrastruktur perdesaan 5. Manajemen infrastruktur dasar yang masih sangat rendah 6. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat
3. Kurang terkendalinya pergerakan pembangunan dalam mengimplementasikan rencana tata ruang	3. Rendahnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang 2. Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai 3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang belum berjalan maksimal 4. Rendahnya kapasitas SDM perencana tata ruang dalam melakukan analisis keruangan yang terintegrasi dan berkelanjutan

4.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Akses Pemukiman layak huni masih menjadi persoalan utama dalam urusan ini. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya akses rumah layak huni serta minimnya ketersediaan utilitas pemukiman. Kebutuhan dasar manusia yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dengan kualitas dan kuantitas yang memadai harus dipenuhi. Ketersediaan air minum merupakan salah satu indikator yang menandakan permukiman yang layak huni. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Papua kebutuhan akan air minum juga semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan dasar air minum dengan membandingkan antara penduduk yang berakses air minum di Papua terlihat masih belum optimal yang mana persentasenya dominan masih dibawah 50 persen dengan kecenderungan yang menurun. Untuk penyediaan air minum layak konsumsi Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya PDAM. Kinerja PDAM dalam penyediaan air minum dapat dilihat dengan menghitung rasio volume produksi riil PDAM dengan Jumlah penduduk yang terlayani. Semakin

tinggi rasionya semakin baik dari sisi kuantitas. Data tahun 2016 capaian rasionya terlihat tertinggi di Indonesia yaitu 3,74 l/det per 1000 penduduk terlayani. Selain itu juga persentase penduduk yang berakses air bersih di Papua menunjukkan penurunan yaitu dari 42,37 persen tahun 2013 menjadi 28,37 persen di tahun 2017. Cakupan layanan PDAM berdasarkan data pelayanan PDAM agustus 2017 di Papua masih rendah yaitu 14,9 persen, dengan persentase kehilangan air yang mencapai 50,24 persen yang jauh di atas rata-rata Indonesia.

Selain itu juga terkait urusan perumahan, kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni semakin meningkat disisi lain keterjangkauan/daya beli akan rumah terbatas yang berdampak pada kualitas rumah dan menciptakan rumah yang tidak layak huni. Pembangunan hunian yang layak untuk masyarakat perkembangannya fluktuatif di Papua. Tahun 2013-2014 terlihat meningkat sangat signifikan yaitu dari 164 menjadi 4000 unit yang kemudian berlanjut di tahun 2015 terlihat meningkat namun tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu menjadi 4025 unit. Setelah tahun 2015 tersebut, pembangunan rumah layak huni terlihat semakin menurun sampai dengan tahun 2017 menjadi 1878 unit. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut dapat dipetakan persoalan dalam Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut.

Tabel 4.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	2. Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat	1. Kurang memadainya sanitasi dan jamban yang aman, bersih dan layak pada rumahtangga 2. Belum optimalnya akses rumahtangga terhadap air bersih dan air minum 3. Masih banyaknya keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni 4. Rendahnya kepemilikan rumah dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan standar keamanan dan keselamatan

4.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Pembangunan Provinsi Papua masih terdapat permasalahan di bidang ini, misalnya ditunjukkan dengan adanya gangguan pada kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat.

Angka kejadian konflik di Papua tahun 2015 di dominasi oleh kejadian konflik lainnya yaitu 2.205 kejadian, kemudian disusul oleh kejadian main hakim sendiri tercatat 888 kejadian dan terakhir konflik sumber daya yang mencapai 419 kejadian dengan Kabupaten Mimika sebagai penyumbang terbesar jumlah kejadian konflik. Selain itu juga data angka kriminalitas di Papua tahun 2016 mencapai 4.844 kasus dan kemudian terlihat menurun di tahun 2017 yaitu 3.561 kasus. Kota Jayapura sebagai penyumbang terbesar kejadian kriminalitas di Papua disusul kemudian Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban	1. Masih tingginya tingkat kriminalitas di beberapa daerah rawan konflik	1. Belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum dan keamanan 2. Belum optimalnya penegakan perda dan perkara 3. Masih tingginya tingkat kejahatan yang belum tertangani (pidana berat dan ringan) 4. Belum optimalnya penyelesaian tindak pidana 5. Belum memadainya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan 6. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum 7. Belum maksimalnya upaya-upaya pencegahan konflik dan perang antarsuku 8. Tingginya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak dan remaja dalam rumahtangga

4.1.1.6. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Provinsi Papua masih menghadapi berbagai persoalan sosial. Dari total keluarga yang tercatat sebanyak 182.514 KK pada tahun 2017 Keluarga Sejahtera I dan Pra Sejahtera tercatat masing-masing sebesar 51,74 persen dan 27,38 persen. Selain itu, masalah kebutuhan sosial masih sangat kurang terkait kebutuhan akan pendidikan, interaksi dengan keluarga dan interaksi dengan lingkungan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan social yang cukup besar di Papua. tahun 2013 jumlah penyandang kesejahteraan social mencapai 181.271 orang yang meningkat tajam di tahun 2017 yaitu mencapai 470.722 orang. Berikut ini pemetaan masalah pokok bidang sosial serta akar-akar masalahnya.

Tabel 4.6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tingginya kerentanan sosial masyarakat	1. Rendahnya pemberdayaan terhadap warga KAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan terhadap KAT kurang optimal 2. Rentang jangkauan terhadap KAT sangat luas 3. Sinergitas dan integrasi antarsektor dalam penanganan KAT masih sangat rendah 4. Belum maksimalnya pendataan KAT yang lengkap dan akurat
	2. Belum optimalnya pelayanan terhadap PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya rehabilitasi sosial bagi PMKS 2. Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan PMKS masih lemah 3. Minimnya sarana prasarana penanganan PMKS 4. Masih rendahnya koordinasi antar stakeholder dalam penanganan PMKS

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar juga merupakan bidang strategis yang perlu diketahui dinamika pembangunannya selama ini. Bidang-bidang dalam urusan ini terkait dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan

hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

4.1.2.1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Persentase penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK di Papua mengalami penurunan, yaitu dari 75,43 persen di tahun 2015 menjadi 69,74 persen di tahun 2017. Jika diperhatikan per wilayah, nampak bahwa Kabupaten yang persentase penduduknya sudah berbasis NK yang mencapai 100 persen pada tahun 2015 ada 3 kabupaten yaitu Yahukimo, Mambero Tengah dan Deiyai, sedangkan kondisi tahun 2017 hanya 1 kabupaten yaitu Puncak. Persentase penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK yang terendah tahun 2015 di Lanny Jaya yaitu 29,98 persen dan tahun 2017 di Kabupaten Dogiyai dengan capaian hanya 21,98 persen. Demikian juga untuk bayi yang mempunyai akte lahir masih rendah di papua namun terlihat meningkat dari 38,41 persen tahun 2015 menjadi 39,81 persen di tahun 2017. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 4.7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya pelayanan kependudukan yang transparan dan akuntabel	1. Minimnya Ketersediaan database kependudukan	1. Belum maksimalnya capaian penduduk yang memiliki NIK dan KTP-el 2. Belum memadainya jumlah warga yang terdata dalam pendataan penduduk dan catatan sipil 3. Belum tersedianya data terpilah khusus OAP 4. Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata

4.1.2.2. Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Provinsi Papua memiliki potensi yang besar namun, kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Papua dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.

Tabel 4.8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1. Belum tersedianya ruang publik untuk pertunjukan seni dan budaya 2. Tingginya pengaruh budaya dari luar 3. Kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya 4. Promosi budaya yang belum memadai 5. Minimnya jumlah sanggar tempat ekspresi nilai-nilai seni dan budaya
	2. Kurangnya pelestarian budaya asli Papua	1. Rendahnya penuturan terhadap bahasa asli Papua 2. Belum terdata dan terjaganya benda-benda budaya Papua 3. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni dan budaya 4. Masih rendahnya jumlah pengunjung event seni budaya di anjungan Papua TMII

4.1.2.3. Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Papua memiliki potensi pemuda dan keolahragaan yang cukup besar. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka pemuda dan olahraga dapat menjadi salah satu pengungkit daya saing Provinsi Papua. Namun demikian, penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga masih menghadapi berbagai persoalan. Berikut ini merupakan pemetaan permasalahan urusan pemuda dan olahraga.

Tabel 4.9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya daya saing keolahragaan	1. Belum optimalnya prestasi Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya event-event keolahragaan (kompetisi) tingkat daerah 2. Belum memadainya pembinaan terhadap olahraga 3. Adnya keterbatasan SDM keolahragaan (wasit, pelatih, tenaga penyelenggara event, tenaga medis olahraga) 4. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang bertaraf nasional dan internasional 5. Rendahnya integrasi antara event-event keolahragaan dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya (terutama dengan sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi)
	2. Belum maksimalnya penggalan bibit atlet dari usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya upaya pembibitan atlet asli Papua 2. Belum adanya lembaga yang mengelola dan mencari bibit muda atlet yang berpotensi
2. Rendahnya keberdayaan pemuda	3. Rendahnya jati diri pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merosotnya moralitas pemuda yang mengakibatkan perilaku asosial 2. Minimnya pengembangan wawasan kebangsaan pemuda
	4. Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi generasi muda 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan pemuda 3. Rendahnya kesadaran pemuda terhadap perannya sebagai penerus bangsa

4.1.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak disebabkan oleh kecenderungan perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses-proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan cenderung mengalami peningkatan di Papua yaitu dari 57,22

persen di tahun 2013 meningkat menjadi 64,73 persen di tahun 2017. Partisipasi terbesar perempuan pada Lembaga pemerintahan tahun 2013-2015 berasal dari Kota Jayapura, disusul kemudian oleh kabupaten Nabire dan Sarmi yang berada diatas rata-rata provinsi, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Yapen yang hanya sebesar 30,12 persen. Demikian juga partisipasi perempuan yang menduduki kursi DPRD di Papua mengalami kecenderungan peningkatan, yaitu dari 77,61 persen di tahun 2013 meningkat menjadi 79,38 persen di tahun 2017. Persentase terbesar perempuan yang menduduki kursi DPRD tahun 2013-2015 terdapat di Kota Jayapura yang mencapai 94,50 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Lanny Jaya yang mencapai 90,82 persen dan Kabupaten Jayapura yang mencapai 90,60 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Asmat yang hanya sebesar 49,48 persen. Berikut ini merupakan pemetaan masalah hingga akar masalah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 4.10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan	1. Rendahnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan publik sangat rendah (proses pengambilan keputusan) 2. Upaya pemberdayaan perempuan yang belum optimal 3. Budaya Papua menempatkan posisi perempuan sebagai faktor produksi 4. Upaya penyadaran terkait kesetaraan gender masih belum optimal 5. Pemahaman aparaturnya terkait kesetaraan gender masih rendah 6. Masih rendahnya perencanaan pembangunan dan kebijakan yang responsif gender 7. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

4.1.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dihadapi oleh Provinsi Papua saat ini adalah belum optimalnya perencanaan terkait jumlah dan jarak kelahiran anggota keluarga, hal ini terjadi karena rendahnya

partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana. Laju pertumbuhan penduduk di Papua cenderung menurun sejak tahun 2013-2017 dengan angka di bawah 2 persen, namun untuk Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Mimika, Pegunungan Bintang, Tolikara, Keerom, Waropen, Supiori, Mambero Raya, Mambero Tengah, Yalimo, Puncak dan Deiyai terlihat meningkat dari tahun 2016-2017. Perkembangan anggota keluarga di Papua terlihat stagnan yaitu 4 orang anggota keluarga, sedangkan untuk Kabupaten Jayapura dan Asmat terlihat di atas 5 jumlah anggota keluarganya. Walaupun terlihat rendah pertumbuhan penduduk, namun program pengendalian penduduk dan pelayanan KB perlu di back up oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/kota. Perkembangan pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB di Papua menunjukkan angka yang cenderung menurun. Tahun 2013-2015 terlihat menurun rasio akseptor KB dari 82,94 persen menjadi 33,38 persen di tahun 2015, namun kemudian kembali meningkat sampai dengan tahun 2017 yaitu 79,37 persen namun masih dibawah capaian tahun 2013. Selain itu jumlah PUS yang ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) di Papua terlihat perkembangannya fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2013 kebutuhan akan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi mencapai 40.608 pasangan, yang kemudian meningkat pesat di sampai dengan tahun 2015 yang mencapai 231.160 pasangan, kemudian menurun kembali di tahun 2016 menjadi 181.876 pasangan dan tahun 2017 kembali menurun drastis hingga mencapai 41.122 pasangan usia subur. Jika diperhatikan per Kabupaten/kota kondisi kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi sepanjang tahun 2013-2017 terbesar terdapat di Kabupaten Merauke, Biak Numfor, Jayawijaya dan Jayapura. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan masalah dan akar masalah pengendalian penduduk dan pelayanan KB sebagai berikut.

Tabel 4.11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan Keluarga Berencana	1. Rendahnya akseptor KB aktif	1. pencegahan resiko kesehatan 2. Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS 3. Rendahnya literasi fungsi dan keterkaitan KB

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		4. Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas 5. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (alkon) KB jangka Panjang 6. Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi karena lokasi yang sulit terjangkau Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan kader KB

4.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berperan penting sebagai solusi atas permasalahan kesejahteraan yang masih dialami masyarakat Papua. Pelaksanaan urusan ini sangat strategis dengan dukungan kebijakan undang-undang desa dan program pemberdayaan masyarakat kampung yang telah berjalan cukup lama di Provinsi Papua sebagai bagian dari prioritas pelaksanaan otonomi khusus. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan di dalam urusan ini, misalnya dibuktikan dengan status kampung mandiri yang masih rendah di Papua. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Papua sebagai berikut:

Tabel 4.12. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kampung mandiri dan berkembang di Papua	1. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kampung	1. Ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kampung masih sangat rendah 2. Belum berkembangnya sentra produksi komoditi unggulan kampung 3. Minimnya ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur kampung 4. Belum maksimalnya penyediaan infrastruktur dasar di daerah perbatasan 5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau terluar
	2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kampung yang mandiri	1. Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung 2. Belum memadainya kapasitas aparatur kampung

4.1.2.7. Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakefektifan konektivitas transportasi. Transportasi melalui jalur udara merupakan hal yang penting, terutama untuk wilayah Pegunungan di Papua karena lebih cepat untuk menjangkaunya dan karena konektivitas antar Kabupaten yang terbatas dengan jalur darat maupun laut. Oleh karena itu Papua, memiliki jumlah bandara terbanyak di Papua. Tahun 2017, Jumlah bandara di Papua tercatat sebanyak 109 bandara yang terdiri dari bandara internasional, domestic dan perintis, dan yang terbanyak terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Jumlah penumpang terbanyak tercatat melalui bandara Sentani Jayapura dengan Jumlah yang cenderung meningkat. Tahun 2013 jumlah penumpang mencapai 1,67 juta orang dan tahun 2017 mencapai 1,9 juta orang. Berdasarkan kondisi wilayah Papua yang unik tersebut tentunya pengoperasian dan pelayanan udara membutuhkan sumber daya manusia yang handal serta dapat menerapkan teknologi dengan prosedur-prosedur penerbangan terkini serta peralatan navigasi yang dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan dan bekerja yang maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah urusan perhubungan di Papua sebagai berikut:

Tabel 4.13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya konektivitas transportasi	1. Aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang sangat rendah	1. Belum optimalnya konektivitas antar kawasan strategis provinsi 2. Rendahnya ketersediaan moda transportasi antar daerah 3. Rendahnya kualitas manajemen pelayanan perhubungan darat dan laut 4. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat 5. Rendahnya ketersediaan moda transportasi darat dan laut 6. Rendahnya ketersediaan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan 7. Rendahnya kualitas pelayanan pelabuhan dan fasilitas pelabuhan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		8. Belum optimalnya ketersediaan bandara 9. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat 10. Rendahnya kualitas pelabuhan dan fasilitas pelabuhan 11. Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara

4.1.2.8. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada bidang urusan komunikasi dan informatika adalah akses komunikasi dan telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah di Papua serta belum optimalnya kualitas kelembagaan dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik. Keberadaan Jaringan TIK yang menjangkau seluruh wilayah di Papua bisa membantu mendorong berkembangnya perekonomian di Papua. Oleh karena itu keterjangkauan konetivitas layanan yang merata sangat diperlukan, selain itu juga efektifitas, keamanan, kecepatan, server dan sistem layanan yang bagus, serta SDM yang handal dalam bidang TIK akan memudahkan implementasi *e government, smart city, smart maritime* dan lainnya di Papua.

Saat ini jaringan telekomunikasi di Papua sudah menyebar di ibu kota Kabupaten dan kota, namun untuk daerah pedalaman atau wilayah sulit akses masih terbatas. Tantangan geografis dan Jumlah pelanggan yang tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan menyebabkan hanya operator Telkomsel saja yang terlihat dominan menguasai pasar Papua dengan jumlah unit BTS yang mencapai 4.461, sedangkan Indosat hanya 137 unit BTS dan XL 46 BTS di tahun 2018. Namun demikian kapasitas jaringan yang ada di Papua masih terbatas dan kecepatan layanan data yang masih lambat. Telkomsel sebagai operator yang menguasai pasar telekomunikasi di Papua sampai dengan Desember 2016 memiliki Jumlah pelanggan 1.78 juta pelanggan sedangkan pelanggan indihome di Papua tercatat 7.155 pelanggan dengan jumlah sambungan telepon mencapai 28 ribu satuan sambungan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi	1. Penyediaan jaringan telekomunikasi yang masih sangat terbatas dan timpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya akses informasi dan komunikasi 2. Masih rendahnya akses jaringan berbasis teknologi informasi 2. Minimnya kapasitas jaringan BTS yang terbangun 3. Minimnya kapasitas jaringan BTS yang terpelihara 4. Rendahnya kapasitas SDM yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi dan komunikasi

4.1.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi di sektor koperasi dan UKM adalah rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah. Persentase koperasi yang aktif di Papua sampai dengan tahun 2017 hanya sebesar 52,48 persen dari total koperasi. Kabupaten Asmat memiliki persentase koperasi aktif terendah yaitu 20,73 persen, diikuti oleh Kabupaten Nabire dengan persentase koperasi aktif mencapai 30,22 persen dan Kota Jayapura yang memiliki persentase koperasi yang aktif hanya 33,32 persen. Permasalahan yang mengemuka selama ini terkait pengembangan perkoperasian di Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 4.15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya implementasi Koperasi sebagai soko guru ekonomi	1. Kondisi perkembangan koperasi yang stagnan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas SDM pengelola koperasi yang masih rendah 2. Banyaknya lembaga koperasi yang dikelola dengan tidak transparan, akuntabel dan profesional 3. Rendahnya kehidupan berkoperasi dalam masyarakat 4. Rendahnya kualitas dan jumlah tenaga pendamping pengembangan koperasi
2. Rendahnya kontribusi UKM dalam perekonomian wilayah	1. Belum memadainya UKM pada sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kemampuan wirausaha dagang 2. Barang yang diproduksi belum berorientasi pasar

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		3. Keterbatasan ketersediaan dan kualitas sarana pendukung distribusi barang industri 4. Kurangnya akses masyarakat bantuan permodalan (KUR) 5. Terbatasnya jaringan pemasaran UKM di dalam dan ke luar daerah 6. Kurangnya jiwa wirausaha masyarakat asli papua 7. Belum memadainya inkubator UKM

4.1.2.10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Jika masyarakat di Papua tidak memiliki kedaulatan dalam memproduksi dan menghasilkan kebutuhan pangan maka akan sulit untuk menciptakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Papua sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangan dan peningkatan produksi komoditi pangan local dan membudayakan konsumsi pangan local perlu ditingkatkan di Papua untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi *stunting* di Papua.

Ketergantungan penduduk Papua pada sumber makanan padi-padian dan hewani sebagai sumber energi dan protein kurang lebih mencapai 73 persen, kondisi ini mengindikasikan bahwa sumber pangan local berupa sagu dan umbi-umbian bukan menjadi pilihan utama di Papua walaupun penduduk Papua diketahui memiliki makanan pokok sagu dan umbi-umbian. Dari data Cadangan pangan dari beras terlihat meningkat sepanjang tahun 2013-2017 dengan pertumbuhan rata-rata 45 persen, namun masalah yang ada adalah terkait distribusi yang tidak tahun kontrak terlaksana. Dari sisi Jumlah penduduk yang sangat rawan pangan di Papua, persentasenya terlihat cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2013-2016, yaitu dari 41,04 persen tahun 2013 menjadi 28,18 persen di tahun 2016, sedangkan untuk penduduk rawan pangan cenderung meningkat persentasenya yaitu dari 29,63 persen tahun 2013 menjadi 31,78 persen pada tahun 2016, sedangkan penduduk yang tahan pangan di Papua cenderung meningkat yaitu dari 29,33 persen tahun 2013 menjadi 40,04 persen tahun 2016. Sedangkan untuk daerah rawan pangan terlihat ada

penurunan dari tahun 2013-2015, namun untuk tahun 2015-2016 terlihat tetap dengan jumlah 13 daerah rawan pangan dan untuk daerah tahan pangan terlihat meningkat dari 1 daerah menjadi 16 daerah tahan pangan di Papua. Berdasarkan kondisi ketahanan pangan tersebut, dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tingginya kerawanan pangan pada penduduk	1. Rendahnya ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produktifitas pangan lokal 2. Sulitnya akses distribusi pangan 3. Belum memadainya lumbung pangan di wilayah perdesaan 4. Rendahnya produksi tanaman pangan lokal Papua 5. Rendahnya diversifikasi pangan lokal pengganti beras 6. Tingginya ketergantungan pada sumber energi dan protein padi-padian dan hewani 7. Panjangnya rantai distribusi pangan yang berakibat pada penurunan kualitas pangan 8. Ketahanan pangan pada keluarga OAP relatif masih rendah
	2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi 2. Belum adanya sertifikasi layak konsumsi dari dalam daerah 3. Belum adanya kontrol yang baik untuk menjaga konsumsi dan keamanan pangan 4. Belum optimalnya sosialisasi budaya konsumsi pangan lokal 5. Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal sebagai sumber energi dan protein utama 6. Terbatasnya akses penduduk pada makanan lokal dan bergizi

4.1.2.11. Penanaman Modal Daerah

Sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2017, trend investasi di Papua mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp109.304.355 juta di tahun 2013 naik menjadi Rp122.549.122 juta di tahun 2017, namun dari Jumlah investornya mengalami penurunan yaitu dari 168 di tahun 2013 menjadi 87 di tahun 2017. Dari sisi penyebarannya investasi terbesar berasal dari Kabupaten Mimika disusul kemudian oleh Kabupaten Merauke dan Jayapura. Secara keseluruhan sampai dengan

tahun 2017 terdapat 233 investor yang menanamkan modalnya di Papua yang 70 persen diantaranya merupakan PMA. Permasalahan yang dihadapi di sektor penanaman modal adalah belum optimalnya kinerja investasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

Tabel 4.17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1. Daya saing investasi yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya infrastruktur pendukung investasi 2. Belum memadainya promosi investasi baik itu secara sektoral maupun spasial 3. Tingginya biaya transaksi dalam berinvestasi (administrasi, transportasi dan lobi) 4. Tingkat ketergantungan investasi terhadap satu sektor masih sangat tinggi 5. Belum terintegrasinya dengan baik antara kepentingan investor dengan pemilik hak ulayat

4.1.2.12. Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Papua cenderung meningkat yaitu dari 1.688.876 orang di tahun 2013 menjadi 1.762.841 orang di tahun 2017 dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Papua mencapai 3,23 persen dan tahun 2017 tercatat 3,86 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Walaupun tingkat pengangguran rendah di Papua sampai dengan tahun 2017, tenaga kerja yang terserap masih didominasi berpendidikan sampai dengan SD. Tahun 2013 tenaga kerja dengan Pendidikan sampai dengan SD mencapai 64,65 persen dan tahun 2017 mencapai 58,45 persen. Penduduk yang bekerja di sector pertanian mendominasi sepanjang tahun 2013-2017 dengan jumlah yang cenderung mengalami penurunan namun dari sisi persentasenya cenderung mengalami peningkatan, sedangkan untuk orang yang bekerja di sector jasa dan

industry/manufaktur cenderung mengalami peningkatan namun dari sisi persentasenya mengalami penurunan. Rasio penduduk yang bekerja mencapai di Papua tahun 2017 mencapai 96,38 persen, sedangkan untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura rasio orang yang bekerja paling rendah dibandingkan Kabupaten lainnya di Papua yaitu di bawah 90 persen. Selain itu dari sisi keterlibatan penduduk isis produktif yang aktif secara ekonomi (TPAK) di Papua persentasenya cenderung menurun. Dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013, 78,01 persennya bersedia untuk aktif secara ekonomi, sedangkan di tahun 2017 turun mencapai 76,94 persen. TPAK di Kabupaten Waropen terlihat paling rendah, diikuti oleh Kabupaten Jayapura, Yalimo dan Kota Jayapura dengan capaian dibawah 60 persen pada tahun 2017. Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan di Papua, dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	1. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja yang berpendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas tenaga kerja yang rendah 2. Pencari kerja yang lebih dominan pada pendidikan rendah 3. Belum memadainya kualitas Balai Latihan Kerja 4. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangat rendah 5. Kurangnya minat pencari kerja terhadap sektor informal 6. Rendahnya etos kerja OAP 7. Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal

4.1.2.13. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya kerusakan lingkungan hidup perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti karena akan meningkat dari waktu ke waktu. Kebakaran hutan, kekeringan, bencana gempa bumi, longsor, banjir dan perubahan iklim yang ekstrim di Papua menjadi hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi sedini mungkin dan tidak bisa ditunda penanganannya. Diperlukan sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang bersinergi di provinsi maupun dengan perencanaan di tingkat Kabupaten/kota di wilayah Papua dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Papua, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan	1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin menurunnya kualitas udara 2. Tingginya pencemaran air 3. Berkurangnya tutupan lahan 4. Menurunnya kualitas ekologi 5. Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan 6. Rendahnya penggunaan energi listrik yang terbarukan 7. Kurangnya pengelolaan persampahan 8. Meningkatnya Penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan 9. Meningkatnya penggunaan barang-barang penghasil Gas Rumah Kaca 10. Meningkatnya jumlah kendaraan di perkotaan

4.1.2.14. Kearsipan

Kearsipan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama untuk mencapai tertib administrasi dan basis data bagi pembangunan. Permasalahan yang masih terjadi terkait urusan kearsipan ialah belum optimalnya penerapan arsip secara baku di setiap perangkat daerah dan kapasitas sumber daya kearsipan yang belum memadai. Identifikasi permasalahan pembangunan di bidang kearsipan sebagai berikut:

Tabel 4.20. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tata kelola kearsipan yang masih rendah dan belum dilaksanakan secara profesional	1. Kapasitas tenaga kearsipan yang belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya tenaga kearsipan yang bersertifikasi profesional 2. Pengembangan tenaga kearsipan yang belum memadai 3. Rendahnya minat masyarakat terhadap tenaga profesional kearsipan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	2. Minimnya sarana dan prasarana kearsipan	1. Terbatasnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang dapat memenuhi standar minimal 2. Belum memadainya pedoman dan SOP kearsipan 3. Belum maksimalnya pelestarian arsip dan pustaka yang bernilai guna statis

4.1.2.15. Statistik

Urusan statistik bagian dari urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Statistik sebagai urusan wajib memegang peran penting di dalam pembangunan daerah, terutama terkait penyediaan basis data. Permasalahan di bidang statistik sebagai berikut:

Tabel 4.21. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya penerapan tata kelola pembangunan berbasis bukti	1. Belum memadainya penyediaan basis data pembangunan baik itu dalam bentuk statistik dasar maupun statistik sektoral	1. Belum optimalnya ketersediaan data SIPD 2. Kurang terintegrasinya antara kebutuhan data statistik dasar dengan statistik sektoral 3. Minimnya kapasitas dan keterampilan aparatur perencanaan dalam menyediakan data-data statistik sektoral 4. Kurangnya transparansi dan akuntabel dalam penyediaan data statistik dasar maupun sektoral 5. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis bukti 6. Belum optimalnya ketersediaan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas

4.1.2.16. Pertanian

Pertanian merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanian sebagai berikut:

Tabel 4.22. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya Reforma Agraria	1. Belum maksimalnya tata kelola pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tumpang tindih kepemilikan tanah 2. Banyaknya tanah yang terlantar. 3. Belum adanya data base tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang 4. Belum maksimalnya pengakuan negara/pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat 5. Selalu terjadinya konflik dalam ganti rugi tanah 6. Belum harmonisnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang sektoral

4.1.2.17. Persandian

Persandian merupakan bagian dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan persandian terkait keamanan informasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang terkait urusan persandian sebagai berikut:

Tabel 4.23. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah	1. Belum optimalnya pola penetapan hubungan sandi antar perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah 2. Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur persandian

4.1.2.18. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan kebutuhan seklaignus prasyarat krusial dalam meningkatkan literasi masyarakat. Meskipun perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan diluar perpustakaan namun, penyelenggaraan urusan perpustakaan merupakan leading sector dalam mewujudkan budaya membaca dan penyebaran

perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, penyelenggaraan urusan perpustakaan di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai persoalan di bawah ini:

Tabel 4.24. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Tata kelola perpustakaan yang masih rendah dan belum dilaksanakan secara profesional	1. Kapasitas tenaga perpustakaan yang belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya tenaga perpustakaan yang bersertifikasi profesional 2. Pengembangan tenaga perpustakaan yang belum memadai 3. Rendahnya minat masyarakat terhadap tenaga profesional perpustakaan
	2. Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan yang dapat memenuhi standar minimal 2. Distribusi penyebaran perpustakaan daerah yang timpang 3. Belum memadainya pedoman dan SOP perpustakaan 4. Ketersediaan buku-buku perpustakaan yang tidak seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat 5. Penyediaan buku-buku perpustakaan belum terlaksana secara dinamis dan kontinu mengikuti perkembangan IPTEK

Urusan Pilihan

Meskipun berada dalam urusan pilihan, namun berbagai bidang di dalam urusan ini tetap menjadi hal strategis yang perlu diulas dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Urusan ini terkait dengan dinamika optimalisasi potensi lokal daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan berbagai bidang dalam urusan pilihan, merupakan bidang strategis yang menentukan masa depan pembangunan Provinsi Papua:

4.1.3.1. Pertanian

Sector Pertanian peranannya terlihat menurun dalam pembentukan PDRB ADHK Papua sepanjang tahun 2013-2017 dengan kontribusi rata-rata mencapai 11,38 persen dengan Kabupaten Sarmi dan Keerom sebagai penyumbang terbesar.

Kontribusi terbesar sektor pertanian berasal dari tanaman palawija yang mencapai 59,69 persen, disusul kemudian oleh perkebunan yang mencapai 15,66 persen pertahun. Nilai Tukar Petani di Papua terlihat mengalami penurunan dengan angka dibawah 100. Tahun 2013 NTP di Papua tercatat sebesar 98,57 dan tahun 2017 turun menjadi 93,26 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa petani mengalami deficit yaitu kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya yang mengindikasikan bahwa pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. Selain itu juga dari sisi produksi terlihat mengalami penurunan baik untuk palawija maupun perkebunan di Papua. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah pertanian sebagai berikut:

Tabel 4.25. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Perkembangan sektor pertanian yang belum inklusif dan berkelanjutan	1. Belum optimalnya produktifitas regional sektor pertanian/ perkebunan	1. Masih rendahnya kualitas kelembagan petani 2. Rendahnya spesialisasi dan peningkatan kualitas produk-produk pertanian yang dapat meningkatkan NTP 3. Rendahnya kontribusi sektor industri berbasis pertanian terhadap perekonomian daerah 4. Belum memadainya kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan 5. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas penyuluh 6. Belum optimalnya penerapan metode pertanian modern 7. Masih terbatasnya teknologi tepat guna pertanian 8. Rendahnya kualitas/standarisasi produk pertanian/perkebunan 9. Rendahnya produktifitas tanaman perkebunan 10. Keterbatasan infrastruktur jaringan irigasi tersier di kawasan pertanian
	2. Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pengawasan hewan ternak 2. Banyaknya skala usaha peternakan yang masih kecil dan tradisional 3. Kapasitas peternak dalam memenuhi kebutuhan lokal sangat rendah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Rendahnya sertifikasi produk hasil ternak 5. Akses peternak terhadap pasar lokal masih belum memadai
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rendahnya akses pasar atas produk-produk pertanian/perkebunan/peternakan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbangunnya sistem agribisnis yang kuat 2. Panjangnya rantai distribusi produk pertanian/perkebunan/peternakan 3. Rendahnya promosi produk-produk unggulan pertanian/perkebunan/peternakan 4. Rendahnya kontinuitas produksi pertanian/perkebunan/peternakan sesuai kebutuhan pasar

4.1.3.2. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi di sektor perikanan adalah rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah. Sepanjang tahun 2013-2017 kontribusi sector perikanan dan kelautan terlihat menurun yaitu dari 856 persen di tahun 2013 menjadi 7,68 persen ditahun 2017 dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,09 persen pertahun. Walaupun dari sisi kontribusi sector perikanan mengalami penurunan dari dari sisi produksi terlihat mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,09 persen pertahun khususnya dari perikanan budidaya dengan luas lahan meningkat 1,02 persen dan Jumlah pembudidayaan yang meningkat sebesar 2,5 persen. Pengembangan budidaya perikanan sudah tersebar di 29 kabupaten/kota yang berbasis lima wilayah adat. Kendala aksesibilitas pelaku industri perikanan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai masih merupakan kendala termasuk membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di Kabupaten Merauke, Mimika dan Biak Numfor. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

Tabel 4.26. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	1. Belum optimalnya produktifitas regional sektor perikanan dan kelautan dalam perekonomian wilayah	1. Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar 2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap 3. Rendahnya kontribusi sektor industri berbasis perikanan terhadap perekonomian daerah 4. Masih terbatasnya teknologi perikanan tangkap dan budidaya 5. Belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul dan pusat pembibitan ikan 6. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan air tawar 7. Meningkatnya pemukiman masyarakat di daerah tangkapan sumber air baku 8. Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM sektor perikanan terhadap perekonomian daerah 9. Belum memadainya kelembagaan kelompok nelayan 10. Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap 11. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan 12. Belum memadainya kelembagaan kelompok pembudidaya ikan tawar 13. Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap

4.1.3.3. Kehutanan

Jika diperhatikan dari distribusi penyebaran kawasan hutan di Papua, dari luas 32.757.059 ha, proporsi terbesar yaitu 23,88 persen merupakan hutan lindung, 20,49 persen merupakan suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi masing-masing dengan proporsi 18,22 persn dan 14,48 persen, dan 12.58 persen. Permasalahan yang dihadapi di sektor kehutanan adalah rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap

perekonomian daerah dan tingginya laju deforestasi. Peranan sub sektor kehutanan dalam perekonomian Papua sepanjang tahun 2013-2017 terlihat menurun dari 2,61 persen di tahun 2013 menjadi 2,34 persen di tahun 2017 dengan rata-rata kontribusi 2,47 persen pertahun. Jika dilihat dari produksi kayu hutan Papua dari tahun 2013-2016 terlihat variatif volumenya dengan produksi terbesar berturut-turut yaitu kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan terakhir verner. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sector kehutanan di Papua sebagai berikut:

Tabel 4.27. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan	1. Tingginya kerusakan hutan dan kawasan lindung	1. Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup provinsi dan Kabupaten/kota perlu ditingkatkan 2. Belum optimalnya pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti buah merah, sagu 3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat adat yang menetap di sekitar hutan 4. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kawasan hutan 5. Investasi pada bidang kehutanan masih berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan kayu 6. Tingginya pembukaan lahan karena pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah 7. Tingginya pola pembukaan lahan berpindah 8. Belum disahkannya regulasi khusus pengelolaan hutan adat di Provinsi Papua 9. Belum optimalnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar spesifik Papua

4.1.3.4. Pariwisata

Dengan beragamnya potensi wisata di Papua, seharusnya dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Papua, namun dari data terlihat bahwa Jumlah tamu/wisatawan WNA/WNI ke Papua cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2013-2017. Data kunjungan tamu ke Papua tahun 2013 tercatat 903.157 orang

namun terus menurun sampai dengan tahun 2015 menjadi 546.699 orang tamu dan kemudian naik kembali di tahun 2016 menjadi 900.570 orang tamu. Kota Jayapura mendominasi kedatangan Jumlah tamu namun terlihat angkanya menurun dari tahun 2013-2015 namun kemudian meningkat kembali di tahun 2016. Tahun 2013 kunjungan tamu ke Kota Jayapura mencapai 579,966 orang dengan lama kunjungan 2,54 hari dan di tahun 2016 tercatat sebesar 413.019 orang tamu dengan lama kunjungan 1,8 hari. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Papua dan masih rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Papua. Kondisi ini menyebabkan kontribusi sector pariwisata terhadap perekonomian Papua juga masih rendah yaitu rata-rata 2,45 persen pertahun. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah urusan pariwisata sebagai berikut:

Tabel 4.28. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	1. Rendahnya produktifitas regional sektor-sektor berbasis pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berkembangnya ekoturisme dan wisata budaya yang bernilai tambah tinggi untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin 2. Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengelola wisata 3. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 4. Rendahnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata 5. Rendahnya kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata 6. Keterbatasan kualitas penyelenggaraan event-event pariwisata 7. Masih kurangnya pengembangan daerah obyek tujuan wisata (DOTW) potensial dan DOTW yang sudah ada 8. Belum optimalnya pengembangan kampung wisata 9. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak pengembangan pariwisata 10. Terbatasnya promosi pengembangan pariwisata Provinsi Papua di event-event nasional dan internasional yang disertai analisa pasar yang baik 11. Kurangnya partisipasi dalam event-event pariwisata nasional maupun internasional

4.1.3.5. Perdagangan

Total ekspor Papua tahun 2016 mencapai 2.004,04 juta dolar Amerika meningkat menjadi 2.545,59 juta dolar Amerika di tahun 2017 atau meningkat sebesar 22,48 persen dari tahun 2016. Menurut jenisnya, ekspor Papua terbesar berupa barang migas yaitu sebesar 2,900 juta dolar Amerika dan barang non migas sebesar 538,36 juta dolar Amerika (BPS Papua, 2017). Ekspor terbesar Papua berasal dari Pelabuhan Amamapare Mimika dengan nilai 529,47 juta dolar Amerika atau sebesar 98,35 persen dari keseluruhan ekspor Papua. Namun untuk impor mengalami penurunan dari 715,59 juta dolar Amerika di tahun 2016 menjadi 446,51 juta dolar di tahun 2017 atau turun sebesar 37,60 persen. Jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Papua tahun 2013-2017 maka sector perdagangan masih rendah perannya yaitu dengan rata-rata 7,92 persen pertahun. Namun jika dilihat persebarannya menurut Kabupaten/kota di Papua, maka Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan kontribusi yang cenderung meningkat dengan persentase terbesar dengan rata-rata 17,42 persen pertahun, diikuti oleh Kabupaten Biak Numfor dan kota Jayapura namun dengan kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Papua yang cenderung menurun yaitu rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 16,50 persen dan 16,17 persen pertahun. Sedangkan Kabupaten Mimika dan Paniai merupakan Kabupaten dengan kontribusi sector perdagangan terendah yaitu masing-masing dengan rata-rata sebesar 2,14 persen dan 3,40 persen pertahun. Berdasarkan kondisi sector perdagangan tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.29. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1. Produktifitas regional sektor perdagangan yang belum memadai untuk mendorong pertumbuhan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjangnya rantai distribusi kebutuhan barang-barang konsumsi ke berbagai wilayah 2. Besarnya ongkos transportasi 3. Rendahnya kuantitats dan kualitas infrastruktur pendukung sektor perdagangan 4. Kurangnya kontinuitas ketersediaan barang karena persoalan akses dari hulu ke hilir

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		5. Rendahnya daya beli keluarga OAP 6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian barang-barang perdagangan 7. Adanya praktek-praktek monopoli dalam usaha perdagangan 8. Rendahnya kapasitas para pedagang dalam berwirausaha

4.1.3.6. Perindustrian

Kontribusi sektor perindustrian dalam pembentukkan PDRB Papua terlihat masih rendah dengan angka rata-rata dibawah 2 persen yang cenderung menurun sepanjang tahun 2013-2017 dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,85 persen pertahun. Jika diperhatikan persebarannya, maka Kabupaten Boven Digul sebagai penyumbang terbesar sector perindustrian yaitu mencapai rata-rata 26,97 persen dengan laju pertumbuhan 4,10 persen pertahun namun dengan kontribusi yang terlihat konsisten menurun. Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, kepulauan Yapen, Biak Numfor, Merauke, dan Asmat kontribusinya terhadap pembentukkan PDRB Papua juga terlihat berada diatas rata-rata Papua yaitu berkisar 2 sampai dengan 5 persen sedangkan Kabupaten/kota lainnya kontribusinya dibawah rata-rata Papua. Laju pertumbuhan rata-rata tertinggi sector perindustrian terdapat di Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu sebesar 9,18 persen pertahun, diikuti oleh Kabupaten Nabire dan Pegunungan Bintang masing-masing dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 8,38 persen dan 8 persen pertahun. Berdasarkan kondisi sector perindustrian tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.30. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya peranan sektor industri dalam perekonomian wilayah	1. Rendahnya produktifitas regional sektor industri	1. Belum adanya konsep kluster industri berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan dan inklusif 2. Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Minimnya kuantitas dan kualitas perkembangan industri kecil dan menengah berbasis pertanian 4. Belum berkembangnya industri mikro dan kecil berbasis rumah tangga secara memadai 5. Kurangnya jejaring pengembangan industri mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar 6. Belum adanya rencana induk pembangunan industri daerah, yang akan melahirkan pembangunan kluster industri per wilayah adat

4.1.3.7. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral semakin lama semakin meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Di sektor migas demikian juga, seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, perkembangan penduduk, perkembangan jumlah kendaraan baik mobil dan motor, juga meningkat akibatnya permintaan akan BBM juga semakin meningkat, namun disisi lain untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut pemerintah perlu mengimpor sumber daya tersebut. Penghematan penggunaan BBM sudah harus dilakukan. Selain itu juga ketergantungan pada sumber daya fosil juga perlu menjadi perhatian karena akan habis jika dipakai secara terus menerus dan boros, oleh karena itu pengembangan dan penggunaan sumber baru dan terbarukan sudah harus menjadi perhatian pemerintah Papua ke depannya. Penggunaan energi baru dan terbarukan sudah harus diintensifkan karena masih terdapat kabupaten di Papua yang belum menikmati listrik.

Di sektor kelistrikan, dari data yang ada terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik di Papua mengalami peningkatan sepanjang tahun 2013-2017. Tahun 2013, jumlah pelanggan listrik tercatat sebanyak 276.724 pelanggan dan tahun 2017 mencapai 384.833 pelanggan. Demikian juga untuk daya terpasang (KW) di Papua nampak meningkat, yaitu dari 187.598 KW tahun 2014 meningkat menjadi 340.751 KW. Pelanggan terbesar dan juga daya terpasang terbesar terdapat di Kota Jayapura. Di sektor pertambangan, terlihat bahwa Papua masih tergantung pada sector ini namun kontribusinya terhadap perekonomian cenderung menurun sepanjang tahun 2013-

2017. Tahun 2013, kontribusi sector pertambangan mencapai 43,56 persen dan tahun 2017, kontribusinya mencapai 41,78 persen. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.31. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan ESDM

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya produktifitas sektor energi dan sumberdaya mineral	1. Belum maksimalnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antarpersonal maupun antarsektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP) 2. Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) 3. Kuantitas dan kualitas penelitian dan survey pelayanan geologi masih sangat kurang 4. Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan 5. Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
	2. Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya energi listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan industri 2. Penyediaan sumber daya energi listrik pada kampung yang sangat terbatas dan tidak merata 3. Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang pemerintah memegang peran penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Efektivitas pelaksanaan fungsi penunjang menjadi instrumen untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif. Berdasar analisis pembangunan Provinsi Papua pada periode sebelumnya sebagaimana data yang disajikan di Bab 2, fungsi penunjang urusan pemerintahan ini di satu sisi telah berhasil memenuhi capaian indikator kinerja daerah. Di sisi lain, terdapat pula berbagai permasalahan pada fungsi penunjang yang menghambat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, menghambat koordinasi lintas sektoral, serta adanya tantangan berupa capaian kinerja yang belum menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat pada urusan perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian hingga kesekretariatan.

4.1.4.1. Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dan MRP serta beberapa perangkat daerah lainnya. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupaya memberi keyakinan bahwa seluruh sektor pemerintah menjalankan agenda pembangunan secara terpadu dan terkordinasi.

Tabel 4.32. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya Perdasu tentang pemerintahan yang ditetapkan 2. Belum optimalnya SDM kampung dan distrik 3. Masih rendahnya LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi 4. Belum optimalnya Penataan Peraturan Perundang-undangan 5. Belum optimalnya warga miskin yang memperoleh pendampingan terkait kasus hukum 6. Belum optimalnya Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua yang difasilitasi 7. Rendahnya produk hukum daerah yang didesiminasi 8. Belum optimalnya OPD yang memiliki data uraian jabatan 9. Masih rendahnya OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama 10. Belum optimalnya OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan 11. Belum optimalnya Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti 12. Belum optimalnya kinerja BUMD 13. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan keprotokolan Pemprov Papua 14. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui ULP
2. Belum optimalnya pembangunan di wilayah perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbelakangnya wilayah perbatasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya sarana dan prasarana Pos Lintas Bantas yang memenuhi standar 2. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan 3. Minimnya sarana dan prasarana ekonomi di daerah perbatasan 4. Belum optimalnya implementasi kerja sama antar negara di kawasan perbatasan

4.1.4.2. Penelitian dan Pengembangan

Urusan perencanaan terkait perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang, serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan terkait urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 4.33. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian, dan Pengembangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya penelitian dan pengembangan inovasi daerah	1. Belum optimalnya implementasi kelitbangan	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan 2. Belum memadainya SDM kelitbangan 3. Belum optimalnya rekomendasi hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi

4.1.4.3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan terkait perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang, serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan terkait urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang	1. Belum maksimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua 2. Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran 3. Belum optimalnya capaian indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJM	1. Belum optimalnya capaian realisasi program-program Otsus 2. Belum optimalnya Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd 3. Belum optimalnya konsistensi Program RKPd kedalam APBD 4. Masih rendahnya LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi 5. Belum optimalnya dokumen perencanaan yang menampung aspirasi masyarakat

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		6. Belum optimalnya asistensi Musrenbang Kabupaten 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua 8. Penyusunan LKPJ yang sering tidak tepat Waktu 9. Belum optimalnya Evaluasi RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota se Papua 10. Belum optimalnya ketersediaan analisis data informasi pembangunan daerah 11. Rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan bidang ekonomi 12. Rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan bidang sosbud 13. Rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan bidang fispra 14. Belum optimalnya kerjasama pembangunan 15. Masih perlunya peningkatan efektivitas sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik
	4. Masih tingginya pelanggaran terhadap rencana tata ruang	1. Belum optimalnya kesesuaian antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota 2. Kurang dimanfaatkannya hasil perencanaan percepatan pembangunan kawasan perbatasan

4.1.4.4. Keuangan Daerah

Urusan keuangan terkait kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Kinerja keuangan pemerintahan di Provinsi Papua masih terkategori Mandiri Rendah, dengan rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan daerah hanya 8,01 persen per tahun. jika diperhatikan menurut wilayah adat, maka semua wilayah adat menunjukkan kemandirian fiskal yang rendah, dengan rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan daerah paling tinggi sebesar 4,99 persen di wilayah Mamta, dan 1,74 persen di wilayah La Pago. Jika dipilah berdasarkan Kabupaten/kota, maka Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura memiliki rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan daerah paling tinggi dibanding Kabupaten lainnya di Papua, yaitu sebesar 12,57% dan 13,12% per tahun sepanjang periode 2013-2017, sedangkan Kabupaten dengan kemandirian fiskal paling rendah yakni Kabupaten Nduga, Deyiai, Intan Jaya,

Mamberamo Raya, Waropen dan Dogiyai, dengan persentasenya masing-masing tidak lebih dari 1% per tahun. Dari sisi laporan keuangan, selama tahun 2013-2016 pemberian opini TMP oleh BPK untuk setiap entitas di wilayah Papua cenderung relatif menurun, dimana pada tahun 2016 ada 12 entitas yang masih mendapatkan opini TMP. Sedangkan untuk opini WTP terlihat mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang melonjak tinggi di tahun 2015 mencapai 8 entitas kemudian di tahun 2019 menjadi 9 entitas. Berdasarkan wilayah adat, maka wilayah adat La Pago, Mee Pago, Anim Ha dan Saireri perlu meningkatkan kualitas LKPD masing-masing sebaik mungkin agar dapat meraih penilaian WTP dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan dan aset yang sesuai peraturan, optimalisasi fungsi pengawasan internal di inspektorat, dan perbaikan sistem pengendalian internal. Berikut permasalahan pembangunan daerah terkait urusan keuangan:

Tabel 4.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua 2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 3. Belum optimalnya kualitas kelembagaan keterbukaan informasi publik 4. Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan 2. Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus 3. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD tidak tepat waktu 4. Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah 5. Belum optimalnya aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi 6. Penyampaian LKPD tidak Tepat Waktu 7. Tertib Administrasi BMD 8. Penyusunan APBD kabupaten/kota yang tidak tepat waktu 9. Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua 10. Belum optimalnya Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah 11. Belum Efektifnya pendapatan asli daerah 12. Belum optimalnya Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah

4.1.4.5. Pengawasan

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Permasalahan pembangunan terkait urusan pengawasan, yaitu:

Tabel 4.36. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya pengawasan secara transparan dan akuntabel	1. Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dalam pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya tenaga pemeriksa yang tersertifikasi 2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan 4. Persentase OPD dengan nilai SAKIP B yang masih rendah 5. Belum optimalnya Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua 6. Belum optimalnya penetapan perdasu dan perdasus berdasarkan prolegda 7. Belum optimalnya Pembahasan APBD Tepat Waktu 8. Belum tuntasnya pengawalan revisi undang-undang otonomi khusus Papua

4.1.4.6. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pembangunan daerah terkait urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan upaya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian secara garis besar terkait peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Pelaksanaan urusan ini di Provinsi Papua masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu:

Tabel 4.37. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum maksimalnya pelayanan kepegawaian dan diklat daerah	1. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kapasitas SDM dalam melakukan promosi potensi daerah Belum optimalnya ASN peserta diklat teknis fungsional Belum optimalnya ASN peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Belum optimalnya penyelesaian administrasi kepegawaian Belum optimalnya Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Masih rendahnya ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya

Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan terkait pelaksanaan fungsi peningkatan kapasitas SDM pada balai diklat. Persoalan pembangunan daerah terkait urusan Pendidikan dan pelatihan adalah:

Tabel 4.38. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Pelayanan pendidikan dan pelatihan belum memadai	1. Tata kelola pendidikan dan pelatihan belum dilaksanakan secara optimal dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar minimal Kurangnya tenaga widiyaswara diklat provinsi Pengembangan kurikulum diklat struktural dan fungsional yang kurang profesional dan memadai sesuai standar minimal Belum adanya regulasi daerah yang mengatur semua diklat struktural dan fungsional dilaksanakan terpusat pada daerah provinsi Belum optimalnya Diklat yang terakreditasi

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus berdasarkan analisis situasi serta memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu-isu tersebut harus dikelompokkan dan

mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun perencanaan pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada konteks permasalahan lingkup regional, nasional dan global.

4.2.1. Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Papua.

4.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Papua. Untuk itu, Provinsi Papua juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

4.2.1.2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah meruntuhkan sekat antar masyarakat bahkan dalam level global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Bagi Provinsi Papua, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur listrik dan jaringan.

4.2.1.3. Green Economy

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian *green economy* merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam *green economy* tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

4.2.1.4. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN

Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

4.2.2. Penelaahan RPJMN 2015-2019 dan RPJMN Teknokratis 2020-2024

4.2.2.1 RPJMN Tahun 2015-2019

Permasalahan yang terjadi di level nasional merupakan bahan pertimbangan utama dalam rangka merumuskan isu-isu strategis provinsi. Dalam konteks tersebut, isu nasional yang sangat prioritas untuk diperhatikan adalah kebijakan nasional jangka panjang dan menengah yang dirumuskan dalam Kebijakan *NAWA CITA* dan RPJPN 2005-2025. Selain itu, isu lain yang harus diperhatikan adalah paradigm pembangunan spasial yang terkait langsung dengan Provinsi Papua yaitu pembangunan berbasis 5 Wilayah Adat.

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju da bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
7. Mewujudkn kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWA CITA ini kemudian dipertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

Tabel 4.39. Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK

RPJMN IV (2020-2024)	<p>Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur</p> <p>Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan sruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</p>
---------------------------------	--

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025

Selain NAWA CITA dan skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPN, penetapan Papua dalam beberapa wilayah adat juga harus dijadikan pedoman dalam pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Pembagian wilayah adat di Papua sudah sejak lama diakui oleh masyarakat Papua secara umum dan kemudian pembagian wilayah ini diakomodir oleh Pemerintah Pusat sebagai satu pendekatan pembangunan di Papua. Tabel 4.40 menunjukkan pembagian wilayah adat yang diakomodir sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan ekonomi wilayah dan menjaga keseimbangan kemajuan daerah.

Tabel 4.40. Kawasan Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah Adat di Provinsi Papua

KPE	Wilayah	Fokus Pengembangan
Saereri	Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen	Perikanan laut, Industri Pengalengan, Industri Perikanan Laut, pariwisata
Mamta	Kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kota Jayapura	Perkebunan dan industri kelapa sawit dan coklat, pariwisata
Me Pago	Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika	Perkebunan dan industri sagu, buah merah, ubi jalar,pariwisata
La Pago	Kabupaten Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Puncak, dan Puncak Jaya	Perkebunan dan industri sagu, buah merah, ubi jalar,pariwisata
Ha'anim	Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel	Perkebunan dan industri karet, kelapa sawit, industri pengalengan ikan, pangan, dan peternakan

Sumber: Buku III RPJMN 2015-2019

Pembagian Papua dalam beberapa wilayah adat ini pada tahapan selanjutnya digunakan sebagai basis dalam pengembangan kawasan strategis di Provinsi Papua. Kawasan strategis dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan gesostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Setidaknya ada empat daerah di Pulau Papua yang akan

dikembangkan menjadi kawasan strategis, salah satunya di Kabupaten Merauke. Pengembangan kawasan strategis difokuskan pada sektor pertanian dan kehutanan. Walaupun saat ini Provinsi Papua belum memiliki kawasan strategis, namun pemerintah telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pertambangan (Tabel 6). Hal ini juga dilakukan untuk mendukung sentra produksi di sektor pangan, peternakan, industri, dan pariwisata.

Untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi KPE membutuhkan penguatan konektivitas di masing-masing wilayah adat. Kebutuhan infrastruktur untuk penguatan konektivitas di pusat pertumbuhan ekonomi antara lain mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi darat, laut, dan udara, pembangunan ruas jalan strategis nasional, dan mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Beberapa pembangunan infrastruktur untuk penguatan konektivitas di KPE Provinsi Papua antara lain:

1. Pembangunan ruas jalan, antara lain: Ruas Jalan Sarmi-Ampawar-Barapasi-Sumiangga-Kimibay, Jalan Lingkar Numfor dan Kota Biak; Ruas Jalan Depapre-Bongkrang, ruas jalan Warumbaim-Taja-Lereh-Tengon, Ruas Jalan Jayapura-Wamena-Mulia; Ruas Jalan Sumohai-Dekai-Oksibil-Iwur-Waropko, ruas jalan Enarotali-Tiom, Ruas Jalan Wamena-Habema-Kenyam, Ruas Jalan Timika-Potowaiburu-Wagete-Nabire, Ruas jalan Yeti-Ubrub; Ruas Jalan Okaba-Sanomere-Bade, Ruas Jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam-Bian-Wogikel, Ruas Jalan Okaba-Kumbe-Kuprik-Jagebob-Erambu;
2. Pengembangan Bandara Internasional Frans Kaisepo, Bandara Internasional Sentani, Bandara Internasional Moses Kilangin, Bandara Internasional Mopah; pembangunan Bandara di Yapen Waropen, Wamena, Dekai;
3. Reaktivasi Pelabuhan Biak; pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Depapre, pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Merauke; pengembangan dermaga Kenyam dan Suru-suru;

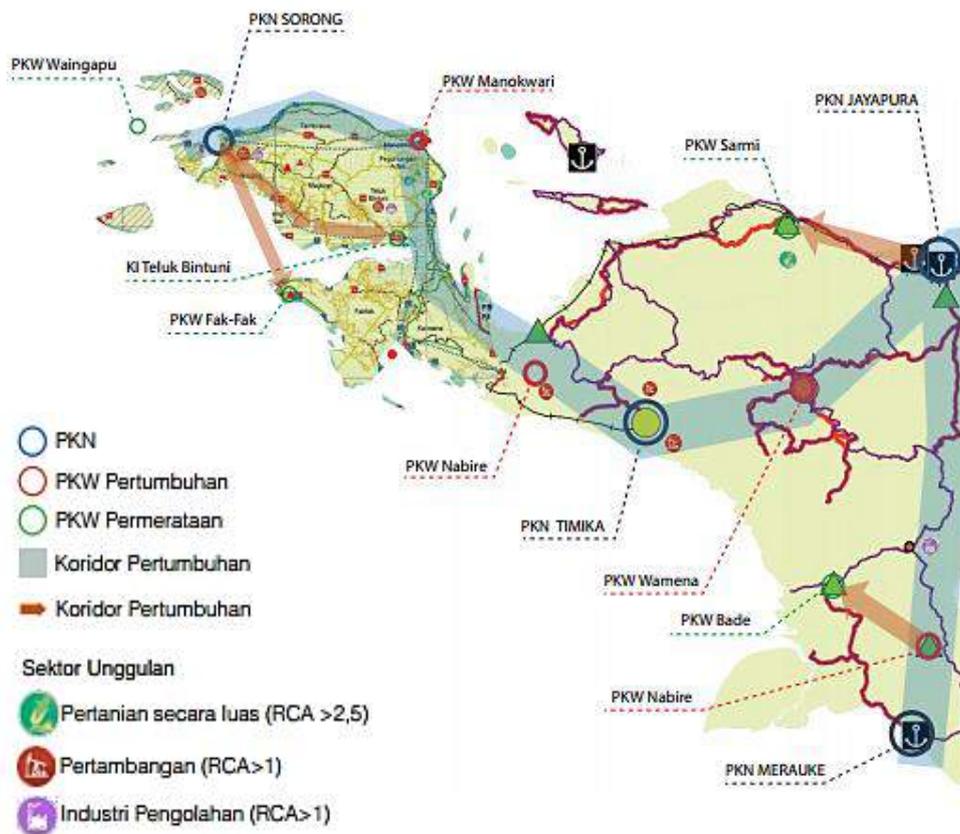
Pembangunan Terminal Tipe A Kota Jayapura, Terminal B Kabupaten Sarmi, Keerom, dan Kota Jayapura; Pembangunan jaringan kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah Pengembangan PLTA Supiori, PLTA Mamberamo, PLTA Gayem,

PLTA Hotekamp, PLTA Baliem, PLTA Urumuka, PLTS Makro. Salah satu syarat pengembangan kawasan strategis adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. Kawasan strategis bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah. Terbentuknya kawasan strategis diharapkan semakin membangun daya saing wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2.2 RPJMN Teknokratis Tahun 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua berdasarkan RPJMN Teknokratis 2020-2024 adalah **menjadikan wilayah Papua sebagai pusat perikanan, pertanian, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, serta pertambangan berbasis kampung masyarakat adat** (lihat Gambar 4.1).

Gambar 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Papua dalam RPJMN Tahun 2020-2024



Strategi pembangunan nasional di Provinsi Papua dalam mewujudkan arah pembangunan tersebut adalah:

1. Pengembangan komoditas unggulan perikanan, tanaman pangan, hortikultura, pertambangan bijih logam, dan angkutan laut;
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang utama; dan
3. Pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan, pengembangan PKS, pengembangan PLBN Terpadu Sota dan Yeyetkun, dan pengentasan daerah tertinggal.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) prioritas untuk mencapai target pembangunan (lihat Tabel 4.41).

Tabel 4.41. Prioritas Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	1.1	Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
		1.2	Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2.1	Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah
		2.2	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
		2.3	Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
		2.4	Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
		2.5	Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	3.1	Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
		3.2	Pemenuhan layanan dasar
		3.3	Penguatan tata kelola kependudukan
		3.4	Peningkatan produktivitas dan daya saing SDM
		3.5	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
4	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa	4.1	Memperkuat ketahanan budaya bangsa
		4.2	Memajukan kebudayaan
		4.3	Meningkatkan pemahaman, pengalaman, dan penghayatan nilai agama
		4.4	Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat serta perlindungan perempuan dan anak
		4.5	Meningkatkan budaya literasi
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	5.1	Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah
		5.2	Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan

	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5.3	Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK
		5.4	Rehabilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien
		5.5	Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6.1	Penguatan kapasitas penanggulangan bencana
		6.2	Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
		6.3	Penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana
		6.4	Penguatan manajemen kebencanaan
7	Memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik	7.1	Reformasi kelembagaan dan kapasitas ASN
		7.2	Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil
		7.3	Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
		7.4	Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi

Untuk mencapai target pembangunan nasional terdapat 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional. Pengarusutamaan tersebut terdiri atas kesetaraan gender; tata kelola; kerentanan bencana dan perubahan iklim; modal sosial dan budaya; serta pembangunan berbasis teknologi digital. Prioritas dan pengarusutamaan nasional tersebut perlu disinkronkan dengan program dalam RPJMD Papua tahun 2019-2023 agar tercapai dampak pembangunan secara maksimal. Adapun indikator makro pembangunan Provinsi Papua yang menjadi target dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditampilkan dalam Tabel 4.41.

Tabel 4.41. Indikator Makro Pembangunan Provinsi Papua dalam RPJMN Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET KINERJA PAPUA	
		2020	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.76	6.23
2	Kemiskinan	25.47	19.99

4.2.3. Penelaahan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. Beberapa komponen utama RPJPD Papua yang menjadi dasar bagi perumusan RPJMD Papua tahun 2019-2023 adalah:

1. Visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2005-2025 adalah: **PAPUA YANG MANDIRI SECARA SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN POLITIK**
2. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Papua tahun 2005-2025 sebagai berikut:
 - **MISI Pertama: Mewujudkan Kemandirian Sosial** adalah meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Papua yang sehat, cerdas, berbahagia, dan berinovasi tinggi untuk penguasaan, pemanfaatan, pengembangan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan yang adil dan merata. Tujuan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah agar semua orang dapat mengembangkan diri dan berkontribusi sesuai minat dan bakatnya masing-masing, untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - **Misi Kedua: Mewujudkan Kemandirian Budaya** adalah pengembangan kelembagaan adat, agama, dan perempuan, terintegrasi ke dalam sistem formal; pengembangan jati diri masyarakat dan kebanggaan menjadi orang Papua ; serta peningkatan budaya berprestasi dan inovatif.
 - **Misi Ketiga: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi** adalah peningkatan pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat Papua yang berbasis pada kekuatan lokal; peningkatan pembangunan infrastruktur yang membantu memenuhi kecukupan kebutuhan secara lokal; pemenuhan kebutuhan berbasis aset alam lokal secara berkelanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan wilayah yang dirancang berdasarkan daya dukung serta peruntukan ruang yang telah disepakati bersama; tercapainya peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggungjawab.
 - **Misi Keempat: Mewujudkan Kemandirian Politik** adalah peningkatan peran masyarakat yang demokratis; Peningkatan kualitas aparatur sebagai fasilitator/ mediator pembangunan ; Peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa berdasarkan hukum; implementasi kelembagaan dan hukum adat ke dalam sistem formal.

- **Misi Kelima: Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua** adalah suatu kondisi di mana masyarakat asli Papua berperan utama dalam kepemimpinan dan pelaksanaan pembangunan di Papua, hingga pembangunan di Papua berjalan berdasarkan jati diri masyarakat asli Papua. Kemandirian ini terwujud secara merata di semua kampung dan di tingkat provinsi melalui kerjasama yang harmonis dan demokratis di antara seluruh masyarakat adat dari semua kampung. Kemandirian masyarakat asli Papua tercermin dari kemampuan masyarakat asli Papua untuk menentukan sendiri arah pembangunan Papua dan berperan utama pada berbagai sektor pembangunan. Kemandirian Masyarakat Asli Papua diwujudkan melalui pengakuan terhadap nilai serta hak adat masyarakat asli Papua serta berbagai aktivitas percepatan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat asli Papua dalam peningkatan kualitas hidup dan kemampuan mengambil peran dalam pembangunan, berbagai inovasi affirmative action bagi masyarakat asli Papua, pengembangan IPTEK berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya lokal, sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat asli Papua di kampung-kampung, serta merealisasikan kewenangan, peran dan tanggung jawab orang asli Papua dalam pengambilan keputusan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI

4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berlangsung beriringan dengan penyusunan dokumen RPJMD ini. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui proses tersebut didapatkan isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah (secara geografis maupun budaya, dan tingkat pentingnya potensi dampak. Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas hidup
2. Ketahanan pangan, sosial dan budaya
3. Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
4. Kerusakan hutan dan lingkungan
5. Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Secara umum, sebagian besar indikator TPB sudah terakomodir dalam isu strategis. Isu strategis yang paling banyak terkait dengan indikator TPB adalah isu kualitas hidup masyarakat yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hasil persandingan antara Isu Strategis TPB yang didapatkan dari 34 indikator TPB yang belum tercapai dengan 5 isu strategis yang disintesis menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.41.. Persandingan Isu Strategis dengan Indikator TPB yang Belum Tercapai

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas hidup	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas hidup	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
3	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas hidup	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah (SMA)	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kualitas Hidup	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Rasio kepemilikan akta kelahiran	Akses terhadap pendidikan
5	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi	na	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Administrasi kependudukan

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
	kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
6	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Ketahanan pangan, sosial dan budaya	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Ketahanan pangan
7	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Ketahanan pangan, sosial dan budaya	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Konsumsi ikan (kh/kap/org):34,26; ekspor hasil perikanan (US\$/tahun):18.903.551; jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikasi (unit/tahun) : 12 unit	Akses terhadap pelayanan kesehatan
8	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Kualitas hidup	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Kn)	Ketahanan pangan
9	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kualitas hidup	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka kejadian Malaria	Akses terhadap pelayanan kesehatan
10	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Kualitas hidup	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Akses terhadap pelayanan kesehatan
11	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Kualitas hidup	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah	Akses terhadap pendidikan
12	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan	Kualitas hidup	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Akses terhadap pendidikan

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
	tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.					
13	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Kualitas hidup	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Akses terhadap pendidikan
14	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indeks Pemberdayaan Gender	Akses terhadap pendidikan
15	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	na	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
17	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kualitas hidup	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase penduduk berakses air minum	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
18	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kualitas hidup	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Persentase Penduduk berakses air bersih	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
19	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kualitas hidup	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase penduduk berakses air minum	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
20	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada	Kualitas hidup	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
	kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
21	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Kerusakan hutan dan lingkungan	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
22	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Na	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi	Kerusakan hutan dan lingkungan
23	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB DP	Ketahanan energi
2	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita (Rp juta)	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
25	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
26	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
27	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
28	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indeks Gini	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan

No	Target TPB	Isu Strategis Papua	No Indikator	Indikator TPB	Indikator Papua	Hasil Sintesis
	40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
29	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persentase penduduk miskin (P0)	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
30	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Kerusakan hutan dan lingkungan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indeks kualitas tutupan hutan	Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
31	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	Kerusakan hutan dan lingkungan	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kerusakan hutan dan lingkungan
32	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Kerusakan hutan dan lingkungan	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah	Kerusakan hutan dan lingkungan
33	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tingkat Konflik Horisontal (antar suku)	Kerusakan hutan dan lingkungan
34	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Sintesis dilakukan dengan penyesuaian isu strategis yang sudah dihasilkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya target yang ditentukan oleh TPB itu sendiri. Beberapa isu dipisahkan agar terdapat penekanan pemenuhan yang urgensinya cukup besar berdasarkan tingkat ketercapaiannya. Berdasarkan hasil sintesis di atas didapatkan 10 isu strategis prioritas pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Administrasi kependudukan
2. Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
3. Akses terhadap pelayanan kesehatan
4. Akses terhadap pendidikan
5. Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
6. Kerusakan hutan dan lingkungan
7. Ketahanan energi
8. Ketahanan pangan
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Dari hasil KLHS, maka TPB yang perlu diperkuat dalam perencanaan program berdasarkan isu strategis adalah sbb;

- a. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam; (13, 14, 15, 16);
- b. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif (TPB: 2, 3, 4, 5, 6, 10);
- c. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan (TPB: 7, 8, 16).

Dari penelaahan KLHS, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

1. Indikator kegiatan yang tercapai masih sangat rendah yakni 10% (25 indikator dari 236 indikator yang ditetapkan) sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan capaian indikator dapat dipenuhi pada batas waktu RPJMD.
2. Untuk indikator capaian yang belum dilaksanakan dan tidak tersedia datanya, Pemprov Papua perlu melakukan identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai sektor.
3. Indikator-indikator yang belum tercapai sebagian dikarenakan karena data belum terinventaris dengan baik. Pemprov diharapkan segera berkoordinasi dengan badan atau lembaga-lembaga pusat penyedia data untuk memastikan data-data tersebut dapat dimanfaatkan dan selanjutnya diolah dalam format capaian indikator. Selanjutnya data tersebut dapat dianalisis yang lebih mendalam.

4.2.5. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Papua dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Papua. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2019-2023 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Provinsi Papua, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah

Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal terutama di wilayah adat Lapago dan Mepago dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah

Demikian juga dalam bidang kesehatan yang kondisinya hampir sama dengan bidang pendidikan, Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas masih menjadi faktor krusial di hampir semua wilayah Papua yang ditandai dengan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara rerata mengalami peningkatan di Papua, Demikian juga terkait *stunting* (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Papua karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Indonesia. Fakta lainnya lagi adalah Angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data terakhir tahun 2017 menunjukkan terjadi kematian ibu sebesar 289 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan masih rendah, hanya 41,52% di tahun 2017, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 40,90% pada tahun 2017. Sedangkan dari sumber daya kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 24,13 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya penanganan penyakit malaria di Provinsi Papua, sehingga sampai tahun 2017 tercatat API Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu 59 per 1.000 penduduk, yang cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2014. Dalam hal kasus HIV/AIDS terindikasi jumlah kasus kematian akibat virus mematikan tersebut terus

mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 tercatat ada 1.883 kematian akibat HIV/AIDS

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua seringkali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangan dan peningkatan produksi komoditi pangan local dan membudayakan konsumsi pangan local perlu ditingkatkan di Papua untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi *stunting* di Papua

2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan

Kondisi kurang stabilnya kemanan serta demokrasi lokal yang kurang kondusif seringkali mengganggu aktivitas pembangunan daerah di beberapa wilayah di Provinsi Papua. Beberapa rumusan permasalahan yang patut diperhatikan kedepan terkait dengan isu strategis **Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan** adalah; masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM, tingkat kesadaran terhadap HAM masih rendah, masih tingginya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya konflik sosial, belum optimalnya pelayanan keagamaan antar umat, menurunnya toleransi kehidupan beragama, belum maksimalnya toleransi antar umat beragama, belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, belum optimalnya kehidupan berdemokrasi secara baik, masih banyaknya kasus money politic dalam berdemokrasi.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik menjadi satu isu krusial yang menjadi penyokong penyelenggaraan

pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkualitas. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Disiplin ASN meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Pada periode 2013-2018 telah dilakukan Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan disiplin bagi ASN, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan e-Government Provinsi Papua pada perencanaan dan penganggaran daerah, pendapatan daerah, investasi daerah, serta penerapan system Tunjangan Kinerja Daerah. Kesemuanya itu, diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik dan penanggulangan korupsi.

Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi Birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara

Pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua secara murni dan konsekuen

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh multistakeholder di Papua. Hal ini terkait dengan penciptaan kue pembangunan yang akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Papua. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi pada masa lalu telah menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi yang tercipta yang diandai dengan rendahnya pelibatan tenaga kerja lokal serta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik lokal didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan supra dan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Disamping itu perhatian juga harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti; sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan

Isu strategis pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten serta

peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan penting artinya dalam konteks pembangunan di Papua.

Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2019-2023 yang didasarkan pada konsolidasi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai isu strategis yang mengemuka di Papua, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang

5.1. VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

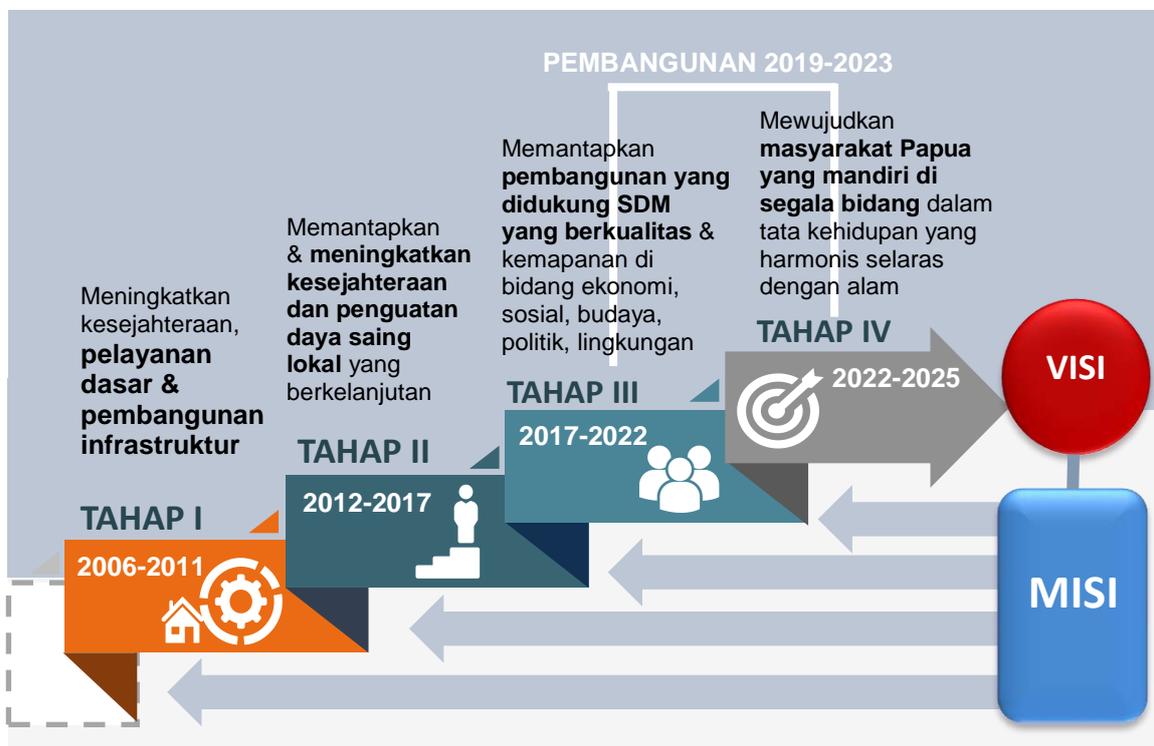
Provinsi Papua memiliki modal dan aset yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, serta sumber daya kultural yang beragam dan kuat. Kita mampu bangkit dan mandiri mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang dan kesempatan. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Masyarakat Papua memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2013-2018, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di tahun 2013-2018, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar ---*main capital*--- yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang. Pada periode 2019-2023 akan terus dan konsisten berfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.

Periode 2019-2023 merupakan tahap ke tiga dalam proses pencapaian Visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya **Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi**

dan Politik. Dalam hal ini, agenda atau tema tahap ke tiga pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, ditujukan untuk *Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM Berkualitas dan Keamanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan.*

Gambar 5.1. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua



Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilakukan dengan meningkatkan kemandirian, kemitraan, dan keterlibatan Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keamanan lokal berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan, kemampuan daya saing, yang didukung perlindungan perempuan dan anak, serta menekankan pada kesetaraan gender dan terwujudnya lembaga jaminan sosial. Keamanan ini juga ditunjukkan dengan pelebagaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang didukung oleh kepatuhan dan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta budaya kerja yang professional.

Selanjutnya budaya demokrasi dan saling menghormati perbedaan dan pendapat dengan menitikberatkan kesatuan bangsa dalam koridor NKRI tetap sehat dan berkembang secara dinamis, namun tetap berbasis pada kearifan lokal, khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus yang memasuki tahun ke-20. Pelaksanaan

otonomi khusus tetap berprinsip pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial setinggi-tingginya; penguatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam; serta menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali.

Sarana dan prasarana dasar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga keamanan bidang infrastruktur dapat menjamin keberlanjutan kemandirian lokal, yang dituangkan dalam program berkesinambungan, melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan sosial; keamanan di bidang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Program tersebut didukung akses pada sumber daya berbasis budaya lokal yang mampu mempertahankan kemandirian masyarakat Papua berdasarkan perkembangan IPTEK yang mampu dipahami dan dikuasai untuk diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan mencermati tantangan pembangunan masa depan, maka visi Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah:

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Kebangkitan, Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa **Keadilan** bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Korelasi antara Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan sebagai visi pembangunan dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Papua yang **BERKEADILAN** menjadi fokus utama bagi perwujudan **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA**, yang diselimuti dengan prinsip **Kasih Menembus Perbedaan**, karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut **Papua yang Baru dalam Bingkai Peradaban Baru Papua**. Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan **KASIH**, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk *ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi*.

Gambar 5.2 Visi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Pendekatan Kasih ini diharapkan dapat menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adapun penjelasan setiap elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Papua Bangkit berarti terwujudnya masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai NKRI tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dalam hal ini, orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Papua mandiri berarti terwujudnya masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, dengan didukung generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan

mendorong tumbuhnya sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata. Tumbuhnya sektor unggulan ini dapat memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, yang didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup yang setinggi-tingginya yang tercermin dari kenyamanan masyarakat Papua dalam menjalani kehidupan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya merupakan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Kesejahteraan juga bermakna kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

PAPUA BERKEADILAN

Papua Berkeadilan berarti masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan,

mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata merupakan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

5.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023

Misi pembangunan 2019-2023 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi, namun tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2019-2023 yang mempengaruhinya. Misi pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah yakni *Papua Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik*. Usaha-usaha Perwujudan visi akan dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

Gambar 5.3 Misi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Penjelasan masing-masing misi:

Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Orang Papua yang mandiri memiliki

kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya IPM yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya Saing SDM. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang telah dicapai seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian ibu, pengiriman siswa-siswa berprestasi Asli Papua melanjutkan sekolah di dalam dan luar negeri serta tercapainya target peningkatan IPM tahun 2018. Pondasi peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2023 mendatang tetap konsisten melanjutkan berbagai program peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran, kebijakan serta pengawasan dan pengendalian program terutama pada program beasiswa di dalam dan luar negeri untuk anak Asli Papua. Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan IPTEK. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjamin dalam pasokan pangannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam hal ini, kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan rasa aman, tentram dan damai, walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman dan

tentram masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama. Sejauh ini telah terdapat peningkatan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Di samping itu, dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan. Pemantapan sistem kerukunan hidup juga harus disertai dengan penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional.

Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; serta mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Sejauh ini, disiplin ASN telah meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tahun 2013-2018 telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi pada periode 2013-2018 dilakukan melalui peningkatan

disiplin ASN; pengelolaan keuangan daerah; penerapan e-Government Provinsi Papua dalam perencanaan, penganggaran, pendapatan, dan investasi daerah; serta penerapan sistem tunjangan kinerja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, yang didukung perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja secara lebih cepat dan terarah. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Periode pembangunan 2013-2018 telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari, dan meningkatnya perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua pada periode 2019-2023 akan tetap memperkuat ekonomi daerah berbasis karakteristik dan potensi setiap wilayah, dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan dan percepatan perekonomian daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk memperoleh akses

legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat. Pemberdayaan orang asli Papua diprioritaskan untuk: menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri dan Animha, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

Untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata, akan didukung oleh peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua. Peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar akan diprioritaskan pada periode 2019-2023.

Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 karena pelaksanaan pembangunan di masa lalu belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga tidak cukup diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan akan diwujudkan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi

orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerataan dan keadilan dalam periode 2019-2023 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat dan Gerbangmas pada periode 2013-2018 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Pada lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menysasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu: 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; serta 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

Tabel 5.1. Indikator Makro Pembangunan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target 2023	Target RPJPD
			2017	2018		
1	IPM	indeks	59,09	60,19	65	70
2	Persentase Penduduk Miskin	%	27,76	27,74	20	< 19
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,96	5 – 6,5	6,21
4	PDRB Perkapita (TT)	juta Rp	37,51	39,82	50	> 40
5	Gini Rasio	%	0,400	0,397	0,3845	-
6	Pengangguran Terbuka	%	3,62	2,91	2,00	1,9
7	Konektivitas Wilayah (akses reguler ke ibukota kab/kota)	%	64,29	64,29	100	-
8	Intensitas Emisi GRK	ton CO2 per juta rupiah	0,392	0,392	0,282	-

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator makro pembangunan sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Provinsi Papua tahun 2019-2023. Penjabaran indikator makro keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan perangkat daerah.

Misi ke-1: Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan dan 7 sasaran, yaitu:

- **T1.** Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran:
 - S1. Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan
 - S2. Meningkatkan budaya baca pada masyarakat
 - S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - S4. Sukses penyelenggaraan PON dan prestasi olahraga
 - S5. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
 - S6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan
 - S7. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat

Misi ke-2: Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

- Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:
- **T2.** Meningkatkan keamanan, ketenangan dan ketertiban yang berbasis kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan sasaran:
 - S8. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum
 - S9. Meningkatnya keharmonisan dan kohesivitas masyarakat

S10. Meningkatnya penegakan HAM

S11. Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi

Misi ke-3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:

- **T3.** Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran:
 - S12.** Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua
 - S13.** Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - S14.** Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah
 - S15.** Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Misi ke-4: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 14 sasaran, yaitu:

- **T4.** Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - S16.** Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
 - S17.** Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
 - S18.** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
 - S19.** Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
 - S20.** Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan

- S21. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
 - S22. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
 - S23. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah
- **T5.** Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:
- S24. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
 - S25. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
 - S26. Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
 - S27. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
 - S28. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
 - S29. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Misi ke-5: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 6 sasaran, yaitu:

- **T6.** Meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasaran:
- S30. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung
 - S31. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP
 - S32. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan
 - S33. Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS
 - S34. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
 - S35. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak

Tabel 5.2. Matriks Keselarasan Misi, Tujuan Sasaran Serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
M1	Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM										
T1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	59,09	60,11	61,15	62,20	63,27	64,36	65,47	65,47
		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	48,83	50,54	52,30	54,13	56,02	57,97	60,00	60,00
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	n/a	n/a	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	n/a	n/a	40	45	50	55	60	60
		Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	n/a	37,09	39,53	42,13	44,90	47,85	51,00	51,00
S1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	8,21
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	12,0	12,00
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	73,89	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	80,0	80,00
		Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	40,00	42,8	45,8	49,0	52,4	56,1	60,0	60,00
S2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari	n/a	n/a	150	150	200	250	300	300
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,14	65,86	66,59	67,33	68,07	68,83	69,59	69,59

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Perolehan medali emas dalam PON	medali	17	-	-	90	-	-	-	90
		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40	80	85	95	100	100
		Ketepatanwaktuan pelaksanaan PON				tepat waktu					
S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68,08	69,19	70,3	71,5	72,6	73,8	75,0	75,00
		Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	persen	15,60	16,6	17,7	18,8	20,1	21,4	22,8	22,76
S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kabupaten/kota	13	13	11	10	9	7	7	7
		Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26,95	27,44	27,93	28,43	28,95	29,47	30,00	30
		Persentase penduduk tahan pangan	persen	40,04	42,83	45,82	49,01	52,43	56,09	60,00	60
S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3	3	1	1	1	1	1	5
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0	0	1	0	1	2
		Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	n/a	n/a	2	2	2,5	2,5	5	5
M2	Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI										
T2	Tujuan 2 Meningkatkan keamanan, ketentraman dan	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	236,00	218,00	202,00	187,00	173,00	159,00	147,00	147,00

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61,02	61,36	61,70	62,04	62,39	62,73	63,08	63,08
S8	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	persen	63,62	64,64	65,68	66,73	67,81	68,89	70,00	70,00
S9	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75,97	76,42	76,86	77,31	77,77	78,22	78,68	78,68
S10	Meningkatnya penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	15
		Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	0	0	50	60	65	70	75	75
S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92,15	92,62	93,09	93,56	94,04	94,52	95,00	95
		Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	41,13	42,49	43,90	45,35	46,85	48,40	50,00	50
		Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53,45	54,49	55,55	56,63	57,73	58,86	60,00	60,00
M3	Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan										
T3	Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-	C	C	B-	B	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	C	C	CC	CC	B	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	C	C	C	B	B	B	A	A

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90	93	95	98	100	100
		Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah kabupaten/kota	0	0	5	5	6	6	7	29
S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4,88	5,08	5,29	5,50	5,72	5,96	6,20	6,20
		Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74,37	76,04	77,76	79,51	81,30	83,13	85,00	85,00
		Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masuk e-planning dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	95	95
		Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	0	1	1	1	1	1	5
S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran,	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46,39	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	-	75,38	30,00	40,00	50,00	70,00	85,00	85,00
		Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48,24	36,70	39,04	41,53	44,18	47,00	50,00	50,00
		Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	-	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00	70,00
S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
		Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	7,81	8,61	9,49	10,46	11,52	12,70	14,00	14,00
M4	Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan										
T4	Tujuan 4: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	4,64	4,96	5,24	5,56	5,91	6,26	6,62	6,62
		Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	5,18	5,52	5,83	6,20	6,53	6,95	7,39	7,39
		Rasio Gini	nilai indeks	0,4000	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,3840
		Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0,392	0,371	0,351	0,332	0,315	0,298	0,282	0,282
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81,47	82,06	82,64	83,21	83,83	84,44	85,03	85,03

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Persentase penerapan green economy	persen			50	55	60	65	70	70
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,62	2,91	2,70	2,50	2,32	2,16	2,00	2,00
		PDRB Perkapita DT	juta rupiah	58,68	59,13	59,58	59,86	60,13	60,58	60,94	60,94
		PDRB Perkapita TT	juta rupiah	37,52	39,82	42,19	44,77	47,50	50,50	53,43	53,43
		Tingkat Inflasi	persen	2,41	2,41	2,36	2,36	2,34	2,30	2,26	2,26
S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,6	88,00	88,39	88,79	89,19	89,60	90,00	90
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	-	45	50	55	60	65	70
		Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2,27	2,59	2,95	3,37	3,84	4,38	5,00	5,0
		Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0,80	1,09	1,47	2,00	2,71	3,68	5,00	5,0
		Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0,82	1,11	1,50	2,02	2,74	3,70	5,00	5,00
S17	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13,21	14,69	16,34	18,17	20,21	22,48	25,00	25,00
S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara	indeks	90,91	91,58	92,25	92,93	93,62	94,31	95,00	95
		Indeks Kualitas Air	indeks	77,33	77,77	78,21	78,65	79,10	79,55	80,00	80
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78,18	79,28	80,39	81,52	82,66	83,82	85,00	85

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	-	-	31.580,25	39.475,31	47.370,37	55.265,43	63.160,49	63.160,49
S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	rasio	23,93	24,85	25,80	26,79	27,82	28,89	30,00	30
		Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1,29	1,48	1,71	1,97	2,26	2,61	3,00	3
		Laju Deforestasi	ribu hektar	48,6	43,50	38,94	34,86	31,20	27,93	25,00	25
S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	8,00	8,30	8,62	8,94	9,28	9,63	10,00	10
		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	1,94	2,19	2,47	2,79	3,14	3,55	4,00	4
		Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	0	0	1	1	2	2	4	10
		Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	52	53,66	54,88	56,11	57,38	58,68	60,00	60
		Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3428	3517	3609	3703	3799	3898	4000	4000
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	900,57	980,50	1067,52	1162,26	1265,42	1377,72	1500,00	1500
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2,20	2,41	2,65	2,90	3,19	3,50	3,5
S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4,53	5,33	6,27	7,37	8,67	10,20	12,00	12
		NTP perikanan tangkap	Skor	103,75	103,96	104,17	104,37	104,58	104,79	105,00	105
		NTP perikanan budidaya	Skor	83,27	85,85	88,51	91,25	94,08	96,99	100,00	100
		Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	0,22	0,33	0,49	0,74	1,10	1,65	2,46	2,46

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76,94	77,44	77,95	78,46	78,97	79,48	80,00	80,00
		Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96,01	97,09	97,34	97,59	97,84	98,09	98,34	98,34
S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. juta	52.510.304	54.401.000	56.360.000	58.389.000	60.491.000	62.669.000	64.926.000	64.926.365
		Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp.juta	70.038.818	73.744.000	77.645.000	81.753.000	86.078.000	90.632.000	95.427.000	95.425.872
		Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	90	80	60	40	30	20	20
T5	mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	229,82	224,56	219,42	214,39	209,48	204,69	200,00	200,00
		Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori			C	C	C	B	B	B
S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	55,17	55,17	58,62	65,52	72,41	79,31	93,10	93,10
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	30	30	32	40	45	50	55	55
		Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen	20	20	25	30	35	40	45	45

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen			30	35	40	45	50	50
S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen			60	65	70	75	80	80
		Persentase pengendalian daya rusak air	persen			40	45	50	55	60	60
S27	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33,06	34,12	35,22	36,36	37,54	38,75	40,00	40
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38,47	39,52	40,61	41,72	42,87	44,04	45,25	45,25
		Backlog perumahan layak huni	ribu ruta	147,88	138,55	129,80	121,61	113,93	106,74	100,00	100,00
S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40,57	41,28	41,99	42,73	43,47	44,23	45,00	45
S29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	persen			40	45	50	55	60	60
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen			5	7,25	7,5	8	10	10
M5	Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu										
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5,37	6,94	8,97	11,59	14,97	19,35	25,00	25,00
		Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	32,32	31,78	31,25	30,71	30,23	29,72	29,23	29,23

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	30,12	29,80	29,47	29,15	28,81	28,48	28,16	28,16
		Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	36,30	35,89	35,48	35,04	34,60	34,20	33,80	33,80
		Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0,8316	0,7774	0,7544	0,6907	0,6255	0,6067	0,5640	0,5640
		IPM wilayah perbatasan	indeks	63,25	64,02	64,79	65,58	66,38	67,18	68,00	68,00
		Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
		Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,517	0,508	0,500	0,491	0,483	0,475	0,467	0,467
S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Indeks kampung membangun	indeks	41,89	43,43	45,02	46,67	48,38	50,16	52,00	52
		Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen		30	34,46	39,59	45,47	52,23	60,00	60
S31	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen		60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	73,00	73,00
S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7,48	8,09	8,75	9,47	10,25	11,09	12,00	12
		Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65,08	65,56	66,04	66,53	67,01	67,50	68,00	68
		Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9,49	10,12	10,80	11,52	12,30	13,12	14,00	14
S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	-	-	50	50	50	50	50	250

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	-	-	10	20	30	40	50	150
S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	492	423	364	313	269	232	200	200
		Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	79,38	79,48	79,59	79,69	79,79	79,90	80,00	80

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Provinsi Papua sesuai dengan amanat visi dan misi daerah serta dinamika isu strategis yang berkembang

Dalam rangka mewujudkan visi **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan** maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka memantapkan kualitas dan daya saing SDM dengan masyarakat yang terjamin rasa aman, tentram dan damai disertai dengan kehidupan yang demokratis melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2019-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

Gambar 6.1. Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023



6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan

Untuk pelaksanaan RPJMD Papua 2019-2023, terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. **Perlindungan (*protection*):** sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
2. **Keberpihakan (*affirmative*):** afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan

perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama.

3. **Pemberdayaan (*empowerment*)**: bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. **Keberlanjutan (*sustainability*)**: Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. **Keterpaduan (*integrated*)**: RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
6. **Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*)**: pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan lima tahun kedepan adalah:

1. **Kecukupan (*sustenance*)**: pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (*basic need*) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri (*self esteem*)**: pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achivement*, menghargai diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (*freedom*)**: pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berperilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

6.1.2 Orientasi Pembangunan

Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu:

1. Orientasi Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal, serta dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan akan difokuskan pada pendidikan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah; kemandirian perekonomian masyarakat; serta ketahanan pangan bagi seluruh wilayah di Provinsi Papua. Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan periode 2019-2023.

2. Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan

Pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan merata diperlukan, sehingga dampak pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi secara esensial tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, melainkan dampak dari pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui: perubahan pola pikir, pengwilayahan komoditas, serta tanam, petik, olah dan jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya lokal yang ada di sekitarnya sehingga dapat bernilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. **Pengwilayahan komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Tanam, petik, olah dan jual** dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tahun 2019-2023 merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi, dan merupakan suatu indikator antara (bukan hasil akhir yang akan dicapai).

3. Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan

Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 (lima) wilayah yaitu 1) La Pago; 2) Mee Pago; 3) Anim Ha; 4) Saereri; dan 5) Mamta. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan.

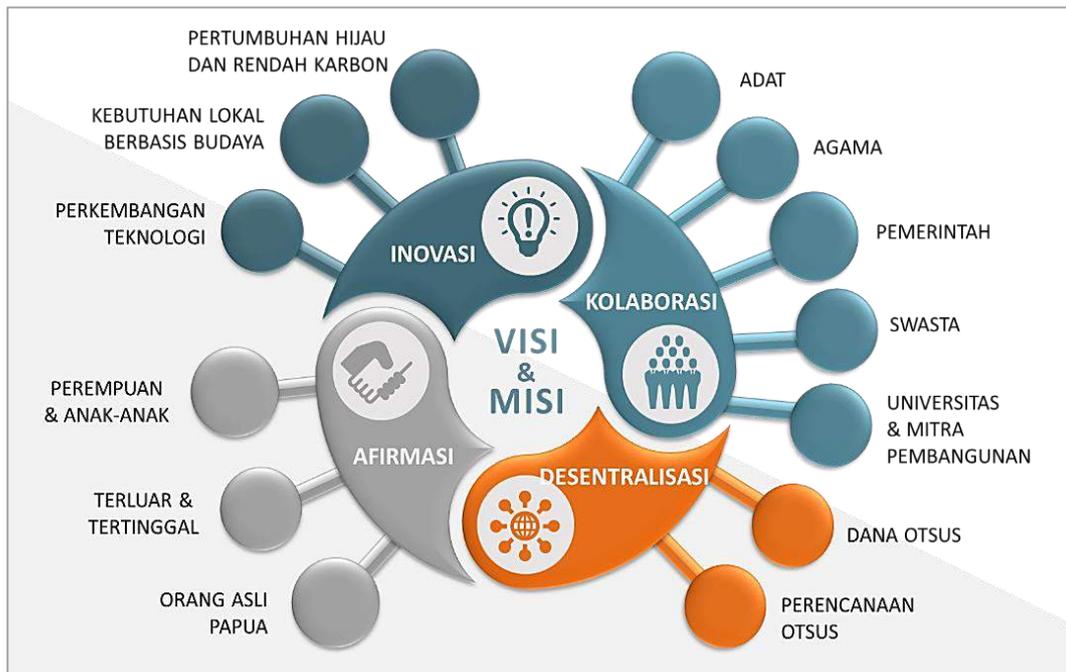
6.1.3. Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian bauran kebijakan yang mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki daerah di berbagai sektor sehingga akan memberi pengaruh terhadap percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. 4 (empat) pendekatan pembangunan yang akan diintensifkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2019-2023 adalah;

1. Inovasi artinya pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses dan hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga akan menambah nilai bagi penciptaan kepuasan bagi masyarakat Papua secara umum;
2. Kolaborasi artinya pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik dari perspektif kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya. Pada akhirnya kolaborasi akan memperkuat *sense of belonging* dari semua pihak dan memberi nilai bagi keberlanjutan pembangunan daerah;

3. Afirmasi artinya pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan terhadap potensi-potensi pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih yang ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan otonomi khusus Papua;
4. Desentralisasi artinya pembangunan daerah mengelola kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komponen pemerintahan sehingga mendorong terjadinya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 6.2 Pendekatan Pembangunan Daerah



6.1.4 Strategi Pencapaian Sasaran

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan.

6.2. Arah Kebijakan

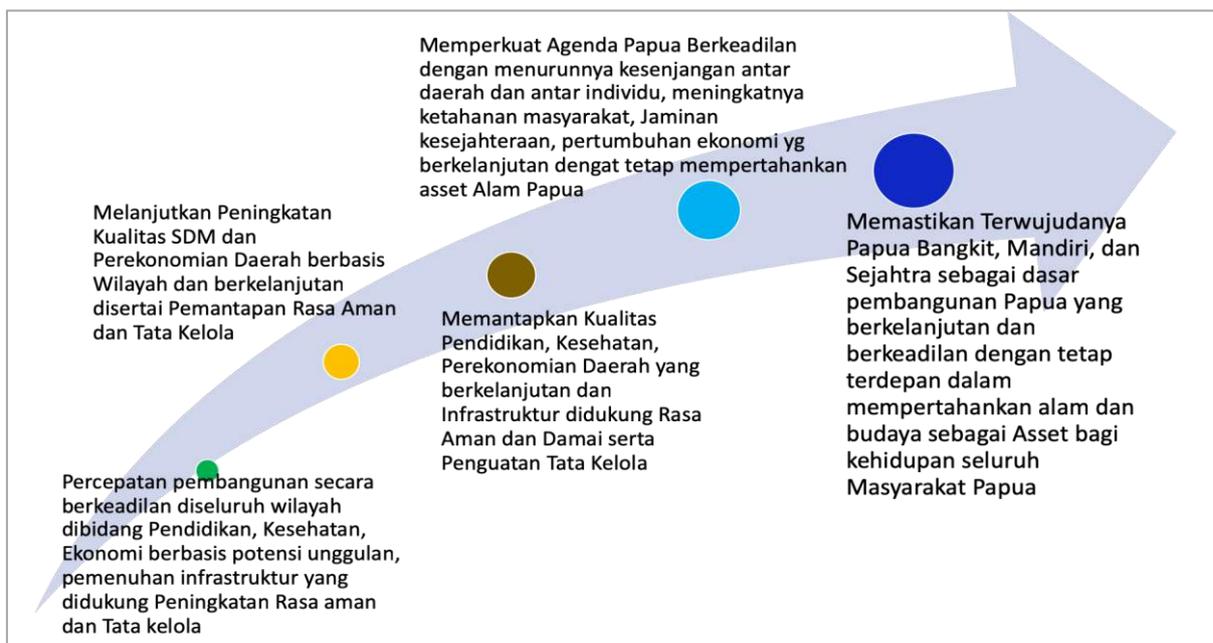
Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 terdiri dari Arah Kebijakan Umum Pembangunan yang mencakup bidang-bidang pembangunan dan Arah Pembangunan Kewilayahan. Tahapan pelaksanaan pembangunan akan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas dan

waktu pelaksanaan, sedangkan Arah pembangunan kewilayahan akan menjelaskan arah dan strategi pembangunan kewilayahan berbasis 5 (lima) wilayah yaitu La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Saereri, dan Mamta.

6.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Arah kebijakan Provinsi Papua merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama lima tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (lihat Gambar 6.3).

Gambar 6.3. Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Fokus pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tema akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional.

Berdasarkan fokus pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan tahunan pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
			2019	2020	2021	2022	2023		
Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM									
Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	S1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1	Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya.	√	√	√		
			2	Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Papua	√	√			
			3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan IPTEK di PTN/PTS			√	√	√
			4	Akselarasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	√	√	√	√	√
			5	Peningkatan pendidikan kecakapan hidup, yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.		√	√		
			6	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan		√	√	√	
			7	Perlindungan sosial untuk menjamin generasi emas papua.	√	√	√	√	√
			8	Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua	√	√	√	√	√
			9	Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama).		√	√	√	√
			10	Peningkatan akses pendidikan melalui guru kunjung, terutama di daerah terpencil.	√	√	√		
			11	Peningkatan profesionalisme dan tunjangan guru untuk daerah tertinggal dan terluar.		√	√	√	√
			12	Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan tunjangan guru	√	√	√	√	√
			13	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan berbasis e-learning	√	√	√	√	√
	S2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	1	Peningkatan budaya baca masyarakat			√	√	√
			2	Perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan pengarsipan				√	√
			3	Peningkatan layanan perpustakaan keliling					√
	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat	√	√	√	√	√
2			Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak bencana dan kejadian luar biasa		√	√			
3			Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service, dan telemedicine	√	√	√	√	√	
4			Menyempumakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran.	√	√				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2019	2020	2021	2022	2023	
		5 Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.		√	√			
		6 Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua.	√	√	√	√	√	
		7 Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.	√	√	√	√	√	
		8 Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan,			√	√		
		9 Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.				√	√	
		10 Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat.	√	√	√	√	√	
		11 Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah				√	√	
		12 Mendorong penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan pola BLUD	√	√	√	√	√	
		13 Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan	√	√	√	√	√	
		14 Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	√	√	√	√	√	
	S4 Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	1 Pemantapan persiapan pelaksanaan PON Papua XX Papua	√	√				
		2 Penguatan seleksi dan pembinaan bibit muda atlet olahraga berprestasi daerah	√	√				
		3 Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	√	√				
		4 Menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung utama kegiatan PON	√	√				
		5 Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi berbasis keunggulan komoditas masing-masing wilayah	√	√				
	S5 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1 Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembanguan daerah terutama dalam bidang kewirausahaan	√	√	√	√	√	
		2 Menumbuhkan talenta-talenta kewirausahaan di kalangan pemuda	√	√	√	√	√	
		3 Meningkatkan aktualisasi seni dan budaya pemuda	√	√	√	√	√	
		4 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pemuda		√	√	√		
		5 Percepatan peningkatan kapasitas SDM pemuda OAP		√	√	√		
		6 Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dan pengembangan industri olah raga Indonesia	√	√	√	√	√	
	S6 Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1 Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.	√	√	√	√		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
			2019	2020	2021	2022	2023		
		2	Perbaiki sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.		√	√	√		
		3	Penguatan petani dan menjaga daya beli serta nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani.		√	√	√	√	
		4	Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan diberikan insentif dalam pengembangannya.				√	√	
		5	Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.				√	√	
		6	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		√	√	√	√	
		S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	1	Meningkatkan pembinaan mental dan spritual masyarakat	√	√	√	√
	2	Pembinaan kelembagaan umat beragama	√	√	√	√	√		
	3	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan melalui bantuan kepada lembaga agama dan yayasan pengelola pendidikan keagamaan	√	√	√	√	√		
	4	Peningkatan apresiasi terhadap adat dan budaya dalam berbagai bidang kehidupan	√	√	√	√	√		
	5	Penguatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya			√	√	√		
Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI									
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	S8	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	1	Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah	√	√	√		
			2	Menumbuhkembangkan ketentraman dan ketrtiban umum		√	√	√	
			3	Meningkatkan keamanan dan ketertiban swakarsa			√	√	√
	S9	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1	mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial	√	√	√		
			2	Meningkatkan penciptaan lingkungan kondusif bagi kehidupan umat beragama	√	√			
			3	Memperkuat kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok	√	√	√		
			4	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	√	√			
			5	Memperkuat peran adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	√	√	√	√	√
	S10	Meningkatnya penegakan HAM	1	Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM	√	√	√	√	√
			2	Meningkatkan fasilitasi berbagai lembaga pada kasus kasus pelanggaran HAM	√	√	√	√	√
			3	Peningkatan kesadaran masyarakat pada HAM	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan							
			2019	2020	2021	2022	2023			
	S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1	Meningkatkan lingkungan kondusif bagi kehidupan demokrasi lokal	√			√	√	
			2	Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi daerah serta peningkatan pendidikan politik masyarakat	√			√	√	
			3	Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diintegrasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik	√	√	√	√	√	
			4	Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	√	√	√	√	√	
Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan										
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1	Memantapkan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan Otonomi khusus Papua	√			√		√
			2	Pemantapan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang efisien, efektif dan berkeadilan	√	√				
			3	Penguatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua	√	√	√	√	√	
			4	Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus	√	√				
			5	Penguatan kelembagaan dan rambu-rambu hukum otonomi khusus Provinsi Papua	√	√				
			6	Mendata dan menjamin OAP memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil		√	√			
			7	Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan.	√		√			√
			8	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	√	√	√	√		
	S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Meneruskan reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kerjanya serta pertanggungjawaban publik	√			√		√
			2	Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	√		√			
			3	Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah		√		√		
			4	Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process)		√	√			
			5	Meningkatkan sistem monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	√				
			6	Meningkatkan tata hukum dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah		√		√		
			7	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah	√			√		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2019	2020	2021	2022	2023	
		8 Meningkatkan upaya fasilitasi penyelesaian tapal batas antar wilayah kabupaten	√	√	√	√	√	
		9 Meningkatkan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi daerah	√					
		10 Meningkatkan pengembangan sistem pencegahan korupsi	√	√	√	√	√	
		11 Meningkatkan komunikasi dan transparansi informasi kebijakan pemerintah daerah				√	√	
		12 Meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online dan transparan	√	√				
		13 Menciptakan fungsi lembaga perwakilan rakyat DPRP dan MRP dalam menjalankan amanah rakyat	√	√	√	√	√	
		14 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan		√				
		15 Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor	√	√				
		16 Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan	√	√	√	√	√	
		17 Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung	√	√	√	√	√	
		18 Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan	√	√	√	√	√	
		19 Memastikan seluruh penduduk Papua, terutama OAP terdata secara terpilah dan memiliki identitas kependudukan			√	√	√	
		S14 Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial		√	√		
			2 Memperkuat Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence base planning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan	√	√			√
			3 Membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan daerah		√	√	√	
			4 Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	√	√	√	√	√
			5 Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur	√	√	√	√	√
			6 Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	√	√	√	√	
		S15 Meningkatkan sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1 Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP		√	√		
2 Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan APBD	√		√	√	√	√		
3 Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Papua				√	√			
4 Memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN	√		√	√	√	√		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2019	2020	2021	2022	2023	
		5 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas	√	√	√	√	√	
Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan								
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1 Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor tanaman pangan/perkebunan/peternakan dengan mutu serta kualitas prima			√	√	√
			2 Peningkatan produktivitas tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui penerapan teknologi, serta fasilitasi pemasaran	√	√	√	√	√
			3 Peningkatan ketahanan pangan di tingkat provinsi yang berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal	√	√	√		
			4 Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	√	√	√		
			5 Perbaikan sistem distribusi dan logistik komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain			√	√	√
			6 Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG Provinsi)			√	√	√
			7 Pengembangan industri hilir tanaman pangan/ perkebunan/ peternakan melalui insentif pengembangan			√	√	√
			8 Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga			√	√	√
			9 Pembangunan dan pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	√	√	√	√	√
			10 Penguatan kelembagaan ekonomi petani/peternak untuk peningkatan produktifitas dan pemasaran dalam perekonomian masyarakat lokal.			√	√	√
			11 Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan masing-masing Wilayah (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)	√	√			
			12 Memantapkan hubungan antar wilayah/daerah/kampung dengan membangun infrastruktur dan keterkaitan sistem produksi dan distribusi komoditas pertanian dan perkebunan, serta pelayanan yang kokoh serta berkesinambungan.		√	√	√	
			13 Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		√	√	√	√
			14 Mengembangkan jaringan dan informasi pasar lokal untuk komoditas unggulan pertanian/perkebunan/peternakan di tiap wilayah				√	√
			15 Peningkatan agroindustri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah.	√	√	√		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
			2019	2020	2021	2022	2023		
	S17	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	16	Perbaikan iklim Investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor UMKM agribisnis sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP.	√	√	√		
			17	Pengembangan industri pertanian/perkebunan/peternakan padat karya			√	√	√
			1	Pengembangan industri pertambangan yang berkelanjutan		√	√	√	
			2	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan		√	√	√	
			3	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertambangan		√	√	√	
	S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	4	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas		√	√	√	
			5	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan		√	√	√	
			1	Meningkatkan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan		√	√	√	
			2	Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)	√	√	√		
			3	Revitalisasi pembangunan rendah karbon			√	√	√
			4	Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√	√
	S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	5	Konservasi sungai dan danau	√	√	√	√	√
			6	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas		√	√	√	
			1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan	√	√	√	√	
	S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	2	Optimalisasi konservasi sumberdaya alam hayati		√	√	√	
			3	Restorasi pembangunan lahan gambut yang berkelanjutan				√	√
			1	Meningkatkan akses tata niaga dan kualitas infrastruktur perdagangan				√	√
			2	Penguatan kemauan dan kemampuan masyarakat kampung dalam berinovasi dan memproduksi serta mengelola ekonomi lokal yang kuat dan mandiri,			√	√	√
			3	Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas	√	√	√	√	
			4	Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah	√	√	√	√	√
5			Meningkatkan kemitraan usaha mikro kecil menengah dengan perbankan dan fasilitasi pemasaran produk	√	√		√	√	
6			Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi				√	√	
7			Pengembangan destinasi pariwisata andalan Provinsi Papua	√	√	√			
8	Pengembangan kepariwisataan diutamakan pada kegiatan ekoturisme yang bernilai tambah tinggi, sehingga secara efektif dan efisien dapat mendukung upaya pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin	√	√	√					
		9	Pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis wilayah adat				√	√	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan							
			2019	2020	2021	2022	2023			
		10	Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan			√	√	√		
		11	Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI)		√	√	√	√		
		12	Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian, peternakan, dan perikanan dengan diberikan insentif dalam pengembangannya			√	√	√		
	S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	1	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya	√	√	√	√		
			2	Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat			√	√	√	
			3	Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan			√	√	√	
			4	Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat				√	√	
			5	Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi perikanan lokal unggulan			√	√	√	
			6	Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur perikanan		√	√	√		
	S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Peningkatan daya saing tenaga kerja disertai dengan perluasan kesempatan kerja		√	√	√		
			2	Peningkatan fasilitas Penyelesaian konflik industrial			√	√		
			3	Perbaikan iklim Investasi dan usaha serta pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja terintegrasi dengan kebijakan bidang urusan lainnya				√	√	
			4	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan		√	√	√		
	S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	1	Peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah		√	√	√		
			2	Pembangunan dan pengembangan sentra ekonomi berbasis wilayah adat			√	√	√	
			3	Penyederhanaan perizinan berbasis <i>Online Single Submission (OSS)</i>		√	√	√		
			4	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas		√	√	√		
	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	S24	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	1	Meningkatkan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua	√	√	√	√	√
				2	Memantapkan hubungan antar wilayah/ daerah/ kampung dengan penyediaan infrastruktur transportasi dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah / daerah yang kokoh serta berkesinambungan	√	√	√	√	√
3				Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah	√	√	√	√	√	
4				Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan dengan RTRW Provinsi	√	√	√	√	√	
S25		Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	1	Pengendalian pemanfaatan ruang		√	√	√	√	
			2	Sosialisasi rencana tata ruang dan penegakan hukum serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan		√	√	√	√	
			3	Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan		√	√	√	√	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan							
			2019	2020	2021	2022	2023			
	S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	4	Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang		√	√	√	√	
			5	Penataan guna lahan permukiman di perkotaan		√	√	√	√	
		1	Meningkatkan kapasitas daya tampung jaringan irigasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat		√	√	√			
		2	Penyediaan dan pengelolaan air baku	√	√	√	√	√		
		3	Pengendalian banjir dan abrasi pantai	√	√	√	√	√		
	S27	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat		√	√	√	√	
			2	Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	√	√	√	√	√	
	S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	1	Peningkatan ketersediaan energi (listrik / penerangan)	√	√	√	√	√	
			2	Peningkatan energi alternatif				√	√	
	S29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi & Informasi antar wilayah	1	Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	√	√	√	√	√	
			2	Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi			√	√	√	
	Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu									
	Meningkatkan pemerataan pembangunan	S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	1	Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	√	√	√	√	√
2				Penguatan dan pendampingan tata kelola pemerintahan kampung serta memperkuat peran distrik dalam pembangunan kampung dan pelayanan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	
3				Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan.	√	√				
4				Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	√	√	√	√	√	
5				Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.		√	√	√		
6				Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		√	√	√	√	
7				Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung	√	√	√	√	√	
S31		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1	Peningkatan akses masyarakat di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian	√	√	√	√	√	
			2	Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP		√	√	√	√	
			3	Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	√	√	√	√	√	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
			2019	2020	2021	2022	2023		
		4	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		√	√	√	√	
		5	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	√	√	√	√	√	
	S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	1	Optimalisasi kerjasama perbatasan dengan negara tetangga			√	√	
			2	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.		√	√	√	√
	S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	1	Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM yang menangani kesejahteraan sosial	√	√	√		
			2	Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan komprehensif ke arah pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial	√	√	√	√	√
			3	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan permasalahan kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua		√	√	√	√
			4	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	√	√	√	√	√
	S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota			√	√	√
			2	Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengantisipasi kebencanaan			√	√	√
			3	Pengembangan data dan peta risiko rawan bencana alam di tingkat provinsi			√	√	√
			4	Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah			√	√	√
			5	Fasilitasi rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap bencana		√	√	√	
	S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua		√	√	√	√
			2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah		√	√	√	√
			3	Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan		√	√	√	√
			4	Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak		√	√	√	√

6.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan

6.2.2.1 Kerangka Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. **Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.**

Gambar 6.4. Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (*hinterland*) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut.
2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang

diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan.

3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSNI, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSNI, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.
5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang.
6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.

Dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua tersebut, terdapat target keberhasilan per wilayah adat yang merupakan hasil berbagai program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Target Kewilayahan

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal Perencanaan		Tahun					Target RPJMD	Target Wilayah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
ANIM HA										
IPM	Indeks	58.59	59.33	60.47-65.47	60.95-65.95	62.46-67.46	63.67-68.67	64.21-69.21	65.47	64.21-69.21
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	6.61	n/a*	7.08-9.98	7.18-9.98	7.28-9.98	7.38-9.98	7.48-9.98	6.62	7.48-9.98
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	6.60	n/a*	6.83-8.00	6.93-8.00	7.03-8.00	7.13-8.00	7.23-8.00	7.39	7.23-8.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	29.85	n/a*	32.49-35.49	34.15-37.15	35.73-38.73	37.85-40.85	42.57-45.57	60.94	42.57-45.57
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	29.51	n/a*	32.13-37.13	33.76-38.76	37.33-42.33	42.43-47.43	45.11-50.11	53.43	45.11-50.11
Tingkat pengangguran terbuka	%	3.76	n/a*	2.70-2.50	2.26-2.06	2.06-1.86	1.84-1.64	1.45-1.25	2.00	1.45-1.25
Persentase penduduk miskin	%	20.91	n/a*	20.19-18.19	19.69-17.69	19.42-17.42	18.97-16.97	18.70-16.70	23.98	18.70-16.70
LA PAGO										
IPM	Indeks	44.88	45.79	49.28-54.28	50.85-55.85	51.21-56.21	52.37-57.37	53.28-58.28	65.47	53.28-58.28
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	5.65	n/a*	6.21-8.51	6.46-8.51	6.71-8.51	6.96-8.51	7.21-8.51	6.62	7.21-8.51
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	5.65	n/a*	6.09-7.00	6.34-7.00	6.59-7.00	6.84-7.00	7.09-7.00	7.39	7.09-7.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	10.50	n/a*	11.33-14.83	11.87-15.37	12.38-15.88	13.06-16.56	16.94-20.44	60.94	16.94-20.44
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	10.40	n/a*	13.22-20.22	13.75-20.75	15.26-22.26	17.94-24.94	23.80-30.80	53.43	23.80-30.80
Tingkat pengangguran terbuka	%	1.14	n/a*	1.07-0.87	1.14-0.94	0.99-0.79	0.63-0.43	0.55-0.35	2.00	0.55-0.35
Persentase penduduk miskin	%	36.30	n/a*	35.37-25.37	34.82-24.82	34.34-24.34	33.83-23.83	33.28-23.28	23.98	33.28-23.28
MEE PAGO										
IPM	Indeks	57.21	57.87	61.15-66.15	62.27-67.27	63.33-68.33	64.01-69.01	65.03-70.03	65.47	65.03-70.03
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	3.32	n/a*	4.42-6.67	6.46-6.67	6.71-6.67	6.96-6.67	5.42-6.67	6.62	5.42-6.67
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	5.90	n/a*	6.34-7.00	6.59-7.00	6.84-7.00	7.09-7.00	7.34-7.00	7.39	7.34-7.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	69.47	n/a*	75.50-78.00	79.15-81.65	82.60-85.10	87.19-89.69	94.01-96.51	60.94	94.01-96.51
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	20.13	n/a*	22.81-27.81	23.98-28.98	26.75-31.75	30.11-35.11	37.03-42.03	53.43	37.03-42.03
Tingkat pengangguran terbuka	%	2.90	n/a*	2.25-2.05	2.00-1.80	1.83-1.63	1.55-1.35	1.30-1.10	2.00	1.30-1.10
Persentase penduduk miskin	%	32.32	n/a*	31.28-21.28	30.90-20.90	30.49-20.49	30.10-20.10	29.49-19.49	23.98	29.49-19.49

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal Perencanaan		Tahun					Target RPJMD	Target Wilayah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
SAERERI										
IPM	Indeks	65.74	66.40	67.08-72.08	68.75-73.75	69.11-74.11	70.16-75.16	71.04-76.04	65.47	71.04-76.04
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	0.96	n/a*	5.32-7.35	6.46-7.35	6.71-7.35	6.96-7.35	6.32-7,35	6.62	6.32-7,35
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	0.97	n/a*	1.97-5.00	2.22-5.00	2.47-5.00	2.97-5.00	3.47-5.00	7.39	3.47-5.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	33.21	n/a*	35.74-39.24	37.28-40.78	38.74-42.24	40.72-44.22	46.26-49.76	60.94	46.26-49.76
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	33.00	n/a*	36.52-41.52	38.05-43.05	41.49-46.49	45.46-50.46	52.97-57.97	53.43	52.97-57.97
Tingkat pengangguran terbuka	%	5.30	n/a*	4.06-2.56	4.11-2.61	3.94-2.44	3.92-2.42	3.73-2.23	2.00	3.73-2.23
Persentase penduduk miskin	%	30.12	n/a*	28.89-21.89	28.47-21.47	27.72-20.72	26.99-19.99	26.49-19.49	23.98	26.49-19.49
MAMTA										
IPM	Indeks	65.55	66.16	67.87-72.87	68.35-73.35	69.49-74.49	70.69-75.69	71.50-76.50	65.47	71.50-76.50
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	6.27	n/a*	6.71-9.37	6.81-9.37	6.91-9.37	7.01-9.37	7.11-9.37	6.62	7.11-9.37
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	6.29	n/a*	6.59-8.00	6.69-8.00	6.79-8.00	6.89-8.00	6.99-8.00	7.39	6.99-8.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	46.74	n/a*	51.06-54.06	53.76-56.76	56.33-59.33	59.75-62.75	66.11-69.11	60.94	66.11-69.11
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	50.39	n/a*	55.43-59.43	58.61-62.61	61.65-65.65	65.65-69.65	70.79-74.79	53.43	70.79-74.79
Tingkat pengangguran terbuka	%	8.93	n/a*	6.88-4.88	6.93-4.93	6.45-4.45	6.02-4.02	5.84-3.84	2.00	5.84-3.84
Persentase penduduk miskin	%	16.96	n/a*	16.12-14.12	15.68-13.68	15.14-13.14	14.70-12.70	14.27-12.27	23.98	14.27-12.27

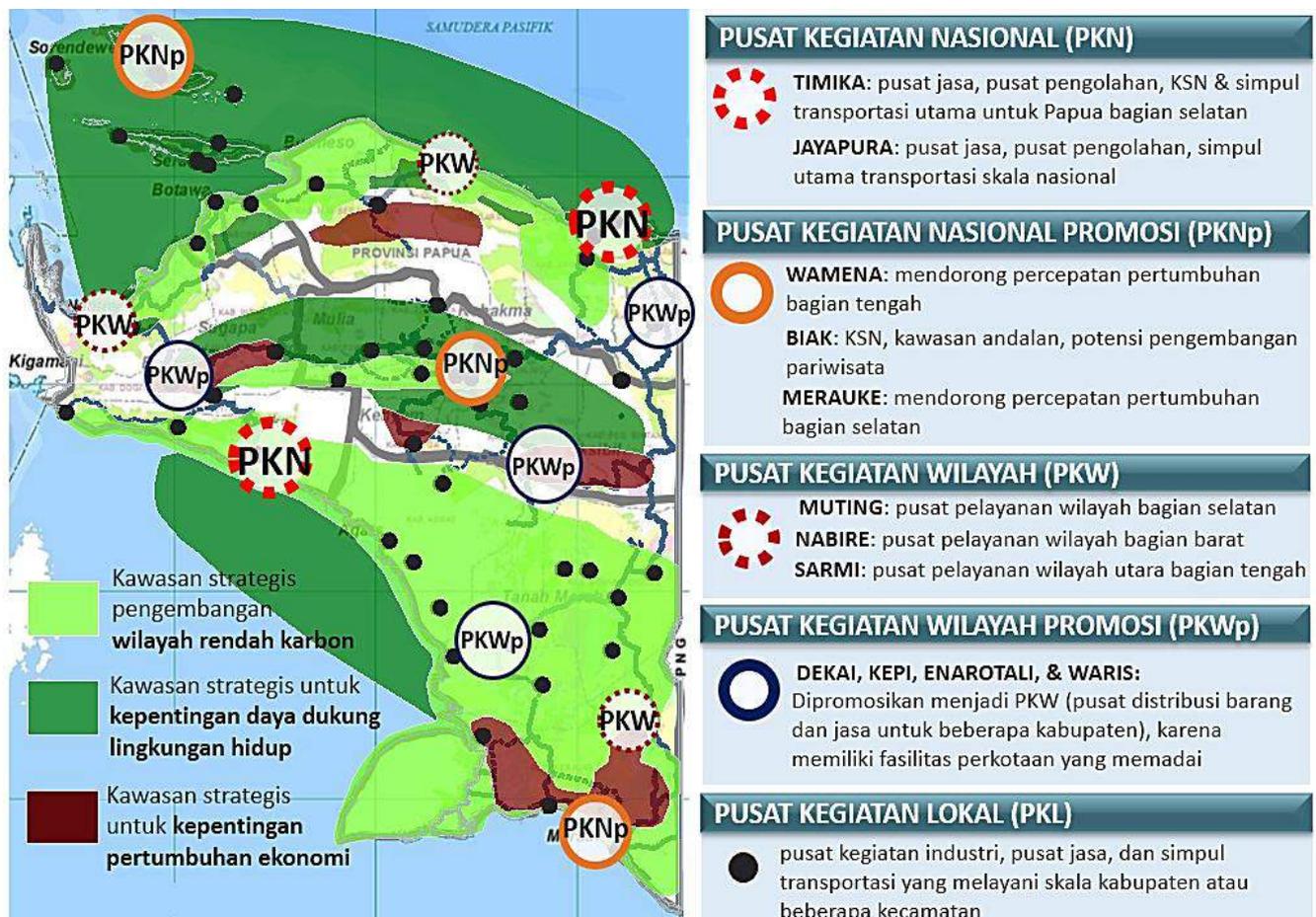
Keterangan:

n/a* = Data belum tersedia (Publikasi resmi BPS “Provinsi Papua Dalam Angka 2019” belum dikeluarkan saat penyusunan RPJMD 2019-2023)

6.2.2.2. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat” diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar 6.5. Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Tabel 6.3. Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua

PUSAT PERTUMBUHAN	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> pintu gerbang ke kawasan internasional berpotensi mendorong perkembangan wilayah sekitarnya pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi 				
			Timika di Kab. Mimika <ul style="list-style-type: none"> KSN simpul transportasi utama yang melayani Papua bagian selatan 	Kota Jayapura dan Kab. Jayapura <ul style="list-style-type: none"> simpul utama transportasi skala nasional dengan adanya pelabuhan laut dan bandara Sentani 	
Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKN				
	Wamena di Kab. Jayawijaya <ul style="list-style-type: none"> mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Papua 	Merauke <ul style="list-style-type: none"> mendorong percepatan pertumbuhan di bagian selatan Papua 			Biak <ul style="list-style-type: none"> KSN kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> mendukung PKN pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten 				
		Muting di Kab. Merauke <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah bagian selatan 	Nabire <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah barat menunjang wilayah sekitarnya dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara 	Sarmi <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah 	
Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKW				
	Dekai di Kab. Yahukimo <ul style="list-style-type: none"> pusat simpul masuknya barang dan jasa pusat pengembangan industri di wilayah selatan 	Kepi di Kab. Mappi <ul style="list-style-type: none"> ibukota Kab. Mappi 	Enarotali di Kab. Paniai <ul style="list-style-type: none"> pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak 	Waris di Kab. Keerom <ul style="list-style-type: none"> memiliki fasilitas perkotaan memadai 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. (Semua ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKN, PKNp, dan PKW maka ditentukan sebagai PKL) 				

6.2.2.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan SDM di Papua untuk mewujudkan “*green growth* berbasis wilayah adat” dan pengembangan klaster ekonomi dilakukan dengan pembentukan SDM unggul melalui *center of knowledge*, politeknik agroindustri, *technopark*, SMK pertanian, dan balai latihan kerja yang terletak di lokasi-lokasi strategis dalam pembentukan klaster ekonomi setiap wilayah adat.

Secara umum SDM di klaster pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata di Papua harus menguasai kompetensi dasar untuk dapat menjalankan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, keberadaan pusat klaster yang membantu memberikan informasi mengenai peluang pasar untuk hasil produk budidaya olahan pertanian tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertanian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus dipelajari secara mandiri, namun terdapat lembaga antar klaster yang menjalin kemitraan dengan berbagai aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha pertanian eksternal, akademisi, swasta, organisasi sosial, dan lembaga keuangan eksternal untuk membantu SDM pelaku usaha pertanian. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi, namun juga dalam bentuk studi banding, penelitian & pengembangan, investasi, serta memberi bantuan input (benih, pupuk, modal, teknologi, dll). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong SDM pelaku usaha pertanian di Papua yang saling bertukar input, output, pengetahuan, informasi dan teknologi serta bekerja sama dengan pelaku usaha pertanian eksternal, sehingga dapat tercipta SDM yang kompeten, kompetitif, dan inovatif dalam implementasi *green growth* berbasis wilayah adat.

Tabel 6.4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Politeknik Agroindustri terakreditasi B	Wamena di Kab. Jayawijaya* (*opsional)	Kab. Merauke* (*opsional)			
Technopark sebagai <i>center of excellence</i> sektor unggulan klaster ekonomi	V	V	V	V	V

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
SMK pertanian, pariwisata, dan/atau pertambangan	Wamena di Kab. Jayawijaya	Kab. Merauke	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura Kab. Sarmi	Kab. Biak Numfor
Balai Latihan Kerja (BLK)	Wamena di Kab. Jayawijaya Kab. Yahukimo	Kab. Merauke Kepi di Kab. Mappi Kab. Boven Digoel	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura	Kab. Biak Numfor
Lembaga standarisasi mutu					Kab. Biak Numfor

Tentu saja strategi pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di atas tidak mengabaikan strategi yang saat ini telah dilakukan untuk mendukung pendidikan dasar, yaitu melalui penguatan sekolah kecil dan sekolah berasrama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan karakteristik wilayah, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kearifan lokal masyarakat Papua. Dalam implementasi upaya peningkatan tersebut diperlukan peran aktif masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal. Secara umum, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan pemberian tunjangan tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan obat-obat tradisional, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV Aids, TB paru, dan malaria.

Tabel 6.5. Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
RSUD tipe A				Kota Jayapura	
RSUD tipe B	V	V	V		V
Rumah sakit pratama	Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang	Mindiptana di Kab. Boven Digoel	Kab. Dogiyai	Kab. Sarmi	Kab. Supiori

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
		Muting di Kab. Merauke			
Rumah sakit mata				Kota Jayapura	
Rumah sakit jiwa		Kab. Merauke	Kab. Mimika	Kota Jayapura	
Sarana kesehatan terapung		V		V	
Sarana kesehatan keliling				V	V

Sebagaimana bidang pendidikan, penguatan di bidang kesehatan sekunder juga paralel dengan strategi pengembangan kesehatan primer dan kesehatan berbasis masyarakat melalui skema dukungan otonomi khusus.

6.2.2.4 Pengembangan Perekonomian Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (*cluster*) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

Dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua, setiap wilayah dan pelaku usaha saling terhubung dan membentuk jejaring dalam memanfaatkan potensi lokal, sehingga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi multisektor dan manfaat kolektif. Adapun manfaat kolektif yang diperoleh dari terbentuknya klaster adalah sebagai berikut (Porter, 1998):

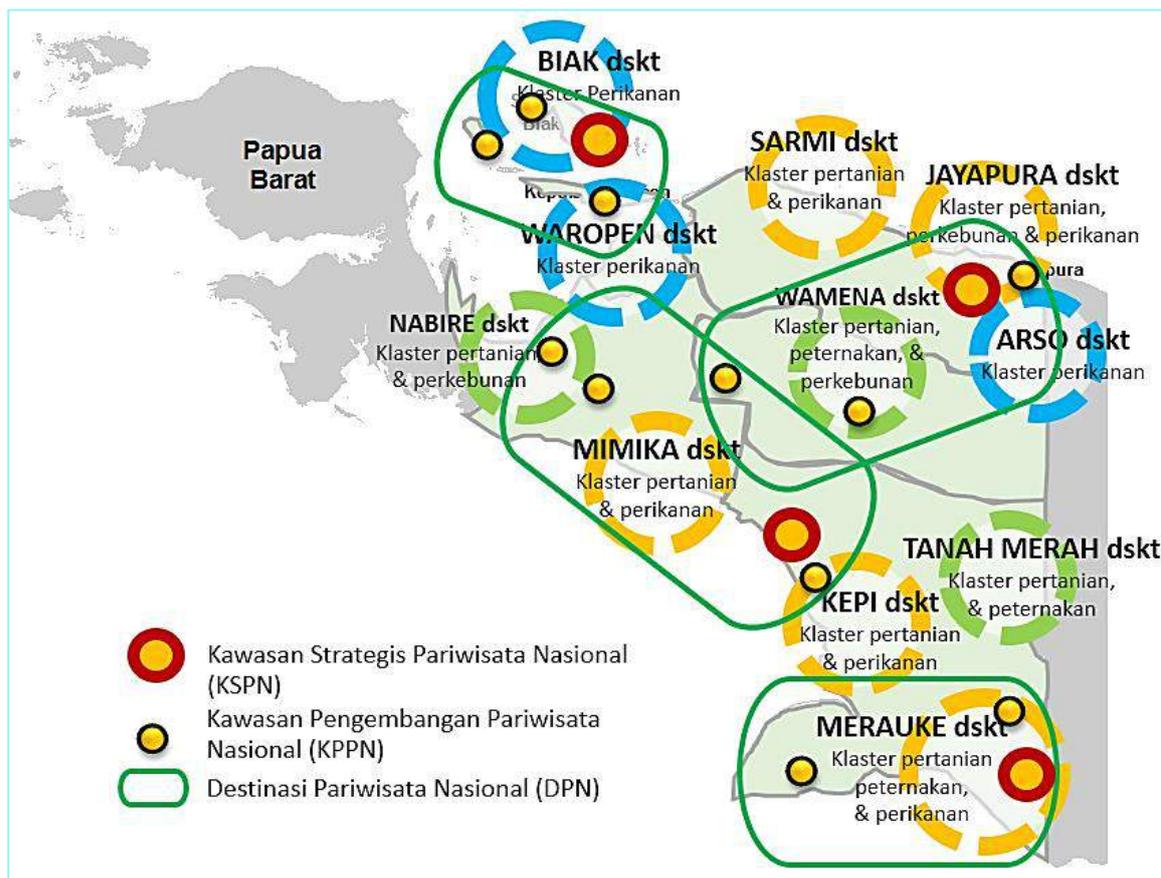
- a. **Efisiensi:** kedekatan geografis akan berdampak terhadap pengurangan biaya operasional (transportasi dan komunikasi) dan biaya produksi, serta memungkinkan efisiensi lainnya berupa pembiayaan bersama (*cost sharing*) dan pembagian risiko (*risk sharing*);
- b. **Produktivitas:** sebagai dampak dari kemudahan yang diperoleh (*specialized labor pool, specialized input supplier, and technological supplier*) maka para pelaku usaha dapat fokus kompetensi untuk meningkatkan produktivitas. Pelaku usaha di dalam klaster akan lebih produktif dalam menggunakan input; mengakses informasi,

teknologi dan institusi yang dibutuhkan; berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait; dan memiliki motivasi di dalam melakukan perbaikan (*improvement*);

- c. **Inovatif:** merupakan *output* dari interaksi sinergis antar *stakeholder* di dalam klaster, termasuk keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang akan meningkatkan kemampuan kolektif.

Tantangan dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua adalah dampak yang tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sehingga diperlukan upaya lebih agar klaster ekonomi terbentuk secara berkelanjutan. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Klaster tersebut memiliki jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan, tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.

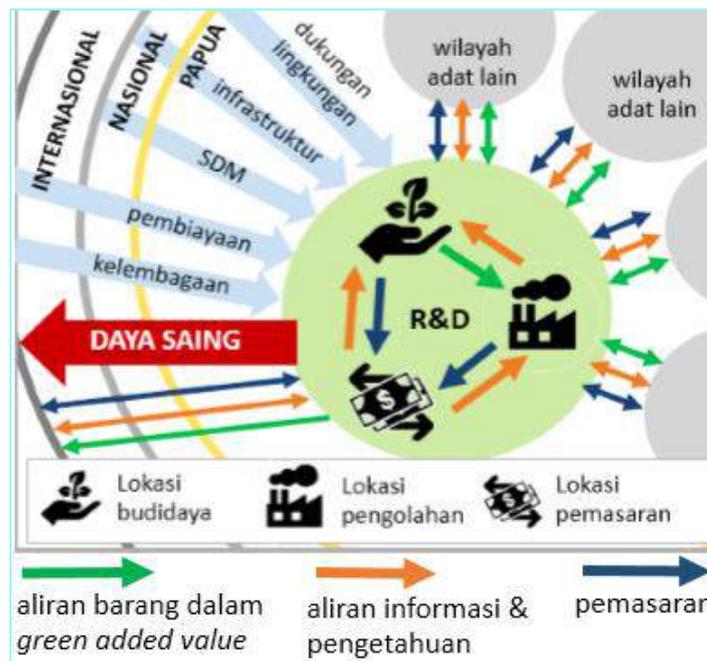
Gambar 6.6. Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua



Tabel 6.6. Pengembangan Perekonomian Wilayah

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL					
Sektor Primer	kopi, buah merah, ubi jalar, sagu	padi, karet, kopi, tebu, perikanan, peternakan, kelapa sawit	kopi, buah merah, ubi jalar, tambang, perikanan, sagu	kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, perikanan	hasil Laut, perikanan
Sektor Sekunder	industri pengolahan sagu, buah merah, ubi jalar, kopi	industri pengolahan tebu, kelapa sawit, peternakan, dan pengalengan ikan	industri pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan/ atau perkebunan	industri pengolahan ikan dan hasil perkebunan	industri kayu, pengolahan ikan
Sektor Tersier	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa
PENGEMBANGAN KLASTER EKONOMI DI PAPUA					
Klaster Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Wamena dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanah Merah dan sekitarnya Kepi dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Nabire dan sekitarnya Mimika dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Sarmi dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya 	
Klaster Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Wamena dan sekitarnya 		<ul style="list-style-type: none"> Nabire dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Jayapura dan sekitarnya 	
Klaster Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Wamena dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanah Merah dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya 			
Klaster Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> Kepi dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Mimika dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Sarmi dan sekitarnya Arso dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> Biak dan sekitarnya Waropen dan sekitarnya
Klaster Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya KPPN Jayawijaya di Kab. Jayawijaya KPPN Wamena di Kab. Jayawijaya 	<ul style="list-style-type: none"> KSPN Wasur-Merauke dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Kimaam dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Danau Bian dan sekitarnya di Kab. Merauke 	<ul style="list-style-type: none"> KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya di Kab. Nabire KPPN Paniai dan sekitarnya di Kab. Paniai KSPN Agats- Asmat dan sekitarnya di Kab. Asmat KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya 	<ul style="list-style-type: none"> KSPN Sentani dan sekitarnya di Kab. Jayapura KPPN Jayapura dan sekitarnya di Kota Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> KSPN Biak dan sekitarnya di Kab. Biak KPPN Numfor dan sekitarnya di Kab. Biak numfor KPPN Serui dan sekitarnya di Kab. Kep.Yapen KPPN Supiori dan sekitarnya di Kab. Supiori

Gambar 6.7. Ilustrasi Pengembangan Kluster Ekonomi di Papua



Dalam pengembangan kluster ekonomi terdapat interaksi di dalam kluster ekonomi, interaksi antar kluster ekonomi, interaksi di dalam wilayah adat, antar wilayah adat, maupun interaksi dengan wilayah luar Papua, berupa: (1) aliran barang dalam penciptaan nilai tambah yang ramah lingkungan (*green added value*); (2) aliran informasi & pengetahuan (*sharing of knowledge*) yang mendorong keterampilan dan inovasi; serta (3) aliran pemasaran. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal, serta dapat memberikan *multiplier effect* terhadap sektor ekonomi lainnya, tanpa mengabaikan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan kluster pariwisata, terdapat hubungan integrasi antara kluster pariwisata dengan kluster lainnya, yaitu sebagai lokasi promosi dan pemasaran output produksi kluster ekonomi.

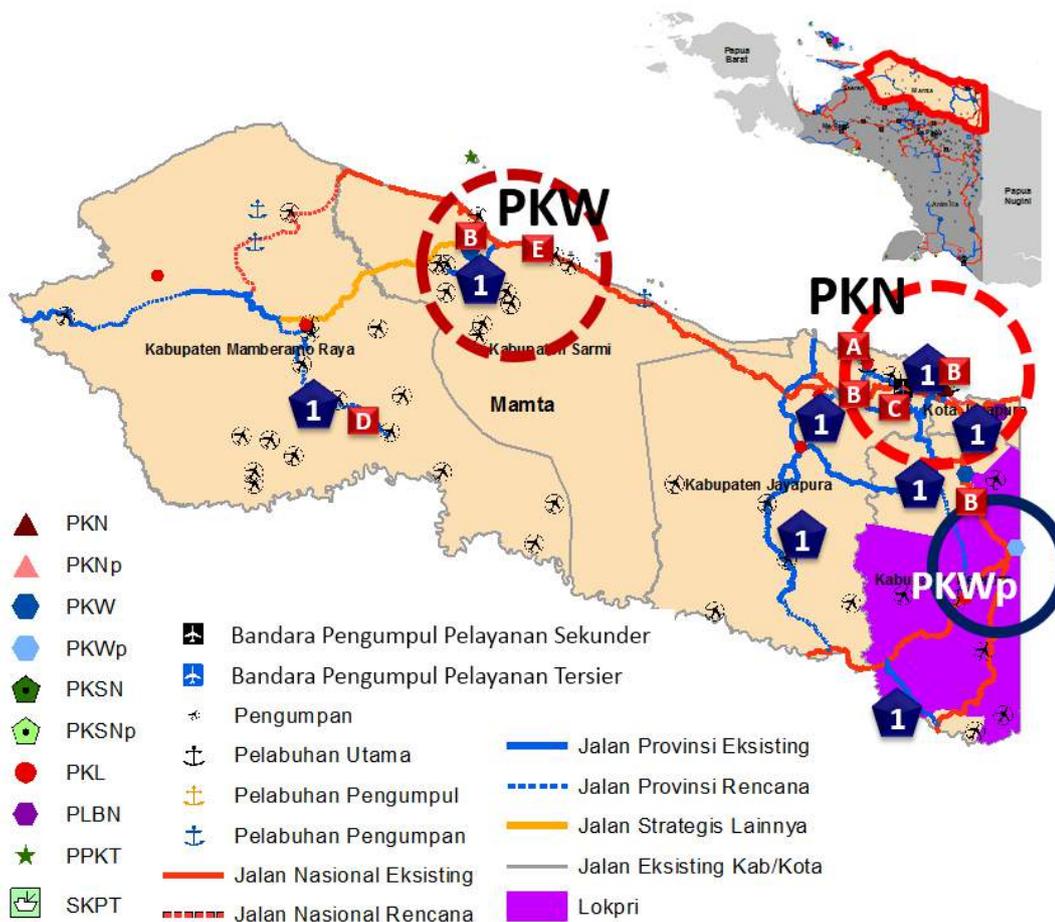
Pada implementasi kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “*Green Growth* berbasis wilayah adat”, maka arah pengembangan juga difokuskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian limbah. Tantangan terbesar dari implementasi ini adalah diperlukan arahan yang tepat dari para pemangku kepentingan agar teknologi ramah dapat digunakan sebaik mungkin oleh setiap pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir di dalam pengembangan kluster ekonomi.

6.2.2.5 Kebijakan Pengembangan Konektivitas

Pengembangan konektivitas Papua diarahkan untuk memadukan sistem pelayanan transportasi antarmoda, dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Pada pengembangan klaster, infrastruktur menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan.

a. Arah Pengembangan Konektivitas MAMTA

Gambar 6.8. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta



Jalan dan jembatan:

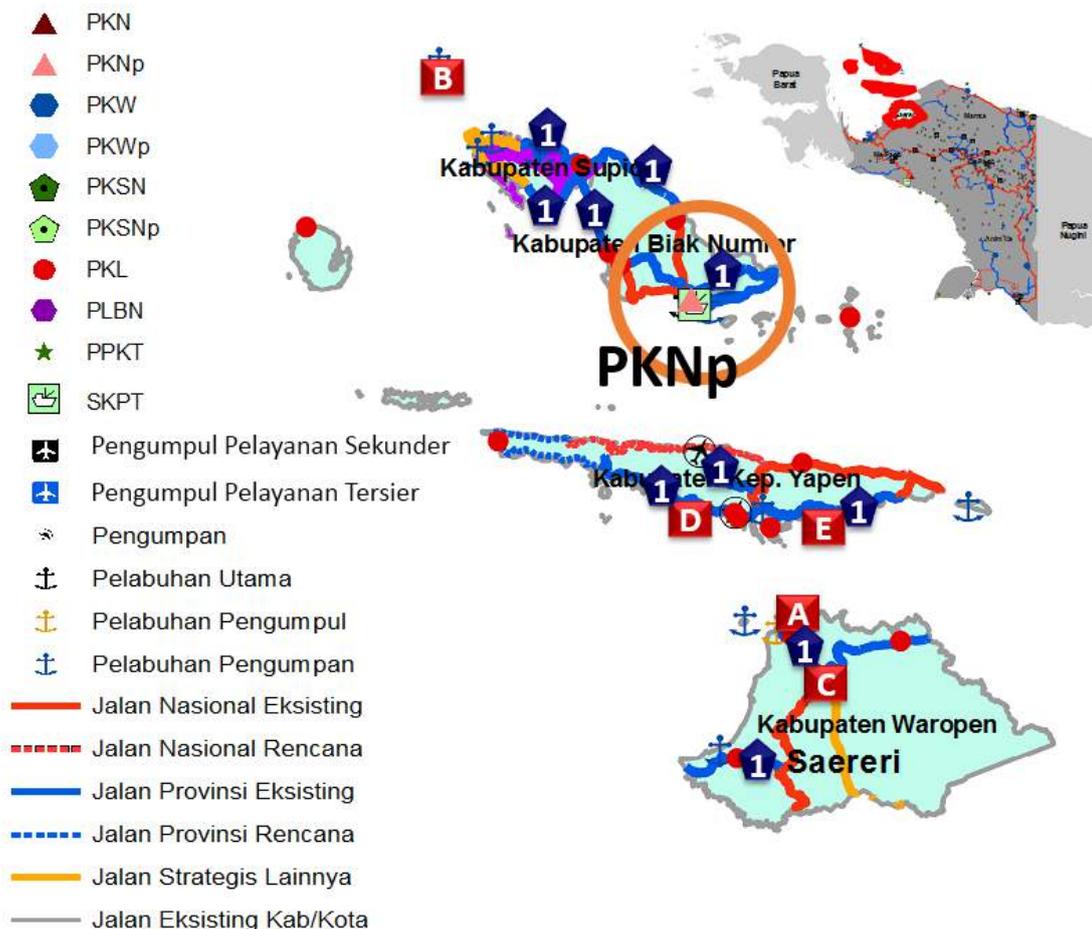
1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten

Perhubungan:

- A. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Kab. Jayapura
- B. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, dan Keerom
- C. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani
- D. Pembangunan Bandara Kustra di Kab.Mamberamo Raya
- E. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kab. Sarmi

b. Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI

Gambar 6.9. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri



Jalan dan jembatan:

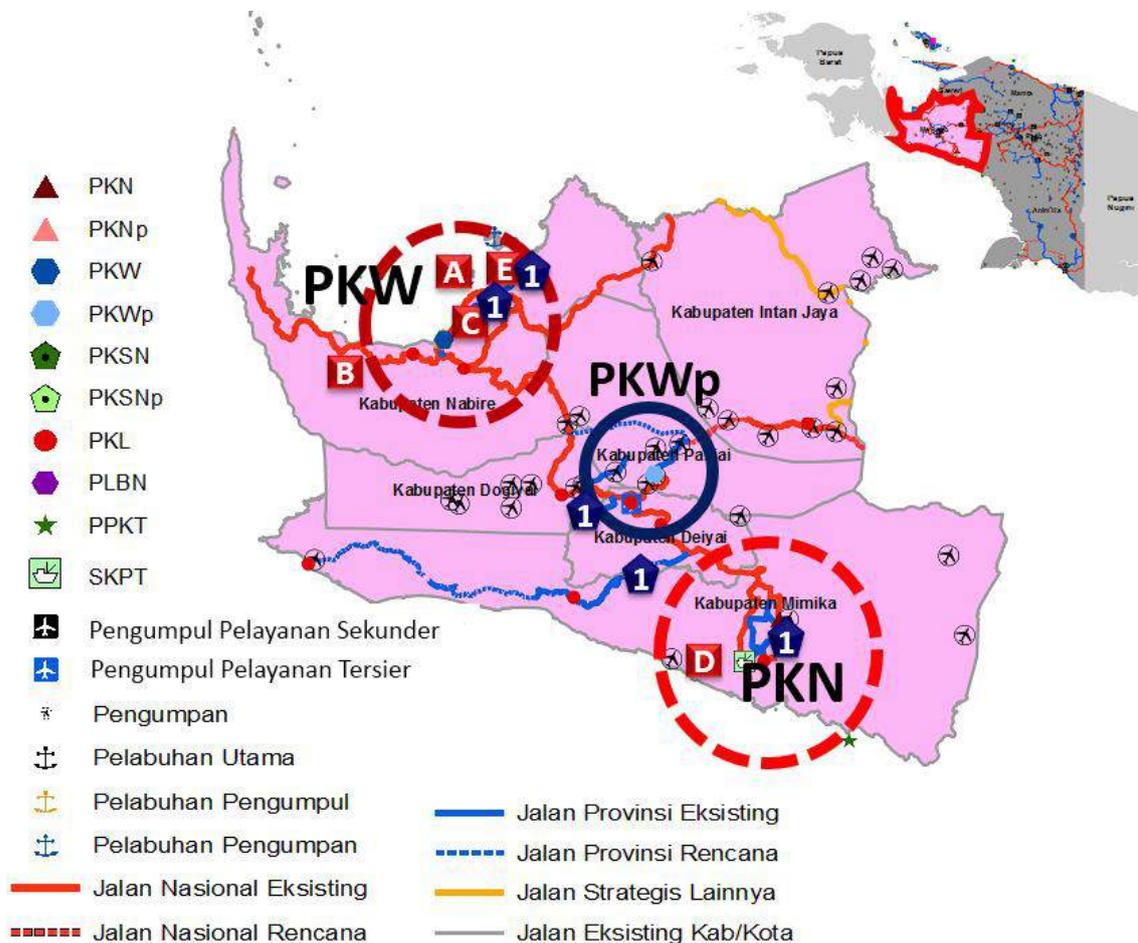
1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen
- B. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Kab. Supiori
- C. Pembangunan Bandara Botawa di Kabupaten Waropen
- D. Pembangunan dan peningkatan Bandara Kamanap di Kab. Kepulauan Yapen
- E. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kab. Kepulauan Yapen

c. Arah Pengembangan Infrastruktur MEE PAGO

Gambar 6.10. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago



Jalan dan jembatan:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kab. Nabire
- B. Pembangunan Bandara Wanggar di Kab. Nabire
- C. Pembangunan Terminal type B di Anibe
- D. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu di Kab. Mimika
- E. Rehabilitasi dan peningkatan Dermaga Samabusa di Kab. Nabire

d. Arah Pengembangan Infrastruktur LA PAGO

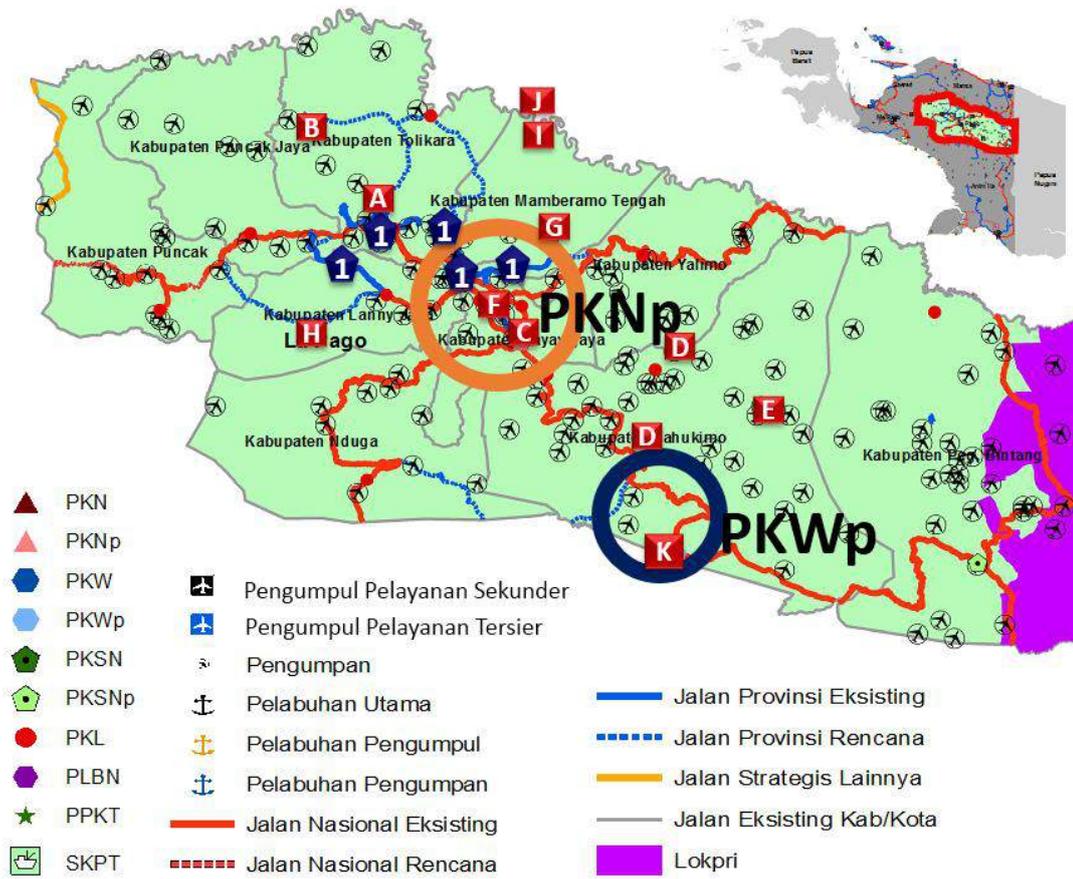
Jalan dan jembatan:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Bandara Mamit di Tolikara
- B. Pembangunan Bandara Fawi di Puncak Jaya
- C. Pembangunan Bandara Wamena
- D. Pembangunan Bandara Panggema & Ninia di Yahukimo
- E. Pembangunan Bandara Saminage di Yahukimo
- F. Pembangunan Terminal Tipe B di Jayawijaya
- G. Pembangunan Bandara Kobakma di Mamberamo Tengah
- H. Pembangunan Bandara Kuyawge di Lanny Jaya
- I. Pembangunan Bandara Taria Mamberamo Tengah
- J. Pembangunan Dermaga Sungai Taria di Mamberamo Tengah
- K. Pembangunan Bandara Nop Gollat di Yahukimo

Gambar 6.11. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago



e. Arah Pengembangan Infrastruktur Anim Ha

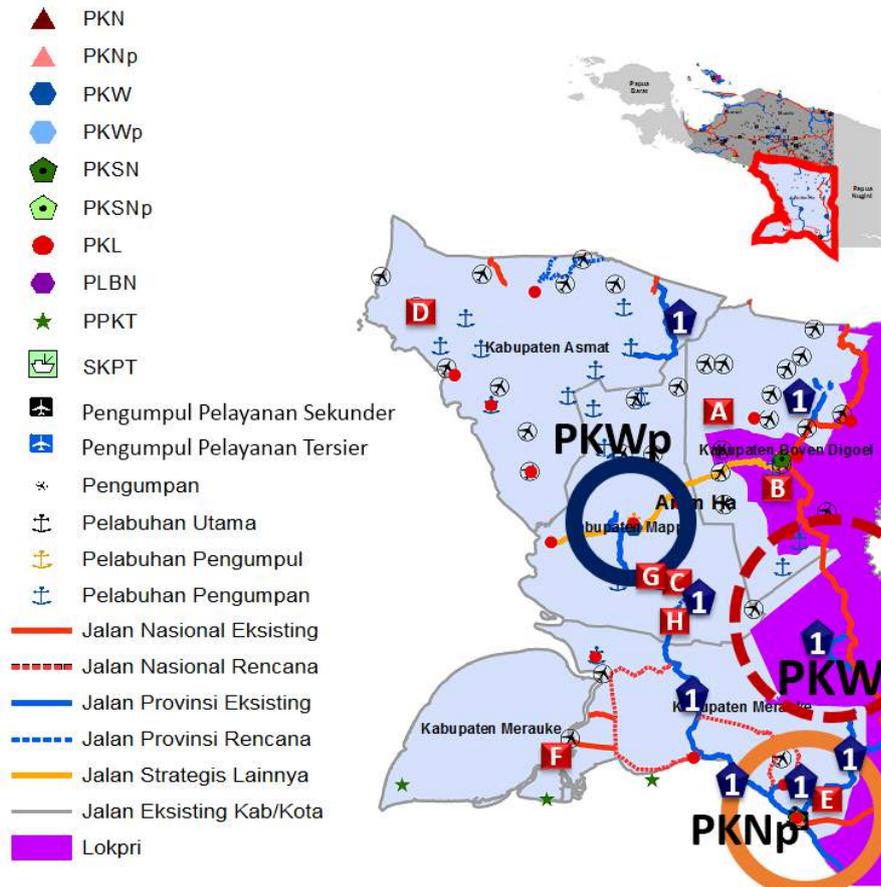
Jalan dan jembatan:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Boeven Digul
- B. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah di Boeven Digul
- C. Pembangunan Bandara Kepi di Mappi
- D. Pembangunan Bandara Ewer di Asmat
- E. Pembangunan Terminal Tipe B di Merauke
- F. Pembangunan Pelabuhan Kimam di Merauke
- G. Pengembangan Pelabuhan Kepi
- H. Pembangunan Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi

Gambar 6.12. Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha



6.2.2.6 Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan

Pengembangan wilayah pinggiran menjadi prioritas daerah dalam pembangunan pelayanan dasar terutama untuk menjamin bahwa pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan infrastruktur dasar sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah pinggiran.

Salah satu kawasan pinggiran yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan adalah kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Terdapat 2 (dua) pendekatan pembangunan dalam mengembangkan kawasan perbatasan di Papua, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Pendekatan keamanan dilakukan melalui:

- Tranformasi kelembagaan lintas batas negara menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu, yaitu *costum, immigration, quarantine, security* (CIQS)

- Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, yang melibatkan peran aktif masyarakat
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan

Adapun pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dilakukan melalui:

- Penguatan kegiatan ekonomi berbasis komoditas lokal di PLBN, PKSN, dan lokpri yg mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga, serta didukung pembangunan infrastruktur & pelayanan dasar
- Pembangunan SDM yg handal & pemanfaatan IPTEK
- Pembangunan konektivitas antara PKSN, lokpri, PKW, & PKN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara tetangga

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka peran provinsi Papua akan lebih banyak pada pendekatan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), maka penyelenggaraan kewenangan ini tentu saja dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong daerah kabupaten di perbatasan agar mendayagunakan sumber daya ekonomi lokal dalam mendukung PKSN agar pembangunan PKSN memberikan kontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di sekitarnya.

Tabel 6.7. Pengembangan Wilayah Perbatasan

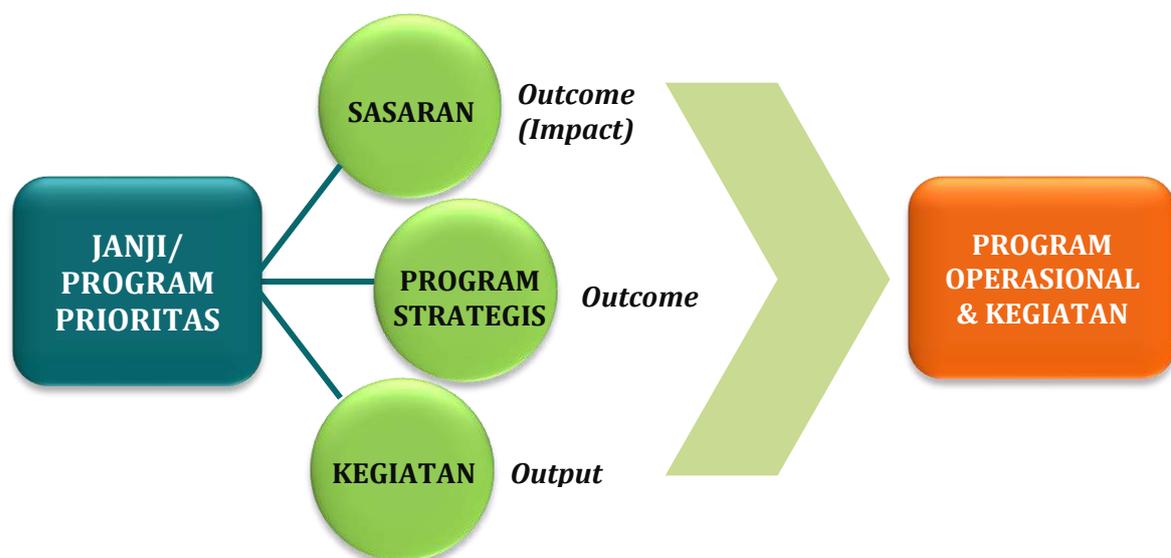
	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> • menunjang sektor strategis nasional • menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi • daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang telah ada • berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya 				
	Oksibil di Kab. Pegunungan Bintang <ul style="list-style-type: none"> • pusat pertumbuhan 	Tanah Merah di Kab. Boven Digoel <ul style="list-style-type: none"> • pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, 		Arso di Kab. Keerom <ul style="list-style-type: none"> • pusat pertumbuhan 	

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
	wilayah sekitarnya	dan keamanan terpadu; <ul style="list-style-type: none"> pusat perdagangan skala internasional pengembangan sekolah bertaraf internasional 		wilayah sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> pengembangan sekolah bertaraf internasional 	
PKSN Promosi	KEDUDUKAN: Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara				
		Merauke di Kab. Merauke <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan pusat perdagangan skala internasional pengembangan sekolah bertaraf internasional 		Jayapura <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan pusat perdagangan skala internasional 	
Lokasi Prioritas (Iokpri) perbatasan	KEDUDUKAN: Kawasan yang mempercepat pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik di perbatasan				
	Kab. Pegunungan Bintang (9 distrik) Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop	Kab. Merauke (5 distrik) Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri Kab. Boven Digoel (4 distrik) Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko		Kab. Keerom (5 distrik) Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe Kota Jayapura (2 distrik) Muara Tami, Jayapura Utara	Kab. Supiori (3 distrik) Supirori Barat, Supirori Utara, Kepulauan Aruri
Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang berperan dalam kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia Penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain Penempatan sarana bantu navigasi pelayaran Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, dan industri jasa maritim 				
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> Pusat pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis sektor kelautan dan perikanan 				
		SKPT Merauke	SKPT Timika	SKPT Sarmi	SKPT Biak Numfor
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)		PLBN Sota di Kab. Merauke		PLBN Skouw di Kota Jayapura	

6.3. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Prioritas pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi Gambar 6.13.

Gambar 6.13. Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah



Berdasarkan janji Gubernur Papua terpilih, prioritas pembangunan dan program Provinsi Papua mencakup: 1) sumber daya manusia berdaya saing yang ditandai oleh sumber daya yang cerdas mandiri, sumber daya manusia yang sehat sejahtera, pemuda yang aktif dan berprestasi, dan berketahanan pangan; 2) menyukseskan penyelenggaraan PON XX 2020 di Provinsi Papua dengan prestasi yang baik, 3) pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, yang juga ditopang oleh 4) kampung Papua berkembang dan mandiri dalam menjalankan kewenangannya; 5) permukiman masyarakat yang layak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat; dan 6) percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menopang dan membangkitkan perkembangan wilayah, pelayanan dasar dan ekonomi. Aspek pembangunan di atas didukung oleh: 1) tata kelola

pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kuat, 2) pengarusutamaan keadilan gender dan upaya perlindungan anak-anak, 3) afirmasi melalui program perlindungan sosial, terutama bagi orang asli Papua, yang salah satunya telah diinisiasi melalui Program BANGGA PAPUA dan 4) kemitraan dengan berbagai sumber daya pembangunan yang ada di Provinsi Papua terutama dengan lembaga adat, lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun mitra pembangunan internasional. Prioritas pembangunan dan program provinsi tersebut kemudian dirumuskan dalam *flagship 10 TEKAD PAPUA* yaitu: 1) Generasi Emas (Gemas) Papua; 2) Berdaya Ekomas Papua; 3) Infradas Papua; 4) Perlindungan dan Keberpihakan Adat Papua; 5) Kestaraan Gender dan Kemitraan Papua; 6) Sukses PON XX Papua; 7) Pembangunan Berkelanjutan Papua; 8) Kampung Mandiri Papua; 9) Mandiri Pangan Papua; dan 10) Reformasi Birokrasi Papua (sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 6.14).

Tabel 6.8. menampilkan rincian prioritas program pembangunan daerah Papua Tahun 2019-2023 yang telah dipetakan berdasarkan sasaran strategis, strategi, urusan, kewenangan, kebijakan belanja (belanja langsung / belanja tidak langsung), serta tingkat prioritas di setiap wilayah adat. Dalam hal ini, tingkat prioritas terbagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3.

Gambar 6.14. Flagship 10 Tekad Papua dan Program Prioritas Provinsi Papua 2019-2023

VISI: MENUJU PAPUA BANGKIT, MANDIRI & SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

FLAGSHIP
10 TEKAD PAPUA

GEMAS PAPUA

BERDAYA EKOMAS PAPUA

INFRADAS PAPUA

PERLINDUNGAN & KEBERPIHAKAN ADAT PAPUA

KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN PAPUA

SUKSES PON XX PAPUA

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA

KAMPUNG MANDIRI PAPUA

MANDIRI PANGAN PAPUA

REFORMASI BIROKRASI PAPUA

MISI

1

Memantapkan Kualitas & Daya Saing SDM

PROGRAM PRIORITAS

GEMAS PAPUA

- Program pembangunan & pengembangan SMK, BLK, & Politeknik
- Program peningkatan akses & kualitas pendidikan SD, SMP, & SMA
- Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul
- Program pemantapan jaminan kesehatan
- Program peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap wabah
- Program peningkatan & pembenahan puskesmas, rumah sakit & sistem rujukan
- Program pemantapan upaya kesehatan berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan @pro aktif/ bergerak
- Program pengurangan penyakit & kematian pada ibu, bayi, & balita
- Program peningkatan kualitas SDM kesehatan
- Program peningkatan prestasi kepemudaan

INFRADAS PAPUA

- Program penyediaan dan peningkatan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah

SUKSES PON XX PAPUA

- Program peningkatan prestasi kepemudaan
- Program penyelenggaraan sarana & prasarana PON
- Program peningkatan ekonomi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan PON

MANDIRI PANGAN PAPUA

- Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan

2

Memantapkan Rasa Aman, Tenram & Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

PROGRAM PRIORITAS

KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN

- Program penguatan kemitraan dalam pembuatan/ pengambilan keputusan publik, pembangunan, dan ketertiban masyarakat

3

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

PROGRAM PRIORITAS

PERLINDUNGAN & KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA

INFRADAS PAPUA

- Penguatan kebijakan pembagian dana Otsus untuk mengurangi kesenjangan, insentif jasa lingkungan, dan infrastruktur

KAMPUNG MANDIRI PAPUA

- Program penguatan kelembagaan kampung

REFORMASI BIROKRASI PAPUA

- Program penguatan sinergi antara pemerintah prov. & kab./kota
- Program penataan struktur organisasi & teknologi birokrasi untuk pelayanan publik, pengawasan, & penegakan aturan yang lebih efektif & efisien
- Program penguatan sistem akuntabilitas & pengawasan dalam pengelolaan keuangan & kinerja daerah

REFORMASI BIROKRASI PAPUA | **INFRADAS PAPUA**

SUKSES PON XX PAPUA

- Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan

4

Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural & Berkelanjutan

PROGRAM PRIORITAS

MANDIRI PANGAN PAPUA

- Program penguatan nilai tukar & daya beli petani, peternak, & nelayan
- Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan
- Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas

BERDAYA EKOMAS PAPUA

- Program pembangunan & pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan
- Program peningkatan & pemenuhan infrastruktur pertanian, perternakan, & perikanan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah
- Program perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas
- Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas
- Program peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mendorong kemandirian ekonomi

GEMAS PAPUA

- Program pembangunan dan pengembangan SMK, BLK, dan Politeknik

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA

- Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan
- Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup, serta revitalisasi pembangunan rendah karbon
- Program pengendalian banjir & abrasi pantai

INFRADAS PAPUA

- Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, dengan lingkungan yang sehat & bersih
- Program peningkatan akses transportasi antar moda
- Program peningkatan pengelolaan air baku yang mendukung produktivitas wilayah
- Program peningkatan ketersediaan energi murah dan energi terbarukan
- Program peningkatan akses informasi dan komunikasi

5

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Tertentu

PROGRAM PRIORITAS

PERLINDUNGAN & KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA

Program percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan & infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, terluar & tertentu

MANDIRI PANGAN PAPUA

Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan

KAMPUNG MANDIRI PAPUA

Program penguatan kelembagaan kampung

GEMAS PAPUA

- Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul
- Program perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, & difabel

INFRADAS PAPUA

Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, & lingkungan sehat

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program peningkatan kapasitas SDM & sarana prasarana penanggulangan bencana

KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN

Penguatan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan.

Tabel 6.8. Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT							
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA			
Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM																
Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	S1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan		1	1	1	1	1		
				Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk program Pendidikan Menengah Kejuruan								
			Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 30% Bidang Pendidikan	1	1	1	1	1		
			Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta rumah guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama).	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 30% Bidang Pendidikan	2	2	1	1	1		
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 30% Bidang Pendidikan							

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyebaran tenaga pendidikan dan guru kunjung , terutama di daerah terpencil	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 30% Bidang Pendidikan	2	2	1	1	1
		Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, profesionalisme dan tunjangan guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belanja Bantuan Khusus Pendidikan dan beasiswa	2	2	2	2	2
		Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Belanja Bantuan Khusus Pendidikan dan Beasiswa	2	2	1	1	1
		Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 30% Bidang Pendidikan	1	1	1	1	1
	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan		1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan						
	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan						
	Program Pengembangan Data/Informasi		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengembangan Data/Informasi	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan						
		Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan					
		Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
		Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
		Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan gizi	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan					
		Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
		Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
		Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		Pembangunan dan pengembangan rumah sakit rujukan di 5 wilayah adat.	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan	1	1	1	1	1
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan					
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata						
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■		Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata						

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2
	S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota						
Menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung utama kegiatan PON			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota						
			Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis)	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis)	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1	1
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	■		Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pelayanan Air Bersih	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					
			Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■		Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi						
		Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi berbasis keunggulan komoditas masing-masing wilayah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata	■	■	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan dapat berasal dari otsus	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	1	1	1	1
S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	■	■	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT								
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA				
Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI																	
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	S9	Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	■		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		2	2	2	2	2			
	S11	Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi	Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diaggresasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	■		Program Pendidikan Politik Masyarakat		2	2	2	2	2			
				Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	■		Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah		2	2	2	2	2			
			Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	■	■	Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2				
Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan																	
Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih,	S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan	Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk	Program perencanaan pembangunan daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	■	Program perencanaan pembangunan daerah	Belanja Dana Otonomi Khusus 80% Bagian Kabupaten/ Kota (OTSUS)	2	2	2	2	2			

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Otonomi Khusus Papua	mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	■	■	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Belanja Dana Otonomi Khusus 80% Bagian Kabupaten/ Kota (OTSUS)						
		Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	■	■	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur)	2	2	2	2	2	
S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi anggaran Kampung	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	■		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua		1	1	1	1	1	
		Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	■		Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		2	2	2	2	2	
		Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	■		Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan		2	2	2	2	2	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	■		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga							

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
			Perwakilan Rakyat Daerah	Administrasi Pemerintahan			Perwakilan Rakyat Daerah							
			Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	■		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan							
		Memastikan seluruh penduduk Papua, terutama OAP terdata secara terpisah dan memiliki identitas kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	■	■	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	
		Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	■		Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	■		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		2	2	2	2	2	
	S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■		Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
		Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		2	2	2	2	2	

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur	Program Kerjasama Pembangunan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	■	Program Kerjasama Pembangunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	1	1	3	3	3
		Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	■	Program Kerjasama Pembangunan	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur)	2	2	2	2	2
	S15 Meningkatkan sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	■		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota		2	2	2	2	2
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	■		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	■		Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur							
Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	■		Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan							
Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis KuItural dan Berkelanjutan													

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT						
						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA		
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Urusan Pilihan Pertanian	■		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		1	1	1	1	1		
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	1	1	1	1		
				Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota untuk Pengembangan Ekonomi							
			Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota untuk Pengembangan Ekonomi							
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	1	1	1	1		
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota untuk Pengembangan Ekonomi							
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	■	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1		

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
			jaringan pengairan lainnya				jaringan pengairan lainnya							
	S17 Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Perbaiki tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■		Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara							
Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral			Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■		Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal			1	1	1	1	1	
Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	■		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1	1	1	1	1	
	S18 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							
Revitalisasi pembangunan rendah karbon			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■		Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim			2	2	2	2	2

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
		Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA&LH	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH		1	1	1	1	1	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		1	1	1	1	1	
		Konservasi sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		2	2	2	2	2	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		1	1	1	1	1	
	S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan	Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	■	■	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perindustrian	■	■	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1
				Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Urusan Pilihan Perdagangan	■		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Urusan Pilihan Perdagangan	■		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							
		Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian, peternakan, dan perikanan dengan diberikan insentif dalam pengembangannya	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perindustrian	■	■	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1	1
		Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	■	■	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1	1
	S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Budaya Perikanan	■	■	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1	1
			Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	■	■	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1	
			Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	■	■	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi	1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
	S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	■		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		1	1	1	1	1
	S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	■		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		1	1	1	1	1
				Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	■		Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal						
Mewujudkan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah	S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	■		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	■		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		1	1	2	2	2
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	■	■	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					
	S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Penataan guna lahan permukiman di perkotaan	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■		Program Perencanaan Tata Ruang		1	3	1	3	3

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
			Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■		Program pengendalian dan pemanfaatan ruang							
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■		Program Perencanaan Tata Ruang			1	1	1	1	1
			Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■		Program pengendalian dan pemanfaatan ruang							
	S26	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	■	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
			Pengelolaan Air minum dan air limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum & air limbah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	■	Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
			Pengendalian banjir dan abrasi pantai	Program Pengendalian Banjir	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■		Program Pengendalian Banjir		2	2	2	2	2
	S27	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS		STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
						PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					
			Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		■		Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2
	S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Ketersediaan energi (listrik/penerangan)	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■	■	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	1	1	1
				Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■	■	Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					
	S29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	■	■	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	1	1	1
Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu														
Meningkatkan pemerataan pembangunan	S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	■	■	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus yang ditempatkan pada pos bantuan keuangan pada kab./kota tertentu sesuai dengan kondisi keteringgalan di bidang infrastruktur	1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	■	■	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus yang ditempatkan pada pos bantuan keuangan pada kab./kota tertentu sesuai dengan kondisi keteringgalan di bidang infrastruktur					
		Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	■	■	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
		Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan alokasi anggaran kampung	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	■	■	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
	S31 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	1	1	1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota						
Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota						
Program Pendidikan Non Formal			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Pendidikan Non Formal	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota						

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
		Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	■	■	Program Pengembangan Perumahan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1	
		Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	■	■	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1	
		Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	■	■	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	1	1	1	
	S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	■	■	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	■	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					
	S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	■	■	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	1	1	1
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	■	■	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
			Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	■	■	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota						
	S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	■	■	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2
	S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	■	■	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	■	■	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	■	■	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					

Keterangan: 1 = Prioritas 1 2 = Prioritas 2 3 = Prioritas 3

Tabel 6.9. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
M1	MISI PERTAMA, MEMANTAPKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM																	
T1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	59,09	60,11	61,15		62,2		63,27		64,36		65,47		65,47		
		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	48,83	50,54	52,3		54,13		56,02		57,97		60		60		
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	n/a	n/a	Rendah		Rendah		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		
		Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	n/a	n/a	40		45		50		55		60		60		
		Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	n/a	37,09	39,53		42,13		44,9		47,85		51		51		
S1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,3	6,6	6,9		7,2		7,5		7,8		8,2		8,21		
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,8	11		11,2		11,5		11,7		12		12		
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	persen	73,89	74,9	75,9		76,9		77,9		78,9		80		80		
		Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	persen	40	42,8	45,8		49		52,4		56,1		60		60		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	88,63	90,43	92,27	0	94,14	1.000	96,06	1.000	98,01	1.000	100	1.000	100	4.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
PR (F1)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	78,83	79,83	80,84	1500	81,86	1500	82,89	1500	83,94	1500	85	1500	85	7.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	56,13	56,76	57,39		58,03		58,68		59,34		60		60		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0,56	0,49	0,43		0,37		0,33		0,29		0,25		0,25		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1,21	1,17	1,14		1,1		1,07		1,03		1		1		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	22,48	23,59	24,75		25,97		27,25		28,59		30		30		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	22,37	23,49	24,67		25,91		27,21		28,57		30		30		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24,2	24,33	24,46		24,6		24,73		24,86		25		25		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	16,76	17,91	19,15		20,47		21,88		23,39		25		25		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	181	184,04	187,12		190,26		193,45		196,7		200		200		
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia	murid per sekolah	196,09	196,73	197,38		198,03		198,69		199,34		200		200				

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		sekolah pendidikan menengah pertama																
		Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	92	94	96		98		100		100		100		100		
PR (F1)	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	33,88	34,83	48,97	37.500	60,27	38.367	75,33	50.000	85	50.000	100	50.000	100	225.867	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	n/a	n/a	65		80		100		100		100		100		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0,93	0,84	0,76		0,68		0,61		0,55		0,5		0,5		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	33,87	34,82	35,8		36,81		37,84		38,9		40		40		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	13,13	14,62	16,27		18,12		20,17		22,46		25		25		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	262	250,47	239,45		228,91		218,84		209,21		200		200		
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	73,98	74,95	75,93	10.657	76,93	10.657	77,94	40.000	78,96	40.000	80	40.000	80	141.313	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	persen	89,32	90,24	91,17		92,12		93,07		94,03		95		95		
		Jumlah PKBM aktif	unit	388	398	411		420		434		443		448		448		
PR (F1)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	70,73	71,42	72,13	24.107	72,83	24.139	73,55	45.000	74,27	45.000	75	45.000	75	183.246	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	60	62,95	66,04		69,28		72,68		76,25		80		80		
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	80	80,81	81,63		82,46		83,3		84,15		85		85		
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	75	76,28	77,58		78,9		80,24		81,61		83		83		
		Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	75	76,43	77,89		79,37		80,89		82,43		84		84		
		Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	60	61,56	63,16		64,81		66,49		68,22		70		70		
		Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	45	46,67	48,4		50,2		52,06		54		56		56		
PR (F1)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	n/a	2,5	5	100.000	7	94.442	10	94.442	15	94.442	20	94.442	20	477.767	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	10	10	2		2		4		4		5		17		
		Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	15	18,68	23,27		28,98		36,1		44,96		56		56		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan	
						2019		2020		2021		2022		2023					
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta		
		Cakupan PBM Sekolah yang disupervisi dan dimonitoring	persen	80	75,38	71,03		66,93		63,07		59,43		56		56			
	Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	85,00	86,59	88,21	0	89,86	0	91,54	0	93,26	0	95,00	0	95,00	0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	60,00	61,56	63,16		64,81		66,49		68,22		70,00		70,00			
		Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	50,00	52,23	54,57		57,01		59,56		62,22		65,00		65,00			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	20,44	21,14	21,86		22,61		23,38		24,17		25,00		25,00			
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	n/a	n/a	250	20.000	250	19.727	250	19.727	250	19.727	250	19.727	1250	98.908	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	700	795	903		1025		1164		1322		1500		1500			
		Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit per tahun	n/a	n/a	10		10		10		10		10		50			
		Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	2,92	3,59	4,40		5,40		6,64		8,15		10,00		10,00			
		Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel		10,60	11,78	13,09		14,56		16,18		17,99		20,00		20,00		
		APM pendidikan khusus	persen	n/a	n/a	10,00		10,52		11,07		11,64		12,25		12,25			
	Program Pendidikan Luar Biasa	APK peserta didik SLB tingkat SD (orang)	persen	n/a	n/a	20	580	50	0	80	1.000	100	1.000	100	1.000	100	3.580	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		APK peserta didik SLB tingkat SMP (orang)	persen	n/a	n/a	20		50		80		100		100		100			
		APK peserta didik SLB tingkat SMA (orang)	persen	n/a	n/a	20		50		80		100		100		100			
		Cakupan jenis pelayanan SLB terhadap penduduk penyandang disabilitas	jenis	n/a	2	2		2		3		3		3		3			
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki SLB yang terakreditasi	kab./kota per tahun	n/a	1	1		1		1		1		1		5			
		Persentase lulusan SLB yang terserap dalam lapangan pekerjaan	persen	n/a	50	52		55		57		60		65		65			
PR (F1)	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	30	32,67	35,57	105.000	38,73	103.695	42,17	103.695	45,92	103.695	50	103.695	50	519.782	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	n/a	n/a	2		2		2		2		2		10			
PR (F1)	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan	persen	n/a	n/a	70	10.000	70	10.000	80	10.000	80	11.000	85	10.000	85	50.000	Urusan Pemerintahan	

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		beasiswa lulus dengan IPK memuaskan																Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (sub urusan Pengembangan SDM)
		Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang per tahun	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100		
S2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari	n/a	n/a	150		150		200		250		300		300		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Standar Nasional yang Dibangun	unit	n/a	n/a	0	0	1	500	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	6.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	n/a	n/a	85	250	85	250	90	250	90	250	95	250	95	1.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Layanan Perpustakaan umum daerah provinsi secara konvensional dan elektronik	orang per tahun	n/a	108991	30.000	1.907	25.000	2.048	25.000	2.298	25.000	2.048	25.000	3.298	130.000	11.600	
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,14	65,86	66,59		67,33		68,07		68,83		69,59		69,59		
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	7,63	9,59	12,04	1.542	15,13	1.542	19,01	3.000	23,88	3.500	30	4.500	30	14.084	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	5,84	6,45	7,13		7,88		8,7		9,61		10,62		10,62		
		Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	94,48	102,05	110,22		119,05		128,58		138,88		150		150		
		Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	n/a	n/a	50		55		60		65		70		70		
PR (F1)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	n/a	n/a	25	438	25	438	30	700	35	700	40	700	40	2.977	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	n/a	27,59	34,92	4.720	44,2	4.720	55,95	4.720	70,83	4.720	89,66	4.720	89,66	23.600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	n/a	60	60		65		65		70		75		75		
PR (F1)	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (RSUD Jayapura)	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	n/a	n/a	60	426	65	0	65	0	70	0	75	0	75	426	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	n/a	n/a	70	78.841	75	78.841	80	78.841	90	78.841	100	78.841	100	394.207	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	35,21	36,68	38,21		39,81		41,47		43,2		45		45		Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	persen	3,45	6,9	13,79		20,69		27,59		34,48		41,38		41,38		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	n/a	80	82	11.108	70	11.108	80	11.108	90	11.108	90	11.108	90	55.539	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Persentase Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) yang diawasi	persen	n/a	n/a	58		68		78		88		100		100		
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	persen	n/a	n/a	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	persen	n/a	n/a	90		90		90		90		90		90		
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	n/a	n/a	10	550	10	550	15	2.000	20	2.000	25	2.000	25	7.099	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	API Malaria	persen	59	51,35	44,69	11.159	38,89	9.859	33,85	15.000	29,46	15.000	25,64	15.000	25,64	66.018	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	62,78	56,3	50,48		45,27		40,59		36,4		32,64		32,64		
		Tingkat prevalensi DBD	persen	92,67	86,37	80,5		75,03		69,93		65,17		60,74		60,74		
		Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	42	39,83	37,78		35,83		33,98		32,23		30,57		30,57		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	n/a	11,7	11,1		10,53		10		9,48		9		9		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	48	45,36	42,86		40,5		38,28		36,17		34,18		34,18		
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	n/a	n/a	10		15		20		25		30		30		
		Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB	persen	n/a	n/a	65		75		85		95		100		100		
	Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	n/a	11,7	11,1	0	10,53	300	10	300	9,48	300	9	300	9	1.200	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	n/a	n/a	25		20		15		10		5		5		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kab./kota	n/a	6	7	510	9	510	12	510	14	510	16	510	16	2.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	n/a	n/a	25		20		15		10		5		5		
		Unmeet need pelayanan kesehatan	persen	2,63	2,93	3,26		3,63		4,04		4,49		5		5		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	Persentase lansia yang memiliki dan memanfaatkan Jaminan Kesehatan	persen	n/a	n/a	35	660	40	660	45	660	55	660	55	660	55	3.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	7	6,38	5,81	450	5,29	450	4,82	450	4,39	450	4	450	4	2.250	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	kasus	289	259,08	232,25		208,21		186,65		167,32		150		150		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	40,9	43,6	46,47		49,54		52,81		56,29		60		60		
		Cakupan pelayanan nifas	persen	35,8	37,19	38,64		40,14		41,7		43,32		45		45		
PR (F1)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	61,59	62,15	62,71	2.660	63,27	2.660	63,84	2.660	64,42	2.660	65	2.660	65	13.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	persen	11,3	10,02	8,89		7,88		6,99		6,2		5,5		5,5		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	32,8	31,35	29,96		28,64		27,37		26,16		25		25		
		Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1,6	1,38	1,18		1,02		0,88		0,76		0,65		0,65		
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	n/a	n/a	20		20		25		25		40		40		
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	8	7,13	6,35		5,66		5,04		4,49		4		4		
		Rasio posyandu yang aktif	persen	63,57	64,6	65,64		66,71		67,79		68,88		70		70		
		Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	48,89	49,4	49,91		50,42		50,94		51,47		52		52		
PR (F1)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari	kkal	2115,09	2144,84	2175,01	3.092	2205,61	3.092	2236,63	3.092	2268,1	3.092	2300	3.092	2300	15.461	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	20	23,3	27,14		31,62		36,84		42,92		50		50		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	45	48,44	52,14		56,12		60,41		65,03		70		70		
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	46	46,95	47,92		48,91		49,92		50,95		52		52		
PR (F1)	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	n/a	21	21	28.541	22	28.541	24	28.541	25	28.541	27	28.541	27	142.705	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit	n/a	5	5		5		6		6		8		8		
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	25	25	25,77		26,57		27,39		28,23		29,1		29,1		
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	1,12	1,41	1,78		2,24		2,83		3,57		4,5		4,5		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	24,13	25,06	26,02		27,02		28,05		29,13		30,25		30,25		
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,03	1,05	1,08		1,11		1,14		1,17		1,2		1,2		
PR (F1)	Program Sumber Daya Kesehatan (RSUD Jayapura)	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	24,13	25,06	26,02	400	27,02	400	28,05	400	29,13	400	30,25	400	30,25	2000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,03	1,05	1,08		1,11		1,14		1,17		1,2		1,2		
	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	n/a	70	75	12.061	80	12.061	85	12.061	90	12.061	90	12.061	90	60.305	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	n/a	85	85	3.245	90	3.245	90	3.245	95	3.245	95	3.245	95	16.225	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	n/a	n/a	40	800	43	800	50	800	55	800	60	800	60	4000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	1	1	2		2		3		3		4		4		
		Cakupan rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	n/a	56	57		58		59		59		60		60		
	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (RSJ)	Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	persen	n/a	n/a	60	11.064	65	15.200	70	16.400	75	17.450	80	18.000	80	78.114	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (RSJ)	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	10	12,6	15,87	50	20	50	25,2	50	31,75	50	40	50	40	250	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
PR (F1)	Program upaya kesehatan perorangan (RSUD Jayapura)	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	n/a	n/a	70	114.006	75	149.000	80	157.800	90	167.480	100	178.128	100	766.414	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	n/a	35,21	38,21		39,81		41,47		43,2		45		45		
PR (F1)	Program upaya kesehatan perorangan (RSJ)	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	n/a	n/a	70	9.075	75	10.750	80	11.900	90	12.150	100	13.500	100	57.375	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	n/a	35,21	38,21		39,81		41,47		43,2		45		45		
		Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	persen	n/a	n/a	60		65		70		75		80		80		
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	n/a	60	60	19.118	65	20.000	70	20.000	75	20.000	80	20.000	80	99.118	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Abepura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	n/a	60	60	55.463	65	60.000	70	70.000	75	70.000	80	70.000	80	325.463	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)
PR (F1)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Jayapura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	n/a	60	60	10.591	65	8.671	70	6.600	80	7.190	100	8.488	100	41.540	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Abepura)	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	n/a	60	65	8.000	70	8.000	75	9.000	85	1.000	90	11.000	90	37.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	n/a	60	60	65	70	80	80	80	80	80	80	80	80		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Cakupan advokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat	persen	n/a	0	45	600	47	1.750	50	1.750	55	1.750	60	1.750	60	7.600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Jayapura)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	n/a	n/a	80	177.782	80	200.000	85	200.000	90	200.000	100	200.000	100	977.782	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Abepura)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	63	n/a	95	122.502	95	200.000	95	200.000	95	200.000	95	200.000	95	922.502	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSJ)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	80	n/a	80	22.242	80	26.023	85	30.500	85	30.750	85	29.950	85	139.464	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Jayapura)	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura	persen	n/a	n/a	60	13.620	65	55.700	70	22.900	75	24.440	80	26.134	80	142.794	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Abepura)	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	unit	4	n/a	6	3.500	6	4.000	6	5.000	6	6.000	6	7.500	6	26.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (RSJ)	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	unit	10	n/a	5	75	5	75	10	80	10	80	10	80	10	390	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
PR (F3)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	33,06	34,12	35,22	556	36,36	556	37,54	556	38,75	556	40	556	40	2.779	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	38,47	39,52	40,61		41,72		42,87		44,04		45,25		45,25		
S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Perolehan medali emas dalam PON	medali	17	-	-		90		-		-		-		90		
		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40		80		85		95		100		100		
PR (F10)	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	n/a	40	40	8.768	40	9.865	50	7.385	50	7.655	50	7.925	50	41.598	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
		Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		95		95		
PR (F10)	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	n/a	n/a	20	75.000	20	51.850	30	57.250	30	57.900	40	58.550	40	300.550	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
PR (F10)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	n/a	n/a	10	500.000	10	432.081	-	0	-	0	-	0	10	932.081	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	n/a	n/a	-		6		-		-		-		6		
		Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	n/a	75	100		-		-		-		-		100		
		Cakupan venue berstandar internasional	persen	30	60	90		100		-		-		-		100		
	Pengembangan Prasarana PON	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	50	50	100	150.000	100	25.000	-	0	-	0	-	0	100	175.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga	Frekwensi penyelenggaraan even olahraga persiapan PON XX yang berjalan sukses	kali	n/a	n/a	5	75.000	-	50.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	5	215.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX/2020	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan PON XX yang ditindaklanjuti	persen	n/a	n/a	100	29.261	100	43.925	-	0	-	0	-	0	100	73.186	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah venue PON XX yang berstandar internasional	gedung	n/a	n/a	2	300.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	300.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional																	Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembinaan Atlet Muda dan Olahraga Prestasi	Persentase atlet muda Pelatda (Pusat Pelatihan Daerah) yang berprestasi nasional	persen	n/a	n/a	100	25.000	100	50.000	100	40.000	100	35.000	100	45.000	100	195.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020	Persentase persiapan PON XX	persen	n/a	n/a	85	1.000.000	100	970.756	-	0	-	0	-	0	100	1.970.756	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
PR (F10)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	n/a	n/a	n/a	2.000	150	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	150	12.000	Urusan Pilihan Pariwisata
PR (F10)	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	n/a	n/a	250	0	250	0	-	0	-	0	-	0	250	0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F10)	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	n/a	n/a	250	0	250	0	-	0	-	0	-	0	250	0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F10)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	n/a	n/a	50	100	3.200	5.000	-	0	-	0	-	0	3.200	5.100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
PR (F10)	Program Pelayanan Air Bersih	Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	n/a	n/a	n/a	250	432	500	-	0	-	0	-	0	100	750	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
PR (F10)	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen	n/a	n/a	30	0	100	500	-	0	-	0	-	0	100	800	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68,08	69,19	70,3		71,5		72,6		73,8		75	72,6	75		
		Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	persen	15,6	16,6	17,7		18,8		20,1		21,4		22,8	22,76			
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	n/a	20	25	1.200	25	1.750	30	1.875	35	1.950	50	2.025	50	8.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
PR (F10)	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang per tahun	n/a	n/a	250	5.111	250	5.391	250	5.746	250	6.092	250	6.547	1.250	28.887	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	47	49	51		53		55		57		59		59		Kepemudaan dan Olah Raga
		Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	n/a	20	25		25		30		35		50		50		
	Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan pembangunan	persen	n/a	n/a	25	3.900	30	1.200	35	1.500	40	1.500	45	1.500	45	9.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	13	13	11		10		9		7		7		7		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26,95	27,44	27,93		28,43		28,95		29,47		30		30		
		Persentase penduduk tahan pangan	persen	40,04	42,83	45,82		49,01		52,43		56,09		60		60		
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	n/a	15	15	10.800	15	11.500	20	12.250	20	12.975	25	14.325	25	61.850	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	60	56,08	52,41		48,99		45,79		42,8		40		40		
		Skor PPH	skor	87,6	88,43	89,26		90,1		90,95		91,81		92,67		92,67		
	Program Peningkatan Diversifikasi Pengankaragaman dan Keamanan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	n/a	15	15	3.000	15	3.500	20	3.700	20	4.000	25	4.100	25	18.300	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Skor PPH	skor	87,6	88,43	89,26		90,1		90,95		91,81		92,67		92,67		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Terlaksanannya Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri	kegiatan per tahun	n/a	n/a	16	4090	16	3.790	16	3.790	16	3.790	16	3.790	80	19.250	Urusan Pilihan Perdagangan
		Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	280	258,9	239,4		221,36		204,68		189,26		175		175		
		Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	n/a	n/a	2,5		3		3,25		3,5		4		4		
S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3	3	1		1		1		1		1		5		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0		0		1		0		1		2		
		Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	n/a	n/a	2		2		2,5		2,5		5		5		
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	n/a	n/a	1	6.400	2	7.100	3	7.100	4	7.100	5	27.700	5	55.400	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Lembaga Pengelola kekayaan budaya	lembaga	n/a	n/a	5	2.000	5	2.150	5	2.150	5	2.150	5	2.150	5	10.600	

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali per tahun	n/a	n/a	1		1		1		2		2		7		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah per tahun	3	3	1		1		1		1		1		5		
		Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali per tahun	n/a	5	5		5		7		7		7		31		
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0		0		1		1		2		2		
		Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	n/a	40	40		45		45		50		50		50		
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	kerjasama per tahun	n/a	n/a	5,00	4.000	5	5.600	5	5.700	5	5.700	5	5.800	25	26.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pengelolaan keragaman budaya	kegiatan	n/a	n/a	2	6.000	2	6.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	13	39.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali per tahun	n/a	n/a	1		1		1		1		1		5		
M2	MISI KEDUA, MEMANTAPKAN RASA AMAN, TENTRAM DAN DAMAI SERTA KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMPERKUAT BINGKAI NKRI																	
T2	Tujuan 2 Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	236	218	202		187		173		159		147		147		
		Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61,02	61,36	61,7		62,04		62,39		62,73		63,08		63,08		
S8	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	persen	63,62	64,64	65,68		66,73		67,81		68,89		70		70		
	Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kesbangpol)	Jumlah konflik horisontal	kasus	n/a	10	10	0	6	1.775	6	1.775	2	1.900	2	1.900	2	7.350	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
		Cakupan penegakan Perda	persen	n/a	80	80		90		100		100		100		100		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Satpol PP)	Jumlah konflik horisontal	kasus	n/a	10	10	1.404	6	4.554	6	4.821	2	5.179	2	5.672	2	21.630	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Cakupan penegakan Perda	persen	n/a	80	80		90		100		100		100		100		
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8,7	9,99	11,48		13,19		15,15		17,41		20		20		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	3,02	2,59	2,22		1,9		1,63		1,4		1,2		1,2		serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	n/a	40	45	4.751	50	6.216	55	6.378	60	6.740	65	6.976	65	31.061	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk		rasio	63,45	65,67	67,97		70,35		72,81		75,36		78		78			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) (Satpol PP)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	n/a	65	70	790	75	2.335	80	2.507	85	2.782	85	2.990	85	11.404	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) (Kesbangpol)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	n/a	65	70	1.350	75	1.350	80	1.350	85	1.350	85	1.350	85	6.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	persen	n/a	n/a	10	2.278	10	3.947	10	4.280	10	4.516	10	4.743	10	19.763	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)
		Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	n/a	28	32		36		40		45		50		50		
		Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	n/a	40	45		50		55		60		65		65		
S9	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75,97	76,42	76,86		77,31		77,77		78,22		78,68		78,68		
PR (F5)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali per tahun	n/a	n/a	2	750	2	4.075	2	4.050	2	3.800	2	3.800	10	16.475	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
		Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang per tahun	n/a	n/a	250		250		250		250		250		1.250		
		Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali per tahun	n/a	n/a	5		5		5		5		5		25		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Cakupan forum lintas agama tingkat provinsi yang berfungsi dan aktif	jumlah	n/a	n/a	2	720	2	870	2	870	2	920	2	970	2	4.350	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data ormas dan keagamaan	persen	n/a	n/a	80	200	90	200	100	200	100	200	100	200	100	1.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
S10	Meningkatnya penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	3		3		3		3		3		15		
		Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	0	0	50		60		65		70		75		75		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	n/a	n/a	2	500	2	1.500	2,25	1.500	2,5	1.500	3	1.500	3	6.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
		Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	n/a	20	20		30		30		40		50		50		
S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92,15	92,62	93,09		93,56		94,04		94,52		95		95		
		Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	41,13	42,49	43,9		45,35		46,85		48,4		50		50		
		Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53,45	54,49	55,55		56,63		57,73		58,86		60		60		
PR (F5)	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	n/a	n/a	3	2.000	3	3.075	5	2.150	5	2.475	10	7.000	10	16.700	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
		Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	n/a	n/a	70		75		80		85		90		90		
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	n/a	n/a	75		-		-		-		-		75		
PR (F5)	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	n/a	n/a	80	500	80	925	85	950	85	950	90	950	90	4.275	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
	Program Pemberdayaan Keagamaan	Cakupan kelompok keagamaan yang berfungsi dan aktif	jumlah	n/a	140	140	42.204	140	42.204	160	42.204	180	42.204	180	42.204	10	211.022	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Rasio rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dan pemberdayaan	persen	n/a	40	40		45		50		50		50		20		Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
	Program Pembinaan Mental Spiritual	Frekuensi koordinasi lembaga keagamaan dengan pemerintah	kali per tahun	n/a	n/a	5	900	5	900	5	900	5	950	5	950	5	4.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spirituat dan Bina Kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per satu Penduduk	per 10.000 penduduk	26,63	27,16	27,71	1.210	28,26	1.210	28,83	1.210	29,41	1.210	30	1.210	30	6.050	Urusan Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
M3 MISI KETIGA, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan																		
T3	Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-		C		C		B-		B		B		
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	C	C		CC		CC		B		B		B		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	C	C	C		B		B		B		A		A		
S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90		93		95		98		100		100		
		Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah kab./kota	0	0	5		5		6		6		7		29		
PR (F4)	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100	2.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
PR (F3) (F4)	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	n/a	n/a	90	2.400	100	2.487	100	2.577	100	2.670	100	2.762	100	12.896	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah)
		Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	n/a	1	2		-		-		-		-		2		
		Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	n/a	85	85		90		95		100		100		100		
S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan	Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	predikat	B	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
		Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4,88	5,08	5,29		5,5		5,72		5,96		6,2		6,2		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Kategori Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74,37	76,04	77,76		79,51		81,3		83,13		85		85		
		Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masuk ke e-planning dll ke program)	persen	80	80	85		85		90		90		95		95		
		Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	jumlah per tahun	0	0	1		1		1		1		1		1		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Perdasai tentang pemerintahan yang ditetapkan	dokumen per tahun	n/a	n/a	5	4.200	5	4.700	5	5.000	5	5.000	5	4.550	25	23.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Terbangunnya sistem penataan pertanahan	persen	n/a	n/a	20	350	25	450	30	500	45	750	50	1.000	50	3.050	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	n/a	n/a	60	500	65	650	70	725	75	650	80	725	80	3.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tingkat ketertiban penataan pertanahan	persen	n/a	n/a	40	263	45	450	50	346	50	150	55	475	55	1.684	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
		Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	n/a	n/a	20		30		40		50		60		60		
PR (F8)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	Jumlah aparaturnya kampung dan distrik yang mendapatkan pelatihan pemerintahan kampung	orang	n/a	n/a	250	1.600	250	1.700	250	1.700	250	1.700	250	1.750	1.250	8.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
		Cakupan kampung mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya	persen	n/a	40	45		50		55		60		65		65		
PR (F6)	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	7	n/a	12	1.500	14	1.800	16	1.800	18	2.300	20	2.300	20	9.700	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
			jumlah kab/kota	7	n/a	12	6.500	14	6.500	16	7.500	18	6.500	20	6.500	20	33.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan otonomi khusus)
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	100	520	100	520	100	520	100	520	100	520	100	2.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																		urusan humas dan protokol)
			persen	100	100	100	358	100	358	100	358	100	358	100	358	100	1.790	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)
			persen	100	100	100	300.000	100	500.000	100	534.576	100	634.576	100	684.576	100	2.653.728	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat daerah)
	Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	persen	70	n/a	75	900	80	750	90	750	100	750	100	750	100	3.900	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan humas dan protokol)
			persen	70	n/a	75	150	80	150	90	150	100	150	100	150	100	750	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan persandian daerah	persen	n/a	n/a	100	1.800	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	5.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perdasi/Perdus yang ditetapkan	produk per tahun	n/a	n/a	5	2.335	5	2.335	5	2.335	5	2.335	5	2.335	25	11.673	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Pemberian bantuan hukum dan penegakan perda	persen	100	100	100	1.377	100	1.377	100	1.377	100	1.377	100	1.377	100	6.884	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)
		Cakupan kasus hukum warga miskin yang memperoleh pendampingan	kasus per tahun	n/a	n/a	10		10		10		10		10		50		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Terlaksananya Penegakan hukum	persen	n/a	n/a	0	1.945	100	1.945	100	1.945	100	1.945	100	1.945	100	9.725	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Terlaksananya kegiatan pengawasan produk hukum kab/kota	persen	n/a	n/a	0		100		100		100		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua yang difasilitasi	persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100		(sub urusan hukum)
	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum	persen	n/a	n/a	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100	1.250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)
		Cakupan produk hukum daerah yang didesiminasi	persen	n/a	n/a	70		75		80		85		90		90		
PR (F6)	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	persen	n/a	n/a	100	4.076	100	11.750	100	11.795	100	11.200	100	11.475	100	50.296	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan organisasi)
		Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	persen	n/a	n/a	50		70		90		100		100		100		
		Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Persentase Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti	persen	n/a	n/a	25		40		55		70		85		85		
	Program Peningkatan Kinerja BUMD	Tersedianya regulasi BUMD	dokumen per tahun	n/a	n/a	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900	5	4.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan perekonomian dan SDA)
		Terlaksananya pertemuan forum koordinasi mitra BUMD	acara per tahun	n/a	n/a	9		9		9		9		9		45		
		Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kinerja BUMD	acara per tahun	n/a	n/a	1		1		1		1		1		5		
		Tersedianya regulasi pengelolaan SDA	dokumen	n/a	n/a	3		3		3		3		3		15		
		Terlaksananya fasilitasi kemitraan swasta dan pelaku ekonomi	acara per tahun	n/a	n/a	1		1		1		1		1		5		
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa	Cakupan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	persen	n/a	n/a	80	0	90	31.000	100	31.000	100	34.050	100	34.600	100	130.650	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengadaan barang dan jasa)
PR (F6)	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perdasi dan Perdasus yang ditetapkan	produk per tahun	n/a	n/a	5	300.000	5	351.071	5	351.071	5	351.071	5	351.071	25	1.704.284	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat DPRP)
		Tingkat kehadiran Anggota dewan	persen	n/a	n/a	75		75		75		75		75		75		
		Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	persen	n/a	n/a	75		75		75		75		75		75		
		Persentase penetapan perdasus dan perdasus berdasarkan prolegda	produk per tahun	n/a	n/a	5		5		5		5		5		25		
	Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung Pentas Anjungan Papua	persen	n/a	n/a	2,5	50	2,75	50	3	50	3,25	50	3,5	50	3,5	250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pembinaan Masyarakat dan Kemahasiswaan	Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Masyarakat di Jakarta	kali per tahun	n/a	n/a	5	100	5	100	5	100	5	100	5	100	25	500	Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Tingkat kehadiran Anggota MRP	persen	n/a	n/a	95	200.000	95	210.000	95	246.000	95	246.000	95	246.000	95	1.148.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat MRP)
Persentase Rancangan Perdas dan Perdasus yang ditindaklanjuti		persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100			
Jumlah perdas dan perdasus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP		peraturan	n/a	n/a	10		10		10		10		10		10			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan pengembangan SDM)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	n/a	20	10.957	20	12.400	20	13.050	20	11.984	20	13.332	20	61.723	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengembangan SDM)
Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan		persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan otonomi khusus)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	n/a	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	1.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan Otonomi Khusus)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan pengadaan barang dan jasa)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	n/a	20	27.500	20	0	20	0	20	0	20	0	20	27.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengadaan barang dan jasa)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan penghubung daerah)	Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	persen	n/a	n/a	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	380	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)
	Program Pendidikan Kedinasan	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	n/a	3	3	255	3	255	5	255	5	255	8	255	8	1.275	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan		persen	n/a	n/a	80	8.350	82	22.580	85	22.580	87	22.580	90	22.580	90	98.670	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengembangan SDM)	
Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan		persen	n/a	n/a	70		75		80		85		90		90			

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	n/a	n/a	65		70		75		80		85		85		
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data/kepegawaian daerah	persen	n/a	n/a	100	660	100	660	100	660	100	660	100	660	100	3.302	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
PR (F6)	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	persen	n/a	n/a	60	2.500	65	2.500	70	2.500	75	2.500	80	2.500	80	12.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian (sub pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian)
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Persentase kasus pendampingan hukum yang didampingi	persen	n/a	n/a	70	897	72	897	75	897	77	897	80	897	80	4.484	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	n/a	n/a	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	70.099	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pemenuhan penyelenggaraan kearsipan di Papua pada 7 aspek kearsipan	dokumen per tahun	n/a	n/a	2	330	2	330	2	330	2	330	2	330	10	1.650	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	n/a	n/a	70	450	75	470	80	550	85	550	90	550	90	2.570	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
PR (F6)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	3.600	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	21.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	64,25	67,42	70,75		74,24		77,90		81,75		85,78		85,78		
		Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	29,7	31,91	34,28		36,83		39,57		42,51		45,67		45,67		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	44,06	45,77	47,54		49,38		51,29		53,28		55,34		55,34		
		Persentase pasangan berakte nikah	persen	n/a	40	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		
	Program Pembinaan Kependudukan	Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan kependudukan	persen	n/a	n/a	20,00	450	20,00	450	20,00	450	20,00	450	20,00	450	100,00	2.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	n/a	n/a	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	500	6.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen	n/a	3,26	3	1.000	3	1.000	2,8	1.000	2,5	1.000	2,25	1.000	2,25	5.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	n/a	60	60		65		70		75		80		80		
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan kampung KB	persen	n/a	n/a	20	0	25	300	30	300	35	300	40	300	40	1.200	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	n/a	n/a	30		30		30		30		30		150		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Komunikasi dan Informasi melalui Media Massa	media	n/a	n/a	2	8.139	2	2.298	2	2.883	2	3.469	2	4.054	2	20.843	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya pengembangan komunikasi dan informasi di Lingkungan Pemda	media	n/a	n/a	1		1		1		1		1		1		
		Peningkatan kerjasama media dan publikasi pembangunan daerah	persen	n/a	n/a	50	5.160	60	4.810	65	5.160	70	5.160	75	5.160	75	25.450	
		Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	per tahun	n/a	n/a	5		5		8		8		10		10		
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil pembangunan	kerjasama per tahun	n/a	n/a	5	6.320	5	3.152	5	3.302	5	3.452	5	3.602	25	19.827	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Cakupan Layanan PPIID	persen	n/a	20	20		40		50		50		70		70		
PR (F6)	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	n/a	n/a	10	40.287	10	37.051	20	38.815	20	40.580	40	42.344	40	199.076	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	n/a	n/a	20		25		30		35		40		40		
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	n/a	n/a	75	1.209	80	1.250	85	1.300	90	1.400	95	1.500	95	6.659	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	n/a	n/a	5	1.950	5	2.050	8	3.350	8	1.550	10	2.650	10	11.550	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
		Cakupan Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis per tahun	n/a	n/a	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	5	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
PR (F6)	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	n/a	n/a	40	600	45	866	50	750	55	750	60	750	60	3.716	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	persen	n/a	n/a	100	2.700	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	16.700	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46,39	80	80		85		90		95		100		100		
		Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	n/a	75,38	30		40		50		70		85		85		
		Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48,24	36,7	39,04		41,53		44,18		47		50		50		
		Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	n/a	50	53,48		57,2		61,19		65,44		70		70		
PR (F6)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	46,39	80	80	5.500	85	5.650	90	5.420	95	8.650	100	500	100	25.720	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	70	75	85		90		90		95		100		100		
		Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	86,21	89,66	93,1		96,55		100		100		100		100		
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		
		Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		
		Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	n/a	85	90		95		100		100		100		100		
	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	n/a	n/a	80	10.400	85	10.400	90	10.400	95	10.400	100	10.400	100	52.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
PR (F6)	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	80	80	85	1.500	85	1.500	90	1.400	90	1.400	90	1.500	90	7.300	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	n/a	n/a	25		35		50		71		100		100		
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	n/a	n/a	25	1.455	35	1.455	50	1.455	71	1.455	100	1.455	100	7.275	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	n/a	n/a	25	2.000	35	2.000	50	2.000	71	2.000	100	2.000	100	10.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	n/a	n/a	25	3.250	35	3.250	50	3.250	71	3.250	100	3.250	100	16.250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Rekomendasi Kajian/Survei Statistik Sektoral yang memenuhi kriteria "layak"	rekomen dasi per tahun	n/a	n/a	2	800	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	10	4.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	n/a	70	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen per tahun	n/a	5	5		5		5		5		5		25		
PR (F3) (F6)	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kesepakatan Kerjasama	dokumen per tahun	n/a	n/a	2	1.570	2	1.570	2	1.570	2	1.570	2	1.570	10	7.850	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Perencanaan pembangunan	persen	n/a	n/a	100	250	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		
		Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	7,81	8,61	9,49		10,46		11,52		12,7		14		14		
PR (F6)	Program Pembinaan dan Fasilitasi	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang	persen	n/a	80	85	2.000	85	2.000	95	2.000	100	2.000	100	2.000	100	10.000	Urusan Pemerintahan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan	
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta				Target
	Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas																Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah)	
		Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	n/a	n/a	100		100	100		100		100		100		100		
PR (F6)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	23.679	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	123.679	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah)	
		Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	n/a	n/a	100		100	100		100		100		100		100		
		Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	n/a	20	20		20		40		40		50		50			50
		Opini Pemeriksaan BPK	opini	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			WTP
		Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya			Ya
		Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya			Ya
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persen	n/a	n/a	40	2.885	50	3.935	60	4.035	70	4.135	80	4.285	90	19.277	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pendapatan daerah)	
		Peningkatan Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	1,96	2,10	2,26		2,42		2,60		2,79		3,00		3,00		3,00	
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	rupiah	n/a	n/a	1.025.000.000	7.300	1.025.000.000	14.026	1.025.000.000	16.005	1.025.000.000	19.810	1.025.000.000	17.635	1.025.000.000	74.776	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pendapatan daerah)	
		Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis per tahun	n/a	n/a	2		2		2		3		3		12		12	
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	14	16	18		20		22		26		28		28		28	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang	n/a	28	35	1.897	40	3.207	45	2.590	50	2.650	55	2.910	60	13.254	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
PR (F6)	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	n/a	55	65	9.714	70	11.644	75	12.967	80	13.267	85	13.467	90	61.058	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
		Persentase Rekomendasi Auditor Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi yang Berindikasi Kerugian Daerah	persen	n/a	n/a	75		80		85		90		95		95			95
PR (F6)	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	n/a	40	40	5.978	40	7.273	45	7.900	45	8.804		9.479	50	39.434	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
		Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	n/a	20	25		25		30		35		50		35			35
		Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	n/a	30	30		35		35		35		35		35			35

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
M4	MISI KEEMPAT, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural dan Berkelanjutan																	
T4	Tujuan 4: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	4,64	4,96	5,24				5,91		6,26		6,62		6,62		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	5,18	5,52	5,83		6,2		6,53		6,95		7,39		7,39		
		Rasio Gini	nilai indeks	0,4	0,4	0,39		0,39		0,39		0,39		0,38		0,384		
		Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0,392	0,371	0,351		0,332		0,315		0,298		0,282		0,282		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81,47	82,06	82,64		83,21		83,83		84,44		85,03		85,03		
		Persentase penerapan green economy	persen	n/a	n/a	50		55		60		65		70		70		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,62	2,91	2,7		2,5		2,32		2,16		2		2		
		PDRB Perkapita DT	juta rupiah	58,68	59,13	59,58		59,86		60,13		60,58		60,94		60,94		
		PDRB Perkapita TT	juta rupiah	37,52	39,82	42,19		44,77		47,5		50,5		53,43		53,43		
		Tingkat Inflasi	persen	2,41	2,41	2,36		2,36		2,34		2,3		2,26		2,26		
S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,6	88	88,39		88,79		89,19		89,6		90		90		
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	n/a	n/a	45		50		55		60		65		70		
		Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2,27	2,59	2,95		3,37		3,84		4,38		5		5		
		Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0,8	1,09	1,47		2		2,71		3,68		5		5		
		Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0,82	1,11	1,5		2,02		2,74		3,7		5		5		
PR (F7)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Tanaman Pangan)	Cakupan bina kelompok tani	persen per tahun	n/a	n/a	20	2.500	20	3.000	20	3.000	20	3.000	20	3.000	100	14.500	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		NTP tanaman pangan	persen	86,31	88,45	90,65		92,9		95,21		97,58		100		100		
		NTP peternakan	persen	99,89	99,91	99,93	1.500	99,94	500	99,96	500	99,98	500	100	500	100	3.500	
	Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh (Peternakan)	Prosentase peningkatan kinerja kelembagaan penyuluh	persen	n/a	n/a	20	1.500	25	1.500	25	1.950	30	1.500	50	500	50	6.950	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
		Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	unit	n/a	n/a	10		10		10		10		10		50		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan)	Cakupan bina kelompok tani	persen	n/a	n/a	20	1.850	20	2.300	20	3.075	20	3.275	20	3.500	100	14.000	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		NTP perkebunan	persen	99,89	99,91	99,93		99,94		99,96		99,98		100		100		
		NTP tanaman pangan	persen	86,31	88,45	90,65		92,9		95,21		97,58		100		100		
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	7,37	8	8,16	8.250	8,58	8.250	9,03	8.250	9,5	8.250	10	8.250	10	41.250	Urusan Pilihan Pertanian (sub

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	(Pertanian dan perkebunan)	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	n/a	n/a	60		60		65		70		75		75		urusan tanaman pangan)
		Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	2,67	2,86	3,06		3,27		3,5		3,74		4		4		
		Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura	persen	n/a	10	15		20		25		30		35		35		
		Tingkat swasembada pangan	persen	n/a	n/a	25		30		35		40		45		45		
		Meningkatnya produksi perkebunan	Ha	n/a	n/a	0	400	100	2.550	100	2.750	200	3.525	200	4.175	200	13.400	
PR (F7)	Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	n/a	10	10	1.550	10	1.550	15	1.550	15	1.550	25	1.550	25	7.750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	n/a	60	65	7.211	70	15.000	75	15.000	80	15.000	85	15.000	85	67.211	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	n/a	n/a	15	500	25	1.600	25	2.200	30	2.810	30	3.350	30	10.460	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui diklat	persen	n/a	n/a	2	12.183	2	15.500	3	15.500	3	15.500	3	15.500	3	74.183	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		Jumlah Sumber Daya Perkebunan yang ditingkatkan kemampuannya	kelompok	n/a	n/a	1	325	4	300	4	325	5	325	5	350	5	1.625	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
PR (F2)	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	n/a	n/a	2	3.500	2	7.500	2	7.500	2	7.500	2	7.500	10	33.500	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembangkan	bibit	10000	n/a	10000	225	25.000	475	25.000	525	50.000	705	50.000	790	50.000	2.720	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi	Terlaksananya penerapan teknologi perkebunan tepat guna	kegiatan	n/a	n/a	1	500	1	575	1	600	1	950	1	1.000	5	3.625	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Cakupan teknologi pertanian rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	n/a	n/a	10	750	10	2.250	12	2.250	12	2.250	15	2.250	15	9.750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		Cakupan teknologi peternakan tepat guna yang diterapkan	jenis	n/a	n/a	10	750	-	0	-	0	-	0	-	0	10	750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
PR (F2)		Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Ha	1000	n/a	2000	31.554	2.000	26.519	2.200	27.225	2.500	28.230	3.000	28.433	3.000	141.961	Urusan Pilihan Pertanian (sub

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	485,22	489,26	493,34		497,46		501,60		505,78		510,00		510		urusan perkebunan)
		Tingkat produktifitas tanaman pertanian	kg per hektar	485,22	489,26	493,34	3.500	497,46	3.500	501,60	3.500	505,78	3.500	510,00	3.500	510	17.500	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
PR (F2)	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	n/a	n/a	1000	20.000	2.000	20.000	3.000	100.000	4.000	100.000	5.000	100.000	39.600	340.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen	n/a	n/a	75		80		85		90		95		95		
		Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	44,55	46,82	49,2		51,7		54,33		57,1		60		60		
		Cakupan layanan air bersih	persen	n/a	48	50		52		54		56		60		60		
		Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lo kasi	n/a	n/a	20		20		20		20		20		100		
		Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	n/a	n/a	40		50		60		70		80		80		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	ton	100	n/a	100	5.000	200	5.000	200	6.000	250	7.000	300	8.000	300	31.000	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	n/a	n/a	25		30		35		40		45		45		
		Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	n/a	n/a	2		2		2		2		2		10		
		Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	n/a	n/a	25	4.000	30	4.000	35	4.000	40	4.000	45	4.000	45	20.000	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		Frekwensi promosi produk pertanian	kali	n/a	n/a	2		2		2		2		2		10		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	kegiatan	n/a	n/a	10	5.250	10	7.500	10	7.550	10	7.600	10	7.850	50	35.750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
		Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	n/a	n/a	50		55		60		65		70		70		
PR (F2)	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	persen	n/a	n/a	3,5	12.073	3,5	13.536	3,5	13.200	3,5	13.500	3,5	13.700	3,5	66.009	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
		Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	ton	30.146.247	31.277.043	32450255		33667475		34930354		36240603		37600000		37600000		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	n/a	30	32	2.900	34	9.250	36	6.250	38	6.250	40	6.250	40	30.900	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
	Program Perencanaan Pembangunan (Perkebunan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	n/a	1	1.984	1	2.240	1	2.455	1	2.430	1	2.445	5	11.554	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program Perencanaan Pembangunan (Peternakan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	n/a	1	3.300	1	3.700	1	3.800	1	3.850	1	4.000	5	18.650	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Perencanaan Pembangunan (Tanaman Pangan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	n/a	1	2.729	1	3.900	1	4.000	1	4.100	1	4.100	5	18.829	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
S17	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13,21	14,69	16,34		18,17		20,21		22,48		25		25		
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	n/a	n/a	80	1.000	85	1.000	90	1.000	95	1.000	100	1.000	100	5.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	n/a	n/a	40		45		50		55		60		60		
		Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	n/a	n/a	25		50		75		100		100		100		
		Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	n/a	n/a	30		40		50		60		70		70		
PR (F2)	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	persen	n/a	n/a	30	1.604	50	4.200	70	4.200	90	4.200	100	4.200	100	18.404	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	n/a	n/a	65		80		90		100		100		100		
	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya Jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	persen	n/a	n/a	50	850	60	3.200	70	3.200	80	3.200	100	3.200	100	13.650	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	n/a	n/a	40		50		60		70		80		80		
	Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan	persen	n/a	n/a	50	300	60	1.950	70	1.750	80	1.750	100	1.750	100	7.500	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
	Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	Meningkatnya ketersediaan bbb untuk nelayan	persen	n/a	n/a	100	2.935	10	3.800	10	4.850	10	4.850	10	4.850	50	21.285	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	Rp per liter	n/a	10.000	10.000		9.800		9.800		9.500		9.500		9.500		
	Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Meningkatnya kerjasama aparatur pemerintah	persen	n/a	n/a	60	700	70	1.800	80	1.800	90	1.800	100	1.800	100	7.900	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
PR (F1)	Program Peningkatan Kualitas dan	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	n/a	n/a	80	1.500	85	1.350	90	2.150	95	2.150	100	2.600	100	9.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Kategori	Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta				
	Produktivitas Tenaga Kerja	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	n/a	n/a	2		2		2		2		2		10		Dasar Tenaga Kerja	
	Program Peningkatan Kinerja Organisasi	Persentase peningkatan kinerja organisasi ketenagakerjaan	persen	n/a	n/a	60	150	70	150	80	150	90	150	100	150	100	750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase hasil produk tanaman pangan lokal berkualitas yang terserap	persen	n/a	n/a	5	2.875	5	2.875	10	4.025	10	5.075	15	5.825	15	20.650	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Cakupan kelompok binaan tani lokal pemasok kebutuhan makanan sektor pertambangan yang berkembang	kelompok	n/a	n/a	20		20		20		20		20		100			
PR (F2)	Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya jumlah investasi di bidang pertambangan dan energi	persen per tahun	n/a	n/a	4	400	4	3.000	4	1.450	4	1.450	4	2.150	4	8.450	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
	Program Pengembangan ESDM	Tersedianya dokumen sebagai sumber Data	dokumen per tahun	n/a	n/a	-	0	10	135.000	10	135.000	10	137.500	10	138.500	40	546.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara	indeks	90,91	91,58	92,25		92,93		93,62		94,31		95		95			
		Indeks Kualitas Air	indeks	77,33	77,77	78,21		78,65		79,1		79,55		80		80			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78,18	79,28	80,39		81,52		82,66		83,82		85		85			
		Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	-	-	31.580,25		39.475,31		47.370,37		55.265,43		63.160,49		63.160,49			
PR (F9)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	14	n/a	20	17.750	20	17.750	20	19.000	20	22.000	20	25.000	100	101.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
		Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	15/5	n/a	20/5		40/8		50/10		50/10		50/10		50/10			
		Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	6,84	5,57	4,54		3,7		3,01		2,45		2		2			
		Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	n/a	n/a	60		65		70		75		80		80			
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	lokasi per kab/kota	n/a	n/a	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	5	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	n/a	n/a	12	2.750	12	2.750	12	2.750	12	2.750	12	2.750	60	13.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di kawasan	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi per kab/kota	n/a	n/a	1	1.050	1	1.050	1	1.050	1	1.050	1	1.050	5	5.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	kawasan Konservasi Laut dan Hutan																	
PR (F9)	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	n/a	n/a	60	2.550	65	2.550	70	2.550	75	2.550	80	2.550	80	12.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	n/a	n/a	20		25		30		35		40		40		
		Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	n/a	n/a	30		35		40		45		50		50		
PR (F9)	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	n/a	12	12	3.600	12	3.600	12	3.650	16	3.650	20	3.650	20	18.150	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	n/a	2	0			1		1		2		2		5	
PR (F9)	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terfasilitasi kegiatan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persen	n/a	n/a	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100	2.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	rasio	23,93	24,85	25,8		26,79		27,82		28,89		30		30		
		Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1,29	1,48	1,71		1,97		2,26		2,61		3		3		
		Laju Deforestasi	ribu hektar	48,6	43,5	38,94		34,86		31,2		27,93		25		25		
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp milyar	2.051,75	2.120,45	2.191,44	9.450	2.264,81	9.050	2.340,64	9.400	2.419,01	9.450	2.500,00	10.200	2.500,00	47.550	Urusan Pilihan Kehutanan
		Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	n/a	n/a	10		10		10		10		10		10		
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	n/a	26,41	27,09	18.000	27,79	18.000	28,51	18.000	29,24	18.000	30	18.150	30	90.150	Urusan Pilihan Kehutanan
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	n/a	4.641,81	4.761,77		4.884,83		5.011,07		5.140,57		5.273,42		3.000,00		
		Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	n/a	5	10		15		20		25		30		30		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7.755.284	7.755.284	7.755.284	21.490	7.755.284	18.919	7.755.284	20.105	7.755.284	21.490	7.755.284	23.232	7.755.284	105.236	Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	n/a	n/a	30	5.100	35	5.000	40	4.500	45	5.100	50	5.350	50	25.050	Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan	Jumlah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	unit	17 UPTD, 19 CDK	17 UPTD, 19 CDK	17 UPTD, 19 CDK	38.363	17 UPTD, 19 CDK	38.763	17 UPTD, 19 CDK	38.763	19 UPTD, 20 CDK	43.663	19 UPTD, 20 CDK	44.113	19 UPTD, 20 CDK	203.665	Urusan Pilihan Kehutanan
		Luasan hutan yang dikelola melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit	Ha	n/a	n/a	660		660		660		720		720		720		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan	
						2019		2020		2021		2022		2023					
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta		
		Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)																	
S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB		persen	8	8,3	8,62		8,94		9,28		9,63		10		10		
		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB		persen	1,94	2,19	2,47		2,79		3,14		3,55		4		4		
		Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan		Jumlah	0	0	1		1		2		2		4		10		
		Persentase koperasi aktif dan berkembang		persen	52	53,66	54,88		56,11		57,38		58,68		60		60		
		Jumlah UMKM yang berkembang		Jumlah	3428	3517	3609		3703		3799		3898		4000		4000		
		Jumlah Kunjungan Wisatawan		ribu orang	900,57	980,5	1067,52		1162,26		1265,42		1377,72		1500		1500		
		Lama Tinggal Wisatawan		Hari	2	2,2	2,41		2,65		2,9		3,19		3,5		3,5		
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terlaksananya penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah		kegiatan per tahun	n/a	n/a	1	0	1	900	1	900	1	900	1	900	5	3.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PR (F2)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru		persen	n/a	n/a	7	6.512	14	9.495	21	8.450	28	7.205	35	7.550	35	39.212	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)		persen	n/a	n/a	25	3.452	25	4.825	25	4.150	25	4.525	25	4.850	25	21.802	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT)		persen	n/a	n/a	30	6.328	35	10.866	40	11.417	45	12.172	50	12.949	50	53.730	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah kelompok pra koperasi yang akan di fasilitasi menjadi koperasi		unit	n/a	n/a	10		10		10		10		10		50		
PR (F7)	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok		persen	n/a	n/a	250	900	225	3.000	200	2.500	175	2.500	150	2.500	150	11.400	Urusan Pilihan Perdagangan
		Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga		persen	12,52	12,94	13,37		13,82		14,28		14,76		15,25		15,25		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		kegiatan per tahun	n/a	n/a	1	400	1	10.480	1	6.230	1	6.230	1	6.230	5	29.570	Urusan Pilihan Perdagangan
		Prosentase Peningkatan Pengembangan Ekspor		persen	n/a	n/a	0		40		60		80		100		100		
		Prosentase Meningkatnya Wirausaha baru dan UMKM yang kompetitif		persen	n/a	n/a	0		40		60		80		100		100		
		Nilai ekspor Non Migas Papua		Rp milyar	2.008,10	2.147,05	2.295,61		2.454,44		2.624,27		2.805,86		3.000,00		3.000,00		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan	
						2019		2020		2021		2022		2023					
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta		
PR (F7)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	n/a	n/a	2,5	4.000	3	4.000	3,25	4.000	3,5	4.000	4	4.000	4	20.000	Urusan Pilihan Perdagangan	
PR (F2)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	IKM per tahun	n/a	n/a	50	8491,81	50	12192	50	12192	50	13300	50	21300	250	67475,81	Urusan Pilihan Perindustrian	
		Sentra industri rakyat yang berfungsi	sentra	n/a	n/a	1		1		1		1		1		5			
		Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	n/a	n/a	10		20		30		40		50		50			50
		Cakupan Industri kecil dan Menengah OAP yang dibina	IKM	n/a	n/a	50		60		70		80		90		90			90
		Jumlah Jenis Komoditas Industri lokal yang dilabeli HAKI	jenis	n/a	n/a	3		3		3		3		3		3			15
		Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	persen	n/a	n/a	5		5		5		5		5		5			25
		Jumlah sentra industri rakyat	sentra	n/a	n/a	1		1		1		1		1		1			5
		Jumlah sentra industri rakyat	destinasi	n/a	10	10	9.477	12	13.100	12	12.150	15	12.250	15	12.750	15	12.750		15
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	n/a	2	1			1		1		1		1		5		Urusan Pilihan Pariwisata	
Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	n/a	n/a	10	1.579	10	1.850	10	2.350	10	2.000	10	2.000	50	9.779	Urusan Pilihan Pariwisata		
Program Peningkatan Kelembagaan Petani (Pernakan)	Prosentase peningkatan kinerja kelembagaan petani	persen	n/a	n/a	20	1.400	20	1.400	25	1.050	30	1.100	40	700	40	5.650	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan Peternakan)		
Program pengembangan kapasitas	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	n/a	n/a	50	1.235	50	1.200	50	1.700	50	2.100	50	2.400	250	8.635	Urusan Pilihan Pariwisata		
		Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	n/a	n/a	10		10		10		10		10		50			
Program Pengembangan Kawasan	Cakupan pengembangan kawasan peruntukan khusus	persen	n/a	n/a	80	3.900	-	0	-	0	-	0	-	0	80	3.900	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	n/a	n/a	10	0	20	530	30	530	40	530	50	530	50	2.120	Urusan Pilihan Perindustrian		
Program Penataan Struktur Industri	Cakupan penataan struktur industri	persen	n/a	n/a	40	1.300	50	1.350	60	1.350	70	1.300	80	1.350	80	6.650	Urusan Pilihan Perindustrian		
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah kawasan sentra industri rakyat	kawasan	n/a	n/a	1	400	1	400	2	400	2	400	2	400	2	2.000	Urusan Pilihan Perindustrian		
		Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	persen	n/a	n/a	5		5		5		5		5		25			
		Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	IKM per tahun	n/a	n/a	50		50		50		50		50		250			
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	persen	n/a	n/a	30	30.000	35	0	40	200.000	45	200.000	50	200.000	50	630.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4,53	5,33	6,27		7,37		8,67		10,2		12		12		
		NTP perikanan tangkap	Skor	103,75	103,96	104,17		104,37		104,58		104,79		105		105		
		NTP perikanan budidaya	Skor	83,27	85,85	88,51		91,25		94,08		96,99		100		100		
		Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita / bulan	0,22	0,33	0,49		0,74		1,1		1,65		2,46		2,46		
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan	kelompok	n/a	n/a	4	5.350	8	6.925	12	7.585	16	8.205	20	3.280	20	31.345	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen	n/a	n/a	1,25		1,50		1,75		1,80		2		2		
		Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	n/a	n/a	8		10		13		13		13		13		
PR (F2)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	kelompok per tahun	n/a	n/a	6	2.853	6	11.225	6	12.225	6	14.425	6	14.725	30	55.453	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	ton	113	118,46	124,19		130,19		136,49		143,08		150		150		
PR (F2)	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	7.403,00	7.499,31	7.596,88	1.083	7.695,71	6.325	7.795,83	7.100	7.897,26	8.175	8.000,00	8.875	8.000,00	31.558	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	n/a	60	65	0	70	375	75	430	80	485	85	525	85	1.815	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Persentase meningkatnya penyuluhan perikanan lapangan	persen	n/a	n/a	15		25		25		30		30		30		
	Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	37.811,51	39.613,97	41.502,35	1.265	43.480,75	6.546	45.553,46	7.265	47.724,97	7.555	50.000,00	7.895	50.000,00	30.526	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	6.787,68	6976,15	7169,86		7368,95		7573,57		7783,86		8000		8000		
PR (F7)	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	unit per tahun	n/a	n/a	2	300	2	600	4	1200	4	1200	8	1200	20	4500	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kenaikan pemasaran hasil produksi perikanan	persen	n/a	n/a	2,5	385	2,5	750	2,75	850	3	950	3	1.000	3	3.935	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	ton	113	118,46	124,19	4.881	130,19	4.924	136,49	4.895	143,08	4.900	150	4.910	150	24.510	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	n/a	n/a	1,20	11715	1,50	12000	2,00	12000	2,25	12000	2,50	12000	2,50	59715	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data perikanan dan kelautan	persen per tahun	n/a	n/a	20	1.007	20	650	20	800	20	950	20	1.100	100	4.507	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76,94	77,44	77,95		78,46		78,97		79,48		80		80		
		Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96,01	97,09	97,34		97,59		97,84		98,09		98,34		98,34		
PR (F1)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	n/a	n/a	80	2000	80	2000	85	2.000	85	2.000	90	2.000	10000	10.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	n/a	n/a	25		25		30		40		50		50		
		Persentase kenaikan UMP	persen	n/a	n/a	1,5		1,5		2,3		3,5		4		4		
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	n/a	n/a	30		35		40		50		60		60		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	76,94	77,44	77,95	5.150	78,46	4.225	78,97	4.650	79,48	4.275	80	4.325	80	22.625	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,62	2,91	2,7		2,5		2,32		2,16		2		2		
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	persen	n/a	n/a	40	1.350	45	1.350	50	1.350	55	1.350	60	1.350	60	3.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	n/a	n/a	60		65		70		75		80		80		
S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. juta	52.510.304	54.401.000	56.360.000		58.389.000		60.491.000		62.669.000		64.926.000		64.926.365		
		Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp.juta	70.038.818	73.744.000	77.645.000		81.753.000		86.078.000		90.632.000		95.427.000		95.425.872		
		Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	90	80		60		40		30		20		20		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Papua	perusahaan	n/a	n/a	50	3.900	104	6.700	158	7.200	212	7.700	272	8.200	272	33.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
		Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	n/a	6,5	7		7		7,50		7,50		7,50		8		
		Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	n/a	n/a	15		20		25		30		35		35		
		Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	n/a	n/a	5		5		5		5		5		25		
		Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	n/a	n/a	40		50		60		70		80		80		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
PR (F2)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	n/a	60	40	3.700	30	4.300	20	4.650	10	5.000	10	5.350	10	23.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
		Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	skor	n/a	65	67	68	70	72	74	77							
	Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Pertumbuhan nilai investasi	persen	n/a	n/a	7	1.000	14	1.100	21	1.200	28	1.300	35	1.400	35	6.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Proporsi biaya transaksi dalam total investasi	persen	n/a	n/a	5	1.500	3	1.700	2	4.900	2	2.100	1	2.300	1	12.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
PR (F2)	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	n/a	n/a	65	3.000	70	3.900	75	4.500	80	5.100	85	5.700	85	22.200	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
T5	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	229,82	224,56	219,42		214,39		209,48		204,69		200		200		
		Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	kategori	n/a	n/a	C		C		C		B		B		B		
S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	55,17	55,17	58,62		65,52		72,41		79,31		93,1		93,1		
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	30	30	32		40		45		50		60		60		
		Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen	20	20	25		30		35		40		45		45		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	n/a	n/a	20	530.390	20	480.442	20	686.392	20	959.451	20	1.087.442	100	3.744.117	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan yang fungsional	m'	n/a	n/a	500		500		500		500		500		2500		
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	n/a	n/a	34	60.000	38	60.000	40	200.000	45	200.000	50	200.000	55	720.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap	persen	n/a	n/a	40		45		50		55		60		60		
	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	n/a	n/a	10	350.000	20	463.526	20	533.190	20	425.000	30	425.000	100	2.196.716	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq	n/a	n/a	30		30		30		30		30		150		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	n/a	n/a	60	10.000	65	10.000	70	44.225	75	42.369	80	44.225	80	150.820	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PR (F3)	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan integrasi antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat	n/a	1	1	9.894	2	48.421	2	62.950	3	15.800	3	65.000	3	202.066	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
PR (F3)	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	n/a	20	20	375	25	750	30	550	35	550	40	550	40	2.775	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	n/a	200	180		160		140		120		100		100		
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan untuk pelayanan transportasi	unit	n.a	n.a	4	5.670	14	8.841	18	2.450	20	2.450	22	2.450	22	21.861	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
PR (F3)	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	n.a	7	1	250.000	1	334.835	1	545.820	1	580.000	1	580.000	5	2.290.655	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	n.a	5	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	n.a	6	-		-		1		-		1		2		
		Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	n.a	3	2		2		2		2		2		10		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	n.a	5	5		6		6		7		7		7		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	n.a	n.a	2,5		3		3,50		4		4,5		4,5		
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	n.a	n.a	60	4.000	65	5.151	70	200	75	200	80	200	80	9.751	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah balai/alat pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi	unit	n.a	n.a	1	234	1	234	1	234	1	234	1	234	1	1.172	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji petik	unit	n.a	n.a	100		120		130		140		150		150		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	persen	n.a	n.a	100	0	100	250	100	300	100	300	100	300	100	1.150	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	persen	n.a	n.a	45	11.422	-	0	-	0	55	100.000	70	100.000	70	211.422	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	Cakupan pembinaan dan pengembangan konstruksi	persen	n.a	n.a	80	1.000	-	0	-	0	-	0	-	0	80	1.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen			30		35		40		45		50		50		
PR (F9)	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	n.a	n.a	60	1.000	70	1.000	80	1.000	90	1.000	100	1.000	100	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	dokumen	n.a	n.a	1	2.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1	2.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan pelaksanaan pemanfaatan ruang	persen	n.a	n.a	100	900	-	0	-	0	-	0	-	0	100	900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PR (F9)	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	n.a	n.a	80	600	85	600	90	600	95	600	100	600	100	3.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	n.a	n.a	60		65		70		75		80		80		
		Persentase pengendalian daya rusak air	persen	n.a	n.a	40		45		50		55		60		60		
PR (F3)	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Cakupan keterlayanan air baku	persen	n.a	n.a	30	1.000	35	2.000	40	5.000	45	7.000	50	9.000	50	24.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PR (F3)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	38,47	40,19	41,98	100.000	43,86	100.000	45,82	100.000	47,86	100.000	50	100.000	50	500.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum	persen	n.a	n.a	50		70		90		100		100		100		
		Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	persen	69,16	70,86	72,6		74,38		76,21		78,08		80		80		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	n.a	n.a	25		50		75		100		100		100		
PR (F9)	Program Pengendalian Banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	n/a	n/a	30	10.000	35	0	40	150.000	45	200.000	50	200.000	50	560.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	n/a	n/a	50		55		60		65		70		70		
	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap/talud/bronjong yang	persen	n/a	n/a	90	23.000	95	25.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	348.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		berfungsi baik dalam mencegah longsor di tebing jalan /sungai																Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase genangan air permukaan yang dapat turun	persen	n/a	n/a	85	10.000	85	30.000	90	120.000	90	120.000	90	120.000	90	400.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S27	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33,06	34,12	35,22		36,36		37,54		38,75		40		40		
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38,47	39,52	40,61		41,72		42,87		44,04		45,25		45,25		
		Backlog perumahan layak huni	ribu rupa	147,88	138,55	129,8		121,61		113,93		106,74		100		100		
PR (F3)	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak huni yang terbangun	unit	n/a	n/a	356	0	3.000	0	3.000	400.000	3.000	400.000	3.000	400.000	12.356	1.200.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	n/a	n/a	60		65		70		75		80		80		
		Persentase penduduk relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100		
PR (F3)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penduduk yang terakses lingkungan sehat	persen	n/a	n/a	50	6.300	50	7.000	50	7.000	50	7.000	50	7.000	50	34.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	n/a	30	30		35		40		45		50		50		
PR (F3)	Program Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya ketersediaan air bersih	persen	n/a	n/a	50	4.427	52	12.750	54	13.350	56	13.450	60	13.750	60	57.727	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	n/a	n/a	125		180		230		300		380		380		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	persen	10,03	9,38	10	300	10	300	20	300	30	300	40	300	40	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota	lokasi	n/a	n/a	-		-		1		1		1		1		
		Cakupan pengelolaan sampah di kawasan strategis dan perkotaan	persen	n/a	n/a	20		30		40		45		50		50		
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Komunitas perumahan yang diberdayakan	komunitas per tahun	n/a	n/a	5	13.500	5	15.000	5	20.000	5	25.000	5	30.000	25	103.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40,57	41,28	41,99		42,73		43,47		44,23		45		45		
PR (F3)		Cakupan ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan	persen	n/a	n/a	0	0	15	9.400	20	2.900	25	2.900	30	2.900	35	18.100	Urusan Pilihan Energi dan

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat elektrifikasi	persen	53,2	54,28	55,38		56,5		57,64		58,81		60		60		Sumberdaya Mineral
		Persentase kampung terakses listrik	persen	43	45,46	48,05		50,79		53,69		56,76		60		60		
PR (F3)	Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	persen	n/a	n/a	0	128.098	5	90.400	10	73.750	15	73.750	20	73.750	20	439.748	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumahtan gga	n/a	n/a	250		500		750		1.000		1.250		1.250		
		Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumahtan gga	n/a	n/a	500		1.000		1.500		2.000		2.500		2.500		
		Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	n/a	n/a	100		200		300		400		500		500		
S29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	persen			40		45		50		55		60		60		
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen			5		7,25		7,5		8		10		10		
PR (F3)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	16,51	17,05	17,6	5.000	18,17	5.000	18,76	5.000	19,37	5.000	20	5.000	20	25.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase SDM Aparatur yang memahami IT	persen	n.a	n.a	40	500	50	1.000	60	2.000	70	2.000	80	2.000	80	7.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT	kelompok	n.a	n.a	2		4		5		6		7		8		
		Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	n.a	n.a	60		65		70		75		80		80		
M5	MISI KELIMA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTENTU																	
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5,37	6,94	8,97		11,59		14,97		19,35		25		25		
		Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	32,32	31,78	31,25		30,71		30,23		29,72		29,23		29,23		
		Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	30,12	29,8	29,47		29,15		28,81		28,48		28,16		28,16		
		Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	36,3	35,89	35,48		35,04		34,6		34,2		33,8		33,8		
		Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0,8316	0,7774	0,7544		0,6907		0,6255		0,6067		0,564		0,564		
		IPM wilayah perbatasan	indeks	63,25	64,02	64,79		65,58		66,38		67,18		68		68		
		Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Rendah		Rendah		
		Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,517	0,508	0,5		0,491		0,483		0,475		0,467		0,467		
S30		Indeks kampung membangun	indeks	41,89	43,43	45,02		46,67		48,38		50,16		52		52		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	n/a	30	34,46		39,59		45,47		52,23		60		60		
PR (F8) (F4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Cakupan pemberdayaan masyarakat kampung	kegiatan	n/a	n/a	6	3.100	6	3.350	6	4.000	6	4.650	6	5.300	6	20.400	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	n/a	n/a	25		30		35		40		45		45		
		Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	kampung	n/a	n/a	10		10		10		10		10		50		
		Persentase kampung tertinggal	persen	n/a	87,12	84,55		82,05		79,63		77,28		75		75		
		Persentase kampung mandiri	persen	n/a	10	2		2		4		4		5		17		
PR (F8)	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di distrik dan kampung	persen	n/a	n/a	35	2.800	45	3.100	65	3.350	85	3.600	100	3.850	100	16.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	n/a	n/a	10		10		10		10		10		50		
		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	n/a	n/a	10		15		20		25		30		30		
	Program Pengembangan data/informasi	Persentase pengembangan data/informasi pemberdayaan masyarakat kampung	persen	n/a	n/a	60	2.900	70	3.000	80	3.100	90	3.200	100	3.300	100	15.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
PR (F4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	n/a	n/a	60	4.856	65	10.000	70	10.000	75	10.000	80	10.000	80	44.856	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	Per 1000 nelayan	127,36	173	234,99		319,2		433,58		588,95		800		800		
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pertumbuhan ekonomi wilayah transmigrasi	persen	n/a	n/a	5,50	300	5,60	300	5,70	300	5,80	300	5,90	300	6,00	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah transmigran lokal yang ditempatkan	orang	n/a	n/a	500	550	500	550	500	900	500	550	500	900	2500	3.450	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
S31	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen		60	62,4		64,9		67,49		70,19		73		73		
PR (F1)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	n/a	n/a	40	1.388	43,51	1.500	47,33	1.500	51,48	1.500	56	15.000	56	20.888	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
PR (F1)		Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	n/a	n/a	85	1.500	88,52	1.500	92,2	1.500	96,02	1.500	100	1.500	100	7.500	

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	n/a	n/a	2,15		1,7		1,35		1,07		0,85		0,85		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	n/a	n/a	1,22		0,82		0,55		0,37		0,25		0,25		
PR (F1)	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	n/a	n/a	35	37.500	40,05	38.367	45,83	50.000	52,44	50.000	60	50.000	60	225.867	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	n/a	n/a	200		200		200		200		200		1000		
PR (F1)	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	n/a	n/a	45	10.657	48,36	10.657	51,96	40.000	55,84	40.000	60	40.000	60	141.314	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa	persen	n/a	n/a	70	10.000	70	15.000	80	15.000	80	15.000	85	15.000	85	70.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan otonomi khusus)
		Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang per tahun	n/a	n/a	100		100		100		100		100		500		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	n/a	n/a	25	750	28,12	750	31,62	750	35,57	750	40	750	40	3.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan
		Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	n/a	n/a	60		63,44		67,08		70,93		75		75		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	n/a	n/a	40	1330	46,01	1330	52,92	1330	60,86	1330	70	1330	70	6.650	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan
PR (F3)	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	n/a	n/a	30	0	32,24	0	34,64	200.000	37,22	200.000	40	200.000	40	600.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	n/a	n/a	20	10.800	14,14	11.500	10	12.250	7,07	12.975	5	14.325	5	61.850	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
PR (F1)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	n/a	n/a	250	900	250	3.250	250	1.800	250	1.800	250	1.800	1250	9.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan	Kegiatan	n/a	n/a	1	1.800	5	5.250	5	4.300	5	4.350	5	4.350	25	20.050	Urusan Pilihan Perdagangan
		Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	n/a	n/a	80		80		85		85		90		90		
		Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	n/a	n/a	100		100		100		100		100		100		
		Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	n/a	n/a	250		225		200		175		150		150		
		Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga	persen	12,52	12,94	13,37		13,82		14,28		14,76		15,25		15,25		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	
S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7,48	8,09	8,75		9,47		10,25		11,09		12		12		
		Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65,08	65,56	66,04		66,53		67,01		67,5		68		68		
		Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9,49	10,12	10,8		11,52		12,3		13,12		14		14		
PR (F4)	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional	lokasi	n/a	2	1	1.200	1	27.800	1	29.850	1	28.950	1	25.250	5	113.050	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan perbatasan dan kerjasama luar negeri)
		Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	persen	n/a	n/a	45		50		55		60		65		65		
		Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan	murid per sekolah	97,87	100	150		175		200		225		250		250		
		Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan	murid per guru	14,9	15	15		20		20		25		25		25		
		Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan	murid per kelas	13,88	14	20		25		30		35		40		40		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan	puskesmas per 1000 penduduk	0,34	0,34	0,4		0,5		0,6		0,7		0,8		0,8		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	persen	n/a	n/a	30		36		42		50		60		60		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	persen	n/a	n/a	40		42		45		47		50		50		
	Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan	persen	n/a	n/a	80	2.400	85	2.400	90	2.400	95	2.400	100	2.400	100	12.000	
	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas	Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	persen	n/a	n/a	45	2.835	50	2.835	55	2.835	60	2.835	65	2.835	65	14.175	
Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan		persen	n/a	n/a	30		36		42		50		60		60			
Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan		persen	n/a	n/a	40		42		45		47		50		50			
PR (F4)	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah	n/a	n/a	30	200	-	0	-	0	-	0	-	0	30	200	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	-	-	50		50		50		50		50		250		
		Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	-	-	10		20		30		40		50		150		
		Prosentase KAT yang mandiri	persen	n/a	n/a	25	11.150	30	11.650	35	11.650	40	11.650	45	11.650	50	57.750	

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
PR (F1)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	n/a	n/a	40		45		50		55		60		60	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	
		Persentase PMKS yang tertangani	persen	n/a	n/a	30		35		40		45		50		50		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	25	28,51	32,51		37,08		42,29		48,23		55		55		
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	n/a	n/a	200		200		200		200		200		1.000		
		Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	n/a	n/a	70		75		80		85		90		90		
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	n/a	n/a	65		70		75		80		85		85		
		Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
PR (F1)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	n/a	n/a	30	1.550	35	1.550	40	1.800	45	1.800	50	2.200	50	8.900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	n/a	n/a	15		20		25		30		35		35		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah kelembagaan sosial masyarakat yang aktif	Kelompok	n/a	n/a	20	3.750	25	4.450	30	5.700	35	6.450	40	7.200	45	27.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Keluarga miskin	persen	n/a	n/a	50		60		70		80		90		90		
		Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	n/a	9	12		15		18		21		24		24		
PR (F1)	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	n/a	n/a	50	4.850	50	5.350	50	5.550	50	5.550	50	5.550	250	26.850	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	n/a	n/a	250		250		250		250		250		1.250		
		Cakupan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	n/a	n/a	30		35		40		45		50		50		
		Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	n/a	n/a	60		65		70		75		80		80		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas perencanaan kesejahteraan sosial	persen	n/a	n/a	70	650	75	1.000	80	1.000	85	1.000	90	1.000	90	4.650	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	n/a	n/a	2		2		2		2		2		10		
S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori		Tinggi	Tinggi		Tinggi		Sedang		Sedang		Rendah		Rendah		
PR (F9)	Program Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam (urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan)	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam	kegiatan	n/a	n/a	18	8.000	18	7.850	18	10.000	18	11.000	18	15.000	0	51.850	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penanggulangan bencana daerah)
		Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	n/a	n/a	60		65		70		75		80		80		
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	n/a	n/a	2		2		2		2		2		10		
		Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	n/a	n/a	80		80		90		90		100		100		
		Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	n/a	n/a	20		25		30		35		40		40		
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
	Program Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam (Satpol PP)	Prosentase Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana	persen	n/a	n/a	85	783	90	1.716	95	1.800	100	2.031	100	2.251	100	8.581	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)
		Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	n/a	n/a	60		65		70		75		80		80		
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	n/a	n/a	2		2		2		2		2		2		
		Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	n/a	n/a	80		80		90		90		100		100		
		Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	n/a	n/a	20		25		30		35		40		40		
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Cakupan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam laut	persen	n/a	n/a	50	1.000	60	1.000	70	1.000	80	1.000	90	1.000	90	5.000	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	unit per tahun	n/a	n/a	50	3.500	50	3.500	50	3.500	50	3.500	50	3.500	250	17.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	n/a	n/a	40		60		80		100		100		100		
S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	492	423	364		313		269		232		200		200		
		Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	79,38	79,48	79,59		79,69		79,79		79,9		80		80		
PR (F5)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Proporsi perempuan di Legislatif	persen	12,73	12,73	20	1.100	20	2.427	20	2.080	20	2.365	20	1.970	20	9.942	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupani perempuan yang berada di posisi pimpinan	per 100 laki-laki	n/a	10	10		15		20		25		30		30		
		Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	kasus	98	80	66		54		44		36		30		30		
		Persentase kasus Trafficking dan Eksploitasi anak	persen	7,73	4,9	3		2		1		1		1		1		
PR (F5)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	per 1000 perempuan	51	46,68	43	1.436	39	1.550	36	1.600	33	1.450	30	1.430	30	6.030	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Implementasi kebijakan yang responsif gender	persen	n/a	n/a	60		70		80		90		100		100		
		Persentase Posyandu Aktif	persen	85,71	87,19	89		90		92		93		95		95		
		Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	persen	n/a	n/a	70		80		90		100		100		100		
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan	persen	n/a	n/a	80	250	85	300	90	300	95	300	100	30	100	1.180	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Prosentase pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan	persen	n/a	n/a	50		65		80		95		100		100		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	persen	n/a	n/a	70	800	80	1.000	90	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
PR (F5)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan (urusan pemberdayaan perempuan dan	Cakupan wirasaha perempuan binaan yang berkembang	orang	n/a	n/a	150	3.121	150	2.600	150	2.600	150	2.600	150	2.600	750	13.521	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PKK aktif	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Cakupan wirasaha perempuan binaan yang berkembang	orang	n/a	n/a	150		150		150		150		150		150		

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Kondisi Kinerja Awal RJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	perlindungan anak dan KB)																	dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan (urusan pemberdayaan masyarakat desa)	Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	persen	n/a	n/a	40	1.380	60	1.300	80	1.500	100	1.500	100	1.500	100	7.180	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase PKK aktif	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan	persen	n/a	n/a	80		85		90		95		100		100		

KETERANGAN

- M Misi
- S Sasaran
- PR Program Prioritas

FLAGSHIP 10 TEKAD PAPUA:

- F1 Gemas Papua
- F2 Berdaya Ekomas Papua
- F3 Infradas Papua
- F4 Perlindungan dan Keberlanjutan Adat Papua
- F5 Kesetaraan Gender dan Kemitraan Papua
- F6 Reformasi Birokrasi Papua
- F7 Mandiri Pangan Papua
- F8 Kampung Mandiri Papua
- F9 Pembangunan Berkelanjutan Papua
- F10 Sukses PON XX Papua

BAB VII

KERANGKA PENDANAN



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan pengembangan suatu skenario penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam jangka menengah untuk pembiayaan program program pembangunan daerah yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan strategis lainnya.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
					RPJMD PAPUA 2019-2023	
A	Kapasitas Riil	7.255.261.423.794	7.617.186.263.819	7.998.045.576.910	8.397.947.855.655	8.817.845.498.338
B	Penggunaan Kapasitas Riil					
B.1.	Prioritas I					
	Belanja Langsung Program Prioritas untuk pencapaian visi dan misi Daerah Tahun 2019-2023	6.430.049.506.775	6.782.667.977.702	7.169.619.560.589	7.664.855.849.333	7.997.844.012.015
B.2.	Prioritas II					
02.01	Belanja Langsung 6 Program Rutin pada seluruh Perangkat Daerah	825.211.915.000	834.518.284.098	828.426.014.300	733.092.004.300	820.001.484.300

Tabel 7.2 Pengalokasian Pendanaan Program Prioritas Menurut Urusan Kewenangan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan	2019	2020	2021	2022	2023
I	Program Rutin Seluruh Perangkat Daerah	825.212	834.518	828.426	733.092	820.001
II	Program Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah	6.430.050	6.782.668	7.169.620	7.664.856	7.997.844
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	350.389,00	345.550,79	449.364,00	449.364,00	462.864,00
2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	731.628	921.432	922.504	929.364	956.604
	• Dinkes	163.113	161.813	170.124	170.624	171.624
	• RSUD Jayapura	336.543	435.521	409.450	421.260	434.900
	• RSUD Abepura	189.465	272.000	284.000	277.000	288.500
	• Rumah Sakit Jiwa	42.506	52.098	58.930	60.480	61.580
3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.150.582	1.176.518	2.056.329	2.439.848	2.551.929
4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	23.300	25.500	630.500	635.500	640.500
5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.106	31.468	31.561	33.223	39.132
	KesbangPol	5.100	12.700	11.775	11.975	16.500
	Satpol PP	10.006	18.768	19.786	21.248	22.632
6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	22.850	27.250	27.500	28.250	27.500
7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	11.000	9.925	11.500	10.775	11.625
8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.907	6.877	6.580	6.715	6.030
9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	24.600	26.500	28.200	29.950	32.750
10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	1.113	1.550	1.571	1.550	2.200
11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	28.800	28.800	30.100	33.100	36.100

No	Bidang Urusan Pemerintahan	2019	2020	2021	2022	2023
12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.050	4.950	4.950	4.950	4.950
13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.980	11.750	12.950	13.950	14.950
14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	270.174	398.482	612.504	599.534	648.734
16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	60.346	53.500	52.000	54.500	57.000
17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.292	26.086	24.917	24.802	26.249
18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	13.100	17.700	22.450	21.200	22.950
19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	2.173.240	1.641.818	143.756	140.097	151.547
20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	18.400	20.850	23.950	23.950	44.650
23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	2.157	2.298	2.548	2.298	3.548
24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	780	800	880	880	880
25	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	34.695	61.320	65.350	69.845	66.510
26	Urusan Pilihan Pariwisata	14.291	18.650	18.700	18.850	19.650
27	Urusan Pilihan Pertanian	120.060	129.934	143.284	127.265	147.330
	• Sub Urusan Pertanian Tanaman Pangan	44.624	62.900	63.000	63.100	63.100
	• Sub Urusan Perkebunan	45.213	28.098	44.434	28.315	49.180
	• Sub Urusan Peternakan	30.223	38.936	35.850	35.850	35.050
28	Urusan Pilihan Kehutanan	92.403	89.732	90.768	97.703	101.045

No	Bidang Urusan Pemerintahan	2019	2020	2021	2022	2023
29	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	135.886	254.250	229.900	232.400	234.100
30	Urusan Pilihan Perdagangan	11.190	26.520	20.820	20.870	20.870
31	Urusan Pilihan Perindustrian	10.192	14.472	14.472	15.530	23.580
32	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	962.628	1.283.346	1.360.466	1.462.555	1.513.678
	• Sub Urusan Sekretariat Daerah	424.587	668.711	707.032	808.187	854.962
	• Sub Urusan Sekretariat DPRD	300.000	351.071	351.071	351.071	351.071
	• Sub Urusan Penghubung Daerah	734	734	734	734	734
	• Sub Urusan Sekretariat MRP	200.000	210.000	246.000	246.000	246.000
	• Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.307	44.980	45.630	45.564	45.912
	• Sub urusan Penanggulangan Bencana Daerah	8.000	7.850	10.000	11.000	15.000
33	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	18.797	23.374	24.757	26.121	27.356
34	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	28.500	25.300	24.970	28.200	20.150
35	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	38.264	47.448	49.617	53.615	51.682
	Sub Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.079	29.487	29.577	29.670	29.762
	Sub Urusan Pendapatan Daerah	10.185	17.961	20.040	23.945	21.920
36	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	18.332	18.332	18.332	18.332	18.332
37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	5.120	5.486	6.670	4.870	5.970
III	Total Anggaran Belanja Langsung Program	7.255.261	7.617.186	7.998.046	8.397.948	8.817.845

7.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program pembangunan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang pelaksanaan janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan prioritas pembangunan nasional, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah serta program-program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	90,43	92,27	0	94,14	1.000	96,06	1.000	98,01	1.000	100	1.000	100	4.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	89	40	1.388	43,51	1.500	47,33	1.500	51,48	1.500	56	15.000	56	20.888	
PR (F1)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	79,83	80,84	1500	81,86	1500	82,89	1500	83,94	1500	85	1500	85	7.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	56,76	57,39		58,03		58,68		59,34		60		60		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0,49	0,43		0,37		0,33		0,29		0,25		0,25		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1,17	1,14		1,1		1,07		1,03		1		1		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	23,59	24,75		25,97		27,25		28,59		30		30		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	23,49	24,67		25,91		27,21		28,57		30		30		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24,33	24,46		24,6		24,73		24,86		25		25		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	17,91	19,15		20,47		21,88		23,39		25		25		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	184,04	187,12		190,26		193,45		196,7		200		200		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	196,73	197,38		198,03		198,69		199,34		200		200		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	94	96		98		100		100		100		100		
		Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	n/a	85	1.500	88,52	1.500	92,2	1.500	96,02	1.500	100	1.500	100	7.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	n/a	2,15		1,7		1,35		1,07		0,85		0,85		
		Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	n/a	1,22		0,82		0,55		0,37		0,25		0,25		
PR (F1)	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	34,83	48,97	37.500	60,27	38.367	75,33	50.000	85	50.000	100	50.000	100	225.867	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	n/a	65		80		100		100		100		100		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0,84	0,76		0,68		0,61		0,55		0,5		0,5		
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	34,82	35,8		36,81		37,84		38,9		40		40		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	14,62	16,27		18,12		20,17		22,46		25		25		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	250,47	239,45		228,91		218,84		209,21		200		200		
		Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	n/a	35	37.500	40,05	38.367	45,83	50.000	52,44	50.000	60	50.000	60	225.867	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	n/a	200		200		200		200		200		1000		
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	74,95	75,93	10.657	76,93	10.657	77,94	40.000	78,96	40.000	80	40.000	80	141.313	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	persen	90,24	91,17		92,12		93,07		94,03		95		95		
		Jumlah PKBM aktif	unit	398	411		420		434		443		448		448		
		Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	n/a	45	10.657	48,36	10.657	51,96	40.000	55,84	40.000	60	40.000	60	141.314	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Program Pendidikan Luar Biasa	APK peserta didik SLB tingkat SD (orang)	persen	n/a	20	580	50	0	80	1.000	100	1.000	100	1.000	100	3.580	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		APK peserta didik SLB tingkat SMP (orang)	persen	n/a	20		50		80		100		100		100		
		APK peserta didik SLB tingkat SMA (orang)	persen	n/a	20		50		80		100		100		100		
		Cakupan jenis pelayanan SLB terhadap penduduk penyandang disabilitas	jenis	2	2		2		3		3		3		3		
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki SLB yang terakreditasi	kab./kota per tahun	1	1		1		1		1		1		5		
		Persentase lulusan SLB yang terserap dalam lapangan pekerjaan	persen	50	52		55		57		60		65		65		
PR (F1)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	71,42	72,13	24.107	72,83	24.139	73,55	45.000	74,27	45.000	75	45.000	75	183.246	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	62,95	66,04		69,28		72,68		76,25		80		80		
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	80,81	81,63		82,46		83,3		84,15		85		85		
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	76,28	77,58		78,9		80,24		81,61		83		83		
		Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	76,43	77,89		79,37		80,89		82,43		84		84		
		Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	61,56	63,16		64,81		66,49		68,22		70		70		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	46,67	48,4		50,2		52,06		54		56		56		
PR (F1)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	2,5	5	100.000	7	94.442	10	94.442	15	94.442	20	94.442	20	477.767	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	10	2		2		4		4		5		17		
		Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	18,68	23,27		28,98		36,1		44,96		56		56		
		Cakupan PBM Sekolah yang disupervisi dan dimonitoring	persen	75,38	71,03		66,93		63,07		59,43		56		56		
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	n/a	250	20.000	250	19.727	250	19.727	250	19.727	250	19.727	1250	98.908	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	795	903		1025		1164		1322		1500		1500		
		Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit per tahun	n/a	10		10		10		10		10		50		
		Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	3,59	4,40		5,40		6,64		8,15		10,00		10,00		
		Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	11,78	13,09		14,56		16,18		17,99		20,00		20,00		
		APM pendidikan khusus	persen	n/a	10,00		10,52		11,07		11,64		12,25		12,25		
PR (F1)	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	32,67	35,57	105.000	38,73	103.695	42,17	103.695	45,92	103.695	50	103.695	50	519.782	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	n/a	2		2		2		2		2		10		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	Cakupan Mahasiswa Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	86,59	88,21	0	89,86	0	91,54	0	93,26	0	95,00	0	95,00	0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Cakupan Mahasiswa Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	61,56	63,16		64,81		66,49		68,22		70,00		70,00		
		Cakupan Mahasiswa Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	52,23	54,57		57,01		59,56		62,22		65,00		65,00		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	21,14	21,86		22,61		23,38		24,17		25,00		25,00		
2	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN																
	Sub Urusan Dinkes																
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	80	82	11.108	70	11.108	80	11.108	90	11.108	90	11.108	90	55.539	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Persentase Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) yang diawasi	persen	n/a	58		68		78		88		100		100		
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	9,59	12,04	1.542	15,13	1.542	19,01	3.000	23,88	3.500	30	4.500	30	14.084	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	6,45	7,13		7,88		8,7		9,61		10,62		10,62		
		Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	102,05	110,22		119,05		128,58		138,88		150		150		
		Cakupan kabupaten/kota UKBM yang terpetakan	persen	n/a	50		55		60		65		70		70		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	persen	n/a	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	persen	n/a	90		90		90		90		90		90		
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	n/a	10	550	10	550	15	2.000	20	2.000	25	2.000	25	7.099	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	n/a	25	438	25	438	30	700	35	700	40	700	40	2.977	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari	kcal	2144,84	2175,01	3.092	2205,61	3.092	2236,63	3.092	2268,1	3.092	2300	3.092	2300	15.461	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	23,3	27,14		31,62		36,84		42,92		50		50		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	48,44	52,14		56,12		60,41		65,03		70		70		
PR (F1)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	34,12	35,22	556	36,36	556	37,54	556	38,75	556	40	556	40	2.779	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	39,52	40,61		41,72		42,87		44,04		45,25		45,25		
PR (F1)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	API Malaria	persen	51,35	44,69	11.159	38,89	9.859	33,85	15.000	29,46	15.000	25,64	15.000	25,64	66.018	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	56,3	50,48		45,27		40,59		36,4		32,64		32,64		
		Tingkat prevalensi DBD	persen	86,37	80,5		75,03		69,93		65,17		60,74		60,74		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	39,83	37,78		35,83		33,98		32,23		30,57		30,57		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	11,7	11,1		10,53		10		9,48		9		9		
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	45,36	42,86		40,5		38,28		36,17		34,18		34,18		
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	n/a	10		15		20		25		30		30		
		Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB	persen	n/a	65		75		85		95		100		100		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kab./kota	6	7	510	9	510	12	510	14	510	16	510	16	2.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	n/a	25		20		15		10		5		5		
		Unmeet need pelayanan kesehatan	persen	2,93	3,26		3,63		4,04		4,49		5		5		
PR (F1)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	62,15	62,71	2.660	63,27	2.660	63,84	2.660	64,42	2.660	65	2.660	65	13.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	persen	10,02	8,89		7,88		6,99		6,2		5,5		5,5		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	31,35	29,96		28,64		27,37		26,16		25		25		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1,38	1,18		1,02		0,88		0,76		0,65		0,65		
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	n/a	20		20		25		25		40		40		
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 kh	7,13	6,35		5,66		5,04		4,49		4		4		
		Rasio posyandu yang aktif	persen	64,6	65,64		66,71		67,79		68,88		70		70		
		Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	49,4	49,91		50,42		50,94		51,47		52		52		
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	46,95	47,92		48,91		49,92		50,95		52		52		
		Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	n/a	40	1330	46,01	1330	52,92	1330	60,86	1330	70	1330	70	6.650	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	Persentase lansia yang memiliki dan memanfaatkan Jaminan Kesehatan	persen	n/a	35	660	40	660	45	660	55	660	55	660	55	3.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kh	6,38	5,81	450	5,29	450	4,82	450	4,39	450	4	450	4	2.250	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	259,08	232,25		208,21		186,65		167,32		150		150		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	43,6	46,47		49,54		52,81		56,29		60		60		
		Cakupan pelayanan nifas	persen	37,19	38,64		40,14		41,7		43,32		45		45		
		Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	n/a	25	750	28,12	750	31,62	750	35,57	750	40	750	40	3.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan
		Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	n/a	60		63,44		67,08		70,93		75		75		
PR (F1)	Program Kebijakan dan Manajemen	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	27,59	34,92	4.720	44,2	4.720	55,95	4.720	70,83	4.720	89,66	4.720	89,66	23.600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Pembangunan Kesehatan																Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	60	60		65		65		70		75		75		
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	n/a	70	78.841	75	78.841	80	78.841	90	78.841	100	78.841	100	394.207	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	36,68	38,21		39,81		41,47		43,2		45		45		
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	persen	6,9	13,79		20,69		27,59		34,48		41,38		41,38		
PR (F1)	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	21	21	28.541	22	28.541	24	28.541	25	28.541	27	28.541	27	142.705	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit	5	5		5		6		6		8		8		
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	25	25,77		26,57		27,39		28,23		29,1		29,1		
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	1,41	1,78		2,24		2,83		3,57		4,5		4,5		
		Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	25,06	26,02		27,02		28,05		29,13		30,25		30,25		
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,05	1,08		1,11		1,14		1,17		1,2		1,2		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	n/a	250		250		-		-		-		250		
	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	70	75	12.061	80	12.061	85	12.061	90	12.061	90	12.061	90	60.305	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	85	85	3.245	90	3.245	90	3.245	95	3.245	95	3.245	95	16.225	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	n/a	40	800	43	800	50	800	55	800	60	800	60	4000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	1	2		2		3		3		4		4		
		Cakupan rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	56	57		58		59		59		60		60		
	RSUD Jayapura																
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60	19.118	65	20.000	70	20.000	75	20.000	80	20.000	80	99.118	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Cakupan advokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat	persen	0	45	600	47	1.750	50	1.750	55	1.750	60	1.750	60	7.600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Jayapura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60	10.591	65	8.671	70	6.600	80	7.190	100	8.488	100	41.540	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Peningkatan Sarana	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD	persen	n/a	80	177.782	80	200.000	85	200.000	90	200.000	100	200.000	100	977.782	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Jayapura)	Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal															Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Jayapura)	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura	persen	n/a	60	13.620	65	55.700	70	22.900	75	24.440	80	26.134	80	142.794	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (RSUD Jayapura)	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	n/a	60	426	65	0	65	0	70	0	75	0	75	426	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program upaya kesehatan perorangan (RSUD Jayapura)	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	n/a	70	114.006	75	149.000	80	157.800	90	167.480	100	178.128	100	766.414	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	35,21	38,21		39,81		41,47		43,2		45		45		
PR (F1)	Program Sumber Daya Kesehatan (RSUD Jayapura)	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	25,06	26,02	400	27,02	400	28,05	400	29,13	400	30,25	400	30,25	2000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,05	1,08		1,11		1,14		1,17		1,2		1,2		
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	n/a	250		250		-		-		-		250		
	RSUD Abepura																

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Abepura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60	55.463	65	60.000	70	70.000	75	70.000	80	70.000	80	325.463	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)
PR (F1)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Abepura)	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	60	65	8.000	70	8.000	75	9.000	85	1.000	90	11.000	90	37.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60		65		70		80		80		80		
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Abepura)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	n/a	95	122.502	95	200.000	95	200.000	95	200.000	95	200.000	95	922.502	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSUD Abepura)	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata	unit	n/a	6	3.500	6	4.000	6	5.000	6	6.000	6	7.500	6	26.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)
	Rumah Sakit Jiwa																
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (RSJ)	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	12,6	15,87	50	20	50	25,2	50	31,75	50	40	50	40	250	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSJ)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	n/a	80	22.242	80	26.023	85	30.500	85	30.750	85	29.950	85	139.464	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (RSJ)	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata	unit	n/a	5	75	5	75	10	80	10	80	10	80	10	390	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
PR (F1)	Program upaya kesehatan perorangan (RSJ)	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	n/a	70	9.075	75	10.750	80	11.900	90	12.150	100	13.500	100	57.375	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	35,21	38,21		39,81		41,47		43,2		45		45		
		Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	persen	n/a	60		65		70		75		80		80		
	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (RSJ)	Persentase ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) peserta konseling yang terpulihkan	persen	n/a	60	11.064	65	15.200	70	16.400	75	17.450	80	18.000	80	78.114	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)
3	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	n/a	20	520.660	20	465.392	20	503.313	20	844.878	20	953.104	100	3.287.348	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan yang fungsional	m'	n/a	500		500		500		500		500		2500		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase genangan air permukaan yang dapat turun	persen	n/a	85	10.000	85	30.000	90	120.000	90	120.000	90	120.000	90	400.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase turap/talud/brojong yang berfungsi baik dalam mencegah longsor di tebing jalan /sungai	persen	n/a	90	23.000	95	25.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	348.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	n/a	34	60.000	38	60.000	40	200.000	45	200.000	50	200.000	55	720.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	persen	n/a	40		45		50		55		60		60		
PR (F2)	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	n/a	1000	20.000	2.000	20.000	3.000	100.000	4.000	100.000	5.000	100.000	39.600	340.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen	n/a	75		80		85		90		95		95		
		Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	46,82	49,2		51,7		54,33		57,1		60		60		
		Cakupan layanan air bersih	persen	48	50		52		54		56		60		60		
		Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lokasi	n/a	20		20		20		20		20		100		
		Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	n/a	40		50		60		70		80		80		
PR (F3)	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Cakupan keterlayanan air baku	persen	n.a	30	1.000	35	2.000	40	5.000	45	7.000	50	9.000	50	24.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PR (F3)	Program Pengembangan	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	40,19	41,98	100.000	43,86	100.000	45,82	100.000	47,86	100.000	50	100.000	50	500.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah																Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum	persen	n.a	50		70		90		100		100		100		
		Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	persen	70,86	72,6		74,38		76,21		78,08		80		80		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	n.a	25		50		75		100		100		100		
PR (F3)	Program Pengendalian Banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	n/a	30	10.000	35	0	40	150.000	45	200.000	50	200.000	50	560.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	n/a	50		55		60		65		70		70		
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	persen	n/a	30	30.000	35	0	40	200.000	45	200.000	50	200.000	50	630.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	persen	n.a	45	11.422	-	0	-	0	55	100.000	70	100.000	70	211.422	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	n/a	10	350.000	20	463.526	20	533.190	20	425.000	30	425.000	100	2.196.716	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq	n/a	30		30		30		30		30		150		
	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	n/a	60	10.000	65	10.000	70	44.225	75	42.369	80	44.225	80	150.820	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	dan Penataan Ruang
PR (F9)	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	dokumen	n.a	1	2.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1	2.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	Cakupan pembinaan dan pengembangan konstruksi	persen	n.a	80	1.000	-	0	-	0	-	0	-	0	80	1.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan pelaksanaan pemanfaatan ruang	persen	n.a	100	900	-	0	-	0	-	0	-	0	100	900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PR (F9)	Program pendalaian dan pemanfaatan ruang	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	n.a	80	600	85	600	90	600	95	600	100	600	100	3.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
PR (F3)	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak huni yang terbangun	unit	n/a	356	0	3.000	0	3.000	400.000	3.000	400.000	3.000	400.000	12.356	1.200.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	n/a	60		65		70		75		80		80		
		Persentase penduduk relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	n/a	30	0	32,24	0	34,64	200.000	37,22	200.000	40	200.000	40	600.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
PR (F3)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase penduduk yang terakses lingkungan sehat	persen	n/a	50	6.300	50	7.000	50	7.000	50	7.000	50	7.000	50	34.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	30	30		35		40		45		50		50		
	Program Pemberdayaan komunitas perumahan	Komunitas perumahan yang diberdayakan	komunitas per tahun	n/a	5	13.500	5	15.000	5	20.000	5	25.000	5	30.000	25	103.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	unit per tahun	n/a	50	3.500	50	3.500	50	3.500	50	3.500	50	3.500	250	17.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	n/a	40		60		80		100		100		100		
5	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	Sub Urusan Kembangpol																
	Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kembangpol)	Jumlah konflik horisontal	kasus	10	10	0	6	1.775	6	1.775	2	1.900	2	1.900	2	7.350	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	urusan Kesbangpol)
		Cakupan penegakan Perda	persen	80	80		90		100		100		100		100		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
PR (F5)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali per tahun	n/a	2	750	2	4.075	2	4.050	2	3.800	2	3.800	10	16.475	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
		Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang per tahun	n/a	250		250		250		250		250		1.250		
		Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali per tahun	n/a	5		5		5		5		5		25		
		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	n/a	2	500	2	1.500	2,25	1.500	2,5	1.500	3	1.500	3	6.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
		Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	20	20		30		30		40		50		50		
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) (Kesbangpol)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	65	70	1.350	75	1.350	80	1.350	85	1.350	85	1.350	85	6.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Usuran Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	urusan Kesbangpol)
PR (F5)	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	n/a	3	2.000	3	3.075	5	2.150	5	2.475	10	7.000	10	16.700	Usuran Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	n/a	70		75		80		85		90		90		
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	n/a	75		-		-		-		-		75		
PR (F5)	Program Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	n/a	80	500	80	925	85	950	85	950	90	950	90	4.275	Usuran Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Sub Urusan Polisi Pamong Praja																
	Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Satpol PP)	Jumlah konflik horisontal	kasus	10	10	1.404	6	4.554	6	4.821	2	5.179	2	5.672	2	21.630	Usuran Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
		Cakupan penegakan Perda	persen	80	80		90		100		100		100		100		
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	9,99	11,48		13,19		15,15		17,41		20		20		
		Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	2,59	2,22		1,9		1,63		1,4		1,2		1,2		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	40	45	4.751	50	6.216	55	6.378	60	6.740	65	6.976	65	31.061	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
		Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	65,67	67,97		70,35		72,81		75,36		78		78		
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) (Satpol PP)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	65	70	790	75	2.335	80	2.507	85	2.782	85	2.990	85	11.404	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Satpol PP)	Prosentase Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana	persen	n/a	85	783	90	1.716	95	1.800	100	2.031	100	2.251	100	8.581	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)
		Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	n/a	60		65		70		75		80		80		
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	n/a	2		2		2		2		2		2		
		Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	n/a	80		80		90		90		100		100		
		Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	n/a	20		25		30		35		40		40		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	persen	n/a	10	2.278	10	3.947	10	4.280	10	4.516	10	4.743	10	19.763	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)
		Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	28	32		36		40		45		50		50		
		Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	40	45		50		55		60		65		65		
6	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIA																
PR (F1)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase KAT yang mandiri	persen	n/a	25	11.150	30	11.650	35	11.650	40	11.650	45	11.650	50	57.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	n/a	40		45		50		55		60		60		
		Persentase PMKS yang tertangani	persen	n/a	30		35		40		45		50		50		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	28,51	32,51		37,08		42,29		48,23		55		55		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	n/a	200		200		200		200		200		1.000		
		Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	n/a	70		75		80		85		90		90		
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	n/a	65		70		75		80		85		85		
		Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
PR (F1)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	n/a	30	1.550	35	1.550	40	1.800	45	1.800	50	2.200	50	8.900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	n/a	15		20		25		30		35		35		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah kelembagaan sosial masyarakat yang aktif	Kelompok	n/a	20	3.750	25	4.450	30	5.700	35	6.450	40	7.200	45	27.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Keluarga miskin	persen	n/a	50		60		70		80		90		90		
		Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	9	12		15		18		21		24		24		
		Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	n/a	250	900	250	3.250	250	1.800	250	1.800	250	1.800	1250	9.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
PR (F1)	Pelayanan Kesejahteraan	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang	orang	n/a	50	4.850	50	5.350	50	5.550	50	5.550	50	5.550	250	26.850	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Sosial Berbasis Panti	mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial															
		Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	n/a	250		250		250		250		250		1.250		
		Cakupan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	n/a	30		35		40		45		50		50		
		Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	n/a	60		65		70		75		80		80		
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas perencanaan kesejahteraan sosial	persen	n/a	70	650	75	1.000	80	1.000	85	1.000	90	1.000	90	4.650	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
		Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	n/a	2		2		2		2		2		10		
7	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA																
PR (F1)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	n/a	80	1.500	85	1.350	90	2.150	95	2.150	100	2.600	100	9.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	n/a	2		2		2		2		2		10		
		Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	n/a	80	2000	80	2000	85	2.000	85	2.000	90	2.000	10000	10.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	n/a	25		25		30		40		50		50		
		Persentase kenaikan UMP	persen	n/a	1,5		1,5		2,3		3,5		4		4		
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	n/a	30		35		40		50		60		60		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	77,44	77,95	5.150	78,46	4.225	78,97	4.650	79,48	4.275	80	4.325	80	22.625	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Tingkat pengangguran terbuka	persen	2,91	2,7		2,5		2,32		2,16		2		2		
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen	n/a	40	1.350	45	1.350	50	1.350	55	1.350	60	1.350	60	3.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	n/a	60		65		70		75		80		80		
	Program Peningkatan Kinerja Organisasi	Persentase peningkatan kinerja organisasi ketenagakerjaan	persen	n/a	60	150	70	150	80	150	90	150	100	150	100	750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pertumbuhan ekonomi wilayah transmigrasi	persen	n/a	5,50	300	5,60	300	5,70	300	5,80	300	5,90	300	6,00	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah transmigran lokal yang ditempatkan	orang	n/a	500	550	500	550	500	900	500	550	500	900	2500	3.450	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
8	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan	persen	n/a	80	250	85	300	90	300	95	300	100	30	100	1.180	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Prosentase pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan	persen	n/a	50		65		80		95		100		100		
PR (F5)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Proporsi perempuan di Legislatif	persen	12,73	20	1.100	20	2.427	20	2.080	20	2.365	20	1.970	20	9.942	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Cakupani perempuan yang berada di posisi pimpinan	per 100 laki-laki	10	10		15		20		25		30		30		
		Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	kasus	80	66		54		44		36		30		30		
		Persentase kasus Trafficking dan Eksploitasi anak	persen	4,9	3		2		1		1		1		1		
PR (F5)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	per 1000 perempuan	46,68	43	1.436	39	1.550	36	1.600	33	1.450	30	1.430	30	6.030	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Implementasi kebijakan yang responsif gender	persen	n/a	60		70		80		90		100		100		
		Persentase Posyandu Aktif	persen	87,19	89		90		92		93		95		95		
		Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	persen	n/a	70		80		90		100		100		100		
PR (F5)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan (urusan pemberdayaan	Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	orang	n/a	150	3.121	150	2.600	150	2.600	150	2.600	150	2.600	750	13.521	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	perempuan dan perlindungan anak dan KB)																Keluarga Berencana
		Persentase PKK aktif	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	orang	n/a	150		150		150		150		150		750		
9	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN																
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	n/a	20	10.800	14,14	11.500	10	12.250	7,07	12.975	5	14.325	5	61.850	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	15	15	10.800	15	11.500	20	12.250	20	12.975	25	14.325	25	61.850	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	56,08	52,41		48,99		45,79		42,8		40		40		
		Skor PPH	skor	88,43	89,26		90,1		90,95		91,81		92,67		92,67		
	Program Peningkatan Diversifikasi Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	15	15	3.000	15	3.500	20	3.700	20	4.000	25	4.100	25	18.300	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Skor PPH	skor	88,43	89,26		90,1		90,95		91,81		92,67		92,67		
10	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN																
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Terbangunnya sistem penataan pertanahan	persen	n/a	20	350	25	450	30	500	45	750	50	1.000	50	3.050	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanian
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tingkat ketertiban penataan pertanahan	persen	n/a	40	263	45	450	50	346	50	150	55	475	55	1.684	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	n/a	20		30		40		50		60		60		
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	n/a	60	500	65	650	70	725	75	650	80	725	80	3.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
11	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP																
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	persen	9,38	10	300	10	300	20	300	30	300	40	300	40	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota	lokasi	n/a	-		-		1		1		1		1		
		Cakupan pengelolaan sampah di kawasan strategis dan perkotaan	persen	n/a	20		30		40		45		50		50		
PR (F9)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	n/a	20	17.750	20	17.750	20	19.000	20	22.000	20	25.000	100	101.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	n/a	20/5		40/8		50/10		50/10		50/10		50/10		
		Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	5,57	4,54		3,7		3,01		2,45		2		2		
		Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	n/a	60		65		70		75		80		80		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	lokasi per kab/kota	n/a	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	5	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	n/a	12	2.750	12	2.750	12	2.750	12	2.750	12	2.750	60	13.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di kawasan kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi per kab/kot a	n/a	1	1.050	1	1.050	1	1.050	1	1.050	1	1.050	5	5.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
PR (F9)	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	n/a	60	2.550	65	2.550	70	2.550	75	2.550	80	2.550	80	12.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	n/a	20		25		30		35		40		40		
		Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	n/a	30		35		40		45		50		50		
PR (F9)	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	12	12	3.600	12	3.600	12	3.650	16	3.650	20	3.650	20	18.150	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	2	0		1		1		2		2		5		
PR (F9)	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terfasilitasi kegiatan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persen	n/a	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100	2.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
12	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
PR (F6)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	3.600	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	21.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	67,42	70,75		74,24		77,90		81,75		85,78		85,78		
		Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	31,91	34,28		36,83		39,57		42,51		45,67		45,67		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	45,77	47,54		49,38		51,29		53,28		55,34		55,34		
		Persentase pasangan berakte nikah	persen	40	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		
	Program Pembinaan Kependudukan	Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan kependudukan	persen	n/a	20,00	450	20,00	450	20,00	450	20,00	450	20,00	450	100,00	2.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
	Program Pengembangan data/informasi	Persentase pengembangan data/informasi pemberdayaan masyarakat kampung	persen	n/a	60	2.900	70	3.000	80	3.100	90	3.200	100	3.300	100	15.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
PR (F8) (F4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Cakupan pemberdayaan masyarakat kampung	kegiatan	n/a	6	3.100	6	3.350	6	4.000	6	4.650	6	5.300	6	20.400	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	n/a	25		30		35		40		45		45		
		Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	kampung	n/a	10		10		10		10		10		50		
		Persentase kampung tertinggal	persen	87,12	84,55		82,05		79,63		77,28		75		75		
		Persentase kampung mandiri	persen	10	2		2		4		4		5		17		
PR (F8)	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas	persen	n/a	35	2.800	45	3.100	65	3.350	85	3.600	100	3.850	100	16.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Distrik dan Kampung	kelembagaannya di distrik dan kampung															Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	n/a	10		10		10		10		10		50		
		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	n/a	10		15		20		25		30		30		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	persen	n/a	70	800	80	1.000	90	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
PR (F5)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan (urusan pemberdayaan masyarakat desa)	Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	persen	n/a	40	1.380	60	1.300	80	1.500	100	1.500	100	1.500	100	7.180	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase PKK aktif	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
14	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	11,7	11,1	0	10,53	300	10	300	9,48	300	9	300	9	1.200	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	n/a	25		20		15		10		5		5		
	Program penyiapan tenaga pendamping	Cakupan kampung KB	persen	n/a	20	0	25	300	30	300	35	300	40	300	40	1.200	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	kelompok bina keluarga																Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	n/a	30		30		30		30		30		150		
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	n/a	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	500	6.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen	3,26	3	1.000	3	1.000	2,8	1.000	2,5	1.000	2,25	1.000	2,25	5.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	60	60		65		70		75		80		80		
15	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN																
PR (F3)	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan integrasi antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat	1	1	9.894	2	48.421	2	62.950	3	15.800	3	65.000	3	202.066	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
PR (F3)	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	20	20	375	25	750	30	550	35	550	40	550	40	2.775	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	200	180		160		140		120		100		100		
	Program peningkatan	Tersedianya angkutan untuk pelayanan transportasi	unit	n.a	4	5.670	14	8.841	18	2.450	20	2.450	22	2.450	22	21.861	Urusan Wajib Bukan Pelayanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	pelayanan angkutan																Dasar Perhubungan
PR (F3)	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	7	1	250.000	1	334.835	1	545.820	1	580.000	1	580.000	5	2.290.655	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	5	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	6	-		-		1		-		1		2		
		Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	3	2		2		2		2		2		10		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	5	5		6		6		7		7		7		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	n.a	2,5		3		3,50		4		4,5		4,5		
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	n.a	60	4.000	65	5.151	70	200	75	200	80	200	80	9.751	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah balai/alat pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi	unit	n.a	1	234	1	234	1	234	1	234	1	234	1	1.172	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji petik	unit	n.a	100		120		130		140		150		150		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	persen	n.a	100	0	100	250	100	300	100	300	100	300	100	1.150	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
16	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
PR (F3) (F10)	Program Pengembangan Komunikasi, Media Massa	Meningkatnya Komunikasi dan Informasi melalui Media Massa	media	n/a	2	8.139	2	2.298	2	2.883	2	3.469	2	4.054	2	20.843	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Informasi dan Media Massa																Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya pengembangan komunikasi dan informasi di Lingkungan Pemda	media	n/a	1		1		1		1		1		1		
		Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	17,05	17,6	5.000	18,17	5.000	18,76	5.000	19,37	5.000	20	5.000	20	25.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	n/a	50	100	3.200	5.000	-	0	-	0	-	0	3.200	5.100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase SDM Aparatur yang memahami IT	persen	n.a	40	500	50	1.000	60	2.000	70	2.000	80	2.000	80	7.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT	kelompok	n.a	2		4		5		6		7		8		
		Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	n.a	60		65		70		75		80		80		
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil pembangunan	kerjasama per tahun	n/a	5	6.320	5	3.152	5	3.302	5	3.452	5	3.602	25	19.827	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Cakupan Layanan PPID	persen	20	20		40		50		50		70		70		
PR (F6)	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	n/a	10	40.287	10	37.051	20	38.815	20	40.580	40	42.344	40	199.076	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	n/a	20		25		30		35		40		40		
17	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terlaksananya penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah	kegiatan per tahun	n/a	1	0	1	900	1	900	1	900	1	900	5	3.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PR (F2)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru	persen	n/a	7	6.512	14	9.495	21	8.450	28	7.205	35	7.550	35	39.212	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	persen	n/a	25	3.452	25	4.825	25	4.150	25	4.525	25	4.850	25	21.802	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT)	persen	n/a	30	6.328	35	10.866	40	11.417	45	12.172	50	12.949	50	53.730	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah kelompok pra koperasi yang akan difasilitasi menjadi koperasi	unit	n/a	10		10		10		10		10		50		
18	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL																
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Papua	perusahaan	n/a	50	3.900	104	6.700	158	7.200	212	7.700	272	8.200	272	33.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
		Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	6,5	7		7		7,50		7,50		7,50		8		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	n/a	15		20		25		30		35		35		
		Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	n/a	5		5		5		5		5		25		
		Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	n/a	40		50		60		70		80		80		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Proporsi biaya transaksi dalam total investasi	persen	n/a	5	1.500	3	1.700	2	4.900	2	2.100	1	2.300	1	12.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
PR (F2)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	60	40	3.700	30	4.300	20	4.650	10	5.000	10	5.350	10	23.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
		Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	skor	65	67		68		70		72		74		77		
	Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Pertumbuhan nilai investasi	persen	n/a	7	1.000	14	1.100	21	1.200	28	1.300	35	1.400	35	6.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
PR (F2)	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	n/a	65	3.000	70	3.900	75	4.500	80	5.100	85	5.700	85	22.200	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
19	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																
PR (F10)	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang per tahun	n/a	250	5.111	250	5.391	250	5.746	250	6.092	250	6.547	1.250	28.887	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	49	51		53		55		57		59		59		
		Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	20	25		25		30		35		50		50		
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	20	25	1.200	25	1.750	30	1.875	35	1.950	50	2.025	50	8.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
PR (F10)	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	40	40	8.768	40	9.865	50	7.385	50	7.655	50	7.925	50	41.598	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
		Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	n/a	80		85		90		95		95		95		
PR (F10)	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	n/a	20	75.000	20	51.850	30	57.250	30	57.900	40	58.550	40	300.550	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
PR (F10)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	n/a	10	500.000	10	432.081	-	0	-	0	-	0	10	932.081	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	n/a	-		6		-		-		-		6		
		Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	75	100		-		-		-		-		100		
		Cakupan venue berstandar internasional	persen	60	90		100		-		-		-		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Pengembangan Prasarana PON	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	50	100	150.000	100	25.000	-	0	-	0	-	0	100	175.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga	Frekwensi penyelenggaraan even olahraga persiapan PON XX yang berjalan sukses	kali	n/a	5	75.000	-	50.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	5	215.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX/2020	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan PON XX yang ditindaklanjuti	persen	n/a	100	29.261	100	43.925	-	0	-	0	-	0	100	73.186	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional	Jumlah venue PON XX yang berstandar internasional	gedung	n/a	2	300.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	300.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan pembangunan	persen	n/a	25	3.900	30	1.200	35	1.500	40	1.500	45	1.500	45	9.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembinaan Atlit Muda dan Olahraga Prestasi	Persentase atlit muda Pelatda (Pusat Pelatihan Daerah) yang berprestasi nasional	persen	n/a	100	25.000	100	50.000	100	40.000	100	35.000	100	45.000	100	195.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020	Persentase persiapan PON XX	persen	n/a	85	1.000.000	100	970.756	-	0	-	0	-	0	100	1.970.756	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
20	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR STATISTIK																
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Rekomendasi Kajian/Survei Statistik Sektoral yang memenuhi kriteria "layak"	rekomen dasi per tahun	n/a	2	800	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	10	4.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
		Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	70	75		80		85		90		95		95		
		Cakupan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen per tahun	5	5		5		5		5		5		25		
21	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERSANDIAN																
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan persandian daerah	persen	n/a	100	1.800	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	5.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian
22	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN																
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Lembaga Pengelola kekayaan budaya	lembaga	n/a	5	2.000	5	2.150	5	2.150	5	2.150	5	2.150	5	10.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali per tahun	n/a	1		1		1		2		2		7		
		Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah per tahun	3	1		1		1		1		1		5		
		Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali per tahun	5	5		5		7		7		7		31		
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0		0		1		1		2		2		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	40	40		45		45		50		50		50		
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	kerjasama per tahun	n/a	5	4.000	5	5.600	5	5.700	5	5.700	5	5.800	25	26.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	n/a	1	6.400	2	7.100	3	7.100	4	7.100	5	27.700	5	55.400	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pengelolaan keragaman budaya	kegiatan	n/a	2	6.000	2	6.000	3	9.000	3	9.000	3	9.000	13	39.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali per tahun	n/a	1		1		1		1		1		5		
23	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN																
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Standar Nasional yang Dibangun	unit	n/a	0	0	1	500	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	6.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	n/a	85	250	85	250	90	250	90	250	95	250	95	1.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Layanan Perpustakaan umum daerah provinsi secara konvensional dan elektronik	orang per tahun	108991	30.000	1.907	25.000	2.048	25.000	2.298	25.000	2.048	25.000	3.298	130.000	11.600	
24	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEARSIPAN																
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pemenuhan penyelenggaraan kearsipan	dokumen per tahun	n/a	2	330	2	330	2	330	2	330	2	330	10	1.650	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		di Papua pada 7 aspek kearsipan															
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	n/a	70	450	75	470	80	550	85	550	90	550	90	2.570	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
25	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan	kelompok	n/a	4	5.350	8	6.925	12	7.585	16	8.205	20	3.280	20	31.345	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen	n/a	1,25		1,50		1,75		1,80		2		2		
		Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	n/a	8		10		13		13		13		13		
	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Cakupan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam laut	persen	n/a	50	1.000	60	1.000	70	1.000	80	1.000	90	1.000	90	5.000	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
PR (F2)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	kelompok per tahun	n/a	6	2.853	6	11.225	6	12.225	6	14.425	6	14.725	30	55.453	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	ton	118,46	124,19		130,19		136,49		143,08		150		150		
PR (F2)	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	7.499,31	7.596,88	1.083	7.695,71	6.325	7.795,83	7.100	7.897,26	8.175	8.000,00	8.875	8.000,00	31.558	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	60	65	0	70	375	75	430	80	485	85	525	85	1.815	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Persentase meningkatnya penyuluhan perikanan lapangan	persen	n/a	15		25		25		30		30		30		
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kenaikan pemasaran hasil produksi perikanan	persen	n/a	2,5	385	2,5	750	2,75	850	3	950	3	1.000	3	3.935	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	ton	118,46	124,19	4.881	130,19	4.924	136,49	4.895	143,08	4.900	150	4.910	150	24.510	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data perikanan dan kelautan	persen per tahun	n/a	20	1.007	20	650	20	800	20	950	20	1.100	100	4.507	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	39.613,97	41.502,35	1.265	43.480,75	6.546	45.553,46	7.265	47.724,97	7.555	50.000,00	7.895	50.000,00	30.526	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	6976,15	7169,86		7368,95		7573,57		7783,86		8000		8000		
PR (F7)	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	unit per tahun	n/a	2	300	2	600	4	1200	4	1200	8	1200	20	4500	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	n/a	1,20	11715	1,50	12000	2,00	12000	2,25	12000	2,50	12000	2,50	59715	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
PR (F4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	n/a	60	4.856	65	10.000	70	10.000	75	10.000	80	10.000	80	44.856	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	dan Pulau-pulau Kecil																
		Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	Per 1000 nelayan	173	234,99		319,2		433,58		588,95		800		800		
26	URUSAN PILIHAN PARIWISATA																
PR (F10)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	n/a	n/a	2.000	150	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	150	12.000	Urusan Pilihan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	10	10	9.477	12	13.100	12	12.150	15	12.250	15	12.750	15	59.727	Urusan Pilihan Pariwisata
		Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	2	1		1		1		1		1		5		
	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	n/a	10	1.579	10	1.850	10	2.350	10	2.000	10	2.000	50	9.779	Urusan Pilihan Pariwisata
	Program pengembangan kapasitas	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	n/a	50	1.235	50	1.200	50	1.700	50	2.100	50	2.400	250	8.635	Urusan Pilihan Pariwisata
		Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	n/a	10		10		10		10		10		50		
27	URUSAN PILIHAN PERTANIAN																
	Sub Urusan Pertanian Tanaman Pangan																
PR (F7)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok tani	persen per tahun	n/a	20	2.500	20	3.000	20	3.000	20	3.000	20	3.000	100	14.500	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		NTP tanaman pangan	persen	88,45	90,65		92,9		95,21		97,58		100		100		
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	8	8,16	8.250	8,58	8.250	9,03	8.250	9,5	8.250	10	8.250	10	41.250	Urusan Pilihan Pertanian (sub

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	(pertanian/perkebunan)																urusan tanaman pangan)
		Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	n/a	60		60		65		70		75		75		
		Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	2,86	3,06		3,27		3,5		3,74		4		4		
		Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura	persen	10	15		20		25		30		35		35		
		Tingkat swasembada pangan	persen	n/a	25		30		35		40		45		45		
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	n/a	25	4.000	30	4.000	35	4.000	40	4.000	45	4.000	45	20.000	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
		Frekwensi promosi produk pertanian	kali	n/a	2		2		2		2		2		10		
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan teknologi pertanian rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	n/a	10	750	10	2.250	12	2.250	12	2.250	15	2.250	15	9.750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
PR (F2)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman pertanian	kg per hektar	489,26	493,34	3.500	497,46	3.500	501,60	3.500	505,78	3.500	510,00	3.500	510	17.500	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	60	65	7.211	70	15.000	75	15.000	80	15.000	85	15.000	85	67.211	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
	Program Perencanaan Pembangunan (Tanaman Pangan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	1	2.729	1	3.900	1	4.000	1	4.100	1	4.100	5	18.829	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui diklat	persen	n/a	2	12.183	2	15.500	3	15.500	3	15.500	3	15.500	3	74.183	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	n/a	2	3.500	2	7.500	2	7.500	2	7.500	2	7.500	10	33.500	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)
	Sub Urusan Perkebunan																
PR (F7)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan)	Cakupan bina kelompok tani	persen	n/a	20	1.850	20	2.300	20	3.075	20	3.275	20	3.500	100	14.000	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		NTP perkebunan	persen	99,91	99,93		99,94		99,96		99,98		100		100		
		NTP tanaman pangan	persen	88,45	90,65		92,9		95,21		97,58		100		100		
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya produksi perkebunan	Ha	n/a	0	400	100	2.550	100	2.750	200	3.525	200	4.175	200	13.400	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	ton	n/a	100	5.000	200	5.000	200	6.000	250	7.000	300	8.000	300	31.000	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	n/a	25		30		35		40		45		45		
		Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	n/a	2		2		2		2		2		10		
		Persentase hasil produk tanaman pangan lokal berkualitas yang terserap	persen	n/a	5	2.875	5	2.875	10	4.025	10	5.075	15	5.825	15	20.650	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Cakupan kelompok tani lokal pemasok	kelompok	n/a	20		20		20		20		20		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		kebutuhan makanan sektor pertambangan yang berkembang															
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penerapan teknologi perkebunan tepat guna	kegiatan	n/a	1	500	1	575	1	600	1	950	1	1.000	5	3.625	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Ha	n/a	2000	31.554	2.000	26.519	2.200	27.225	2.500	28.230	3.000	28.433	3.000	141.961	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	489,26	493,34		497,46		501,60		505,78		510,00		510		
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	n/a	15	500	25	1.600	25	2.200	30	2.810	30	3.350	30	10.460	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program Perencanaan Pembangunan (Perkebunan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	1	1.984	1	2.240	1	2.455	1	2.430	1	2.445	5	11.554	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Jumlah Sumber Daya Perkebunan yang ditingkatkan kemampuannya	kelompok	n/a	1	325	4	300	4	325	5	325	5	350	5	1.625	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembangkan	bibit	n/a	10000	225	25.000	475	25.000	525	50.000	705	50.000	790	50.000	2.720	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Sub Urusan Peternakan																
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP peternakan	persen	99,91	99,93	1.500	99,94	500	99,96	500	99,98	500	100	500	100	3.500	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	kegiatan	n/a	10	5.250	10	7.500	10	7.550	10	7.600	10	7.850	50	35.750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
		Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	n/a	50		55		60		65		70		70		
PR (F2)	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	persen	n/a	3,5	12.073	3,5	13.536	3,5	13.200	3,5	13.500	3,5	13.700	3,5	66.009	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
		Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	ton	31.277.043	32450255		33667475		34930354		36240603		37600000		37600000		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	30	32	2.900	34	9.250	36	6.250	38	6.250	40	6.250	40	30.900	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan teknologi peternakan tepat guna yang diterapkan	jenis	n/a	10	750	-	0	-	0	-	0	-	0	10	750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
	Program Perencanaan Pembangunan (Peternakan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	1	3.300	1	3.700	1	3.800	1	3.850	1	4.000	5	18.650	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
PR (F7)	Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	10	10	1.550	10	1.550	15	1.550	15	1.550	25	1.550	25	7.750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
	Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh (Peternakan)	Prosentase peningkatan kinerja kelembagaan penyuluh	persen	n/a	20	1.500	25	1.500	25	1.950	30	1.500	50	500	50	6.950	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)
		Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkat kapasitasnya	unit	n/a	10		10		10		10		10		50		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Peningkatan Kelembagaan Petani (Peternakan)	Prosentase peningkatan kinerja kelembagaan petani	persen	n/a	20	1.400	20	1.400	25	1.050	30	1.100	40	700	40	5.650	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan Peternakan)
28	URUSAN PILIHAN KEHUTANAN																
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp milyar	2.120,45	2.191,44	9.450	2.264,81	9.050	2.340,64	9.400	2.419,01	9.450	2.500,00	10.200	2.500,00	47.550	Urusan Pilihan Kehutanan
		Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	n/a	10		10		10		10		10		50		
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	26,41	27,09	18.000	27,79	18.000	28,51	18.000	29,24	18.000	30	18.150	30	90.150	Urusan Pilihan Kehutanan
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	4.641,81	4.761,77		4.884,83		5.011,07		5.140,57		5.273,42		3.000,00		
		Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	5	10		15		20		25		30		30		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7.755.284	7.755.284	21.490	7.755.284	18.919	7.755.284	20.105	7.755.284	21.490	7.755.284	23.232	7.755.284	105.236	Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	n/a	30	5.100	35	5.000	40	4.500	45	5.100	50	5.350	50	25.050	Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan	Jumlah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	unit	17 UPTD, 19 CDK	17 UPTD, 19 CDK	38.363	17 UPTD, 19 CDK	38.763	17 UPTD, 19 CDK	38.763	19 UPTD, 20 CDK	43.663	19 UPTD, 20 CDK	44.113	19 UPTD, 20 CDK	203.665	Urusan Pilihan Kehutanan
		Luasan hutan yang dikelola melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Ha	n/a	660		660		660		720		720		720		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																471.651	
29	URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase hasil dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	n/a	80	1.000	85	1.000	90	1.000	95	1.000	100	1.000	100	5.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	n/a	40		45		50		55		60		60		
		Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	n/a	25		50		75		100		100		100		
		Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	n/a	30		40		50		60		70		70		
	Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Meningkatnya kerjasama aparaturnya pemerintah	persen	n/a	60	700	70	1.800	80	1.800	90	1.800	100	1.800	100	7.900	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
PR (F2)	Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya jumlah investasi di bidang pertambangan dan energi	persen per tahun	n/a	4	400	4	3.000	4	1.450	4	1.450	4	2.150	4	8.450	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
PR (F2)	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	persen	n/a	30	1.604	50	4.200	70	4.200	90	4.200	100	4.200	100	18.404	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	n/a	65		80		90		100		100		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	persen	n/a	50	850	60	3.200	70	3.200	80	3.200	100	3.200	100	13.650	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	n/a	40		50		60		70		80		80		
PR (F3)	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Cakupan ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan	persen	n/a	0	0	15	9.400	20	2.900	25	2.900	30	2.900	35	18.100	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Tingkat elektrifikasi	persen	54,28	55,38		56,5		57,64		58,81		60		60		
		Persentase kampung terakses listrik	persen	45,46	48,05		50,79		53,69		56,76		60		60		
		Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen	n/a	30	0	100	500	-	0	-	0	-	0	100	800	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
	Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan	persen	n/a	50	300	60	1.950	70	1.750	80	1.750	100	1.750	100	7.500	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
	Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	Meningkatnya ketersediaan bbm untuk nelayan	persen	n/a	100	2.935	10	3.800	10	4.850	10	4.850	10	4.850	50	21.285	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	Rp per liter	10.000	10.000		9.800		9.800		9.500		9.500		9.500		
PR (F3)	Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	persen	n/a	0	128.098	5	90.400	10	73.750	15	73.750	20	73.750	20	439.748	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga	n/a	250		500		750		1.000		1.250		1.250		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	n/a	500		1.000		1.500		2.000		2.500		2.500		
		Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	n/a	100		200		300		400		500		500		
	Program Pengembangan ESDM	Tersedianya dokumen sebagai sumber Data	dokumen per tahun	n/a	-	0	10	135.000	10	135.000	10	137.500	10	138.500	40	546.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
PR (F3)	Program Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya ketersediaan air bersih	persen	n/a	50	4.427	52	12.750	54	13.350	56	13.450	60	13.750	60	57.727	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	n/a	125		180		230		300		380		380		
		Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	n/a	n/a	250	432	500	-	0	-	0	-	0	100	750	
30	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN																
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan	Kegiatan	n/a	1	1.800	5	5.250	5	4.300	5	4.350	5	4.350	25	20.050	Urusan Pilihan Perdagangan
		Cakupan penyelesaian permasalahan-pengaduan konsumen	persen	n/a	80		80		85		85		90		90		
		Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
		Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	n/a	250	900	225	3.000	200	2.500	175	2.500	150	2.500	150	11.400	
		Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga	persen	12,94	13,37		13,82		14,28		14,76		15,25		15,25		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terlaksanannya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	kegiatan per tahun	n/a	1	400	1	10.480	1	6.230	1	6.230	1	6.230	5	29.570	Urusan Pilihan Perdagangan
		Prosentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	persen	n/a	0		40		60		80		100		100		
		Prosentase Meningkatnya Wirausaha baru dan UMKM yang kompetitif	persen	n/a	0		40		60		80		100		100		
		Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2.147,05	2.295,61	2.454,44		2.624,27		2.805,86		3.000,00		3.000,00			
PR (F7)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	n/a	2,5	4.000	3	4.000	3,25	4.000	3,5	4.000	4	4.000	4	20.000	Urusan Pilihan Perdagangan
		Terlaksanannya Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri	kegiatan per tahun	n/a	16	4090	16	3.790	16	3.790	16	3.790	16	3.790	80	19.250	Urusan Pilihan Perdagangan
		Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	258,9	239,4		221,36		204,68		189,26		175		175		
		Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	n/a	2,5		3		3,25		3,5		4		4		
31	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN																
PR (F2)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	IKM per tahun	n/a	50	8491,81	50	12192	50	12192	50	13300	50	21300	250	67475,81	Urusan Pilihan Perindustrian
		Sentra industri rakyat yang berfungsi	sentra	n/a	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	n/a	10		20		30		40		50		50		
		Cakupan Industri kecil dan Menengah OAP yang dibina	IKM	n/a	50		60		70		80		90		90		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Jumlah Jenis Komoditas Industri lokal yang dilabeli HAKI	jenis	n/a	3		3		3		3		3		15		
		Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	persen	n/a	5		5		5		5		5		25		
		Jumlah sentra industri rakyat	sentra	n/a	1		1		1		1		1		5		
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	n/a	10	0	20	530	30	530	40	530	50	530	50	2.120	Urusan Pilihan Perindustrian
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan penataan struktur industri	persen	n/a	40	1.300	50	1.350	60	1.350	70	1.300	80	1.350	80	6.650	Urusan Pilihan Perindustrian
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah kawasan sentra industri rakyat	kawasa n	n/a	1	400	1	400	2	400	2	400	2	400	2	2.000	Urusan Pilihan Perindustrian
		Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	persen	n/a	5		5		5		5		5		25		
		Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	IKM per tahun	n/a	50		50		50		50		50		250		
32	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAN																
	Sub Urusan Sekretariat Daerah																
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	300.000	100	500.000	100	534.576	100	634.576	100	684.576	100	2.653.728	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat daerah)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Perdasi tentang yang ditetapkan	dokumen per tahun	n/a	5	4.200	5	4.700	5	5.000	5	5.000	5	4.550	25	23.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	persen	n/a	100	2.700	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	16.700	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
PR (F8)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	Jumlah aparatur kampung dan distrik yang mendapatkan pelatihan pemerintahan kampung	orang	n/a	250	1.600	250	1.700	250	1.700	250	1.700	250	1.750	1.250	8.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
		Cakupan kampung mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya	persen	40	45		50		55		60		65		65		
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	n/a	12	1.500	14	1.800	16	1.800	18	2.300	20	2.300	20	9.700	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
PR (F4)	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Cakupan Pos Lintas Batas yang berstandar internasional	lokasi	2	1	1.200	1	27.800	1	29.850	1	28.950	1	25.250	5	113.050	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	persen	n/a	45		50		55		60		65		65		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan Ketersediaan sekolah di perbatasan	murid per sekolah	100	150		175		200		225		250		250		
		Cakupan Ketersediaan guru di perbatasan	murid per guru	15	15		20		20		25		25		25		
		Cakupan Ketersediaan kelas di perbatasan	murid per kelas	14	20		25		30		35		40		40		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan	puskes mas per 1000 penduduk	0,34	0,4		0,5		0,6		0,7		0,8		0,8		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	persen	n/a	30		36		42		50		60		60		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	persen	n/a	40		42		45		47		50		50		
	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas	Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	persen	n/a	45	2.835	50	2.835	55	2.835	60	2.835	65	2.835	65	14.175	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	persen	n/a	30		36		42		50		60		60		
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	persen	n/a	40		42		45		47		50		50		
	Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan	persen	n/a	80	2.400	85	2.400	90	2.400	95	2.400	100	2.400	100	12.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perdasu/Perdasus yang ditetapkan	produk per tahun	n/a	5	2.335	5	2.335	5	2.335	5	2.335	5	2.335	25	11.673	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Pemberian bantuan hukum dan penegakan perda	persen	100	100	1.377	100	1.377	100	1.377	100	1.377	100	1.377	100	6.884	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)
		Cakupan kasus hukum warga miskin yang memperoleh pendampingan	kasus per tahun	n/a	10		10		10		10		10		50		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Terlaksananya Penegakan hukum	persen	n/a	0	1.945	100	1.945	100	1.945	100	1.945	100	1.945	100	9.725	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)
		Terlaksananya kegiatan pengawasan produk hukum kab/kota	persen	n/a	0		100		100		100		100		100		
		Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua yang difasilitasi	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum	persen	n/a	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100	1.250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan produk hukum daerah yang didesiminasi	persen	n/a	70		75		80		85		90		90		
PR (F6)	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	persen	n/a	100	4.076	100	11.750	100	11.795	100	11.200	100	11.475	100	50.296	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan organisasi)
		Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	persen	n/a	50		70		90		100		100		100		
		Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Persentase Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti	persen	n/a	25		40		55		70		85		85		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	n/a	25	1.455	35	1.455	50	1.455	71	1.455	100	1.455	100	7.275	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan perekonomian dan SDA)
	Program Peningkatan Kinerja BUMD	Tersedianya regulasi BUMD	dokumen per tahun	n/a	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900	5	4.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan perekonomian dan SDA)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Terlaksananya pertemuan forum koordinasi mitra BUMD	acara per tahun	n/a	9		9		9		9		9		45		
		Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kinerja BUMD	acara per tahun	n/a	1		1		1		1		1		5		
		Tersedianya regulasi pengelolaan SDA	dokumen	n/a	3		3		3		3		3		15		
		Terlaksananya fasilitasi kemitraan swasta dan pelaku ekonomi	acara per tahun	n/a	1		1		1		1		1		5		
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	520	100	520	100	520	100	520	100	520	100	2.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan humas dan protokol)
	Program Pelayanan Informasi	Peningkatan pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	persen	n/a	75	900	80	750	90	750	100	750	100	750	100	3.900	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan humas dan protokol)
	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Peningkatan kerjasama media dan publikasi pembangunan daerah	persen	n/a	50	5.160	60	4.810	65	5.160	70	5.160	75	5.160	75	25.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan humas dan protokol)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	per tahun	n/a	5		5		8		8		10		10		
	Program Pembinaan Mental Spiritual	Frekuensi koordinasi lembaga keagamaan dengan pemerintah	kali per tahun	n/a	5	900	5	900	5	900	5	950	5	950	5	4.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk	per 10.000 penduduk	27,16	27,71	1.210	28,26	1.210	28,83	1.210	29,41	1.210	30	1.210	30	6.050	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Cakupan forum lintas agama tingkat provinsi yang berfungsi dan aktif	jumlah	n/a	2	720	2	870	2	870	2	920	2	970	2	4.350	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data ormas dan keagamaan	persen	n/a	80	200	90	200	100	200	100	200	100	200	100	1.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
	Program Pemberdayaan Keagamaan	Cakupan kelompok keagamaan yang berfungsi dan aktif	jumlah	140	140	42.204	140	42.204	160	42.204	180	42.204	180	42.204	10	211.022	Urusan Pemerintahan Fungsi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
		Rasio rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dan pemberdayaan	persen	40	40		45		50		50		50		20		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan pengadaan barang dan jasa)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	20	27.500	20	0	20	0	20	0	20	0	20	27.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengadaan barang dan jasa)
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa	Cakupan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	persen	n/a	80	0	90	31.000	100	31.000	100	34.050	100	34.600	100	130.650	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengadaan barang dan jasa)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan otonomi khusus)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	1.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan Otonomi Khusus)
	Program Peningkatan	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	n/a	12	6.500	14	6.500	16	7.500	18	6.500	20	6.500	20	33.500	Urusan Pemerintahan Fungsi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Penyelenggaraan Otonomi Daerah																Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan otonomi khusus)
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa	persen	n/a	70	10.000	70	15.000	80	15.000	80	15.000	85	15.000	85	70.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan otonomi khusus)
		Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang per tahun	n/a	100		100		100		100		100		500		
	Sub Urusan Sekretariat DPRP																
PR (F6)	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perdasu dan Perdasus yang ditetapkan	produk per tahun	n/a	5	300.000	5	351.071	5	351.071	5	351.071	5	351.071	25	1.704.284	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat DPRP)
		Tingkat kehadiran Anggota dewan	persen	n/a	75		75		75		75		75		75		
		Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	persen	n/a	75		75		75		75		75		75		
		Persentase penetapan perdasu dan perdasus berdasarkan prolegda	produk per tahun	n/a	5		5		5		5		5		25		
	Sub Urusan Penghubung Daerah																

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program peningkatan pelayanan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	358	100	358	100	358	100	358	100	358	100	1.790	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan penghubung daerah)	Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	persen	n/a	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	380	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)
	Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung Pentas Anjungan Papua	persen	n/a	2,5	50	2,75	50	3	50	3,25	50	3,5	50	3,5	250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan	Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Kemasyarakatan di Jakarta	kali per tahun	n/a	5	100	5	100	5	100	5	100	5	100	25	500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	persen	n/a	75	150	80	150	90	150	100	150	100	150	100	750	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Sub Urusan Sekretariat MRP																
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Tingkat kehadiran Anggota MRP	persen	n/a	95	200.000	95	210.000	95	246.000	95	246.000	95	246.000	95	1.148.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat MRP)
		Persentase Rancangan Perdasi dan Perdassus yang ditindaklanjuti	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
		Jumlah perdasi dan perdassus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP	peraturan	n/a	10		10		10		10		10		10		
	Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia																
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan pengembangan SDM)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	20	10.957	20	12.400	20	13.050	20	11.984	20	13.332	20	61.723	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengembangan SDM)
		Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	n/a	80	8.350	82	22.580	85	22.580	87	22.580	90	22.580	90	98.670	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
																	Pemerintahan (sub urusan pengembangan SDM)
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	n/a	70		75		80		85		90		90		
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	n/a	65		70		75		80		85		85		
PR (F1)	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	n/a	70	10.000	70	10.000	80	10.000	80	11.000	85	10.000	85	50.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (sub urusan Pengembangan SDM)
		Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang per tahun	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Sub urusan Penanggulangan Bencana Daerah																
PR (F9)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan)	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	kegiatan	n/a	18	8.000	18	7.850	18	10.000	18	11.000	18	15.000	0	51.850	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penanggulangan bencana daerah)
		Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	n/a	60		65		70		75		80		80		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	n/a	2		2		2		2		2		10		
		Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
		Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	n/a	80		80		90		90		100		100		
		Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	n/a	20		25		30		35		40		40		
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
33	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN																
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang	28	35	1.897	40	3.207	45	2.590	50	2.650	55	2.910	60	13.254	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	n/a	75	1.209	80	1.250	85	1.300	90	1.400	95	1.500	95	6.659	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
PR (F6)	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	55	65	9.714	70	11.644	75	12.967	80	13.267	85	13.467	90	61.058	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
		Persentase Rekomendasi Auditor Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi yang Berindikasi Kerugian Daerah	persen	n/a	75		80		85		90		95		95		
PR (F6)	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	40	40	5.978	40	7.273	45	7.900	45	8.804		9.479	50	39.434	Urusan Pemerintahan Fungsi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan																Penunjang Pengawasan
		Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	20	25	25		30		35		50		35			
		Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemrov Papua	persen	30	30	35		35		35		35		35			
												35					
34	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																
	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	n/a	80	10.400	85	10.400	90	10.400	95	10.400	100	10.400	100	52.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	persen	n/a	80		85		90		95		100		100		
	Program Pengembangan Kawasan	Cakupan pengembangan kawasan peruntukan khusus	persen	n/a	80	3.900	-	0	-	0	-	0	-	0	80	3.900	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
PR (F4)	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah	n/a	30	200	-	0	-	0	-	0	-	0	30	200	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Perencanaan pembangunan	persen	n/a	100	250	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
PR (F6)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	80	80	5.500	85	5.650	90	5.420	95	8.650	100	500	100	25.720	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
		Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	75	85		90		90		95		100		100		
		Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	89,66	93,1		96,55		100		100		100		100		
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		
		Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		
		Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	85	90		95		100		100		100		100		
		Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	88	90	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100	2.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	80	85	1.500	85	1.500	90	1.400	90	1.400	90	1.500	90	7.300	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	n/a	25		35		50		71		100		100		
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	n/a	25	2.000	35	2.000	50	2.000	71	2.000	100	2.000	100	10.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	n/a	25	3.250	35	3.250	50	3.250	71	3.250	100	3.250	100	16.250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	n.a	60	1.000	70	1.000	80	1.000	90	1.000	100	1.000	100	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
35	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN																
	Sub Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																
PR (F6)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	23.679	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	25.000	Ya	123.679	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah)
		Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
		Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	20	20		20		40		40		50		50		
		Opini Pemeriksaan BPK	opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
		Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		
PR (F3) (F4)	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	n/a	90	2.400	100	2.487	100	2.577	100	2.670	100	2.762	100	12.896	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Keuangan Kabupaten/Kota																Keuangan (sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah)
		Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	1	2		-		-		-		-		2		
		Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	85	85		90		95		100		100		100		
		Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	80	85	2.000	85	2.000	95	2.000	100	2.000	100	2.000	100	10.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah)
		Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Sub Fungsi Pendapatan Daerah																
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persen	n/a	40	2.885	50	3.935	60	4.035	70	4.135	80	4.285	90	19.277	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pendapatan daerah)
		Peningkatan Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	2,10	2,26		2,42		2,60		2,79		3,00		3,00		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	rupiah	n/a	1.025.000.000	7.300	1.025.000.000	14.026	1.025.000.000	16.005	1.025.000.000	19.810	1.025.000.000	17.635	1.025.000.000	74.776	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pendapatan daerah)
		Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis per tahun	n/a	2		2		2		3		3		12		
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	16	18		20		22		26		28		28		
36	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN																
PR (F6)	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	persen	n/a	60	2.500	65	2.500	70	2.500	75	2.500	80	2.500	80	12.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian (sub pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian)
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Persentase kasus pendampingan hukum yang didampingi	persen	n/a	70	897	72	897	75	897	77	897	80	897	80	4.484	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	n/a	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	70.099	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data kepegawaian daerah	persen	-	100	660	100	660	100	660	100	660	100	660	100	3.302	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
					Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta			
	Program Pendidikan Kedinasan	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	3	3	255	3	255	5	255	5	255	8	255	8	1.275	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
30	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	n/a	5	1.950	5	2.050	8	3.350	8	1.550	10	2.650	10	11.550	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
		Cakupan Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis per tahun	n/a	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	5	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
PR (F6)	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	n/a	40	600	45	866	50	750	55	750	60	750	60	3.716	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
PR (F3) (F6)	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kesepakatan Kerjasama	dokumen per tahun	n/a	2	1.570	2	1.570	2	1.570	2	1.570	2	1.570	10	7.850	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah baik dari sisi tujuan, sasaran dan program

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2019-2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam Tabel 8.1 dan Tabel 8.2, sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2019-2023

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.2	8.21
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10.5	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0	12.00
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	73.89	74.9	75.9	76.9	77.9	78.9	80.0	80.00
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.1	65.9	66.6	67.3	68.1	68.8	69.6	69.59
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40	80	85	95	100	100
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68.08	69.2	70.3	71.5	72.6	73.8	75.0	75.00
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	13	13.0	11.0	10.0	9.0	7.0	7.0	7.00
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	6996	7093.2	7191.8	7291.7	7393.1	7495.8	7600.0	7600.00
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75.97	76.4	76.9	77.3	77.8	78.2	78.7	78.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92.15	92.6	93.1	93.6	94.0	94.5	95.0	95.00
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	41.13	42.5	43.9	45.3	46.8	48.4	50.0	50.00
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53.45	54.5	55.5	56.6	57.7	58.9	60.0	60.00
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88.0	90.0	93.0	95.0	98.0	100.0	100.00
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik											
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	95	95
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46.39	80.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	100.00
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	7.81	8.61	9.49	10.46	11.52	12.70	14.00	14.00
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2.27	2.6	3.0	3.4	3.8	4.4	5.0	5.00
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0.8	1.1	1.5	2.0	2.7	3.7	5.0	5.00
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0.82	1.1	1.5	2.0	2.7	3.7	5.0	5.00
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	indeks	90.91	91.6	92.3	92.9	93.6	94.3	95.0	95.00
		13.2	Indeks Kualitas Air	indeks	77.33	77.8	78.2	78.7	79.1	79.5	80.0	80.00
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78.18	79.3	80.4	81.5	82.7	83.8	85.0	85.00
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	-	-	31580.2	39475.3	47370.4	55265.4	63160.5	63160.49
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4.53	5.33	6.27	7.37	8.67	10.20	12.00	12

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan											
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96.01	97.09	97.34	97.59	97.84	98.09	98.34	98.34
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	52.51	54.40	56.36	58.39	60.49	62.67	64.93	64.93
		16.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	70.04	73.74	77.65	81.75	86.08	90.63	95.43	95.43
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	30.00	30.00	32.00	40.00	45.00	50.00	55.00	55.00
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	-	-	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	-	-	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33.06	34.12	35.22	36.36	37.54	38.75	40.00	40.00
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38.47	39.52	40.61	41.72	42.87	44.04	45.25	45.25
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	indeks	41.89	43.43	45.02	46.67	48.38	50.16	52.00	52.00

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	-	60.00	62.40	64.90	67.49	70.19	73.00	73.00
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7.48	8.09	8.75	9.47	10.25	11.09	12.00	12.00
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65.08	65.56	66.04	66.53	67.01	67.50	68.00	68.00
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9.49	10.12	10.80	11.52	12.30	13.12	14.00	14.00
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	-	-	10	20	30	40	50	150
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	79.38	79.48	79.59	79.69	79.79	79.90	80.00	80.00
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	61.89	62.40	62.91	63.43	63.95	64.47	65.00	65.00

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi											
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13.21	14.69	16.34	18.17	20.21	22.48	25.00	25.00	
1.2	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74.37	76.04	77.76	79.51	81.30	83.13	85.00	85.00	
1.3	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	95	95	
1.4	Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	0	1	1	1	1	1	5	
1.5	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	-	75.38	30.00	40.00	50.00	70.00	85.00	85.00	
1.6	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48.24	36.70	39.04	41.53	44.18	47.00	50.00	50.00	
1.7	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	-	50.00	53.48	57.20	61.19	65.44	70.00	70.00	
1.8	Ketepatan waktu Penetapan APBD	kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
1.9	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah kabupaten/kota	0	0	5	5	6	6	7	29	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.10	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4.88	5.08	5.29	5.50	5.72	5.96	6.20	6.20	
1.11	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9.49	10.12	10.80	11.52	12.30	13.12	14.00	14.00	
1.12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	C	C	CC	CC	B	B	B	
1.13	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-	C	C	B-	B	B	
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	C	C	C	B	B	B	A	A	
1.15	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari			150	150	200	250	300	300	
1.16	Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	0	0	50	60	65	70	75	75	
1.17	Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	
Kesejahteraan sosial											
1. Pendidikan											
1.1	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	40.00	42.80	45.79	48.99	52.41	56.08	60.00	60.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.2	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7.48	8.09	8.75	9.47	10.25	11.09	12.00	12	
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	88.63	90.43	92.27	94.14	96.06	98.01	100.00	100.00	
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	78.83	79.83	80.84	81.86	82.89	83.94	85.00	85.00	
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	56.13	56.76	57.39	58.03	58.68	59.34	60.00	60.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2. Kesehatan											
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	7.00	6.38	5.81	5.29	4.82	4.39	4.00	4.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	persen	11.30	10.02	8.89	7.88	6.99	6.20	5.50	5.50	
3. Pangan											
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks		37.09	39.53	42.13	44.90	47.85	51.00	51.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
3.2	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26.95	27.44	27.93	28.43	28.95	29.47	30.00	30	
3.3	Persentase penduduk tahan pangan	persen	40.04	42.83	45.82	49.01	52.43	56.09	60.00	60	
4. Ketenagakerjaan											
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3.62	2.91	2.70	2.50	2.32	2.16	2.00	2.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76.94	77.44	77.95	78.46	78.97	79.48	80.00	80.00	
5. Pemberdayaan											
5.1	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5.37	6.94	8.97	11.59	14.97	19.35	25.00	25.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen		30.00	34.46	39.59	45.47	52.23	60.00	60.00	
5.3	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	
6. Seni Budaya dan Olahraga											

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6.1	Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen			40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
6.2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0	0	1	0	1	2	
6.3	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen			2	2	2.5	2.5	5	5	
6.4	Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	-	-	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
Kemampuan Ekonomi Daerah											
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	NTP perikanan tangkap	Skor	103.75	103.96	104.17	104.37	104.58	104.79	105.00	105	
1.2	NTP perikanan budidaya	Skor	83.27	85.85	88.51	91.25	94.08	96.99	100.00	100	
1.3	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	0.22	0.33	0.49	0.74	1.10	1.65	2.46	2.46	
1.4	Pendapatan Per Kapita Petani	Rp juta per kapita	10.21	10.34	10.63	11.00	11.45	12.24	13.12	13.12	
1.5	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87.6	88.00	88.39	88.79	89.19	89.60	90.00	90	
1.6	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	-	45	50	55	60	65	70	
1.7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2.00	2.20	2.41	2.65	2.90	3.19	3.50	3.50	
1.8	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1.29	1.48	1.71	1.97	2.26	2.61	3.00	3	
1.9	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	0	0	1	1	2	2	4	10	
1.10	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	52	53.66	54.88	56.11	57.38	58.68	60.00	60	
1.11	Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3428	3517	3609	3703	3799	3898	4000	4000	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
1. Perhubungan											
1.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	55.17	55.17	58.62	65.52	72.41	79.31	93.10	93.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2. Listrik Dan Air Bersih											
2.1	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40.57	41.28	41.99	42.73	43.47	44.23	45.00	45.00	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33.06	34.12	35.22	36.36	37.54	38.75	40.00	40	
2.3	Backlog perumahan layak huni dan sehat	ribu rupa	147.88	138.55	129.80	121.61	113.93	106.74	100.00	100.00	
3. Lingkungan Hidup											
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	48.6	43.50	38.94	34.86	31.20	27.93	25.00	25.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dan Urusan Pilihan Kehutanan
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0.392	0.371	0.351	0.332	0.315	0.298	0.282	0.282	
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81.47	82.06	82.64	83.21	83.83	84.44	85.03	85.03	
3.4	Persentase penerapan green economy	persen			50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00	
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/Rp	-	-	31580.25	39475.31	47370.37	55265.43	63160.49	63160.49	
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen			60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	
3.7	Persentase pengendalian daya rusak air	persen			40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
4. Informasi Dan Komunikasi											
4.1	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori			C	C	C	B	B	B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
4.2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen			40	45	50	55	60	60	
4.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen			5	7.25	7.5	8	10	10	
5. Iklim Berinvestasi											
5.1	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	236	218	202	187	173	159	147	147	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal, Urusan Pilihan Perdagangan
5.2	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61.02	61.36	61.70	62.04	62.39	62.73	63.08	63.08	
5.3	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	15	
5.4	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	90	80	60	40	30	20	20	
5.5	ICOR	nilai	5.13	4.75	4.39	4.06	3.76	3.48	3.21	3.21	
5.6	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	229.82	224.56	219.42	214.39	209.48	204.69	200.00	200.00	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar										
1.1.	Pendidikan										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0.56	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29	0.25	0.25	
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1.21	1.17	1.14	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	22.48	23.59	24.75	25.97	27.25	28.59	30.00	30.00	
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	22.37	23.49	24.67	25.91	27.21	28.57	30.00	30.00	
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24.20	24.33	24.46	24.60	24.73	24.86	25.00	25.00	
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	16.76	17.91	19.15	20.47	21.88	23.39	25.00	25.00	
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	181.00	184.04	187.12	190.26	193.45	196.70	200.00	200.00	
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	196.09	196.73	197.38	198.03	198.69	199.34	200.00	200.00	
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)	persen	33.88	34.83	48.97	60.27	75.33	85.00	100.00	100.00	
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0.93	0.84	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.50	
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	33.87	34.82	35.80	36.81	37.84	38.90	39.99	40.00	
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	13.13	14.62	16.27	18.12	20.17	22.46	25.00	25.00	
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	262.00	250.47	239.45	228.91	218.84	209.21	200.00	200.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	73.98	74.95	75.93	76.93	77.94	78.96	80.00	80.00	
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	persen	89.32	90.24	91.17	92.12	93.07	94.03	95.00	95.00	
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	388.00	398.00	411.00	420.00	434.00	443.00	448.00	448.00	
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	70.73	71.42	72.13	72.83	73.55	74.27	75.00	75.00	
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	60.00	62.95	66.04	69.28	72.68	76.25	80.00	80.00	
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	80.00	80.81	81.63	82.46	83.30	84.15	85.00	85.00	
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	75.00	76.28	77.58	78.90	80.24	81.61	83.00	83.00	
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	75.00	76.43	77.89	79.37	80.89	82.43	84.00	84.00	
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	60.00	61.56	63.16	64.81	66.49	68.22	70.00	70.00	
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	45.00	46.67	48.40	50.20	52.06	54.00	56.00	56.00	
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	-	2.50	5.00	7.00	10.00	15.00	20.00	20.00	
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	10.00	10.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	17.00	
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	15.00	18.68	23.27	28.98	36.10	44.96	56.00	56.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	80.00	75.38	71.03	66.93	63.07	59.43	56.00	56.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	85.00	86.59	88.21	89.86	91.54	93.26	95.00	95.00	
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	60.00	61.56	63.16	64.81	66.49	68.22	70.00	70.00	
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	50.00	52.23	54.57	57.01	59.56	62.22	65.00	65.00	
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	20.44	21.14	21.86	22.61	23.38	24.17	25.00	25.00	
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00	
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	700.00	795.00	903.00	1025.00	1164.00	1322.00	1500.00	1500.00	
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	2.92	3.59	4.40	5.40	6.64	8.15	10.00	10.00	
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	10.60	11.78	13.09	14.56	16.18	17.99	20.00	20.00	
1.1.38	APM pendidikan khusus (SPM Provinsi)	persen			20	50	80	100	100	100	
1.2.	Kesehatan										
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	7.63	9.59	12.04	15.13	19.01	23.88	30.00	30.00	
1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	5.84	6.45	7.13	7.88	8.70	9.61	10.62	10.62	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	94.48	102.05	110.22	119.05	128.58	138.88	150.00	150.00	
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	-	-	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00	
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	-	-	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	-	27.59	34.92	44.20	55.95	70.83	89.66	89.66	
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	-	60.00	60.00	65.00	65.00	70.00	75.00	75.00	
1.2.9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	35.21	36.68	38.21	39.81	41.47	43.20	45.00	45.00	
1.2.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	3.45	6.90	13.79	20.69	27.59	34.48	41.38	41.38	
1.2.11	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen		80	82	85	87	90	92	436	
1.2.12	Persentase PAK yang diawasi	persen			58	68	78	88	100	392	
1.2.13	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	-	-	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	
1.2.14	API Malaria	persen	59.00	51.35	44.69	38.89	33.85	29.46	25.64	25.64	
1.2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	62.78	56.30	50.48	45.27	40.59	36.40	32.64	32.64	
1.2.16	Tingkat prevalensi DBD	persen	92.67	86.37	80.50	75.03	69.93	65.17	60.74	60.74	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.17	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	42.00	39.83	37.78	35.83	33.98	32.23	30.57	30.57	
1.2.18	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	-	11.70	11.10	10.53	10.00	9.48	9.00	9.00	
1.2.19	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	48.00	45.36	42.86	40.50	38.28	36.17	34.18	34.18	
1.2.20	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	-	-	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00	
1.2.21	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen			65.00	75.00	85.00	95.00	100.00	100.00	
1.2.22	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kabupaten /kota	-	6.00	7.00	9.00	12.00	14.00	16.00	16.00	
1.2.23	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	-	-	25.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	
1.2.24	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	2.63	2.93	3.26	3.63	4.04	4.49	5.00	5.00	
1.2.26	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	289.00	259.08	232.25	208.21	186.65	167.32	150.00	150.00	
1.2.27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	40.90	43.60	46.47	49.54	52.81	56.29	60.00	60.00	
1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	persen	35.80	37.19	38.64	40.14	41.70	43.32	45.00	45.00	
1.2.29	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	61.59	62.15	62.71	63.27	63.84	64.42	65.00	65.00	
1.2.31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	32.80	31.35	29.96	28.64	27.37	26.16	25.00	25.00	
1.2.32	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1.60	1.38	1.18	1.02	0.88	0.76	0.65	0.65	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen			20.00	20.00	25.00	25.00	40.00	40.00	
1.2.34	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 khl	8.00	7.13	6.35	5.66	5.04	4.49	4.00	4.00	
1.2.35	Rasio posyandu yang aktif	persen	63.57	64.60	65.64	66.71	67.79	68.88	70.00	70.00	
1.2.36	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	48.89	49.40	49.91	50.42	50.94	51.47	52.00	52.00	
1.2.37	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi		46.00	46.95	47.92	48.91	49.92	50.95	52.00	52.00	
1.2.38	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2115.09	2144.84	2175.01	2205.61	2236.63	2268.10	2300.00	2300.00	
1.2.39	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	20.00	23.30	27.14	31.62	36.84	42.92	50.00	50.00	
1.2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	45.00	48.44	52.14	56.12	60.41	65.03	70.00	70.00	
1.2.41	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	-	21.00	21.00	22.00	24.00	25.00	27.00	27.00	
1.2.42	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit		5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	
1.2.43	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	25.00	25.00	25.77	26.57	27.39	28.23	29.10	30.00	
1.2.44	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	1.12	1.41	1.78	2.24	2.83	3.57	4.50	4.50	
1.2.45	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	24.13	25.06	26.02	27.02	28.05	29.13	30.25	30.25	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.46	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.03	1.05	1.08	1.11	1.14	1.17	1.20	1.20	
1.2.47	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen		70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	
1.2.48	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen		85.00	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	
1.2.49	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen			40.00	43.00	50.00	55.00	60.00	60.00	
1.2.50	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	2.00	4.00	
1.2.51	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	56.25	56.86	57.47	58.09	58.72	59.36	60.00	60.00	
1.2.52	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	10.00	12.60	15.87	20.00	25.20	31.75	40.00	40.00	
1.2.53	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	-	60	60,00	65	70,00	75,00	80,00	80,00	
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	-	-		-	-	-	-	-	
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	-	44,83	48,28	48,28	51,72	55,17	58,62	58,62	
1.2.56	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen		60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	
1.2.57	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	41.84	42.35	42.87	43.39	43.92	44.46	45.00	45.00	
1.2.58	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	-	44.83	48.28	48.28	51.72	55.17	58.62	58.62	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.59	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen		60.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	
1.2.60	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	60.00	62.25	65.00	67.50	70.00	72.50	73.00	73.00	
1.2.61	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen		-	70	72	75	78	80	80	
1.2.62	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen		-	80	82	84	86	90	90	
1.2.63	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	33.06	34.12	35.22	36.36	37.54	38.75	40.00	40.00	
1.2.64	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	38.47	39.52	40.61	41.72	42.87	44.04	45.25	45.25	
1.2.65	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	-	-	250	250	-	-	-	250	
1.2.66	Jumlah Pos dan Peralatan kesehatan yang memenuhi standar nasional untuk pelaksanaan PON	unit	-	-	40	40	-	-	-	40	
1.2.67	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)				20	60	80	100	100	100	
1.2.68	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)				80	100	100	100	100	100	
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.3.1.	Pekerjaan Umum										
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar			1000	2000	3000	4000	5000	39600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.1.2	Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen			75	80	85	90	95	95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	44.55	46.82	49.20	51.70	54.33	57.10	60.00	60	
1.3.1.4	Cakupan layanan air minum (SPM Provinsi)	persen		48	60	80	100	100	100	100	
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lokasi			20	20	20	20	20	100	
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m			40	50	60	70	80	80	
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km			20	20	20	20	20	100	
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'			500	500	500	500	500	2500	
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen			34	38	40	45	50	55	
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	persen			40	45	50	55	60	60	
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km			10	20	20	20	30	100	
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq			30	30	30	30	30	150	
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen			60	65	70	75	80	80	
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	persen			30	35	40	45	50	50	
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	38.47	40.19	41.98	43.86	45.82	47.86	50.00	50	
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa	persen	69.16	70.86	72.60	74.38	76.21	78.08	80.00	80	
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen			30	35	40	45	50	50	
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen			50	55	60	65	70	70	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.1.19	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)	persen			25	50	75	100	100	100	
1.3.2.	Penataan Ruang										
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen			80	85	90	95	100	100	
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen			30	50	70	100	100	100	
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen			60	65	70	75	80	80	
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	unit			3000	3000	3000	3000	3000	15000	
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen			30	35	40	45	50	50	
1.4.4	Cakupan rumahtangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk			125	180	230	300	380	380	
1.4.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen			100	100	100	100	100	100	
1.4.6	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen			100	100	100	100	100	100	
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus		10.00	10.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen		80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8.70	9.99	11.48	13.19	15.15	17.41	20.00	20.00	serta Perlindungan Masyarakat
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	3.02	2.59	2.22	1.90	1.63	1.40	1.20	1.20	
1.5.5	Jumlah konflik horisontal	kasus		10.00	10.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	
1.5.6	Cakupan penegakan Perda	persen		80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.5.7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8.70	9.99	11.48	13.19	15.15	17.41	20.00	20.00	
1.5.8	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	3.02	2.59	2.22	1.90	1.63	1.40	1.20	1.20	
1.5.9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	-	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00	
1.5.10	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	63.45	65.67	67.97	70.35	72.81	75.36	78.00	78.00	
1.5.11	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	-	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00	85.00	
1.5.12	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen		28.00	32.00	36.00	40.00	45.00	50.00	50.00	
1.5.13	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen		40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00	
1.5.14	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
1.5.15	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang			250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00	
1.5.16	Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.5.17	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	-	-	2.00	2.00	2.25	2.50	3.00	3.00	
1.5.18	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen		20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	
1.5.19	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen			2.50	2.50	5.00	5.00	10.00	10.00	
1.5.20	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen			70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	
1.5.21	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-	-	75.00	-	-	-	-	75.00	
1.5.22	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	-	-	80.00	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	
1.5.23	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
1.5.24	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen			60	65	70	75	80	80	
1.5.25	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi			2	2	2	2	2	10	
1.5.26	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen			80	85	90	95	100	100	
1.5.27	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen			80	80	90	90	100	100	
1.5.28	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen			20	25	30	35	40	40	
1.5.29	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen			80	85	90	95	100	100	
1.5.30	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	persen			100	100	100	100	100	100	
1.6.	Sosial										

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen			40	45	50	55	60	60	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen			30	35	40	45	50	50	
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	25.00	28.51	32.51	37.08	42.29	48.23	55.00	55.00	
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK			200	200	200	200	200	1000	
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen			70	75	80	85	90	90	
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen			65	70	75	80	85	85	
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen			80	85	90	95	100	100	
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen			30	35	40	45	50	50	
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen			15	20	25	30	35	35	
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota		9	12	15	18	21	24	24	
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang			50	50	50	50	50	250	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.6.12	Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen			40	60	80	100	100	100	
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen			40	60	80	100	100	100	
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen			60	65	70	75	80	80	
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen			2	2	2	2	2	10	
2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
2.1.	Tenaga Kerja										
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen			80	85	90	95	100	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali			2	2	2	2	2	10	
2.1.3	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen			80	80	85	85	90	90	
2.1.4	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen			25	25	30	40	50	50	
2.1.5	Persentase kenaikan UMP	persen			1.5	1.5	2.3	3.5	4.0	4.0	
2.1.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen			30	35	40	50	60	60	
2.1.7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	76.94	77.44	77.95	78.46	78.97	79.48	80.00	80.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.1.8	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3.62	2.91	2.70	2.50	2.32	2.16	2.00	2.00	
2.1.9	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen			40	45	50	55	60	60	
2.1.10	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen			60	65	70	75	80	80	
2.2.	Pangan										
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	60.00	56.08	52.41	48.99	45.79	42.80	40.00	40.00	
2.2.3	Skor PPH	skor	87.60	88.43	89.26	90.10	90.95	91.81	92.67	92.67	
2.3.	Pertanahan										
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	-	-	60	65	70	75	80	80	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	-	-	20	30	40	50	60	60	
2.4.	Lingkungan Hidup										
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	14		20	20	20	20	20	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	15/5		20/5	40/8	50/10	50/10	50/10	50/10	
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	6.84	5.57	4.54	3.70	3.01	2.45	2.00	2.00	
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen			60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	-	-	12	12	12	12	12	60	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	-	-	1	1	1	1	1	5	
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen			60	65	70	75	80	80	
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen			20	25	30	35	40	40	
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen			30	35	40	45	50	50	
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang		12	12	12	12	16	20	20	
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang		2	-	-	1	2	2	5	
2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	64.25	67.42	70.75	74.24	77.90	81.75	85.78	85.78	
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	29.70	31.91	34.28	36.83	39.57	42.51	45.67	45.67	
2.5.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	44.06	45.77	47.54	49.38	51.29	53.28	55.34	55.34	
2.5.5	Persentase pasangan berakte nikah	persen		40	45	50	55	60	65	65	
2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen			25	30	35	40	45	45	
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit			10	10	10	10	10	50	
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen		87.12	84.55	82.05	79.63	77.28	75.00	75.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung		10	2	2	4	4	5	17	
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung			10	10	10	10	10	50	
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen			10	15	20	25	30	30	
2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun			100	100	100	100	100	500	
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen		3.26	3	3	2.8	2.5	2.25	2,25	
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen		60	60	65	70	75	80	80	
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen			20	25	30	35	40	40	
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun			30	30	30	30	30	150	
2.8.	Perhubungan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat		1	1	2	2	3	3	3	
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen		20	20	25	30	35	40	40	
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa		200	180	160	140	120	100	100	
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit		7	1	1	1	1	1	5	
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit		5	1	1	1	1	1	5	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit		6	-	-	1	-	1	2	
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit		3	2	2	2	2	2	10	
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen		5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen			2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	4.5	
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen			60	65	70	75	80	80	
2.9.	Komunikasi dan Informatika										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2.9.1	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	-	-	-	3200.00					
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama			2	2	2	2	2	10	
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen			10	10	20	20	40	40	
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen			20	25	30	35	40	40	
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	16.51	17.05	17.60	18.17	18.76	19.37	20.00	20.00	
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen			60	65	70	75	80	80	
2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.10.1	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	unit			50	50				50	
2.10.2	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	-	-	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.10.3	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	7386.00	7769.00	8171.00	8594.00	9039.00	9507.00	10000.00	10000.00	
2.10.4	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit			30	30	30	30	30	150	
2.10.5	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali			5	5	8	8	10	36	
2.10.6	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok			10	10	10	10	10	50	
2.10.7	Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp milyar	10,156	10,838	11,566	12,343	13,171	14,056	15,000	15,000	
2.10.8	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen		60	60	65	65	70	75	75	
2.11.	Penanaman Modal										
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen			80	85	90	95	100	100	
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen		6.5	6.5	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen			15	20	25	30	35	35	
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali			5	5	5	5	5	25	
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen			40	50	60	70	80	80	
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari		60	40	30	20	10	10	10	
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor		65	66.68	68.40	70.17	71.98	73.84	77.25	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen			65	70	75	80	85	85	
2.12.	Kepemudaan dan Olah Raga										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	-	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	-	-	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-	-	10.00	10.00	-	-	-	10.00	
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-	-	-	6.00	-	-	-	6.00	
2.12.6	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	-	75.00	100.00	-	-	-	-	100.00	
2.12.7	Cakupan venue berstandar internasional	persen	30.00	60.00	90.00	100.00	-	-	-		
2.12.8	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	50.00	50.00	100.00	100					
2.12.9	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00	
2.12.10	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	47.00	49.00	51.00	53.00	55.00	57.00	59.00	60.00	
2.13.	Statistik										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Statistik
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen		70	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.0	
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen		5	5	5	5	5	5	25	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.14.	Persandian										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen		85	85	85	90	95	100	100	
2.15.	Kebudayaan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	-	-	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	7.00	
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
2.15.4	Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali		5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	31.00	
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen		40.00	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	
2.16.	Perpustakaan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	-	-	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	
2.17.	Kearsipan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	-	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepastakaan	persen	-	-	1.20	2.00	2.25	3.00	4.00	4.00	
3.	Layanan Urusan Pilihan										
3.1.	Pariwisata										Urusan Pilihan Pariwisata
3.1.1	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	-	-	-	150	-	-	-	150	
3.1.2	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi		10	10	12	12	15	15	15	
3.1.3	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan		2	1	1	1	1	1	5	
3.1.4	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan			10	10	10	10	10	50	
3.1.5	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang			50	50	50	50	50	250	
3.1.6	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha			10	10	10	10	10	50	
3.2.	Pertanian										Urusan Pilihan Pertanian
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	-	-	20	20	20	20	20	100	
3.2.2	NTP peternakan	persen	99.89	99.91	99.93	99.94	99.96	99.98	100.00	100	
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	86.31	88.45	90.65	92.90	95.21	97.58	100.00	100	
3.2.4	Cakupan bina kelompok tani	persen	-	-	20	20	20	20	20	100	
3.2.5	NTP perkebunan	persen	99.89	99.91	99.93	99.94	99.96	99.98	100.00	100	
3.2.6	NTP tanaman pangan	persen	86.31	88.45	90.65	92.90	95.21	97.58	100.00	100	
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	7.37	8	8.16	8.58	9.03	9.50	10.00	10	
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-	-	-	60	-	-	-		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	2.67	2.86	3.06	3.27	3.50	3.74	4.00	4.00	
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	-	-	25	30	35	40	45	45	
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	-	60	65	70	75	80	85	85	
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen			30	35	40	45	50	50	
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen			2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan			2	2	2	2	2	10	
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	-	-	10	10	12	12	15	15	
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	485.22	489.26	493.34	497.46	501.60	505.78	510.00	510	
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen			25	30	35	40	45	45	
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	-	-	2	2	2	2	2	10	
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen			50	55	60	65	70	70	
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	Ton	30,146,247	31,277,043	32,450,255	33,667,475	34,930,354	36,240,603	37,600,000	37,600,000	
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen		30	32	34	36	38	40	40	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen		10	10	10	15	15	25	25	
3.3.	Kehutanan										Urusan Pilihan Kehutanan
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp triliun	2,05	2,12	2,19	2,26	2,34	2,42	2,50	2,50	
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen		26.41	27.09	27.79	28.51	29.24	30.00	30	
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha		4,64	4,76	4,88	5,01	5,14	5,27	5,27	
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen		5	10	15	20	25	30	30	
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen			30	35	40	45	50	50	
3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral										Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
3.4.1	Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	-	-	-	432.00					
3.4.2	Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen				100.00					
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen			80	85	90	95	100	100	
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen			40	45	50	55	60	60	
3.4.5	Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen			80	85	90	95	100	100	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen			25	50	75	100	100	100		
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen			30	40	50	60	70	70		
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen			65	80	90	100	100	100		
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen			40	50	60	70	80	80		
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter		10,000	10,000	9,800	9,800	9,500	9,500	9,500		
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	53.20	54.28	55.38	56.50	57.64	58.81	60.00	60		
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	43	45.46	48.05	50.79	53.69	56.76	60.00	60		
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumahtan gga				250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00		
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumahtan gga			500	500	500	500	500	2500		
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung			100	100	100	100	100	500		
3.5.	Perdagangan											
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	280.00	258.90	239.40	221.36	204.68	189.26	175.00	175.00		Urusan Pilihan Perdagangan
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen			80	80	85	85	90	90		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen			100	100	100	100	100	100	
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2,008.10	2,147.05	2,295.61	2,454.44	2,624.27	2,805.86	3,000.00	3,000.00	
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit			20	20	20	20	20	100	
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen			2.50	3.00	3.25	3.50	4.00	4.00	
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen			250	225	200	175	150	150	
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga	persen	12.52	12.94	13.37	13.82	14.28	14.76	15.25	15.25	
3.6.	Perindustrian										Urusan Pilihan Perindustrian
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun			10	10	10	10	10	50	
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha			50	50	50	50	50	250	
3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan			1	1	1	1	1	5	
3.7.	Kelautan dan Perikanan										Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
3.7.1	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen			1.25	1.50	1.75	1.80	2.00	2.00	
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	-	-	8	10	13	13	13	13	
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	113	118.46	124.19	130.19	136.49	143.08	150.00	150.00	
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	7,403.00	7,499.31	7,596.88	7,695.71	7,795.83	7,897.26	8,000.00	8,000.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	37,811.51	39,613.9	41,502.35	43,480.75	45,553.46	47,724.97	50,000.00	50,000.00	
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	6,787.68	6976.15	7169.86	7368.95	7573.57	7783.86	8000.00	8000	
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen			2	2	4	4	8	20	
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen			1.20	1.50	2.00	2.25	2.50	2.50	
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen			60	65	70	75	80	80	
4.	Layanan Penunjang Urusan										
4.1.	Perencanaan Pembangunan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90					100	
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	7		12	14	16	18	20	20	
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	46.39	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	70	75	85	90	90	95	100.00	100.00	
4.1.5	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.1.6	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	86.21	89.66	93.10	96.55	100.00	100.00	100.00	100	
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen		85	90	95	100	100	100	100	
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen			80	85	90	95	100	100	
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	80	80	85	85	90	90	90	90	
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.0	
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.0	
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.0	
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah			4	4	4	4	4	20	
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen			60	70	80	90	100	100	
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen			30	50	70	100	100	100	
4.2.	Keuangan										
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen			90	100	100	100	100	100	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen		1	2	-	-	-	-	2	
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen		85	85	90	95	100	100	100	
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	-	-	100	100	100	100	100	100	
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	-	20	20	20	40	40	50	50	
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen		80	85	85	95	100	100	100	
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen			100	100	100	100	100	100	
4.2.11	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.12	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	-	-	100	100	100	100	100	100	
4.2.13	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	-	20	20	20	40	40	50	50	
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.2.15	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.16	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	1.26	1.56	1.94	2.41	2.99	3.71	4.60	4.60	
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	7.81	8.61	9.49	10.46	11.52	12.70	14.00	14	
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	1.96	2.10	2.26	2.42	2.60	2.79	3.00	3.00	
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	-	-	2	2	2	3	3	12	
4.2.21	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	14	16	18	20	22	26	28	28	
4.3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00	
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	-	3	3	3	5	5	8	8	
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen			80	82	85	87	90	90	
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen			70	75	80	85	90	90	
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen			65	70	75	80	85	85	
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang			100	100	100	100	100	500	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.4.	Penelitian dan pengembangan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun			5	5	8	8	10	10	
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen			40	45	50	55	60	60	
4.5	Penerapan SIDA										
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis			1	1	1	1	1	5	
4.6.	Pengawasan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen			15	20	25	30	35	35	
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun	-	-	1	1	2	2	4	10	
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	-	80	85	85	95	100	100	100	
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen		40	40	40	45	45	50	50	
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen		20	25	25	30	35	35	35	
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen		30	30	40	40	50	60	60	
4.7.	Sekretariat Dewan										Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi	ada/tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)										
4.7.2	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
ASPEK OTONOMI KHUSUS											
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar										
1.1.	Pendidikan										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.1	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen			40	43.51	47.33	51.48	56.00	56	
1.1.2	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen			85	88.52	92.20	96.02	100.00	100	
1.1.3	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen			2.15	1.70	1.35	1.07	0.85	0.85	
1.1.4	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen			1.22	0.82	0.55	0.37	0.25	0.25	
1.1.5	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen			35	40.05	45.83	52.44	60.00	60	
1.1.6	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP			200	200	200	200	200	1000	
1.1.7	Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen			45	48.36	51.96	55.84	60.00	60	
1.1.8	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	-	-	70.00	70.00	80.00	80.00	85.00	85.00	
1.1.9	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	30.00	32.67	35.57	38.73	42.17	45.92	50.00	50.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.10	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
1.1.11	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen		60.00	62.40	64.90	67.49	70.19	73.00	73.00	
1.2.	Kesehatan										
1.2.1	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen			25	28.12	31.62	35.57	40.00	40	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2.2	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen			60	63.44	67.08	70.93	75.00	75	
1.2.3	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen			40	46.01	52.92	60.86	70.00	70	
1.2.4	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	-	-	70.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00	
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.3.1	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen			30	32.24	34.64	37.22	40.00	40	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.4.	Sosial										
1.4.1	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga			250	250	250	250	250	1250	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.5.	Pangan										
1.5.1	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen			20	14.14	10.00	7.07	5.00	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
1.6.	Kepemudaan dan Olah Raga										

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.6.1	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	-	20.00	25.00	25.00	30.00	35.00	50.00	50.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
1.6.2	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	-	20	25	25	30	35	50	50	
1.7.	Kebudayaan										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
1.7.1	Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
1.8.	Kelautan dan Perikanan										Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
1.8.1	Persentase nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	persen	127.36	173.00	234.99	319.20	433.58	588.95	800.00	800	

BAB IX

PENUTUP



Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan

BAB IX PENUTUP

Bab Penutup ini menguraikan kaidah implementasi dan Pedoman Transisi RPJMD Papua Tahun 2019-2023

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJMN. Pelaksanaan Perda tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

9.1. Kaidah Implementasi

Dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Gubernur Papua berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 kepada masyarakat.
4. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
5. Penyusunan RKPD Provinsi Papua pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2019 sampai dengan 2023.
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Papua berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di seluruh Papua.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2023, sebagai tahun terakhir periode RPJMD Papua. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 (pada saat belum ada RPJMD periode berikutnya) berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Papua 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua akan menyusun RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

